

AUDIT

SEBAGAI JASA ASSURANCE DAN NON ASSURANCE



Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFA



YUMA PUSTAKA

YUMA PUSTAKA

Jl. Samudra Pasai No. 47 Kleco, Kadipiro,
Surakarta 57136
E-mail : yuma.pustaka04@gmail.com
Tlp. 0271 - 586 3084/085 647 031 229

ISBN 978-623-6000-44-1



9 786236 000441

AUDIT

**SEBAGAI JASA ASSURANCE
DAN NON ASSURANCE**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Agung Nur Probohudono

AUDIT

SEBAGAI JASA ASSURANCE DAN NON ASSURANCE



Audit sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance

Copyright © Agung Nur Probohudono

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Publish Pertama, April 2022

Penulis : Agung Nur Probohudono
Rancang Sampul : Muhammad Kavit
Tata Letak : Okta
Pracetak : Wahyu Saputra
Moko Dwi Saputro

Penerbit:

YUMA PUSTAKA

Jl. Samudra Pasai No. 47, Kleco, Kadipiro Surakarta 57136

Telp. 0271-5863084/2088181. Fax. 0271-654 394,

Hunting 081 391 423 540

E-mail: kavid.yuma@gmail.com

Facebook: @Yuma Pustaka

viii + 144 hal,

14 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-6000-44-1

Percetakan dan Pemasaran:

Yuma Pressindo

E-mail: kavid.yuma@gmail.com

Telp. 0271-9226606/085869771270

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui ilmu audit dengan mudah.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya modul ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Surakarta, 23 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I AUDIT DAN JASA <i>ASSURANCE</i> LAINNYA.....	1
Jenis-Jenis Audit	2
Standar Audit.....	3
Jenis-Jenis Auditor.....	6
Jasa <i>Assurance</i> Lainnya.....	8
Jasa <i>Non-Assurance</i> Lainnya	11
Review Artikel Terkait.....	13
BAB II THE CPA PROFESSION (PROFESI AKUNTAN PUBLIK).....	29
Dampak & Konsekuensi Perkembangan Akuntansi	29
Kode Etik Profesi Akuntan Publik	31
Kantor Akuntan Publik (<i>CPA'S Firm</i>)	32
Sabarnes - Oxley Act & Profesi Akuntan Publik	39
Review Artikel Terkait.....	41
BAB III LAPORAN AUDIT	59
Definisi Laporan Audit	59
Manfaat Laporan Audit	60

	Syarat Laporan Audit.....	60
	Bentuk dan Bagian Laporan Audit.....	61
	Kategori Laporan Audit.....	63
	Materialitas.....	66
	Dampak <i>E-Commerce</i> Terhadap Pelaporan Audit	69
	Review Artikel Terkait.....	71
BAB IV	ETIKA PROFESIONAL	87
	Definisi Etika	87
	Tujuan Penerapan Etika.....	88
	Jenis Etika	89
	Macam-Macam Etika.....	89
	Sistem Penilaian Etika	90
	Dilema Etika	91
	Etika Profesi	92
	Prinsip Dasar Etika Profesi.....	93
	Kode Etik Profesi	93
	Peraturan Perilaku.....	96
	Review Artikel Terkait.....	101
BAB V	TANGGUNG JAWAB AUDIT & TUJUAN..	113
	Tujuan Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan.....	113
	Review Artikel Terkait.....	125
BAB VI	BUKTI AUDIT	145
	Pengertian Bukti Audit	145

	Tipe Bukti Audit	146
	Kecukupan Bukti Audit.....	148
	Kompetensi Bukti Audit.....	149
	Pendekatan Pengumpulan Audit	152
	Dokumentasi Bukti Audit (Kertas Kerja Audit).....	152
	Keputusan Yang Harus Diambil Auditor Terkaitan Bukti Audit	154
	Prosedur Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor.....	154
	Situasi Audit Yang Mengandung Resiko Besar	156
	Review Artikel Terkait.....	157
BAB VII	PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALISIS	163
	Kertas Kerja Audit dan Program Audit.....	175
	Review Artikel Terkait.....	179
BAB VIII	MATERIALITY AND RISK.....	191
	Materialitas.....	191
	Resiko Audit.....	198
	Review Artikel Terkait.....	208
BAB IX	AUDIT ATAS PENGENDALIAN INTER- NAL DAN RESIKO PENGENDALIAN	223
	Pengendalian Internal.....	223
	Resiko Pengendalian.....	227
	Review Artikel Terkait.....	240

BAB X	AUDIT RISK ALERT	255
	Penyimpanan dan Lembaga Pinjaman	260
	Respon Auditor Untuk Penipuan Risiko	267
	Prosedur Audit Menanggapi Risiko Penipuan.....	268
	Definisi <i>Fraud</i>	268
	Gejala Adanya <i>Fraud</i>	269
	Langkah Mengantisipasi Terjadinya <i>Fraud</i> ..	270
	Kebijakan Umum Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	271
	Review Artikel Terkait.....	273
BAB XI	FRAUD AUDITING	279
	Definisi Fraud	279
	Jenis - Jenis Kecurangan.....	279
	Menilai Resiko Kecurangan.....	284
	Review Artikel Terkait.....	292
BAB XII	TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROSES AUDIT	306
	Menilai Resiko Teknologi Informasi	307
	Pengendalian Internal Khusus Bagi Teknologi Informasi	310
	Dampak Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit.....	313
	Permasalahan Pada Lingkungan Teknologi Informasi Yang Berbeda	318
	Review Artikel Terkait.....	321

BAB XIII	RENCANA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT SECARA KESELURUHAN	332
	Jenis Pengujian.....	332
	Memilih Jenis Pengujian Yang Akan Dilaksanakan.....	345
	Review Artikel Terkait.....	347
DAFTAR PUSTAKA		356

BAB I

AUDIT DAN JASA ASSURANCE LAINNYA

Auditing merupakan salah satu jenis jasa *assurance*. Jasa *assurance* adalah jasa professional yang dilakukan guna meningkatkan kualitas informasi yang sangat dibutuhkan bagi dasar pengambilan keputusan. Auditing merupakan suatu proses sistematis, prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kejadian ekonomi agar mendapatkan kesesuaian dengan criteria yang telah ditetapkan. Hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti para pemegang saham, manjaemen, investor, pemerintah maupun masyarakat luas.

Audit diperlukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang memenuhi 7 karakteristik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. ketujuh karakteristik itu adalah:

1. *Relevant*. Suatu laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi

keputusan yang akan diambil, dengan mengevaluasi setiap kejadian ekonomi yang ada.

2. *Reliable*. Suatu laporan keuangan harus memiliki sifat andal (reliable). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus terbebas dari kesalahan material sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
3. *Complete*. Informasi dalam suatu laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan informatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan intepretasi.
4. *Timely*. Informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip periodesitas, dimana penilaian pelaporan keuangan perusahaan dibatasi waktu tertentu.
5. *Understandable*. Informasi dalam laporan keuangan haruslah mudah dipahami oleh pemakai. Pemakai laporan keuangan tidak hanya orang-orang yang paham akan akuntansi, namun masyarakat secara luas (apabila perusahaan tersebut *go public*).
6. *Verifiable*. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi kebenarannya. Sehingga dalam penyusunannya harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada informasi material yang disembunyikan.
7. *Accessible*. Informasi laporan keuangan haruslah mudah diakses oleh pemakai, kapanpun dan dimanapun informasi tersebut diperlukan.

Jenis-Jenis Audit

1. **Audit laporan keuangan**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
 - Sifat asersi: data-data yang ada pada laporan keuangan

- Kriteria yang ditetapkan: prinsip akuntansi yang berlaku umum
 - Sifat laporan auditor: menyatakan kewajaran atas laporan keuangan
2. **Audit kepatuhan**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
- Sifat asersi: data yang digunakann berkaitan dengan bagaimana kepatuhan suatu entitas terhadap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kriteria yang ditetapkan: kebijakan manajemen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum yang berlaku.
 - Sifat lapoan auditor: kesimpulan atas temuan tentang derajat kepatuhan suatu entitas atau organisasi.
3. **Audit operasional**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
- Sifat asersi: data operasional suatu entitas
 - Kriteria: tujuan entitas yang terdapat dalam fungsi perencanaan manajemen
 - Sifat laporan auditor: rekomendasi utuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis

Standar Audit

1. **Standar umum**, terdiri dari:
 - a. **Keahlian dan Pelatihan Teknis yang Memadai**. Seorang auditor dituntut memiliki keahlian yang tinggi sehingga diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan auditor untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan jasa audit.

- b. **Independensi.** Independensi seorang auditor bersifat mutlak. Seorang auditor tidak boleh memberikan opini berdasarkan hubungan atau relasi dengan pihak tertentu. Seorang auditor dituntut untuk memberikan kesimpulan dan opini sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan, karena opini auditor memberikan dampak yang besar bagi bisnis suatu perusahaan.
 - c. **Penggunaan Kemahiran Professional dengan Cermat dan Seksama.** Seorang auditor dituntut untuk profesional di setiap penugasan audit. Seorang auditor harus cermat dalam mengumpulkan bukti dan dokumen. Seorang auditor juga harus bisa memitigasi risiko dan permasalahan yang terjadi di perusahaan.
2. **Standar Pemeriksaan Lapangan,** terdiri dari:
- a. **Perencanaan dan Supervisi Audit.** Sebelum memulai penugasan, tim auditor terlebih dahulu melakukan perencanaan agar nanti audit dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Seorang tim audit, dipimpin oleh senior auditor yang nantinya memberikan supervisi terhadap pekerjaan keseluruhan tim audit. Supervisi ini juga untuk menilai apakah tim audit sudah melaksanakan *job desk* masing-masing sesuai dengan SOP yang ada.
 - b. **Pemahaman yang Memadai atas Pengendalian Internal.** Seorang auditor harus menngerti dan memahami pengendalian internal perusahaan. Sehingga auditor suatu saat dapat menemukan celah dan kelemahan dari pengendalian internal yang nantinya dapat memicu timbulnya *fraud*.

- c. **Kecukupan atas Bukti Audit yang Kompeten.** Dalam proses pengumpulan bukti, seorang auditor harus bisa mencari dan mendapatkan bukti atau dokumen yang kompeten, artinya bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan opini.
3. **Standar Pelaporan**, terdiri dari:
- a. **Pernyataan Tentang Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi.** Auditor harus mampu menilai apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. **Pernyataan Mengenai Ketidakkonsistenan Penerapan Standar Akuntansi.** Auditor harus bisa menemukan latar belakang perusahaan tidak menerapkan standar akuntansi secara konsisten.
 - c. **Pengungkapan Informatif dalam Laporan Keuangan.** Auditor harus mengungkapkan hasil temuan, rekomendasi dan juga opini secara informatif, mudah dipahami oleh semua pemakai, bahkan jika pemakai bukan berasal dari orang yang memahami akuntansi.
 - d. **Pernyataan Pendapat atas Laporan Keuangan secara Keseluruhan.** Setelah melakukan audit, seorang auditor wajib memberikan pendapat sesuai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Jenis-Jenis Auditor

1. Auditor Independen / Akuntan Publik

Tugas utama dari auditor ini ialah melakukan jasa audit atas laporan keuangan atas perusahaan baik perusahaan yang *go public*, perusahaan besar (yang belum *go public*), perusahaan kecil, dan perusahaan yang tidak berorientasi pada laba.

2. Auditor Internal

Auditor internal biasanya merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut. Auditor ini tetap harus bersifat independen dalam melakukan proses audit. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif. Ruang lingkup auditor internal adalah untuk melakukan audit operasional dan kepatuhan, juga dapat melengkapi audit laporan keuangan.

3. Auditor Pemerintah

Jenis auditor pemerintah yang pertama adalah **Auditor Eksternal Pemerintah**. Audit ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya*". Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BPK harus tetap bersikap independen kepada pemerintah.

Selain auditor eksternal pemerintah, terdapat pula **Auditor Internal Pemerintah**. Auditor ini dikenal sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat jendral dan Badan Pengawasan Daerah. Adapun objek pemeriksaan auditor internal pemerintah, yaitu: (a) *Laporan keuangan dan laporan asset*; (b) *Surat Pertanggungjawaban (SPJ)*; (c) *Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), termasuk tiket, hotel, dan lumpsum (sesuai standar biaya umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah)*; (d) *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*; (e) *Standar operasi anl prosedur unit badan*; dan (f) *Rencana kinerja tahunan (RKT) masing-masing SKPD*.

4. Auditor Pajak

Aparat pelaksana Direktorat Jendral Pajak (DJP) di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (Karipka). Karipka memiliki auditor khusus. Tanggung jawabnya adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. Sebenarnya audit ini termasuk ke dalam jenis audit kepatuhan.

Audit kepatuhan pajak berbeda dengan audit kepatuhan pada umumnya. Karena perpajakan memiliki peraturan perundangan yang sangat kompleks dan terkadang sangat sulit dipahami, sehingga seringkali ditafsirkan dalam berbagai cara. Sehingga diperlukan auditor khusus untuk menangani laporan pajak dari seorang wajib pajak, apakah telah dihitung dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jasa Assurance Lainnya

1. Pengendalian Atas Risiko yang Berhubungan dengan Investasi

Jasa ini mencakup kebijakan yang terkait dengan kontrak kerja sama untuk melakukan perdagangan dengan konsekuensi risiko keuangan tertentu. Contohnya adalah perdagangan di pasar uang dan pasar modal. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi proses dalam praktek investasi suatu untuk entitas dan menentukan efektivitas proses tersebut.

2. *Mystery shopping*

Dengan melakukan pembelian secara diam-diam untuk menilai upaya tenaga penjualan yang berhadapan dengan pelanggan dan menilai ketaatan tenaga penjualan tersebut dengan prosedur yang ada. Para *Mystery shopper* biasanya berasal dari orang dalam perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sumber daya manusia perusahaan salah satunya adalah tenaga penjualan. Para *Mystery shopper* akan bertindak layaknya konsumen biasa, kemudian akan membeli produk. Dari sinilah akan terlihat bagaimana tenaga penjualan tersebut menawarkan dan melayani konsumen sesuai dengan prosedur perusahaan, dan Para *Mystery shopper* akan menilai seberapa jauh prosedur perusahaan diterapkan di lapangan. Kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dipilih untuk mengatasi kendala tersebut.

Jika penerapan prosedur sudah sesuai dengan harapan perusahaan, namun hasil yang dicapai perusahaan masih dirasa kurang, maka dari hasil pengamatan *Mystery shopper* ini, manajemen akan melakukan tindakan perbaikan dan mengambil langkah antisipasi jika dikemudian hari menemui kendala dan hambatan saat berada di lapangan.

3. Penilaian Risiko Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penyimpanan Informasi Digital

Akuntan publik harus mampu menilai risiko keamanan dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan pendukung di dalam dan di luar lokasi. Risiko yang paling besar adalah risiko kehilangan, baik pencurian maupun karena bencana alam. Akuntan publik yang baik harus selalu memiliki perencanaan atas mitigasi risiko terhadap penyimpanan dan proses pendistribusian data. Risiko lainnya adalah dalam pendistribusian data terdapat kecurangan atau *fraud*, seperti manipulasi data, penambahan dan pengurangan data.

4. Penilaian Risiko dan Tindakan Illegal

Akuntan publik harus membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan illegal. Auditor harus membuat mitigasi terhadap risiko *fraud* dan membuat langkah pengendaliannya. Risiko *fraud* akan selalu melekat di setiap kegiatan manajerial perusahaan. Oleh karenanya, auditor harus meyakini bahwa dokumen yang menjadi bukti audit harus bebas dari tindakan manipulasi data.

5. Kepatuhan pada Kebijakan dan Prosedur Perdagangan

Akuntan publik harus memeriksa terkait kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur perdagangan, termasuk kontrak perusahaan dengan supplier. Auditor harus menelaah isi perjanjian antara perusahaan dan supplier, apakah didalamnya tidak ada celah untuk risiko terjadinya *fraud*.

6. Kepatuhan pada Perjanjian Royalti Hiburan

Memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan royalty sesuai dengan perjanjian atau sesuai peraturan yang berlaku.

7. Sertifikasi ISO 9000

Sertifikat ISO 9000 merupakan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu entitas organisasi telah memenuhi standar pengendalian mutu yang tinggi. Sebelum melakukan sertifikasi ISO 9000, maka perusahaan terlebih dahulu harus melalui serangkaian pengujian sesuai standar yang berlaku.

8. Audit Lingkungan

Memastikan perusahaan menaati peraturan terkait kesehatan lingkungan, misalnya perlakuan dan penanganan limbah perusahaan. Perusahaan harus mencantumkan informasi mengenai bagaimana teknik pengolahan limbah yang dilakukan serta alokasi biayanya. Auditor harus memeriksa apakah biaya yang dialokasikan tersebut sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga tidak ada celah untuk penyelewengan biaya tersebut.

9. Jasa Assurance dalam Teknologi Informasi

Jasa ini terbagi kedalam dua jenis, yang pertama ialah *Jasa Web Trust*. Melalui jasa ini maka para pengguna jasa ini telah memenuhi kriteria bisnis yang bersangkutan dan proses informasi yang disampaikan sudah memenuhi asas kejujuran atau integritas. Selanjutnya, ialah *Jasa SysTrust*, jasa ini menyediakan layanan evaluasi dan uji reliabilitas dalam bidang pengamanan data, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat *real time*.

Jasa *Non-Assurance* Lainnya

1. Konsultasi Manajemen Tertentu

Pada jaman seperti sekarang ini, dimana persaingan bisnis dan pasar yang semakin ketat, maka manajemen membutuhkan pendampingan seorang profesional untuk memutuskan langkah pengambilan kebijakan. Akuntan publik bisa memberikan konsultasi manajemen kepada klien, dengan catatan dia tidak boleh menjadi auditor di perusahaan klien tersebut. Akuntan publik yang melakukan jasa konsultasi manajemen dapat membantu manajemen dengan memberikan rekomendasi kepada manajemen sebelum menetapkan kebijakan perusahaan. Akuntan publik juga dapat membantu manajemen melakukan pengukuran kinerja perusahaan, menilai seberapa efektif, efisien dan ekonomisnya perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada. Kebijakan manajemen ini bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Namun, sekali lagi tidak diperbolehkan bagi seorang akuntan public yang telah melakukan jasa konsultasi manajemen lalu mengaudit perusahaan yang sama. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut.

2. Jasa Pajak

Kantor konsultan pajak sudah banyak ditemui dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka dengan perhitungan yang tepat sudah semakin baik. Dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak, pekerjaan akan lebih efisien karena tingkat kesalahan perhitungan dan pelaporan sangat kecil sehingga risiko lebih bayar bisa nol. Perusahaan juga dapat melakukan perencanaan perpajakan. Apabila ada pemeriksaan pajak, perusahaan akan dapat terbantu karena didampingi oleh

seorang konsultan yang memahami prosedur pemeriksaan dan melakukan langkah antisipasi dari kesalahan perhitungan.

Seorang konsultan pajak tetap harus memiliki independensi, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan profesinya. Seorang konsultan pajak juga dituntut untuk mengikuti perkembangan peraturan yang jumlahnya sangat banyak dan sering berganti. Pengetahuan seorang konsultan pajak dituntut untuk selalu *up to date* sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang dan selalu memberikan bimbingan kepada wajib pajak dikarenakan isi aturan pajak yang sering kali multitafsir dan multipretasi sehingga menimbulkan kebingungan dan kurang pemahannya wajib pajak.

3. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan. Pembukuan merupakan bagian dasar yang tidak terpisahkan dari akuntansi. Pembukuan berfungsi untuk menjaga dokumentasi setiap transaksi keuangan entitas untuk membentuk suatu acuan dasar proses akuntansi. Pembukuan sebenarnya adalah proses dari akuntansi yaitu proses pencatatannya saja, sedangkan akuntansi mencakup juga identifikasi dan komunikasi (dalam bentuk laporan keuangan). Di dalam pembukuan, informasi yang dihasilkan tidak mencerminkan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan, sedangkan dengan akuntansi harus bisa menunjukkan keuangan entitas dengan jelas dan tepat.

Seorang akuntan publik bisa memberikan jasa penyusunan laporan keuangan, namun tentu saja kantor akuntan publiknya tidak boleh memberikan jasa audit. Tentu saja tidak ada independensi jika seorang akuntan public melakukan hal tersebut.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : At the Interface of Electronic Frontier and The Law: The International Legal Environment for System Reliability Assurance Service

Penulis : Carl Pacini, William Hillison, Dominic Peltier-Rivest, Dave Sinason, Ratnam Alagiah

Adanya beberapa kasus dan masalah yang berkenaan dengan sistem informasi yang tidak terpercaya, membuat beberapa organisasi akuntan publik yaitu *the American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan *Canadian Institute of Chartered Accountant (CICA)* mengeluarkan *SysTrust* untuk laporan jasa atestasi dan *assurance* yang terpercaya.

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi lingkungan perundang-undangan di lima negara, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris. Penelitian ini juga mengidentifikasi lingkungan yang memiliki risiko yang tinggi untuk bisa mengimplementasikan *SysTrust*.

Karakteristik lingkungan yang tepat untuk implementasi *SysTrust* adalah lingkungan bisnis yang memiliki risiko dari strategi manajemen, evaluasi penilaian dengan klien, klausa surat perjanjian serta bagaimana cara menyelesaikan masalah. *SysTrust* diimplementasikan untuk meminimalkan adanya risiko litigasi. Risiko litigasi adalah risiko yang melekat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang saling berkepentingan.

Latar Belakang

1. Adanya kegagalan sistem yang mengakibatkan menurunnya kualitas informasi yang dihasilkan
2. Beberapa perusahaan besar terkena imbas dari kegagalan sistem tersebut.
3. Seiring dengan berkembangnya sistem teknologi informasi, maka toleransi kesalahan akan semakin menurun.
4. Pengguna menginginkan keakuratan dan konsistensi dalam sistem informasi
5. Sistem yang tidak reliable menyebabkan dampak yang berkesinambungan baik untuk perusahaan itu sendiri, konsumennya, supplier, masyarakat, dan relasi bisnis perusahaan seperti pemerintah.
6. AICPA dan CICA kemudian memprakarsai *SysTrust* untuk mengakomodir isu-isu terkait pelaporan jasa atestasi maupun jasa assurance.
7. Pengguna potensial laporan hasil *SysTrust* termasuk perusahaan itu sendiri, masyarakat, kreditur, konsumen, serta pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan perusahaan.
8. Para akuntan publik meyakini bahwa dengan adanya *SysTrust* akan mampu menangani risiko litigasi dalam lingkungan tersebut.
9. selama lebih dari 25 tahun, para akuntan publik menghadapi berbagai krisis yang berkenaan dengan risiko litigasi. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di lima negara (Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris) yang memiliki beberapa masalah serikat terkait dengan sistem perundangan yang berlaku dengan peraturan praktek akuntansi.

-
10. Mengevaluasi keberadaan hukum internasional yang diterapkan oleh para akuntan publik.

Keberadaan *SysTrust*

1. Sistem informasi yang ada pada perusahaan antara lain Electronic Data Interchange (EDI), Extranet dan Internet.
 - a. *Electronic Data Interchange (EDI)*
 - Memungkinkan pertukaran data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan computer.
 - Memiliki standardisasi pengkodean untuk transaksi perdagangan
 - Tidak memerlukan *hardcopy*
 - b. Extranet
 - Jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasional secara aman kepada supplier, vendor, relasi bisnis dan pelanggan.
 - c. Internet
 - Koneksi atau jaringan dari seluruh komputer di seluruh dunia yang memungkinkan akses informasi secara terbuka.
 - Memungkinkan untuk berkomunikasi menggunakan email dan menyediakan informasi publik yang dapat diakses melalui web maupun situs berbayar.
2. *SysTrust* mampu mendukung penyelesaian masalah yang timbul di dalam pelaporan bisnis terkait dengan pelaporan informasi bisnis yang menggunakan jaringan komputer. *SysTrust* mampu mengevaluasi asersi manajemen selama periode waktu tertentu.

3. Sebuah sistem dikatakan reliable apabila:
 - a. *Availability* (tersedia), sistem tersedia untuk dioperasikan dan digunakan di waktu yang diinginkan.
 - b. *Security* (aman), sistem telah terlindungi dari akses yang illegal.
 - c. *Integrity* (integritas), pemrosesan sistem telah lengkap, akurat, tepat waktu dan didukung dengan persetujuan transaksi dari entitas dan peraturan pendistribusian.
 - d. *Maintainability* (dapat dipelihara), sistem ini dapat diperbarui sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.
4. Kriteria sistem informasi yang dapat digunakan:
 - a. Komunikasi. Entitas menggambarkan dan mengkomunikasikan kinerja sistem secara efektif, sesuai aturan, memenuhi standard untuk ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem.
 - b. Prosedur. Entitas menggunakan prosedur, karyawan, data perangkat lunak dan infrastruktur untuk mencapai sistem yang memenuhi standard untuk ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem.
 - c. Monitoring / Pengawasan. Entitas memonitoring sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem.

Gambaran sistem hukum

- Adanya perbedaan hukum di empat negara, yaitu : (a) Pihak ketiga wajib menyediakan jaminan; (b) Pengadilan nasional tertinggi memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk membuat keputusan.

Keberadaan Hukum dan *SysTrust*

1. Belum ada kasus hukum yang dilaporkan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kewajiban professional akuntan kepada pihak ketiga dalam jasa assurance maupun kelalaian dalam sistem informasi.
2. Difokuskan pada lingkungan Amerika Serikat dan Kanada, karena:
 - a. Layanan *SysTrust* dikembangkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dan *Canadian Institute of Chartered Accountant* (CICA).
 - b. Dua pertiga pengguna internet ada di Amerika utara.
 - c. Amerika Serikat dan Kanada adalah mitra dagang terbesar
3. **Amerika Serikat**, tidak ada laporan terkait kasus hukum kelalaian penggunaan *SysTrust*.
 - a. *Privity rule*: memiliki ikatan kontraktual (hanya para pihak yang terikat kontrak yang berhak meminta pemenuhan kewajiban)
 - b. *Near - privity standard*: pendekatan kontraktual dengan pihak ketiga.
 - c. *The restatement standard*: berdasarkan standard ini, auditor mempersiapkan informasi keuangan tidak hanya untuk satu klien, tetapi untuk kelompok lain dimana rekan bisnis klien tersebut membutuhkan informasi tersebut.
 - d. *Reasonable foreseeability rule*: merupakan perluasan ruang lingkup akuntan, dimana seorang akuntan mampu melakukan forecast atau prediksi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.

4. **Kanada**, terdapat kasus yang dilaporkan berkaitan dengan kelalaian dalam penggunaan *SysTrust*. Berdasarkan kasus tersebut, maka penyedia jasa *SysTrust* haruslah memperkirakan apakah pihak ketiga akan bergantung pada laporan *SysTrust*.
5. **Australia**, terdapat kasus kelalaian seorang akuntan dalam menyediakan jasa assurance. Kesalahannya mungkin terletak pada pengoperasian EDI atau ekstranet yang tidak semestinya, namun demikian baik EDI maupun ekstranet hanyalah salah satu pendukung berjalanya sistem *SysTrust*.
6. **Selandia Baru**, terdapat kasus yang dilaporkan kepada pengadilan negeri setempat yaitu kasus seorang akuntan dengan pemegang saham. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan tersebut terdapat kesalahan di dalamnya sehingga keputusan yang diambil pemegang saham menjadi salah.
7. **Inggris**, terdapat kasus kelalaian seorang akuntan di dalam penyusunan laporan audit. Laporan yang dihasilkan tersebut ternyata tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dikarenakan informasi di dalamnya mengandung kesalahan penyajian maupun penyusunan.
8. *SysTrust* dapat berjalan jika didukung dengan adanya penggunaan jaringan komputer yang sudah semakin meluas. Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan risiko litigasi yaitu: Mengidentifikasi risiko; Mengevaluasi risiko; dan Mengukur kadar risiko
9. Langkah-langkah penyusunan perikatan *SysTrust*:
 - a. Mengevaluasi integritas manajemen

-
- b. Mengidentifikasi kejadian khusus dan risiko yang tidak biasa
 - c. Menilai kompetensi perusahaan dalam pengaplikasian *SysTrust*
 - d. Mengevaluasi independensi
 - e. Mengevaluasi kemampuan akuntan
 - f. Mempersiapkan surat perikatan
10. Isi perikatan *SysTrust*:
- a. Tujuan perikatan *SysTrust* adalah agar bisa memberikan pendapat sesuai dengan informasi yang telah terdapat di dalam sistem.
 - b. Pertanggung jawaban manajemen untuk membangun dan mempertahankan kepatuhan terhadap standard *SysTrust* yaitu ketersediaan, pemeliharaan, integritas dan keamanan.
 - c. Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan segala informasi yang dibutuhkan.
 - d. Di akhir perikatan, manajemen akan menyediakan provider *SysTrust* dengan surat yang menegaskan ada pernyataan tertentu yang dibuat oleh manajemen.
 - e. Adanya klausul yang membahas apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama masih ada di dalam perikatan *SysTrust*.

Kesimpulan

1. Para akuntan publik di negara-negara maju sudah mengembangkan sebuah inovasi yaitu *SysTrust*.
2. *SysTrust* dibuat untuk menciptakan kenyamanan manajemen, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis dengan sistem yang mendukung bisnis tersebut.

3. Para akuntan harus lebih memahami risiko litigasi sehingga kedepannya para akuntan tidak lagi terlibat kasus hukum karena kelalaian dalam penerapan peraturan dan kurang memahami bisnis klien.

2. Artikel Kedua

Judul : It's all about audit quality: perspective on strategic-system auditing

Penulis : Mark E. Peecher, Rachel Schwartz, Ira Solomon

Latar Belakang

1. SSA ini berhubungan dengan kualitas audit. Dengan menerapkan SSA maka diharapkan laporan audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi.
2. Perubahan lingkungan bisnis disebabkan oleh:
 - a. Adanya inovasi
 - b. Adanya arus informasi yang begitu cepat
 - c. Tuntutan terhadap transportasi yang semakin baik karena jumlah usia produktif yang semakin banyak.
 - d. Adanya komunikasi yang semakin mengglobal
 - e. Adanya kemajuan teknologi
 - f. Era globalisasi
3. Laporan keuangan tetap mengandung risiko, oleh karenanya diterapkan SSA. Perubahan dalam lingkungan audit ini mempengaruhi konsepsi audit. Dalam beberapa kasus, di dalam laporan keuangan masih terdapat informasi yang tidak diungkapkan, hal ini merupakan kecurangan pihak manajemen. Opini auditor menjadi sangat penting untuk menilai

kewajaran laporan keuangan. SSA dapat mengakomodir keperluan di dalam lingkungan audit.

4. Kompleksitas lingkungan audit ini disebabkan oleh:
 - a. Entitas yang sedang di audit menerapkan bisnis baru.
 - b. Kekhawatiran tentang adanya salah saji dalam penyusunan laporan keuangan
 - c. Kurangnya pengendalian terhadap risiko audit
 - d. Audit Risk Model (ARM) tetap dianggap sebagai faktor utama dalam perencanaan audit dan mengontrol kualitas audit
5. Masing-masing konteks bisnis memiliki risiko bisnis tersendiri. Risiko yang paling besar dan sering terjadi adalah adanya peran manajemen untuk “mempermainkan” laporan keuangan, misalnya dengan melakukan manajemen laba. Walaupun di dalam laporan keuangan terdapat beberapa hal yang kompleks, namun auditor harus tetap memberikan pendapat atau opini dengan menguji kebenaran atas laporan keuangan.
6. Untuk menghadapi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan laporan keuangan, maka pemerintah mulai membuat regulasi untuk audit. Salah satunya adalah auditor harus mempunyai keyakinan yang tinggi tentang adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu menilai risiko salah saji material yang disebabkan karena adanya *fraud*.
7. Kondisi yang menyebabkan kegagalan penilaian auditor:
 - a. Kegagalan auditor dalam memahami bisnis klien

- b. Kegagalan untuk menegaskan kembali representasi manajemen
 - c. Kurangnya sifat skeptis auditor.
8. Risiko audit terdiri dari:

$$TAR \text{ (Total Audit Risk)} = IR \times CR \times DR$$

Inherent Risk : risiko yang melekat dalam setiap proses audit

Control Risk : risiko yang tidak dapat di deteksi karena lemahnya pengendalian

Detection Risk : risiko yang tidak dapat dihindari karena lemahnya program audit

9. Gambaran umum SSA

SSA (*strategic-system auditing*) digunakan untuk menghasilkan kualitas laporan audit yang baik. Dengan menerapkan SSA maka audit diharapkan mampu memperoleh pemahaman mendalam tentang bisnis, lingkungan dan risiko bisnis yang melibatkan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar auditor memahami tujuan organisasi, strategi dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Auditor pun dapat menilai kelengkapan analisa yang dilakukan oleh manajemen.

10. Alur SSA:

- a. Auditor harus memahami *Entity Business State (EBS)* atau lingkungan bisnis perusahaan.
- b. Proses dan penerapan program audit dimulai pada fase *Management Information Intermediaries (MII)*, yang isinya adalah proses pengendalian terhadap laporan keuangan dan menerapkan kerangka penyusunan laporan keuangan.

-
- c. Tahap selanjutnya adalah *Management Bussiness Representation (MBS)* yakni menghasilkan laporan keuangan.
11. Penilaian risiko
- a. Auditor harus memiliki sudut pandang dari berbagai sisi dan objektif dalam menilai risiko audit dan mencari sumber risiko audit tersebut.
 - b. Auditor harus menetapkan penilaian terhadap risiko tersebut
 - c. Risiko bisnis juga bisa bersifat dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi sehingga risiko audit baru selalu muncul.
12. Dengan SSA maka auditor dapat mengembangkan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai sumber.
13. Ilustrasi SSA:
- a. Memperluas dan mempertimbangkan ruang lingkup *Entity Bussiness State (EBS)*
 - b. Menetapkan pengendalian
 - c. Menetapkan risiko
 - d. Menentukan prosedur audit masing-masing akun
 - e. Auditor melakukan wawancara untuk menguatkan dugaan-dugaan sementara.
 - f. Mengembangkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, melakukan riset pasar.
 - g. Bukti yang dikumpulkan dari pemahaman EBS membantu meminimalkan atau mendeteksi terjadinya *fraud*.
 - h. Auditor juga harus mengamati kinerja non keuangan seperti kinerja karyawan dan kepatuhan terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)*.

14. Dengan SSA maka kredibilitas auditor lebih baik karena auditor memiliki tingkat keyakinan dan pengendalian risiko yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil empiris

1. Bukti yang diperoleh berdasarkan EBS mampu meminimalkan timbulnya *fraud*.
2. Akan terjadi kesetaraan jika auditor dapat menghasilkan kualitas laporan yang baik. Jika adanya pemahaman EBS, maka akan terjadi triangulasi dan penilaian risiko dalam SSA.
3. Namun, terdapat beberapa kontroversi, yaitu:
 - a. SSA dikembangkan untuk meningkatkan reputasi auditor
 - b. Namun beberapa kontroversi terjadi, motivasi auditor seharusnya tidak semata-mata mengejar reputasi, namun tetap meningkatkan kemampuan profesional dengan menghasilkan laporan audit yang berkualitas
 - c. Jika pengujian substansi SSA terlalu sedikit, maka hal itu tidak dipermasalahkan selama sudah mengandung kecukupan dan kompetensi bukti audit yang dibutuhkan.
 - d. Pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh manajemen lebih mudah, namun *fraud* yang terkandung di laporan keuangan (kesalahan yang sengaja) susah dideteksi.
 - e. Biaya untuk SSA mempengaruhi fee audit. Namun jika entitas menginginkan kualitas laporan yang baik, maka hal itu tidak lagi menjadi persoalan.

Kesimpulan:

1. Tuntutan akan kualitas laporan audit meningkat dikarenakan kesadaran masyarakat akan dampak laporan keuangan pada

keberlangsungan bisnis dan kehidupan perekonomian secara luas.

2. SSA masih memerlukan pengembangan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.
3. Bukti audit yang berdasarkan EBS lebih baik sehingga dapat meminimalkan risiko salah saji material.
4. Kinerja auditor menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga kesalahan auditor dalam memberikan opini dapat diminimalkan.

3. Artikel Ketiga

Judul : Balance Between Auditing and Marketing: An Explorative Study

Penulis : Pernilla Broberg, Timurs Umans, Carl Gerlofstig

Latar Belakang

1. Perubahan lingkungan bisnis membuat munculnya penelitian tentang audit sebagai layanan profesional dengan pemasaran. Hubungan keduanya adalah adanya peningkatan persaingan para akuntan publik yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kantor akuntan publik, sehingga para akuntan publik akhirnya menyadari akan perlunya pemasaran yang baik.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap auditor terhadap pemasaran dan untuk meneliti lingkup pemasaran mereka sebenarnya. Serta meneliti keseimbangan antara tanggung jawab audit dan kegiatan pemasaran. Sehingga implikasi yang diperoleh adalah kita akan memperoleh

pengetahuan praktis tentang bagaimana mengikuti perubahan lingkungan melalui kegiatan pemasaran.

3. Kegiatan pemasaran untuk mempertahankan klien yang sudah ada dan untuk mendapatkan klien baru. Auditor di masa sekarang tidak hanya mempromosikan diri mereka sendiri dan kantor akuntan publiknya, tetapi juga mempromosikan kepada calon klien membutuhkan audit.

Review Literatur

1. Auditor berperan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi
2. Sejumlah penelitian telah menyelidiki bagaimana hubungan pelanggan, akuisisi pelanggan dan memelihara hubungan dengan pelanggan merupakan bagian dari fungsi audit.
3. Auditor harus bisa mengembangkan tanggung jawab audit yang melekat dan melakukan tugas pemasaran.
4. Hubungan baik dalam professional dengan klien sangat penting untuk menanggapi keunggulan kompetitif.

Metodelogi Penelitian

1. Diskusi tentang proses seleksi sampel dan deskriptif statistik.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anggota auditor yang berwenang dengan total email 3.556.
4. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan kuesioner.
5. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan eksploratif (wawancara) dan kuantitatif (hasil analisa statistik)

Variabel Penelitian

1. Variable independent dalam penelitian ini ialah sikap auditor terhadap pemasaran.
2. Variable dependen dalam penelitian ini ialah Kegiatan audit dan Kegiatan pemasaran
3. Variable lainnya ialah Sikap responden terhadap audit dan Pentingnya kegiatan audit terhadap keberlangsungan entitas bisnis.

Hasil Empiris

1. Hasil uji regresi pada dua variable menunjukkan adanya hubungan antara sikap auditor terhadap pemasaran yang berpengaruh terhadap keseimbangan antara kegiatan audit dengan kegiatan pemasaran.
2. Peneliti mengeksplorasi bagaimana persepsi auditor tentang keseimbangan antara kegiatan audit dengan pemasaran.
3. Pengujian terhadap semua variable yaitu latar belakang, usia dan jenis kelamin terhadap variable dependen dan independen ternyata menunjukkan adanya korelasi.
4. Auditor ternyata lebih banyak berkomunikasi dengan klien melalui email, dan ini juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk pemasaran.
5. Pemasaran kegiatan audit bisa dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan seminar
 - b. mendatangi klien yang prospektif
 - c. mendatangi seminar
 - d. mempelajari teknik marketing
 - e. mengadakan kegiatan bersama KAP
 - f. menjelaskan pentingnya audit
 - g. menunjukkan pentingnya pengendalian internal terhadap bisnis klien

- h. mensosialisasikan peraturan terbaru
- i. informasi mengenai audit akuntansi
- j. pendidikan di dalam audit

Pembahasan

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana auditor menyeimbangkan kegiatan audit dengan kegiatan pemasaran? Untuk menjawabnya maka, penelitian ini menguji adakah korelasi antara keduanya.
 - a. *Attitude*. Dalam penelitian ini menemukan indikasi bahwa pada masa sekarang auditor harus memikirkan mengenai kegiatan pemasaran yang baik untuk kantor akuntan publiknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mempelajari kegiatan pemasaran memiliki nilai yang tinggi berarti auditor akan terus mengembangkan kemampuan pemasaran untuk unggul dalam persaingan bisnisnya.
 - b. *Importance*. Kegiatan pemasaran memiliki skor yang tinggi untuk masing-masing aktivitas. Hal ini berarti auditor mulai menyeimbangkan antara kegiatan audit mereka dan melakukan kegiatan pemasaran. Persaingan yang semakin ketat, memaksa para auditor untuk memiliki inovasi yang baik dan menciptakan metode pemasaran yang efektif.

Kesimpulan

1. Adanya hubungan antara kegiatan audit dengan pemasaran mengingat ketatnya persaingan antar Kantor Akuntan Publik.
2. Penelitian di masa mendatang harus bisa memunculkan isu mengenai perkembangan kegiatan pemasaran kantor akuntan publik dengan profesi auditor itu sendiri.

BAB II

THE CPA PROFESSION

(PROFESI AKUNTAN PUBLIK)

Profesi akuntan publik menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan saat ini. Kebutuhan akan akuntan publik meningkat dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Terlebih lagi bagi para kreditur ataupun investor. Pendapat yang dikeluarkan oleh akuntan publik menjadi sangat krusial dan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa. Ada beberapa jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, yaitu jasa atestasi, jasa assurance dan jasa non assurance. Dalam memberikan jasa atestasi, seorang auditor hanya diperbolehkan untuk melakukan audit selama tiga tahun berturut-turut untuk satu klien.

Dampak & Konsekuensi Perkembangan Akuntansi

1. Meluasnya peran akuntan sehingga tidak hanya meliputi penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.
2. Kebutuhan akan tenaga professional dan besarnya tanggung jawab para CPA untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalamnya yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kebutuhan akan standar teknis sesuai dengan berkembangnya sistem informasi dan kompleksitas kebutuhan akan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria.

Untuk menjadi seorang akuntan publik, seorang akuntan harus memperoleh izin dari menteri keuangan melalui serangkaian ujian dan sertifikasi. Seorang akuntan publik haruslah menjadi anggota dari IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan memiliki gelar CPA (*Certified Public Accountant*).

Seorang Akuntan Publik Tidak Boleh Terlepas dari Lima Hal Berikut ini:

1. Pendidikan berkelanjutan serta melakukan pembelajaran dan pelatihan selama ia menyandang gelar CPA.

Seorang akuntan publik, harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Regulasi yang selalu berubah, permintaan pasar akan keandalan laporan keuangan menuntut seorang CPA untuk selalu dinamis dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.

2. Kompetensi

Seorang CPA harus memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Mengingat hasil kerja profesionalnya mampu membawa pengaruh dan dampak terhadap keberlangsungan bisnis atau entitas yang menjadi kliennya. Kompetensi ini harus selalu ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan dan permintaan pasar serta kebutuhan bisnis klien, misalnya untuk memperoleh kreditur bagi perusahaan klien.

3. Integritas

Integritas adalah hal utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang CPA. Integritas juga salah satu hal pokok di dalam kode etik akuntan publik. Seorang CPA haruslah memegang teguh integritas di seluruh pekerjaan profesionalnya.

4. Selaras dengan Isu-Isu Bisnis yang Luas

Seorang akuntan publik haruslah selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, salah satunya dengan cara mengikuti perkembangan isu dan perkembangan ekonomi serta regulasi yang berlaku. Seorang CPA tidak boleh menutup diri dengan segala perkembangan dan kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis klien.

5. Objektivitas

Selain integritas, seorang CPA harus selalu mengedepankan objektivitas. Objektivitas ini diperlukan disaat CPA mengevaluasi bukti audit maupun temuannya serta dalam memberikan opininya.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Merupakan prinsip dasar serta aturan profesi yang berhubungan dan mengikat mengenai etika yang harus dijalani oleh setiap individu di dalam kantor akuntan publik. Prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan publik:

1. **Prinsip Integritas.** Setiap akuntan publik harus mengedepankan kejujuran dan memiliki ketegasan dalam menjalankan hubungan profesional. Integritas bisa dijadikan tolak ukur dan menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik.

2. **Prinsip Objektivitas.** Setiap akuntan publik tidak diperbolehkan bersifat subjektif serta memiliki benturan kepentingan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. **Prinsip Kompetensi.** Seorang akuntan publik dituntut memiliki sikap cermat dan kehati-hatian. Seorang akuntan publik juga selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan dirinya sebagai seorang professional, sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan standar an kode etik profesinya.
4. **Prinsip Kerahasiaan.** Setiap akuntan publik wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari kliennya sebagai hasil jasa profesionalnya. Setiap akuntan publik tidak boleh mengungkapkan isi dari informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kliennya, terkecuali ada kewajiban lain seperti yang diatur oleh ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
5. **Prinsip Perilaku Profesional.** Setiap akuntan publik wajib mengikuti segala hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang mampu menjatuhkan kredibilitas profesi akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik (*CPA's Firm*)

Merupakan suatu badan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bentuk badan usaha kantor akuntan public dapat berupa:

1. **Perusahaan Perseorangan (*proprietorship*),** merupakan kantor akuntan publik dengan pemilik tunggal.

2. **Persekutuan Umum** (*general partnership*), merupakan kantor akuntan publik yang dimiliki oleh beberapa orang.
3. **Korporasi Umum**. Struktur kepemilikan kantor akuntan publik ini berupa kepemilikan saham oleh para investor. Namun, di banyak negara bentuk kantor akuntan publik ini sudah dilarang.
4. **Korporasi Professional**. Kantor akuntan publik ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Sama halnya dengan korporasi umum, korporasi profesional banyak dilarang di negara-negara barat karena bentuk perlindungan hukumnya.
5. **Limited Liability Company**, kantor akuntan publik ini merupakan gabungan dari korporasi umum dan persekutuan umum.
6. **Limited Liability Partnership**, kantor akuntan publik ini dimiliki oleh satu atau lebih *partner*.

Akan tetapi di Negara Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) ini lazimnya hanya berbentuk menjadi 2 macam, yaitu:

1. **Perseorangan**, kantor akuntan publik ini didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik saja.
2. **Persekutuan perdata atau firma**, kantor akuntan publik ini hanya dapat didirikan oleh minimal dua akuntan publik atau 75% dari anggota firma adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu dalam kantor akuntan publik disebut dengan *partner*.

Persyaratan Pendirian Kantor Akuntan Publik (KAP)

Untuk mendirikan sebuah Kantor Akuntan Publik, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikasi akuntan publik.

2. Menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia
3. Memiliki paling sedikit dua auditor tetap yang memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi minimal DIII dan paling sedikit satu orang berijazah sarjana.
4. Memiliki NPWP pribadi untuk bentuk badan perseorangan dan NPWP badan untuk yang berbentuk firma,
5. Memiliki rancangan standar pengendalian mutu yang sesuai dengan SPAP
6. Pemimpin KAP harus berdomisili sama dengan KAP.
7. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor.
8. Membuat surat pernyataan yang berisi identitas dan alamat lengkap kantor akuntan publik beserta alasan pendiriannya.
9. Melengkapi persyaratan pengajuan pendirian kantor akuntan publik.

Namun jika KAP berbentuk badan usaha persekutuan atau firma, selain syarat di atas, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki perjanjian untuk mengadakan kerja sama yang disahkan di hadapan notaries.
2. Memiliki sertifikat dan surat izin akuntan publik bagi pemimpin *partner* dan *partner*.
3. Memiliki tanda keanggotaan Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang masih berlaku bagi pemimpin *partner* dan *partner*.
4. Memiliki surat persetujuan dari seluruh *partner* KAP berkenaan dengan penunjukkan pemimpin *partner*.
5. Memiliki bukti domisili pemimpin *partner* dan *partner*.

Hierarki/Susunan Organisasi dalam Kantor Akuntan Publik

1. **Partner.** Merupakan seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam perikatan audit, pihak yang bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing dan klien. *Partner* lah yang menandatangani *management letter* dan bertanggung jawab untuk segala proses pemberian fee audit dari klien. Seorang *partner* biasanya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
2. **Manager.** Bertindak sebagai pengawas dalam proses audit. *Manager* bertugas untuk membantu audit senior dalam membuat rencana audit serta waktu pelaksanaan audit, melakukan *review* terhadap kertas kerja, *management letter* serta laporan proses audit. *Manager* tidak berada di kantor klien, melainkan tetap berada di KAP dan dalam bentuk pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior. Agar dapat menjadi seorang *manager*, maka seorang auditor membutuhkan pengalaman di bidang audit selama 5 sampai dengan 10 tahun.
3. **Auditor Senior.** Merupakan seorang auditor yang bertugas untuk melaksanakan penugasan audit, bertanggung jawab dalam mengupayakan fee audit dan penetapan waktu audit sesuai rencana audit yang telah dibuat oleh *manager*. Auditor senior akan berada di kantor klien selama proses audit berlangsung. Auditor senior paling tidak telah memiliki pengalaman selama 2 sampai 5 tahun.
4. **Auditor Junior/Asisten Staf.** Auditor junior melakukan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk melakukan dokumentasi pekerjaan audit yang telah selesai dilakukan. Auditor junior biasanya adalah seorang auditor yang baru menyelesaikan pendidikan formalnya dan

mebutuhkan banyak pengalaman dan keterampilan di lapangan. Auditor junior atau asisten staf ini memiliki pengalaman tidak sampai 2 tahun.

Bidang Jasa Kantor Akuntan Publik

1. Jasa Audit Laporan Keuangan

KAP akan melakukan audit atas laporan keuangan klien untuk memberikan opini mengenai kewajaran atas suatu laporan keuangan dan menilainya apakah telah sesuai dengan kriteria yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Jasa Audit Khusus

Audit khusus yang diberikan oleh kantor akuntan publik misalnya saja audit kepatuhan dan audit operasional. Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai apakah entitas atau perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit kepatuhan adalah berupa kesimpulan. Sedangkan audit operasional dilakukan untuk melihat efektifitas, efisiensi dan tingkat ekonomis suatu entitas. Hasil dari audit operasional adalah rekomendasi auditor.

3. Jasa Atestasi.

KAP memberikan jasa profesional berupa jasa atestasi yaitu dengan membuat suatu laporan yang berisi kesimpulan tentang keandalan suatu asersi tertulis, melalui pemeriksaan dan prosedur yang telah disepakati bersama.

4. Jasa Review Laporan Keuangan.

Jasa review laporan keuangan diberikan oleh KAP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan tidak adanya salah saji material di dalam laporan keuangan dan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Review laporan

keuangan dilakukan melalui prosedur pengajuan pertanyaan dan analisa professional sesuai dengan standar jasa akuntansi dan SPAP.

Perbedaan auditing dengan review laporan keuangan adalah audit akan menghasilkan suatu jaminan yang tinggi atas keandalan laporan keuangan dan membutuhkan bukti, dokumen pendukung serta fee yang tidak sedikit. Sedangkan review laporan keuangan menghasilkan jaminan keandalan laporan keuangan yang cukup moderat, tidak membutuhkan banyak bukti dan dokumen pendukung, serta fee yang jauh dibawah fee audit.

5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Kompilasi laporan keuangan dilakukan berdasarkan catatan dan informasi keuangan yang diberikan oleh manajemen. KAP tidak memberikan opini, mengenai tingkat kewajaran di dalam kompilasi laporan keuangan. Tanggung jawab laporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen. Kompilasi laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar jasa akuntansi dan review sesuai SPAP.

6. Jasa Konsultasi

KAP dapat memberikan jasa konsultasi sesuai kompetensi yang dimiliki akuntan publiknya. Jasa konsultasi yang diberikan diantaranya adalah jasa konsultasi manajemen, perencanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, penyelenggaraan rekrutmen pegawai, pelatihan dan pendidikan pegawai serta konsultasi yang berkenaan dengan kebijakan manajemen lainnya. Dalam pemberian jasa ini, KAP harus tetap sesuai dengan SPAP.

7. Jasa Perpajakan

KAP bisa memberikan jasa perpajakan, jika ada akuntan publik di dalamnya yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Jasa professional yang bisa diberikan antara lain review pajak, perhitungan pajak dan pelaporan pajak.

Hak dan Kewajiban bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

1. **Hak Akuntan Publik**, dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik memiliki beberapa hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh *fee*
 - b. Memperoleh perlindungan hukum selama dalam memberikan jasa profesionalnya yang sesuai dengan standard SPAP
 - c. Memperoleh berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan selama tidak melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku.
2. **Kewajiban Akuntan Publik**, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan publik, maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bertanggung jawab atas semua jasa professional yang diberikan
 - b. Saat memberikan jasa profesionalnya wajib melalui KAP tempatnya bernaung.
 - c. Wajib mematuhi standar profesi akuntan publik, kode etik dan peraturan hukum sesuai jasa yang diberikan serta membuat kertas kerja dan mempertanggungjawabkannya.
 - d. Wajib menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia

-
- e. Berdomisili di Indonesia dan bagi pemimpin *partner* KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP
 - f. Mendirikan atau menjadi *partner* KAP sejak 180 hari dari pengajuan izin.
 - g. Seorang akuntan publik harus membuat laporan secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak resmi menjadi *partner* pada sebuah KAP atau merangkap jabatan selama tidak dilarang di dalam undang-undang.
 - h. Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional.
 - i. Menjaga perilaku baik, selalu bertanggung jawab dan memiliki integritas serta independensi.
3. **Kewajiban Kantor Akuntan Publik**, dalam menjalankan operasionalnya KAP harus melakukan berbagai kewajibannya sebagai berikut:
- a. Mempunyai minimal 2 orang tenaga kerja professional atau auditor
 - b. Memiliki kantor sebagai tempat untuk menjalankan usahanya.
 - c. Memiliki standar pengendalian mutu dan mengimplementasikannya.
 - d. Memasang papan identitas kantor di bagian depan.

Sarbanes - Oxley Act & Profesi Akuntan Publik

Sarbanes-oxley Act (Sarbox) muncul pada tahun 2002 karena dilatar belakangi banyaknya skandal akuntansi besar di dunia, salah satunya jatuhnya KAP Big5 Arthur Enderson. Karena dampak *fraud* yang dihasilkan akuntan ternyata memiliki peranan yang sangat besar, seperti para pemegang saham, pasar

dan masyarakat luas. Sarbox membawa dampak positif bagi profesi akuntan publik, di antaranya:

1. Adanya syarat sertifikasi CPA (*certified public accountant*) bagi para akuntan publik yang akan memberikan jasa profesionalnya.
2. Adanya syarat dan peraturan yang mengatur pendirian KAP.
3. Adanya peraturan perdagangan saham, baik *dealer* (penyalur) dan *broker* (perantara) dengan pemilik modal atau investor.
4. Profesi investor dan pengacara yang terlibat dalam jasa keuangan.

Sarbox mengatur mengenai akuntansi, pengungkapan informasi, kode etik bagi seluruh jasa profesional di bidang akuntansi dan pembentukan komite audit independen. Sarbox juga memberikan perlindungan hukum bagi karyawan atau siapa saja yang menemukan dan melaporkan adanya indikasi *fraud* dalam pelaporan keuangan.

Secara umum Sarbox mengatur segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, seperti kode etik, jasa yang boleh dan tidak boleh diberikan, standard dan peraturan yang mengatur para akuntan publik, penilaian pengendalian internal serta syarat dan standar laporan dan informasi keuangan yang dihasilkan.

Sarbox membentuk sebuah badan yang bernama PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) yang memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi dan memeriksa serta memberikan tindakan disiplin pada kantor-kantor akuntan publik.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Personality Preferences of Accounting and Non-Accounting Graduates Seeking to Enter the Accounting Profession*

Penulis : Paul Andon, Kar Ming Chong, Peter Roebuck

Latar Belakang

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan personal antara lulusan akuntansi dan non akuntansi saat memasuki dunia profesi akuntansi.
2. Di Australia mulai diperdebatkan mengenai terbukanya kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi.
3. Tujuan dibukanya kesempatan bagi lulusan non akuntansi dengan latar belakang, pengalaman dan keterampilan yang berbeda-beda diharapkan mampu mengubah stereotip profesi akuntansi yang hanya bisa dimasuki oleh lulusan akuntansi serta untuk memenuhi tuntutan kompleksitas dan keberagaman bisnis dan industri sehingga profesi akuntansi dituntut untuk mampu meningkatkan jasa yang diberikan sesuai dengan bisnis yang semakin beragam dan berkembang.
4. Para lulusan non akuntansi mampu memiliki kemampuan di bidang akuntansi dengan pelatihan yang memadai.
5. Dengan pembekalan yang cukup bagi para lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi, maka diharapkan para lulusan ini mampu beradaptasi dan menambah keberagaman sesuai latar belakang ilmu yang dimiliki.

Stereotypical Imagery of Accountants and Links to Demands for More Non Accounting Graduates

1. Adanya kontroversi karena dibukanya kesempatan bagi para lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi, maka lulusan non akuntansi ini harus diberi bekal dan pendidikan akuntansi yang memadai.
2. Dengan adanya kesempatan ini, sebenarnya adalah ingin meningkatkan keberagaman disiplin ilmu dalam ruang lingkup profesi akuntansi.
3. Stereotip yang ada selama ini adalah bahwa hanya lulusan akuntansi yang bisa bergabung dan bekerja di profesi akuntansi.
4. Meningkatnya lulusan akuntansi secara signifikan namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan tidak terlatihnya lulusan akuntansi dalam menghadapi persaingan, maka membuat badan profesi akuntansi di Australia membuat kajian untuk membuka kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi. Keberagaman latar belakang dan disiplin ilmu dalam satu wadah profesi akuntansi diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas profesi akuntansi.
5. Dengan semakin beragamnya latar belakang pendidikan orang-orang yang bergabung dalam wadah profesi akuntansi, diharapkan mampu memenuhi tuntutan pemberian jasa bagi berbagai macam bisnis dan industri.

Rumusan Masalah

1. Secara umum, mengenali kemampuan personal seseorang berarti meneliti dan mengidentifikasi ciri-ciri individu tertentu atau kelompok, maka akan diperoleh data dan informasi mengenai kecenderungan perilaku tertentu seperti sikap, orientasi dan gaya pengambilan keputusan.
2. Menurut beberapa penelitian, ada gabungan dari sifat dari masing-masing individu yang mempengaruhi kemampuan personal.
3. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah utama, yaitu:
 - a. RQ1 : Apa kemampuan personal yang harus dimiliki oleh lulusan non-akuntansi jika akan memasuki dunia profesi akuntansi.
 - b. RQ2 : Apa perbedaan yang signifikan antara lulusan akuntansi dan non akuntansi dalam memasuki profesi akuntansi.

Metodologi Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan metode *Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)*

MBTI adalah salah satu jenis psikotest yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam memandang hal-hal disekelilingnya serta membuat keputusan. MBTI dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat dan tipe kepribadian.
2. Instrument MBTI menggunakan pengisian kuesioner

Hasil dan Pembahasan

1. Untuk menjawab RQ1
 - Mayoritas lulusan non akuntansi menunjukkan hasil bahwa mayoritas mereka mengandalkan intuisi, berpikir dan menilai.
 - Lulusan non akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi harus dapat membuat keputusan yang berdasarkan logika dan analisis, sebab akibat dan perencanaan yang terorganisir.
2. Untuk menjawab RQ2
 - Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi kemamouan personal antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi.
 - Temuan utama dari studi ini adalah bahwa lulusan non akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi ternyata memiliki kemamouan personal serupa dengan lulusan akuntansi.
 - Lulusan non akuntansi cenderung termotivasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi saat mereka memasuki profesi akuntansi.
3. Menguji kemampuan personal antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi saat memasuki profesi akuntansi.
4. Kesempatan terbuka bagi lulusan non akuntansi dalam memasuki profesi akuntansi agar menambah keragaman dunia profesi akuntansi agar mampu memenuhi tuntutan pasar dan industri yang semakin beragam.

5. Kemampuan personal lulusan non akuntansi dan lulusan akuntansi memiliki kesamaan, yaitu memiliki tingkat penguasaan yang sama di bidangnya masing-masing.

Kesimpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan akan kebutuhan tenaga professional di bidang akuntansi, maka dibuka kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk dapat memasuki profesi akuntansi.
2. Keberagaman latar belakang dan keterampilan dinilai mampu memenuhi tuntutan pasar dan industri bisnis yang semakin beragam.

2. Artikel Kedua

Judul : *Known by The Company They Keep: A Study Of Political Campaign Contributions Made by The United States Public Accounting Profession*

Penulis : **Peggy D. Dwyer, Robin W. Roberts**

Pendahuluan

1. Berita mengenai kasus Enron menjadi topic hangat yang diperbincangkan di kalangan akademisi dan profesi akuntansi.
2. Berkembangnya pertanyaan mengenai sifat hubungan antara akuntansi, klien dan negara yang membuat peraturan. Dari munculnya kasus Enron, maka hubungan antar ketiganya menjadi topic yang sering dibicarakan.
3. Penelitian ini membahas mengenai strategi dan cara yang digunakan oleh para profesiaonal (akuntan publik) dan

kelompok-kelompok lainnya dalam upaya dukungannya terhadap legislative.

4. Peneliti melakukan dua analisa khusus yang berkaitan dengan kecenderungan keterlibatan profesi akuntan publik di dalam politik, yaitu apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau mendukung kepentingan klien.
5. Data yang pertama diambil adalah sejauh mana keterlibatan profesi akuntan publik di dalam pembiayaan kampanye politik. Kedua, adalah mengumpulkan informasi mengenai bagaimana keterlibatan profesi akuntan publik dalam pendanaan kampanye dan keterlibatannya dengan ideology politik tertentu.
6. Adanya informasi mengenai hubungan antara teori profesi dan potensi terlibatnya profesi akuntan publik di dalam politik. Serta adanya laporan kontribusi dari profesi akuntan publik yang secara langsung dan terang-terangan mengikuti kegiatan politik.

Latar Belakang dan Motivasi

1. Keterlibatan Profesi Akuntan Publik di dalam politik
 - Adanya ulasan literature yang menyimpulkan bahwa keterlibatan profesi akuntan publik di dalam politik dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
 - Seharusnya jasa yang diberikan oleh para akuntan publik tidak ditumpangi kepentingan politik karena nantinya akan membatasi ruang lingkup pemberian jasa di segala bidang.
 - Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa peran akuntansi dalam masyarakat sebenarnya tidak sedikit,

yaitu sebagai seseorang yang mampu membawa perubahan atau sebagai reactor yang memfasilitasi perubahan di dalam kehidupan masyarakat.

2. Akuntansi, Profesi Akuntan publik dan Ekonomi Politik

- Seorang akuntan dituntut untuk mampu memberikan informasi secara objektif, independen sehingga dapat menghasilkan informasi yang rasional bagi pengambilan keputusan.
- Dalam perspektif Interaksionis (Willmott, 1986), profesi akuntansi diartikan sebagai kelompok yang mencari pengakuan dan status. Perspektif ini melihat bahwa profesi akuntan publik, tidak lagi mengutamakan kepentingan publik namun sudah memasuki dimensi politik.
- Sedangkan teori kritis berpendapat bahwa seorang professional (akuntan publik) lebih cenderung mengarah pada kesejahteraan pribadi mereka dengan cara bergabung dan mempromosikan diri mereka dalam suatu wadah yaitu kantor akuntan publik.
- Secara teori, seharusnya profesi akuntan publik haruslah bersifat netral dan tanpa dipengaruhi sudut pandang tertentu yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam memberikan jasa professional.

3. Kontribusi penelitian

- Kontribusi dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa profesi akuntan publik di Amerika Serikat secara aktif terlibat di dalam politik dan adanya dukungan dari para legislative yang menggunakan jasa akuntan publik untuk membantu mereka dalam merumuskan kebijakan dalam sektor keuangan.

Recent Reform in the CPA Profession

1. Profesi akuntan publik ternyata telah terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan politik selama delapan decade di Amerika Serikat.
2. Pemerintah Amerika Serikat mengizinkan ketrlibatan para akuntan publik ini ke dalam ruang lingkup politik yang dapat terlihat seperti di dalam table 1, 2, dan 3 yang merupakan daftar nama akuntan publik yang terlibat di dalam politik Amerika Serikat.

Kontribusi Profesi CPA (tahun 1997-1998)

1. Dari table 4 dan 5 maka dapat dilihat jumlah calon legislative yang mendapat dukungan dari para professional akuntan publik dari berbagai partai politik yang ada di Amerika.
 - Sampel penelitian, sampel terdiri dari 435 anggota legislatif dari rentang tahun 1997-1998, sebagai *data cross-sectional* pada data kontribusi keuangan dalam jangka waktu sampel beberapa periode waktu.
 - *Measures of accounting profession financial contributions.* Adanya indikasi bahwa profesi akuntan publik dapat memainkan peran sentral dalam kegiatan legitimasi dan proyek pembangunan yang ada serta adanya bukti yang menunjukkan bahwa para akuntan publik ini menerima kontribusi dari anggota komite politik.
2. *Measures of ideology : special interest group scores.* Berdasarkan penelitian yang didasarkan pada enam kategori yang dianggap mewakili kelompok politik Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu kelompok kepentingan bisnis, hak sipil, konservatif, buruh, liberal dan wanita. Untuk masing-masing sampel, peneliti akan mencari rata-rata nilainya.

Hasil dan Pembahasan

1. *Univariate analyses*. Dalam tabel 7 digambarkan adanya standar deviasi untuk tujuh kontribusi dari komite politik serta koefisien korelasinya. Dilakukan analisa terhadap enam faktor yang telah disebutkan di atas maka ditemukan adanya korelasi kepentingan antar keenam poin tersebut. Dan hasilnya bahwa keenam poin tersebut tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan analisis multivariat selanjutnya.
2. *Multivariate analyses*. Untuk menguji hubungan antara ideology dengan kontribusi politik para akuntan publik, maka dilakukan analisis regresi dengan variable independen adalah ideology. Hasilnya menunjukkan bahwa ideology memiliki kontribusi yang signifikan terhadap dukungan yang diberikan oleh professional akuntan publik.

Kesimpulan

1. Seorang akuntan sebaiknya bersifat netral dan jauh dari kepentingan konflik sosial, mengingat seorang akuntan mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan terlebih dalam hal keuangan.
2. Adanya korelasi yang signifikan antara keenam poin yaitu kelompok kepentingan bisnis, hak sipil, konservatif, buruh, liberal dan wanita di dalam daftar kontribusi yang diberikan oleh para akuntan publik.
3. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup penelitian yang hanya menyimpulkan bahwa ideology menjadi ukuran dalam analisa penelitian ini. Hakl tersebut tentu saja tidak dapat menggeneralisasi dalam siklus penelitian selanjutnya.
4. Peran akuntan publik dalam area kebijakan publik perlu mendapatkan kajian dan perhatian mengingat apakah ada

kepentingan lain yang mendasari mereka membuat kebijakan publik tersebut.

5. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana motivasi dan konsekuensi dari dukungan yang diberikan oleh akuntan publik terhadap kegiatan politik di Amerika Serikat. Bahwa dukungan ini bisa mengurangi rasa netral dan independensi akuntan di area publik seperti kasus jatuhnya Enron dan kegagalan-kegagalan auditor lain di beberapa kasus. Kebijakan yang dihasilkan oleh para legislative yang mendapat dukungan dari para akuntan publik dianggap tidak bisa bersifat universal dikarenakan adanya penilaian dari para akuntan publik tersebut.

3. Artikel Ketiga

Judul : *CPA Licensure without examination: Legitimation and Resistance*

Penulis : Richard S. Sathe

Pendahuluan

1. Adanya akuntan publik yang tidak lulus di dalam ujian CPA menimbulkan reaksi keras dari beberapa organisasi akuntan publik. Hal ini dianggap sebagai bentuk resistensi oleh beberapa organisasi akuntan publik di Minnesota.
2. Munculnya beberapa pertanyaan kalangan seperti bagaimana kualitas dari orang yang memiliki lisensi CPA namun tidak lulus ujiannya, serta mempertanyakan bagaimana tingkat kompetensi para LPAs yang tidak memiliki sertifikasi lulus CPA.

3. Ada tiga tahapan paradigma pemeriksaan untuk para CPA yaitu tidak adanya pemeriksaan sama sekali bagi CPA yang telah lama, pemeriksaan untuk CPA baru dan telah berpengalaman dan pemeriksaan untuk keduanya.
4. Di Minnesota terdapat beberapa kali perubahan peraturan terkait lisensi profesi akuntan publik.

Landasan Teori

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa landasan teori. Teori pertama yang digunakan yaitu mengenai regulasi mengenai profesi akuntansi di Amerika Serikat.

1. *Regulation and the public interest*
 - Adanya tiga bentuk langkah-langkah dalam pengajuan pekerjaan di AS seperti adanya pendaftaran, sertifikasi profesi, dan lisensi.
 - Adanya segmen pasar yang besar membuat para akuntan publik berlomba-lomba untuk menawarkan jasanya, namun ada pembatasan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang mensyaratkan pengesahan lisensi bagi jasa professional.
 - Lisensi ini sekaligus menjadi tolak ukur bagaimana kualitas professional yang dimiliki. Karena konsumen yang semakin kritis dalam memilih dan mampu membedakan kualitas para tenaga profesional.
2. *Theories of the profession*
 - Adanya konsep teori Willmott yang berpendapat bahwa ada kontribusi di setiap teori profesi. Salah satunya adalah profesi akuntansi. Profesi ini mengedepankan keterampilan.

- Sebuah profesi juga dianggap sebagai identitas yang memperoleh pengakuan di tengah masyarakat, namun tak jarang profesi juga menuntut perubahan yang dianggap menguntungkan diri mereka sendiri bukan untuk kepentingan umum.

3. *Institutions*

- Institusi diartikan sebagai sekelompok aturan hukum yang membatasi perilaku manusia, struktur, lembaga pemerintah, kelompok kepentingan dan profesi.
- Profesi didefinisikan sebagai keanggotaan yang bersifat kolektif yang menggabungkan masalah legitimasi. Status keanggotaan kelompok dipertahankan menurut aturan dan sudut pandang sosial.
- Dalam beberapa literature dibahas mengenai kerangka konseptual yang digunakan untuk menguji konversi LPAs dan menunjukkan bahwa lisensi dan ujian CPA merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang yang berkenaan dan sangat perat kaitannya dengan profesi akuntansi.

Metodologi Penelitian

1. Metode studi kasus yang tepat digunakan adalah rentang waktu dan struktur yang terikat dengan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini juga meneliti mengenai bagaimana hubungan intraorganisasi di dalam profesi akuntansi itu sendiri.
2. Data utama penelitian bersumber dari dokumen yang berasal dari lembaga yang mengatur profesi di Minnesota dan wawancara. Ada tiga sesi wawancara, yaitu dengan penyusun utama dari 2001 Act, Presiden MNCPA dan komite

legislative. Hasil wawancara terstruktur ini bersifat ekspansif. Hasil dari wawancara ini nantinya akan diverifikasi akurasi dan pihak yang berkepentingan telah bersedia melakukan koreksi.

Studi Kasus

1. Munculnya argument dari pihak berwenang mengenai adanya akuntan publik yang tidak lulus mengikuti ujian CPA sehingga LPA dianggap tidak memiliki kompetensi. Dan yang kedua masyarakat menganggap bahwa akuntan publik yang telah lulus ujian CPA harus mengkonversi LPA nya. Ketiga, lisensi LPA telah berjalan selama lebih dari dua puluh tahun, dan keempat, dikhawatirkan organisasi LPA akan hilang tergerus dengan kemajuan zaman yang mensyaratkan adanya lisensi CPA bagi akuntan publik.
2. Minnesota memberlakukan bahwa semua akuntan publik harus memiliki CPA.
3. Adanya kontradiksi tentang konversi LPA menjadi CPA. Pertama, mereka yang telah memiliki lisensi LPA secara otomatis akan mendapat lisensi CPA mengingat LPA telah diakui dan berpengalaman selama 20 tahun. Kedua, dengan dihapusnya LPA akan membuat kebingungan publik mengenai lisensi akuntan publik. Ketiga, ada 12.000 akuntan publik berlisensi CPA, namun 300 diantaranya masih aktif berlisensi LPA. Keempat, legislative Minnesota melindungi LPA dikarenakan telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun.

Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan mengungkapkan beberapa argument dari berbagai sudut pandang dan ulasan literature.

1. *Expediency*

Ada kesepakatan bahwa LPA akan perlahan hilang dikarenakan adanya pergeseran, namun hal tersebut akan sulit terjadi. Dikarenakan konversi CPA akan sulit dilakukan.

2. *The Two side of the public interest coin*

Kedua belah pihak berkepentingan haruslah mengutamakan kepentingan umum. Ada yang menganggap bahwa akuntan publik yang berlisensi LPA tidak berkompeten karena tidak memiliki lisensi CPA. Namun, ada pihak lain yang berpendapat bahwa LPA telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan selama jangka waktu itu mereka terus mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Pendapat berbeda menyatakan bahwa semua itu tergantung pada pilihan konsumen. Konsumen akan menentukan apakah akan memilih akuntan berlisensi CPA atau LPA karena keduanya berada di dalam profesi yang sama.

3. *The legitimacy of the CPA examination*

Bahwa akuntan publik yang memiliki lisensi CPA memiliki kemampuan dan keahlian normatif yang baik. Dan lisensi CPA merupakan unsur penting dalam identitas professional. Pendapat lain menyatakan bahwa LPA tidak bisa disetarakan dengan CPA. Para akuntan publik berlisensi LPA tetap harus bekerja keras untuk dapat lulus ujian sertifikasi CPA. Namun, disisi lain ada pertanyaan yang muncul apakah lisensi CPA yang didapat oleh akuntan publik baru akan setara dengan akuntan publik berlisensi LPA namun telah lebih berpengalaman. Menurut mereka lamanya pengalaman merupakan bukti kompetensi dan

mampu menggantikan pendidikan serta dapat sebagai pengganti ujian masuk.

4. *The legitimating role of association*

Pada akhirnya pihak berwenang Minnesota memasukkan status aktif dan tidak aktif untuk lisensi CPA dan LPA. Jika akuntan publik memiliki lisensi tidak aktif, maka tidak bisa memberikan jasa profesionalnya, dan jika ingin kembali mengaktifkannya harus dengan syarat tertentu. Dalam beberapa sudut pandang, akuntan berlisensi LPA dianggap lebih berpengalaman daripada akuntan publik baru yang telah berlisensi CPA.

5. *Resistance*

Resistensi merupakan konsistensi terhadap sesuatu. Adanya kemungkinan akuntan publik berlisensi LPA akan tetap bersaing dengan akuntan publik berlisensi CPA. Resistensi membawa isu bahwa adanya konversi LPA menjadi CPA akan membaw perdebatan publik dan kebingungan bagi masyarakat.

Kesimpulan

1. Untuk menjawab pertanyaan mengapa seorang LPA bisa tidak lulus ujian CPA adalah bahwa akuntan publik berlisensi LPA lebih memandang asas kebermanfaatannya daripada gelar lisensi semata.
2. Untuk menjawab pertanyaan kedua mengapa LPA dengan 20 tahun pengalamannya dianggap lebih kompeten dari akuntan publik berlisensi CPA, jawabannya adalah bahwa CPA adalah syarat bagi profesi akuntansi, namun belum tentu akuntan publik baru yang memiliki sertifikat CPA akan mampu menungguli akuntan publik bersertifikat LPA karena pengalaman mereka yang telah lebih dari 20 tahun. Pengalaman mengalahkan pendidikan dan syarat ujian masuk.

3. Penelitian ini memberikan kontribusi dan pemahaman bagaimana proses legitimasi sertifikasi CPA.
4. Penelitian ini juga sedikit banyak berkontribusi pada asosiasi akuntan publik.
5. Penelitian ini juga berkontribusi dan memberikann pemahaman bahwa di Minnesota tidak hanya akuntan publik berlisensi CPA yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan opini audit.

4. Artikel Keempat

Judul : *The "Information Right" and The CPA Profession*

Penulis : Gary J. Previts

Latar Belakang dan Landasan Teori

1. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajemen (pengelola). Dengan adanya kasus Enron, maka muncul stigma pasar yang baru mengenai kepentingan akuntan publik dalam pemberian jasa profesionalnya.
2. Dengan banyaknya skandal akuntan publik, maka dicetuskan adanya Sarbanes Oxley (Sarbox) yang pada akhirnya mengatur segala kode etik profesi akuntan publik, dan menjadi dasar etika dan yang mengikat profesi akuntan publik.
3. Di tengah perubahan lingkungan, maka akuntan publik dituntut untuk meningkatkan wawasan dan perluasan informasi mengenai perubahan pasar yang terjadi. Seorang akuntan publik memainkan peran penting dalam menyediakan informasi bagi pasar.

4. Dengan adanya pemisahan antara fungsi manajemen dengan kepemilikan, maka fungsi pengendalian akan mudah diterapkan. Penyediaan informasi yang andal merupakan ranah utama bagi profesi akuntan publik.

Kesimpulan

1. Dengan pemisahan fungsi pemilik dan pengelola, maka fungsi pengendalian akan mudah diterapkan. Penyediaan informasi yang andal bagi publik merupakan ranah utama dari profesi akuntan publik. Akuntan publik harus terus mengikuti informasi mengenai perubahan pasar dan harus terus meningkatkan kemampuannya. Namun, seorang akuntan publik terikat oleh aturan etika profesi seperti yang tertuang dalam Sarbanes Oxley.

BAB III

LAPORAN AUDIT

Definisi Laporan Audit

Laporan audit merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan pekerjaan dan hasil temuan dari proses audit secara komprehensif. Laporan audit menjadi perhatian penting bagi auditor karena laporan audit sangat penting bagi para investor, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan audit menurut standar pelaporan di dalam SPAP:

1. **Standar pelaporan pertama.** Laporan audit harus dapat menjamin bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. **Standar pelaporan kedua.** Laporan auditor harus mampu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus memiliki konsistensi di dalam penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya baik di periode sekarang maupun periode sebelumnya. Jika ditemukan adanya perubahan, maka auditor wajib menyebutkannya di dalam laporan auditnya.

3. **Standar pelaporan ketiga.** Informasi yang diungkapkan di dalam laporan keuangan harus memenuhi unsur yang memadai, terutama pengungkapan informasi yang material.
4. **Standar pelaporan keempat.** Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Seorang auditor harus bertanggung jawab mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan.

Manfaat Laporan Audit

1. Sebagai alat untuk memahami informasi mengenai proses audit.
2. Sebagai dasar untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit.
3. Sebagai dasar dalam pengambilan opini.

Syarat Laporan Audit

1. **Lengkap.** Laporan audit harus berisi mengenai segala informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit dan hal memadai atas informasi yang akan dilaporkan.
2. **Akurat.** Laporan audit harus memberikan informasi, temuan dan kesimpulan yang didukung dengan adanya bukti yang kompeten dan relevan.
3. **Objektif.** Laporan audit harus disajikan secara seimbang dan netral tanpa memihak pihak manapun dan tidak ditumpangi kepentingan apapun.

4. **Meyakinkan.** Laporan audit beserta informasi yang ada di dalamnya harus mampu bersifat persuasive dan logis serta disusun berdasarkan fakta yang ada.
5. **Jelas.** Laporan audit harus disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna laporan audit.
6. **Ringkas.** Laporan audit disajikan secara ringkas. Laporan yang terlalu panjang, bisa menurunkan kualitas laporan audit.

Bentuk dan Bagian Laporan Audit

1. **Judul Laporan.** Di dalam standar audit, di dalam laporan audit haruslah mencantumkan judul dan memuat kata independen.
2. **Alamat Laporan Audit.** Di dalam laporan audit, harus tercantum tujuan laporan audit, misalkan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan, dewan direksi maupun pemegang saham.
3. **Paragraf Pendahuluan.** Paragraf pertama merupakan:
 - a. Pernyataan sederhana bahwa KAP telah melaksanakan keseluruhan proses audit
 - b. Mencantumkan laporan keuangan yang telah di audit (tanggal dan periode akuntansi laporan keuangan).
 - c. Pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, dan auditor hanya menyatakan kewajaran atas laporan keuangan.
4. **Paragraf Ruang Lingkup.** Paragraf ini berisi tentang pernyataan di mana audit disusun untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, dan

menyatakan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material. Di dalam paragraph ini auditor juga menyatakan telah mengevaluasi penerapan standar akuntansi, estimasi yang digunakan, proses pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Audit memberikan suatu tingkat keyakinan yang tinggi, namun bukan jaminan.

5. **Paragraf Pendapat.** Merupakan paragraf yang berisi kesimpulan auditor yang berdasarkan atas pertimbangan profesional.
6. **Tanda Tangan, Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik.** Dalam bagian ini menunjukkan *partner* akuntan publik yang bertanggung jawab secara hukum dan jabatannya atas mutu hasil auditnya berdasarkan standar professional.
7. **Tanggal Laporan Audit.** Tanggal yang tertera merupakan tanggal dimana auditor telah menyelesaikan proses terpenting dari prosedur audit di lapangan dan menunjukkan sampai tanggal berapa auditor bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

Kondisi dari Laporan Audit Standar Tanpa Pengecualian:

1. Semua instrument dari laporan keuangan tersaji secara keseluruhan dalam laporan keuangan.
2. Ketiga standar umum audit (keahlian & pelatihan teknis yang memadai bagi auditor, independensi, penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) telah dipatuhi dalam semua hal yang terkait dengan penugasan.
3. Bukti audit yang kompeten dan cukup telah didapatkan oleh auditor.
4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan telah diungkapkan secara memadai.

5. Tidak terjadi kondisi yang membuat auditor perlu menambahkan paragraph penjelas

Kategori Laporan Audit

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan oleh auditor jika:

- a. Tidak ada pembatasan ruang lingkup audit.
 - b. Auditor memperoleh bukti yang cukup dan kompeten
 - c. Tidak terdapat pengecualian signifikan tentang kewajaran laporan keuangan, yakni posisi keuangan dan hasil usaha serta operasional perusahaan.
 - d. Laporan keuangan telah menerapkan prinsip akuntansi berlaku umum.
 - e. Terdapat konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan.
 - f. Laporan keuangan telah diungkapkan secara memadai.
- ### **2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan/ WTPDP (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)**

Dalam kategori ini, laporan keuangan tetap disajikan secara wajar namun ada beberapa bagian yang dirasa oleh auditor masih memerlukan tambahan penjelasan. Keadaan yang menyebabkan perlunya tambahan paragraph penjelasan adalah:

- a. Adanya ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi.
- b. Adanya keraguan auditor tentang *going concern* entitas.
- c. Penekanan atas suatu hal.
- d. Laporan audit melibatkan auditor lain.

3. **Wajar dengan Pengecualian / WDP** (*Qualified Opinion*)

Dalam kategori ini, laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, namun menurut auditor ada beberapa unsure yang dikecualikan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan. Kondisi WDP terjadi apabila:

- a. Adanya pembatasan ruang lingkup audit oleh klien.
- b. Adanya kondisi diluar kekuasaan auditor maupun klien yang menyebabkan auditor tidak dapat memperoleh informasi dan melaksanakan prosedur audit yang penting.
- c. Laporan keuangan ternyata tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.
- d. Adanya ketidak konsistenan di dalam penerapan prinsip akuntansi di dalam penyajian laporan keuangan.

4. **Tidak Wajar** (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar apabila:

- a. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sehingga tidak menunjukkan laporan keuangan yang wajar.
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup audit, sehingga auditor tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten.

5. **Tidak Memberikan Pendapat** (*Disclaimer of Opinion*)

Dalam kondisi ini, seorang auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa keseluruhan isi dari laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Auditor memberikan opini ini apabila:

- a. Banyak terjadi pembatasan ruang lingkup audit

- b. Adanya hubungan yang tidak independen antara auditor dengan klien.

Jika auditor tidak memberikan opininya, maka di dalam laporan auditor harus menjelaskan semua alasan substantive yang mendukung opininya tersebut.

Laporan Audit dengan melibatkan auditor yang lain

Dimungkinkan jika akuntan publik memiliki klien audit yang memiliki sejumlah kantor cabang yang tersebar, maka akuntan publik tersebut mengandalkan kantor akuntan publik lain dalam melaksanakan proses audit dan memiliki tiga alternatif, yaitu:

1. Auditor tidak memberikan referensi pada laporan audit

Jika auditor tidak memberikan referensi kepada auditor lain, maka pendapat wajar tanpa pengecualian standar akan diberikan, selama tidak ada kondisi lain yang mengharuskan adanya penyimpangan.

2. Auditor memberikan referensi dalam laporan audit

Disebut juga dengan laporan pendapat bersama. Laporan dengan opini WTP adalah laporan yang tepat apabila tidak ada review bagi pekerjaan auditor lain atau dianggap proporsi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain material terhadap keseluruhan laporan.

3. Auditor mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian

Opini auditor wajar dengan pengecualian maupun menolak berpendapat bergantung pada materialitas yang ditetapkan auditor, akan diperlukan jika auditor utama tidak ingin bertanggung jawab atas pekerjaan auditor lain.

Materialitas

FASB (*financial accounting standard board*) mendefinisikan materialitas adalah sebagai besarnya tingkat kelalaian ataupun salah saji di dalam laporan keuangan, yang membuat pengguna informasi laporan keuangan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan tersebut atau membuat keputusan yang berbeda jika informasi yang benar telah diketahui.

Semakin rendah tingkat materialitas yang digunakan, maka akan semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Semakin besar suatu saldo akun, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Belum ada batasan tingkat materialitas yang disepakati bersama, namun ada tiga kategori tingkatan materialitas yang biasanya digunakan, yaitu:

1. **Jumlah yang tidak material.** Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, namun cenderung tidak mempengaruhi keputusan bagi para pemakai informasi laporan keuangan, maka hal tersebut masih dianggap tidak material. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah wajar tanpa pengecualian
2. **Jumlah yang material namun tidak memperburuk informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara menyeluruh.** Dalam kategori ini, jika salah saji terjadi di dalam laporan keuangan dan hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, tetapi laporan keuangan tetap dianggap wajar secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah wajar dengan pengecualian
3. **Jumlah yang sangat material sehingga kewajaran akan laporan keuangan diragukan.** Dalam kategori ini, salah saji

di dalam laporan keuangan mampu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah tidak wajar/menolak memberikan pendapat.

Namun, di dalam proses audit, walaupun tidak ada aturan pasti mengenai berapa rentang angka yang dianggap material atau tidak, seorang auditor tetap harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan sebagai salah satu strategi audit secara menyeluruh. Contoh penetapan rentang materialitas dalam laporan keuangan secara menyeluruh:

1. Laba bersih : 5% - 10%
2. Pendapatan dan biaya : 1% - 3%
3. Asset: 0,5% - 1%
4. Ekuitas: 1%

Dalam perencanaan audit, auditor harus menetapkan tingkat materialitas ke dalam dua tingkat, yaitu:

1. Tingkat laporan keuangan

Alasannya adalah karena auditor berpendapat mengenai keseluruhan laporan keuangan, sehingga auditor akan menggunakan dua cara berikut:

- a. Pada saat perencanaan audit, maka:
 - Auditor membuat estimasi materialitas
 - Auditor mengidentifikasi sumber dari salah saji material dalam laporan keuangan, seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi, penyimpangan fakta, serta adanya penghilangan informasi yang diperlukan.

- Auditor harus menyadari bahwa di dalam laporan keuangan pasti akan terjadi lebih dari satu tingkat materialitas.
 - Pertimbangan auditor atas materialitas biasanya dibuat enam sampai sembilan bulan dari tanggal neraca berdasarkan data laporan keuangan yang dibuat tahunan. Pertimbangan tersebut juga bisa didasari dari perubahan ekonomi maupun tren bisnis.
- b. Pada saat mengevaluasi bukti audit selama proses pelaksanaan audit

2. Tingkat Saldo Akun

Alasannya adalah karena saldo akun akan diverifikasi untuk mencapai kesimpulan yang menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Saldo suatu akan biasanya mencerminkan *over-statement* atau melebihi batas saji.

Proses Pengambilan Keputusan Untuk Laporan Audit Oleh Auditor

1. Menentukan Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan

Auditor harus mengidentifikasi dan memutuskan apakah telah terjadi kondisi-kondisi yang mempengaruhi kewajaran atas suatu laporan keuangan sebelum pada akhirnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

2. Menentukan Tingkat Materialitas Baik Pada Tingkat Laporan Keuangan Maupun Saldo Akun

Auditor harus menentukan rentang materialitas terhadap salah saji di dalam laporan keuangan. Hal ini penting, mengingat

salah saji dan rentang materialitasnya menjadi salah satu dasar auditor untuk menentukan opininya.

3. Memutuskan Jenis Laporan Audit Berdasarkan Tingkat Materialitas

Setelah mengetahui rentang materialitas suatu laporan keuangan, maka auditor akan mudah menentukan tingkat kewajaran laporan keuangan, dan akan memilih kategori laporan audit mana yang akan digunakannya.

4. Menuliskan Laporan Audit

Auditor pada akhirnya akan menyusun laporan audit yang berisi hasil dari segala proses dan prosedur audit yang telah selesai dilaksanakan. Penulisan laporan audit harus tetap mengikuti aturan baik isi dan bagian dari laporan audit tersebut.

Dampak *E-commerce* Terhadap Pelaporan Audit

Salah saji mungkin saja tidak bisa terdeteksi dengan penggunaan teknologi informasi akibat hilangnya jejak, karena informasi sebagian besar diinput langsung ke dalam komputer, maka bisa saja adanya dokumen dan catatan sumber informasi perusahaan yang hilang ataupun sengaja tidak dimasukkan. Namun, jika sistem teknologi informasi gagal, maka akan mempengaruhi keandalan informasi yang dihasilkan. Risiko yang terjadi adalah dapat meningkatkan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko khusus yang melekat pada sistem teknologi informasi antara lain: (a) Risiko pada *hardware* dan *software*; (b) Jejak atau bukti audit yang berkurang; (c) Kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas di bidang teknologi informasi; (d) Adanya ancaman kegagalan sistem dan virus; dan (e) Akses yang tidak sah.

Di masa sekarang, seorang auditor harus memiliki pemahaman memadai mengenai perangkat keras dan lunak serta sistem komputer untuk merencanakan penugasan dan harus mengetahui bagaimana dampak pengolahan data elektronik terhadap prosedur audit yang akan digunakan. Apabila klien memiliki aplikasi akuntansi yang diproses melalui jaringan, maka auditor harus mempelajari tentang konfigurasi jaringan, *software* yang digunakan untuk mengelola sistem, pengendalian akses dan perubahan program aplikasi. Pengetahuan ini akan berdampak pada penilaian risiko pengendalian auditor ketika menyusun rencana audit laporan keuangan dan saat menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Pengendalian aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan dari proses audit. Pengendalian aplikasi ini bersangkutan dengan tujuan saldo akun serta penyajian dan pengungkapan di dalam laporan keuangan. Pengendalian aplikasi ini terdiri dari:

1. **Pengendalian Input**, dirancang untuk memastikan bahwa data dan informasi yang input sudah diotorisasi, akurat dan lengkap.
2. **Pengendalian Pemrosesan**, untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses.
3. **Pengendalian Output**, untuk mendeteksi kesalahan serta pemrosesan diselesaikan serta untuk mereview kelayakan data.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Audit Firm Industry Specialization and The Audit Report Lag*

Penulis : Ahsan Habib, Md. Borhan Uddin Bhuiyan

Latar Belakang

1. Paper ini memberikan kontribusi dengan menggambarkan hubungan antara audit dengan spesialisasi industri dengan ARL. ARL didefinisikan sebagai batas antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal laporan audit, dan oleh karenanya ARL dapat digunakan untuk mengukur efisiensi audit.
2. Investor lebih memilih menggunakan ARL, karena informasi di dalam ARL lebih mencerminkan kredibilitas laporan keuangan dan ARL dinilai lebih ringkas.
3. Temuan umum penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi ARL diantaranya adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh klien, ukuran klien, kondisi keuangan klien, dan informasi jenis laba.
4. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kantor audit dengan spesialisasi industri, maka akan focus pada perkembangan teknologi, fasilitas yang memadai, personel yang kompeten dan sistem pengendalian organisasi untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
5. Auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri tertentu diharapkan akan lebih efisien dalam menyelesaikan proses audit dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan tersebut.

6. Auditor dengan spesialisasi di bidang industri tertentu pasti akan menetapkan standar fee yang lebih tinggi.
7. Peneliti juga akan menguji bagaimana pengaruh penerapan IFRS terhadap ARL.

Kerangka Teoritis

1. Secara ringkas, maka penjelasan skema dari konsekuensi auditor dengan spesialisasi di bidang industri:
 - a. Reputasi KAP akan ikut berpengaruh dengan keberadaan auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri.
 - b. Terdapat faktor-faktor penentu dan pengukur dari tingkat spesialisasi auditor tersebut.
 - c. KAP akan menerapkan strategi untuk meningkatkan spesialisasi di bidang industri tersebut.
 - d. KAP yang memiliki auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang tersebut maka secara otomatis akan mempengaruhi penetapan fee audit.
 - e. Auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang industri tertentu tentu akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
 - f. Peningkatan kualitas laporan keuangan antara lain meliputi:
 - 1) ARL
 - 2) Kualitas pengungkapan yang lebih baik
 - 3) Akurasi perkiraan yang lebih baik dan meminimalkan terjadinya dispersi
 - 4) Meminimalkan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan
 - 5) Meningkatkan kualitas informasi laba.

-
- g. Peningkatan kualitas informasi laba ini meliputi:
- 1) Meminimalkan praktek manajemen laba
 - 2) Meningkatkan konservatisme atau kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.
 - 3) Mengurangi kecenderungan bahwa penyajian informasi laba tidak bisa mencerminkan keadaan sebenarnya namun hanya untuk memenuhi analisa dan target perusahaan.
2. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua hipotesis berikut:
- a. Hipotesis 1: dampak kehadiran auditor dengan kemampuan spesialisasi industri dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan spesialisasi tersebut.
 - b. Hipotesis 2 : kewajiban untuk mengadopsi IFRS akan meningkatkan ARL namun tidak sama hasilnya dengan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri.

Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini, komponen yang digunakan antara lain;

1. Menggunakan pengukuran terhadap auditor dengan spesialisasi industry
2. Variable kontrol terdiri dari: (1) Pengukuran keuangan pada akhir tahun; (2) Industri; (3) Ukuran perusahaan; (4) Kerugian; (5) Kondisi keuangan; (6) Anak perusahaan; (7) Fee untuk jasa non audit; (8) Masa jabatan; (9) Kepemilikan; (10) Kewajiban untuk pengadopsian IFRS

3. Pemilihan sampel

Sampel yang digunakan adalah 502 perusahaan yang terdaftar pad bursa efek New Zealand dari tahun 2004-2008. Data yang dikumpulkan adalah tanggal laporan audit, biaya audit, biaya non audit, masa audit, nama kantor akuntan publiknya, jumlah anak perusahaan dan nama pemegang saham serta laporan tahunan perusahaan.

4. Hasil tes

a. Statistik deskriptif dan analisa korelasi

- 1) 22% dari total perusahaan memiliki informasi laba yang negative
- 2) masing-masing perusahaan memiliki rata-rata memiliki tujuh anak perusahaan
- 3) $\frac{3}{4}$ dari sampel memiliki akhir tahun fiscal antara bulan Maret dan Juni
- 4) 39% sampel telah diaudit oleh auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri tertentu.

b. Analisa univariate

Dari hasil analisa univariate terdapat perbedaan rata-rata untuk KAP dengan auditor yang memiliki spesialisasi industri dengan KAP yang tidak memiliki auditor tersebut.

c. Analisa multivariate

Dari hasil analisa multivariate mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oelh auditor dengan spesialisasi industri mampu menikmati hasil audit yang lebih efisien. Selain itu, juga terdapat peningkatan yang signifikan terhadap ARL setelah mengadopsi IFRS.

d. Self-selection problem

Pemilihan auditor dengan kemampuan spesialisasi tertentu pada bidang industri tetap dikembalikan lagi kepada klien.

e. *Sensitivity test*, tes ini terdiri dari:

- 1) definisi alternative ARL
- 2) alternatif pengukuran auditor dengan spesialisasi industri
- 3) level spesialisasi industri dan ARL nya
- 4) perbedaan industri

Kesimpulan

1. ARL adalah salah satu dari output yang bisa diamati oleh pengguna eksternal laporan keuangan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi audit.
2. Penelitian empiris membuktikan bahwa ARL dipilih oleh perusahaan tertentu dengan karakteristik audit tertentu.
3. KAP telah melakukan perbaikan dan pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan bisnis klien.
4. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang industri tertentu mampu menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan tersebut.
5. Adanya pengaruh adopsi IFRS terhadap ARL
6. Keterbatasan dari penelitian ini adalah pertama, penelitian empiris sebelumnya hanya berkorelasi dengan variable-variabel yang telah disebutkan di atas, dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan variable yang lain. Kedua, penelitian ini tidak secara langsung membahas perbedaan efisiensi auditor dan pengaruhnya terhadap ARL.

2. Artikel Kedua

Judul : *Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay*

Penulis : Sandra Cohen, Stergios Leventis

Latar Belakang

1. Adanya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang diakui sebagai karakteristik kualitatif pada informasi keuangan.
2. Laporan keuangan pemerintahan memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja dan posisi keuangan karena sebuah akuntabilitas dan saran untuk mengambil keputusan oleh beberapa pengguna.
3. Publikasi secara tepat waktu dianggap penting untuk menilai kinerja sektor publik untuk mencapai efisiensi, tujuan efektivitas dan ekonomi.
4. Penelitian ini akan melihat pula dampak transisi pencatatan akuntansi pemerintahan daerah di Yunani dari awalnya cash basis menjadi accrual basis.

Landasan Teori

Greek municipalities and relevant regulation

1. Kementerian keuangan Yunani telah mengagendakan ketepatan waktu informasi pelaporan audit yang telah diatur di dalam undang-undang Yunani. Ada faktor yang

menyebabkan keterlambatan pelaporan audit: banyaknya aliran politik, peraturan yang kaku, ketentuan hukum yang ketat dan tidak sesuai dengan legislative. Waktu maksimum untuk mempublikasikan laporan audit yaitu 217 hari.

2. Basis Akrual digunakan untuk semua perusahaan swasta yang tidak terdaftar di Bursa. Pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi akrual harus mempublikasikan laporan keuangan tahun fiskal terutama neraca dan labarugi.

Factors affecting audit delay

1. Penundaan audit telah menjadi subjek perhatian dan penelitian pada sektor swasta.
2. Laporan audit yang tepat waktu saling terkait dengan kualitas laporan audit.
3. Audit menjadi negatif jika dikaitkan dengan penerbitan laporan keuangan dengan tujuan pengungkapan laporan audit, dan juga sebagai independensi dari auditor.
4. Penundaan audit akan berpengaruh pada reputasi auditor dan tanggung jawabnya, kompetensi manajemen dan audit fee.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini fokus pada tiga dimensi (faktor pemerintah daerah, politik dan faktor audit), ketersediaan data, mengkaji asosiasi dengan penundaan audit.

1. *Audit delay*, merupakan variabel dependen, diukur sebagai jumlah hari dari tanggal akhir tahun pelaporan laporan audit di pemerintah daerah.

2. *Municipality-related factors*

– *Experience in accrual accounting*

Dalam organisasi penerapan konsep akuntansi berbasis akrual dan prakteknya perlu dipelajari lebih banyak dan ini merupakan “permasalahn” yang akan menyebabkan penundaan yang tidak biasa. Di Yunani persiapan pelaporan keuangan merupakan tugas utama untuk semua pemerintah daerah, karenanya dilakukan pelatihan, sistem akuntansi harus diuji dan aset tetap juga harus ada. Tugas yang kedua pemerintah daerah secara signifikan bisa mengendalikan berbagai aset tetap yang harus dicatat dan dinilai untuk pertama kalinya.

H₁: *Audit delay* berhubungan negatif dengan pengalaman kotamadya dalam adopsi akuntansi berbasis akrual.

– *Dependence on governmental grants*

Pemerintah daerah secara signifikan mengandalkan hibah dari pemerintah pusat. Subsidi dari negara diperuntukan untuk operasional dan investasi, dialokasikan ke pemerintah daerah oleh pusat (pajak dikumpulkan dipusat lalu ditransfer ke pemda).

H₂: *Audit delay* berhubungan negatif dengan ketergantungan pemerintah daerah pada hibah pemerintah pusat.

– *Location*

Kekayaan dari sumberdaya di Yunani tidak merata dan bisa mempengaruhi akses kepada pegawai yang terampil untuk mempertahankan sistem akuntansi yang canggih dan internal operasional di administrasi. Peneliti menganggap bahwa lokasi mempengaruhi keterlambatan

audit. Lokasi geografis memfasilitasi pelaksanaan audit, sehingga mengarah ke pelaporan audit yang tepat waktu atau tidak sehingga menjadi *audit delay*.

H₃: *Audit delay* berhubungan negatif dengan lokasi kota yang terletak dipusat-pusat ekonomi dinegara

1. *Politically related factors*

– Strong opinion

Terdapat politik didalam anggota dewan dan terkadang tidak sesuai alirannya dengan parlemen nasional sehingga menimbulkan pengambilan keputusan dalam keuangan yang prosesnya akan lebih panjang. Kompetensi politik telah ditemukan pada penelitian sebelumnya yang bisa membuat ambiguitas dan sulit untuk menetapkan pengukuran.

H₄: *Audit delay* berhubungan positif dengan oposisi kuat pada pemerintahan dewan

– Re-election

Seorang manajer professional biasanya tidak berpengalaman dengan teknis akuntansi namun, ketika menjabat selama 4 tahun mereka akan lebih mengetahui akuntansi serta paham dengan prosedur audit, namun adanya pemilihan ulang (walikota) dapat mengakibatkan terjadinya *audit delay*.

H₅: *Audit delay* berhubungan negatif dengan pemilihan kembali walikota

2. *Audit- related factors*

– *External accountant*

Perubahan dari cash ke accrual basis bukan merupakan prosedur yang sepele sehingga diperlukan adanya pelatihan staf untuk bisa mengoperasikan sistem baru dan tim eksternal membutuhkan biaya yang dikeluarkan dari segi peningkatan keahlian akuntansi dan dukungan. Keberadaan eksternal accountant bisa membuat meningkatnya *audit delay* karena : (1) Akuntan eksternal tidak banyak menghabiskan waktu di pemerintah daerah yang membuat tidak berkerja sama antara auditor dan staf pemerintah daerah karena mereka bekerja hanya sebagai *freelancer*; (2) Tanggal penyusunan laporan di pemerintah daerah bertepatan pada sektor swasta, oleh karenanya akuntansi eksternal dengan klien disektor swasta akan sibuk selama periode yang nantinya akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah.

H₆: *Audit delay* berhubungan positif dengan adanya akuntan eksternal

– *Internal accounting*

Di Yunani, pengetahuan akuntansi tidak dijadikan syarat untuk menjadi staff yang bekerja di pemerintahan daerah, yang pada akhirnya, pegawai di departemen keuangan tidak memiliki kualifikasi akuntansi profesional. Tim dari internal akuntansi harus melaksanakan fungsi accounting yang diharapkan mendukung auditor dalam tugas-tugas mereka. Hal ini bisa mengakibatkan menghabiskan waktu untuk melakukan kepatuhan dan substantif tes.

H₇: *Audit delay* berhubungan negatif dengan ada tidaknya internal accounting.

– Remarks

Pernyataan yang disajikan di dalam laporan audit mengenai penyimpangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum/undang-undang yang relevan. Di Yunani terdapat banyak sekali kualifikasi yang harus dipatuhi hal ini bisa memperpanjang proses auditor ketika auditor menemukan penyimpangan dan sebagian karena auditor memerlukan banyak waktu mengaudit transaksi sebagai pertahanan terhadap litigasi dimasa depan.

H₈: *Audit delay* berhubungan positif dengan pernyataan audit

– Auditor

Bukti empiris mengungkapkan bahwa perusahaan multi-nasional dan reputasi audit yang baik akan lebih memerlukan waktu sedikit untuk memberikan layanan jasa. Hal ini karena mereka mempunyai staf yang terlatih yang sudah terbiasa menggunakan teknologi terkait proses audit. Di Yunani terdapat SOL (Akuntan publik bersertifikat-Auditor) yang didirikan tahun 1993.

H₉: *Audit delay* berhubungan positif dengan praktek audit lokal.

Metodologi Penelitian

Sampel dalam penelitian ini terdiri 914 pemerintah daerah di Yunani, namun hanya 577 yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sample terdiri 116 pemerintah daerah dalam

kurun waktu 2 tahun (2006-2007). Data-data keuangan diperoleh dari hardcopy atau salinan elektronik.

Hasil dan Analisis Empiris

1. Hasil dari analisis regresi menunjukkan modelnya penelitian hanya menunjukkan 19,9% yaitu tidak terlalu besar. Namun variable partai politik bersignifikan dengan *audit delay*. Karena struktur politik paling berkompetitif dalam masalah keuangan.
2. Pemilihan walikota bersignifikan hal ini menunjukkan bahwa auditor berurusan dengan beban kerja bertambah karena harus melakukan audit tambahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap harta dari wali kota terpilih untuk bisa mengkonfirmasi kecurigaan dengan alasan yang berhubungan pada pra-pemilihan pemilu.
3. Keberadaan internal accounting memiliki hasil yang signifikan karena berhubungan dengan proses ketepatan dalam mengaudit. Keberadaan tim internal accounting sebagai komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

Kesimpulan

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa telah terjadi keterlambatan audit di pemerintah daerah Yunani padav tahun 2006-2007.
2. Hasil analisis regresi menunjukkan oposisi politik, pemilihan kembali walikota, populasi, akuntansi internal, akuntansi berbasis akrual, audit remark merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam *audit delay*.

3. Adanya pengaruh KAP big 4 atau ketergantungan pada audit lokal (SOL) dan berhubungan dengan biaya dan berpengaruh pada terjadinya *audit delay*.
4. Keterbatasan penelitian ini adalah tahun yang diobservasi hanya dua tahun yaitu 2006-2007, peraturan dan undang-undang kurang dijelaskan secara terperinci dalam kaitannya dengan *audit delay*
5. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan faktor-faktor lain seperti karakteristik auditor professional agar bisa mempengaruhi keputusan yang relevan sebagai subject penelitian selanjutnya.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Auditor Decision-Making in Different Litigation Environments : The Private Securities Litigation Reform Act, Audit Reports and Audit Firm Size*

Penulis : Marshall A. Geiger, K. Raghundan, Dasaratha V. Rama

Latar Belakang

1. Efek dari Reformasi Undang-undang diakhir Desember 1995 dan secara signifikan mengubah litigasi dilingkungan akuntansi perusahaan Amerika Serikat.
2. Motivasi penelitian ini adalah fokus pada audit perusahaan dalam pengambilan keputusan regulasi maupun legislatif.
3. Penelitian ini membahas mengenai efek ukuran audit yang berbeda diperusahaan karena mengadopsi Undang-undang

reformasi, dalam studi ini peneliti memeriksa apakah undang-undang reformasi menghasilkan efek differensial.

4. Melalui laporan audit terkait, ditemukan bahwa KAP secara signifikan melakukan modifikasi opini audit setelah adanya undang-undang reformasi.

Pengembangan Hipotesis

1. Dalam penelitian ini berharap bahwa auditor mengurangi kemungkinan melakukan modifikasi pada laporan keuangan dalam undang-undang reformasi dari periode sebelumnya untuk periode selanjutnya.
2. Peneliti memperoleh pengaruh penurunan litigasi pada berbagai pengambilan keputusan manajemen perusahaan dengan memeriksa opini audit sebelum dan setelah adanya reformasi penting dari undang-undang.
3. H_a : kantor akuntan publik *big 6* mengurangi kecenderungan untuk mengeluarkan modifikasi laporan *going concern* sealah diberlakukannya undang-undang reformasi.

Metodologi Penelitian

1. Peneliti menggunakan kepailitan sebagai indikasi perusahaan yang gagal dan kasus auditor yang mengeluarkan pendapat *going concern* yang telah dimodifikasi sebelumnya.
2. Peneliti menemukan perbedaan kecenderungan modifikasi laporan sebelum dan setelah adanya reformasi undang-undang
3. Metode penelitian ini menggunakan model regresi logistik multivariance, variabel nya adalah jenis laporan audit, variabel indikatornya adalah KAP Big6 dalam mengendalikan ukuran perusahaan.

Pembahasan

Sensitivity and additional analyses

1. *Big 6 non-Big 6 analyses*

Hasil menunjukkan KAP big 6 lebih kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan pendapat *going concern* yang dimodifikasi setelah undang-undang reformasi dibandingkan sebelum adanya reformasi, sedangkan KAP non big 6 dalam mengeluarkan pendapat yang dimodifikasi karena relatif lebih konservatif dalam mengambil keputusan laoran dalam periode sebelum undang-undang reformasi.

2. *Client Size*

Peneliti akhirnya menggunakan 404 perusahaan yang digunakan untuk kantor akuntan big 6 dan 116 untuk KAP yang tidak termasuk dalam big6.

3. *Changes in client risk portfolios*

KAP big6 memiliki hasil yang signifikan dalam perubahan dan modifikasi laporan audit antara sebelum dan sesudah reformasi undang-undang dibandingkan dengan KAP yang tidak termasuk ke dalam big6

4. *Cut-off dates*

Adanya perubahan isi laporan audit dari sebelum dan sesudah adanya reformasi undang-undang oleh pemerintah.

Kesimpulan

1. Studi ini meneliti apakah perubahan lingkungan litigasi akan memberi dampak keputusan dari pelaporan audit di KAP big 6 dan non big 6.

2. Hasil analisa peneliti memberikan bukti bahwa pada periode 1991-2001 adanya modifikasi laporan *going concern* pada saat undang-undang reformasi secara signifikan mempengaruhi keputusan pelaporan pada KAP big 6 tetapi tidak pada KAP non big 6 .
3. Adanya keputusan tentang modifikasi pelaporan audit akan berkontribusi terhadap pengetahuan kita reformasi undang-undang pada pelaporan audit perusahaan.
4. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa reformasi undang-undang mungkin memiliki ligitais yang penting untuk kebutuhan profesi akuntan publik di masa mendatang.

BAB IV

ETIKA PROFESIONAL

Definisi Etika

Etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan menegakkan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga memiliki arti norma, nilai, prinsip dan kaidah serta ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan sebab akibat dan baik buruknya. Etika merupakan suatu refleksi dari sebuah pengendalian diri karena segalanya dilakukan dan diterapkan untuk kepentingan sosial.

Tidak setiap hal yang berkaitan dengan perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, sistematis dan sesuai dengan metode yang ada, sehingga etika dapat dikatakan sebagai ilmu dimana objeknya adalah tingkah laku manusia.

Tujuan Penerapan Etika

Dalam penerapannya, etika memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Untuk memperoleh kesamaan konsep mengenai penilaian baik atau buruknya perilaku manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
2. Mengarahkan masyarakat untuk menjadi lebih tertib, teratur dan harmonis.
3. Membuat orang bersikap kritis dan lebih rasional dalam mengambil keputusan.
4. Etika merupakan sarana untuk memberikan orientasi pada hidup manusia
5. Menuntun manusia untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab.
6. Etika dianggap sebagai norma yang dianggap berlaku.
7. Dalam etika juga mengatur bagaimana menghormati hak orang lain, hak lembaga, dll.

Etika umum berusaha mendefinisikan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain tujuan penerapannya, terdapat pula alasan mengapa etika diperlukan, yaitu:

1. Saat ini kita hidup di lingkungan yang semakin pluralistis, sehingga dengan etika akan mampu membantu kita menyikapi keberagaman yang ada.
2. Lingkungan kita tinggal adalah lingkungan dengan masa transformasi masyarakat. Transformasi bisa berupa transformasi budaya, transformasi ekonomi dan transformasi intelektual. Dalam hal ini, etika akan membantu kita agar tidak kehilangan orientasi.

3. Banyak munculnya ideologi-ideologi baru, sehingga dengan kita akan membantu kita menyikapi munculnya ideology-ideologi tersebut agar tidak mudah terpancing.

Jenis Etika

1. **Etika Deskriptif.** Etika jenis ini berkaitan dengan nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan realitas yang telah menjadi bagian budaya dalam kehidupan masyarakat. Etika deskriptif memberikan gambaran mengenai fakta yang selalu berkembang di masyarakat, tanpa adanya interpretasi yang lugas.
2. **Etika Normatif.** Etika normatif memberikan penilaian sekaligus menjadikan norma sebagai dasar dalam memutuskan suatu tindakan. Macam-macam norma dalam etika normative, yaitu:
 - a. Norma kesopanan, menyangkut bagaimana tata cara hiduo dan pergaulan sehari-hari.
 - b. Norma hukum, memiliki konsekuensi yang tegas karena diatur oleh adanya suatu peraturan dengan memiliki jaminan hukuman bagi siapa saja yang melanggar.
 - c. Norma moral, sering digunkan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia.

Macam-Macam Etika

1. **Etika Umum.** Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori etika yang ada.

2. **Etika Khusus.** Etika ini merupakan penerapan dari prinsip moral dasar dalam bidang-bidang kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi:
 - a. **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia kepada dirinya sendiri.
 - b. **Etika soisal**, yaitu etika yang menyangkut kewajiban dan perilaku manusia didalam masyarakat. Etika sosial terdiri atas etika komunikasi, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan dan etika ideology.

Sistem Penilaian Etika

1. Etika dipandang sebagainsuatu ilmu.
2. Etika sebagai perbuatan seseorang yang telah menjadi sifat baginya, atau yang disebut akhlak dan budi pekerti.
3. Perbuatan manusia dinilai dengan tiga tingkatan, yaitu adanya rencana (niat), perbuatan (pekerti), hasil perbuatan tersebut (baik dan buruk).

Menurut Josephson Institute (Arens, 2008), ada enam nilai terkait perilaku etis, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*), yang mencakup: (a) kejujuran; (b) integritas; (c) reliabilitas; dan (d) loyalitas.
2. Penghargaan (*respect*), mencakup: (a) kepantasan (*civility*); (b) kesopnan santunan; (c) kehormatan; (d) toleransi; dan (e) penerimaan.
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yang berarti seseorang akan berusaha untuk menahan diri dalam melakukan tindakan

4. Kelayakan (*fairness*), yang mencakup: (a) adanya persamaan penilaian; (b) sikap netral atau tidak memihak; (c) proporsionalitas; dan (d) keterbukaan.
5. Perhatian (*caring*), berarti seseorang memiliki kesungguhan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat.
6. Kewarganegaraan (*citizenship*), mencakup kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara agar kehidupan di dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Dilema Etika

Merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang saat memutuskan perilaku seperti apa yang harus dan yang tepat untuk dia lakukan. Ada beberapa rasionalisasi yang umum digunakan sehingga menghasilkan tindakan yang tidak etis, yaitu:

1. **bahwa setiap orang juga melakukan tindakan yang sama**, pernyataan ini memiliki arti bahwa jika suatu perilaku yang tidak etis tersebut secara umum dilakukan, maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar.
2. **jika tindakan tersebut sah menurut hukum, maka hal tersebut dianggap etis**, pernyataan ini berarti bahwa semua perilaku yang dianggap sah menurut hukum merupakan perilaku yang etis yang berdasarkan pada kesempurnaan hukum. Padahal sebenarnya hukum berbeda dengan etika.
3. **kemungkinan penemuan dan konsekuensinya**, pernyataan ini berdasarkan pada evaluasi atas kemungkinan bahwa individu lain akan menemukan dan melakukan perbuatan

tersebut dan akan mengetahui seberapa besar konsekuensi yang akan diterimanya.

Selain itu, terdapat beberapa pendekatan untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu sebagai berikut:

1. memperoleh fakta yang relevan
2. mengidentifikasi isu etika berdasarkan fakta tersebut.
3. menentukan apa dan siapa yang akan terkena pengaruh dari dilema tersebut
4. mengidentifikasi alternative yang tersedia untuk menyelesaikan dilemma tersebut
5. mengidentifikasi konsekuensi yang terjadi dari masing-masing alternative.
6. memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis seseorang dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi dan menerapkan prinsip-prinsip moral dasar dan norma etis umum yang berkaitan dengan profesi di dalam kehidupan manusia.

Etika profesi selalu berkaitan dengan bidang pekerjaan seseorang sehingga sangat perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Setiap etika profesi pasti akan memiliki konsep etika yang telah ditetapkan dan disepakati pada masing-masing tatanan profesi dan ruang lingkup tertentu. Dengan etika profesi diharapkan para professional dapat bekerja sebaik mungkin dan bertanggung jawab atas tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan profesinya.

Prinsip Dasar Etika Profesi

1. **Tanggung jawab**, yang meliputi:
 - a. Selalu berusaha melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di dalam pekerjaannya.
 - b. Selalu memikirkan bagaimana dampak profesi tersebut untuk kehidupan di masyarakat.
2. **Keadilan**, prinsip keadilan berarti dalam melayani masyarakat sesuai profesi yang dimiliki tidak akan berat sebelah atau membedakan satu sama lain.
3. **Kompetensi**, dalam prinsip ini berarti seseorang akan melakukan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dan kompetensi yang dimiliki dengan penuh ketekunan.
4. **Perilaku Profesional**, Seseorang akan menjalankan profesinya selalu konsisten dan menjaga reputasi profesinya.
5. **Kerahasiaan**, seorang profesional akan menjaga informasi kerahasiaan dari klien dan tidak akan menyebarluaskan tanpa seijin klien.

Kode Etik Profesi

Merupakan suatu sistem norma, nilai dan aturan professional yang tertulis yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional di bidang tertentu. Tujuan kode etik adalah agar seorang professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Kode etik memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) kontrol social; (2) mencegah adanya campur tangan pihak yang tidak berkepentingan; dan (3) mencegah terjadinya konflik dan benturan kepentingan

Etika Professional Akuntan Publik

Seorang akuntan di Indonesia di dalam menjakankan profesinya telah diikat dengan suatu kode etik profesi yang merupakan pedoman bagi para akuntan publik saat berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan masyarakat. Kode etik akuntan juga merupakan sarana bagi para pemakai laporan keuangan atau masyarakat tentang penilaian kualitas dan mutu atas jasa professional yang telah diberikannya melalui serangkaian pertimbangan etika sesuai aturan dalam kode etik profesi. Terdapat lima aturan etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik, yaitu:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

- a. **Independensi.** Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik harus mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa professionalnya. Independensi terdiri dari Independensi dalam fakta (*independence in fact*), yaitu seorang auditor benar-benar mampu mempertahankan independensinya selama proses audit, dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), yaitu apabila independensi seorang auditor ada secara fakta, namun klien meyakini bahwa auditor tersebut memberikan nasehat atau konsultasi dengan klien.
- b. **Integritas.** Seorang akuntan publik harus tetap mengedepankan integritas dengan bebas dari benturan kepentingan.
- c. **Objektivitas.** Seorang akuntan publik tidak boleh mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain atau

bersikap berat sebelah karena mengetahui adanya fakror salah saji material.

2. **Standar Umum dan Prinsip Akuntansi**, yang terdiri dari:
 - a. **Kompetensi professional.** Seorang akuntan publik hanya diijinkan untuk emlakukan opemberian jasa professional sesuai dengan kecermatan dan keseksamaan professional.
 - b. **Kecermatan dan keseksamaan professional**
 - c. **Perencanaan dan supervise.** Setiap akuntan publik diwajibkan untuk melakukan perencanaan dan supervise setiap memberikan jasa profesionalnya.
 - d. **Data relevan yang memadai.** Setiap akuntan publik wajib memperoleh data yang relevan dan memadai untuk menjadi dasar yang layak untuk pengambilan keputusan dan rekomendasi sesuai dengan jasa profesionalnya.
 - e. **Kepatuhan terhadap standar yang berlaku.** Setiap akuntan publik diwajibkan mematuhi standar yang ada dalam melaksanakan setiap jasa profesionalnya.
3. **Tanggung Jawab Kepada Klien**, meliputi:
 - a. **Rahasia informasi klien.** Seorang akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun tanpa seijin klien.
 - b. **Fee professional.** Besarnya fee seorang kauntan publik berdasarkan pada: risiko penugasan professional, kompleksitas jasa yang diminta klien, tingkat keahlian sesuai penugasan tersebut, struktur biaya di KAP dan banyak pertimbangan professional lainnya.
 - c. **Fee Kontinjen.** *Fee* ini ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional sesuai dengan hasil tertentu atau

temuan yang dihasilkan oleh seorang akuntan publik. Seorang akuntan publik dilarang untuk menetapkan fee kontinjen jika hal tersebut mampu mempengaruhi independensi.

4. **Tanggung Jawab Kepada Seprofesi**, meliputi:
 - a. Akuntan publik wajib menjaga citra dan nama baik profesi dengan tidak melakukan tindakan yang mampu menjatuhkan kredibilitas profesi akuntan publik.
 - b. Akuntan publik wajib melakukan komunikasi tertulis dengan akuntan publik lain jika berkaitan dengan penggantian penugasan audit
5. **Tanggung jawab dan praktek lain.** Seorang akuntan publik diperkenankan melakukan promosi, selama tidak menurunkan citra dan kredibilitas akuntan publik.

Peraturan Perilaku

ATURAN	Diterapkan Pada	
	semua CPA	CPA dalam KAP
Independensi, Integritas, Objektivitas		v
Independensi		
Integritas dan objektivitas	v	
Standar Umum dan Prinsip Akuntansi		
standar umum	v	
kepatuhan terhadap standar	v	
prinsip-prinsip akuntansi	v	
Tanggung jawab kepada klien		
informasi rahasia klien		v
honor Kontinjen		v
tanggung jawab seprofesi		
tanggung jawab dan praktek lainnya		
tindakan yang mendiskreditkan	v	
periklanan dan bentuk solisitasi lainnya		v
komisi dan honor referal		v
bentuk organisasi dan nama		v

Delapan Etika Profesional Akuntan Publik oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

- 1. Tanggung Jawab Profesi.** Setiap akuntan publik harus selalu menggunakan pertimbangan profesional dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya mengingat peran penting seorang akuntan publik. Seorang akuntan publik juga harus bertanggung jawab kepada pemakai jasa profesional mereka. Akuntan publik juga harus bertanggung jawab dengan sesama akuntan publik lainnya untuk senantiasa mengembangkan profesi akuntansi, selalu memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan mengatur diri pribadi untuk selalu bertanggung jawab setiap menjalankan tugas profesionalnya.
- 2. Kepentingan Publik.** Salah satu ciri utama suatu profesi adalah kesediaan untuk penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan publik memiliki peranan yang penting, tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada kreditur, pemerintah, investor, pemberi kerja, masyarakat luas yang bergantung pada bisnis dan keuangan yang akan bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan publik dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh mereka.
- 3. Integritas.** Integritas merupakan salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Dengan integritas, akuntan publik diharuskan untuk selalu bersikap jujur, tanpa memihak pihak manapun, maupun memiliki benturan kepentingan. Integritas adalah kualitas yang melatar belakangi adanya kepercayaan publik dan merupakan *benchmark* bagi akuntan publik dalam menguji keputusan yang diambilnya.

4. **Objektivitas.** Setiap akuntan publik diwajibkan untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Objektivitas juga berarti berlaku adil, tidak memihak ke[ada pihak manapaun dan jujur secara intelektual. Apapun jasa dan kapasitas yang dimiliki oleh akuntan publik, skuntan publik tetap harus menjaga integritas dan objektivitas dalam pekerjaannya.
5. **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.** Setiap akuntan publik dituntut untuk selalu berhati-hati, memiliki kompetensi dan wajib untuk mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya dan memastikan bahwa klien telah memperoleh manfaat dari jasa professional sesuai dengan yang diharapkan, serta tetap mempertahankan konsistensi dan mempertanggungjawabkan profesinya kepada publik. Jika akuntan publik menerima penugasan professional yang melebihi kompetensinya, maka akuntan publik tersebut wajib untuk melakukan konsultasi atau bahkan menyerahkan penugasan tersebut kepada anggota akuntan publik yang lain yang lebih kompeten. Setiap akuntan publik harus mampu menilai kompetensi yang dimiliki dan memiliki apakah kompetensi yang dimiliki masih memadai untuk melakukan penugasan profrsional.
6. **Kerahasiaan.** Setiap akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional. Setiap akuntan publik tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat persetujuan dari klien, kecuali bahwa informasi tersebut boleh diungkapkan berkaitan dengan hak dann kewajiban

secara hukum. Bahkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini berlaku sampai penugasan profesionalnya berakhir. Standar profesi telah mengatur sifat dan luas cakupan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan profesional.

7. **Perilaku Profesional.** Seluruh akuntan publik harus berlaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan reputasi profesi akuntansi. Hal ini sebagai perwujudan tanggung jawab kepada klien, pihak ketiga, staf maupun masyarakat umum.
8. **Standar Teknis.** Seluruh akuntan publik harus berpedoman pada standar teknis dan standar profesional yang relevan dan berlaku dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selalu berhati-hati, menjaga integritas, objektivitas dan memelihara kompetensinya dalam melaksanakan penugasan.

Aturan dan Larangan Tentang Independensi Bagi Seorang Akuntan Publik Berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act* dan SEC (*Security and Exchange Commission*)

1. **Jasa Non-Audit.** Seorang akuntan publik dilarang memberikan dua jasa profesional secara bersamaan namun saling mempengaruhi independensi, misalkan seorang auditor yang sedang mengaudit perusahaan seorang klien, bertindak juga sebagai konsultan manajemen.
2. **Komite Audit.** Sarbox mewajibkan independensi bagi anggota komite audit yang beranggotakan tiga sampai lima orang dewan direksi yang tugas utamanya adalah mengawasi auditor agar tetap independen.

3. **Konflik dari Hubungan Personalia.** Menurut SEC mauoun Sarbox kantor akuntan publik dianggap tidak bisa menjaga independensinya jika klien yang diaudit adalah mantan partner, principal maupun pemegang saham dari kantor KAP dimana auditor tersebut bernaung.
4. **Rotasi Partner.** Aturan SEC menyebutkan bahwa pimpinan dan partner audit harus dirotasi setelah lima tahun melakukan penugasan audit.
5. **Kepentingan Kepemilikan.** Aturan SEC melarang para akuntan publik menerima penugasan dari klien yang masih memiliki hubungan dekat dengan para akuntan publik tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan untuk mempengaruhi independensi.

Contoh Dilema Etika yang Dialami oleh Seorang Auditor

Jika seorang klien mengancam akan mencari auditor baru apabila auditor sekarang tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal sesuai dengan hasil audit, pendapat tersebut tidak dapat dikeluarkan. Maka sebaiknya, seorang auditor tetap harus menjaga independensi dan integritasnya mengingat begitu pentingnya opini audit. Opini audit tentang kewajaran suatu laporan keuangan merupakan suatu informasi yang sangat sensitive dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu, auditor juga harus mengingat konsekuensi yang diterima apabila tetap mempertahankan klien dengan syarat seperti di atas.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *The Code of ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992-2002*

Penulis : Emmanouil Dedoulis

Latar Belakang

1. Adanya Anglo-accountancy di Amerika yang menjadi perhatian politik dunia.
2. Anglo Accountancy adalah model profesi akuntansi yang kuat, peran pemerintah yang terbatas dan mementingkan pasar sekuritas
3. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana profesi akuntansi di Yunani merespon dibentuknya kode etik dan tindakan disipliner untuk memperbaiki citra dan kredibilitas organisasi profesi akuntansi.
4. Adanya latar belakang restrukturisasi politik dan ekonomi Yunani yang menggunakan Anglo-amerika (AS dan Kanada).
5. Adanya kasus Enron menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi.

Understanding the role of the Code of Ethics in the advancement of the local

1. Ulasan literature:
 - a. Adanya pendekatan konvensional yang bergantung pada pandangan mengenai profesi akuntansi.
 - b. Adanya pandangan tentang pengaruh kelompok organisasi dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

2. Kode etik akuntan diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang dirancang untuk aturan yang bersifat mengikat.
3. Menurut Meigs (1989) berpendapat bahwa kode etik adalah unsure utama profesi yang berisi pedoman bagi tindakan disiplin anggota profesi.

The politic economic context of Greece in the period 1992-2002 and the restructuring of the profession

1. Pada tahun 1995 audit SOL (standard audit Yunani) telah dimasukkan ke dalam sistem terpusat di pemerintahan.
2. Perubahan politik Yunani pada tahun 1990 mengakibatkan adanya restrukturisasi SOL dan perubahan lembaga pemerintahan untuk memenuhi tuntutan pemegang saham, manajemen, pemilik perusahaan dan kreditur untuk memperoleh informasi keuangan yang andal.
3. Menurut kepres 226/1992 telah diubah oleh kepres 341/1997 dilakukan oleh Dewan Pengawas SOE dimasukkan kedua anggota Sol dan anggota multinasional audit perusahaan yang telah berlatih di Yunani dan mendirikan sebuah asosiasi dikenal sebagai SELE.

Inter-professional rivalries and the formulation of the Code of Ethics

1. Pada tahun 1990-an, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kantor audit adalah adanya persaingan diantara para anggotanya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggota yang signifikan. Peningkatan anggota ini adalah penggabungan dari auditor local dan multinasional. Sedikit perubahan pada peraturan membuat para auditor makin kompetitif.

2. Untuk menjaga kepentingan para auditor ini, mereka memutuskan untuk mendirikan organisasi, beberapa auditor memutuskan untuk tetap bergabung dengan organisasi SOL, dan sebagian lainnya mendirikan kantor praktek independen.
3. Organisasi audit juga berperan di dalam ekonomi Yunani, seperti pemerintah Yunani menarik kembali peraturan mengenai liberalisasi pasar dan tidak lagi mempersulit proses audit.
4. Adanya persaingan yang ketat diantara para auditor menyebabkan banyaknya tekanan untuk memenuhi tuntutan para klien, selain itu juga terdapat persaingan dalam penetapan fee. Para auditor juga menggunakan berbagai cara akan nantinya dipilih kembali oleh klien.
5. Jika para auditor berlomba-bersama untuk tetap memperoleh klien atau mempertahankan kliennya dengan berbagai cara, maka keandalan dan kualitas informasi yang dihasilkan pun turut diragukan.
6. Pada tahun 1996, organisasi profesi mulai khawatir dengan kegiatan yang dilakukan oleh para auditor dan menjadi sorotan media. Ada empat kelompok auditor:
 - a. Sangat sedikitnya auditor yang melakukan audit sesuai dengan standar audit dan peraturan
 - b. Banyaknya auditor yang tidak melakukan prosedur audit secara lengkap
 - c. Auditor yang tidak memberikan opini yang seharusnya walaupun menemukan adanya penyimpangan
 - d. Auditor yang memodifikasi laporan keuangan klien sehingga informasi laporan keuangan terkesan akurat.
7. Dengan demikian banyak pihak yang menyatakan bahwa profesi auditor sedang mengalami krisis. Sehingga

- pemerintah akan mengatur kerangka peraturan yang akan mengatur keanggotaan dalam organisasi profesi auditor.
8. Pada pertengahan 1990an, pemerintah Yunani menyiapkan rancangan peraturan untuk etika profesi akuntan. Rancangan peraturan ini akan disesuaikan dengan struktur dan budaya Yunani, seperti adanya kebebasan, kerahasiaan, hubungan dengan rekan kerja, promosi dan kepatuhan.
 9. Rancangan peraturan ini disusun dengan memperhatikan ruang lingkup dan sifat organisasi auditor di Yunani. Rancangan aturan ini berjudul "Peraturan Etika Profesional".
 10. Kode etik akan memberikan kerangka untuk mengatur para anggota agar para auditor dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tepat, memberikan pengawasan mengenai penugasan dan pekerjaan pada auditor, apakah auditor telah memenuhi peraturan dan standar yang ada.

The impact of the Enron episode and the responses of the Greek profession

1. Setelah runtuhnya Enron, penggunaan kode etik di Yunani dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap praktek profesional akuntan publik. Auditor dituntut untuk mampu mendeteksi kecurangan dan memprediksi risiko kebangkrutan.
2. Kondisi ekonomi di suatu negara juga bergantung salah satunya pada informasi yang dihasilkan oleh auditor.
3. Semenjak adanya kasus Enron, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menjadi menurun. Oleh karenanya diperlukan kode etik yang mengatur profesi akuntansi. Pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dipatuhi dan benar-benar dijalankan.

Pembahasan

1. Dengan focus pada penerapan kode etik profesi akuntansi didalam perekonomian negara berkembang, maka di dalam penelitian ini disebutkan kode etik tersebut lambat untuk diaplikasikan atau dipraktakan.
2. Satu hal yang menarik dalam perumusan kode etik ini dilakukan secara tertutup tanpa keterlibatan pihak lain seperti auditee, pengguna informasi keuangan, stake holder dan pejabat negara.
3. Ruang lingkup kode etik profesi ini antara lain pertama adalah agar organisasi profesi akuntan mampu mengendalikan dan mengawasi kegiatan para auditor serta memperkenalkan aturan kepatuhan yang harus dijalani dan dipatuhi oleh auditor. Kedua, adalah membatasi akuntabilitas akuntan publik agar tidak terlalu luas cakupannya.
4. Kode etik juga diaplikasikan setelah terjadinya kasus Enron untuk menghadapi krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat.
5. Penelitian ini telah berusaha untuk menunjukkan bahwa adanya metode pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi penerapan kode etik dalam organisasi profesi akuntan di Yunani.
6. Kode etik dibuat karena adanya pengaruh imperalisme, peraturan politik dan ekonomi serta adanya persaingan antara auditor. Kode etik juga dipandang sebagai strategi untuk memperbaiki citra profesi auditor di mata masyarakat.

2. Artikel Kedua

Judul : *The Accounting Profession's Code of Ethics: Is It A Code of Ethics or A Code of Quality Assurance?*

Penulis : Sivakumar Velayutham

Latar Belakang

1. Kode etik profesi akan memberikan jaminan kepada publik dan bertanggung jawab terhadap integritas dan reputasi akuntan publik.
2. Kode etik profesi akuntan akan berfokus dan bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat mengenai jasa profesi yang diberikan.
3. Penelitian ini didasarkan pada evaluasi kode etik dari Institusi Of chartered accountants selandia baru (ICANZ) dan ASCPA.
4. Penelitian ini akan menjawab banyak pertanyaan mengenai apakah isi dan focus dari kode etik profesi akuntansi?
5. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai fitur dan konsep dari etika, kualitas dan jaminan mutu.

The concern of ethics and quality

1. *Ethics*

Menurut Frankena (1973) membedakan ada 3 jenis pemikiran atau pendekatan tentang filsafat moral yaitu:

Menurut Frankena (1973) ada 3 jenis pendekatan tentang filsafat moral yaitu:

- a. Deskripsi empiris untuk menjelaskan fenomena moralitas dan kejadian yang dilakukan oleh antropologi dan sosiologi.
- b. Normatif yaitu penilaian baik dan benar
- c. *Analytical* atau etis berpikir dengan logis atau epistemologis, yaitu bagaimana moral itu dinilai.

Etika sering disebut sebagai moralitas dan mengacu pada kode moral atau teori normatif individu atau kelompok.

Dasar etika:

- a. Universal tentang kode etik yang berlaku untuk anggota profesi
- b. Sebagai perspektif, pernyataan dalam kode etik yang diwujudkan dalam Tindakan
- c. Aturan dan prinsip harus yang mengatur perbuatan benar dan salah

Menurut Frankena (1976), penilaian formatif:

- a. Didukung fakta yang digambarkan dalam tindakan dan karakter
- b. Merupakan sudut pandang tertentu dalam menghadapi sesuatu
- c. Suatu tindakan responsive

2. *Quality*

Di dalam Oxford's Dictionary, kualitas didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Smith (1993) mendefinisikan kualitas sebagai properti atau atribut mengacu pada karakteristik.

Kualitas tidak langsung diukur tetapi melewati penilaian proses.

Garvin mengidentifikasi 8 dimensi kualitas dalam menyediakan kerangka berpikir tentang elemen dasar kualitas :

- a. Kinerja, mengacu pada karakteristik operasi utama dari produk
- b. Fitur, karakteristik sekunder yang melengkapi fungsi produk dasar
- c. Keandalan, mencerminkan kemungkinan produk yang gagal dalam jangka waktu tertentu
- d. Kesesuaian, tingkatan dimana sebuah produk didesain dan karakteristik operasi sesuai dengan standar yang ditetapkan
- e. Daya tahan, ketahanan atau masa dimana produk dapat digunakan
- f. Kecepatan pelayanan, kesopanan dan kompetensi dalam pengiriman produk
- g. Estetika, bagaimana produk di desain
- h. Kualitas yang dirasakan, persepsi produk berdasarkan gambar dan iklan

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai jaminan kualitas sebagai tanggung jawab organisasi profesional melalui pengembangan standar profesional dan bijaksana.

Manajemen mutu akuntansi diperusahaan akan lebih fokus terhadap keunggulan kompetitif, termasuk dalam proses perencanaan. Jaminan mutu merupakan pendekatan yang digunakan oleh manajer untuk memenuhi tuntutan kualitas.

Tujuan dari kualitas adalah kesesuaian produk, layanan dan proses produk sampai pada konsumen dipastikan telah memenuhi standar. ISO merupakan contoh standar jaminan kualitas yang paling populer.

Di dalam standar kualitas, sebuah produk akan dipastikan akan sesuai dengan prosedur produksi, meliputi proses desain, pengembangan, proses produksi dan pelayanan.

Comparison

1. Perbedaan konsep etika dan kualitas:
 - a. Etika berkaitan dengan aturan dan berdampak pada kehidupan, sedangkan kualitas berfokus pada produk dan jasa.
 - b. Etika mengatur hubungan antar individu, sedangkan tidak ada aturan tentang kualitas.
 - c. Etika memiliki persyaratan yang spesifik mengenai apa yang baik dan buruk, sedangkan etika tidak.
 - d. Etika adalah sebuah sikap, sedangkan kualitas mempengaruhi selera terhadap produk dan layanan.
 - e. Etika seringkali diwujudkan dalam tindakan etis yang penilaiannya bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, sedangkan penilaian kualitas adalah berdasarkan individu (konsumen).
2. Menurut May (1975), kualitas pelayanan professional dapat disesuaikan dengan pendekatan perjanjian atau pendekatan kontrak.

Kode Etik ICANZ dan ASCPA

1. ICANZ menggunakan Code of Ethics (COE) sementara ASCPA menggunakan Code of Professional Conduct (CPC).
2. CEO & CPC terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:
 - a. Pembukaan, yang berisi tujuan kode etik, penerapan dan kepatuhan. Menekankan semua anggota untuk

melaksanakan kode disipliner jika terjadi penyimpangan terhadap peraturan kepatuhan.

- b. Prinsip-prinsip, berisi prinsip dasar perilaku yang etis dan profesional
 - c. Ketentuan etika COE atau pernyataan hukum CPC
3. COE ICANZ dan CPC ASCPA berisi prinsip-prinsip dasar yaitu:
- a. Kepentingan umum
 - b. Integritas
 - c. Objektivitas dan kebebasan
 - d. Kompetensi dan kehati-hati
 - e. Profesionalisme
 - f. Kepatuhan terhadap standar teknis
 - g. Kerahasiaan.

Masing-masing dari prinsip-prinsip di atas disertai dengan paragraf pendek penjelasan CEO dan CPC.

4. Pernyataan peraturan dibagi kedalam 4 kelompok:
- a. Berlaku untuk semua anggota kelompok profesi
 - b. Berlaku untuk anggota yang menyediakan layanan akuntansi publik, termasuk untuk biaya profesional
 - c. Berpegang pada prinsip tentang aspek dari perilaku profesional, termasuk dalam kepatuhan akuntansi, auditing, perpajakan, dan manajemen, konsultasi layanan standar.
 - d. Pernyataan profesional, termasuk penugasan profesional, klien, serta perubahan dalam janji profesional.
5. Evaluasi ICANZ dan ASCPA dalam kode etik berfokus pada profesi akuntansi berdasarkan struktur kode etik dan tujuan

dari kode etik itu. Ruland dan LindBlom (1992) menunjukkan bahwa akuntan terkadang memiliki konflik di dalam penugasannya untuk mematuhi peraturan profesional dan tugas untuk mengungkapkan informasi kepentingan umum.

6. Tujuan kerangka konseptual adalah memberikan informasi untuk membantu pengguna jasa professional akuntan publik. Menurut Garvin (1984) memiliki 8 dimensi kualitas, yang bisa mewakili dimensi kinerja terhadap produk atau layanan yang diukur. Komponen dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi) dan tambahan pernyataan (pernyataan kebijakan akuntansi, laporan auditor) mewakili fitur produk atau jasa.

From Etchic To Quality

1. Abott (1983) telah menunjukkan bahwa kode etik profesi merupakan sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat, literatur menjelaskan bahwa kode etik menyediakan legitimasi untuk kerja profesional. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kerja menghubungkan kegiatan profesional dan kesimpulan nilai dalam budaya otoritas kerja profesional. Aboot (1998) menunjukkan bahwa terdapat perubahan mendasar akibat profesi, legitimasi dan teknik legitimasi.
2. Setiap profesi harus memutuskan layanan apa yang akan diberikan dengan kualitas yang terjamin. Adanya identifikasi dan pengukuran terhadap kualitas layanan akan memungkinkan bagi tenaga professional untuk memastikan apakah jasa yang telah diberikan telah memenuhi standar kualitas yang ada.

Kesimpulan

1. Etika merupakan topic yang penting dalam praktek profesional dan pendidikan akuntansi. Begitu pula dengan kode etik profesi. Fokus utama pada kode etik adalah tanggung jawab moral.
2. Dalam penelitian ini menyediakan gambaran mengenai kode etik sebagai kualitas yang bisa diberikan oleh tenaga professional. Tujuan nya untuk bisa membedakan etika dan kualitas. Etika mengenai sikap sedangkan kualitas difokuskan pada produk dan jasa.

BAB V

TANGGUNG JAWAB AUDIT & TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan oleh auditor adalah untuk memeriksa kewajaran dalam semua hal yang material, poisisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Secara umum, tujuan audit diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Kelengkapan (*Completeness*)**, untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara actual telah dimasukkan.
2. **Ketepatan (*Accurancy*)**, untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat, rincian dalam saldo akun telah sesuai dengan buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
3. **Eksistensi (*Exixtence*)**, untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau

keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksin yang tercatat tersebut tidaklah fiktif.

4. **Penilaian (*Valuation*)**, untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi telah diterapkan dengan benar.
5. **Klasifikasi (*Classification*)**, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan tepat termasuk angka-angka terkait dengan saldo.
6. **Pisah Batas (*cut-off*)**, untuk memastikan bahwa transaksi yang berdekatan dengan tanggal neraca telah dicatat dalam tanggal yang tepat. Kemungkinan terjadi transaksi salah saji adalah nerkenaan dengan akun yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
7. **Pengungkapan (*Disclosure*)**, untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dengan penjelasan secara wajar yang terdapat dalam isi catatan kaki laporan keuangan tersebut.

Selain tujuan pelaksanaan audit seperti penjelasan di atas, terdapat empat kondisi audit laporan keuangan perlu dilakukan, yaitu:

1. **Pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*)**, bahwa laporan keuangan harus bersifat netral, informasi disajikan dengan tidak menguntungkan salah satu kelompok pengguna.
2. **Konsekuensi (*consequence*)**. Laporan keuangan berisikan informasi-informasi yang penting, dan tidak jarang menjadi satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, pengajuan

pinjaman, dan lain sebagainya. Sehingga para pengguna laporan keuangan menginginkan sebanyak mungkin data yang relevan.

3. **Kompleksitas (*Complexity*)**, dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja juga turut meningkat. Oleh karenanya, para pengguna informasi lappran keuangan mengandalkan auditor untuk menilai mutu informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan.
4. **Keterpencilan (*Remoteness*)**. Para pengguna laporan keuangan seringkali menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansiguna untuk memverifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu dan biaya. Sehingga untuk menghemat waktu, para pengguna mengandalkan laporan auditor untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Langkah – langkah untuk Mengembangkan Tujuan Audit

1. Memahami Tujuan serta Tanggung Jawab Audit

Tujuan audit adalah untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan serta menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Selanjutnya, untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan merupakan tanggung jawab audit. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Auditor yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh

kepastian yang layak bahwa salah saji, apakah yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, yang tidak material.

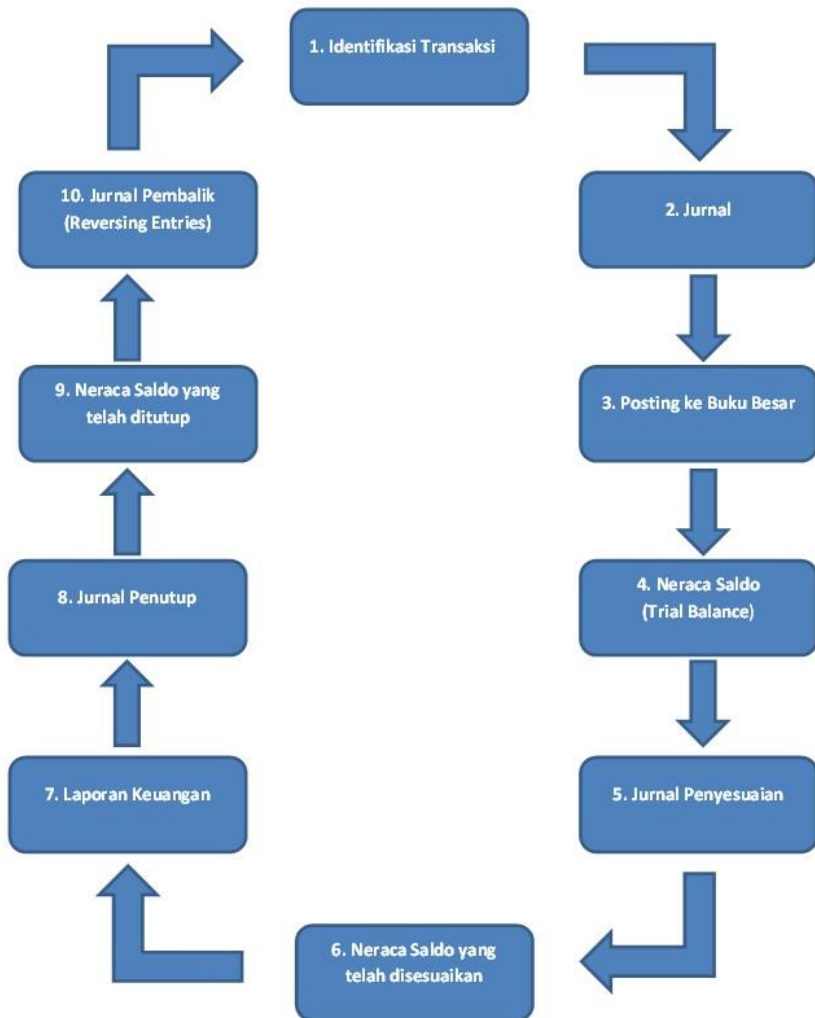
2. Membagi Laporan Keuangan Menjadi Beberapa Siklus

Pendekatan siklus (*cyclus approach*) merupakan cara yang digunakan dalam proses audit untuk tetap memoertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Penggunaan pendekatan siklus ini terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan.

Siklus akuntansi dimulai dari terjadinya transaksi sampai mempersiapkan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Seorang auditor harus memahami siklus dalam laporn keuangan sehingga mampu utnuk mendeteksi celah untuk melakukan kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Setelah mengetahui bagaimana siklus akuntansi secara umum, maka auditor akan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Siklus penerimaan kas, merupakan semua transaksi yang menyebabkan saldo kas bertambah. Contoh: transaksi penjualan tunai, pembayaran piutang, memperoleh uang kas yang bersumber dari hutang, dll.
- b. Siklus pengeluaran kas, yaitu semua transaksi yang menyebabkan saldo kas berkurang. Contoh : transaksi pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan, dll.

Masing-masing siklus dalam akuntansi ini akan diperlakukan secara terpisah dan secara independen selama proses audit sampai batas dalam pengelolaan audit yang rumit,



Gambar Siklus Akuntansi

3. Mengetahui Asersi Manajemen Tentang Laporan Keuangan.

Asersi merupakan sebuah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Asersi manajemen digolongkan:

- a. **Asersi Keberadaan atau Keterjadian.** Asersi ini tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah akun asset atau utang entitas benar-benar terjadi pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.
- b. **Asersi Kelengkapan.** Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan telah dicatatnya semua akun dan transaksi ke dalam laporan keuangan.
- c. **Asersi Hak dan Kewajiban.** Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan apakah akun asset (hak) dan hutang (kewajiban) telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar.
- d. **Asersi Penilaian dan Alokasi.** Asersi mengenai penilaian dan alokasi berhubungan dengan apakah akun asset, kewajiban, pendapatan dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang semestinya.
- e. **Asersi Penyajian dan Pengungkapan.** Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah seluruh komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan dengan seharusnya.

4. Mengetahui Tujuan Audit Umum Untuk Kelas Transaksi, Akun dan Pengungkapan.

Auditor melakukan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu dengan menguji transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapannya. Terdapat delapan tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, yaitu sebagai berikut:

- a. **Keterjadian**, semua jumlah saldo yang ada dalam laporan keuangan memang benar-benar ada.
- b. **Kelengkapan**, berkaitan dengan apakah jumlah saldo akun telah dicantumkan semuanya.
- c. **Keakuratan**, menyatakan bahwa semua jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar.
- d. **Klasifikasi**, apakah semua transaksi telah diklasifikasikan ke dalam akun yang tepat.
- e. **Cut off**, apakah semua transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Adanya kesalahan penyajian biasanya dikarenakan munculnya transaksi yang mendekati tanggal neraca.
- f. **Hubungan yang rinci**, memeriksa apakah rincian tiap-tiap saldo akun telah sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun pada buku besar.
- g. **Nilai yang dapat direalisasi**, nilai yang tercantum pada laporan keuangan merupakan nilai yang dapat direalisasi. Tujuannya apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih.

- h. **Hak dan kewajiban**, apakah akun asset (hak) dan hutang (kewajiban) telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar.

5. Mengetahui Tujuan Audit Khusus untuk Kelas Transaksi, Akun, dan Pengungkapan

Audit khusus biasanya memiliki tujuan yang hampir sama dengan audit umum. Audit khusus biasanya terdiri audit ketaatan dan operasional. audit khusus bertujuan melihat apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melihat operasional suatu entitas apakah telah berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Adapun aara untuk memenuhi tujuan audit, yaitu sebagai berikut:

- a. **Merencanakan dan Merancang Sebuah Pendekatan Audit.** Untuk setiap penugasan audit, terdapat banyak cara yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti untuk mencapai tujuan audit dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.
- b. **Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantive.** Pengendalian ini terkait dengan akurasi audit, dengan mengevaluasi dan memverifikasi catatan dan dokumen serta bukti audit.
- c. **Melakukan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo.** Prosedur analitis menggunakan perbandingan untuk menilai apakah saldo akun telah disajikan secara wajar dengan menguji rincian saldo. Prosedur ini dimaksudkan untuk menguji salah saji niominal saldo akun dalam laporan keuangan.
- d. **Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit.** Setelah auditor melaksanakan prosedur audit, maka

auditor akan menggabungkan informasi dari masing - masing prosedur dan tujuan audit untuk memperoleh kesimpulan secara menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Proses penarikan kesimpulan adalah hal yang bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian professional auditor.

Tanggung Jawab Audit

Tanggung Jawab Manajemen Menurut PSA 01 SA 110

“Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan sisi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan audit terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut

Tanggung Jawab Auditor menurut PSA 01 SA 110:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan”. Keyakinan memadai berarti bukan keyakinan yang absolute, menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Alasannya:

1. Sebagian besar bukti audit berasal dari pengujian sample populasi.
2. Penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, tentunya melibatkan ketidakpastian sehingga auditor harus mengandalkan bukti yang meyakinkan namun tidak menjamin sepenuhnya.
3. Sangat sulit bagi auditor untuk mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, terlebih lagi jika terjadi kolusi di dalam manajemen.

Tanggung Jawab auditor

1. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material dan tidak material

Auditor harus membedakan antara dua salah saji, yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Kekeliruan (*error*)

merupakan tindakan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang disengaja. Kecurangan (*fraud*) dibedakan antara menjadi:

- a. **Misappropriasi aktiva (*misappropriation of assets*)**, merupakan penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan karyawan.
- b. **Pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent financial reporting*)**, merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen selama proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mampu mendeteksi kecurangan ini, auditor dituntut untuk memiliki sikap skeptisme profesional yaitu sikap tidak mudah percaya, penuh rasa ingin tahu serta kritis terhadap bukti audit yang ada. Dalam PSA 04 (SA 230), mengenai skeptisme profesional, auditor diharuskan untuk mendesain prosedur auditor untuk dapat menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Skeptisme profesional merupakan sikap, pemikiran dan penilaian yang kritis terhadap bahan dan bukti audit.

2. Tanggung Jawab Auditor untuk Menemukan Tindakan Illegal

Tindakan illegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan illegal dibedakan menjadi:

- a. **Tindakan Illegal Berdampak Langsung**. Tindakan melanggar hukum dan peraturan berdampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu.

Contoh: pelanggaran terhadap perhitungan pajak, maka akan berpengaruh secara langsung terhadap saldo akun pajak.

- b. Tindakan Illegal Berdampak Tidak Langsung.** Tindakan melanggar peraturan dan hukum, namun dampaknya tidak secara langsung mempengaruhi laporan keuangan. Contoh : jika perusahaan mengabaikan dan melanggar hukum lingkungan, maka laporan keuangan akan terpengaruh jika perusahaan diharuskan membayar sanksi atau denda.

Selain itu, terdapat tiga tingkat tanggung jawab auditor dalam menemukan dan melaporkan tindakan illegal, yaitu: (1) Pengumpulan bukti jika tidak ditemukan alasan untuk mempercayai telah terjadialah tindakan illegal yang berdampak tidak langsung. Contohnya: melalui notulen rapat dewan direksi, wawancara dengan pihak klien; dan (2) Pengumpulan bukti dan tindakan lainnya jika ada alasan untuk percaya bahwa tindakan illegal baik yang berdampak langsung maupun tidak telah terjadi. Kemudian, jika auditor mengetahui adanya tindakan illegal maka seorang auditor perlu melakukan Tindakan sebagai berikut:

- mengidentifikasi dampaknya terhadap laporan keuangan;
- mempertimbangkan pengaruh tindakan illegal tersebut terhadap hubungan kantor akuntan publik dengan manajemen;
- auditor harus berkomunikasi (secara lisan atau tertulis) dengan komite audit atau pihak lainnya yang berwenang tentang terjadinya tindakan illegal tersebut;

- jika klien menolak memberikan konfirmasi, maka auditor dapat menarik diri dari penugasan.

3. **Tanggung Jawab Auditor Terhadap *Subsequent Event* / Kejadian yang Terjadi Setelah Tanggal Neraca Namun Sebelum Diterbitkannya Laporan Audit**

Auditor bertanggung jawab untuk menjamin bahwa klien telah mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dalam menginformasikan kepada pemakai laporan keuangan atas kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam laporan keuangan tersebut. Auditor juga akan berupaya untuk segera meminta keadaan klien untuk mengeluarkan revisi secepatnya atas laporan keuangan tersebut dengan mencantumkan penjelasan tentang alasan adanya perbaikan atau revisi terhadap laporan keuangan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. **Artikel Pertama**

Judul : *Management control in audit firms – Partners' perspectives*

Penulis : **Bernard Pierce, Breda Sweeney**

Latar Belakang

1. Adanya perubahan lingkungan audit yang meningkat maka biaya dan prosedur pengendalian perusahaan yang berkaitan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Tujuan studi ini untuk pemeriksaan mendalam tentang

Landasan Teori

1. *Management control literature*

- Simons (2000) mendefinisikan sistem kontrol diagnostik sebagai sistem informasi formal yang manajer menggunakan monitor hasil organisasi dan penyimpangan dari standar kinerja, sedangkan kontrol interaktif sebagai sistem informasi resmi yang melibatkan manajer dalam mengambil keputusan kegiatan. Dengan kontrol diagnostik kinerja tingkat rendah pada karyawan bisa di pantau dari penyimpangan untuk mencapai target sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan sistem kontrol interaktif digunakan untuk menjelaskan perubahan yang tidak terduga dalam bisnis mereka dan menyarankan rencana.

2. *Cost/quality conflict in audit firms*

- Biaya dikendalikan dengan menggunakan anggaran dan digunakan dalam program audit untuk mampu memenuhi semua kepentingan yang nantinya bisa dievaluasi kinerjanya.

3. *Audit quality controls*

- Kontrol kualitas berkaitan dengan perilaku dan aturan peraturan mengenai bagaimana proses audit dilakukan dan diawasi.
- Proses audit dianggap sebagai ukuran audit (kekuatan) risiko dari litigasi muncul dari kegagalan untuk memastikan proses audit yang dilakukan dengan melihat dokumen klien. Senior audit bekerja untuk mengawasi junior audit dilapangan.

4. *Clan controls and the audit firm*

- *Clan controls* digunakan untuk mendorong staf bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.
- Terdapat kesulitan dalam mengendalikan biaya secara terperinci karena dalam mengontrol kualitas tidak ada langkah yang memuaskan mengenai output dan kesulitan menggunakan kontrol perilaku.

Tujuan dan Metodologi Penelitian

1. *Research objective*

- Pengukuran audit tidak hanya dalam pengukuran kualitas audit tetapi juga bagaimana mengacu pada standar audit dan biaya yang kompetitif sesuai target. *Clan controls* dan pengendalian informasi dipandang sebagai hal yang penting.
- Fokus utama adalah pada *partner* yang secara bersama menempati posisi pemilik dan manajemen senior serta usaha memperoleh perspektif tentang elemen formal dan informal sistem kontrol audit perusahaan.

2. *Data collection*

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan semi terstruktur menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada bulan juni-agustus 2002 sekitar 12 mitra audit *bigfour* perusahaan di Irlandia.
- Terdapat panduan wawancara yang berisi cakupan tentang tema dalam studi ini. Kondisi lingkungan di anggap telah mengakibatkan kurangnya staff yang nantinya bisa terkena dampak kualitas audit yang dihasilkan.

3. *Data organisation and analysis*

- Ada beberapa faktor yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu memastikan semua lengkap disetiap wawancara, menganalisis temuan, analisis pendekatan terstruktur untuk data analisis dan tabulasi untuk memungkinkan pembaca memperoleh data secara keseluruhan.

Temuan

1. *Background findings on reaction to behaviours and perceived consequences*

- Tabel 1 menyajikan ringkasan singkat dari pandangan utama yang diungkapkan setiap mitra mengenai reaksi temua sebelumnya dan konsekuensi dari perilaku auditor dan audit perusahaan.
- QTB perlu diidentifikasi karena konsekuensinya yang dihasilkan tentang kegagalan akan berisiko tinggi dimasa depan, jika evaluasi kinerja buruk.

2. *Roles of formal and informal controls*

- Pengendalian kualitas secara formal dan informal diidentifikasi oleh *partner* audit.
- Kontrol dinggap sangat penting dalam lingkungan saat ini untuk memastikan bahwa jasa yang diberikan berkualitas.

3. *Audit review process*

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses audit dianggap sebagai pengendalian utama dalam kualitas audit. *Partner* dan manajer dilibatkan dan membahas pekerjaan audit:

- Ada banyak keterlibatan *partner* dan manajer ditempat kerja sehingga lebih banyak pelatihan dan *review* selama proses audit .
- Perhatian lebih dikhususkan untuk daerah yang dianggap berisiko
- Peninjauan real time dianggap sebagai prosedur review baru untuk bisa mengendalikan tekanan anggaran dan sebagai mitra untuk bisa mengambil keputusan dari anggaran.

Audit Methodology

1. Setiap penugasan audit dilakukan oleh tim audit dengan mengikuti proses dan prosedur yang telah disusun dengan terstruktur. Di masa sekarang dokumentasi audit dilakukan secara elektronik. Kepatuhan terhadap metode yang diterapkan dalam perusahaan dianggap sebagai suatu kontrol terhadap proses audit yang mampu mempengaruhi pemberian opini audit.
2. Manajemen perusahaan baru-baru ini menerapkan *risk-based management*. metode ini dianggap paling baik untuk menerapkan sistem pengendalian terhadap manajer dan karyawan.
3. Auditor akan lebih mudah efisien jika melaksanakan prosedur audit jika telah ada klasifikasi risiko dalam masing – masing segmen bisnis.
4. Pengendalian dalam segmen bisnis ini tujuannya bukan hanya untuk meminimalkan biaya., tetapi juga untuk memenuhi sisi *assurance* bisnis.

5. Walaupun menurut hasil wawancara dengan beberapa manajer di level atas, pendekatan berbasis risiko ini dianggap kurang terstruktur, dan di sisi lain beberapa karyawan perusahaan yang diwawancarai menyatakan pengendalian ini sudah cukup terstruktur.
6. Di dalam audit, akan kecil kemungkinan jika suatu risiko tidak dapat diidentifikasi. Karena sebelum membuat prosedur audit, maka seorang auditor akan melakukan identifikasi dan mengenali bisnis klien beserta risiko yang melekat dan yang akan terjadi.
7. Sebelum melaksanakan penugasan audit, seluruh anggota tim audit akan memperoleh pengarahan mengenai apa yang ada dalam bisnis klien beserta risiko yang melekat. Akan dijelaskan pula mengenai pentingnya tenggat waktu penyelesaian penugasan audit.
8. Di dalam pengarahan itu juga akan dijelaskan bagaimana menerapkan prosedur audit yang baik dan benar.

Pembahasan dan Kesimpulan

1. Adanya kekurangan dalam sistem pengendalian formal, masih bisa ditoleransi oleh *partner* karena ada beberapa faktor seperti adanya risiko yang tidak dapat dideteksi. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas laporan audit, karena para auditor telah melakukan langkah antisipasinya dalam prosedur audit.
2. *Market and bureaucratic controls*
 - Pasar dan birokrasi secara luas mempengaruhi tuntutan akan parameter dan kualitas audit. Permintaan pasar yang tinggi akan membuat klien meminta kualitas

laporan audit yang tinggi sehingga perlu dikembangkan adanya pengendalian terhadap staf auditor.

- Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas, diantaranya adalah standar profesional, hukum dan risiko litigasi.
- Adanya perubahan metode dan review prosedur audit, mengharuskan adanya komunikasi antara *partner* dengan staf audit, mengenai lingkup pengujian audit dan fungsi lain yang mendukung opini audit.

3. *Clan Control*

- *Clan control* memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan antara *partner* dengan staff auditnya. Sebuah *clan control* diharapkan mampu menjaga kualitas audit dari sebuah KAP dan *partner* audit bertanggung jawab atas hal ini.
- *Image management*

Sebuah *image management* sangat penting bagi sebuah KAP sehingga sebuah KAP harus menjaga citra publik yang positif kepada masyarakat. Sehingga peraturan dan prosedur yang ada di dalam KAP wajib dipatuhi oleh semua staf auditor bahkan termasuk *partner*. Mereka harus mengedepankan profesionalitas dengan tetap berpegang teguh terhadap standar profesi akuntan publik yang berlaku. *Image management* sebuah kantor akuntan publik juga dapat terlihat dari kemampuan yang dimiliki oleh auditornya serta laporan audit yang dihasilkannya.

– ***Informal Communication***

Sebuah komunikasi informal diperlukan antara *partner* dengan staff auditnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kendala yang dihadapi selama berada di lapangan dalam melaksanakan penugasan audit. Dengan demikian, seorang *partner* akan mampu menilai bagaimana kualitas audit dan laporan yang dihasilkan oleh staf auditornya.

– **Selection and training process**

Proses perekrutan karyawan sangat penting untuk menyeleksi calon auditor baru dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan sebuah proses pelatihan juga mendukung terciptanya kualitas audit yang tinggi, karena auditor akan dibekali oleh kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan selama menjalankan penugasan audit.

– ***Intuition of audit partner***

Seorang *partner* akan bertanggung jawab terhadap kantor akuntan publik dan kualitas audit yang dihasilkan. Pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan intuisi seorang *partner* dapat digunakan di dalam pembuatan prosedur audit atau bahkan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau solusi jika di dalam penugasan audit terjadi kendala. Hal ini dikarenakan pengalaman *partner* yang bisa dibilang tidak sebentar dalam profesi akuntan publik.

2. Artikel Kedua

Judul : *Auditor's Responsibility and Independence: Evidence From China*

Penulis : Z. Jun Lin

Latar Belakang

1. Adanya skandal Enron membuat munculnya undang-undang baru yaitu Sarbanes-Oxley Act 2002 yang berisi peraturan lebih ketat tentang tata kelola dan pelaporan keuangan dan audit. Serta mendirikan badan baru yang independen yaitu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) diberi mandat untuk mengatur kedisiplinan perusahaan yang di audit auditor.
2. Penelitian ini bermaksud untuk memeriksa tanggung jawab auditor dilihat dari sudut pandang praktisi dan dan pengaturan ekonomi. Dalam pengaturan kelembagaan audit mempunyai fungsi utama yaitu melayani tujuan tertentu pemerintah administrasi bisnis. Oleh karena audit layanan melayani pemerintah untuk pajak dan retribusi dan kontrol bisnis pada makro ekonomi.
3. CPA di China membentuk akuntansi/audit untuk publik, semua perusahaan di China disponsori oleh departemen untuk biaya, perpajakan, administrasi, properti negara, BUMN dan berbagai industri. karena hal ini personil audit lebih dekat dengan badan pemerintahan serta mereka tunduk terhadap intervensi pemerintah.
4. Masalah muncul di China tentang ambiguitas tanggung jawab auditor dan kurangnya keleluasan sebagai praktisi umum. Umumnya di China CPA diperdayakan untuk

melindungi properti negara dan bunga, hal ini menjadi tanggung jawab auditor tidak diakui dalam substansi.

5. Tugas CPA china menverifikasi modal dan audit keuangan untuk memenuhi perundangan-undangan untuk restrukturisasi bisnis yang berbeda struktur kepemilikan, konversi BUMN ke saham perusahaan, likuidasi bisnis dsb. Oleh karenanya auditor china akan lebih mendapat tinggakt risiko kegagalan bisnis atau kebangkrutan yang dihasilja dari penegakan hukum.

Preposition Study

1. Terdapat perdebatan tanggung jawab auditor dinegara industri selama dua dekade terakhir ini dalam eprtumbuhan akuntansi publik di China, karena negara ini sedang mengalami menuju market-oriented diperekonomiannya. Dalam keyakinan transisi ekonomi cina, keandalan akuntansi informasu adalah penting untuk pengambilan keputusan keuangan bagi pengguna, dan fungsi audit mempengaruhi kesejahteraan berbagai pihak. Oleh karena proposisi studi audit pertama adalah sebagai
(P-1): Peran dan manfaat dari audit yang independen positif dengan manfaat auditor untuk masyarakat China.
2. Salah satu fokus utama dari studi adalah untuk menyelidiki apakah persepsi publik dan harapan kaitannya dengan tanggung jawab auditor dalam lingkungan bisnis China. Terjadi kesenjangan harapan yang berlangsung selama dua dekade terakhir ini, audit sebagai alat pelengkap administrasi bisnis swasta dan berharap berrevolusi dengan perubahan dalam sosial dan kondisin ekonomi.
(P-2): Perbedaaan harapan dalam kaitannya dengan tanggung jawab auditor dilingkungan bisnis saat ini

3. Kesenjangan harapan adalah refleksi dari persepsi yang berbeda tujuan audit, kewajiban untuk mendekteksi penipuan dan tanggung jawab untuk kelalaian atau kegagalan audit diberbagai kepentingan. Di China fungsi audit untuk memastikan kepatuhan terhadap pemerintah bisnis undang-undang atau peraturan untuk menjaga kebenaran dan legiti-masi dari catatan akuntansi dalam entitas bisnis individu.
(P-2.1): Persepsi mengenai tujuan independen audit (akun-tansi publik) secara substansial berbeda antara penerima manfaat audit dan auditor China.
4. Auditor china telah melengkapi hukum dan memfasilitasi kontrol untuk pemerintah terhadap operasi bisnis.
(P-2.2): Persepsi mengenai tugas-tugas auditor dalam men-deteksi dan pelaporan penipuan penyimpangan subtansial berbeda antara penerima jasa audit dan auditor di China.
5. Penugasan audit adalah kontrak antara auditor dan bisnis manajemen, banyak kepentingan pihak seperti calon investor, kreditor, dan pemerintah, mungkin bergantung pada hasil audit utnk bisa mengevaluasi kinerja bisnis dan membuat berbagai keputusan. Auditor diharapkan bisa mendeteksi kegagalan oleh pihak ketiga.
(P-2.3): Persepsi mengenai tanggung jawab auditor pihak ketiga kedua belah pihak dalam kegagalan dan kelalain auditor antara penerima manfaat audit dan auditor di China.
6. Independensi auditor di China dibawah dari pengawasan pelaporan keuangan atau skandal akuntansi di Cina dan negara-negara barat lainnya. Akibat hal ini profesi audit di China mendorong untuk menjadi auditor yang independensi.
(P-3): Pentingnya kebebasan auditor yang diakui oleh penerima manfaat audit/klien dan auditor Di China.

Sampel Penelitian

1. Dengan menggunakan alat survei email untuk bisa melihat praktek-praktek yang ada akuntansi publik China, terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan proposisi.
2. Masing-masing berisi pertanyaan dengan masalah peran audit dan tujuan serta kewajiban auditor untuk mendeteksi pemalsuan, independensi auditor.
3. Kuisioner berisi data dari demografis responden seperti pendidikan, spesifikasi pekerjaan, dan pengalaman kerja. Tanggapan setiap pertanyaan dirancang “sangat tidak setuju” , “tidak ada pendapat” atau “netral”, “setuju” dengan menggunakan skala 1-5.
4. Survei dengan menggunakan bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa China untuk didistribusi di China.
5. Subjek penelitian untuk para investor, kreditor, pejabat pemerintah, manajemen bisnis dan akademis serta praktisi umum.
6. Total 800 kuisioner didistribusikan ke China, 300 dikirim kepada BUMN dan PLC secara acak (1997-1998). Total kuisioner yang kembali ada 209.

Pembahasan

1. Role and Objectives of Auditing Function

Mayoritas responden setuju untuk peran akuntansi publik untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi akuntansi sebuah entitas. Data ini menunjukkan bahwa auditor memberikan dukungan kuat untuk memperluas layanan untuk semua entitas terlepas dari struktur kepemilikan, dan setuju bahwa laporan audit dapat membantu pengguna

untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi bisnis. Secara umum data ini mendukung proposisi (P-1) yang menyatakan bahwa penerima manfaat audit dan auditor diakui penting saat ini pada lingkungan bisnis di China.

2. *Responsibility for Fraud Detection and Communication*

Responden setuju bahwa manajemen harus bertanggung jawab untuk kejujuran dan keandalan laporan. Akuntan publik harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan pelaporan kesalahan dan penipuan dalam audit. Data yang ada menunjukkan bahwa mendukung proposisi (P-2) menyatakan perbedaan harapan berkaitan dengan tanggung jawab auditor mendeteksi penipuan dan pelaporan di China.

3. *Auditor Independence*

Responden mayoritas setuju bahwa auditor (akuntan publik) harus mempertahankan kebebasan dalam pengaudit, dan auditor dituntut untuk meningkatkan independensi.. Pada data ini responden seperti kurang puas dengan status independensi auditor China, yang kini dipertanyakan. Data ini mendukung proposisi (P-3) yang pentingnya kebebasan audit. Para responden percaya bahwa kontrol pemerintah yang secara langsung akan bisa merusak kredibilitas pada jasa audit yang yang mencegaha auditor mencapai kemerdekaan/ kebebasam atau tidak memihak.

4. *Subgroup Comparison*

Dalam perekonomian di China terdapat perbedaan besar antara penerima jasa audit terhadap bisnis mereka yaitu pada struktur kepemilikan, kebutuhan informasi, dan pemanfaatan audit layanan, yang dapat mempengaruhi persepsi tanggung jawab auditor dan kemerdekaan. Oleh karenanya respondne

dibagi menjadi sub kelompok kreditor investor, pemerintah, manjer dan akademisi. Semua respondenn mendukung gagasan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk bisa mendeteksi pelaporan dan kewajiban atas *fraud* audit.

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima jasa audit di china setuju bahwa fungsi audit harus independensi demi meningkatkan keandalan laporan keuangan dan berperan positif dalam perekonomian di china.
2. Dalam studi ini menemukan bahwa “*expetation gap*” mengenai tujuan audit bisa dikaitkan dengan pengaturan kelembagaan di China. Dalam perekonomian di China didominasi oleh kepemilikan oleh pemerintah dan oleh karenanya auditor tunduk pada intervensi pemerintah terutama pada kepatuhan audit.
3. Studi ini menemukan bahwa auditor China tidak puas karena dibawak kontrol pemerintahan sehingga meras atidak bisa meningkatkan independensi auditor.
4. Studi ini memiliki keterbatasan yaitu ukuran sample yang relatif kecil karena kesulitasn dalam melakukan survei di China. Tingkat Sampel yang sedikit menajdi berpengaruh pada analisis data.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Audit Quality in ASEAN*

Penulis : Michael Favere

Introduction

1. Artikel ini melaporkan hasil studi tentang kualitas audit di negara yang bersatatus sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
2. Hukum, peraturan, kode profesional dan standar mengenai audit hukum menentukan peran dan posisi auditor, dan mempengaruhi fungsi pasar pemeriksaan di wilayah tersebut.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang lingkungan hukum yang dapat mempengaruhi peran dan posisi auditor hukum di kawasan ASEAN.
4. Dalam penelitian ini akan melihat hubungan antara hukum dan peraturan nasional yang mempengaruhi penunjukan dan pemutusan auditor hukum, kemandirian dan tidak kompatibel masalah yang dihadapi oleh auditor, pelaporan audit, dan tanggung jawab auditor hukum.
5. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang sifat fungsi audit dalam ASEAN dan keandalan informasi keuangan yang diaudit serta menyediakan perbandingan analisis antara negara-negara anggota, penelitian ini akan membantu masyarakat ASEAN untuk menilai kecukupan hukum dan peraturan yang mengatur audit dan profesi akuntansi.

Landasan Teori

1. Ada dua poin untuk penelitian ini. Poin pertama memberikan gambaran tentang hukum yang relevan lingkungan di ASEAN dan didasarkan pada data yang disediakan oleh kantor akuntan public "Big Five".
2. Poin kedua adalah analisis perbedaan utama antara hukum ASEAN dan peraturan, dan dampaknya pada fungsi pasar audit. Pedomannya adalah menggunakan analisis wawasan dari penelitian berbasis ekonomi dalam audit untuk membuat rekomendasi kebijakan publik menggunakan standar audit internasional.
3. Empat dimensi yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup penelitian ini. Pertama, negara-negara yang tercakup dalam studi ini sesuai dengan negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 31 Desember, 1996. Pada tanggal tersebut, negara-negara anggota yang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Laos dan Myanmar yang mengakui ke ASEAN pada 23 Juli 1997 tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini mendefinisikan " entitas yang dikenakan Audit hukum " sebagai perusahaan swasta yang diaudit sebagai persyaratan hukum nasional.. Ketiga, auditor termasuk dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki hak untuk melakukan hukum audit untuk entitas yang didefinisikan di atas. Dan yang terakhir, kuesioner meminta para responden untuk menggambarkan status hukum dan peraturan pada Juni 1997, dan perubahan dalam lingkungan hukum.

Metodologi Penelitian

1. Kuesioner menggunakan format pertanyaan terbuka untuk memungkinkan responden lebih fleksibel dan memberi kesempatan untuk menambahkan informasi latar belakang jawaban mereka. Isi dari kuesioner ini mengenai informasi yang berkaitan dengan topik-topik berikut: penunjukan dan pemutusan auditor hukum, maupun kegiatan yang tidak kompatibel, hubungan auditor hukum dengan perusahaan, kewajiban auditor hukum terhadap Perusahaan dan ketiga pihak, dan isi dari laporan audit.
2. Setelah menerima jawaban kuesioner ternyata beberapa kuesioner tidak mampu menjawab sejumlah isu spesifik dan terdapat beberapa tanggapan yang diperlukan penjelasan lebih lanjut, maka peneliti memberikan kuesioner kedua kepada perwakilan negara ASEAN.
3. Informasi yang diberikan oleh kedua kuesioner kemudian diringkas dan gambaran dikirim ke perwakilan nasional untuk memastikan bahwa data kompilasi telah benar.
4. Untuk meningkatkan keakuratan informasi, kuesioner dikirimkan ke badan-badan profesional dan pemerintah terkait yang mengatur audit profesi di masing-masing negara ASEAN untuk diperiksa. Secara total, 15 profesional dan badan pemerintah, termasuk Federasi ASEAN Akuntan (AFA), yang terlibat dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Kompetensi auditor hukum memiliki hubungan langsung dengan kualitas audit dan negara ASEAN harus mengadopsi persyaratan yang lebih ketat dan berlaku untuk seluruh Negara yang menjadi anggota.

2. Terkait pelaksanaan audit, ulasan mutu eksternal (oleh rekan atau peraturan badan) adalah alat yang sangat berharga dan penting untuk meningkatkan kualitas audit. Badan pengawas ASEAN harus mempertimbangkan peningkatan kualitas audit dengan meminta, minimal, peer review berkala untuk semua perusahaan audit, sebagaimana ditentukan oleh Pernyataan Kebijakan Dewan IFAC (1992) dan ISA 220. Secara optimal, perusahaan melakukan audit hukum dan perusahaan publik harus tunduk pada proses review kualitas regulasi.
3. Kewajiban pelaporan auditor hukum sangat bervariasi di antara negara-negara ASEAN. Sehingga keseragaman atau keharmonisan persyaratan pelaporan harus menciptakan iklim akuntabilitas kepada investor dan tanggung jawab publik. Langkah ini dilakukan agar terciptanya transparansi dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu bisnis harus meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diaudit. Ada juga sedikit kesepakatan dalam bentuk dan isi laporan audit.
4. Keseimbangan diperlukan antara memberikan insentif yang cukup bagi auditor untuk memberikan high kualitas audit dan menghindari penurunan jasa audit karena biaya litigasi berlebihan (Palmrose, 1988). Mengingat pertimbangan tersebut, negara-negara ASEAN harus mempertimbangkan bergerak untuk mengatur beberapa fitur berikut: (1) berbagai sanksi profesional sesuai dengan tingkat keparahan kondisi sehingga menimbulkan seperti sanksi, (2) kemungkinan litigasi oleh auditee, pemegang saham dan ketiga lainnya

- pihak, (3) topik kewajiban yang wajar, dan (4) diperlukan jaminan asuransi profesional
5. lingkungan hukum yang dihadapi oleh auditor hukum saat ini terlalu beragam untuk memastikan kualitas audit yang seragam di seluruh wilayah. Sehingga badan profesional dan pemerintah ASEAN harus berusaha untuk menerapkan standar berkualitas tinggi yang berlaku untuk semua auditor hukum di wilayah tersebut.
 6. negara-negara akan bergantung pada peningkatan investasi asing dan perdagangan global pada pengembangan ekonomi masa depan, Sehingga badan profesional dan pemerintah ASEAN harus berusaha untuk meningkatkan kualitas audit, melalui suatu peningkatan hukum dan peraturan untuk mencocokkan standar audit internasional saat ini (Schwartz, 1997). Manfaat utama bagi negara-negara ASEAN harus meningkatkan kepercayaan investor dalam pasar keuangan mereka.

BAB VI

BUKTI AUDIT

Pengertian Bukti Audit

1. Bukti audit adalah segala bentuk informasi baik berupa angka maupun informasi penguat yang lain yang relevan dengan penyajian laporan keuangan, sebagai dasar auditor untuk memberikan opini.
2. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan auditor dalam mendukung semua argumentasi yang menguatkan dasar pengambilan opini, kesimpulan dan rekomendasi auditor dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun tidak semua informasi berguna bagi auditor, sehingga informasi tersebut harus dipilih.
3. Pembahasan bukti audit ini didasarkan pada Standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu “Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Tipe Bukti Audit

1. Tipe Data Akuntansi

- a. **Pengendalian Internal.** Pengendalian internal dibentuk untuk mampu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kuat dan lemahnya pengendalian internal akan mempengaruhi jumlah bukti audit yang dibutuhkan. Semakin kuat pengendalian internal maka bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bukti yang dibutuhkan jika pengendalian internal klien lemah.
- b. **Catatan Akuntansi.** Jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Maka, saat auditor menemukan sejumlah saldo pada suatu akun, maka auditor akan menelusuri dan memverifikasi saldo yang tercantum tersebut dengan dokumen pendukung dan catatan akuntansinya.

2. Informasi Penguat

- a. **Bukti Fisik**, merupakan bukti yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan langsung oleh auditor.
- b. **Bukti documenter**, tipe bukti dokumenter dibuat dari kertas bertuliskan huruf atau angka atau symbol. Jika dilihat dari sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
 - Bukti documenter yang dibuat dari pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor.

-
- Bukti documenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien.
 - Bukti documenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.
- c. **Perhitungan Sebagai Bukti.** Perhitungan sendiri oleh auditor dalam membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien dan bersifat kuantitatif. Perhitungan yang dilakukan auditor, berupa:
- *Footing*, adalah pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal.
 - *Cross-footing*, adalah pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal.
 - Bukti ketelitian perhitungan biaya depresiasi.
 - Bukti ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham, taksiran pajak perseroan, dll.
- d. **Bukti Lisan.** Permintaan keterangan dengan lisan menunjukkan situasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan pengumpulan bukti audit lain yang bisa menguatkan. Hasil bukti lisan ini selanjutnya akan didokumentasikan dalam bentuk informasi tertulis. Dalam mengajukan pernyataan, auditor harus berpegang teguh pada standar dan prosedur yang berlaku. Auditor tidak boleh penyelidikan silang pada klien dan tidak boleh memberi tekanan dalam memperoleh informasi.
- e. **Perbandingan.** Untuk menentukan akun atau transaksi yang telah dipisahkan guna untuk penyelidikan lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, pendapatan dan beban dengan saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Bukti

audit berupa perbandingan dan rasio dikumpulkan oleh auditor pada awal audit dalam membantu penentuan objek audit memerlukan penyelidikan mendalam dan diperiksa pada akhir audit untuk menguatkan kesimpulan atas dasar bukti lain. Bukti berupa konfirmasi (*confirmation evidence*) merupakan jawaban tertulis atau secara lisan dari pihak ketiga independen yang memverifikasi kecermatan informasi yang diminta oleh auditor. Informasi ini bersifat faktual dan memiliki keandalan tinggi. Contoh : konfirmasi bank, piutang. Pernyataan tertulis (*written representation*) adalah pernyataan dibuat dan ditanda tangani orang yang bertanggung jawab dan mengetahui tentang hal yang perlu ditegaskan. Bukti ini dibedakan dengan konfirmasi bahwa bukti ini berasal dari dalam atau luar perusahaan. Selain itu bukti ini lebih bersifat subjektif mengenai sesuatu hal dari informasi yang sebenarnya. Contoh : surat pernyataan manajemen klien

- f. **Bukti dari Spesialis**, spesialis merupakan seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang lain selain akuntansi dan auditing, misal: pengacara, insinyur, appraisal.

Kecukupan Bukti Audit

Cukup atau tidaknya bukti audit terkait dengan banyaknya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor untuk menentukan kecukupan bukti audit antara lain:

1. Materialitas dan Risiko

Akun-akun dalam laporan keuangan yang memiliki jumlah saldo besar dan memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadi salah saji, maka auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti daripada akun yang bersaldo lebih rendah dengan risiko salah saji yang lebih kecil. Akun-akun dengan saldo yang material, maka auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti dibandingkan dengan akun-akun yang dianggap tidak bersaldo material.

2. Faktor ekonomi

Pengumpulan bukti audit dibatasi oleh faktor waktu dan biaya. Auditor harus mempertimbangkan faktor ekonomi di dalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Pertimbangan ekonomi yang diambil oleh para auditor yaitu *cost and benefit*.

3. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Dalam pemeriksaan unsure-unsur dalam laporan keuangan seringkali digunakan sampling audit. Pada sampling audit, auditor memilih acak sebagian anggota populasi yang akan diperiksa karakteristiknya. Semakin besar populasi semakin banyak jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika anggota populasi memiliki karakteristik yang heterogen, maka semakin banyak pula bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor.

Kompetensi Bukti Audit

1. Kompetensi data akuntansi

Catatan akuntansi yang andal dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal yang lemah seringkali tidak mampu mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi.

2. Kompetensi Informasi Penguat

Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh:

- a. **Relevansi**, faktor relevansi berarti bahwa bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Auditor harus memperoleh bukti sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan.
- b. **Sumber**, bukti audit yang berasal dari luar entitas klien biasanya merupakan bukti yang memiliki kompetensi yang tinggi. Bukti audit yang diperoleh dengan cara informasi secara langsung yaitu dengan cara pemeriksaan tangan pertama, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor.
- c. **Ketepatan waktu**, ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh auditor. Untuk akun-akun yang berkaitan dengan asset lancar, utang lancar, dan akun laba-rugi, auditor harus memperoleh bukti klien telah melakukan *cut off* terhadap transaksi kas, penjualan, dan pembelian pada tanggal neraca.
- d. **Objektivitas**, bukti yang bersifat objektif biasanya lebih andal jika dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Bukti yang diperoleh dari luar entitas klien biasanya bersifat lebih objektif.

Bukti Audit sebagai Dasar Opini Auditor

Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa factor berikut:

1. Pertimbangan Professional

Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh IAI berisi persyaratan tentang bukti audit dan memberikan pedoman tentang cara yang harus dilakukan oleh auditor untuk memenuhi

persyaratan mengenai penerapan mutu dan jumlah bukti audit yang diperlukan, dan auditor harus memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan terhadap PSA.

2. Integritas Manajemen

Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan mengendalikan bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karenanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen yang memiliki integritas yang tinggi akan meminimalkan keraguan auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

3. Kepemilikan Publik VS Terbatas

Auditor umumnya memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit laporan keuangan perusahaan yang telah *go pyblic* dibandingkan dengan audit terhadap perusahaan dengan bentuk PT tertutup. Hal ini dikarenakan audit laporan keuangan perusahaan *go public*, informasi di dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh kalangan yang lebih luas dibandingkan dengan pemakai laporan auditan perusahaan tertutup

4. Kondisi Keuangan

Jika suatu perusahaan sedang dalam keadaan *distress* dan dalam proses kebangkrutan, maka beberapa pihak akan menyalahkan auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena auditor dinilai gagal dalam mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan memberi sinyal mengenai memburuknya kondisi perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus mampu mempertahankan opini atas laporan keuangan audit dan mutu pekerjaan audit yang sudah dilaksanakan.

Pendekatan Pengumpulan Audit

Pengumpulan bukti dilakukan dari dua arah secara simultan yaitu *top-down* dan *bottom - up*, berikut penjelasannya.

1. Bukti Audit *Top-Down*

Pendekatan *top down* berfokus kepada perolehan pemahaman bisnis dan industri klien, tujuan dan sasaran manajemen, penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan, keunggulan kompetitif klien, proses bisnis klien yang utama dan *cash flow* yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar auditor memperoleh pengetahuan tentang perusahaan klien dan mengembangkan ekspektasi auditor terhadap laporan keuangan.

2. Bukti Audit *Bottom-Up*

Pendekatan *bottom - up* berfokus pada pengujian secara langsung terhadap transaksi, saldo akun dan sistem yang mencatat transaksi dan menghasilkan saldo-saldo akun. Tujuannya adalah agar auditor memperoleh bukti-bukti pendukung yang mendukung transaksi dan saldo-saldo akun dalam laporan keuangan.

Dokumentasi Bukti Audit (Kertas Kerja Audit)

Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat. Manfaat utama dari kertas kerja audit antara lain:

1. Penunjang utama laporan audit;
2. Dasar bagi supervise
3. Dasar bagi perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. Pedoman pokok isi kertas kerja, yang memuat:

-
- Bukti yang menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing
 - Bukti yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dan informasi yang dilaporkan sesuai dengan catatan klien
 - Penjelasan mengenai keputusan yang diambil auditor terhadap pengecualian
 - Komentar/kesimpulan mengenai aspek lainnya
- b. Kuantitas dan Bentuk, faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas, bentuk, isi antara lain:
- Sifat dan tujuan penugasan
 - Sifat laporan audit
 - Sifat laporan keuangan, daftar atau informasi lainnya yang diperlukan untuk pembuatan laporan
 - Sifat dan kondisi catatan klien
 - Tingkat risiko pengendalian
 - Kebutuhan tertentu seperti untuk supervisi dan review
- c. Filing, terdiri dari:
- Permanent file: berisi data yang bersifat historis dan berkelanjutan
 - Copy dokumen penting
 - Informasi mengenai penilaian struktur internal control
 - Hasil analytical prosedur
 - Current file: berkas dibuat dan digunakan untuk tahun buku yang bersangkutan
 - Audit program
 - Informasi umum
 - *Working trial balance*
 - *Lead schedule*

Keputusan Yang Harus Diambil Auditor Terkait Bukti Audit

1. **Penentuan Prosedur Audit yang Akan Digunakan.** Dalam pengumpulan bukti audit, auditor menggunakan prosedur audit yang disajikan berikut :
 - a. Hitung penerimaan kas yang belum disetorkan di tanggal neraca dan awasi uang kas sampai disetoran ke bank.
 - b. Minta *cut-off bank statement* dari bank untuk jangka waktu dua minggu sesudah tanggal neraca.
 - c. Pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien.
2. **Penentuan Besarnya Sampel.** Banyak unsur yang harus diuji oleh auditor dalam setiap prosedur audit. Besarnya sampel beda-beda antara yang satu dengan yang lain dan dari prosedur yang satu dengan yang lain.
3. **Penentuan Unsur yang Dipilih Sebagai Anggota Sampel.** Setelah menentukan besarnya sampel, auditor harus memutuskan unsur yang dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa.
4. **Penentuan Waktu yang Cocok dalam Melaksanakan Prosedur Audit.** Audit laporan keuangan meliputi jangka waktu biasa nya 1 tahun, auditor mulai mengumpulkan bukti audit awal tahun. Klien biasanya menghendaki pekerjaan audit diselesaikan dalam jangka waktu satu minggu dengan tiga bulan setelah tanggal neraca.

Prosedur Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor

1. **Inspeksi,** merupakan pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan-catatan atau kondisi fisik sesuatu. Inspeksi

terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap, auditor dapat menaksir keaslian dokumen, atau mendeteksi adanya perubahan yang mungkin dilakukan.

2. **Pengamatan**, merupakan prosedur audit yang dilakukan auditor untuk melihat pelaksanaan kegiatan.
3. **Konfirmasi**, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan bagi auditor dalam memperoleh informasi langsung dari pihak ketiga.
4. **Permintaan keterangan**, adalah prosedur audit yang dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan adalah bukti lisan dan dokumenter.
5. **Penelusuran**, auditor melakukan penelusuran informasi dimulai dari awal data direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.
6. **Pemeriksaan dokumen pendukung**, merupakan prosedur audit yang meliputi:
 - a. Inspeksi dokumen-dokumen yang mendukung transaksi atau data keuangan dalam menentukan kewajaran dan kebenarannya.
 - b. Membandingkan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi terkait.
7. **Perhitungan**, perhitungan fisik pada sumber daya berwujud seperti kas dan pertanggung jawaban untuk formulir bernomor urut tercetak.
8. **Scanning**, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. **Pelaksanaan ulang**, ialah pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh klien.
10. **Teknik audit berbantuan komputer (*computer-assisted audit techniques*)**, merupakan catatan akuntansi klien dilaporkan dalam bentuk media elektronik. Auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit seperti yang dijelaskan diatas.

Situasi Audit yang Mengandung Risiko Besar

1. **Lemahnya Pengendalian Internal.** Pengendalian internal menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Semakin kuat pengendalian internal maka bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bukti yang dibutuhkan jika pengendalian internal klien lemah.
2. **Kondisi Keuangan yang Tidak Sehat.** Suatu perusahaan yang sedang mengalami *distress* akan mengalami kecenderungan untuk menunda melakukan penghapusan piutang, sehingga auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait hal ini.
3. **Manajemen yang Tidak Dapat Dipercaya.** Auditor harus terlebih dahulu memiliki informasi mengenai latar belakang manajemen perusahaan klien. Karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disajikannya dan keandalan informasi yang disampaikan.
4. **Penggantian Auditor.** Jika klien mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas, maka bisa saja diakibatkan oleh adanya ketidakpuasan klien terhadap kinerja auditor, namun jika

klien terlalu sering mengganti auditor, maka hal ini bisa diindikasikan bahwa adanya perselisihan antara auditor dengan klien mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

5. **Perubahan Tarif Atau Peraturan Pajak Atas Laba.** Jika terjadi perubahan peraturan mengenai tarif pajak, maka akan terjadi perbedaan penafsiran dan penggantian prinsip akuntansi serta terjadi transaksi yang tidak konsisten sehingga membuat perusahaan melakukan pergeseran pengakuan pendapatan yang pada akhirnya mengakui besarnya pajak atas laba.
6. **Sifat Usaha yang Spekulatif.** Auditor melaksanakan audit laporan keuangan yang kegiatan usahanya bersifat spekulatif, akan menghadapi risiko yang relative lebih besar dibandingkan jika auditor mengaudit perusahaan yang kegiatan usahanya relative stabil.
7. **Transaksi Perusahaan Klien yang Kompleks.** Perusahaan klien melakukan transaksi usaha rumit dan kompleks, sehingga perusahaan tersebut mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan transaksi secara konvensional.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

Artikel Pertama

Judul : *Enforcement release evidence on the audit confirmation process: Implication for standard setters*

Penulis : Diane Janvrin

Latar Belakang

1. Tugas auditor adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti melalui prosedur.
2. Salah satu prosedur yang sering digunakan yaitu proses konfirmasi audit yang melibatkan bukti langsung dari pihak ketiga yang membenarkan pernyataan-pernyataan relevan tentang saldo rekening, transaksi, dan pengungkapan
3. Peneliti meneliti tentang efektivitas proses dari konfirmasi audit, yang sebelumnya mengalami kegagalan dalam hasil audit.

A Brief History of Confirmation Standards

Di AS terdapat standart konfirmasi yaitu SAS No 67 yang dikeluarkan tahun 1991 tentang konfirmasi piutang. DI AS (AICPA) menambahkan standar untuk bisa mengkonfirmasi angsuran pinjaman (AU 330,24) Saldo kas (AU 330.10), Account payable (AU 330.13) dan barang konsinyasi (AU 330.12)

Audit Confirmation Process

Konfirmasi yang melibatkan piutang, dan auditor kurang tepat dalam menentukan konfirmasi maka mereka melakukan alternatif audit produser (AICPA, 2008 , AU 330.34-35). Untuk meminimalkan kemungkinan bahwa hasil akan menjadi bias karena adanya intersepsi dan perubahan permintaan konfirmasi maka auditor disarankan untuk melakukan kontrol atas permintaan kepada pihak ketiga (AU 330.28).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini meneliti AAERS berkaitan dengan proses konfirmasi audit. Terdapat AAERS 2500 tahun 1982-2006, peneliti mengidentifikasi 113 konfirmasi terkait dari AAERS.

Analysis of Confirmation-Related AAERS

Dalam pemeriksaan mengenai AAERS menemukan isu berkaitan dengan regulator dan efektivitas dari proses konfirmasi audit, yaitu:

1. *Determine if confirmations are appropriate*

Menentukan apakah konfirmasi telah sesuai dengan bukti-bukti yang relevan dan bisa mengurangi risiko. Sebagai contoh pada AAERS yang berhubungan dengan konfirmasi

- a. E-safety world (2005), auditor gagal mengkonfirmasi permintaan mengenai keberadaannya piutang. Biasanya dalam bentuk saham sebagai pengganti uang tunai.
- b. Vista (2001-2004), Terdapat penjualan fiktif auditor gagal meninjau pesanan/pembelian, penjualan, faktur, dokumen pengiriman atau kas
- c. First America Health Concepts (2005), tentang perbedaan antara buku besar dengan neraca saldo yang tidak seimbang, FAHC yang melebihkan piutang tahun 1999.

2. *Document decision to forego confirmations*

Pada standar audit AS saat ini memungkinkan auditor untuk mengorbankan konfirmasi jika kondisinya seperti ini:

- a. Piutang usaha tidak bersifat material dalam laporan keuangan.
- b. Konfirmasi dinilai tidak efektif.
- c. Auditor lemah dalam menilai *inherent risk* dan *control risk*.

ISA 505 menunjukkan bahwa auditor memepertimbangkan apakah permintaan memiliki implikasi mengenai integritas atau menunjukkan implikasi mengenai integritas dari manajemen. AAERs melibatkan manajemen audit ketika account tertentu tidak bisa dikonfirmasi contohnya:

3. *Select items to confirm*

Auditor bisa memilih untuk konfirmasi atau mereka memilih menguji seluruh populasi. Kesimpulan yang salah akan terjadi jika auditor gagal dalam memilih sample.

4. *Design confirmation request*

Auditor bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga yang mereka percaya memiliki pengetahuan tentang informasi. Auditor harus memikirkan pertimbangan efek dari informasi pada desain pemrintaan efek dan mengevaluasi hasil termasuk apakah prosedur lain diperlukan (AICPA, AU 33.27). Contoh yang berkaitan dengan desain confirmation request

5. *Communicate request to third party while maintaining control over request*

Konfirmasi dilakukan dengan mengirimkannya via pos. Pada standar audit di AS mencatat bahwa proses manual konfirmasi menjadi kurang kompeten karena tidak adanya kontrol proses konfirmasi. Dan sekarang dengan adanya kemajuan teknologi auditor menggunakan faks, konfirmasi elektronik, e-mail atau telepon untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga.

6. *Follow up with second request or perform alternative audit procedures*

Ketika permintaan konfirmasi belum menerima tanggapan, maka auditor menindaklanjuti permintaan ke tiga kali, dan jika

belum menerima tanggapan maka auditor umumnya akan menerapkan prosedur alternatif saldo untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat rendah. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan AAERs dalam *second request or perform alternative audit procedures*: (a) California Micro Devices (2003); (b) Flight Transportation (1985); (c) Alpex Computer Corporation (1984)

Kesimpulan

1. Peneliti meninjau bukti AAERs mengenai proses konfirmasi audit dan mempertimbangkannya dengan memperluas konfirmasi saldo selain account piutang
2. mengidentifikasi terkait kapan konfirmasi harus digunakan, menggunakan otentifikasi elektronik untuk konfirmasi tanggapan.
3. Peneliti menemukan beberapa contoh dimana auditor tidak melakukan konfirmasi apada account, dan beberapa kasus AAERs terlibat kasus anantara audit dan pelanggan/vendor. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah auditor mempunyai independensi terkait konfirmasi terhadap pihak ke tiga. Dengan demikian panduan melakukan konfirmasi ekpada pihak ketiga harus bisa dijamin dan standar menyangkut otentifikasi juga harus tepat.
4. Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini:
 - a. Penelitian ini tidak mencakup semua masalah penting mengenai proses konfirmasi audit.
 - b. Sulitnya kasus kolusi ditemukan

Oleh karenanya dengan adanya perubahan lingkungan pada ekonomi dan politik penting untuk kita memahami prosedur audit, proses konfirmasi.

BAB VII

PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALISIS

Perencanaan Audit

1. Perencanaan Audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan menyeluruh dan ruang lingkup Audit yang diharapkan.
2. Standars pelaksanaan pekerjaan lapangan pertama menyatakan : bahwa semua pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika terdapat asisten terlebih dahulu harus disupervisi dengan semestinya.

Terdapat 3 alasan utama tentang perlunya perencanaan audit :

1. Auditor bisa memperoleh bukti yang memadai sesuai dari kondisi pada saat audit berlangsung.
2. Membantu menjaga agar biaya audit tetap wajar.
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Dalam perencanaan Audit, yang harus diperimbangkan Auditor adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang ada kaitannya dengan bisnis entitas maupun industri yang menjadi tempat usaha.
2. Adanya Kebijakan serta prosedur akuntansi entitas tersebut.
3. Penggunaan Metode yang biasa digunakan oleh entitas dalam pengolahan informasi akuntansi, dan juga adanya penggunaan jasa maupun organisasi dari luar dalam upaya pengolahan informasi akuntansi perusahaan tersebut.
4. Harus melakukan perencanaan untuk tingkat risiko pengendalian yang akan direncanakan.
5. Adanya Pertimbangan awal dalam menentukan tingkat materialitas untuk tujuan audit.
6. Terdapat penyesuaian dalam akun/pos laporan keuangan (jika diperlukan).
7. Adanya Kondisi dimana diperlukannya perluasan ataupun perubahan ketika melakukan pengujian audit, seperti tentang adanya risiko kekeliruan/kecurangan yang bersifat material atau dengan adanya transaksi antar pihak-pihak (mempunyai hubungan istimewa).
8. Pada Sifat laporan Auditor diharapkan bahwa laporannya berisi: laporan Auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada Bapepam, laporan khusus dibuat untuk penggambaran dari kepatuhan (klien) terhadap kontrak perjanjian yang telah dibuat.

Pada perencanaan audit, seorang auditor harus bisa mempertimbangkan sifat, lingkup, pekerjaan harus dilakukan seperti halnya yaitu membuat/melaksanakan program audit yang dilakukan secara tertulis dengan satu set program audit tertulis yang ditujukan untuk setiap audit.

Program audit dibuat harus bisa menggambarkan secara terperinci prosedur audit yang menurut auditor melalau tingkat keyakinan diperlukan untuk bisa mencapai tujuan dari audit. Dari program audit serta tingkat kegiatannya dibuat dengan terperinci sesuai dengan keadaan dan bersifat variasi. Selama berlangsungnya proses audit, perubahan kondisi menyebabkan terjadinya perubahan prosedur audit yang sudah direncanakan.

Terdapat 8 bagian utama dalam perencanaan audit yaitu :

1. Menerima kliennya dan melaksanakan Perencanaan audit awal
2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang/ peahaman dari bisnis klien
3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum dari klien
4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan/awal
5. Menentukan materialitas dan risikonya
6. Memahami struktur pengendalian intern
7. Memperoleh informasi untuk menilai risiko kecurangan
8. Mengembangkan rencana program audit secara keseluruhan

Terdapat dua risiko audit :

1. Risiko audit yang bisa diterima/ *acceptable audit risk* yaitu pengukuran dari auditor seberapa besar auditor bisa menerima bahwa laporan keuangan tersebut akan bisa salahsaji secara material disaat audit telah selesai dan auditor telah berpendapat Wajar tanpa pengecualian.
2. Risiko Inheren yaitu ukuran dari penilaian auditor terhadap kemungkinan pada salah saji yang bersifat material di akun saldo sebelum auditor bisa mempertimbangkan pengendaliann internal.

Penjelasan terkait perencanaan Audit:

1. Perencanaan audit awal

Disini audit melibatkan 4 macam apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit:

- a. Auditor harus bisa memutuskan untuk menerima klien baru atau melanjutkan memberi pelayanan terhadap klien yang ada sekarang.
- b. Auditor bisa mengidentifikasi kenapa klien membutuhkan jasa audit
- c. Guna menghindari adanya kesalahpahaman, maka auditor wajib memahami persyaratan penugasan yang telah ditetapkan oleh klien.
- d. Auditor disini mampu mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk dalam penugasan staff.

2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang/ pemahaman dari bisnis klien

Dalam memperoleh Informasi mengenai latar belakang digunakan berbagai cara antaranya adalah sbagai berikut:

Memahami Bidang Usaha dan Industri Klien

Dalam penginterpretasikan informasi yang didapat selama audit secara memadai, penting pihak auditor untuk bisa memahami industry/bisnis klien. Tiga alasan perlunya pemahaman yang baik atas industry klien, yaitu :

- a. Terdapat Banyak industry yang mempunyai aturan akuntansi khas/bervariasi yang harus dipahami oleh auditor untuk mengevaluasinya apakah laporan keuangan pada klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia. Misalnya, jika

- auditor mengaudit badan pemerintah, maka auditor harus mampu memahami aturan-aturanyang berlaku pada akuntansi pemerintahan.
- b. Auditor harus mampu melakukan pengidentifikasi pada risiko dalam industri yg bisa mempengaruhi penetapan risiko audit yang bisa diterima.
 - c. Risiko bawaan pada hakikatnya sama seluruh klien dalam industri yang bersangkutan. Pemahaman risiko akan dapat membantu auditor dalam pengidentifikasian risiko bawaan dari klien. Contoh antara lain pada risiko bawaan yaitu keusangan persediaan dalam industri rumah mode, risiko bawaan kolektabilitas pada piutang usaha di industri pinjaman konsumen.
 - d. Pengetahuan tentang industri klien diperoleh dari berbagai cara, yaitu diskusi dengan auditor sebelumnya (yang mengaudit tahun sebelumnya) dan dengan auditor yang sedang melakukan penugasan serupa dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama pegawai klien. Meninjau pabrik dan kantor serta fasilitas untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai bidang usaha dan operasi klien.
 - e. Berdiskusi dengan pegawai luar pada bidang akuntansi selama proses peninjauan audit kan berguna dalam mendapatkan perspektif lebih luas. Peninjauan langsung dilokasi fisik perusahaan akan membantu auditor memahami pengamanan fisik atas aktiva serta menginterpretasikan pada data akuntansi memberikan kerangka acuan dalam visualisasi aktiva.

- f. Menelaah Kebijakan Perusahaan perusahaan akan sangat berguna dalam Keputusan-keputusan dasar yang menyangkut kebijakan seperti kebijakan tentang pengendalian intern, pelepasan sebagian dari usaha, adanya kebijakan kredit, pinjaman ke perusahaan afiliasi, dan kebijakan akuntansi untuk mencatat aktiva dan pengakuan pendapatan, dievaluasi dengan teliti sebagai bagian audit untuk menetapkan apakah manajemen dapat memperoleh wewenang dari dewan komisaris untuk membuat keputusan tertentu serta memberi keyakinan bahwa keputusan manajemen tercermin di laporan keuangan.
- g. Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi antara klien dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa seperti : transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan induk dengan perusahaan anak, tukar menukar peralatan antara dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, dan pinjaman kepada para pegawai. Karena hubungan istimewa harus diungkapkan maka penting untuk seluruh pihak yang mempunyai hubungan istimewa diidentifikasi dan dimasukkan kedalam berkas permanen pada awal penugasan auditor. Hal yang umum dilakukan biasanya dengan menanyakan kepada pihak manajemen, menelaah arsip modal, memeriksa daftar pemegang saham untuk mengidentifikasi para pemegang saham utama.
- h. Mengevaluasi kebutuhan akan Spesialis dari Luar, Jika auditor menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, perlu bagi auditor untuk menghubungi spesialis. Contohnya: seorang spesialis berlian diperlukan

untuk menilai biaya penggantian berlian, seorang spesialis aktuaris untuk bisa menetapkan kelayakan nilai yang tertulis dari cadangan kerugian asuransi, maupun konsultasi dengan pengacara untuk dalam interpretasi hukum sebuah kontrak

3. Memperoleh Informasi Mengenai Kewajiban Hukum Klien/risiko bisnis klien

Tiga dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan Adalah:

- a. akta pendirian dan anggaran perusahaan sebagai dokumen penting, untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri.
- b. risalah rapat direksi, komisaris, dan pemegang saham yang berisi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham
- c. Kontrak

informasi harus diungkapkan dalam keuangan. Diperlukan oleh pihak audit guna memperoleh gambar yang lebih baik tentang perusahaan dan membiasakan diri pada bagian yang mungkin menimbulkan masalah.

Informasi yang termasuk dalam notulen rapat yaitu :

- a. Pengumuman dividen
- b. Otorisasi penggajian untuk pejabat
- c. Persetujuan kontrak dan kesepakatan
- d. Otorisasi atas perolehan aktiva
- e. Persetujuan merger
- f. Otorisasi pinjaman jangka panjang

- g. Persetujuan untuk menggadaikan efek-efek
- h. Otorisasi pegawai yang berhak menandatangani cek
- i. Pelaporan mengenai kemajuan operasional perusahaan.

4. Melaksanakan Prosedur Analisis Pendahuluan

Prosedur analitis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang logis antara data keuangan dan data non keuangan yang meliputi perbandingan jumlah yang tercatat yang akan digunakan dalam memperoleh bukti tentang saldo akun ataupun jenis transaksi.

Tujuan pelaksanaan prosedur analisis pendahuluan yaitu:

- a. Penetapan kemampuan entitas untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya
- b. Memahami bidang usaha klien
- c. Indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan
- d. Mengurangi pengujian audit yang terperinci
- e. Tahap-tahap dalam prosedur analisis yaitu:
- f. Mengidentifikasi perhitungan/ perbandingan yang harus dibuat
- g. Mengembangkan harapan
- h. Melaksanakan perhitungan/perbandingan
- i. Menganalisis data dan pendidentifikasi perbedaan yang signifikan
- j. Menyelidiki perbedaan yang signifikan dan tidak terduga serta evaluasi perbedaan tersebut.
- k. Menentukan apa dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit tersebut.

5. Menentukan materialitas dan risikonya

Definisi Materialitas dan risiko Adalah Unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan auditor. Materialitas merupakan besarnya kekeliruan atau salah saji informasi akuntansi laporan keuangan.

Langkah-langkah dalam penetapan materialitas Adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas tersebut
- b. Melakukan pengalokasian tentang pertimbangan awal mengenai materialitas
- c. Melakukan estimasi total salah saji dalam segmen
- d. Dapat melakukan estimasi pada salah saji gabungan
- e. Membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas.
- f. Dapat mengestimasi dari jumlah kekeliruan/salah saji dalam tiap segmen (langkah 3) terjadi selama proses audit. Langkah 4 dan 5 dilakukan tahap penyelesaian audit.

6. Memahami struktur pengendalian intern

Luas pemahaman mencakupi untuk merencanakan audit yang memadai. Empat masalah spesifik perencanaan, yaitu :

- a. Auditability

Auditor harus mampu mendapatkan informasi yang cukup kaitan dengan integritas manajemen dan sifat serta

luas catatan akuntansi, sehingga bahan bukti kompeten tersedia untuk mendukung saldo laporan keuangan.

b. Potensi salah saji yang material

Pemahaman auditor seharusnya mampu mengidentifikasi jenis-jenis kekeliruan dan ketidakberesan yang berpotensi dan dapat mempengaruhi laporan keuangan, dan dapat menetapkan risiko.

c. Risiko penemuan

Informasi mengenai struktur pengendalian intern digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan pengendalian, kemudian mampu mempengaruhi risiko penemuan yang telah direncanakan.

d. Perancangan pengujian

Informasi yang diperoleh seharusnya memungkinkan bagi auditor dalam merancang pengujian saldo laporan keuangan yang efektif. Pengujian atas transaksi maupun atas saldo, prosedur analisis dan yang disebut pengujian substantif.

Terdapat prosedur yang berkaitan dengan perancangan dalam operasi dan digunakan sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien:

- a. Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha
- b. Melakukan Tanya jawab dengan pegawai klien tentang Kebijakan dan pedoman system klien
- c. Melakukan Inspeksi dokumen dan catatan, serta Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha

7. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh

Perencanaan audit dan program audit berhubungan dengan -jenis pengujian audit yang dilakukan, melalui prosedur memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern, pengujian pengendalian, pengujian substantive transaksi, prosedur analisis serta pengujian rinci atas saldo.

a. *Primarily substantive approach*

- 1) Auditor mengutamakan pengujian substantive daripada pengujian pengendalian. Auditor lebih sedikit melakukan prosedur dalam memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien. Strategi ini banyak dipakai dalam audit pertama kali daripada klien lama.
- 2) Strategi ini digunakan apabila auditor, atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya, menemukan kondisi sebagai berikut:
 - a) Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi, tidak efektif. Salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien. Kemudian auditor menguji apakah salah saji yang tidak terdeteksi struktur pengendalian intern klien tersebut, dapat dideteksi oleh prosedur audit. Sehingga, auditor akan lebih banyak melakukan pengujian substantive.
 - b) Biaya untuk melaksanakan: 1)Prosedur tambahan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, 2)*Test of control* mendukung *lower assessed level of control risk* melebihi biaya melaksanakan test substantif yang lebih ekstensif.

Kedua kondisi ini berkaitan dengan asersi-aseri akun:

- 1) Yang dipengaruhi oleh transaksi tidak rutin atau jarang terjadi, misalnya aktiva tetap, utang obligasi, dan modal saham.
 - 2) Yang sangat memerlukan jurnal penyesuaian misalnya akumulasi depresiasi.
- b. *Lower assessed level of control risk approach*
- 1) Auditor mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif.
 - 2) Auditor tetap melakukan pengujian substantive meskipun tidak se-ekstensif pendekatan Primarily substantif. Auditor banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien.
 - 3) Strategi ini banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit atas klien baru. Strategi ini digunakan apabila auditor, terkait dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya, menemukan kondisi :
 - a) Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi yang dirancang dengan baik, dan efektif. Struktur pengendalian intern klien yang efektif dapat mengurangi kemungkinan salah saji. Auditor harus menguji apakah struktur pengendalian intern klien efektif mendeteksi salah saji. Auditor lebih banyak melakukan pengujian pengendalian.
 - b) Biaya untuk melaksanakan: 1)Prosedur tambahan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, 2)*Test of control* dalam mendukung

lower assessed level of control risk lebih rendah dari biaya melaksanakan test substantif yang ekstensif, 3) Akun yang diperiksa adalah akun yang terkait transaksi rutin, dan tinggi volume. Contoh akun :

- Penjualan
- Piutang dagang
- Persediaan
- Biaya upah dan gaji

8. Melakukan Prosedur Analitis Audit

Terdapat 5 jenis prosedur analitis :

- a. Membandingkan data klien dengan industri.
- b. Membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya.
- c. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.
- d. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.
- e. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan menggunakan data non keuangan.

Kertas Kerja Audit dan Program Audit

Kertas Kerja Audit

Definisi Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit berguna sebagai salah satu alat untuk bertahan bagi para auditor terhadap tuntutan pengadilan atas kelalaiannya maupun penyelewengan yang dituduhkan serta sebagai alat untuk bisa mengumpulkan segala informasi penting yang menjadi bahan laporan audit.

Dalam Kertas kerja audit disini akan mencerminkan standart audit , prosedur audit yang mampu dijalankan serta kesimpulan apa yang saja sebagai hasil dari audit. Kertas kerja audit di buat secara teratur, hati-hati, bersih, dan teliti serta mudah di mengerti. Penanggung jawab dan supervisor mereview kertas kerja audit dengan tujuan :

- a. Meyakinkan bahwa program audit telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Meyakinkan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standart auditing yang di tetapkan IAI.
- c. Meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kertas kerja audit tidak memuat salinan buku / dokumen perusahaan, tetapi memuat ikhtisar data serta kesimpulan audit. Data yang dimuat dalam kertas kerja audit harus merupakan data yang perlu untuk mendukung laporan, perlu untuk penyelidikan di kemudian hari dan perlu untuk verifikasi ketepatan pembukuan tranksaksi.

Setiap kertas kerja harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh auditor saat selesai dikerjakan. Di atas kertas kerja audit harus dicantumkan nama klien, nama dan nomor akun, dan tahun buku audit serta petunjuk kepada program audit yang bersangkutan. Kertas kerja audit harus lengkap dan bebas dari kekurangan-kekurangan seperti :

- a. Kekurangan bukti bahwa system pengendalian intern telah diselidiki dan ternyata cukup baik atau lemah.
- b. Kegagalan dalam menjelaskan sesuatu masalah yang muncul dari audit sebelumnya.

- c. Kelalaian dalam menunjukkan prosedur yang dilakukan.
- d. Data yang didapat tidak lengkap untuk dapat menyusun laporan.
- e. Kegagalan dalam menyiapkan hasil audit atau transaksi yang penting setelah tanggal neraca.
- f. Kegagalan dalam memerinci nama jenis efek/sekuritas wesel tagih
- g. Kegagalan dalam melakukan penyelidikan dalam pengawasan atas persediaan barang, sistem pembebanan, upah/gaji, *overhead*.

Program Audit

1. Auditor harus melakukan pengembangan dan pendokumentasian pada program audit untuk dapat melakukan penetapan sifat, waktu dan luasnya prosedur audit yang direncanakan. Pendokumentasian dalam rencana audit umumnya akan mencakup pada rincian dari akun aktivitas klien, bagan alir, dan atau deskripsi naratif dari sistem akuntansi, kuesioner pada pengendalian intern, program audit terinci, review analitis, kertas kerja, anggaran waktu, dan lain-lain.
2. Dalam Penyesuaian situasi dan kondisi di setiap perusahaan harus bisa disesuaikan dengan Program audit yang direncanakan, setiap langkah di arahkan kepada cara yang efisien, sehingga akan diperoleh informasi yang cukup/memadai untuk menilai kewajaran atas penyajian pada laporan keuangan dan sesuai dengan PABU.

Terdapat beberapa Tujuan program audit adalah sebagai berikut :

1. Auditor akan dibantu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam penugasan staff.
2. Adanya kelengkapan dalam kertas kerja akan menunjukkan bahwa program audit tersebut :1. Direncanakan sesuai dengan tujuan pengujian yang diharapkan/diinginkan, 2. Pemilihan prosedur akan lebih sesuai/tepat dengan standart auditing yang di tetapkan IAI melalui.
3. Akan mampu menghemat waktu bagi staff dan auditor sendiri.

Terdapat Beberapa hal yang harus di pertimbangkan dalam melakukan rencana pada program audit :

1. Adanya permasalahan serta teknik baru yang memerlukan modifikasi dan revisi terhadap prosedur audit, serta program audit harus di review kembali untuk setiap pengujian dan penugasannya.
2. Perancangan pada Program harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah utama yang dapat di antisipasi (termasuk pada kelemahan dalam SPI).
3. Auditor harus mampu memperoleh pemahaman dari struktur pengendalian intern klien, agar mampu untuk melakukan perencanaan audit dan pengembangan pendekatan audit yang efektif hal ini dilakukan sebelum auditor melakukan program audit. Auditor juga harus dapat menilai risiko bawaan.
4. Auditor melakukan rencana audit untuk pengendalian risiko pada tingkat asersi di saldo akun dan kelompok transaksi-transaksi yang sifatnya material. Para Auditor juga harus melaksanakan prosedur analitis selama audit ketika tahap perencanaan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Materiality judgments and audit firm culture : social behavioral and political perspectives*

Penulis : **Brian W. Carpenter, MarkDirsmith, Parveen P. Gupta**

Abstract

1. Adanya keinginan peneliti untuk menginterpretasikan cara auditor dalam memberikan justifikasi atau penilaian sebagai sebuah teknik atau fenomena kognitif.
2. Teori dan analisa empiris dalam penelitian ini terbagi dalam tiga level, yaitu: (1) peneliti menginterpretasikan pola justifikasi auditor sebagai fenomena perilaku sosial dimana di dalamnya terdapat justifikasi untuk materialitas; (2) peneliti akan menginterpretasikan filosofi yang dimiliki oleh sebuah KAP dan menilainya sebagai sebuah budaya.
3. Peneliti menyusun dua hipotesis : (1) budaya kantor akuntan publik mencerminkan mekanisme yang ada di dalamnya , sistematika termasuk justifikasi materialitas oleh masing-masing auditor, dimana mengedepankan pertimbangan rasional dan kepuasan; (2) tingkat pengalaman auditor, mencerminkan tingkatan atau hierarki di dalam KAP, memperjelas budaya di dalam KAP tersebut.

Introduction

1. Penelitian ini menafsirkan proses pengambilan keputusan sebagai kejadian yang kognitif dimana mampu mewakili karakteristik perusahaan klien dan mampu mempengaruhi penilaian auditor. Pengalaman seorang auditor juga dipandang mampu untuk mempengaruhi penilaian dan justifikasi terhadap klien.
2. Menurut Hoghart bahwa auditor dalam melakukan justifikasi juga dipengaruhi oleh bukti yang diperoleh auditor yang berkaitan dengan klien.
3. Dalam penelitian sebelumnya, Morris & Nichols (1998) meneliti adanya kemungkinan pengaruh struktur yang ada pada KAP terhadap penilaian materialitas. Pada penelitian mereka, disebutkan bahwa struktur pada KAP dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap klien.
4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan mengenai proses penilaian sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi konteks sosial di dalam KAP.
5. Berdasarkan teori dan hasil analisis, maka hipotesis dari penelitian ini adalah untuk menguji bahwa budaya di dalam KAP mampu mempengaruhi penilaian auditor. Dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor mempengaruhi posisinya di dalam hirarki sebuah KAP.

Audit Firm Structure vs Judgment in Forming Materiality Judgments: a Cultural Reinterpretation

a. Structure and judgment in audit firms

- 1) Penelitian terdahulu menggambarkan bahwa struktur di dalam KAP, akan mempengaruhi dalam perikatan

audit, termasuk penilaian auditor terhadap risiko audit. Struktur di dalam KAP juga mempengaruhi kebijakan *partner* terhadap staff auditornya.

- 2) Struktur yang ada di dalam KAP juga mempengaruhi para auditor dalam menghadapi kompetisi dalam memperoleh klien, maka para auditor dituntut untuk selalu bekerja secara efektif dan efisien.
- 3) Dalam menghadapi persaingan tersebut, maka auditor dituntut untuk mampu memiliki keunggulan bersaing dalam hal litigasi risiko audit, sistem pendokumentasian audit, peningkatan audit berbasis komputer. Para auditor juga dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai peningkatan kompleksitas dari lingkungan bisnis, organisasi klien dan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan klien.
- 4) Dalam penelitian yang dilakukan Kinney (1986) menjelaskan bagaimana anggota dari Auditing Standard Board melakukan vote. Dalam penelitian ini Kinney juga menyebutkan pentingnya sebuah KAP harus memiliki teknologi audit yang terstruktur.
- 5) Struktur KAP yang digeneralisasi biasanya fokus pada filosofi atau dasar audit dan teknologi yang digunakan dalam menyusun metodologi audit

b. *The mechanism and organic metaphors*

- 1) Konsep struktur dalam KAP biasanya mengacu pada kecenderungan organisasi, perilaku organisasi, sikap terhadap birokrasi, mekanisme internal, dll.

- 2) Beberapa organisasi akuntan publik banyak mengadopsi parameter dan strategi dari KAP yang lebih besar agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien.
- 3) Salah satu parameter yang banyak diadopsi adalah mengenai pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan serta untuk melatih anggota KAP untuk responsive terhadap masalah serta sensitive terhadap permasalahan sosial.
- 4) Perlu adanya sosialisasi di dalam anggota KAP untuk meningkatkan kemampuan penilaian mereka, pengembangan keterampilan dan komitmen jangka panjang.
- 5) Tujuan adanya struktur yang jelas serta pelatihan untuk justifikasi adalah agar auditor memiliki keyakinan dalam memastikan salah saji dalam laporan keuangan.
- 6) Seorang auditor juga harus mampu mengembangkan metode analitis jika menemukan salah saji di dalam laporan keuangan. Sehingga seorang auditor mampu memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai selama penugasan audit.

c. *A cultural theory of cognition*

- 1) Selain mekanisme dan *image* organisasi, sebuah organisasi perlu untuk memiliki budaya organisasi yang mencerminkan karakter di dalam organisasi. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi justifikasi atau penilaian auditor. Budaya organisasi juga dianggap mampu menyeragamkan berbagai latar belakang anggota organisasi.
- 2) Struktur dan budaya organisasi secara kolektif dapat mempengaruhi pola perilaku dan pemikiran sesuai

standar yang ditetapkan. Pada akhirnya pola budaya ini menjadi dasar dalam stuktur formal organisasi.

- 3) Perspektif yang lain memandang budaya sebagai bentuk dari konsekuensi interaksi sosial yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi anggota organisasi, sehingga budaya organisasi tidak dapat dimanipulasi dan dibuat oleh manajemen.
- 4) Dalam konteks organisasi formal, peneliti berfokus mengenai perilaku anggota organisasi dalam konteks sosial. Di dalam penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh struktur serta budaya organisasi mempengaruhi penilaian materialitas oleh auditor.

Audit Firm Culture and Hypotheses

1. Budaya yang ada di dalam KAP harus bisa mencerminkan tingkat profesionalisme seorang auditor, sehingga auditor diharapkan mampu memandang masalah dari berbagai sudut pandang sesuai penilaian profesionalnya.
2. Budaya di dalam KAP juga mampu mempengaruhi penilaian materialitas.
3. Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana auditor menggunakan informasi sebagai dasar menilai materialitas.
4. March dan Simon menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas dan kapasitas komputasi, sehingga manusia memiliki keterbatasan untuk menghadapi masalah-masalah structural.
5. Konsisten dengan perspektif budaya antara tingkat rasional dan kepuasan terhadap strategi penilaian audit dengan karakteristik, mekanisme dan budaya local organisasi audit. Untuk mekanisme organisasi, hal ini bukan hanya mengenai

penilaian individual menggunakan informasi yang diperoleh oleh masing-masing individu tetapi bagaimana selyuruh individu di dalam organisasi mampu bersinergi dalam pengambilan penilaian tingkat materialitas.

Berdasarkan alasan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah;

H1 : budaya di dalam KAP mempengaruhi prosedur penilaian tingkat materialitas oleh para akuntan publiknya.

H1a : auditor yang berasal dari KAP memiliki mekanisme yang berbeda dalam melakukan penilaian materialitas.

H1b : auditor yang berasal dari KAP yang memiliki budaya organisasi akan menilai materialitas dalam sudut pandang yang berbeda.

6. Budaya di dalam organisasi memiliki persamaan dengan pengalaman masing-masing individu dan interaksi sosial di dalam organisasi. Semakin banyak pengalaman dan interaksi sosial yang dilakukan oleh auditor maka akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap materialitas.

7. Berdasarkan informasi di atas, maka perumusan hipotesis nya:

H2 : semakin tinggi pengalaman auditor, maka hal tersebut akan mempengaruhi strategi penilaian auditor terhadap rentang materialitas yang disesuaikan dengan budaya KAP nya.

H2a : auditor yang memiliki pengalaman yang lebih serta berkaitan dengan mekanisme budaya dalam perusahaan, maka akan lebih rasional dalam menilai rentang materialitas.

H2b : auditor yang memiliki pengalaman yang lebih serta dikaitkan dengan budaya internal organisasi, maka akan lebih memenuhi ekspektasi dalam menilai rentang materialitas.

Research Method

Pengujian hipotesis dilakukan dengan *experimental simulation* (Runkle & McGrath, 1972) diatur sedemikian rupa untuk *partner, manager, senior audit* pada kantor akuntan publik internasional.

a. Test instrument development

Pengujian dilakukan terhadap pengembangan instrumen yang ada di dalam organisasi akuntan publik.

b. Participants and distribution

Peneliti mendistribusikan 304 uji instrument kepada *partner, managers* dan auditor senior Big8 dari 29 kantor di 6 kota yang merger dengan Arthur Young with Ernst & Whinney and Deloitte, Haskins & Sells dengan Touche Ross. Distribusi dari uji instrument ini dilakukan secara acak yang dikordinasi oleh partner atau manajer di masing-masing kantor.

Ada 212 instrumen tes yang kembali kepada peneliti, kemudian akan dibandingkan antara persepsi dengan pengamatan peneliti.

c. Data analysis

Penelitian ini menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) untuk menguji hipotesis dan hasilnya ditunjukkan pada table 2.

Analisa ini akan menguji budaya yang ada pada KAP yaitu *organic, intermediate, mechanistic*) dengan hirarki yang ada dalam KAP yaitu senior, manager dan partner.

Results and Discussion

Dalam table 2, diperoleh hasil bahwa H1 dan H2 diterima. Hal ini berarti adanya sosialisasi budaya dalam perusahaan berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

Implications : Audit Judgment and Judgment models as signals and symbols

Adanya implikasi teoritis dari penelitian ini yakni yang berhubungan dengan budaya perusahaan dan politik.

a. A cultural interpretation of audit judgment and technology

H1 dan H2 penelitian ini diterima, itu berarti bahwa terdapat hubungan antara budaya, pengalaman dan interaksi sosial dengan penilaian materialitas.

Pola budaya yang ada di dalam organisasi akan tampak dalam struktur organisasi KAP.

Budaya di dalam organisasi juga harus bisa menerima kemajuan teknologi sehingga teknologi digunakan sebagai pendukung untuk menentukan rentang materialitas.

b. A political interpretation of audit judgment and technology

Dari sisi sosiologi, maka akan ada keterkaitan antara fungsi organisasi dan individu, arah komunikasi dan hierarki yang ada dalam suatu KAP.

Adanya tendensi jika seorang anggota KAP terlibat dengan politik. Anggota KAP yang terlibat dalam politik secara tidak langsung akan mempengaruhi pembuatan

kebijakan keuangan. Sehingga kurang independen jika harus menilai rentang materialitas.

Concluding comments

1. Penelitian ini meneliti adanya perspektif budaya dan politik dalam penilaian materialitas oleh auditor.
2. Adanya strategi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan sebuah justifikasi materialitas dan keterkaitannya dengan sistem manajemen dan ekonomi untuk audit yang berbasis teknologi.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan meningkatkan pola penilaian audit dengan keterbukaan wawasan yang berdasar pada fenomena budaya dan politik wilayah setempat.

2. Artikel Kedua

Judul : *Changing audit risk characteristics in the public client market*

Penulis : Gary Giroux , Cory Cassell

Introduction

1. Jasa pada audit keuangan telah berubah di AS selama setengah abad terakhir, sehingga merubah pola siklus dari risiko audit relatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarakan perubahan pola dalam lingkungan risiko ekonomi dan kelembagaan dari waktu-kewaktu dan mampu menyelidiki perbedaan ukuran relatif pada risiko audit.
2. Selama 40 tahun terakhir jasa audit memiliki perubahan yang signifikan, alasannya mencakup dari siklus ekonomi, teknologi,

perubahan kompetensi pada perusahaan audit berbagai tingkat litigasi dan dinamika audit pada regulasi dan penegakan hukum. Pada penelitian ini diharapkan akan mampu menjelaskan pergeseran tentang ekonomi dan kelembagaan lingkungan pada risikonya dari waktu ke waktu, mampu menyelidiki risiko perbedaan pengganti pada risiko audit.

3. Pada proxy keuangan Z-core Altman menggunakan modifikasi. Jika nilai proxy lebih tinggi maka bisa diartikan melakukan manipulasi laba .

Audit events and characteristics from the 1970s to 2007

1. Perkembangan ekonomi dan peraturan pada tahun 1970 berdampak apada profesi audit dan pada risiko.
2. Tahun 1970 : dekade yang dianggap kacau karena terjadi peningkatan inflasi (indeks harga konsumen mencapai 11% pada tahun 1974) dan adanya defisit pada anggaran pemerintahan. Adanya penetapan standar yang baru dalam upaya memecahkan berbagai masalah yang kompleks (Zelf 2003)
3. Pertengahan tahun 1970: terdapat 400 kasus perusahaan yang melakukan penyuaipan dan pemebayaran yang ilegal terhadap pemerintah, partai politik dll. Akibatnya tanggung jawab auditor tidak diakui atau hilang karena mereka melakukan tindakan suap tidka adanay pengendalian internal yang memadai pada perusahaan (Zeff 2003).
4. Tahun 1980: adanya resesi dan inflasi yang eksteim, banyaknya tingkat pengangguran mencapai lebih dari 20% di tahun 1980. Serta para auditor mulai berkompetensi dala persaingan harga dalam biaya audit yang lebih rendah.

Kurangnya independensi auditor juga menjadi perhatian dari regulator akuntansi.

5. Tahun 1990: Adanya perkembangan Saham besar di NASDAQ. Tumbuh penggunaan opsi saham dan bonus serta meningkatnya insentif perusahaan untuk dapat memanipulasi laba.
6. Tahun 2002 : munculnya Sabanes Oxley yang bisa membawa reformasi besar pada undang-undang sekuritas, regulasi pada profesi akuntansi, dan pengelolaan perusahaan yang baru.

Sample and data analysis

Model empiris yang digunakan untuk mengevaluasi risiko keuangan (Z-core Altman), risiko manipulasi earnings, dan risiko litigasi. Rata-rata tahun menyarankan pola siklus risiko audit relatif, pada perubahan kelembagaan selama periode tersebut.

Result

1. Cakupan perusahaan meningkat dari waktu-waktu sekitar 2009 klien audit pada tahun 1970, dan 3181 klien pada tahun 2006 dengan menggunakan Altman (sampel ukuran berbeda-beda)
2. Jumlah terbesar 4793 pada tahun 1997, dan totalnya ada 130.235 observasi perusahaan/tahun.
3. Rata-rata Z-core selama periode itu berfluktuasi selama periode tersebut.
4. Adanya skandal Enron 2001, mengakibatkan kegagalan audit pada laporan keuangan yang menyebabkan publik tidak percaya kepada auditor.

5. Penggunaan akrual yang lebih besar dimungkinkan adanya manipulasi laba yang meningkat. Tingkat akrual muali rendah pada tahun 1970 dan naik pada tahun 1980. Olehkarenanya larangan iklan terhadap audit keuangan dicabut, meningkatnya daya saing auditor,

Conclussion

1. Penelitian ini merupakan sejarah dari risiko audit relatif berdasarkan pada peraturan audit dan faktor serta dampak dar kualitas audit. Peristiwa ekonomi mampu mengubah lingkungan risiko audit dari waktu-ke waktu, sehingga periode nya semakin ketat dalam pengawasannya dan diharapkan kualitas audit akan lebih tinggi dari periode ke periode selanjutnya .
2. Beberapa peristiwa yang memiliki efek pada risiko audit, dampak besar:
 - a. Foreign Corrupt Practise Act Of 1997 (ketaatan meningkat)
 - b. Reformasi pada swasta Ligitasi Sekuritas Act Of 1995 (Kurang ketaatan)
 - c. Sarbanes Oxley Act Of 2002 (Ketaatan lebih besar)
3. Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini :
 - a. Data yang digunakan relatif terbatas dari tahun-ketahun
 - b. Jumlah perusahaan untuk sample berkurang
 - c. Perubahan standar akuntansi dari waktu ke waktu yang membuat kesulitan bagi peneliti untuk penentuan hasil
4. Adanya keterbatasan namun hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa perubahan ada pada mengubah tentang regualsi audit dan faktor-faktor kompetitif.

BAB VIII

MATERIALITY AND RISK

Materialitas

1. Konsep Materialitas dalam Audit

Materialitas merupakan suatu pertimbangan pokok atau utama di dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus diterbitkan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau tingkat salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan bagi pengguna informasi laporan keuangan dikarenakan adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Materialitas juga diindikasikan dengan tingkat riskan atau tidaknya sesuatu hal bagi perusahaan dan pemakai informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Materialitas juga berhubungan dengan dampak suatu item/transaksi terhadap keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam FASB 2 materialitas diartikan sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi laporan keuangan dengan memperhitungkan situasi, yang menyebabkan pertimbangan seseorang yang megacu atau mengandalkan informasi tersebut

mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.

Auditor berdasarkan temuan salah saji yang material akan menyatakan hal tersebut kepada klien sehingga dapat dilakukan koreksi. Hal tersebut dilakukan karena penentuan tingkat materialitas merupakan tanggung jawab auditor. Jika klien menolak untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan, maka auditor akan mengeluarkan opini atau pendapat sesuai dengan kondisi yang terjadi dan apa adanya, tergantung pada besarnya tingkat material salah saji.

Lima langkah auditor dalam menerapkan materialitas:

- Merencanakan luas pengujian
 - Langkah 1 : menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.
 - Langkah 2 : mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam beberapa segmen.
- Mengevaluasi hasil
 - Langkah 3 : mengestimasi total salah saji dalam segmen-segmen.
 - Langkah 4 : memperkirakan salah saji gabungan
 - Langkah 5 : membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.

2. Menentukan Pertimbangan Pendahuluan Tentang Materialitas Membuat Pertimbangan Pendahuluan Tentang Berapa Jumlah yang Dianggap Material

Auditor berkewajiban untuk memutuskan jumlah salah saji gabungan antara yang tertera dalam laporan keuangan, ketika sedang mengembangkan strategi pertimbangan pendahuluan sebelum memulai proses audit. Pertimbangan audit ini juga akan dimasukkan ke dalam dokumentasi audit.

Pengertian pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa di dalam laporan keuangan akan terdapat salah saji namun tidak mempengaruhi keputusan pemakai informasi laporan keuangan.

Dalam membantu auditor dalam merencanakan pengumpulan bukti yang tepat maka auditor akan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali melakukan perubahan atas pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, sehingga seringkali penetapan materialitas ini akan direvisi.

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas:

1. Materialitas bersifat relative bukan absolute

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja bersifat material bagi perusahaan kecil, tetapi akan berbeda jika jumlah tersebut ditemukan di dalam perusahaan yang besar dan menjadi tidak material. Jadi, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas bergantung pada masing-masing jenis dan ukuran usaha klien.

2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas

Diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji tersebut tergolong material, hal ini karena materialitas bersifat relatif. Pada umumnya yang digunakan dalam pertimbangan pendahuluan ini adalah laba bersih sebelum pajak, dikarenakan poin ini dianggap sebagai poin yang sangat penting dalam penyajian informasi pada pemakai laporan keuangan.

3. Faktor kualitatif yang mempengaruhi pertimbangan materialitas

Jenis salah saji tertentu mungkin akan lebih penting bagi para pengguna informasi dibandingkan dengan salah sai lainnya, meskipun sama nilai rupiahnya. Misal:

- a. Nilai yang diakibatkan oleh kekeliruan terkadang dianggap kurang penting dengan nilai yang melibatkan kecurangan karena perbuatan tersebut mencerminkan kejujuran serta realibilitas manajemen atau karyawan yang terlibat.
- b. Salah saji yang sebenarnya tidak material, dapat menjadi material apabila mempengaruhi tren laba.
- c. Hal - hal yang bersifat kurang penting dan kecil terkadang bersifat material apabila hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi atas sejumlah kewajiban dalam kontrak.

Standar auditing dan standar akuntansi tidak menyediakan pedoman khusus tentang materialitas. Pertimbangannya adalah bahwa pedoman tersebut tidak mungkin diterapkan tanpa memperhitungkan semua kompleksitas yang dapat mempengaruhi keputusan akhir auditor.

3. Mengalokasikan Pertimbangan Awal/Pendahuluan Tentang Materialitas ke Dalam Setiap Segmen Atau Salah Saji Yang Dapat Diterima / Ditoleransi

Hal ini perlu dilakukan oleh auditor harus mengumpulkan bukti tiap segmen dari laporan keuangan. Ini dapat membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat dan yang harus dikumpulkan maka pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk setiap segmen harus dimiliki oleh auditor.

Akun neraca banyak dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan materialitas oleh sebagian besar praktisi daripada akun laba rugi. Hal ini dikarenakan salah saji yang terjadi dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama dalam neraca akibat penerapan sistem pelaporan akuntansi.

Ada tiga kesulitan yang dihadapi auditor dalam mengalokasikan materialitas dalam akun neraca:

- a. Alokasi ini mempengaruhi biaya audit.
- b. Baik *understatement* maupun *overstatement* harus tetap dipertimbangkan.
- c. Auditor akan cenderung memperkirakan akun-akun tertentu yang mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan dengan akun-akun lainnya.

Tujuan pengalokasian pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke akun-akun neraca adalah untuk membantu auditor dalam memutuskan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan bagi setiap akun laporan laba rugi ataupun dalam laporan neraca.

Salah satu tujuan alokasi ini adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa mengorbankan mutu audit. Apabila proses audit telah dilaksanakan maka auditor harus berkeyakinan

bahwa salah saji gabungan dalam semua akun akan lebih kecil dengan memperhatikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

4. Mengestimasi Salah Saji Material dan Membandingkan dengan Pertimbangan Pendahuluan

Dalam melaksanakan prosedur untuk mengestimasi salah saji dalam segmen, auditor akan membuat kertas kerja yang digunakan untuk mendokumentasikan semua salah saji yang ada. Salah saji yang terkandung dalam suatu akun apat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Salah saji yang diketahui
Merupakan salah saji yang dapat ditentukan jumlahnya oleh auditor.
- b. Salah saji yang masih bersifat kemungkinan
Salah saji yang masih bersifat kemungkinan ini terdiri dari:
 - 1) Salah saji yang yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara penilaian auditor dengan penilaian manajemen dalam menjumlah saldo akun, misal: saldo akun penyisihan piutang tak tertagih.
 - 2) Adanya *forecast* atau peramalan salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang telah ditetapkan.

Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan professional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali ditetapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup:

- a. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas.
- b. Unsure-unsur laporan keuangan (asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban).
- c. Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus akuntansi, lingkungan bisnis dan ekonomi.
- d. Adanya fluktuasi dalam tolak ukur unsure laporan keuangan.
- e. Adanya unsur yang menjadi perhatian khusus auditor (tujuan evaluasi kinerja keuangan)

Waktu penentuan tingkat materialitas

Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kealahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam lapran auditor.

Dalam perencanaan audit, auditor membuat berbagai pertimbangan tentang ukuran kealahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk:

- a. Penentuan sifat, saat dan luas prosedur penilaian audit.
- b. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material
- c. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan.

Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (jika berlaku materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) pada saat auditor menyadari adanya informasi selama audit yang mungkin saja menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari jumlah materialitas yang pertama kali ditetapkan.

Pada akhirnya opini yang diberikan oleh auditor juga berdasarkan kecukupan bukti, salah saji dan materialitas yang diidentifikasi oleh auditor. Jika selama proses audit, auditor menemukan tingkat kesalahan pada penyajian laporan keuangan secara individu suatu golongan akun dan keseluruhan dibawah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor, maka opini yang akan diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan jika tingkat kesalahan berada di atas atau melebihi tingkat materialitas yang ditentukan, maka opini yang akan diberikan adalah wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) atau tidak wajar (*adverse opinion*), tergantung seberapa material kesalahan tersebut.

Risiko Audit

1. Definisi Risiko Audit

Risiko audit diartikan sebagai tingkat ketidak pastian tertentu yang adapt diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya. Risiko audit juga merupakan kemungkinan terjadinya risiko salah saji material maupun indikasi terjadinya *fraud* yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat.

Mengingat kemungkinan terjadinya risiko sangat besar, maka auditor harus melakukan *risk assessment* sebelum menjakankan proses audit, tepatnya pada tahap perencanaan audit. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin saja terjadi dan bisa menentukan dimana proses audit akan dilaksanakan secara ketat dan tidak serta pada proses mana akan dilakukan *full audit* dan *random audit*.

Standar pekerjaan lapangan kedua mewajibkan auditor untuk memahami entitas klien dan lingkungannya termasuk pengendalian internalnya, dengan tujuan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang salah saji yang potensial di dalam laporan keuangan secara keseluruhan serta saldo akun khusus, kelas transaksi, dan pengungkapan dimana salah saji paling mungkin terjadi, auditor menggunakan model risiko audit.

2. Model Risiko Audit dan Perencanaan Audit

Dalam mengantisipasi adanya risiko, maka auditor menggunakan model risiko audit dalam merencanakan pengumpulan bukti audit. Model risiko audit akan membantu auditor dalam memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya.

a. Jenis Risiko Audit

Secara keseluruhan total risiko audit dirumuskan:

$$\text{TAR} = \text{IR} \times \text{DR} \times \text{CR}$$

Dimana:

TAR : Total Audit Risk

IR : Inherent Risk

DR : Detection Risk

CR : Control Risk

1) *Inherent Risk*

Pada dasarnya risiko inheren merupakan risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan atau yang melekat dari suatu transaksi entah karena adanya (a) kompleksitas transaksi; (b) kompleksitas perhitungan; (c) asset yang mudah

dicuri atau digelapkan; (d) kurangnya informasi yang bersifat objektif.

Risiko inheren mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapat salah saji material, baik *error* maupun *fraud* yang ada di dalam bagian proses audit sebelum mempertimbangkan efektifitas pengendalian internal klien. Auditor akan menyimpulkan bahwa risiko inheren tinggi, apabila auditor mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar ada salah saji, dengan mengabaikan pengendalian internal.

Risiko inheren ini berada diluar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan, bahkan juga berada diluar kendali auditee sendiri. Dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan adanya risiko inheren tetapi tidak bisa melakukan apa-apa.

Beberapa ciri inherent risk yang tinggi antara lain:

- a) Terjadi profitabilitas dan kinerja laporan keuangan yang terus menurun.
- b) Terjadi kekurangan modal kerja
- c) Tingginya asset yang menganggur atau tidak menghasilkan.

Faktor yang mempengaruhi *Inherent Risk*:

- a) Sifat bisnis klien

Risiko inheren bagi akun-akun tertentu dapat dipengaruhi oleh sifat bisnis klien.

- b) Hasil yang diperoleh dari kegiatan audit sebelumnya
Salah saji yang terjadi dalam audit di tahun sebelumnya bisa terjadi lagi pada audit tahun berjalan, karena banyaknya jenis salah saji dan perusahaan cenderung lamban dalam menangani salah saji. Dalam hal ini auditor sebaiknya melakukan pengujian ekstensif sebagai cara untuk menentukan apakah klien telah memperbaiki salah saji yang terjadi.
- c) Penugasan awal atau penugasan berulang
Apabila auditor telah melakukan audit kepada klien yang sama selama beberapa tahun, maka auditor akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kemungkinan salah saji material, sehingga untuk penugasan selanjutnya auditor akan berusaha mengurangi risiko inheren. Jika penugasan tersebut merupakan awal/klien baru, maka auditor akan meningkatkan risiko inheren pada awal periode penugasan.
- d) Pihak terkait
Adanya pihak terkait yang memiliki tujuan yang berbeda sehingga kemungkinan besar terjadi salah saji, sehingga risiko inherennya juga akan meningkat.
- e) Transaksi non rutin
Transaksi yang jarang terjadi justru menjadi transaksi yang rentan terhadap salah saji dan celah terjadi *fraud*.
- f) Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat akun saldo dan transaksi yang tepat
Sebagian besar akun memang membutuhkan ketepatan pencatatan sehingga saldo yang tercantum juga akan tepat.

- g) Unsure populasi
Setiap item dapat membentuk total populasi, misalnya akun piutang usaha akan mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji.
- h) Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan
Risiko kecurangan dapat dinilai untuk keseluruhan proses audit, yaitu menurut siklus, akun, dan tujuan. Respon auditor terhadap munculnya risiko mencakup revisi penilaian risiko audit yang dapat diterima, *inherent risk*, *detection risk* dan *control risk*.

2) *Detection Risk*

Merupakan risiko dimana bukti audit untuk suatu segmen yang dinilai tidak mampu atau akan gagal mendeteksi adanya salah saji yang melebihi salah saji yang bisa ditoleransi. *Detection risk* berada di dalam kendali auditor, oleh karenanya auditor harus berupaya untuk menekan risiko ini ke tingkatan yang paling rendah, karena risiko ini tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya.

Risiko deteksi bisa muncul karena adanya pernyataan yang tidak bisa terdeteksi melalui pengujian substantive oleh auditor. Untuk meminimalkan terjadinya *detection risk*, auditor harus mengembangkan perencanaan audit secara tepat dan melakukan supervise atas pelaksanaan audit.

Ada 4 faktor yang berpotensi menghasilkan *detection risk* yang tinggi, yaitu:

- a) Salah mengaplikasikan prosedur audit.
- b) Salah menginterpretasikan hasil audit.
- c) Salah memilih metode uji.
- d) Pengujian terhadap *control risk* yang kurang intensif.

3) *Control Risk*

Control risk atau risiko pengendalian mengukur penilaian auditor terkait apakah salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima di suatu bagian pengauditan akan dapat dideteksi atau dicegah dengan tepat waktu oleh pengendalian internal klien. *Control risk* juga bisa timbul akibat lemahnya sistem pengendalian internal klien, baik desain SPI nya maupun pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan desain SPI yang ada sehingga tidak mampu mencegah potensi salah saji material maupun *fraud*. *Control risk* tidak bisa dikendalikan oleh auditor tetapi bisa dikendalikan oleh auditee jika auditee bersedia. Jika risiko pengendalian ditetapkan dalam jumlah yang tinggi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audir yang lebih banyak.

Karakter perusahaan yang berisiko memiliki *control risk* tinggi, antara lain:

- a) Struktur organisasi yang tidak jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang juga tidak jelas. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan *control risk*-nya juga tinggi.
- b) Lemahnya pengawasan manajemen terhadap operasional perusahaan.
- c) Tidak memiliki auditor internal dan komite audit.
- d) Sistem pengendalian internal lemah atau tidak efektif.

Langkah-langkah untuk mendeteksi adanya *control risk*:

- a) Menelusuri dokumen pendukung transaksi.
- b) Melakukan perhitungan fisik secara acak. Dan hasilnya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan klien.
- c) Apabila klien menggunakan sistem teknologi informasi, maka auditor harus memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan semestinya.

b. Menilai Risiko audit yang dapat diterima

Risiko audit yang dapat diterima merupakan risiko audit yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesediaan auditor dalam menerima kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan setelah audit selesai dilaksanakan dan opini telah dikeluarkan. Jika auditor meyakini di dalam laporan keuangan tidak ditemukan salah saji material, maka auditor akan memutuskan risiko yang dapat diterima lebih rendah.

Dalam sebuah proses audit, auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima, terlebih lagi dilakukan selama proses perencanaan audit dengan cara:

- 1) Auditor menetapkan risiko kontrak kerja.
- 2) Menggunakan risiko kontrak kerja tersebut untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima yaitu:

- 1) Tingkat ketergantungan pemakai eksternal terhadap laporan keuangan

Jika pemakai eksternal sangat bergantung pada laporan keuangan maka risiko audit yang dapat diterima jadi berkurang. Beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat ketergantungan pemakai eksternal terhadap laporan keuangan yaitu:

- a) Ukuran klien

Yang diukur menurut asset atau total pendapatan.

b) Distribusi kepemilikan

Apabila perusahaan bersifat terbuka maka pemakai laoran keuangan lebih banyak daripada perusahaan tertutup.

c) Jumlah dan sifat kewajiban

Jika dalam laporan keuangan terdapat kewajiban dalam jumlah besar, maka laporan keuangan tersebut akan banyak digunaka oleh para kreditur ataupun calon kresitr secara luas daripada perusahaan dengan jumlah kewajiban yang berjumlah kecil.

2) Kondisi yang memungkinkan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan.

Auditor seringkali mengalami kesulitan untuk memprediksi kegagalan keuangan klien sebelum hal itu terjadi, namun ada beberapa faktor yang mengindikasikan terjadinya kesulitan keuangan klien, antara lain:

a) Posisi likuiditas

Jika klien mengalami kekurangan modal kerja serta kas sehingga akan terjadi kesulitan dalam pembayaran kewajiban di masa mendatang.

b) Laba atau rugi periode sebelumnya

Apabila perusahaan mengalami penurunan laba atau peningkatan kerugian maka auditor harus mengetahui masalah solvensi yang akan dihadapi klien di amsa mendatang.

c) Metode pembiayaan pertumbuhan

Apabila perusahaan lebih mengandalkan utang sebagai alat pembiayaan, maka kemungkinn besar akan terjadi kesulitan keuangan di masa mendatang. Auditor harus bisa

mengevaluasi apakah asset klien dibiayai dengan utang jangka pendek atau jangka panjang karena kebutuhan kas yang besar dalam jangka pendek dapat menyebabkan kepailitan.

d) Sifat operasi klien

Jenis bisnis tertentu dapat mempengaruhi risiko yang terjadi.

e) Kompetensi manajemen

Manajemen yang memiliki kompetensi akan selalu waspada terhadap potensi adanya kesulitan keuangan yang akan dihadapi oleh perusahaan sehingga manajemen akan memodifikasi metode operasinya guna meminimalkan dampak masalah keuangan yang timbul.

3) Evaluasi auditor atas integritas manajemen

Apabila auditor meragukan integritas klien, maka auditor akan menilai risiko audit yang diterima akan lebih rendah.

3. Hubungan Risiko terhadap Bukti Audit

Konsep materialitas dan risiko di dalam audit saling terkait satu sama lain. Keduanya berperan untuk mengukur jumlah ketidakpastian dalam suatu besaran tertentu dimana risiko audit merupakan ukuran ketidakpaastian, sedangkan materialitas merupakan ukuran tinggi rendahnya atau besaran dari ketidakpastian tersebut.

Respon auditor terutama pada risiko yaitu dengan melakukan perubahan terhadap jenis prosedur audit dan luas pengujian, termasuk memasukkan unsure ketidakpastian dalam prosedur audit yang akan digunakan. Ada beberapa cara yang digunakan oleh auditor dalam merespon risiko audit, antara lain:

a. Menugaskan staf yang berpengalaman

Dalam menyusun staf pada setiap penugasan, KAP harus memperhatikan kualifikasi pada masing-masing staf. Contoh: *partner* pada sebuah KAP memperkirakan terdapat risiko inheren yang tinggi pada akun persediaan klien, maka *partner* akan menempatkan staf auditor yang berpengalaman melakukan audit persediaan.

b. Melakukan review dengan seksama terkait penugasan

Penilaian atau review harus dilakukan oleh auditor secara memadai guna memastikan risiko yang adandan mengukur tingkat risiko tersebut untuk menyusun langkah auditor selanjutnya guna meminimalkan risiko tersebut.

Beberapa hal yang harus direview oleh KAP antara lain:

- 1) File audit yang mendokumentasikan rencana audit, bukti audit yang dikumpulkan, kesimpulan serta masalah lain yang muncul selama proses audit.
- 2) Risiko pengendalian maupun risiko inheren umumnya tidak dinilai untuk audit secara keseluruhan, tetapi dinilai untuk setiap siklus serta untuk setiap akun, beserta tujuan audit terhadap akun tersebut.
- 3) Risiko audit yang dapat diterima umumnya dinilai oleh auditor selama tahap perencanaan audit dan bersifat tetap atau tidak berubah pada setiap siklus dan akun utama.
- 4) Risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang dibutuhkan biasanya akan bervariasi dari tujuan satu ke tujuan yang lain, dari akun satu ke akun yang lain, atau dari siklus ke siklus yang lain, seperti halnya risiko pengendalian dan risiko inheren.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Internal Audit Function Role in Operational Risk Management*

Penulis : *Ana Fernandez, Laviada*

Introduction

Dalam Basel modal Accord (NBCA) menetapkan bahwa :

Bank harus mengemabngkan kerangka kerja untuk mengelola risiko operasional dan mengevaluasi kecukupan modal yang diberikan. Kerangka kerja harus mencakup toleransi risiko operasional yang ditetapkan melalui kebijakan.

Pada Capital Requirement Directive, kerangka nya harus ditinjau secara ateratur oleh auditor internal atau eksternal. Dewan direksi harus mampu memastikan bahwa bank tunduk pada manajemen internal audit (secara independen) yang efektif dan komprehensif. Sebagai contoh pelaksanaannya :

1. Dewan direksi harus memastikan stafnya berkompeten dan terlatih
2. Dewan direksi memastikan bahwa adanya kebebasan dalam pengelolaan audit.

Pada internal audit harus beradaptasi dengan rencanan dan prosedur untuk memastikan pengawasan perencanaan sistem. Terdapat beberapa tujuannya yaitu:

1. Dapat mengkonfirmais tingkat kebijakan dan prosedur yang disetujui dewan direksi
2. Tinjauan terhadap integritas dalam proses idnentifikasi OR
3. Pemantauan yang berkala untuk menilai keseluruhan daerah dari bank

Oversight of the operational risk management framework

1. Appropriate operational risk management environment

Komite basel menetapkan 3 prinsip dasar untuk mencapai tujuan yaitu:

- a. Struktur organisasi. Dewan ini bertanggung jawab membangun struktur manajemen yang melaksanakan OR. Internal audit meninjau:
 - 1) Adanya fungsi OR independen dengan staf yang berkualitas dengan diperlukan pengalaman, kemampuan teknis dan akses ke sumber daya.
 - 2) Penetapan OR manajer disetiap daerah dari entitas dalam berbagai unit bisnis dalam grup.
 - 3) Penciptaan atau komite untuk memandu manajemen senior dan untuk menentukan komposisi dan fungsi.
 - 4) Pembentukan jalur komunikasi antara orang yang bertanggung jawab untuk mengelola OR unit usaha tingkat dan untuk mengkoordinasikan penampilan yang berkaitan dengan OR.
- b. Peran dewan dan senior manajemen. Salah satu faktor yang paling penting dalam pengadopsian dan implementasi dalam kerangka OR yang efektif. Auditor internal akan memverifikasi :
 - 1) Pertanggung jawaban manajemen senior dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan, proses dan prosedur
 - 2) Manajemen senior harus mengimplementasikan kebijakan tertentu, proses dan prosedur yang dilaksanakan dan diverifikasi pada unit bisnis.

2. *Operational risk identification*

Dalam New accord modla tuntutan yang terus-menerus, sistematis audit harus:

- a. Menverifikasi keberadaan dalam entitas tertentu untuk OR
- b. Memastikan bahwa fungsi OR mampu identifikasi kelemahannya
- c. Didokumentasikan dengan baik proses ini
- d. OR Telah menerapkan prosedur pengendalin yang mencerminkan entitas

Auditor harus melakukan :

- a. Menganalisis kualitas dokumentasi yang didukung proses OR
- b. Menverifiaksi waktu dan proses integritas

Dalam identifikasi risiko faktor intenal dan eksternal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mencapai tujuan bank. Internla auditor harus mempertimbangkan risiko internal yaitu:

- a. Struktur organisasi yang tidak memadai yang tidak memfasilitasi pemisahan fungsi atau mengawasi dan menganalisis kegiatan dikembangkan diperusahaan.
- b. Non-ekstensi manual berisi kebijakan, proses dan prosedur meliputi kegiatan badan/ entitas
- c. Non-eksistensi fungsional manual berisi kebijakan manajemen lingkungan yang berbeda setiap area

Internal auditor harus mempertimbangkan faktor risiko internal berikut :

- a. Struktur organisasi tidak memadai jika tidka ada pemisahan fungsi yang dikembangkan pada perusahaan

- b. Non eksistensi manual berisi kebijakan, proses, prosedur meliputi kegiatan entitas
- c. Non-eksistensi manual fungsional manual mendefinisikan manajemen lingkungan berbeda area
- d. Kurangnya tatakelola perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan
- e. Kurangnya kode etik yang mengatur kinerja keseluruhan entitas.
- f. Kurangnya otomatisasi proses utama.
- g. Tidak adanya mekanisme pengawasam yang efektif untuk operasi dan proses

Internal auditor mempertimbangkn faktor risiko eksternal meliputi:

- a. teknologi usang
- b. kegagalan utnuk menyesuaikan prosedur yang mencerminkan kerangka peraturan baru dan memantua pelaksanaanya
- c. kegagalan dalam beradaptasi dan mempertimbangkan, pasar baru produk atau kegiatan
- d. munculnya penipuan baru.

Operational Risk Management

Bank seharusnya menilai risiko inheren yang melekat pada operasional untuk semua produk yang material, kegiatan, proses dan sistem. Penilaian risiko yang efektif harus menggabungkan antara evaluasi kualitatif dan kuantitatif.

1. *qualitative evaluation*

Auditor internal akan merancang prosedur untuk memverifikasi keberadaan model evaluasi dan menilai apakah

model evaluasi ini telah sesuai atau belum. Dalam beberapa kasus, model evaluasi ini harus menggunakan informasi dari kategori lini bisnis dan didefinisikan sesuai yang tercantum dalam *New Capital Accord* dan berkontribusi terhadap manajemen.

Secara khusus, aspek yang harus dinilai dari bagian program internal audit antara lain:

- a. Desain model yang akan digunakan untuk mengevaluasi risiko operasi entitas.
- b. Tugas dari seorang manajer operasional untuk bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap risiko operasional.
- c. Adanya partisipasi dari komite yang bertanggung jawab atas penelitian dan persetujuan untuk berbagai aktivitas, produk, proses dan sistem yang berjalan.
- d. Dimasukkannya semua kelompok dan unit fungsi bisnis yang terlobat dalam model evaluasi.
- e. Hubungan antara lingkup organisasi entitas dan lini bisnis sesuai dengan definisi di dalam *New Capital Accord*.
- f. Keandalan dari prosedur manajemen risiko dari aktivitas operasi masing-masing cabang entitas.
- g. Keberadaan prosedur internal dalam entitas.
- h. Adanya pelaporan permanen mengenai aktivitas operasi antar manajemen.
- i. Adanya dokumentasi dari proses evaluasi yang ada secara mendetail untuk memfasilitasi review yang akan dilakukan oleh pihak ketiga (auditor eksternal bank).

Faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor internal dalam merancang prosedur audit mereka antara lain:

- a. Proses pengambilan data. Menjamin keandalan hasil atau data yang diperoleh.

- b. Validasi internal. Proses validasi internal digunakan untuk menilai kinerja dari prosedur yang digunakan dan juga mengevaluasi kualitas audit dengan sistem yang ada.
- c. Parameter dari evaluasi kualitatif. Parameter dari evaluasi kualitatif meliputi penilaian kewajaran dari pemilihan sistem evaluasi yang dipilih.

2. *Quantitative evaluation*

Dua faktor utama dalam evaluasi kuantitatif yang digunakan dalam menilai risiko operasional adalah lingkungan bisnis beserta pengendalian internalnya dan analisa data yang berasal dari eksternal entitas.

a. *Risk indicator*

Merupakan ukuran yang menunjukkan proses kinerja dari perusahaan yang dapat memberikan wawasan dalam tingkat risiko bank. Indikator yang dimiliki oleh bank ini selalu siap terhadap perubahan yang mungkin menunjukkan adanya kemungkinan risiko dan mempengaruhi anggaran yang telah disusun oleh bank.

Tujuan dan prosedur audit untuk indikator risiko ini dirancang oleh entitas harus mempertimbangkan hal-hal seperti:

- 1) Keberadaan dari sistem pengukuran kuantitatif.
- 2) Memperhitungkan kelebihan dari sistem evaluasi.
- 3) Monitoring atas indikator yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan pelaporan atas hasil dari masing-masing wilayah entitas dan laporan dari manajemen senior.

b. *Analysis of operational loss events*

Secara umum entitas memiliki sistem untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan dan memitigasi peristiwa kerugian ini melalui evaluasi dan sistem penilaian risiko operasional.

Pertimbangan auditor internal dalam merencanakan rencana audit, antara lain:

- 1) Adanya metode yang pasti mengenai pengumpulan data atau informasi mengenai kerugian. Pengumpulan informasi tetap harus memperhitungkan eksposur risiko dengan lini bisnis dan jenis risikonya sebagaimana didefinisikan dalam *New Capital Accord*
- 2) Adanya infrastruktur untuk menanggulangi kerugian yang terjadi di dalam entitas.
- 3) Pelaporan adanya peristiwa kerugian
- 4) Memvalidasi hasil temuan
- 5) Adanya rencana perbaikan
- 6) Melakukan pelaporan atas hasil dari masing-masing wilayah entitas dan laporan dari
- 7) Melaporkan hasil evaluasi pada pihak yang berkepentingan.

3. *Operational risk mitigation*

Pelaksanaan sistem penilaian terhadap risiko operasional secara menyeluruh harus dapat memastikan dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko yang ada sesuai kondisi dan keadaan entitas serta harus sesuai dengan ambang batas risiko yang dapat diterima.

Prosedur yang diterapkan oleh auditor internal antara lain:

- a. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil penilaian pada area bisnis dan manajemen.
- b. Pembentukan rencana untuk tindakan selanjutnya
- c. Monitoring rencana yang akan dilakukan.

4. *Monitoring and reporting operational risk*

Auditor internal harus memverifikasi keberadaan proses pelaporan eksternal yang menyediakan informasi untuk pihak ketiga, yaitu auditor eksternal, masyarakat, pemerintah, dll. Auditor harus memeriksa mengenai prosedur dan kebijakan yang ada serta memeriksa dokumentasi yang berisi tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh entitas untuk mencapai tujuan perusahaan serta aksesibilitas dan transparansi data yang digunakan.

Auditor internal harus menganalisa laporan yang dihasilkan yang terdiri dari:

- a. Tujuan dari pemilihan sistem
- b. Distribusi informasi yang diperoleh
- c. Bagaimana tentang pendokumentasian informasi tersebut
- d. Sumber data
- e. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi tersebut dan memonitoring proses tersebut.

Methodology for the calculation of capital

Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh auditor akan mempengaruhi metodologi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan proses audit.

Dalam proses audit, auditor internal harus mempertimbangkan:

1. Adanya fungsi yang bertanggung jawab.
2. Tingkat otomatisasi dari proses dan pelaksanaan kontrol.

3. Pembentukan batas toleransi atau ambang batas
4. Membentuk sistematika pelaporan
5. Dokumentasi yang memadai atas terkumpulnya informasi

1. *Basic indicator approach*

Auditor internal harus memastikan bahwa pemilihan opsi dan prosedur tidak menyiratkan ketidakpantasan terhadap penilaian risiko operasional.

2. *Standardized approach*

Auditor internal akan mengkonfirmasi keberadaan mengenai kebijakan yang dilih dalam prosedur audit. Konfirmasi dibuat untuk:

- a. Penugasan semua kegiatan yang dilakukan dalam entitas
- b. Adanya kerjasama dengan area yang bertanggung jawab mengelola risiko lainnya seperti kepatuhan, risiko kredit dan risiko pasar.
- c. Pertimbangan desain risiko operasional, menganalisa dan mendapatkan otorisasi atau persetujuan.
- d. Meninjau pendapatan kotor dalam laporan keuangan
- e. Struktur dan sistem akuntansi yang dipilih oleh entitas
- f. Dokumentasi keseluruhan hasil penugasan
- g. Aplikasi yang memadai untuk mendukung prosedur audit internal.

3. *Advanced measurement approaches*

Kompleksitas dalam penerapan jenis metodologi membuat entitas harus melakuak proses sesuai dengan peraturan pemerintah. Aspek yang harus diperhatikan oleh auditor internal dalam melakukan proses pemeriksaan dan analisis, yaitu:

- a. Adanya rencana untuk meninjau dan memantau fungsi untuk pelaksanaan mitigasi risiko operasional.
- b. Adanya panduan operasional untuk semua tingkat staf.
- c. Pengembangan dan pembentukan rencana dan proses untuk semua tingkatan staf.
- d. Proses identifikasi dan pengumpulan data dan proses analisa yang dilakukan.

Conclusion

1. Bagian terpenting dari tata kelola perusahaan yang sehat adalah adanya pengendalian internal yang kuat dan ini termasuk ke dalam fungsi audit internal karena merupakan sumber informasi yang berharga mengenai risiko internal dan eksternal untuk manajemen bank.
2. Kerangka risiko operasional yang dimiliki manajemen yang efisien akan meningkatkan dan memperkuat pengendalian internal organisasi.
3. Audit internal harus waspada terhadap seluruh proses pelaksanaan sistem untuk mengelola risiko operasional di dalam entitas. Memodifikasi bentuk dari perilaku dan tidak hanya mengadaptasi prosedur dari sudut pandang fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan budaya yang kuat, memperkuat kerangka kerja di dalam entitas.
4. Pada akhirnya keseluruhan proses dan prosedur audit internal akan menghasilkan informasi yang lebih baik bagi pihak ketiga seperti supplier, masyarakat dan pemerintah.

2. Artikel Kedua

Judul : *Do Auditors Assess Inherent Risk As If There Are No Controls?*

Penulis : Timothy C. Miller

Introduction

1. Pada penelitian ini menguji tentang auditor dalam melakukan penilaian risiko salah saji bermaterial (RMM) sesuai dengan standar hari ini. Adanya standar setter mempunyai tingkat keefektivitasan pada audit efisiensi sebagai IR dan IC untuk mampu menentukan sifat, waktu dan tingkat audit tes.
2. Penelitian ini meneliti apakah auditor menilai IR tanpa memasukkan asumsi mereka tentang kontrol klien. Penelitian ini menyelidiki percobaan dengan dua fasa. Fasa pertama 54 auditor dari big 4 untuk mengevaluasi efek khusus yang melekat dari faktor RC di RMM, pada tahap kedua meminta para auditor untuk membuat penilaian RMM sebagai hipotesis klien yang tentang faktor CR dari waktu ke waktu. Para auditor senior seringkali meningkatkan penilaian terhadap RMM dalam pengendalian internal sebagai bentuk harapan pengendalian yang efektif untuk menilai IR.

(In)dependence of IR and CR

1. Secara tradisional risiko audit telah dinilai kesesuaiannya dengan SAS NI 147 (AICPA, 1983) dan 39 (AICPA,1981) SAS NO 47 mendefinisikan IR sebagai :
"kerentanan saldo akun atau golongan transaksi terhadap kesalahan yang bisa menjadi bermaterial bila digabungkan

dengan kesalahan dalam saldo atau kelas-kelas dan dengan asumsi bahwa tidak ada pengendalian akuntansi internal terkait.

2. CR Didefinisikan sebagai:

“Risiko terhadap kesalahan dapat terjadi dalam akun atau kelompok transaksi dan itu bisa menjadi bermaterial, bila digabungkan dengan kesalahan dalam saldo atas kelas-kelas lain, tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal akuntansi (AICPA 1983).

Dalam model Kinney pada penelitiannya (1989) dinyatakan sebagai salah satu konsep penilaian probabilitas dari RMM untuk menilai CR dan IR.

- a. Setiap informasi dalam pengendalian yang relevan harus mampu mengurangi RMM, sebagai contoh auditor dalam menilai IR dari salah saji material ketika meragukan account dengan tingkat 90% karena entitas pada piutang meragkan dan sangat kompleks.
- b. Para auditor mengindikasikan bahwa menilai risiko dengan bertanya bagaimana pengendalian nya bisa mengurangi kesalahan, dan apa yang bis amenjadi salah? Olehkarenanya dalam big4 terdapat beberapa rincian tentang proses penilaian risiko yaitu:
 - 1) Adanya IR pada laporan keuangan
 - 2) Penialain pada entitas terkait tingkat pengendalian (CR)
 - 3) Ada pernyataan tentang risiko pada laporan keuangan.
- c. Penilaian ketiga bagian ini mengikuti prosedur pada saat auditor melakukan wawancara, yaitu

Expectations

1. Pada desain penelitian Haskin (1995) adanya pengendalian dalam lingkungan akan mampu menilai potensialnya IR dan CR yang diberikan pada subject. Desain penelitian ini memungkinkan untuk memberi informasi tentang pengendalian terhadap RMM.
2. IR faktor diharapkan untuk meningkatkan atau menurunkan RMM pada awal penilaian. CR faktor menjadi kekuatan atau arah dari faktor dalam penilaian, sehingga IR faktor akan meningkat atau menurunkan RMM bergantung pada kekuatan atau arah faktor. Dan diharapkan bahwa CR akan mampu menurunkan (tidak berpengaruh) pada Assesment RMM. Hipotesisnya :

H1 : Revisions of RMM based on internal control information will either reduce or have no effect on the prior RMM assessment.

Method

Terdapat dua fasa untuk menilai/ melakukan percobaan terhadap faktor IR dan CR faktor pada RMM. Faktornya tercantum pada apendiks diambil dari SAS 109.

Pada tahap 1:

Peserta diminta untuk mengevaluasi delapan faktor risiko dengan menjawab prompt “mengabaikan semua informasi lain (termasuk tidak menyediakan informasi perusahaan”, bagaimana Anda pikir faktor berikut akan bisa mempengaruhi risiko salah saji material (RMM)? Delapan faktor risiko yang kemudian disajikan secara individual dan peserta menunjukkan apakah dan untuk tingkatan apa, faktor risiko meningkat,

menurun, atau tidak berpengaruh pada RMM (-5 penurunan pada RMM , dan +5 kenaikan pada RMM)

Pada tahap 2 :

Kami memperluas penelitian kami dengan memeriksa kombinasi IR dan CR dalam penentuan RMM. Fase ini menyajikan konteks pada latar belakang perusahaan. Setelah membaca latar belakang perusahaan participant diminta untuk memberikan penilaian dasar dari RMM.

Oleh karena itu sementara Tahap 1 menangkap efek langsung dari faktor risiko pada RMM tahap 2 meminta partisipan untuk membuat penilaian risiko yang mempengaruhi RMM secara berurutan.

Results

Survey dilakukan pada participant sebanyak 54 terdapat 48% pesertanya laki-laki, yang memiliki rata-rata 4 tahun pengalaman dan telah berpartisipasi dalam penilaian risiko diperusahaan. Semua partisipan mengikuti sesi pelatihan pada perusahaan big4.

Hasil tahap 1 :

Peneliti menemukan bahwa informasi pada kualitas pengendalian (kompetensi audit internal) menyebabkan peningkatan RMM pada saat ketika ditafsirkan oleh auditor. Secara khusus hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada RMM yang disebabkan pada faktor CR, Dalam 216 kasus penilaian RMM mengenai pengendalian pada tahap 1 (54 peserta) -RMM telah dinilai meningkat sekitar 45%.

Hasil tahap 2:

Auditor menilai 3 dari 4 faktor yang secara signifikan dapat meningkatkan RMM. Serupa dengan tingkat 45% dari keseluruhan kenaikan RMM ditemukan tahap 1 untuk faktor CR sekitar 48%.

Conclusion

1. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa CR dapat tergantung pada tingkat nilai IR. Penilaian CR oleh auditor secara signifikan dipengaruhi oleh IR, yang disebut sebagai *downstream*.
2. Dalam mengevaluasi faktor risiko auditor dalam konteks ARM mereka harus menilai faktor IR dan CR secara konsisten.
3. Pada penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana praktisi yaitu auditor bisa menginterpretasikan faktor risiko, dan mereka mampu untuk menilai risiko sesuai dengan standar yang berasal dari teori. Peningkatan penilaian risiko maka akan mengarah pada perencanaan audit yang lebih efektif.

BAB IX

AUDIT ATAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN

Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan and sasarnya. Kebijakan dan prosedur ininkemudian dikenal dengan pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk sistem pengendalian internal.

Tujuan utama dalam perancangan sistem pengendalian internal yang efektif:

1. Keandalan atau reabilitas atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi para kreditur, investor dan para pengguna lainnya. Manajemen juga bertanggung jawab secara professional dan hukum mengenai laporan keuangan yang benar bahwa informasi yang disajikan tersebut telah sesuai dengan persyaratan

yang tercantum dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu pengendalian internal yang dijalankan atas pelaporan keuangan, salah satunya bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan oleh manajemen.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan

Sistem pengendalian internal akan digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan sasaran dan tujuan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Oleh karena itu sistem pengendalian internal ditujukan untuk memperoleh semua informasi keuangan dan non keuangan tentang operasi perusahaan yang akurat dalam keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen.

3. Kepatuhan akan hukum dan peraturan

Dalam Sarbanes Oxley Act tercantum dalam Section 404 yang mewajibkan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan mengenai keefektifan atas pelaksanaan pengendalian internal laporan keuangan perusahaan. Selain menaati ketentuan yang tercantum di dalam Sarbox Section 404, perusahaan, organisasi publik, maupun non publik serta organisasi nirlaba diharuskan untuk juga mematuhi berbagai peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai contohnya mengenai Undang Undang Perlindungan lingkungan dan hak sipil, dalam hal ini tidak ada keterkaitannya dengan akuntansi. Sedangkan peraturan dan hukum yang ada kaitannya dengan akuntansi seperti Undang undang dan ketentuan perpajakan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor atas pengendalian internal

Manajemen dan auditor memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai tanggung jawab atas pengendalian internal. Dilihat dari sisi manajemen, ia bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pengendalian internal entitas. Menurut isi pada Section 404, pembuatan laporan keuangan secara transparan merupakan bentuk efektifitas pelaksanaan sistem tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari sisi auditor, ia bertanggung jawab untuk memahami dan menguji sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Menurut Section 404, auditor juga diharuskan untuk mengeluarkan laporan audit mengenai penilaian manajemen terhadap pengendalian internlanya, termasuk mengeluarkan pendapat atas efektif atau tidaknya pengendalian tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen

1. Tanggung jawab manajemen dalam penetapan pengendalian internal

Pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pengendalian internal entitas adalah manajemen bukan auditor. Hal ini sesuai dengan konsep yang terdapat dalam GAAP mengenai penyusunan laporan keuangan. Ada dua konsep utama yang menjadi landasan dalam merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal, yaitu:

- a. Kepastian yang layak

Pengembangan pengendalian internal harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memberikan kepastian yang

layak, namun bukan absolute. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan seharusnya bersifat wajar. Kepastian yang layak hanya memeberikan kemungkinan kecil dalam mencegah dan mendeteksi kealahan saji material secara tepat waktu oleh pengendalian internal.

b. Keterbatasan inheren

Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif seratus persen, tanpa menghiraukan kecermatan dan ketelitian dari pihak manajemen yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya.

2. Tanggung Jawab Laporan Manajemen menurut Sarbox Section 404

Setiap manajemen dalam perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan laporan pengendalian internal yang tercantum dalam Sarbox. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. Adanya pernyataan bahwa pihak manajemen harus bertanggung jawab atas penetapan dan penyelenggaraan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur laporan keuangan.
- b. Adanya suatu penilaian atas efektivitas prosedur laporan keuangan dan struktur pengendalian internal per akhir tahun fiscal perusahaan.

Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan A.S adalah internal control - integrated framework yang dikeluarkan Commitee of Sponsoring Organization dari Treadway Commosision (COSO). Identifikasi manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan mencakup:

a. Rancangan pengendalian internal

Manajemen harus melakukan evaluasi mengenai apakah pengendalian internal yang telah dirancang dan diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan.

b. Efektifitas pelaksanaan pengendalian

Pihak manajemen juga harus melakukan uji efektivitas atas pelaksanaan pengendalian internal. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal yang telah dirancang berjalan sebagaimana mestinya dan apakah pihak yang melakukan mempunyai kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian internal secara efektif.

Tanggung jawab Auditor

1. Tanggung jawab auditor dalam memahami pengendalian internal

Pengetahuan mengenai pengendalian internal klien dinyatakan terpisah dalam standar auditing yang berlaku umum. Auditor harus memiliki pemahaman yang benar dan cukup mengenai lingkungan dan entitasnya termasuk pengendalian internal, menilai apakah risiko salah saji material dalam laporan keuangan disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan.

2. Pengendalian atas keandalan/reabilitas laporan keuangan

Auditor berfokus pada poengendalian yang berkaitan dengan perhatian manajemen yang pertama, yaitu mengenai keandalan laporan keuangan. Hal ini digunakan untuk mematuhi standar pekerjaan lapangan yang kedua yaitu Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.

Tidak seperti yang dilakukan oleh manajemen, auditor tidak berfokus pada pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas klien atas pengamatan aset dan ketaatan pada hukum karena akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan.

3. Pengendalian atas kelas transaksi

Pengendalian internal ditekankan oleh auditor atas kelas-kelas transaksi bukan saldo akun. Hal ini disebabkan oleh kakuratan output sistem akuntansi yang dicerminkan pada saldo akun sangat bergantung pada proses transaksi dan keakuratan input.

4. Tanggung jawab auditor dalam menguji pengendalian internal

Auditor menerbitkan dan menegaskan laporan tentang penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan. Hal ini merupakan persyaratan yang tertuang dalam Sarbox Section 404. Auditor harus memiliki pemahaman dalam melakukan pengujian terhadap pengendalian untuk semua transaksi seperti saldo akun, transaksi dan pengungkapan yang signifikan serta hal lain yang terkait dengan asersi dalam laporan keuangan.

Komponen Pengendalian Internal menurut dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organization* dari *Treadway Commission* (COSO)

Terdapat lima komponen pengendalian internal yang tercantum di dalam COSO. Lima komponen pengendalian ini dirancang dan ditetapkan oleh manajemen sehingga dapat

memberikan kepastian yang layak dan tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Lima komoonen pengendalian internal tersebut antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

Poin utama pengendalian internal yang efektif dari organisasi yang dikendalikan terletak pada sistem manajemen puncak, apabila anggota organisasi atau perusahaan cenderung tidak diperhatikan oleh manajemen puncak, maka tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan yang mencakup hal-hal mengenai prosedur dan kebijakan yang dijalankan. Berikut merupakan subkomponen pengendalian yang paling penting:

a. Integritas dan nilai-nilai etis

Pengertian dari integritas dan nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas serta bagaimana standar tersebut diberlakukan dan dikomunikasikan dalam praktek. Subkomponen ini mencakup langkah nyata manajemen untuk menghilangkan dorongan yang membuat staf melakukan hal-hal yang dilarang dalam standar etika, seperti *moral hazard* dan hal lain yang tidak etis.

b. Komitmen pada kompetensi

Definisi dari kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas. Tindakan nyata manajemen pada kompetensi mencakup adanya pertimbangan tingkat kompetensi bagi pekerja di posisi/bagian tertentu.

c. Partisipasi komite audit atau dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris memiliki tanggung jawab akhir untuk memastikan kelayakan penerapan pengendalian dan proses laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk membantu mengawasi manajemen, dewan komisaris membentuk sebuah organ yang disebut komite audit. Komite ini bertugas untuk mengawasi pelaporan keuangan, berkomunikasi dengan auditor eksternal dan internal dan menyetujui baik jasa audit maupun non audit.

d. Filosofi dan gaya operasional manajemen

Melalui kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, dapat memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan bahwa pengendalian internal sebagai suatu hal yang penting. Berdasarkan aktivitas tersebut, auditor dapat pula menilai sikap antusias manajemen mengenai pengendalian internal.

e. Struktur organisasi

Dengan memahami struktur organisasi dari sebuah entitas, auditor dapat menentukan tanggung jawab dan kewenangan dari penerapan atas pengendalian internal yang ada.

f. Kebijakan dan praktik sumber daya

Bagian yang penting dalam pengendalian internal adalah personil. Apabila para karyawan adalah orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya, maka pengendalian intern akan sukses dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memenuhi kualifikasi andal. Sebaliknya, sebaik apapun sistem pengendalian internal, jika dijalankan oleh orang yang tidak

berkompeten dan tidak berintegritas, maka justru akan mengagalkan pengendalian itu sendiri.

2. Penilaian risiko

Merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Setelah proses identifikasi risiko, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh manajemen adalah melakukan estimasi dan menilai kemungkinan terjadinya risiko dan mengembangkan sebuah tindakan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko tersebut bahkan ke level risiko yang dapat diterima. Hal ini berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor bertujuan untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit.

3. Aktivitas Pengendalian

Didefinisikan sebagai prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk menangani risiko guna tercapainya visi, misi dan tujuan entitas.

Kegiatan pengendalian pada umumnya dikelompokkan menjadi:

- a. Adanya pemisahan tugas yang memadai
- b. Otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan kegiatan
- c. Dokumentasi dan pencatatan yang lengkap
- d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan.
- e. Pemeriksaan independen atas kinerja.

4. Komunikasi dan Informasi

Tindakan memulai, memproses, dan melaporkan transaksi – transaksi yang terjadi serta mempertahankan akuntabilitas atas asset yang berhubungan dengan tujuan dari sistem komunikasi dan informasi akuntansi dari setiap entitas. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi yang mempunyai sub-sub komponen yang dapat membentuk kelompok transaksi misalnya: pembelian, penjualan, retur penjualan, dll.

5. Pengawasan

Kegiatan pengawasan berkaitan dengan penilaian kualitas pengendalian internal secara periodic atau berkelanjutan oleh pihak manajemen dalam menentukan bahwa pengendalian akan dijalankan sesuai tujuan dan dapat dimodifikasi apabila terdapat perubahan kondisi.

Informasi dapat dinilai dari berbagai macam sumber yaitu dari pengendalian internal yang telah ada, laporan dari regulator, laporan internal auditor serta laporan pengecualian atas aktivitas

Pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dan pengendalian internal

Auditor harus dapat mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu dengan pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Cara yang dilakukan antara lain:

1. Komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola

Auditor harus menyampaikan kelemahan yang material dan defisiensi yang signifikan secara tertulis kepada pihak yang

bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Komunikasi ini ditujukan kepada manajemen dan komite audit.

2. Surat manajemen

Auditor sering melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal, sehingga auditor harus mengkomunikasikannya dengan klien. Bentuk komunikasinya sering kali berupa surat terpisah yang kemudian disebut surat manajemen.

Hal-hal yang menjadi fokus pada penilaian pengendalian internal, antara lain:

1. filosofi dan gaya operasi

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal.

2. struktur organisasi entitas

menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada.

3. kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personal. Penilaian risiko (*risk assesment*) atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan pengendalian risiko-risiko yang relevan dengan penyusutan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendapatkan dan Melakukan Dokumentasi pemahaman terhadap pengendalian internal

Dokumentasi manajemen adalah sumber utama pada waktu mendapat pemahaman terhadap pengendalian internal. Auditor menggunakan prosedur dalam mendapatkan pemahaman, yang meliputi pengumpulan bukti mengenai rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian internal tersebut telah diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan informasi sebagai dasar audit terpadu.

Pada umumnya auditor menggunakan tiga jenis dokumen dalam mendapatkan serta melakukan dokumentasi pemahaman terhadap rencana pengendalian internal, yaitu:

1. Narasi

Naratif-naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Ada empat hal yang baik untuk mendapatkan narasi yang baik tentang sistem akuntansi dan pengendalian internal:

- a. Asal usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem
- b. Semua pemerosesan yang berlangsung
- c. Disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem
- d. Petunjuk tentang pengendalian yang relavan dengan penilain risiko pengendalian

2. Bagan Arus

Bagan arus (*flow chart*) pegendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi.

3. Kuesioner pengendalian internal

Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi definisi pengendalian internal.

Mengevaluasi Penerapan Pengendalian Internal

Metode umum yang digunakan dalam mengevaluasi penerapan pengendalian internal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pengalaman auditor sebelumnya yang diperoleh dari perusahaan yang pernah di audit.
2. Melakukan Tanya jawab dengan klien untuk mengevaluasi apakah karyawan memahami tugasnya dan melakukan prosedur pengendalian internal.
3. Melakukakan pengujian dokumen dan catatan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah informasi yang dijelaskna di dalam narasi dan bagan arus sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengamatan dan kegiatan dan operasi entitas.
5. Melakukan penelusuran pada sistem akuntansi. Pada setiap tahap pemrosesan auditor melaksanakan tanya jawab, melihat aktivitas dan menguji semua dokumen catatan.

Risiko Pengendalian

Menilai Risiko Pengendalian

Auditor harus memahami perancangan dan pengemplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian

pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang memadai secara keseluruhan.

Ada 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas :

1. Pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan.
2. Matrik risiko pengendalian untuk membantu proses penilai risiko pengendalian.

Langkah – langkah dalam penyusunan matriks antara lain:

1. Melakukan identifikasi tujuan audit.
 - a. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal : rancangan dan operasi
 - b. Menilai risiko pengendalian
 - c. Merancang melaksanakan,dan mengevaluasi pengujian pengendalian
 - d. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantive.
2. Melakukan identifikasi pengendalian yang sudah ada.

Auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian terdahulu mengenai perolehan dan pendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam pencapaian tujuan audit berhubungan dengan transaksi

3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait setiap pengendalian aka memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
4. Melakukan identifikasi dan evaluasi atas:

- a. defisiensi pengendalian kekurangan operasi terjadi apabila rencana atau pelaksanaan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. defisiensi yang signifikan adanya kekurangan yang signifikan terjadi apabila satu atau lebih kekurangan pengendalian yang tidak dapat dideteksi.
- c. kelemahan yang material kelemahan material muncul jika ada kekurangan signifikan yang lainnya. Hal ini dapat berakibat kemungkinan yang lebih kecil jika pengendalian internal belum mampu mencegah atau mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan.

Pengujian Pengendalian

Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah.

1. Mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat
2. Memeriksa dokumen ,catatan, dan laporan
3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian
4. Melaksanakan kembali prosedur klien

Luas prosedur

1. Mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya
2. Menguji pengendalian yang berhubungan dengan risiko yang signifikan
3. Menguji kurang dari seluruh periode audit

Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum :

1. Untuk memahami pengendalian internal ,prosedur untuk memperoleh pemahaman harus diterapkan pada semua pengendalian yang teridentifikasi selama tahap tersebut.

2. Prosedur untuk memperoleh pemahaman hanya pada satu atau beberapa transaksi atau dalam kasus observasi, pada satu titik waktu.

Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantive

Dalam menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantive terkait untuk audit atas laporan keuangan, auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Langkah-langkahnya antara lain:

1. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal : perencanaan dan pelaksanaan.
2. Menilai risiko pengendalian.
3. Merancang ,melaksanakan,dan mengevaluasi pengujian pengendalian.
4. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif

Pelaporan pengendalian internal menurut Sarbox Section 404

Berdasarkan penilaian dan pengujian auditor atas pengendalian internal, auditor diharuskan oleh UU Sarbanes-Oxley untuk menyusun laporan keuangan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Opini auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal telah ditanyakan secara wajar,dalam semua hal yang material.

Opini auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan, dalam semua hal yang material,pengendalian

internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan.

Jenis-jenis opini

1. Opini wajar tanpa pengecualian
2. Opini tidak wajar
3. Opini wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan opini

Mengevaluasi, Melaporkan, dan Menguji Pengendalian Internal untuk Perusahaan Nonpublik

Mengidentifikasi Perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan :

1. Persyaratan pelaporan
2. Luas pengendalian internal yang disyaratkan
3. Luas pemahaman yang diperlukan
4. Menilai risiko pengendalian
5. Luas pengujian pengendalian yang diperlukan

Jumlah pengendalian yang diuji oleh auditor untuk menayakan pendapat mengenai pengendalian internal bagi sebuah perusahaan publik jauh lebih besar ketimbang hanya menyatakan pendapat tentang laporan keuangan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Embedding Risk Management : Structure and Approaches*

Penulis : Ian Frasser and William Henry

Introduction

1. Munculnya The Turnbull Report dan The Hampel Report dengan latar belakang permintaan untuk pelaporan perusahaan tentang efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. The Turnbull Report didasari pada pendekatan berbasis risiko untuk pengendalian internal dan pada penilaian efektivitas.
2. Ada lima klasifikasi risiko yang tercantum dalam Turnbull Report yaitu risiko keuangan, bisnis, kepatuhan, operasional dan risiko lainnya.
3. Secara historis perusahaan lebih berfokus pada risiko keuangan, namun manajemen risiko yang baru menganggap harus adanya penilaian yang komprehensif dari seluruh bisnis dan lingkungannya.
4. Pendekatan untuk menilai risiko bisnis secara keseluruhan disebut dengan risiko enterprise-wide management (ERM) oleh Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission (COSO,2004) yang mendefinisikan keseluruhan proses dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil di dalam entitas dalam pengaturan strategi perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas, mengelola risiko dan memberikan jaminan untuk mencapai tujuan entitas.

5. Dan oleh UK Institut of Internal Auditor (IIA, 2004) merumuskan efektifitas pengendalian internal adalah sebagai proses terstruktur, konsisten, dan terus menerus di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, memutuskan tanggapan dan melaporkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuannya.
6. Hubungan antara manajemen risiko dan pengendalian internal belum banyak dijelaskan. Hampell, Turnbull dan FRC (2005) mendefinisikan hubungan tersebut dengan memanfaatkan para direksi untuk mengambil tanggung jawab dan mempertimbangkan semua kontrol, tidak hanya pelaporan keuangan.
7. Di dalam COSO (2004) dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari ERM dimana pengendalian internal merupakan cara untuk mengelola risiko.
8. Perkembangan saat ini dalam tata kelolanya, perusahaan menempatkan banyak tanggung jawab pada direktur perusahaan, komite audit and audit internal untuk efektivitas proses ERM.
9. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaporkan penelitian mengenai cara perusahaan dalam mengidentifikasi risiko, melakukan manajemen risiko, prosedur pengendalian dan juga melaporkan interaksi antara audit internal dan komite audit terkait kontribusi mereka dalam manajemen risiko.

Literature

1. *Risk Identification And Management*

- a. FRC (2005) menyatakan bahwa perkembangan ERM terjadi sangat tinggi dikarenakan adanya dampak dari Turnbull Report. Turnbull Report dianggap memberikan kontribusi pada penetapan standar serta ukuran manajemen risiko dan pengendalian internal.
- b. Menurut Bolton (2002) Turnbull Report memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menerapkan budaya pengendalian dan manajemen risiko sebagai ciri organisasi tersebut.
- c. Chown (2000); Diageo (Viles, 2000), Baklfour Beatty (Boswell, 2001) juga mengutip perkembangan dari implementasi Turnbull Report juga menguatkan identifikasi atas risiko dan pengendalian internal dalam manajemen beserta dengan model pelaporannya.
- d. Chown (2000) menyebutkan adanya struktur piramida pada kepemilikan organisasi dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko karena tanggung jawab melekat pada masing-masing tingkatan.
- e. Skinner dan Leptospira (2003) menyatakan bahwa pengendalian risiko menggunakan *control- self assessment* (CSA).
- f. Page dan Leptospira (2004) menyoroti penggunaan model *bottom up* dalam mengidentifikasi risiko yang melekat pada manajemen.
- g. Hodge (2002) menyatakan bahwa risiko harus dikaji dan dikelola.

-
- h. Page dan Spira (2004) risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko yang tinggi, rendah atau menengah.
 - i. Barlow (2000); Mustafa dan Kennard (2004) menyatakan bahwa risiko harus dipetakan dan dikelompokkan oleh auditor internal, manajemen, dan komite audit.
 - j. Boswell (2001) menyatakan organisasi harus menyusun sebuah *software* untuk dapat menilai dan menghitung risiko serta sebagai awal implemenatsi ERM.
2. *The role internal audit in erm*
- a. IIA (2004) mendefinisikan adanya peran auditor internal dan implemenatsi ERM untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan akan tercapai jika risiko utama usaha dapat dikelola secara tepat dan memastikan bahwa pengendalian interinal telah berjalan efektif.
 - b. Page dan Leptospira (2004) memyatakan bahwa personil auditor internal memiliki latar belakang keuangan.
 - c. ICAEW (2000) menjelaskan peran auditor internal dapat memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses dimana risiko diidentifikasi, diprioritaskan, dikelola, dikendalikan, dikurangi dan dilaporkan.
3. *The Role Of Audit Committees In Erm*
- a. Leptospira (2003) menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan *task framework* dalam proses penilaian risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh komite audit.
 - b. ERM dapat dijadikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan oleh auditor internal untuk mengatasi kendala dalam menilai risiko dan asimetri informasi.

- c. Beberapa literature menyebutkan bahwa komite audit mulai banyak menggunakan ERM.

Research question and methodology

- RQ1 : apa mekanisme untuk mengidentifikasi risiko kritis dan efektifitas manajemen dan apoa saja informasi yang bisa dikembangkan oleh dewan direksi?
- RQ2 : Apa peranan auditor internal dalam manajemen risiko dan bagaimana seharusnya fungsi audit internal melakukan fungsi pengendalian secara efektif?
- RQ3 : Apa peranan komite audit dalam manajemen risiko mengingat adanya keterbatasan waktu dan keahlian dalam proses manajemen risiko?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi isu-isu yang sedang berkembang.

The Interview

Koresponden di dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di bursa dan kantor akuntan publik Big 4. Pihak yang berpartisipasi antara lain:

1. *Financial director*
2. *Audit committee chairs*
3. *Internal auditor*
4. *Risk director*
5. *Audit partners*

Interview dilakukan dengan tujuan untuk:

1. *mechanism for identification and management of risk*

fungsi audit internal dan penggunaan ERM mampu mengidentifikasi risiko dan menyiapkan mitigasi kontrol,

tanggung jawab dan selalu beriringan dengan manajemen operasional.

2. *the role of internal audit in risk management*

Peneliti percaya bahwa audit internal mampu membuat bisnis menjadi lebih berorientasi dan memberikan dampak positif terhadap fungsi pengawasan bisnis.

3. *the role of audit committees in risk management*

Komite audit akan terlibat di dalam manajemen risiko sampai pada batas yang telah ditentukan. Komite audit akan melaporkan temuan kepada dewan direksi dan bertanggung jawab mengenai efektivitas ERM

Conclusion

Peranan auditor internal yang berkaitan dengan ERM adalah sebagai pihak yang memberikan jaminan bahwa risiko utama bisnis jika dikelola secara tepat dan pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan target yang ditetapkan perusahaan.

2. Artikel Kedua

Judul : *Audit Committees and Corporate Control*

Penulis : **Gerald Vinten and Connie Lee**

Introduction

1. Adanya kontrol manajemen menjadi semakin terpisah dari kepemilikan sejak pergantian abad kedua puluh. Penelitian di US 200 perusahaan telah menunjukkan pada periode 1992-1963, kepemilikan tanpa bunga dominan dalam perusahaan

telah meningkat dari 44 persen menjadi 84 persen, dan perusahaan dengan kontrol yang sama mayoritas menurun dari 11% menjadi 3%.

2. Pada penelitian yang ada di Inggris sebanyak 250 perusahaan mengungkapkan kecenderungan yang sama pada persentase perusahaan tanpa mengendalikan kepentingan yang cenderung sama.
3. Komite audit dikembangkan setelah runtuhnya Atlantic Corporation pada tahun 1965. Dalam rangka untuk meningkatkan independensi auditor, maka diterbitkan saham ekuitas untuk membentuk komite audit dan tersedia untuk auditor membahas tidak hanya laporan keuangan tetapi juga hal-hal yang terkait audit course.
4. Laporan Komite Watson Chartered Accountant diterbitkan pada tahun 1968 yang direkomendasikan bahwa undang-undang federal dan provinsi, harus memerlukan direksi perusahaan yang mempunyai efek kepada masyarakat untuk mengatur komite audit direksi tidak kurang dari tiga, dan bahwa sebagian besar tidak bertugas diperusahaan. Laporan keuangan yang diaudit harus mendapat persetujuan dari dewan direksi.

Background to Audit Committee Developments

The North American Experience

1. Konsep komite audit dikembangkan Di Amerika Utara pada tahun 1940an menyusul kasus McKesson-Robbins, Salah satu kasus penipuan yang paling terkenal dalam sejarah bisnis. Pembentukan komite audit mulai menarik minat setelah

terdapat isu pernyataan oleh komite eksekutif dari AICPA yang mendukung komite tersebut.

2. Pada tahun 1972 Komisi Bursa Saham (SEC) mendorong pembentukan komite audit oleh semua perusahaan yang terdaftar. Perkembangan komite audit di Kanada mengikuti pola yang sama, dalam rangka meningkatkan independensi auditor, komite Lawrence telah merekomendasikan kepada pemerintah Ontario yang perusahaan menerbitkan saham ekuitas yang diperlukan untuk membentuk komite audit dan tersedia untuk auditor untuk membaca tidak hanya laporan keuangan tetapi juga hal-hal yang relevan yang telah muncul pada audit course.

The UK Experience

1. Tidak ada persyaratan hukum untuk pembentukan komite audit dalam setiap beban hukum di Inggris. Perusahaan (Komite Audit) Bill dipelrukan bahwa pemegang saham perusahaan publik utama diberikan hak untuk memilih pembentukan komite audit.
2. Tugas yang ditetapkan komite audit dalam RUU meliputi : meninjau semua laporan keuangan sebelum publikasi mereka. Pertimbangan hal-hal pemeriksaan penting yang membutuhkan perhatian dewan, dan rekomendasi tentang pengangkatan dan remunerasi auditor eksternal.
3. Tradisi Inggris sering lebih suka self-regulation bukan paksaan hukum, pada tahun 1977 konfederasi industri Inggris mendirikan partai bekerja yang keluar secara luas mendukung prinsip-prinsip Bill yang diusulkan.
4. Sementara Institusi di direksi didukung janji lebih dari direktur non-eksekutif, telah menyatakan keprihatinan bahwa komite audit dengan peran tertentu dalam

pengawasan masalah manajemen keuangan dalam organisasi, dapat digunakan sebagai platform di mana tanggung jawab kolektif dewan yang dirusak.

Pressures on the Board of Directors

1. Pada dewan direksi perusahaan dipegang penuh pada tanggung jawab untuk arah dan manajemen Diskusi lingkup dan waktu pekerjaan audit dengan auditor internal
2. Penilaian efektivitas tim audit internal dan laporannya
3. Ulasan dari temuan audit, biasanya dikomunikasikan dalam surat manajemen oleh auditor eksternal.
4. Ulasan dari kebijakan akuntansi untuk memastikan kepatuhan dengan yang terbaik atau umumnya diterima standar praktek accounting
5. Ulasan dari laporan keuangan sebelum naik persetujuan
6. Rekomendasi kepada dewan signifikan dalam pengungkapan audit
7. Hal yang berkaitan dengan penunjukkan auditor dan remunisasi.

Audit Committees and the Board

1. Dalam analisis keterkaitan komite audit dan dewan, kita akan menyoroti beban regulasi meningkatkan eksternal yang dikenakan pada para direktur, oleh karena itu pelurnya mekanisme internal untuk membantu mereka dalam pemakaian dari tanggung jawab tersebut. Selain itu peneliti berusaha untuk mengklarifikasi peran komite audit. Dan melanjutkan untuk mengidentifikasi perusahaan.
2. Akuntabilitas dikomunikasikan melalui penilaian dan manajemen perusahaan oleh pemegang saham secara berkala.

3. Direksi umumnya diperlukan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara jujur dan adil pada perusahaan. Audit hukum tidak membebaskan direksi tanggung jawab utama ini. Hal ini juga tugas direktur untuk menjaga catatan akuntansi yang dirancang dengan baik.
4. Direksi bertanggung jawab untuk penilaian yang salah dalam kaitannya dengan solvabilitas perusahaan, penafsiran yang salah atas fakta-fakta dalam promosi perusahaan melalui penerbitan prospektus, perilaku yang merugikan dalam masalah saham, kesalahan dalam kegiatan pengambil alihan merger, serta pengajuan rekening dan laporan dalam batas waktu yang wajar.

Functions of Audit Committee

Pentingnya meninjau laporan keuangan oleh audit komite yang telah didokumentasikan dengan baik dalam penelitian. Terdapat 50% responden dalam studi 1978 menganggap ini sebagai fungsi utama untuk meningkatkan kualitas laporan yang diterbitkan. Komite akan memastikan bahwa manajemen dan auditor puas dengan kebenaran dan keadilan dari laporan keuangan sebelum mereka tunduk pada dewan utama. Beberapa hal yang menarik:

1. Prinsip akuntansi, kebijakan praktek yang digunakan dalam penyusunan account dan prospektus dan meninjau setiap perubahan
2. Keterbatasan pada arus keuangan
3. Tingkat kesesuaian dan pelaporan praktek dalam industri dan sesuai dengan perundang-undangan, saham asing dan persyaratan standar akuntansi.

4. Kelayakan metode pengukuran mengadopsi tempat akuntansi kontroversial, skema pada neraca keuangan, goodwill dan merk dagang, merger dan akuisisi
5. Kecukupan ketentuan kewajiban seperti pengguhan pajak, saham usang dan depresiasi aset
6. disclosure of non-recurring or individually significant items such as business rationalization expenses and cost of discontinuation of operations.
7. pengungkapan kontigensi ketentuan dan neraca saldo seperti kontrak kerugian komitmen modal dan mungkin pemerintah tindakan.
8. dasar subjektif perkiraan yang dibuat manajemen di daerah menentu dan tertunda litigasi klaim dan asuransi kerugian
9. pengungkapan transaksi tidak menentu seperti klaim litigasi tertunda dan asuransi kerugian
10. hal yang ingin auditor eksternal diskusikan dengan board

Conclusion

1. Penciptaan komite audit merupakan langkah maju untuk memberikan bantuan dalam arah yang benar. Berfungsinya komite audit di perusahaan di Amerika Utara, dalam sepuluh terakhir dan memberikan tingkat tertentu kenyamanan dalam perannya sebagai mekanisme yang berguna untuk para direktur untuk memantau tentang kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan.
2. Pelaksanaan komite audit harus selalu menjaga peran penasihat dan pengawasan didelegasikan oleh dewan. upaya meningkatkan kemerdekaan harus bisa terlepas dari tekanan dan mampu bertanggung jawab terhadap publik.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Quality Assurance and effectiveness of audit system*

Penulis : Karapetrovic and Willborn

Introduction

1. Kualitas audit dipakai sejak 20 tahun terakhir sebagai alat untuk menilai efektivitas dalam upaya meningkatkan jaminan kualitas dan mengevaluasi sesuai dengan standar kualitas yang berlaku seperti ISO 9000, Auditor kualitas memeriksa dalam beberapa tahap. Pertama mereka menilai kepatuhan prosedur jaminan kualitas dan dokumentasi terkait standar yang berlaku dan pedoman.
2. Penelitian ini menyajikan pandangan yang sistematis tentang jaminan kualitas di auditing. Pendekatan sistem untuk audit secara singkat dan didikuti oleh diskusi adanya jaminan kualitas audit dan pengendalian diberbagai elemen audit sistem.

Sistem pendekatan untuk audit

Mutu audit sistem dikumpulkan untuk independensi dan objektivitas serta verifikasi bukti audit, dan evaluasi terhadap kriteria audit. Bukti audit berkaitan dengan semua informasi dan materi yang dikumpulkan dengan tujuan mencapai tujuan audit yang direncanakan. Kriteria audit meliputi prosedur yang disepakati, pedoman, standar, SIO 9001 atau QS 9000 yang berfungsi sebagai patokan untuk audit individual.

Karakteristik dari pendekatan sistem dalam audit meliputi :

1. audit individual harmonis dan selaras mencapai tujuan strategis umum bukan seperangkat tujuan taktis yang tidak terkait.
2. Audit individu subsistem dari program audit (misalnya program untuk mengaudit sistem manajemen mutu dapat mencakup siklus audit pada kualitas individu selama periode 3 tahun)
3. Program audit adalah subsistem dari sistem audit general keseluruhan.
4. Sistem audit generic adalah subsistem dari sistem manajemen utama dan dikelola sesuai dengan yang sama manajemen pedoman, metodologi dan prinsip-prinsip sebagai sistem lain
5. Audit saling bergantung yang berarti fokus sementara pada pencapaian tujuan global yang sama dan berbagi sumber daya yang sama output dari satu atau lebih audit dapat menjadi masukan.
6. Audit adalah sistem terbuka dan dinamis yang berarti bahwa parameter dan kendala dimana mereka beroperasi dan dengan adanya perubahan seiring waktu.
7. Audit adalah sistem adaptif mampu membiasakan diri untuk perubahan di lingkungan operasional.

Kualitas Jaminan dan sistem audit

Untuk memastikan kualitas proses audit dan hasil, langkah-langkah yang relevan untuk jaminan kualitas harus diterapkan. Dan melanjutkan dengan diskusi tentang alasan, manfaat, dan keprihatinan menerapkan jaminan resmi didasarkan pada sistem Mutu ISO 9001 serta saran tentang kerangka untuk aplikasi seperti itu.

Membangun kepercayaan

Jaminan kualitas (QA) berkaitan dengan penyediaan kepercayaan diri untuk pelanggan yang kebutuhan mereka untuk kualitas produk atau jasa terpenuhi terus menerus. Karena kualitas audit adalah layanan diberikan kepada eksternal atau pihak ketiga klien, sistem audit mutu harus memberikan keyakinan sehubungan dengan persyaratan audit. Misalnya:

1. Kerangka waktu khusus untuk melakukan audit
2. Ketentuan untuk pengeolaan program audit
3. Pemeliharaan kompetensi auditor yang memadai
4. Ketersediaan sumber daya audit untuk merencanakan dan melakukan audit yang berbasis risiko
5. kerja sama dengan klien dan auditte.

Audit system effectiveness

1. *Efectivenees*

Memberikan kepercayaan kepada klien tentang kebutuhan mereka untuk kualitas audit yang diperlukan

2. *Reliability*

Keandalan sistem audit dapat didefinisikan sebagai probabilitas sistem yang memadai berfungsi dalam rangka waktu tertentu ketika berfungsi dibawah kondisi tertentu dan ruang lingkup.

3. *Availibilty*

Ketersediaan merupakan probabilitas sistem audit secara memadai yang berfungsi bahwa sistem audit secara memadai akan berfungsi pada saat tertentu.

4. *Efectivenees revisited*

Efektivitas sistem adalah masalah yang kompleks melibatkan kemampuan auditor untuk melakukan audit bebas dari kesalahan, siap beroperasi bila diperlukan dan cocok untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.

Conclusion dan penelitian lebih lanjut

1. Standar audit mutu internasional yaitu ISO 10011 (1990) diterbitkan pada awal dekade ini dan telah banyak digunakan untuk melakukan audit individual dan mengelola program audit dan menilai kualifikasi auditor.
2. Penelitian ini berpendapat bahwa bagian dari masalah tersebut terletak pada pembentukan jaminan kualitas dalam audit. Kerangka ISO 9000 adalah solusi yang mungkin, menyediakan kepercayaan dalam kualitas eksternal, sistem audit yang harus dikelola untuk efektivitas internal.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan dalam domain teknik sampling statistik audit, permodelan pemeliharaan audit dan keberlanjutan serta penggunaan skema jaminan kualitas untuk audit perusahaan kecil. Penelitian khusus juga harus diberikan untuk pengembangan metode kuantitatif untuk menilai efektivitas pemeriksaan melalui langkah-langkah kehandalan, ketersediaan, kesesuaian.

BAB X

AUDIT RISK ALERT

Latar Belakang

Standar auditing berdasarkan risiko baru dikeluarkan oleh Auditing Standards Board pada Maret 2006. Laporan Standar Audit nomer 104-111 terdiri atas 8 pernyataan yang terpisah dari standar auditing dan sering disebut sebagai “standar penilaian risiko. prosedur audit yang tepat yang responsive terhadap risiko dinilai.

Alasan SAS Nomor 104-111 dikeluarkan adalah standar yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit dengan berfokus pada prosedur audit secara langsung terhadap penilaian risiko.

Klien akan mendapatkan keuntungan karena pendekatan audit ini akan lebih disesuaikan dengan entitas klien. Sebagai contoh, standar ini menuntut auditor untuk lebih memahami berbagai aspek lingkungan klien, termasuk pengendalian internal dan untuk menilai risiko salah saji material. Hal ini juga memungkinkan bagi auditor untuk memfokuskan prosedur audit pada pos-pos dimana dinilai mengandung risiko yang besar.

Karena kategori yang ada di dalam *alerts* ini diperbarui setiap tahun, maka dapat membantu mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan yang dapat mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Adanya *alerts* ini dapat juga digunakan oleh manajemen untuk menangani pos-pos yang menjadi perhatian audit.

Alerts pada laporan keuangan dirancang untuk para pihak di dalam manajemen keuangan dan komite audit suatu entitas untuk mengidentifikasi dan memahami siklus serta metode akuntansi dan perkembangan peraturan yang ada yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan entitas, terutama perkembangan dan kebijakan ekonomi.

Audit risk alert berdasarkan AICPA Risk Alert Summarize SAS 104-111 yaitu:

1. SAS 104 Amends SAS 1 Due Professional Care

Untuk menerapkan SAS 104 auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan cara memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang lebih rendah sehingga laporan keuangan terbebas dari salah saji materialitas. Auditor tidak memeriksa keseluruhan transaksi klien karena adanya keterbatasan waktu dan biaya sehingga jaminan mutlak tidak dapat dicapai. Ini adalah premis dasar untuk standar baru lainnya.

2. SAS 105 Amends SAS 95 Generally Accepted Auditing Standards

Peraturan ini memperluas lingkup standar pekerjaan lapangan kedua yaitu dari pemahaman pengendalian internal menjadi pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk di

dalamnya adalah pengendalian internal. Standar ini juga menekankan kualitas dan kedalaman pemahaman yang akan diperoleh oleh auditor dalam mengidentifikasi salah saji material di dalam laporan keuangan apakah terjadi karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) serta untuk merancang sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Standar ini pada dasarnya menganggap bahwa opini audit adalah hasil dari pemahaman auditor terhadap entitas, lingkungan dan pengendalian internalnya, serta ketersediaan bukti yang cukup.

3. SAS 106 Audit Evidence

SAS 106 ini menjelaskan prosedur penilaian risiko audit sebagai prosedur audit sehingga auditor harus memperoleh pemahaman tentang lingkungannya. Standar ini mengatur mengenai segala sesuatu tentang ketersediaan dan kecukupan bukti audit yang diperoleh dengan melakukan prosedur penilaian risiko serta yang diperoleh dengan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantive. Hasil dari prosedur penilaian risiko dan prosedur audit lanjutan lainnya serta adanya bukti audit yang cukup dan tepat akan menjadi dasar auditor untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut.

4. SAS 107 Audit Risk & Materiality

SAS 107 merupakan landasan dari standar berbasis risiko yang menyatakan bahwa auditor harus memiliki dan mendokumentasikan secara tepat untuk pendekatan audit. Dalam standar ini menyatakan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah dan auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada setiap tahapan dan menunjukkan semua

kemungkinan salah saji telah diidentifikasi dan telah dikomunikasikan ke level manajemen yang sesuai.

5. SAS 108 Audit Planning & Supervision

SAS 108 memberikan petunjuk bagi auditor tentang perencanaan audit. Komponen kunci dari SAS 108 antara lain:

- a. Strategi audit secara keseluruhan
- b. Rencana audit
- c. Menentukan keterlibatan professional sesuai dengan bidangnya.

Ketika mengembangkan rencana audit, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang entitas yang akan diaudit.

6. SAS 109 Understanding The Entity and Its Environment Assessing The Risks of Material Misstatements

Dalam SAS 109 dijelaskan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang terjadi kemungkinan berasal dari kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) sehingga auditor bisa merancang sifat, waktu dan luas prosedur audit lebih lanjut. Untuk memperoleh pemahaman tentang entitas, audit perlu melakukan prosedur penilaian risiko yang meliputi pertanyaan yang akan diajukan, prosedur analitik, observasi dan pemeriksaan. SAS 109 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal untuk mengevaluasi desain pengendalian internal klien dan menilai apakah klien telah melaksanakan pengendalian internal tersebut secara efektif. SAS 109 juga mewajibkan auditor untuk menilai risiko salah saji

material baik di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi. Penilaian salah saji material pada tingkat asersi merupakan dasar untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut. Auditor harus menentukan apakah salah satu risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan tersebut.

7. SAS 110 Performing Audit Procedure in Response to Assessed in Risk and Evaluating the Audit Evidence Obtained

Dalam SAS 110 menjelaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan dasar yang memadai untuk memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. SAS 110 juga memberikan pedoman untuk menentukan respon secara keseluruhan dan merancang serta melakukan prosedur audit lebih lanjut. SAS 110 juga mewajibkan auditor untuk mendokumentasikan hubungan antara risiko yang dinilai oleh auditor dan pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut.

8. SAS 111 Amends SAS 39 Audit Sampling

SAS 111 memberikan panduan lebih lanjut mengenai salah saji yang dapat ditoleransi. Selain itu, standar ini bisa menjadi parameter auditor untuk mengembangkan sampel, baik yang menggunakan metode statistik maupun non statistik. Sehingga kedua metode tersebut akan menghasilkan ukuran sampel yang sebanding.

Penyimpanan dan Lembaga Pinjaman

Sebagai ahli laporan keuangan atau auditor adalah penting untuk memahami kompleksitas industri penyimpanan dan peminjaman lembaga termasuk operasional, peraturan, akuntansi, pelaporan, dan aspek audit unik untuk industri ini. publikasi AICPA memberikan informasi latar belakang umum bersama dengan perkembangan terakhir, informasi tambahan tentang masalah yang kompleks, dan contoh ilustrasi untuk akuntansi umum dan praktek audit industri penyimpanan dan peminjaman lembaga, termasuk bank dan lembaga tabungan, serikat kredit, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan hipotek. Topik yang dibahas dalam publikasi penyimpanan dan pinjaman lembaga termasuk

1. investasi pada efek hutang dan ekuitas dan gangguan lainnya-dari-sementara.
2. pinjaman dan kerugian kredit.
3. akuntansi untuk transfer dan pelayanan dari aset keuangan.
4. restrukturisasi hutang bermasalah
5. Perkiraan audit seperti penyisihan pinjaman dan sewa kerugian.

Juga dibahas adalah perkembangan terbaru di bidang-bidang seperti konsolidasi, transfer dan pembayaran, restrukturisasi utang bermasalah, piutang pembiayaan dan penyisihan kerugian

Staf Audit Praktek Alerts menyoroti baru, muncul, atau dicatat keadaan yang dapat mempengaruhi bagaimana auditor melakukan audit di bawah adapersyaratan standar dan aturan PCAOB dan hukum yang relevan. Auditor harus menentukan

apakah dan bagaimana menanggapi inikeadaan berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disajikan. Laporan terkandung dalam Staf Audit Praktek Alerts tidak menetapkan aturan Dewan dandidak mencerminkan tekad Dewan atau penilaian tentang perilaku dari setiap perusahaan tertentu, auditor, atau orang lain.

Ringkasan bisnis plan

Pasar negara berkembang memainkan peran yang semakin penting dalam dunia ekonomi mengingat prospek pertumbuhan yang tinggi ekonomi dan ukuran pasar yang signifikan.

Pinjaman material dan tidak ada catatan atau perbedaan yang signifikan mengenai transaksi tertentu;

1. Upaya oleh manajemen untuk mencegah atau mengubah permintaan konfirmasi atau tanggapan;
2. Penyimpangan dalam kontrak penjualan, seperti segel khusus perusahaan ditempelkan pada kontrak penjualan yang bukan milik yang diklaim pelanggan yang disebutkan dalam kontrak;
3. Mengakui pendapatan dari kontrak atau pelanggan yang keberadaannya tidak bisa dikuatkan;
4. Mencatat penjualan produk dikirim ke gudang atau barang forwarders di mana tidak ada pelanggan diidentifikasi;
5. Bahan yang dirahasiakan fakta-fakta seputar transaksi akuisisi, transaksi penjualan, dan transaksi off-balance-sheet dengan pihak terkait.
6. Merekam aset yang bukti penguasaan, kepemilikan, atau Judul tidak jelas atau sulit untuk menguatkan
7. Potensi penghitungan ganda aktiva tetap;

8. Pencatatan biaya operasional uncorroborated dimana tujuan bisnis tidak jelas;
9. Manipulasi catatan akuntansi untuk menjelaskan sifat atau menyembunyikan pembayaran suap atau pembayaran lainnya yang tidak pantas;
10. Perbedaan dijelaskan signifikan antara jumlah termasuk dalam laporan keuangan dalam pengajuan SEC dan jumlah termasuk dalam laporan keuangan kepada regulator lainnya, seperti pemerintah daerah;
11. Penggunaan pribadi-jenis rekening bank yang diselenggarakan atas nama perusahaan petugas atau karyawan bukan perusahaan-jenis rekening bank untuk bisnis perusahaan; dan
12. Penundaan yang tidak biasa oleh manajemen dalam produksi rutin dokumen yang diminta oleh auditor.

Standar PCAOB membutuhkan auditor untuk melakukan audit mereka untuk menanggapi risiko penipuan dan risiko lainnya dari salah saji material, dan untuk mendapatkan yang relevan dan bukti terpercaya yang cukup untuk mendukung opini auditor. praktek ini peringatan membahas pertimbangan tertentu yang mungkin relevan saat melakukan audit di pasar negara berkembang.

Meskipun kondisi, situasi, dan risiko penipuan yang dijelaskan dalam peringatan ini telah diamati dalam audit perusahaan di pasar negara berkembang tertentu, mereka mungkin juga hadir pada perusahaan di pasar lain. Hal-hal yang dibahas dalam peringatan ini relevan kapan kondisi seperti itu, situasi, atau risiko *fraud* yang hadir dalam audit dari perusahaan yang berlokasi di negara berkembang atau dikembangkan pasar.

Seperti perusahaan publik di negara-negara maju, emerging market perusahaan yang ingin meningkatkan modal di pasar internasional mungkin ingin menyajikan posisi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang kuat pada pendapatan dan laba. Pada gilirannya, ini mungkin menciptakan insentif atau tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan bukan dari laporan hasil buruk atau berita buruk kepada masyarakat investasi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan gagal untuk mewujudkan akuisisi diumumkan sebelumnya, ada risiko bahwa manajemen mungkin memanipulasi laporan keuangan untuk membuat mereka muncul seolah olah akuisisi telah terjadi. Sebagai contoh lain, manajemen di unit operasi jarak jauh terletak dari multinasional besar perusahaan lokasi mungkin merasa tekanan untuk melaporkan hasil meningkat. Selain insentif dan tekanan secara rutin dipertimbangkan dalam audit perusahaan publik, auditor harus mempertimbangkan karakteristik unik dari perusahaan pasar atau lingkungan yang muncul yang mungkin mengakibatkan penipuan tertentu risiko. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin terlibat dalam bisnis yang signifikan kemitraan dengan badan milik negara atau VIE. Dalam situasi itu, perusahaan mungkin termotivasi untuk mengkonsolidasikan kemitraan atau VIE untuk memperkuat dilaporkan posisi keuangan, bahkan jika pembatasan hukum yang signifikan mencegah perusahaan dari memperoleh saham mayoritas di kemitraan atau aset. Misalnya, Perusahaan mungkin masuk ke dalam pengaturan kontrak dengan VIE yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan VIE, meskipun mungkin ada ketidakpastian yang signifikan mengenai substansi ekonomi mereka.

Sebagai contoh lain, pembatasan hukum pada pergerakan aset perusahaan mungkin menyebabkan perusahaan untuk mempertahankan sejumlah besar uang tunai atau aset likuid lainnya di unit usaha di wilayah hukum tertentu, yang dapat membuat insentif untuk penyalahgunaan aset.

Peluang

Beberapa risiko penipuan timbul saat kondisi internal atau eksternal dan lemah pengendalian internal memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. aspek-aspek tertentu dari bisnis lingkungan di pasar negara berkembang dapat menciptakan peluang untuk melakukan penipuan, karena dibahas dalam contoh di bawah ini. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di pasar berkembang mungkin memiliki dominan Kehadiran di wilayah geografis di mana letaknya karena itu adalah satu majikan terbesar di kawasan ini, atau mungkin melakukan kontrol atas bahan baku di struktur VIE tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko terkait dengan dihilangkan, tidak lengkap, atau pengungkapan yang tidak akurat

Pertimbangan Penipuan adalah Bagian Integral Audit

Pertimbangan penipuan merupakan bagian integral dari audit bawah PCAOB standar. Standar PCAOB mengharuskan rencana auditor dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas Selain menunjukkan risiko penipuan tinggi, di beberapa situasi, kondisi dan situasi dalam daftar ini mungkin juga indikasi pemahaman:

1. Industri yang relevan dan faktor regulasi, termasuk hukum, dan lingkungan politik, yang mungkin termasuk hal-hal

seperti: Signifikansi perusahaan dalam perekonomian regional atau local dan tingkat pengaruh atas Industri, dan regional atau pemerintah daerah, dan

2. Norma-norma budaya di lingkungan bisnis dan peraturan;
3. Perusahaan tujuan, strategi, dan risiko bisnis terkait; struktur organisasi; dan sumber pendanaandari operasi perusahaan;
4. Investasi yang signifikan perusahaan, termasuk metode ekuitas investasi, usaha patungan, dan entitas bunga variabel
5. Sumber pendapatan perusahaan, termasuk relatif profitabilitas produk dan layanan utama; dan
6. Pemasok dan pelanggan utama perusahaan hubungan.

Perbedaan signifikan dapat ada antara lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di pasar negara berkembang dan orang-orang di maju pasar, yang dapat mempengaruhi risiko salah saji dalam laporan keuangan.

Misalnya, perusahaan di pasar negara berkembang dapat dikenakan berubah dengan cepat atau kurang konsisten peraturan pengawasan dan pelaporan persyaratan, sedangkan perusahaan di pasar negara maju tidak mungkin. Ini dan aspek lain darilingkungan bisnis di pasar negara berkembang dapat menciptakan insentif, tekanan, dan peluang yang dapat menyebabkan risiko lebih tinggi terhadap penipuan. manajemen perusahaan mungkin memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintah daerah atau negara.

Dalam keadaan seperti:

1. Manajemen mungkin bisa mendikte syarat atau kondisi untuk local pemasok atau pelanggan, yang mungkin mengakibatkan panjang non-lengan

transaksi.

2. Manajemen mungkin bisa menekan personil dari bank lokal atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan informasi palsu kepada auditor.
3. Karyawan perusahaan mungkin tidak bersedia melaporkan kasus penipuan karena alasan budaya atau takut akan pembalasan dari manajemen.

Sementara perlindungan whistleblower telah diperkenalkan di banyak negara-negara emerging market, pengamat mengatakan bahwa masih ada perlu meningkatkan efektivitas program whistleblower.

Lemahnya internal dan kurangnya pemerintahan yang kuat mekanisme telah diamati di perusahaan di pasar berkembang tertentu negara. Ini mungkin berasal dari kurangnya keakraban dalam budaya lokal dengan tertentu konsep tata kelola, seperti larangan self-dealing, bahkan di mana serupa konsep hukum. Budaya seperti itu bisa memberikan kesempatan untuk manajemen untuk mempengaruhi pejabat senior perusahaan lain atau berbagai ketiga pihak untuk memberikan informasi palsu atau menyesatkan auditor perusahaan.

Jika mengkritik atau mempertanyakan sosok otoritas bertentangan dengan local budaya, karyawan perusahaan mungkin ragu-ragu untuk mengungkapkan keprihatinan apapun tentang tindakan manajemen untuk auditor. Seperti lingkungan dapat memberikan peluang tambahan bagi manajemen untuk menimpa kontrol atau sengaja salah mengutarakan laporan keuangan.

Sebagai contoh lain, sebuah perusahaan di pasar berkembang mungkin dibuat sebagai spin-off dari badan swasta atau BUMN yang lebih besar. Operasi komponen dari entitas yang lebih besar mungkin di antara pemasok terbesar perusahaan atau pelanggan. Dalam kasus tertentu, individu atau kelompok yang sama yang mengontrol.

Respon Auditor Untuk Penipuan Risiko

Standar PCAOB mengharuskan desain auditor dan melaksanakan audit yang tanggapan yang mengatasi risiko penipuan yang diidentifikasi dan dinilai. Auditor harus mencakup tanggapan yang memiliki efek keseluruhan pada bagaimana audit dilakukan (misalnya, membuat tugas keterlibatan yang sesuai) dan tanggapan melibatkan sifat, waktu, dan luas prosedur audit (misalnya, memodifikasi prosedur audit yang direncanakan)

Di bawah standar PCAOB, tanggapan dia auditor terhadap risiko dinilai dari salah saji material, terutama risiko *fraud*, harus melibatkan penerapan skeptisisme profesional dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. tidak efektif tanggapan terhadap risiko penipuan dapat mengakibatkan kegagalan auditor untuk mendeteksi bahan salah saji laporan keuangan atau kegagalan untuk memperoleh sesuai cukup mengaudit bukti untuk mendukung pendapat dalam laporan auditor.

Contoh : Penerapan skeptisisme profesional dalam menanggapi risiko penipuan dinilai mungkin termasuk "memodifikasi prosedur audit yang direncanakan untuk memperoleh lebih handal bukti tentang asersi yang relevan dan ... memperoleh sesuai cukup bukti untuk menguatkan penjelasan atau representasi manajemen.

Prosedur Audit Menanggapi Risiko Penipuan

Auditor harus melaksanakan prosedur substantif, termasuk tes detail, yang secara khusus responsif terhadap risiko penipuan dinilai, termasuk prosedur tertentu untuk mengatasi risiko manajemen override kontrol.

Banyak kondisi yang dibahas di atas yang menunjukkan penipuan tinggi risiko muncul untuk melibatkan kemungkinan upaya untuk melebih-lebihkan jumlah aset atau pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan. Ketika melakukan pemeriksaan prosedur untuk mengatasi risiko *fraud* tertentu, terutama yang melibatkan keberadaan aset seperti kas dan piutang.

Definisi *Fraud*

Fraud memiliki definisi merupakan kecurangan oleh seseorang. Dari pendekatan pribadi terdapat dan ada pendekatan disebut sebagai the segitiga *fraud*. Ketiga alasan itu adalah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Terdapat 4 pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) *Exposure* (pengungkapan).

1. Faktor Individu

- a. Berhubungan dengan moral, sebagian besar berhubungan dengan keserakahan (*greed*)
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*) yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan.

2. Faktor Generic

- a. Kesempatan (opportunity) melakukan kecurangan tergantung kedudukan pelaku terhadap kecurangan objek.
- b. Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya dan terungkap.

Gejala Adanya *Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh top manajemen/manajer tingkat atas lebih sulit ditemukan dan dilakukan daripada oleh karyawan.

1. Gejala *fraud* pada manajemen:
 - a. Ketidakcocokan di antara manajemen.
 - b. Moral dan motivasi karyawan rendah.
 - c. Kurangnya staf pada departemen akuntansi.
 - d. Adanya tingkat complain yang tinggi terhadap entitas dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas.
 - e. Adanya kekurangan pada kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
 - f. Penjualan atau laba yang menurun sementara hutang dan piutang dagang meningkat.
 - g. Perusahaan melakukan kredit sampai batas-batas maksimal dalam jangka waktu yang lama.
 - h. Terdapat kelebihan persediaan.
 - i. Ada peningkatan ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.
 - j. Penggantian auditor eksternal sering.
2. Gejala *fraud* pada karyawan
 - a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa penjelasan pendukung.

- b. Adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung
- c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku besar
- d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
- e. Kekurangan barang yang diterima oleh perusahaan
- f. Naiknya harga barang yang dibeli
- g. Adanya faktur ganda
- h. Mutu barang yang diganti.
- i. Adanya transaksi yang tidak masuk akal

Langkah Mengantisipasi Terjadinya *Fraud*

Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani *fraud*, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensik) dan manajemen perusahaan.

Red Flag

Merupakan kondisi janggal berbeda dengan suatu keadaan normal. Dengan kata lain, *red-flags* adalah indikasi akan adanya tidak biasa. *Red flags* tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah/tidak merupakan tanda peringatan bahwa bisa *fraud* terjadi.

Tipe Red flag

1. *Red flag* pada karyawan
ciri-cirinya: perubahan gaya hidup karyawan, seperti mobil mewah, dan perhiasan; memiliki permasalahan hutang pribadi; perubahan perilaku, seperti indikasi penggunaan

2. *Red flag* pada manajemen
ciri-cirinya: enggan untuk memberikan informasi kepada auditor; terdapat lingkungan pengendalian internal yang lemah; sering terjadi pergantian auditor eksternal;
3. *Red flag* pada perubahan kebiasaan
ciri-cirinya: kreditur dan kolektor mendatangi tempat kerja; mudah kesal/tersinggung dengan pertanyaan yang tidak wajar.
4. *Red flag* pada kas/piutang
ciri-cirinya: aktivitas mendadak; transaksi tunai berlebihan yang dibenarkan; dan sebagian besar penghapusan dari rekening bank yang tidak direkonsiliasi.
5. *Red flag* pada bagian penggajian
ciri-cirinya: jam lembur yang tidak konsisten untuk pusat biaya; lembur dibebankan selama periode tertentu.
6. *Red flag* pada persediaan
ciri-cirinya: semakin banyak keluhan tentang produk atau layanan; peningkatan pembelian persediaan tanpa ada peningkatan penjualan; kurangnya keamanan fisik aset/persediaan.

Kebijakan Umum Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Strategi anti *Fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang memiliki 4 pilar yaitu :

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan bagian sistem pengendalian *Fraud* telah memuat langkah-langkah mengurangi potensi-risiko terjadinya *Fraud*, yang kurang kesadaran mencakup terhadap bahaya *Fraud* anti-*Fraud* awareness,identifikasi kerawanan, dan penerapan prinsip mengenal pekerja.

2. Deteksi

Deteksi bagian dari sistem pengendalian *Fraud* telah memuat langkah dalam rangka mengidentifikasi & menemukan *Fraud* dalam kegiatan Bank, mencakup kurang kebijakan *whistleblowing*, pelaksanaan audit mendadak(surprise audit), dan sistem pengamatan (*surveillance system*).

3. Investigasi, pelaporan dan sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

Artikel Pertama

Judul : *Auditors' perception of fraud risk indicators Malaysian evidence*

Penulis : Malcolm Smith

Introduction

1. *Fraud* didefinisikan oleh Malaysian Approved Standart Auditing sebagai "Tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, karyawan, yang bisa menghasilkan laporan keuangan yang tidak benar/kekeliruan"
2. Menurut Palshikar (2002) *fraud* merupakan masalah yang serius dan menjadi tantangan dalam bisnis saat ini, menyatakan bahwa *fraud* merupakan kejahatan kerah putih yang dominan dalam lingkungan bisnis dan organisasi pemerintah, khususnya bidang jasa keuangan.
3. Auditor, akuntan dan profesi lainnya perlu mengambil langkah proaktif untuk mengekang tindakan *fraud* di perusahaan, dengan peningkatan pada regulasi.
4. *Fraud* telah menjadi masalah besar di Malaysia (Manajemen time, 2001) Melaporkan bahwa lebih dari 60% perusahaan yang terdaftar di Malaysia telah melakukan tindakan *fraud*.

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu :

1. Bertujuan untuk mengidentifikasi *red flag* sebagai kesadaran bagi auditor
2. Mengeksplorasi auditor berdasarkan faktor jenis kelamin, pengalaman auditor, audit tenure, jenis audit firms, dan *fraud experience*

Literature Review

SAS 99 mengharuskan auditor-auditor dalam pengumpulan informasi yang diperlukan dalam salah saji material karena *fraud* dan menerapkan profesionalisme untuk mampu mempertimbangkan atribut risiko.

Terdapat 3 poin utama risiko:

1. Jenis risiko (kecurangan pelaporan keuangan atau penyalahgunaan aset).
2. Signifikansi dari risiko.
3. Kemungkinan risiko mengakibatkan salah saji material.

Menurut Burn (1997) Bahwa adanya *Red flags* pada bisnis akan memungkinkan terjadinya *fraud*. Adanya *Red flag* akan mengingatkan auditor tentang adanya kemungkinan *fraud* dan memperingatkan secara dini kepada kliennya. Mendeteksi adanya *fraud* auditor bisa menerapkan "Skeptisme" secara profesional.

Menurut Hackenbrack (1993) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit akan merasa bahwa apenilaian tentang risiko *fraud* lebih efektif dengan membedakan anatar faktor risiko dan bobot relatif.

Pada penelitian Bell dan Carcello (2000) mengembangkan untuk melakukan pengujian regresi logistik untuk memperkirakan kemungkinan *fraud* pada pelaporan keuangan dengan sample 77 yang terlibat *fraud* dan 305 yang tidak terlibat *fraud*. Mereka menemukan adanya *Red flags* secara signifikan efektif diskriminasi anatar frau dan non *fraud* yaitu:

1. Ketidak jujuran manajemen kepada auditor
2. Pengendalian internal yang lemah

3. Sikap dari manajemen yang agresif
4. Penekanan pada proyeksi laba yang tidak semestinya
5. Hubungan yang sulit tentang transaksi yang berhubungan dengan audit.

Penelitian Church (2001) memberikan bukti bahwa auditor internal sensitif terhadap faktor kemungkinan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Dalam situasi pendapatan operasional lebih besar daripada yang diharapkan, bonus plan.

Penelitian Knap (2001) mengungkapkan bahwa pengalaman auditor dan keberhasilan sebelumnya dalam mendeteksi *fraud* adalah variable konsisten signifikan dalam pendeteksian *fraud* di siklus audit, mereka melakukan percobaan dengan meneliti efek dari pengalaman auditor dan risiko eksplisit dalam mendeteksi *fraud* melalui prosedur analitis yang hasilnya menunjukkan bahwa manajer audit lebih efektif menilai risiko *fraud* daripada senior audit melalui prosedur analitis.

Chung dan Monroe (2001) Meneliti efek dari jenis kelamin dan kompleksitas tugas keakuratan penilaian audit. Mereka menemukan bahwa ada perbedaan pada penilaian secara akurasi, khususnya mencatat interaksi dimana perempuan lebih akurat dibanding laki-laki saat memproses tugas audit yang kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan survei Kuisoner sebagai metode pengumpulan data. Kuisoner ini bersifat kerahasiaan yang mendorong keterbukaan dan telah banyak digunakan dalam penelitian Audit.

Responden dari survei ini auditor dari perusahaan di Kuala Lumpur. Sampel auditor diambil dari populasi perusahaan yang

terdaftar di Kuala Lumpur (Malaysia Ikatan Akuntan). Tekniknya yaitu random sampling, instrument survei terdiri dari surat lamaran, amplop prab-bayar dan kusioner yang dikirim kepada 200 auditor. Sebanyak 48 persen menanggapi kusioner sehingga tingkat respon ada 24%.

Terdapat 3 bagian didalam kuisoner yaitu:

1. Bagian pertama berisi informasi demografis tentang responden
2. Bagian kedua tentang pertanyaan apakah auditor telah mengalami kasus *fraud* selama mengaudit dan persepsi tentang pentingnya tingkat *Red flag*. Dengan menggunakan skala likert "1" tidak penting samasekali "2" pada umumnya tidak penting "3" pada umumnya penting dan "4" sangat penting.
3. Bagian ke tiga kuisoner berisi pertanyaan yang lebih spesifik
 - a. Pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden untuk berpendapat dan membuat rekomendasi tentang *Red flag* lainnya yang tidak tercantum dalam daftar pertanyaan.
 - b. Pertanyaan tertutup, mengumpulkan pendapat responden tentang apakah perlu atau tidak daftar *Red flag* selama penugasan mereka.

Result dan data analisis

Peneliti melakukan pengujian normalitas untuk memeriksa distribusi data "normal". Pada ukuran statistiknya menghasilkan 0,8280 yang berarti item yang dibuat dengan skala konsisten secara internal.

Tabel 1, memberikan informasi demografis mengenai responden yang terdiri dari 27 laki-laki dan 21 auditor

perempuan. Sebanyak 26 auditor memiliki kurang dari 3 tahun pengalaman audit dan 22 auditor memiliki pengalaman diatas 3 tahun. Sebanyak 20 responden pernah menangani kasus *fraud* dan 28 sebelumnya tidak pernah.

Tabel 2, menunjukkan hanya 7 yang memiliki score rata-rata 3,00 (umumnya penting). hanya satu indikator bersak dari pengaruh manajemen atas pengendalian lingkungan dan enam lainnya berasal dari operasi dan stabilitas keuangan.

Tabel 3, menunjukkan bahwa karakteristik stabilitas keuangan dan operasi pada *Red flag* dianggap lebih penting daripada karakteristik manajemen dan pengaruh pengendalian atas lingkungan dan kondisis industri.

Tabel 4, hasil t-test antara perbedaan kelompok yang berhubungan dengan kondisi industri

Hasil Empiris

Pengaruh manajemen atas kelompok lingkungan pengendalian menduduki peringkat sebagai indikator risiko *fraud* yang paling penting dalam membantu auditor untuk memprediksi kehadiran acara penipuan. Auditor tampaknya memahami bahwa “pengendalian internal yang lemah” dan “sikap yang salah terhadap kepentingan mereka” akan menyebabkan risiko yang lebih besar untuk kelangsungan organisasi.

Persepsi auditor tidak ditemukan pengaruh oleh latar belakang demografis, yang diwakili oleh jenis kelamin, tahun pengalaman atau jenis perusahaan audit. Hasil memotivasi beberapa wilayah penelitian masa depan.

Untuk menguji apakah indikator risiko penipuan ini memang membantu dalam investigasi melaporkan kesalahan dan kasus penipuan di Malaysia. Mungkin temuan ini dapat

membantu peneliti untuk mengembangkan indikator risiko penipuan baru yang memperhitungkan kasus aktual penipuan Malaysia.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Terdapat 3 penelitian sebelumnya relevan dengan penelitian ini : Apostolou et al., 2001b; yang hasilnya operasi dna stabilitas keuangan dianggap penting sebagai karakteristik dimanajemen dan pengaruh pengendalian atas lingkungan pada *Red flag* Abdul Majid and Tsui, 2001; hasilnya *Red flag* adalah yang penting untuk menentukan penegndlaian and Heiman-Hoffman et al., 1996. Hasilnya sulitnya transaksi audit sehingga sulit untuk menentukan pengendalian pada organisasi.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini para auditor memberikan tanggapan bahwa pentingnya indikator risiko yang terkait dengan potensi *fraud* pada manajemen.

Persepsi auditor tidak berpengaruh terhadap demografi latar belakang mereka, serta jenis kelamin dan pengalaman audit. Hasil ini didasarkan pada pengalaman umum auditor dengan *fraud* pada manajemen dan menunjukkan auditor harus memberikan fokus perhatian terhadap *Red flag* yang berkaitan dnegan operasi dan stabilitas keuangan. Temuan ini juga pentingnya melakukan pengendalian internal yang baik dalam organisasi agar bisa terhindar dari *fraud*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memotivasi peneliti selanjutnya, untuk meniliti apakah indikator dari risiko *fraud* akan membantu dalam menyelidiki masalah *fraud* di Malaysia sehingga bisa mengembangkan indikator risiko *fraud* yang harus diperhitungkan

BAB XI

FRAUD AUDITING

DefinisI *Fraud*

Fraud merupakan kejahatan memanipulasi informasi dengan sengaja yang bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. *Fraud* pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yakni internal kontrol yang lemah, pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan yang lemah ataupun dapat menyebabkan penetapan kebijakan yang tidak up to date,serta monitoring yang lemah.

Jenis - Jenis Kecurangan

Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah laporan keuangan yang curang (*fraudulent financial reporting*) dan penyalahgunaan aktiva (*misaprorpriation of assets*).

1. Kecurangan pada laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*)

Kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau pengabaian jumlah di dalam pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan.

Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya untuk melebihi sajian laba, perusahaan juga mungkin dengan sengaja menyajikan laba lebih rendah dari yang seharusnya ketika sebenarnya laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba. Praktek seperti ini disebut *income smoothing* dan *earnings management*.

Income smoothing (perataan laba) merupakan salah satu bentuk pengaturan laba dimana manajemen menukar posisi pendapatan dan laba di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Perataan laba adalah tindakan yang sengaja memanipulasi dan dilakukan oleh manajemen mengenai tingkatan labadilaporkan agar keuntungan perusahaan berada ditingkat yang dianggap normal

2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation asset*)

Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan atau pencurian asset perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kondisi yang menyebabkan *Fraud* (*Fraud Triangle*)

1. Tekanan

Tekanan adalah situasi diaman seseorang meyakini untuk harus melakukan *fraud*. Misalnya, saat seseorang berada dalam

kondisi kesulitan ekonomi, maka seorang karyawan akan terdorong untuk melakukan *fraud*. Faktor kesejahteraan karyawan menjadi salah satu perhatian penting manajemen untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan *fraud*.

Memang tidak ada jaminan yang mutlak bahwa karyawan yang sejahtera sekalipun tidak akan melakukan *fraud*. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi setidaknya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, selain diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya *fraud* juga dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.

2. Peluang

Peluang adalah situasi dimana seseorang meyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan *fraud* dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, bahkan di saat seseorang tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan *fraud*.

3. Rasionalisasi

Terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Pelaku *fraud* merasa bahwa tindakannya bukan merupakan kecurangan namun memang merupakan haknya, kadang pelaku merasa berperan dan berjasa dalam organisasi.

Latar belakang muncul *fraud* juga bisa disebabkan oleh:

1. Beberapa risiko penipuan muncul ketika kondisi internal dan eksternal mendukung
2. Melemahnya pengendalian internal memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk terlibat dalam *fraud*

3. Adanya *whistleblower*
4. Lemahnya kontrol atas *whistleblower*
5. Lemahnya pengendalian internal dan kebijakan pemerintah yang terlalu mendominasi.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) *Exposure* (pengungkapan). Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu (faktor individual), sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi (faktor generic/ umum).

1. Faktor Individu

- a. Berhubungan dengan moral, sebagian besar berhubungan dengan keserakahan (*greed*)
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*) yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan karyawan yang terkait dengan asset yang dimiliki entitas tempatnya bekerja. Selain itu adanya tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan *fraud*.

2. Faktor Generic

Faktor Risiko Penyebab Kecurangan pada laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kecurangan.

Dalam *fraud triangle*, kecurangan pada laporan keuangan dan penyalahgunaan asset terbagi dalam tiga kondisi yang sama, tetapi faktornya berbeda.

1. Tekanan atau Insentif

Tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah karena menurunnya prospek keuangan perusahaan. Perusahaan juga mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau tolak ukur para analis seperti laba periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, manajemen akan memanipulasi laba hanya untuk menjaga reputasi mereka

2. Peluang

Meskipun laporan keuangan pada masing-masing perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar. Perputaran personil bagian akuntansi atau kelemahan lain dalam metode dan proses akuntansi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji.

3. Rasionalisasi

Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko.

Faktor risiko untuk penyalahgunaan asset

1. Tekanan

Tekanan keuangan merupakan dorongan yang umum bagi pegawai yang menyalahgunakan asset. Pegawai yang memiliki tuntutan ekonomi yang besar, berpeluang besar untuk melakukan tindakan penyalahgunaan asset.

2. Peluang

Kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan atau pencurian memang terdapat pada semua perusahaan. Akan tetapi, kesempatan itu jauh lebih besar pada perusahaan yang memiliki akses kas yang mudah, persediaan atau asset lainnya yang tidak memiliki pengendalian yang kuat.

3. Rasionalisasi

Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai dan manajer merasionalisasi pencurian asset. Jika manajemen melakukan penipuan terhadap pelanggan dengan jalan membebankan harga yang terlalu tinggi untuk barang atau terlihat dalam taktik penjualan yang sangat agresif. Pada level karyawan, adanya perasaan bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan seperti memanipulasi laporan keuangan atau absensi dianggap benar seperti yang para manajer lakukan dalam kecurangan yang lainnya.

Menilai Risiko Kecurangan

Auditor tidak menjamin bahwa semua *fraud* terdeteksi, tetapi harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil prosedur auditnya, sehingga dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan, ketidakberesan, dan ketidaktaatan yang material dapat dideteksi.

Beberapa standar audit yang mewajibkan auditor untuk mendeteksi *fraud* antara lain terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP).

Sejalan dengan tanggung jawab profesi auditor serta dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut, maka dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan risiko kecurangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor hendaknya menempuh langkah berikut berkaitan dengan risiko kecurangan:

1. Mengenali kemungkinan kecurangan terkait dengan kegiatan/substansi masalah/hal yang akan diaudit
2. Menetapkan pengendalian yang seharusnya ada, dalam rangka memastikan bahwa risiko kecurangan di atas tidak akan terjadi.
3. Penilaian didasarkan pada tersedia atau tidaknya prosedur pengendalian, serta efektif atau tidaknya prosedur pengendalian tersebut.
4. Mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan
5. Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) serta dampak (consequences) kecurangan tersebut
6. Memilih risiko kecurangan yang akan di dalam dalam kegiatan audit.

Dalam menilai risiko kecurangan, auditor harus mempertahankan sikap skeptisme profesionalnya. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan.

1. Skeptisme Profesional

SAS 1 menyatakan, dalam melaksanakan skeptisisme profesional, auditor “tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kecurangan absolut.” Dalam praktik, mempertahankan sikap skeptisisme profesional ini mungkin sulit karena, meskipun sudah ada contoh-contoh mutakhir yang menyolok mengenai laporan keuangan yang curang, kecurangan yang material terbilang jarang jika dibandingkan dengan jumlah audit laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Pikiran.

2. Sumber Informasi untuk Menilai Risiko Kecurangan.

a. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen.

Pertanyaan yang diajukan harus spesifik termasuk kemungkinan manajemen mencurigai adanya kecurangan.

b. Faktor-faktor risiko.

Ketiga faktor risiko (insentif/tekanan, kesempatan, dan sikap/rasionalisasi) perlu dipertimbangkan dengan semua informasi yang ada.

c. Prosedur analitis.

Prosedur analitis dirancang sejak perencanaan audit. Bila hasilnya berbeda dengan ekspektasi, harus dievaluasi dengan memperhitungkan dengan informasi yang lain.

d. Informasi lain.

Informasi ini diperoleh dalam di setiap tahapan audit saat penilaian risiko *fraud*, dan selebihnya dapat mendeteksi risiko kecurangan lebih tinggi.

Mendokumentasikan Penilaian Kecurangan

Peraturan yang terdapat di dalam SAS 99 mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal yang bersangkutan dengan pertimbangan auditor mengenai salah saji material.

Merespon Risiko Kecurangan

Apabila risiko salah saji yang material akibat kecurangan telah teridentifikasi, langkah pertama yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan pembahasan tersebut dengan manajemen dan meminta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang telah dirancang untuk mendeteksi salah saji. Selanjutnya auditor harus mempertimbangkan apakah program dan pengendalian anti *fraud* dapat mengurangi salah saji material akibat kecurangan atau apakah terdapat defisiensi pengendalian yang meningkatkan risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi:

1. Mengubah pelaksanaan auditor secara keseluruhan

Auditor bisa melakukan berbagai pemilhan atas berbagai tindakan apabila risiko kecurangan meningkat. Apabila terjadi peningkatan terhadap risiko salah saji akibat dari kecurangan yang meningkat, maka dapat menugaskan personil yang telah berpengalaman.

Dalam SAS 99 mengharuskan auditor memasukkan ketidakterdugaan dalam rencana audit. Hal ini disebabkan karena pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui mengenai berbagai prosedur audit yang akan dilakukan.

2. Merancang dan melakukan Prosedur Audit untuk mengatasi risiko kecurangan

Prosedur audit yang sesuai untuk digunakan dalam mengatasi berbagai risiko kecurangan tertentu bergantung pada akun apa yang akan diaudit serta tipe risiko kecurangan yang diidentifikasi.

3. Merancang dan melakukan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

Dalam setiap audit, terdapat tiga prosedur yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memeriksa catatan jurnal dan penyesuaian lain untuk bukti kemungkinan salah saji karena kecurangan.
- b. Meninjau kembali estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias.
- c. Mengevaluasi dasar rasional untuk transaksi tidak lazim yang bernilai signifikan, seorang auditor harus memiliki pemahaman.

Pos-pos risiko kecurangan yang spesifik

1. Pembelian
2. Penjualan dan Pemasaran

Uraian lengkap pengujian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga terendah/memperoleh potongan harga (*discount*) paling besar
- b. Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit

- c. Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu tertentu
 - d. Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang dan faktur, selanjutnya bandingkan antara ketiganya
 - e. Teliti pengiriman barang contoh ke gudang/cabang atau pengiriman barang kepada pihak ketiga tersebut. Prosedur ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sampel
 - f. Teliti nota kredit untuk barang-barang yang dikembalikan (diretur) dan bandingkan dengan penerimaan barangnya (di gudang)
 - g. Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan keluhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebagainya. Trasiir keluhan-keluhan tersebut kepada barang yang dipesan, pengiriman barang, dan faktur penjualan
3. Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. Trasiir ke buku kasnya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan tanggal, nama pembayar. Prosedur ini dilakukan dalam rangka mendeteksi kemungkinan terjadinya lapping.

4. Persediaan

Persediaan seringkali merupakan akun terbesar dalam neraca dan auditor sering merasa sulit untuk memverifikasi eksistensi dan penilaian persediaan. Akibatnya persediaan rentan terhadap manipulasi oleh manajer yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan keuangan.

Langkah untuk menguji akun persediaan:

- a. Teliti secara detail catatan-catatan persediaan berkaitan dengan hal-hal berikut ini :
 - 1) Produk yang mempunyai perputaran (turnover) paling tinggi
 - 2) Produk yang ada dalam persediaan, padahal tidak terdapat dalam persediaan tahun sebelumnya
 - 3) Produk yang ada dalam persediaan tahun-tahun lalu, namun tidak tersedia tahun ini
 - 4) Semua koreksi atas catatan persediaan yang disebabkan adanya perbedaan pada saat dilakukan stock opname
- b. Periksa jadwal pelaksanaan stock opname tahun lalu dengan cara :
 - 1) Meneliti setiap jenis barang dan kaitkan dengan kewajaran persediaan, perputaran dan ruang penyimpanan yang tersedia
 - 2) Meneliti catatan kerja pengemudi perusahaan pada saat dilakukan inventarisasi
 - 3) Meneliti apakah terdapat pembayaran biaya pengangkutan untuk pihak ketiga pada saat inventarisasi
 - 4) Verifikasi kebenaran barang dalam perjalanan

Tanggung jawab Bila Dicurigai ada Kecurangan

Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, lebih banyak kecurangan yang terdeteksi oleh pengendalian internal atau fungsi internal audit dibandingkan oleh auditor eksternal.

1. Merespons salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan
Sepanjang pengauditan, auditor terus menerus mengevaluasi apakah bukti-bukti yang didapatkan dan pengamatan-

pengamatan lainnya mengindikasikan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.

2. Jenis teknik-teknik wawancara tanya jawab dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif.

Mengidentifikasi Tata Kelola Korporasi dan Faktor-faktor Lingkungan Pengendalian Lainnya yang Mengurangi Risiko Kecurangan

Manajemen bertanggung jawab mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan, yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. Pedoman untuk mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi
 - a. menetapkan *tone at the top* (tekanan berasal dari tingkatan manajerial yang dapat menyebabkan bawahan berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada)
 - b. menciptakan lingkungan kerja yang positif
 - c. mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, konfirmasi, dan disiplin.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan
 - a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan
 - b. Mengurangi risiko kecurangan
 - c. Memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan

Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses penilaian risiko kecurangan oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti *fraud*.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Can an auditor ever be a first responder to financial fraud*

Penulis : **G. Stevenson Smith**

Abstract

1. Responder pertama adalah tim yang akan pertama kali menangani ketika terjadi situasi krisis. Dalam hal audit laporan keuangan, tentu saja responder pertamanya adalah auditor itu sendiri. Tindakan yang dilakukannya adalah mengidentifikasi penipuan yang terjadi, menstabilkan situasi, mencegah kerugian sumber daya yang berkelanjutan yang dialami oleh klien.
2. Ketika muncul dugaan telah terjadi tindakan illegal, auditor perlu untuk terlibat di dalam penyelidikan lebih lanjut, sesuai di dalam Section 10A dalam aturan Securities and Exchange Comission (SEC). lebih lanjut lagi, seorang auditor memiliki peran untuk mewaspadai terjadinya suatu kecurangan dan penipuan keuangan selama proses penugasan audit.
3. Pada era sekarang, dimana audit sudah memakai basis digital, maka seorang auditor dalam upaya menstabilkan dan mencegah kerugian klien yang lebih lanjut harus memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam mengoperasikan informas teknologi dan audit yang berbasis pada komputer / digital.

Investigasi menurut Section 10A

Di dalam Section 10A, seorang auditor harus menginformasikan kepada klien mengenai tindakan perbaikan jika telah terjadi tindakan illegal atau kecurangan. Aturan di dalam *Section A* kepada auditor, antara lain:

- Menentukan apakah telah terjadi tindakan illegal
- Menentukan dan mempertimbangkan efek jika terjadi tindakan illegal
- Menginformasikan kepada komite audit maupun dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan illegal.

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor memerlukan pemahaman yang memadai mengenai tindakan perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh manajemen jika terjadi suatu kecurangan atau tindakan illegal. Seorang auditor dituntut untuk selalu proaktif dalam mengidentifikasi, mencegah maupun menangani tindakan-tindakan illegal di dalam entitas klien, mengingat auditor merupakan responder pertama selama penugasan audit di dalam perusahaan klien.

Professional Auditing Standar

1. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*)

Merupakan organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar (*certified public accountants*) saja. Pendirian AICPA membuat akuntansi sebagai profesi yang istimewa karena persyaratannya, pendidikan yang ketat, standar profesional tinggi, kode etik profesional, dan komitmen dalam melayani kepentingan publik.

2. PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*)

PCAOB dibentuk pada tahun 2002 dengan dibentuknya peraturan Sarbox dan memulai kegiatannya pada awal tahun 2003. PCAOB kemudian mengeluarkan Standar Audit No.2 mengenai Audit Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan yang dilakukan bersamaan dengan Audit Laporan Keuangan.

PCAOB juga bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik.

3. IFAC (*International Financial Accounting Standards*)

IFAC merupakan organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan mempertkuat kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. IFAC serupa dengan GAAP di Amerika, yakni dibentuk untuk menghadapi isu-isu internasional yang berkaitan dengan *fraud*.

The First responder's rule

Peranan dari responder pertama terkait *fraud*:

1. Menstabilkan situasi
2. Mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut

Tiga langkah dasar jika auditor menemukan indikasi dugaan terjadinya *fraud*:

1. Mengamankan e-data

Menurut section 10 A mengenai penyelidikan *fraud*, auditor harus menentukan upaya untuk mencari e-dokumen terkait dengan tindakan *fraud* tersebut.

Auditir juga harus memastikan semua data yang diperoleh oleh manajer terbebas dari unsure *fraud*.

Semua data yang diperoleh selama penyelidikan, menurut Sectionn 10A, auditor harus mendiskusikannya dengan spesialis forensic komputer.

2. Pencatatan Dokumentasi

Dalam Section 10 A mengenai investigasi *fraud*, seharusnya paling tidak ada satu manajer yang menjadi kunci yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumentasi telah dicatata, dikelola dan disimpan dengan benar. Manajemen harus menyediakan dokumentasi e -data sesuai dengan prosedur jika nantinya dibutuhkan di dalam penyelidikan *fraud*.

3. Pelatihan dan kompetensi

Tanpa adanya pelatihan yang memadai, seorang responder pertama dikhawatirkan justru akan merusak e-data yang seharusnya digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Umumnya, personil IT adalah seseorang yang terlatih yang nantinya akan menginterpretasikan hasil analisis data forensic kepada klien maupun auditor.

Kemampuan dasar untuk investigator forensic komputer antara lain:

- a. Memahami sistem operasi (OS) seperti Windows or Linux. Investigator haruslah familiar dengan OS dan jaringan yang digunakan oleh klien.
- b. Mampu untuk mengisolasi atau mengamankan file dengan cepat.

- c. Mampu untuk menyimpan data dengan benar. Data tersebut bermanfaat jika terjadi pergantian file atau entri jurnal.
- d. Kemampuan untuk mengamankan data. Para investigator harus memastikan bahwa file asli harus memiliki replikasi yang persis sebagai cadangan jika terjadi sesuatu pada file yang asli.

Auditor harus familiar dengan metode dan proses investigasi dengan menggunakan data elektronik dan memastikan bahwa prosedur investigasi yang dijalani harus sesuai dengan Section 10A.

Seorang auditor membutuhkan jaminan berupa perikatan dengan perusahaanterkait tindakan investigasi dengan mengikuti prosedur yang tepat serta melibatkan pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi.

Stepping up to the plate

Pada Section 10A tentang investigasi, menempatkan auditor pada posisi hukum yang lebih genting daripada pedoman professional para auditor itu sendiri. Dalam standar pedoman bagi auditor tidak terdapat penjelasan mengenai peran auditor sebagai responder pertama. Seorang auditor harus memiliki dan mempertahankan skeptisme profesionalnya dalam menjalani prosedur investigasi. Seorang auditor juga harus menyadari kelemahan yang terdapat pada setiap teknologi sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi pengendalian internal.

Kesimpulan

Auditor memiliki keharusan untuk mengevaluasi kecukupan penyelidikan/investigasi digital berdasarkan peraturan yang tercantum di dalam SEC Section 10A mengenai brainstorming maupun mitigasi jaminan yang di dokumentasikan oleh manajemen perusahaan yang ternyata tidak memadai. Dalam rangka untuk menentukan prosedur penyelidikan, auditor harus memahami mengenai dokumentasi digital sehingga pada saat melakukan investigasi terhadap e-data, auditor menyadari kelemahan e-data tersebut.

Sampai pada saat ini, standar professional auditor belum memasukkan peran dari dokumentasi digital di dalam praktek audit. Standar ini hanya berfokus terhadap *fraud* atas laporan keuangan sehingga peran auditor sebagai responder pertama jika terjadi kecurangan kurang begitu dibahas.

2. Artikel Kedua

Judul : *Fraud Auditing*

Penulis : **Rocco R. Vanasco**

Introduction

Fraud telah menjadi perhatian bagi penyidik, audit, dan akuntansi, asosiasi, dan lembaga pemerintah, dalam nasional dan internasional.

Menurut Prosser 1971 mempunyai unsur-unsur *fraud* sebagai berikut:

1. *Theft act* which involves taking cash, inventory, information, or other assets manually, by computer, or by telephone;
2. *Concealment* which involves the steps taken by the perpetrators to hide the *fraud* from others; and
3. *Conversion* which involves selling or converting stolen assets into cash and then spending the cash.

Menurut Albrecht (1996) setiap *fraud* mempunyai tiga unsur:

1. Adanya pencurian dalam uang tunai, inventaris, informasi, atau aset lainnya secara manual, komputer, atau telepon
2. Melakukan penyembunyian dengan melibatkan penipuan lainnya.
3. Adanya konversi yang melibatkan menjual atau mengubah aset ke kas dan kemudian menghabiskan uang tunai.

Terdapat beberapa *fraud* yang dilaporkan dalam dekade ini yang telah menyebabkan pemerintah dan profesi akuntansi dan profesi akuntansi untuk menjaga aset perusahaan yang lebih baik.

Bagian I : *Fraud* dan hukum

Peran Sekuritas dan pertukaran komisi auditor harus bisa menyadari tanggung jawab mereka kepada, investor publik dengan memasukkan kegiatan manajemen dalam kajian mereka (SEC, 1940).

SEC menyarankan bahwa auditor menyelidiki tentang manajemen klien baru dan mencatat:

1. Banyak prosedur audit memerlukan penguatan prosedur persediaan.
2. Auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi pada gross apakah dihasilkan dari kolusi atau tidak

3. Auditor harus menyadari tanggung jawab mereka kepada investor publik dengan memasukkan kegiatan manajemen dalam review mereka

Pada tahun 1942, SEC diundangkan Peraturan 10b-5 yang menyatakan larangan :

1. Untuk mempekerjakan skema atau kecerdasan dengan alasan penipuan
2. Membuat pernyataan tidak benar dari fakta material atau menghilangkan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat material.
3. Terlibat dalam tindakan atau praktek *fraud* atau kebohongan atas setiap orang sehubungan dengan pembelian atau penjualan

Robert Loeffler kegiatan *fraud* dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Adanya inflasi aset dalam neraca keuangan
2. Peminjaman uang tunai tanpa rekaman kewajiban yang sesuai
3. Penciptaan asuransi palsu yang dijual ke perusahaan asuransi lain.

Pengadilan menyimpulkan bahwa :

Perlakuan rektroatif dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan kesalahan dalam laporan 1968.

Kelalaian biasa

Merupakan kegagalan untuk latihan dan bersifat wajar.

Perusahaan Aliansi Athur Andersen&Co Pengadilan didirikan tiga kriteria untuk menentukan apakah penggugat dapat membawa klaim terhadap auditor untuk kelalaian biasa:

1. Penggugat tidak sebenarnya mengandalkan laporan audit.
2. Auditor Tahu bahwa penggugat dimaksudkan untuk mengandalkan laporan mereka.
3. Auditor melakukan tindakan berdasarkan bukti ketergantungan penggugat.

Kelalaian

Kelalaian adalah kegagalan dalam situasi dimana auditor bertindak sembarangan atau asal-asalan dalam melakukan auditnya.

Pedoman menetapkan nilai titik keorganisasi berdasarkan litigasi dan keadaan yang memberatkan. Antara lain:

1. Organisasi yang terlibat pernah melakukan kesalahan yang sama dimasa lalu
2. Kejahatan dalam melanggar perintah pengadilan yang ada atau perintah
3. Organisasi memperkerjakan orang yang mempunyai catatan kriminal sebelumnya.

Program yang efektif meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Membangun program kepatuhan yang dapat diperkirakan mungkin mengurangi prospek kegiatan.
2. Menugaskan tanggung jawab kepada individu highlevel khusus untuk mengawasi kepatuhan dengan standar dan prosedur.
3. Tidak memungkinkan otoritas diskresioner untuk individu dalam organisasi akan terlibat dnegan kegiatan yang bersifat ilegal.
4. Pemasangan sistem monitoring dan ausit sistem yang dirancang untuk mendeteksi perilaku kriminal.

5. Adanya komunikasi dalam prosedur dan standar kepada seluruh karyawan dan agen melalui program pelatihan
6. Memperkuat standar secara konsisten melalui mekanisme disiplin yang sesuai.
7. Menanggapi pelanggaran dengan tindakan diambil untuk mencegah kekambuhan (Flesher 1996).

Bagian II: *Fraud* dan standar profesional

Peran AICPA

Auditor Independen harus menerima tanggung jawab untuk menemukan dan pengungkapan tentang adanya penyimpangan, karena praktisi harus bisa bijaksana dalam mengungkapkannya (Mautz dan Sharaf, 1961).

Diharapkan pada tujuan AICPA mampu menyelamatkan akuntansi dan profesi audit dalam kasus *fraud* dengan meluruskan situasi dan standar audit serta prosedur audit. Kasus *fraud* ini, telah dipublikasikan secara luas dan memiliki efek pada profesi sebagai tanggung jawab auditor independen.

Peran Lembaga manajemen akuntan

The association of Certified *Fraud* Examiner (ACFE) yang didirikan pada tahun 1988 untuk tujuan tersebut mengurangi insiden penipuan kerah putih. The ACFE menjalankan program untuk mengakreditasi sebagai Certified *Fraud* Examiners (CFEs) orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi, menyelidiki, mencegah penipuan. CFEs sering memiliki akuntansi atau latarbelakang audit dan bekerja diserti bidang akuntansi forensik, audit *fraud* dan investigasi, pencegahan kerugian, penegakan hukum, penilitain akademisi, dan akuntan publik.

Peran Komisis *Treadway*

Komisi *Treadway* mendesak semua peserta dalam proses pelaporan keuangan untuk mempertimbangkan beberapa faktor risiko tertentu ketika perencanaan atau meninjau kegiatan audit yang diusulkan.

Bab III : Peran manajemen, komite audit dan auditor

Peran manajemen

Munculnya nondiscovery audit dalam kasus manajemen *fraud*, sekarang para auditor memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menemukan *fraud* manajemen dari sebelumnya (Arens dan Loebbecke 1994)

Berikut ini daftar delapan alasan baik dibalik manajemen *fraud*:

1. Eksekutif terkadang mengambil langkah yang salah
2. Profit center dapat distorsi dengan fakta untuk menunda divesta
3. Manajer tidka kompeten
4. Kinerja yang mungkin distorsi utnuk menjamin bonus besar
5. Kebutuhan untuk berhasil dapat mengubah manajer untuk *fraud*
6. Manajer yang mempunyai kepentingan sendiri
7. Keuntungan yang dapat meningkat untuk memperoleh keuntungan dipasar
8. Orang yang mengontrol baik aset atau catatan mereka dalam posisi yang smepurna untuk bisa memalsukan catatan.

Peran Komite Audit

Dalam banyak kasus manajemen puncak sering tidak percaya bahw *afraud* bis aterjadi pada organisasi mereka.

Asumsinya bahwa orang yang jujur, adanya pengendalian internal bisa mencegah *fraud* atau penyalahgunaan (Alpert 1992)

Peran auditor internal

Merupakan tantangan bagi auditor internal untuk memberikan perhatian pada *fraud* dengan seimbang dan bisa menyelesaikan permasalahan *fraud* dlama sebuah organisasi (Brink dan Witt 1982).

Bagian IV : *Fraud* dalam pemerintahan dan entitas nirlaba

Peran kantor akuntansi Umum AS

Fraud adalah masalah yang signifikan bagi pemerintah saat ini. Aspek tanggung jawab dibawah pemerintah dengan membuat standar auditing untuk bisa mendeteksi dalam pelaporan yang salah, penyimpangan dan tindakan ilegal meliputi:

1. Menyadari karakteristik dan jenis penyimpangan bahan potensial yang akan berkembang
2. Adanya indikasi penyimpangan dan tindakan ilegal dalam organisasi
3. Jika ada pelanggaran atau *fraud* segera melaporkannya kepada penegak hukum dan badan pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab.

Bagian V : Sektor industri

Sektor perbankan

Para direktur bank komersial sering bertanggung jawab untuk *fraud* yang dilakukan bawahan dan mereka tidak menyadari adanya *fraud* dalam aktivitas organisasi (Schadewitz dan Blevin 1996).

Terdapat 5 skema yang dapat mengakibatkan *fraud* menjadi kegagalan dalam keuangan adalah:

1. Calon peminjam
2. Peminjam agunan ganda
3. Timbal balik pengtauran pinjaman
4. Land flips
5. Terkait pembiayaan

Sektor kesehatan

Akuntan bukan menjadi penjamin laporan dia hanya bertugas untuk mempersiapkan laporan dan bertindak jujur dan mempunyai itikad baik dan penuh kehati-hatian agar laporan disajikan dengan wajar sesuai dengan kewajiban profesionalnya.

Sektor industri ritel

Karyawan tidak jujur adalah salah satu penyebab utama dollar hilang pada setiap perusahaan. Para *frauder* disini juga menutupi agar tindakannya tidak terdeteksi oleh auditor. (Dabny 1997)

Bagian VI : Arena International

Menampilkan perspektif tentang *fraud* disleuruh dunia. Seperti Uni Eropa, Afrika, Asia dan negara-negara penganut sistem Anglo Saxon

Kesimpulan

1. *Fraud* dalam laporan keuangan menjadi perhatian pada dunia usaha, profesi akuntansi. Adanya *fraud* akan dapat mengejutkan publik dan bisa merusak kredibilitas dari para auditor dalam kaitannya profesi audit.

2. Dalam institut Internal Auditor (IIA) telah menempatkan pencegahan penipuan atas tugas prioritas, pada tahun 1985 membuat SIAS yaitu penecegaha, pendekteksia, dan penyelidikan.
3. Pada kasus-kasus yang telah diteliti disarankan untuk melakukan program baru, produk, investasi dan tunjangan yang perlu diawasi oleg auditor. Pada penelitian Lacativo (1995) menunjukkan pendekan berbasis ririko *fraud* audit akan membantu auditor memenuhi peratran federal dengan taat.
4. Untuk mengurangi adanya *fraud* dalam sektor industri, maka IIA mendirikan tugas mengembangkan “pandua industri” yang berurusan dengan pencegahan *fraud*, deteksi, pencegahan, dan pelaporan. Diharapkan para auditor internal dan auditor eksternal dituntut untuk mempunyai keterampilan dalam kaitannya pendekteksian dan pencegahan *fraud*. Dalam kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa uang, persediaan, dan transaksi menjadi rentan atas *fraud*.
5. Adanya sistem komputerisasi dianggap sebagai pemicu *fraud* karena tidak tepatnya dalam penginputan data, program aplikasi, file data, dan operasi komputer. Adanya kesulitan untuk mendeteksi sehingga auditor sekarang harus mempunyai pengetahuan dan praktek EDP audit, serta melakukan rekrukturisasi dalam kerangka kerja audit untuk memenuhi kebutuhan semua internal auditor diseluruh dunia.

BAB XII

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROSES AUDIT

Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi (TI) bisa saja meningkatkan pengendalian internal dengan menambah prosedur-prosedur pengendalian yang baru dan terprogram di dalam komputer. Dan disisi lain, penggunaan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko yang baru, namun sebenarnya risiko ini masih dapat dikelola oleh klien dengan menggunakan mekanisme khusus yang dibuat oleh klien. Seorang auditor tidak dibenarkan untuk selalu bergantung pada informasi yang dihasilkan melalui proses komputerisasi, dan harus menelusuri keakuratan sumber atau input informasi tersebut. Sebelum mengambil kesimpulan bahwa informasi yang dihasilkan komputer dapat diandalkan, auditor harus memahami dan menguji penguadalian berbasis komputer tersebut.

Berikut ini beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang diakibatkan oleh adanya pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi:

1. Pengendalian internal berbasis teknologi informasi menggantikan pengendalian internal dengan sistem manual.

Manfaat dari perubahan ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi mampu menangani sejumlah transaksi bisnis yang besar dan lebih kompleks secara efektif dan efisien. Karena komputer mampu memproses transaksi secara konsisten, maka hal ini diharapkan mampu meminimalkna terjadinya salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan prosedur yang telah terprogram yang menerapkan pengendalian dan pengecekan untuk setiap transaksi yang diproses.

Pengendalian keamanan secara online atas aplikasi, database dan sistem operasi dapat memperbaiki pemisahan fungsi atau tugas dan mengurangi kesempatan untuk melakukan *fraud*.

2. Tersedianya informasi bermutu tinggi

Segala aktivitas yang melibatkan teknologi informasi umumnya terjadi secara kompleks dan dikelola secara efektif. Hal ini biasanya menghasilkan informasi yang memiliki mutu lebih tinggi bagi manajemen, jauh lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan sistem manual. Setelah yakin atas keandalan informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi, manajemen cenderung menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Menilai Risiko Teknologi Informasi

Meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, namun di sisi lain juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian perusahaan secara

keseluruhan. Hal ini terjadi jika sistem dalam teknologi informasi tersebut mengalami kendala dan kegagalan. Risiko ini dapat menimbulkan kemungkinan salah saji material dalam laoran keuangan. Risiko spesifik pada sistem teknologi informasi meliputi:

1. Risk to hardware and data

Risiko khusus yang mencakup hal-hal mengenai perlindungan terhadap *hardware* dan data meliputi:

- a. Adanya ketergantungan pada fungsi dan kemampuan *hardware* dan *software*. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, maka baik *hardware* maupun *software* tidak akan berfungsi dengan baik dan akan menghasilkan informasi yang tidak semestinya.
- b. Adanya kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Risiko kesalahan acak akan terjadi jika sistem manual telah diganti dengan sistem berbasis teknologi informasi. Namun, kesalahan sistematis juga akan meningkat saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Jika ada kecacatan pada pemrograman komputer sering kali mengakibatkan banyak terjadi salah saji material yang signifikan.
- c. Adanya akses yang tidak sah Sistem akuntansi yang berbasis teknologi informasi memungkinkan akses secara online ke data elektronik dalam file induk, *software* dan catatan lainnya. Dikarenakan akses online dapat diakses dari luar kota/dimanapun oleh pihak eksternal melalui internal, mungkin saja terjadi akses yang tidak sah.

- d. Hilangnya data sebagian besar data pada sistem teknologi informasi disimpan dalam file elektronik yang terpusat. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan file data secara keseluruhan dan juga memiliki konsekuensi terjadi salah saji material.

2. *Reduced Audit Trail*

Salah saji yang mungkin tidak dapat terdeteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi akibat berkurangnya jejak audit, termasuk berkurangnya keterlibatan auditor dan sistem manual. Selain itu sistem komputer dapat juga menggantikan jenis otorisasi manual dalam beberapa sistem teknologi informasi, antara lain meliputi:

- a. Visibilitas jejak audit

Karena sebagian besar informasi dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan dokumen dan catatan dari sumber data yang memungkinkan organisasi untuk melakukan penelusuran informasi akuntansi.

- b. Keterlibatan manusia berkurang

Dalam banyak sistem teknologi informasi, karyawan yang terlibat dalam pemrosesan awal transaksi biasanya tidak pernah melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, mereka kurang mampu mengidentifikasi salah saji pemrosesan.

- c. Tidak adanya otorisasi manual

Sistem teknologi informasi yang canggih sering digunakan untuk memproses transaksi tertentu secara otomatis. Oleh karena itu, otorisasi yang tepat tergantung pada prosedur *software* dan keakuratan file induk yang digunakan dalam membuat keputusan otorisasi.

3. *Need for IT experience and separation of IT duties*

Sistem teknologi informasi mampu meminimalisasi pemisahan tugas secara tradisional seperti pembukuan, otorisasi dan penyimpanan, untuk mengaplikasikan sisten teknologi informasi ini, maka dibutuhkan pengalaman di bidang teknologi informasi, yaitu:

a. Berkurangnya pemisahann tugas secara tradisional

Ketika suatu organisasi memutuskan untuk mengganti dari sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, maka tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual akan digantikan dengan komputer seperti otorisasi dan pembukuan.

b. Kebutuhan mengenai pengalaman teknologi informasi

Sangat penting bagi perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam memasang, memelihara dan menggunakan sistem tersebut. Ketika penggunaan sistem teknologi informasi meningkat, kebutuhan akan ahli di bidang IT juga meningkat.

Pengendalian Internal Khusus Bagi Teknologi Informasi

Standar auditing, menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem teknologi informasi, yaitu:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini diterapkan pada semua aspek dalam fungsi teknologi informasi termasuk pengaturan teknologi informasi, pemisahan tugas, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada *hardware* dan data-data yang terkait, kontijensi dan rencana cadangan jika dalam kondisi darurat yang

diperkirakan sebelumnya, dan pengendalian *hardware*. Auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Administrasi fungsi teknologi informasi

Pengawasan atas penggunaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara komputerisasi.

b. Pemisahan tugas dan fungsi

Dengan menggunakan teknologi informasi, maka fungsi dan tugas akan dilakukan secara otomatis. Tanggung jawab untuk melakukan pemrograman, pengoperasian dan pengendalian data dapat dipisahkan.

c. Pengembangan sistem

Dalam pengembangan sistem mencakup hal mengenai keputusan untuk membeli *software* yang baru atau mengembangkan sendiri *software* yang sudah ada dan memastikan bahwa *software* tersebut kompatibel dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Keamanan fisik dan online

Mencakup:

- 1) Pengendalian fisik yang layak atas keseluruhan perangkat komputer maupun *hardware* dan *software* serta melakukan pembatasan akses, dan melakukan *back up* data.
- 2) Pengendalian akses secara online dengan menggunakan *username* dan *password*.
- 3) *Backup* dan kontijensi, organisasi memerlukan *backup* terperinci dan rencana kontijensi seperti menyimpan

semua salinan file data dan *software* untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko kehilangan, kebakaran atau bencana.

- 4) Pengendalian *hardware*. kerusakan memori atau kerusakan *hardware* menyebabkan munculnya pesan-pesan yang salah dalam tampilan layar komputer.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini diterapkan untuk memproses transaksi dan saldo akun. Auditor seharusnya mengevaluasikan dalam pengendalian aplikasi untuk setiap kelompok transaksi atau saldo akun dimana auditor merencanakan untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian karena pengendalian teknologi informasi berbeda di setiap kelompok transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi akan efektif jika pengendalian umumnya efektif.

Pengendalian aplikasi terdiri dari tiga kategori yaitu:

a. Pengendalian input

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer sudah lengkap, akurat dan diotorisasi.

b. Pengendalian proses

Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data diproses.

c. Pengendalian output

Pengendalian ini berfokus pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan telah selesai dilaksanakan, bukan pada mencegah adanya kesalahan.

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit

Auditor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengendalian internal umum dan aplikasi dan melihat apakah klien menggunakan sistem teknologi informasi yang kompleks atau sederhana. Hal ini dilakukan karena para auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Pengetahuan yang memadai mengenai pengendalian umum mampu meningkatkan efektivitas pengendalian aplikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko pengendalian secara keseluruhan selama proses audit.

1. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian

Auditor harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian umum sebelum melakukan evaluasi terhadap pengendalian aplikasi. memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor mengevaluasi pengendalian umum terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif.

a. Pengaruh pengendalian umum terhadap keseluruhan aplikasi sistem

Pengendalian umum yang tidak efektif dapat menghasilkan potensi salah saji material pada keseluruhan aplikasi sistem, tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor menempatkan keandalan yang lebih pada pengendalian *software*. Auditor setelah itu menguji pengendalian *software* serta efektivitas operasi dan menjamin hasil dalam pengurangan pengujian substantive.

b. Pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan *software*

Perubahan yang dilakukan klien terhadap aplikasi *software* dapat mempengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian berbasis komputer tersebut. Ketika klien memutuskan untuk mengganti *software* maka auditor harus mengevaluasi apakah diperlukan pengujian tambahan. Jika pengendalian umum dinilai telah efektif, maka auditor dengan mudah akan mengidentifikasi kapan perubahan *software* dilakukan. Namun, jika klien memiliki pengendalian umum yang lemah, akan sulit untuk mengidentifikasi kapan *software* tersebut diganti.

c. Memahami pengendalian umum klien

Auditor dapat memperoleh informasi mengenai pengendalian umum dan aplikasi melalui cara-cara antara lain:

- 1) Memeriksa dokumentasi sistem, seperti bagan arus, petunjuk penggunaan, permohonan perubahan program dan pengujian output.
- 2) Melakukan wawancara dengan personel IT dan para pengguna utama.
- 3) Mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf IT.

2. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantive

a. Menghubungkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi

Biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan definisi pengendalian umum dengan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Dikarenakan pengendalian

umum mampu mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus, maka pengendalian umumnya menjadi tidak efektif dan kemampuan auditor. Jika pengendalian umum tersebut efektif maka kemampuan auditor dalam penggunaan pengendalian *software* pada semua siklus akan cenderung meningkat.

b. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substantive

Setelah melakukan identifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor kemudian mengurangi pengujian substantive. Karena pengendalian aplikasi bersifat sistematis, hal ini akan memungkinkan auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut baik dalam audit keseluruhan laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

3. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang kompleks

Dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang begitu kompleks, organisasi seringkali mengandalkan sistem komputer sederhana (mikro) untuk melakukan fungsi akuntansi. Penggunaan sistem komputer yang sederhana (mikro) akan menghasilkan beberapa pertimbangan oleh auditor, antara lain:

a. Akses file induk

Apabila klien menggunakan komputer yang sederhana (mikro), auditor harus memperhatikan mengenai akses terhadap file-file utama dan tanggung jawab pemrosesan menjadi sangat penting.

- b. Adanya ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang bersifat otomatis.

Dalam lingkungan teknologi informasi yang tidak begitu canggih, pengendalian otomatis seringkali dapat diandalkan. Sebagai contoh, program *software* dalam komputer sederhana (mikro) dapat dimasukkan ke dalam *hard drive* komputer dengan format yang tidak memungkinkan dilakukan perubahan oleh personel lain selain yang memegang tugas dan otorisasi, sehingga risiko perubahan illegal / tidak diotorisasi terhadap *software* tersebut menjadi rendah.

- c. Risiko virus komputer

Virus yang menyerang perangkat komputer mampu menyebabkan hilangnya data dan program. Beberapa virus bahkan dapat merusak file elektronik atau mematikan seluruh jaringan komputer. Memperbarui *software* dan antivirus secara berkala dapat meningkatkan pengendalian.

4. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks

Pengendalian internal seringkali disisipkan dalam aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik, hal ini dilakukan apabila organisasi meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

Pendekatan tersebut adalah auditing dengan melalui komputer (*auditing through the computer*).

Tiga kategori pendekatan auditing melalui komputer (*auditing through the computer*) antara lain:

- a. Pendekatan data pengujian (*test data approach*)

Jika menggunakan pendekatan ini, auditor akan memiliki tiga pertimbangan utama, yaitu:

- 1) Program aplikasi yang digunakan untuk pengujian data auditor haruslah sama dengan yang digunakan oleh klien sepanjang tahun berjalan.
- 2) Data pengujian harus meliputi semua kondisi yang relevan
- 3) Data pengujian harus dihapuskan dari catatan klien.

Auditor yang melakukan *test data approach* selalu mendapatkan bantuan dari para ahli IT karena tingginya tingkat kompleksitas dari program dan aplikasi *software* klien tersebut.

b. Simulasi parallel (*parallel simulation testing*)

Tujuan simulasi parallel adalah untuk menentukan tingkat efektivitas suatu pengendalian yang terotomatisasi dan untuk memperoleh bukti mengenai saldo akun elektronik. Auditor biasanya melakukan simulasi parallel dengan menggunakan *software* audit tergeneralisasi (*generalized audit software - GAS*) yang merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk tujuan auditing. GAS memiliki tiga keunggulan yaitu:

- 1) *Software* tersebut bisa diimplementasikan pada berbagai jenis bisnis klien dengan penyesuaian yang minimal.
- 2) Relative mudah melatih para staf audit untuk menggunakannya, walaupun mereka hanya memiliki pelatihan yang minim di bidang IT terkait dengan audit.
- 3) Mampu untuk melakukan pengujian audit yang jauh lebih cepat dan terperinci jika dibandingkan dengan prosedur manual dan tradisional.

c. Pendekatan modul audit tertanam (*embedded audit module approach*)

Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan sebuah modul audit di dalam sistem aplikasi klien guna mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan bagi auditor untuk bisa terus menerus mengaudit berbagai transaksi dengan melakukan identifikasi atas transaksi actual yang diproses oleh klien yang selanjutnya akan dibandingkan dengan pendekatan simulasi parallel dan data pengujian. Meskipun memungkinkan bagi auditor untuk menggunakan satu ataupun kombinasi dari setiap pendekatan pengujian, auditor akan mempertimbangkan pilihan pendekatan yang akan digunakan, antara lain:

- 1) Simulasi parallel untuk melakukan pengujian substantive seperti menjumlahkan file induk ke sebuah catatan tambahan saldo akun dan menghitung ulang jumlah transaksi yang ada.
- 2) Data pengujian untuk melakukan pengujian substantive atas transaksi dan pengujian pengendalian
- 3) Modul audit yang melekat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai transaksi yang tidak biasa bagi pengujian substantif.

Permasalahan Pada Lingkungan Teknologi Informasi Yang Berbeda

1. Masalah pada lingkungan jaringan

Lingkungan jaringan terlebih lagi organisasi berada pada lingkungan jaringan yang rumit, akan menimbulkan berbagai masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam merencanakan penugasan

2. Masalah pada sistem manajemen database

Klien menerapkan sistem manajemen database yang berguna untuk meningkatkan pengendalian atas data, mengurangi kelebihan data, dan menyediakan informasi yang lebih baik bagi pengambilan keputusan dengan cara mengintegrasikan informasi pada seluruh fungsi dan departemen.

Sistem manajemen database juga dapat menimbulkan berbagai risiko pengendalian internal, seperti risiko banyaknya personil yang bisa mengakses file dan memperbarui file data sehingga file menjadi tidak akurat dan tidak mendapat otorisasi.

Jika klien menggunakan manajemen database, maka auditor memiliki pemahaman mengenai organisasi, perencanaan, kebijakan dan prosedur klien guna menilai seberapa baik sistem tersebut dikelola. Pemahaman ini dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko pengendalian dan pendapat auditor tentang tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan.

3. Masalah pada sistem *e-commerce*

Perusahaan yang menggunakan sistem *e-commerce* dalam berbagai transaksi bisnis seperti penjualan dan pembelian, memiliki risiko tersendiri di dalam sistem IT. Penggunaan sistem *e-commerce* akan membuat data perusahaan menjadi sensitive dan terbuka oleh kemungkinan kemudahan akses bagi pihak luar.

Dalam menilai validitas patner dagang yang melaksanakan bisnis-bisnis secara *e-commerce*. Perusahaan mengandalkan otoritas sertifikasi pihak eksternal yang memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital berisi nama pemilik dan

password, serta berisi nama yang memberikan otoritas sertifikasi dan tanggal kadaluarsa sertifikat tersebut dan informasi khusus lainnya.

4. Masalah yang timbul ketika klien melakukan *outsorce* teknologi informasi

Kebanyakan klien meng*outsorce* beberapa atau seluruh kebutuhan IT nya kepada pusat pelayanan komputer independen seperti penyedia jasa aplikasi. Untuk memahamin dan menguji pengendalian pusat jasa, seorang auditor harus menggunakan beberapa kriteria yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan evaluasi pengendalian internal klien.

Dalam SAS 70 (SA-324) memberikan pedoman: (1) auditor yang mengeluarkan laporan mengenai pengendalian internal suatu organisasi jasa, (2) auditor organisasi pemakai yang bergantung pada laporan auditor pusat jasa. Ada dua jenis laporan yang dikeluarkan oleh auditor pusat jasa, yaitu:

- a. Laporan mengenai pengendalian yang telah diimplementasikan, akan membantu auditor dalam memahami suatu pengendalian internal guna perencanaan audit.
- b. Lapora mengenai pengendalian yang telah diimplementasikan dan diuji untuk keefektifan operasi.

Auditor membutuhkan bukti mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian guna menilai risiko pengendalian, terutama ketika akan mengaudit penganadalian internal atas pelaporan keuangan sebuah perusahaan publik.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *The Impact of information technology on the audit process : an assessment of the state of the art and implication for the future*

Penulis : James L. Bierstaker, Priscilla Burnaby, dan Jay Thibodeau

Saat ini penyimpanan data pada komputer dianggap lebih efisien dan transaksi uang dilakukan secara elektronik telah berkembang dengan pesat. Teknologi seperti pertukaran data secara elektronik (EDI) dan transfer file elektronik (EFT) akan membuat audit secara tradisional akan menghilang. Teknologi akan mengubah sifat dari proses audit tradisional yang mengandalkan sumber dokumen dalam bentuk kertas menjadi terkomputerisasi. Untuk mengaudit dengan sistem on-line, auditor harus menggabungkan *software* audit online sebagai alat audit utama mereka dan mengumpulkan bukti elektronik. Penggunaan teknologi akan membebaskan auditor dari kegiatan-kegiatan manual dan memungkinkan auditor untuk menggunakan waktu ini untuk tugas-tugas yang lain, seperti lebih memahami bisnis klien dan menilai berbagai risiko.

Teknologi telah berdampak pada perencanaan audit. Sebagai contoh, komputer digunakan untuk menghasilkan template pengendalian internal klien yang lebih spesifik untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem. Untuk menghasilkan template pengendalian internal klien, auditor menginput data kuesioner yang berbasis komputer yang dikembangkan oleh kantor audit. *Software* dalam komputer dapat

digunakan untuk menganalisis proses bisnis klien, menentukan pengendalian yang ada, menilai pengendalian risiko dan menghasilkan serangkaian tes pemeriksaan yang secara rinci akan dilakukan. Hasil pengujian audit kemudian dimasukkan ke dalam *software* untuk menentukan apakah risiko yang teridentifikasi selama perencanaan, telah ditangani dengan tepat.

Keuntungan penting dari penggunaan teknologi untuk perencanaan audit adalah bahwa alih-alih hanya mengandalkan pada keahlian tim audit yang ditugaskan untuk menilai pengetahuan manajer dan mitra di seluruh dunia yang dikumpulkan dan dapat diakses dengan menggunakan *software* komputer. Banyak perusahaan telah megadopsi pendekatan audit berbasis risiko dan mengembangkan atau memutuskan untuk membeli *software* untuk membantu auditor mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana risiko eksternal dan internal dapat mempengaruhi audit.

Kemampuan penting lain yang dimiliki oleh *software* yaitu pemantauan secara terus menerus dari transaksi yang memiliki risiko yang tinggi, pengendalian internal, tren persediaan item yang tidak biasa dan indikator kinerja lainnya.

Teknologi akan terus memiliki dampak dramatis pada hampir setiap tahapan proses audit. Dari pemeriksaan yang dihasilkan, *software* program komputer mampu melakukan pengujian terhadap seluruh populasi data klien. Teknologi sangat penting bagi akuntan untuk memahami proses bisnis klien dan bersaing dengan audit yang telah mencanangkan program *paperless* sebagai cara untuk mensukseskan program lingkungan hidup. Auditor yang memanfaatkan perkembangan teknologi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dalam hal efisiensi dan efektivitas audit.

2. Artikel Kedua

Judul : *Program Review : Its Role in computer Auditing*

Penulis : Michael J. Earl

Review program atau audit program pada awalnya masih bersifat tidak pasti, namun perlahan-lahan menjadi salah satu metode pemeriksaan berbasis komputer. Saat ini review program menjadi teknik yang ditetapkan dalam audit komputer, baik sebagai alternatif atau pelengkap untuk metode tertentu. Auditor eksternal telah menggunakan review program untuk memenuhi keadaan tertentu dimana teknik lain tidak tepat untuk digunakan. Dalam audit internal, review program dapat digunakan pada audit kepatuhan dan audit kinerja.

Jika program audit baru pertama kali dijalankan, akan lebih baik untuk memulai dengan program yang sederhana daripada mencari program yang kompleks. Pengendalian data, pengujian, tes kewajaran dan pengendalian berkas adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada beberapa dasar yang harus diperhatikan untuk membuat program audit klien. Kelayakan program audit sering dipertanyakan karena tingkat kesulitannya dan tingginya permintaan. Beberapa pertanyaan yang sering muncul antara lain: apa keterampilan yang diperlukan, siapa yang harus melaksanakan audit, bagaimana dengan biayanya, bagaimana hubungan internal auditor dengan eksternal auditor dan dengan manajemen serta bagaimana teknik yang masih mungkin untuk dikembangkan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk program audit mencakup kemampuan untuk berpikir logis, pemahaman tentang desain sistem komputer dan pengetahuan tentang pengaplikasi-

an sistem bisnis. Diperlukan pula pengetahuan tentang bahasa pemrograman yang relevan, namun kemampuan-kemampuan ini belum dimiliki sepenuhnya oleh auditor internal dan eksternal. Oleh karenanya, saat ini sering diadakan pelatihan untuk para auditor tentang dasar-dasar pengolahan data dan pengoperasian program audit berbasis komputer.

Pada saat ini, organisasi cenderung memisahkan fungsi dan tanggung jawab dengan menggunakan teknologi informasi serta semua departemen audit telah menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga kemungkinan program audit bisa lebih efisien apabila menggunakan orang yang ahli dalam pemrograman IT.

Salah satu cara untuk membangun hubungan yang terpercaya, fungsi audit internal salah satunya adalah memberikan saran konstruktif atau bersifat membangun. Di sisi lain, auditor internal dan eksternal memiliki sedikit potensi terjadi konflik dalam hubungan mereka. Auditor eksternal dapat memilih untuk mendelegasikan audit program tertentu yang lebih kompleks kepada personel IT yang lebih ahli. Kemudian prosedur pengendalian dan administrative akan diperlukan untuk program audit tertentu. Saat ini perusahaan yang bergerak dalam bidang audit sudah mulai memberikan pelatihan terkait audit komputer untuk auditor internal klien.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Automation: Crossing the Final Frontier*

Penulis : Peter Fox

Menggunakan otomatisasi penuh berarti menerapkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk menjalankan kegiatan

operasional organisasi keseluruhan secara otomatis. Hal ini berarti penggunaan otomatisasi berlaku untuk setiap fungsi mulai dari pembelian bahan baku melalui supplier hingga untuk pengiriman barang jadi. Hal ini juga termasuk setiap fungsi dari tugas-tugas operasional untuk kegiatan taktis yaitu memesan bahan untuk proses selanjutnya dan untuk perencanaan strategis yaitu memutuskan output untuk periode berikutnya.

Dalam model tradisional, kegiatan operasional dapat dibagi menjadi lima lapisan dalam dua tingkat. Pada tingkat manufaktur dan tingkat perakitan merupakan instrument, proses yang terotomatisasi dan optimalisasi pada sebagian proses, di tingkat manajemen perusahaan : manufaktur sistem eksekusi dan sistem untuk perencanaan bisnis atau *enterprise resource planing* yang selalu memerlukan *software* yang telah didesain.

Pengguna memerlukan sistem otomatisasi yang terpisah dalam setiap lapisan untuk menghubungkan lima pemasok yang berbeda dan kemudian menghubungkan sistem tersebut bersama-sama. Hal ini mengharuskan keterlibatan pihak ketiga yang akan menjadi salah satu pemasok peralatan. Dengan komponen *hardware* dan *software*, serangkaian komponen dapat dibuat untuk kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Dan dengan dukungan para ahli yang tersedia di setiap proses dalam siklus sebuah sistem. Manajemen aset bukan hanya mengenai personel yang melakukan tugas perakitan, tapi keseluruhan proses, melalui alat audit yang dimiliki oleh perusahaan pemantauan kondisi, optimalisasi siklus sistem dan dokumentasi.

4. Artikel Keempat

Judul : *Auditing in the e-commerce era*

Penulis : Ning Zhao, I-Chiu Chang and David C

Penelitian ini berfokus tentang kebutuhan audit ditengah sistem perdagangan elektronik. Perlu adanya pembaharuan dalam sistem audit untuk menghadapi era perkembangan sistem perdagangan secara elektronik agar bisa memenuhi kebutuhan para pelaku perdagangan elektronik.

Dengan perkembangan teknologi informasi, fungsi audit tradisional akan berkurang bahkan nyaris tidak ada. Ancaman-ancaman itu berupa :

1. Investor dapat meng-*up date* data setiap perusahaan setiap menit melalui perangkat elektronik tanpa menunggu laporan triwulan atau tahunan.
2. Laporan keuangan tahunan didasarkan pada informasi historis, sedangkan informasi keuangan dari data elektronik disajikan pada rincian kejadian saat ini sehingga lebih cepat untuk disampaikan atau disajikan, oleh karenanya laporan keuangan dari data elektronik lebih dipilih oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kelemahan-kelemahan sistem audit tradisional adalah:

1. Kurang cepat dalam menyajikan informasi, laporan keuangan disajikan periodenya bisa triwulan atau tahunan.
2. Kurang peka terhadap perkembangan jaman
3. Memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak

Perkembangan teknologi bisa mengancam fungsi audit. Saat ini peristiwa-peristiwa ekonomi di ukur, dan dilaporkan secara elektronik, tidak lagi menggunakan dokumentasi tertulis dan

kertas kerja. Sistem informasi yang ada dalam era perdagangan elektronik ini diantaranya adalah:

a. *Real time accounting* (RTA)

RTA merupakan sistem informasi akuntansi dalam perdagangan elektronik yang menyediakan data secara cepat, berkualitas dan akurat.

b. *Elektronik Data Interchange* (EDI)

EDI juga menyediakan informasi ekonomi dalam perdagangan elektronik secara cepat, dapat digunakan untuk menghemat waktu dan biaya perusahaan dalam kegiatan bisnisnya karena tidak memerlukan kertas kerja dan lebih bisa mengantisipasi arus produk fisik dan audit dalam perdagangan elektronik.

Meskipun terdapat ancaman terhadap audit secara tradisional, maka para auditor maupun kantor akuntan publik telah menawarkan sistem terbaru yaitu memberikan jasa akuntansi berbasis elektronik. Salah satu perkembangan sistem audit yang ditawarkan adalah sistem *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) atau pelaporan bisnis ekstensibel. XBRL merupakan aplikasi *software* untuk bidang akuntansi khususnya auditing yang lebih efisien dan membantu kerja auditor. Cara kerja XBRL adalah:

1. Sistem akan mengevaluasi risiko yang terkait dengan keterlibatan klien termasuk perencanaan auditnya, sehingga sistem kerja audit lebih efisien,
2. Sistem akan menerbitkan laporan keuangan
3. Sistem akan meng-upload informasi bisnis dan akan mengidentifikasi sehingga memunculkan laporan informasi yang akurat.

4. XBRL memungkinkan untuk melakukan audit secara terus-menerus/modern hal ini merupakan pengembangan dari sistem audit untuk mengikuti perkembangan jaman. Pengembangan audit modern disponsori oleh AICPA dan CICA. Audit modern merupakan metodologi yang memungkinkan audit independen untuk memberikan jaminan atas serangkaian laporan yang diterbitkan. Sistem ini dibantu oleh perangkat komputer yang disebut Computer Assistent Audiit Tools (CAATs). CAATs dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas audit dan meningkatkan fungsi audit.

Software dalam CAATs yang membantu auditor adalah Audit Command Language (ACL) dan Interactive Data Extration and Analysis (IDEA). Laporan audit modern merupakan laporan dengan interval pendek, relevan yang disajikan untuk kondisi saat ini dan bisa diperbaharui seiring dengan perkembangan jaman. Auditor dapat melakukan audit modern jika sebagian besar informasi hanya dalam bentuk elektronik. Dalam pemantauan laporan audit modern dari pihak yang tidak bertanggung jawab auditor umumnya merancang sistem pengendalian yaitu dengan menggunakan password untuk membatasai akses, dan hanya karyawan tertentu yang disetujui yang bisa masuk ke-program. Yang dibuthkan auditor dalam audit modern adalah :

1. Link yang efektif untuk mempercepat komunikasi
2. Konektivitas yang lebih mudah artinya dapat terhubung ke area jaringan yang lebih luas.
3. Jaminan keamanan yaitu menggunakan firewall, enkripsi data
4. Pelaporan audit yang cepat, akurat dan tepat waktu

5. Auditor harus mempunyai kemampuan dan pemahaman terhadap aspek teknologi informasi bisnis dan keuangan klien.

Persamaan audit tradisional dan audit modern : dilakukan oleh auditor independen dan menurut standar GAAP.

Perbedaan audit tradisional dan audit modern:

Audit tradisional:

1. Dilakukan untuk akuntansi berbasis kertas kerja
2. Dilakukan setahun sekali
3. Melakukan kerja lapangan
4. Informasi berbentuk dokumen tertulis
5. Waktu lebih panjang dan biaya yang dibutuhkan lebih banyak

Audit modern

1. Dilakukan untuk akuntansi berbasis elektronik
2. Interval penugasan lebih pendek
3. Tidak memerlukan kerja lapangan
4. Informasi dalam bentuk data elektronik
5. Lebih hemat waktu dan biaya

Kesimpulan:

Diperlukan adanya pengembangan dari sistem audit untuk memenuhi kebutuhan di era elektronik yaitu audit modern. Audit modern menyediakan informasi keuangan secara elektronik, laporan keuangan yang disajikan dapat tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan. Hal ini menjawab semua keinginan pelaku bisnis dan masyarakat sebagai pelaku perdagangan elektronik.

5. Artikel Kelima

Judul : *Audit Automation As Control Within Audit Firms*

Penulis : **Stuart Manson, Sean McCartney & Michael Sherer**

Pada paper membahas sifat otomatisasi pengendalian audit dalam perusahaan audit. Tema artikel ini adalah pengendalian atas proses kerja dan pemeriksaan staf, tugas, ketahanan dan kompetensi, yang dianalisis menggunakan kerangka teori yang disediakan oleh Coombs dkk yang menerapkan teori struktur Giddens untuk meneliti dampak teknologi informasi dalam organisasi

Sebagai bagian dari studi yang lebih luas dari penggunaan dan dampak teknologi informasi dalam proses audit, peneliti melakukan serangkaian wawancara mitra, manajer, senior, asisten dan spesialis teknologi informasi di dua perusahaan audit big five. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana praktek kerja mereka dan perilaku mereka telah dipengaruhi oleh otomatisasi audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otomatisasi audit tidak dapat dilihat hanya sebagai teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari proses audit. Otomatisasi audit juga memiliki nilai sebagai simbol daya saing pasar suatu perusahaan dan karenanya membantu untuk mempromosikan perusahaan kepada klien dan internal perusahaan. Selain itu peneliti ini juga menunjukkan bahwa otomatisasi audit menawarkan peluang yang cukup besar untuk pengawasan dan pengendalian manajerial yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama memfasilitasi struktur organisasi yang kurang hirarkis dan struktur organisasi yang lebih informal.

BAB XIII

RENCANA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT SECARA KESELURUHAN

Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus berencana secara benar:

1. Untuk memungkinkan auditor untuk memperoleh bukti keterlibatan yang cukup dan tepat untuk keadaan,
2. Untuk membantu menjaga biaya audit wajar, dan
3. untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Jenis Pengujian

Auditor menggunakan lima jenis pengujian dalam mengembangkan rencana audit secara keseluruhan dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, antara lain:

1. Prosedur Penilaian Risiko
2. Pengujian Pengendalian
3. Pengujian Substantif atas Transaksi
4. Prosedur analitis
5. Pengujian rincian saldo

- a. Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat adalah penting jika perusahaan meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Menjaga biaya yang wajar dan membantu perusahaan tetap kompetitif.
- b. Menghindari kesalahpahaman dengan klien diperlukan untuk menjaga hubungan klien yang baik dan untuk memfasilitasi pekerjaan yang berkualitas tinggi pada fee yang wajar:
 - 1) Misalkan auditor menginformasikan klien bahwa audit akan selesai sebelum 30 Juni tapi tidak dapat menyelesaikannya sampai Agustus karena penjadwalan tidak sesuai dengan rencana.
 - 2) Klien mungkin akan marah dengan perusahaan KAP dan bahkan bisa menuntut pelanggaran kontrak.

Perencanaan Audit Awal

Melibatkan empat hal, yang semuanya harus dilakukan di awal audit:

1. Auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan. Penentuan ini biasanya dibuat oleh auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini awal, sebelum menimbulkan biaya yang signifikan.
2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien ingin atau perlu audit. Informasi ini kemungkinan akan mempengaruhi sisa bagian dari proses perencanaan.

3. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien tentang perjanjian kontrak.
4. Auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk keterlibatan kepegawaian dan setiap spesialis audit yang diperlukan.

Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu aspek yang paling menuntut dan penting dari audit. Sebuah kehati-hatian Audit direncanakan dalam meningkatkan efisiensi auditor dan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa tim audit dan membahas isu-isu penting.

Auditor mempersiapkan pemeriksaan perencanaan dokumen yang merangkum latar belakang industry klien, informasi dan mendiskusikan isu-isu akuntansi dan auditing terkait dengan laporan keuangan klien.

Securities and Exchange Commission (SEC) Form 10-K aturan pengajuan memerlukan mengelola perusahaan publik AS untuk memasukkan informasi latar belakang tentang bisnis.

1. Keandalan pelaporan keuangan, manajemen
 - a. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya.
 - b. Manajemen memiliki kedua tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa
 - c. Informasi disajikan secara wajar sesuai dengan pelaporan dari kerangka akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Tujuan yang efektif pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi pelaporan tanggung jawab keuangan.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi.
 - a. Kontrol dalam perusahaan tentang penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan golnya.
 - b. Tujuan penting dari kontrol ini adalah akurat keuangan dan informasi non keuangan tentang operasi perusahaan untuk keputusan pembuatan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
 - a. Mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk menerbitkan laporan tentang efektivitas operasi dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain ketentuan hokum publik, non publik, dan tidak-untuk organisasi nirlaba yang diwajibkan mengikuti banyak hukum dan peraturan.
 - b. Beberapa berhubungan dengan akuntansi hanya secara tidak langsung, seperti perlindungan lingkungan dan hukum hak-hak sipil.
 - c. Lainnya adalah erat terkait dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan anti-*fraud*.
 - d. Manajemen desain sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan semua tiga tujuan.
 - e. Fokus auditor di kedua audit atas laporan keuangan dan audit internal.
 - f. Kontrol pada kontrol atas keandalan pelaporan keuangan
 - g. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang secara material dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Standar audit

1. Standar kedua mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan klien.
2. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk memahami bisnis klien dan industri untuk menilai risiko salah saji material.
3. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian.
4. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian.
5. Prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk kontrol internal, merupakan prosedur penilaian risiko auditor. prosedur penilaian risiko dilakukan untuk menilai risiko salah mengutarakan dalam laporan keuangan.

Auditor melakukan :

1. Tes kontrol
2. Substantif tes transaksi
3. Prosedur analitis
4. Tes rincian saldo dalam menanggapi penilaian auditor dari risiko salah saji material.

Prosedur untuk memperoleh pemahaman internal kontrol

Fokus pada kedua Desain dan pelaksanaan dari pengendalian internal dan digunakan untuk menilai risiko kontrol untuk setiap audit terkait transaksi.

Tujuan

Pemahaman auditor pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko kontrol untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit.

Contoh menilai tujuan akurasi untuk transaksi penjualan rendah dan tujuan terjadinya sebagai moderat. ketika kontrol kebijakan dan prosedur diyakini dirancang secara efektif, auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan efektivitas relatif dari kontrol-kontrol. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian bahwa, auditor melakukan **tes kontrol**.

Tes kontrol, baik manual atau otomatis, mungkin termasuk jenis berikut :

1. Membuat pertanyaan dari personil klien yang sesuai
2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan
3. Mengamati kegiatan yang berhubungan dengan kontrol
4. Prosedur klien Reperform

Walkthrough

1. Auditor melakukan sistem walkthrough sebagai bagian dari prosedur untuk mendapatkan dan membantu mereka menentukan apakah kontrol berada di tempat.
2. Walkthrough adalah biasanya diterapkan pada satu atau beberapa transaksi dan mengikuti transaksi yang melalui seluruh proses. Misalnya, auditor dapat memilih transaksi satu penjualan untuk system walkthrough dari proses persetujuan kredit, kemudian ikuti proses persetujuan kredit dari inisiasi transaksi penjualan melalui pemberian kredit.

Tes kontrol

1. Tes kontrol juga digunakan untuk menentukan apakah kontrol ini efektif dan biasanya melibatkan pengujian sampel transaksi.
2. Uji efektivitas operasi dari proses persetujuan kredit, misalnya, auditor mungkin memeriksa sampel dari 50 transaksi penjualan dari sepanjang tahun untuk menentukan apakah kredit diberikan sebelum pengiriman barang.
3. Prosedur untuk memperoleh pemahaman internal control umumnya tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat bahwa kontrol adalah beroperasi secara efektif.
4. Pengecualian mungkin berlaku untuk kontrol otomatis karena mereka kinerja yang konsisten. prosedur auditor untuk menentukan apakah otomatis control telah dilaksanakan juga dapat berfungsi sebagai tes kontrol yang, jika auditor menentukan ada risiko minimal bahwa kontrol otomatis telah berubah sejak pemahaman diperoleh. Kemudian, tidak ada tes tambahan kontrol akan diperlukan.

Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk tes kontrol tergantung pada dua hal:

1. Luasnya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman pengendalian internal
2. Rencana pengurangan risiko control

Pengujian Pengendalian

Peran pengujian pengendalian dalam audit penjualan dan siklus koleksi relatif terhadap tes lain yang dilakukan untuk memberikan bukti yang cukup dan tepat untuk opini auditor. P

Jika auditor memverifikasi bahwa penjualan dan penerimaan kas transaksi dengan benar dicatat dalam catatan akuntansi dan diposting ke buku besar, mereka dapat menyimpulkan bahwa berakhir saldo piutang dan penjualan sudah benar.

Auditor dapat melakukan pengujian kontrol terpisah dari semua tes lainnya, tapi sering lebih efisien untuk melakukannya pada waktu yang sama dengan pengujian substantif transaksi.

Auditor biasanya dapat menerapkan pengujian pengendalian melibatkan dokumentasi dan Reperformance untuk transaksi yang sama diuji untuk salah saji moneter.(secara bersamaan memberikan bukti tentang kedua kontrol dan kebenaran moneter).

Mengasumsikan bahwa tes kontrol dan substantif tes tindakan dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Prosedur Analitis

Prosedur Analitis melibatkan perbandingan dicatat sebesar harapan yang dikembangkan oleh auditor. standar auditing mengharuskan mereka dilakukan selama perencanaan dan menyelesaikan audit. Meskipun tidak diperlukan, prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun.

Dua yang paling penting tujuan prosedur analitis dalam audit saldo rekening adalah untuk:

1. Menunjukkan mungkin salah saji dalam laporan keuangan.
2. Memberikan bukti substantive.

Prosedur analitis dilakukan selama perencanaan biasanya berbeda dari yang dilakukan di tahap pengujian. Bahkan jika, misalnya, auditor menghitung margin kotor selama perencanaan, mereka mungkin melakukannya dengan menggunakan data interim.

Kemudian, selama pengujian saldo berakhir, mereka akan menghitung ulang rasio menggunakan data tahun penuh. Jika auditor yakin bahwa analisis

prosedur mengindikasikan kemungkinan wajar dari salah saji, mereka dapat melakukan prosedur analitis nasional atau memutuskan untuk memodifikasi tes rincian saldo.

Tes rincian saldo

Tes rincian saldo fokus pada saldo buku besar berakhir untuk kedua keseimbangan sheet dan laporan laba rugi rekening.

Beberapa pengamatan tentang tabel:

1. Lebih banyak jenis bukti, enam di total, yang digunakan untuk tes rincian saldo dari ntuk semua jenis lain dari tes.
2. Hanya tes rincian saldo melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi.
3. Pertanyaan dari klien yang dibuat untuk setiap jenis tes.
4. Dokumentasi digunakan dalam setiap jenis tes kecuali prosedur analitis.
5. Digunakan dalam setiap jenis tes kecuali prosedur analitis.

Auditor mungkin kontrol sebagai bagian dari langkah-langkah transaksi atau untuk menguji kontrol yang tidak didukung oleh bukti-bukti dokumen yang cukup.

Perhitungan kembali digunakan untuk memverifikasi keakuratan matematis transaksi saat per membentuk tes substantif transaksi dan saldo akun saat per - membentuk tes rincian saldo.

Ketika auditor harus menentukan jenis tes untuk memilih untuk mendapatkan appro yang cukupbukti, biaya bukti adalah suatu pertimbangan penting.

Jenis tes tercantum di bawah ini dalam rangka peningkatan biaya:

1. prosedur analitis
2. prosedur penilaian risiko
3. pemahaman pengendalian internal
4. tes kontrol
5. pengujian substantif transaksi
6. tes rincian saldo

Analisis Audit 1

1. Klien ini adalah perusahaan besar dengan kontrol internal yang canggih dan risiko yang melekat rendah.
2. Auditor melakukan tes ekstensif kontrol dan sangat bergantung pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif.
3. Luas prosedur analitis substantif juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya.
4. Pengujian substantif transaksi dan tes rincian saldo yang diminimalkan. Karena penekanan pada tes kontrol dan substantif analitis prosedur, pemeriksaan ini dapat dilakukan relatif murah.
5. Audit ini kemungkinan merupakan campuran bukti yang digunakan dalam audit terpadu dari perusahaan publik keuangan pernyataan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Analisis Audit 2

1. Perusahaan ini adalah media berukuran, dengan beberapa kontrol dan beberapa risiko yang melekat.

2. Auditor telah memutuskan untuk melakukan sejumlah media pengujian untuk semua jenis tes kecuali prosedur analitis substantif, yang akan dilakukan secara ekstensif.
3. Pengujian ekstensif akan diperlukan jika risiko yang melekat tertentu ditemukan.

Analisis Audit 3

1. Perusahaan ini adalah media berukuran tetapi memiliki sedikit kontrol yang efektif
2. Risiko yang melekat signifikan.
3. Manajemen telah memutuskan bahwa lebih baik kontrol menjadi efektif.

Analisis Audit 4

1. Rencana awal audit ini adalah untuk mengikuti pendekatan yang digunakan Analisis Audit 2.
2. Auditor mungkin menemukan luas penyimpangan tes kontrol dan salah saji yang signifikan saat melakukan pengujian substantif transaksi dan prosedur analitis substantif.

Desain Program Audit

1. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan yang sesuai penekanan pada masing-masing empat jenis tes, prosedur audit spesifik untuk setiap jenis tes harus dirancang.
2. Setiap siklus transaksi kemungkinan akan dievaluasi menggunakan satu set terpisah dari sub-audit program.

Dalam siklus penjualan dan penagihan, misalnya, auditor mungkin menggunakan:

1. Sebuah tes kontrol dan substantif tes program audit transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas
2. Sebuah program audit prosedur analitis substantif untuk seluruh siklus
3. Tes rincian program audit saldo uang tunai, piutang, buruk Beban utang, penyisihan piutang tak tertagih, dan rekening aneka piutang

Prosedur Audit

Prosedur Audit Ketika merancang tes kontrol dan substantive, auditor menekankan memuaskan tujuan audit terkait transaksi dikembangkan dalam. Auditor mengikuti pendekatan empat-langkah untuk mengurangi risiko pengendalian yang dinilai.

- a. Terapkan tujuan audit terkait transaksi transaksi seperti penjualan.
- b. Identifikasi pengendalian kunci yang harus mengurangi risiko kontrol tujuan audit.
- c. Mengembangkan tes yang sesuai kontrol untuk semua kontrol internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal dari risiko kendali bawah maksimum (kontrol utama).
- d. Untuk jenis potensi salah saji yang terkait dengan setiap audit terkait transaksi objektif, desain yang sesuai substantif tes transaksi, mengingat kekurangan dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian

Salah saji dan Menilai Risiko Inheren untuk Piutang

Auditor harus menentukan penilaian awal tentang materialitas untuk audit secara utuh dan kemudian mengalokasikan total saldo rekening,

Menilai Risiko Pengendalian untuk Penjualan

Untuk mengevaluasi risiko pengendalian akan diterapkan baik penjualan dan penerimaan kas dalam audit piutang.

Desain dan Lakukan Pengujian Kontrol dan Tes Substantif Transaksi untuk Penjualan dan Koleksi Cycle

Tes kontrol dan substantif tes transaksi dirancang dengan harapan bahwa hasil tertentu akan diperoleh.

Tujuan Audit Terkait

Tes direncanakan rincian saldo termasuk pemeriksaan prosedur, ukuran sampel, item untuk memilih, dan waktu. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan tujuan audit terkait dengan saldo dalam setiap akun.

Prosedur Analitis penggunaan hubungan bandingkan untuk menilai apakah saldo rekening atau data lain muncul masuk akal bukti campuran kombinasi dari jenis tes untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk siklus; ada kemungkinan menjadi variasi campuran dari siklus ke siklus tergantung pada keadaan audit prosedur audit lebih lanjut kombinasi dari tes kontrol, tes substantive transaksi, prosedur analitis, dan tes rincian saldo dilakukan dimenanggapi risiko salah saji material diidentifikasi oleh penilaian risiko auditor Prosedur

Fase proses audit empat aspek audit lengkap:

1. rencana dan merancang pendekatan audit,
2. melakukan tes kontrol dan substantif tes transaksi,
3. melakukan prosedur analitis
4. menyelesaikan audit dan menerbitkan surat laporan audit

Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal

Prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti tentang

Ikhtisar Jenis-Jenis Pengujian

Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi claim siklus tersebut telah cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian, sehingga memungkinkan pengurangan pengujian substantif.

klien yang merupakan perusahaan publik. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk memverifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal dan dipindahbukukan ke dalam buku besar.

Prosedur analitis menekankan pada keyakinan keseluruhan atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo buku besar. Pengujian atas perincian saldo menekankan pada saldo akhir dalam buku besar.

Memilih Jenis Pengujian Yang Akan Dilaksanakan

Auditor menggunakan lima jenis pengujian pada waktu audit laporan kecurangan, beberapa jenis pengujian memperoleh penekanan yang lebih dibandingkan dengan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap pengujian yang dipilih yang akan dipelajari adalah: (Arens, Elder et al. 2008)

1. Ketersediaan Jenis Bukti untuk Prosedur Audit Selanjutnya

Ada beberapa pengamatan tentang tabel hubungan antara prosedur audit lanjutan dan jenis bukti antara lain:

- a. Lebih banyak jenis bukti, ada enam jumlahnya, digunakan dalam pengujian rincian saldo dibandingkan bagi setiap pengujian lainnya;
- b. Tanya jawab dengan klien dilakukan dalam setiap jenis pengujian;
- c. Hanya pengujian rincian saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi;
- d. Disetiap pengujian dilakukan dokumentasi kecuali pada prosedur analitis;
- e. Pada setiap jenis pengujian dilakukan pengujian ulang kecuali prosedur analitis.

2. Biaya Audit

Jenis-jenis pengujian berikut ini mempunyai dasar urutan biaya yang dari rendah sampai yang tinggi:

Prosedur Analitis

Prosedur ini menggunakan biaya yang paling rendah sebab lebih mudah dalam membuat perhitungan dan perbandingan.

Prosedur Penilaian Risiko

Prosedur ini dalam memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal tidak semahal pengujian audit lainnya, sehingga dengan mudah auditor membuat tanya jawab prosedur analitis

Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian dibandingkan pengujian juga masih menggunakan biaya yang rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Tetapi pengujian pengendalian masih lebih mahal daripada prosedur penilaian risiko.

Pengujian Substantif

Pengujian substantif transaksi lebih mahal dibanding dengan pengujian pengendalian yang tidak melibatkan suatu pengerjaan ulang sebab yang sebelumnya.

Pengujian Rincian Saldo

Pengujian ini lebih mahal dibanding dengan jenis pengujian yang lainnya karena adanya biaya prosedur contohnya pengiriman konfirmasi serta perhitungan persediaan.

Pada waktu perencanaan auditor harus memutuskan apakah akan melakukan penilaian risiko pengendalian dibawah maksimum.

Ikhtisar Proses Audit

Fase I : Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit

Fase II : Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi

Fase III : Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo

Fase IV : Menvelesaikan Audit dan Mengeluarkan Laporan Audit

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *An Exploratory Study Of The Effects Of The Sarbanes-Oxley Act, The Sec And United Statesstock Exchange(S) Rules On Audit Committee Alignment*

Penulis : **Louis Braiotta Jr and Jian Zhou**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki rekomendasi dari Blue Ribbon Committe (BRC) dan persyaratan Sarbanes-Oxley (SOX) untuk keselarasan komite audit. Pada penelitian ini

menguji apakah penerbitan aturan baru untuk komite audit oleh Kongres AS dengan berlakunya SOX, SEC aturan yang dibuat organisasi, dan standar audit setter telah menyebabkan keselarasan yang lebih besar apada struktur dan komposisi komite audit dan dewan direksi. Mengingat pengungkapan baru pada SEC, Standar pencatatan bursa saham nasional dan komunikasi diluar auditor tidak dapat dilakukan secara sistematis dikarena adanya kepatuhan ini.

Terdapat aturan-aturan baru yang diberlakukan memungkinkan pemeriksaan cross-sectional yaitu pada sejauh mana aturan pada sektor swasta dan publik dapat mempengaruhi, keputusan dewan direksi untuk menyelaraskan struktur komite audit dan keanggotaanya. Pada penelitian ini keselarasan komite audit didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan direksi di perusahaan, yang dirancancang untuk menerapkan perubahan (reformasi) dalam struktur komite audit perusahaan dan komposisi memenuhi persyaratan peraturan. Lebih khusus, keselarasan komite audit terjadi jika perusahaan mengubah ukuran komite audit dan atau perubahan komposisi komite audit untuk memnuhi persyaratan peraturan. Sebagai contoh, BRC tentang peningkatan efektivitas Audit Komite Perusahaan (1999) menyatakan bahwa sehubungan dengan penyelarasan "Komite audit akan lebih efektif dalam membantu untuk menjamin transparansi dan integritas pelaporan keuangan dan dengan demikian mempertahankan kepercayaan investor yang membuat pasar sekuritas kami terbaik dan paling likuid di dunia". Pada bulan juli 2002, Kongres AS memberlakukan SOX yang menyebabkan banyak komite audit dalam praktek terbaik

untuk menjadi undang-undang federal, misal SOX membutuhkan komite audit harus terdiri dari direktur indepen sepenuhnya.

Penelitian ini menguji akan struktur, komposisi serta ukuran komite audit dan dewan direksi berdasarkan pengungkapan yang disediakan pada tahun 1999 2000. Metodologi/ pendekatan : menggunakan seperangkat data yang dikumpulkan dari komite audit dengan 129 perusahaan (tahun 199, 2000, 20002) .

Penelitian ini dipisahkan menjadi dua tahap : tahap pertama menyelidiki dampak dari rekomendasi dari BRC terkait peningkatan efektivitas komite audit pada keselarasan komite audit, pada tahap kedua menyelidiki dampak SOX pada keselarasan komite audit.

Penelitian ini dilakukan karena melihat pentingnya tugas komite audit melakukan pengawasan yang efektif dari kedua proses audit dan pengungkapan keuangan, yang apada gilirannya akan membantu menyediakan sistem pelaporan keuangan dan pasar sekuritas efisien. Pada penelitian Cook (1993) menyebutkan bahwa “ Komite audit menambahkan nilai yang cukup besar dengan kualitas dan kredibilitas proses pelaporan keuangan. Pada pengawasan mereka dari fungsi audit dan sistem pengendalian internal perusahaan membantu melindungi kepentingan para pemegang saham dengan menjaga pada bisnis “Straight and narrow”. Namun pada penelitian Wolnozer (1995) Berpendapat bahwa komite audit merupakan red herrings kecuali pada praktek akuntansi direformasi sehingga laporan keuangan daoat dikonfirmasi melalui jalan lain utnuk bukti komersial yang andal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel mengalami perubahan tahunan secara signifikan dalam

keselarasan komite audit dalam periode pengujian BRC. Namun pada periode SOX, Hasil analisis corellation menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keselarasan komite audit, tingkat independensi dewan dan ukuran. Selanjutnya setelah mengendalikan faktor lain yang terkait dengan keselarasan komite audit, dan ukuran komite audit, direktur kompensasi, jumlah pertemuan komite audit, tingkat independensi dewan dan ukuran. Selanjutnya setelah mengendalikan faktor lain yang terkait dengan keselarasan komite audit, hasil analisis logis menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih cenderung untuk menyelaraskan komite audit pada tahun 2002 berkaitan dengan kurangnya peningkatan EM.

Pada penelitian ini terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas monitoring komite audit struktur dan komposisi (Independensi). Penelitian etrbaru menyarankan bahwa struktur dan komposisi komite audit mungkin berhubungan dengan kualitas pelaporan dan proses pemeriksaan. Pada penelitian Menon dan Willian (1994) menyatakan bahwa "Independensi dan Integritas pemantauan dapat ditingkatkan dengan memiliki auditor internal dan eksternal yang melpor kedewan yang terdiri dari luar direksi. Dewan direksi penuh termasuk CEO dan karyawan lainnya pada perusahaan yang kinerjanya dapat dipertanyakan oleh auditor.

Independensi dan komposisi komite audit meningkatkan untuk bertanggung jawab pada pengawasan untuk pelaporan keuangan dan sekuritas pasar, pada teori agensi Jensen dan Meckling 1979 menyatakan biaya agensi akan turun karena efektivitas pemantau ditingkatkan. Pada penelitian Watts (1977) Bukti bahwa kualitas pelaporan eksternal dan proses audit

terkait dapat mengurangi biaya agensi. Dengan demikian perusahaan dengan komite audit di pasar AS mendapatkan peningkatan transparansi pada perusahaan mereka untuk mengurangi risiko litigasi. Ceteris paribus, berargumen bahwa dewan direksi akan memberikan insentif untuk menyelaraskan komite audit mereka dengan ada persyaratan yang etrkait untuk pencapaian keseragaman dalam perlindungan pengawasan untuk investasi publik. Oleh karena itu pembahasan termasuk kemajuan hipotesis berikut :

- H1. Karena SOX telah membentuk lingkungan hukum dan peraturan baru untuk akuntabilitas perusahaan, dewan direksi akan memiliki insentif untuk menyelaraskan struktur komite audit dan komposisi mereka. Ceteris paribus, keselarasan komite audit kemungkinannnya terkait dengan peningkatan ukuran komite audit, kompensasi direktur, independensi komite audit, pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit dan keahlian tata kelola.
- H2. Sejak SOX dibentuk melalui lingkungan hukum dan peraturan baru untuk tujuan akuntabilitas perusahaan, dewan direksi akan memilki insentif untuk menyelaraskan struktur komite audit dan komposisi mereka. Ceteris paribus, perusahaan dengan keselarasan komite audit yang mungkin terkait dengan kurangnya peningkatan EM atau tingkat yang lebih rendah dari EM.

Dalam konteks tata kelola perusahaan, dengan membandingkan hasil temuan diatas maka penelitian ini mempunyai implikasi penting mengenai efek independensi komite audit dan kompetensi yang ditingkatkan dalam perlindungan pengawasan untuk investasi publik/masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan komite audit yang terkait dengan SOX dan persyaratan pertukaran meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang berfungsi sebagai bukti awal pada efektivitas persyaratan ini. Sample pada penelitian ini relatif kecil karena penggunaan data primer yang dikumpulkan, sehingga peneliti menyarankan untuk future reserach menambah sampel agar hasilnya bisa digeneralisasikan jika menggunakan sampel yang lebih besar lagi.

2. Artikel Kedua

Judul : *Increase Your Fraud Auditing Effectiveness By Being Unpredictable!*

Penulis : **Thomas E. McKee**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana auditor dapat menggabungkan ketidakpastian dalam rencana audit mereka, untuk memenuhi standar audit internasional tentang adanya pencegahan dan pendeteksian penipuan. Adanya ketidakpastian membuat paara auditor bersikap skeptisme yang didefinisikan dalam SAS 99 (13) yaitu sebagai sikap yang mencakup pikiran pertanyaan dan penilaian kritis dari bukti audit.

Keuntungan utama untuk auditor menjaid tidak terduga yaitu bahwa ini akan meningkatkan peluang auditor akan menemukan penipuan. Dengan kata lain audit akan lebih efektif. Hal ini terjadi karena perilaku tidak terduga oleh auditor akan membuat penipu/*frauder* cenderung untuk dapat secara efektif menyembunyikan adanya penipuan. Peneingkatan deteksi adanya penipuan berarti bahwa klien dan masyarakat umum

akan lebih percaya dengan profesi audit. Manfaat kedua adalah bahwa pencegahan penipuan akan meningkat.

Kesimpulannya yaitu beberapa penipuan kan mudah untuk dilakukan karena kurangnya prediksi dari pihak auditor. Sebagaimana dicatat dikedua SAS 99 dan ISA 240 salah satu respon terhadap risiko *fraud* adalah untuk menggabungkan unsur ketidakpastian dalam rencana audit. Tulisan ini memaparkan jumlah teknik audit untuk meningkatkan ketidakpastian auditor. Publik mengharapkan profesi audit untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan pencegahan penipuan dengan deteksi. Jika semua auditor secara rutin menggabungkan beberapa unsur ketidakpastian dalam pendekatan audit mereka, profesi audit akan memenuhi harapan ini.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Audit Committees and Corporate Control*

Penulis : **Gerald Vinten and Connie Le**

Kontrol manajemen telah menjadi semakin terpisah dari kepemilikan, sejak adanya pergantian abad kedua puluh. Penelitian terhadap 200 Perusahaan ranking di Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk periode 1929-1963, kepemilikan pada kepentingan dominan dalam perusahaan telah meningkat dari 44 persen menjadi 84 persen, dan perusahaan dengan kontrol saham mayoritas telah menurun dari 11 persen menjadi 3 persen. Dari bukti yang ada, jelas bahwa tidak ada kepemilikan tunggal yang mempunyai kontrol efektif atas kegiatan perusahaan.

Komite audit menjadi subjek berbagai interpretasi oleh perusahaan yang berbeda. AICPA belum mendefinisikan lingkup yang tepat dari tanggung jawab komite audit, namun AICPA telah memutuskan bahwa efektivitas komite tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan persepsi dari manajemen puncak, yang akan menentukan piagam komite yang tepat berkaitan dengan persyaratan perusahaan.

Berfungsinya komite audit di perusahaan-perusahaan Amerika Utara, dalam sepuluh tahun terakhir, memberikan tingkat tertentu kenyamanan dalam perannya sebagai mekanisme yang berguna untuk para direktur dalam memantau kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan.

Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi lima bidang dasar utama: review dari departemen audit internal, review dari rencana audit tahunan, review dari pengendalian akuntansi

internal dan perlindungan aset perusahaan. Istilah yang tepat sebagai referensi dari komite audit dapat diperluas atau diasah tergantung pada kebutuhan perusahaan dan karakteristik perusahaan di waktu tertentu. Merupakan hal yang biasa apabila komite audit mereview hal-hal seperti kontribusi politik, kode etik perilaku, audit kepatuhan lingkungan, konflik kepentingan insider trading dan kualitas laporan pendapatan.

Efektivitas komite audit dapat terancam jika manajemen mementingkan ego pribadi. Dalam mendefinisikan peran komite, manajemen tidak harus membangun harapan yang tidak realistis komite, sehingga memaksa kemampuan mereka dalam mengambil tanggung jawab yang tidak bisa untuk ditangani, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya anggota direktur non-eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. www.praktisi.ac.id. Diakses, Jumat 9 September 2016.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S., 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 Edisi kedua belas*. Jakarta : Erlangga
- Arens, Alvin A., Loebbecke, James k., Jusuf, Amir Abadi. 1996. *Auditing, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Salemba 4
- Auditor (Online). <http://id.wikipedia.org/wiki/auditor>. diakses Rabu, 31 Agustus 2016
- Andon, Paul., Chong, Kar Ming., Roebuck Peter. 2010. "Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession". *Critical Perspective on Accounting* 21. Elsevier 253-265.
- Bierstaker, J.L., et al. 2001. "The Impact of Information Technology on The Audit Process : an Assessment of The State of The Art and Implication for The Future". *Managerial Auditing Journal* 16 (3). 159-164
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., Kell, Walter G. 2002. *Modern Auditing Edisi Ketujuh Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Braiotta, Jr, L. J. Zhou. 2006. "An Exploratory Study of The Effects of The Sarbanes Oxley Act, the SEC and United States

-
- Stock Change Rules On Audit Committee Alignment". *Managerial Auditing Journal* 21 (2). 166-190
- Broberg, Pernilla., Umans, Timurs., Carl, Gerlofsting. 2013. "Balanced Between Auditing and Marketing : An Explorative Study". *Journal Of International Accounting, Auditing and Taxation*. Xxx-xxx
- Carpenter, Brian W., et al. 1994. "Materiality Judgements and Audit Firm Culture: Social Behavioral and Political Perspective". *Accounting Organization and Society* vol.19, no.45. 355-380
- Cohen, Sandra., Leventis, Stergios. 2013. "Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay". *Accounting Forum* 37. Science Direct 40-53.
- Dedoulis, Emmanouil. 2006. "The Code of ethics and the development of the auditing profession in Greece, the periodn1992-2002". *Accounting Forum* 30. 155-178
- Dwyer, Peggy. 2004. "Known by the company they keep: a study of political campaign contribution made by the United States public accounting profession". *Critical Perspective on Accounting* 15. Elsevier Science 865-883.
- Earl, Michael J.1980. "Program review : Its Role in Computer Auditing". *Managerial Finance* 5 (2). 188-199
- Favere, Michael., Marchesi. 2000. " Audit Quality in ASEAN". *The International Journal of Accounting* 35.121-149.

- Fraser, Ian., Henry, William. 2007. "Embedding risk management: Structures and approaches". *Managerial Auditing Journal* vol. 22 No 4. 392-409.
- Fox, Peter. 2001."Automation: Crossing the Final Frontier". *Assembly Automation* vol 21 No 2. 111-114
- Geiger, Marshall A., Raghunandan, K. Rama, Dasaratha V. 2006. "Auditor decision-making in different litigation environments: the private securities litigation reform act, audit report and audit firm size". *Journal of Accounting and Public Policy* 25. Science Direct 332-353.
- Giroux, Gary., Casseell, Cory. 2011. "Changing Audit Risk Characteristic in the Public Client Market". *Research in Accounting Regulation* 23. 177-183
- Habib, Ahsan., Bhuiyan, Md Borhan Uddin,. 2011. "Audit firm industry specialization and the audit report lag". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 20. Science Direct 32-44.
- Ikatan Akuntan Indonesia, standar professional akuntan publik
- Janvrin, Diane., Caster, Paul., Elder, Randy. 2010. "Enforcement Release Evidence on the Audit Confirmation Process : Implication for standard setters". *Research in Accounting Regulation* 22. 1-17.
- Karapetrovic, Stainslav., Willborn, Walter. 2000." Quality Assurance and Effectiveness of Audit System". *International Journal of Quality & Reliability Management* vol 17 No.6.679-703.

Kode etik profesi akuntan publik. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Laviada, Ana Fernandez. 2007." Internal Audit Function Role in Operational Risk Management". *Journal of Financial Regulation and Compliance* vol 15 No.2 . 143-155

Lin, Z. Jun., 2004. "Auditor's Responsibility and Independence: Evidence From China". *Research in Accounting Regulation* 17.167-190.

Manson, Stuart et al. 2001." Audit Automation As Control Within Audit Firms". *Accounting, Auditing & Accountability Journal* Vol 14 No 1. 109-130.

Mulyadi. 2001. *Auditing Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat

Miller, Timothy C. 2012. "Do Auditors Assess Inherent Risk As If There Are No Controls?". *Managerial Auditing Journal* vol.27 no.5. 448-461.

McKee, T. E. 2006. "Increase Your *Fraud* Audit Effectiveness By Being Unpredictable". *Managerial Auditing Journal* 21 (2).224-231

Pacini, Carl., Hillison, William., Peltier, Dominic., Sinason, Dave., Alagiah, Ratnam. 2000. "At The Interface of The Electronic Frontier and The Law : The International Legal Environment for System Reliability Assurance Services". *Journal Of Accounting Auditing Taxation*. Elseviers Science.185-218.

Peecher, Mark E., Schwartz, Rachel., Solomon, Ira. 2007. "It's All About Audit Quality: Perspective on Strategic-System

- Auditing". *Journal Of Accounting Organization and Society*. Elsevier Science. 463-485
- Pierce, Bernard., Sweeney, Breda. 2005. "Management Control in audit firms - Partner's perspective". *Management Accounting Research* 16. 340-370.
- Previts, Gary J. 2003." The Information right and the CPA Profession" . *Research in Accounting Regulation volume* 16. Elsevier Science 275-277.
- Sathe, Richard S. 2010. "CPA Licensure without examination: Legitimation and resistance". *Critical Perspective on Accounting* 21. Elsevier 496-508.
- Smith, Malcom. 2005. "Auditor's Perception of Fraud Risk Indicators". *Managerial Auditing Journal vol.20 No.1* . 73-85
- Smith, G. Stevenson. 2012. "Can an Auditor Ever Be A First Responder to Financial Frauds?". *Journal of Financial* vol 19 No 3. 291-304
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, www.kompas.com diakses pada Jumat 4 November 2016
- The Institute of Internal Auditor, www.iaa.com, diakses pada Jumat 4 November 2016
- Vanasco, Rocco R. 1998. "Fraud Auditing". *Managerial Auditing Journal* 13/1. 4-71
- Velayutham, Sivakumar. 2003." The Accounting Profession's code of ethics, is it code of ethics or code of quality assurance". *Critical Perspective on Accounting* 14. 483-503

- Vinten, Gerald., Lee, Connie. 1993. "Audit Committees and Corporate Control". *Managerial Auditing Journal* vol 8 No.3. 11-24
- www. Akuntansiterapan.com/2010/12/22/ mengupas-seluk-beluk-*fraud*-dan-cara-mengatasinya/ diakses pada Jumat 4 November 2016
- www. Akuntansiterapan.com/2010/12/22/ mengupas-seluk-beluk-*fraud*-dan-cara-mengatasinya/ diakses pada Sabtu 26 November 2016
- www. kompas.com /audit-kecurangan/ diakses pada Sabtu 26 November 2016
- Zhao, Ning et al. 2004. "Auditing In The *E-commerce* Era". *Information Management & Computer Security* Vol 12 No.5. 389-400

Audit Sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance

by Agung Nur Probohudono

Submission date: 26-Jul-2022 06:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1875416802

File name: 1654248123244_AUDIT_DONO_NEW.pdf (8.78M)

Word count: 61672

Character count: 409805

AUDIT

SEBAGAI JASA ASSURANCE DAN NON ASSURANCE



Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFrA



69

YUMA PUSTAKA

Jl. Samudra Pasai No. 47 Kleco, Kadipiro,
Surakarta 57136
E-mail : yuma.pustaka04@gmail.com
Tlp. 0271 - 586 3084/085 647 031 229

ISBN 978-623-6000-44-1



AUDIT

**SEBAGAI JASA ASSURANCE
DAN NON ASSURANCE**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113**Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014****Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987****Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982****Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002****Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Agung Nur Probohudono

AUDIT

SEBAGAI JASA ASSURANCE DAN NON ASSURANCE



Audit sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance

Copyright © Agung Nur Probohudono

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Publish Pertama, April 2022

Penulis : Agung Nur Probohudono
Rancang Sampul : Muhammad Kavit
Tata Letak : Okta
Pracetak : Wahyu Saputra
Moko Dwi Saputra

Penerbit:

YUMA PUSTAKA

Jl. Samudra Pasai No. 47, Kleco, Kadipiro Surakarta 57136

Telp. 0271-5863084/2088181. Fax. 0271-654 394,

Hunting 081 391 423 540

E-mail: kavid.yuma@gmail.com

Facebook: @Yuma Pustaka

viii + 144 hal,

14 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-6000-44-1

Percetakan dan Pemasaran:

Yuma Pressindo

E-mail: kavid.yuma@gmail.com

Telp. 0271-9226606/085869771270

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah supaya para mahasiswa dapat mengetahui ilmu audit dengan mudah.

32

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya modul ini.

Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Surakarta, 23 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I AUDIT DAN JASA <i>ASSURANCE</i> LAINNYA.....	1
Jenis-Jenis Audit	2
Standar Audit.....	3
Jenis-Jenis Auditor.....	6
<i>Jasa Assurance</i> Lainnya.....	8
<i>Jasa Non-Assurance</i> Lainnya	11
Review Artikel Terkait.....	13
BAB II THE CPA PROFESSION (PROFESI AKUNTAN PUBLIK).....	29
Dampak & Konsekuensi Perkembangan Akuntansi	29
Kode Etik Profesi Akuntan Publik	31
Kantor Akuntan Publik (<i>CPA'S Firm</i>)	32
Sabarnes - Oxley Act & Profesi Akuntan Publik	39
Review Artikel Terkait.....	41
BAB III LAPORAN AUDIT	59
Definisi Laporan Audit	59
Manfaat Laporan Audit	60

	Syarat Laporan Audit.....	60
	Bentuk dan Bagian Laporan Audit.....	61
	Kategori Laporan Audit.....	63
	Materialitas.....	66
	Dampak <i>E-Commerce</i> Terhadap Pelaporan Audit	69
	Review Artikel Terkait.....	71
BAB IV	ETIKA PROFESIONAL	87
	Definisi Etika	87
	Tujuan Penerapan Etika.....	88
	Jenis Etika	89
	Macam-Macam Etika.....	89
	Sistem Penilaian Etika	90
	Dilema Etika.....	91
	Etika Profesi	92
	Prinsip Dasar Etika Profesi.....	93
	Kode Etik Profesi	93
	Peraturan Perilaku.....	96
	Review Artikel Terkait.....	101
BAB V	TANGGUNG JAWAB AUDIT & TUJUAN..	113
	Tujuan Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan.....	113
	Review Artikel Terkait.....	125
BAB VI	BUKTI AUDIT	145
	Pengertian Bukti Audit	145

	103	Tipe Bukti Audit.....	146
		Kecukupan Bukti Audit.....	148
		Kompetensi Bukti Audit.....	149
		Pendekatan Pengumpulan Audit	152
		Dokumentasi Bukti Audit (Kertas Kerja Audit).....	152
		Keputusan Yang Harus Diambil Auditor Terkait Bukti Audit	154
		Prosedur Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor.....	154
	263	Situasi Audit Yang Mengandung Resiko Besar	156
		Review Artikel Terkait.....	157
BAB VII		PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALISIS	163
		Kertas Kerja Audit dan Program Audit.....	175
		Review Artikel Terkait.....	179
BAB VIII		MATERIALITY AND RISK.....	191
		Materialitas.....	191
		Resiko Audit.....	198
		Review Artikel Terkait.....	208
BAB IX	237	AUDIT ATAS PENGENDALIAN INTER- NAL DAN RESIKO PENGENDALIAN	223
		Pengendalian Internal	223
		Resiko Pengendalian	227
		Review Artikel Terkait.....	240

BAB X	AUDIT RISK ALERT	255
	Penyimpanan dan Lembaga Pinjaman	260
	Respon Auditor Untuk Penipuan Risiko.....	267
	Prosedur Audit Menanggapi Risiko Penipuan.....	268
	Definisi <i>Fraud</i>	268
	Gejala Adanya <i>Fraud</i>	269
	Langkah Mengantisipasi Terjadinya <i>Fraud</i> ..	270
	Kebijakan Umum Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	271
	Review Artikel Terkait.....	273
BAB XI	FRAUD AUDITING	279
	Definisi Fraud	279
	Jenis - Jenis Kecurangan.....	279
	Menilai Resiko Kecurangan.....	284
	Review Artikel Terkait.....	292
BAB XII	TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROSES AUDIT	306
	Menilai Resiko Teknologi Informasi	307
	Pengendalian Internal Khusus Bagi Teknologi Informasi	310
	Dampak Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit	313
	Permasalahan Pada Lingkungan Teknologi Informasi Yang Berbeda	318
	Review Artikel Terkait.....	321

BAB XIII	RENCANA AUDIT DAN PROGRAM	
	AUDIT SECARA KESELURUHAN	332
	Jenis Pengujian.....	332
	Memilih Jenis Pengujian Yang Akan	
	Dilaksanakan.....	345
	Review Artikel Terkait.....	347
DAFTAR PUSTAKA		356

BAB I

AUDIT DAN JASA ASSURANCE LAINNYA

18
Auditing merupakan salah satu jenis jasa *assurance*. Jasa *assurance* adalah jasa professional yang dilakukan guna meningkatkan kualitas informasi yang sangat dibutuhkan bagi dasar pengambilan keputusan. Auditing merupakan suatu proses sistematis, prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kejadian ekonomi agar mendapatkan kesesuaian dengan criteria yang telah ditetapkan. Hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti para pemegang saham, manjaemen, investor, pemerintah maupun masyarakat luas.

Audit diperlukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang memenuhi 7 karakteristik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. ketujuh karakteristik itu adalah:

- 206
1. *Relevant*. Suatu laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi

keputusan yang akan diambil, dengan mengevaluasi setiap kejadian ekonomi yang ada.

2. *Reliable*. Suatu laporan keuangan harus memiliki sifat andal (reliable). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus terbebas dari kesalahan material sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
3. *Complete*. Informasi dalam suatu laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan informatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan intepretasi.
4. *Timely*. Informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip periodesitas, dimana penilaian pelaporan keuangan perusahaan dibatasi waktu tertentu.
5. *Understandable*. Informasi dalam laporan keuangan haruslah mudah dipahami oleh pemakai. Pemakai laporan keuangan tidak hanya orang-orang yang paham akan akuntansi, namun masyarakat secara luas (apabila perusahaan tersebut *go public*).
6. *Verifiable*. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi kebenarannya. Sehingga dalam penyusunannya harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada informasi material yang disembunyikan.
7. *Accessible*. Informasi laporan keuangan haruslah mudah diakses oleh pemakai, kapanpun dan dimanapun informasi tersebut diperlukan.

Jenis-Jenis Audit

1. **Audit laporan keuangan**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
 - Sifat asersi: data-data yang ada pada laporan keuangan

28

- Kriteria yang ditetapkan: prinsip akuntansi yang berlaku umum
 - Sifat laporan auditor: menyatakan kewajaran atas laporan keuangan
2. **Audit kepatuhan**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
- Sifat asersi: data yang digunakann berkaitan dengan bagaimana kepatuhan suatu entitas terhadap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kriteria yang ditetapkan: kebijakan manajemen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum yang berlaku.
 - Sifat lapoan auditor: kesimpulan atas temuan tentang derajat kepatuhan suatu entitas atau organisasi.
3. **Audit operasional**, adapun ciri-ciri dari audit ini adalah sebagai berikut:
- Sifat asersi: data operasional suatu entitas
 - Kriteria: tujuan entitas yang terdapat dalam fungsi perencanaan manajemen
 - Sifat laporan auditor: rekomendasi untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis

Standar Audit

1. **Standar umum**, terdiri dari:
 - a. **Keahlian dan Pelatihan Teknis yang Memadai.** Seorang auditor dituntut memiliki keahlian yang tinggi sehingga diharuskan mengikuti pelatihan-pelatihan auditor untuk meningkatkan kemampuan mereka melakukan jasa audit.

- b. Independensi.** Independensi seorang auditor bersifat mutlak. Seorang auditor tidak boleh memberikan opini berdasarkan hubungan atau relasi dengan pihak tertentu. Seorang auditor dituntut untuk memberikan kesimpulan dan opini sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan, karena opini auditor memberikan dampak yang besar bagi bisnis suatu perusahaan.
 - c. Penggunaan Kemahiran Professional dengan Cermat dan Seksama.** Seorang auditor dituntut untuk profesional di setiap penugasan audit. Seorang auditor harus cermat dalam mengumpulkan bukti dan dokumen. Seorang auditor juga harus bisa memitigasi risiko dan permasalahan yang terjadi di perusahaan.
- 2. Standar Pemeriksaan Lapangan, terdiri dari:**
- a. Perencanaan dan Supervisi Audit.** Sebelum memulai penugasan, tim auditor terlebih dahulu melakukan perencanaan agar nanti audit dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Seorang tim audit, dipimpin oleh senior auditor yang nantinya memberikan supervisi terhadap pekerjaan keseluruhan tim audit. Supervisi ini juga untuk menilai apakah tim audit sudah melaksanakan *job desk* masing-masing sesuai dengan SOP yang ada.
 - b. Pemahaman yang Memadai atas Pengendalian Internal.** Seorang auditor harus mengerti dan memahami pengendalian internal perusahaan. Sehingga auditor suatu saat dapat menemukan celah dan kelemahan dari pengendalian internal yang nantinya dapat memicu timbulnya *fraud*.

- c. **Kecukupan atas Bukti Audit yang Kompeten.** Dalam proses pengumpulan bukti, seorang auditor harus bisa mencari dan mendapatkan bukti atau dokumen yang kompeten, artinya bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan opini.
3. **Standar Pelaporan**, terdiri dari:
- a. **Pernyataan Tentang Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi.** Auditor harus mampu menilai apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. **Pernyataan Mengenai Ketidakkonsistenan Penerapan Standar Akuntansi.** Auditor harus bisa menemukan latar belakang perusahaan tidak menerapkan standar akuntansi secara konsisten.
 - c. **Pengungkapan Informatif dalam Laporan Keuangan.** Auditor harus mengungkapkan hasil temuan, rekomendasi dan juga opini secara informatif, mudah dipahami oleh semua pemakai, bahkan jika pemakai bukan berasal dari orang yang memahami akuntansi.
 - d. **Pernyataan Pendapat atas Laporan Keuangan secara Keseluruhan.** Setelah melakukan audit, seorang auditor wajib memberikan pendapat sesuai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Jenis-Jenis Auditor

1. Auditor Independen / Akuntan Publik

Tugas utama dari auditor ini ialah melakukan jasa audit atas laporan keuangan atas perusahaan baik perusahaan yang *go public*, perusahaan besar (yang belum *go public*), perusahaan kecil, dan perusahaan yang tidak berorientasi pada laba.

2. Auditor Internal

Auditor internal biasanya merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut. Auditor ini tetap harus bersifat independen dalam melakukan proses audit. Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif. Ruang lingkup auditor internal adalah untuk melakukan audit operasional dan kepatuhan, juga dapat melengkapi audit laporan keuangan.

3. Auditor Pemerintah

Jenis auditor pemerintah yang pertama adalah **Auditor Eksternal Pemerintah**. Audit ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya*". Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BPK harus tetap bersikap independen kepada pemerintah.

Selain auditor eksternal pemerintah, terdapat pula **Auditor Internal Pemerintah**. Auditor ini dikenal sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat jendral dan Badan Pengawasan Daerah. Adapun objek pemeriksaan auditor internal pemerintah, yaitu: (a) Laporan keuangan dan laporan asset; (b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ); (c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), termasuk tiket, hotel, dan lumpsum (sesuai standar biaya umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah); (d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); (e) Standar operasi anl prosedur unit badan; dan (f) Rencana kinerja tahunan (RKT) masing-masing SKPD.

4. Auditor Pajak

Aparat pelaksana Direktorat Jendral Pajak (DJP) di lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (Karipka). Karipka memiliki auditor khusus. Tanggung jawabnya adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan. Sebenarnya audit ini termasuk ke dalam jenis audit kepatuhan.

Audit kepatuhan pajak berbeda dengan audit kepatuhan pada umumnya. Karena perpajakan memiliki peraturan perundangan yang sangat kompleks dan terkadang sangat sulit dipahami, sehingga seringkali ditafsirkan dalam berbagai cara. Sehingga diperlukan auditor khusus untuk menangani laporan pajak dari seorang wajib pajak, apakah telah dihitung dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jasa Assurance Lainnya

1. Pengendalian Atas Risiko yang Berhubungan dengan Investasi

Jasa ini mencakup kebijakan yang terkait dengan kontrak kerja sama untuk melakukan perdagangan dengan konsekuensi risiko keuangan tertentu. Contohnya adalah perdagangan di pasar uang dan pasar modal. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi proses dalam praktek investasi suatu untuk entitas dan menentukan efektivitas proses tersebut.

2. *Mystery shopping*

Dengan melakukan pembelian secara diam-diam untuk menilai upaya tenaga penjualan yang berhadapan dengan pelanggan dan menilai ketaatan tenaga penjualan tersebut dengan prosedur yang ada. Para *Mystery shopper* biasanya berasal dari orang dalam perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sumber daya manusia perusahaan salah satunya adalah tenaga penjualan. Para *Mystery shopper* akan bertindak layaknya konsumen biasa, kemudian akan membeli produk. Dari sinilah akan terlihat bagaimana tenaga penjualan tersebut menawarkan dan melayani konsumen sesuai dengan prosedur perusahaan, dan Para *Mystery shopper* akan menilai seberapa jauh prosedur perusahaan diterapkan di lapangan. Kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dipilih untuk mengatasi kendala tersebut.

Jika penerapan prosedur sudah sesuai dengan harapan perusahaan, namun hasil yang dicapai perusahaan masih dirasa kurang, maka dari hasil pengamatan *Mystery shopper* ini, manajemen akan melakukan tindakan perbaikan dan mengambil langkah antisipasi jika dikemudian hari menemui kendala dan hambatan saat berada di lapangan.

3. Penilaian Risiko Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penyimpanan Informasi Digital

Akuntan publik harus mampu menilai risiko keamanan dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan pendukung di dalam dan di luar lokasi. Risiko yang paling besar adalah risiko kehilangan, baik pencurian maupun karena bencana alam. Akuntan publik yang baik harus selalu memiliki perencanaan atas mitigasi risiko terhadap penyimpanan dan proses pendistribusian data. Risiko lainnya adalah dalam pendistribusian data terdapat kecurangan atau *fraud*, seperti manipulasi data, penambahan dan pengurangan data.

4. Penilaian Risiko dan Tindakan Illegal

Akuntan publik harus membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan illegal. Auditor harus membuat mitigasi terhadap risiko *fraud* dan membuat langkah pengendaliannya. Risiko *fraud* akan selalu melekat di setiap kegiatan manajerial perusahaan. Oleh karenanya, auditor harus meyakini bahwa dokumen yang menjadi bukti audit harus bebas dari tindakan manipulasi data.

5. Kepatuhan pada Kebijakan dan Prosedur Perdagangan

Akuntan publik harus memeriksa terkait kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur perdagangan, termasuk kontrak perusahaan dengan supplier. Auditor harus menelaah isi perjanjian antara perusahaan dan supplier, apakah didalamnya tidak ada celah untuk risiko terjadinya *fraud*.

6. Kepatuhan pada Perjanjian Royalti Hiburan

94 Memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan royalty sesuai dengan perjanjian atau sesuai peraturan yang berlaku.

7. Sertifikasi ISO 9000

Sertifikat ISO 9000 merupakan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu entitas organisasi telah memenuhi standar pengendalian mutu yang tinggi. Sebelum melakukan sertifikasi ISO 9000, maka perusahaan terlebih dahulu harus melalui serangkaian pengujian sesuai standar yang berlaku.

8. Audit Lingkungan

Memastikan perusahaan menaati peraturan terkait kesehatan lingkungan, misalnya perlakuan dan penanganan limbah perusahaan. Perusahaan harus mencantumkan informasi mengenai bagaimana teknik pengolahan limbah yang dilakukan serta alokasi biayanya. Auditor harus memeriksa apakah biaya yang dialokasikan tersebut sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga tidak ada celah untuk penyelewengan biaya tersebut.

9. Jasa Assurance dalam Teknologi Informasi

Jasa ini terbagi kedalam dua jenis, yang pertama ialah *Jasa Web Trust*. Melalui jasa ini maka para pengguna jasa ini telah memenuhi kriteria bisnis yang bersangkutan dan proses informasi yang disampaikan sudah memenuhi asas kejujuran atau integritas. Selanjutnya, ialah *Jasa SysTrust*, jasa ini menyediakan layanan evaluasi dan uji reliabilitas dalam bidang pengamanan data, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat *real time*.

Jasa *Non-Assurance* Lainnya

1. Konsultasi Manajemen Tertentu

Pada jaman seperti sekarang ini, dimana persaingan bisnis dan pasar yang semakin ketat, maka manajemen membutuhkan pendampingan seorang profesional untuk memutuskan langkah pengambilan kebijakan. Akuntan publik bisa memberikan konsultasi manajemen kepada klien, dengan catatan dia tidak boleh menjadi auditor di perusahaan klien tersebut. Akuntan publik yang melakukan jasa konsultasi manajemen dapat membantu manajemen dengan memberikan rekomendasi kepada manajemen sebelum menetapkan kebijakan perusahaan. Akuntan publik juga dapat membantu manajemen melakukan pengukuran kinerja perusahaan, menilai seberapa efektif, efisien dan ekonomisnya perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada. Kebijakan manajemen ini bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Namun, sekali lagi tidak diperbolehkan bagi seorang akuntan public yang telah melakukan jasa konsultasi manajemen lalu mengaudit perusahaan yang sama. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut.

2. Jasa Pajak

Kantor konsultan pajak sudah banyak ditemui dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka dengan perhitungan yang tepat sudah semakin baik. Dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak, pekerjaan akan lebih efisien karena tingkat kesalahan perhitungan dan pelaporan sangat kecil sehingga risiko lebih bayar bisa nol. Perusahaan juga dapat melakukan perencanaan perpajakan. Apabila ada pemeriksaan pajak, perusahaan akan dapat terbantu karena didampingi oleh

seorang konsultan yang memahami prosedur pemeriksaan dan melakukan langkah antisipasi dari kesalahan perhitungan.

Seorang konsultan pajak tetap harus memiliki independensi, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan profesinya. Seorang konsultan pajak juga dituntut untuk mengikuti perkembangan peraturan yang jumlahnya sangat banyak dan sering berganti. Pengetahuan seorang konsultan pajak dituntut untuk selalu *up to date* sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang dan selalu memberikan bimbingan kepada wajib pajak dikarenakan isi aturan pajak yang sering kali multitafsir dan multipretasi sehingga menimbulkan kebingungan dan kurang pemahannya wajib pajak.

3. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

44 Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan. Pembukuan merupakan bagian dasar yang tidak terpisahkan dari akuntansi. Pembukuan berfungsi untuk menjaga dokumentasi setiap transaksi keuangan entitas untuk membentuk suatu acuan dasar proses akuntansi. Pembukuan sebenarnya adalah proses dari akuntansi yaitu proses pencatatannya saja, sedangkan akuntansi mencakup juga identifikasi dan komunikasi (dalam bentuk laporan keuangan). Di dalam pembukuan, informasi yang dihasilkan tidak mencerminkan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan, sedangkan dengan akuntansi harus bisa menunjukkan keuangan entitas dengan jelas dan tepat.

Seorang akuntan publik bisa memberikan jasa penyusunan laporan keuangan, namun tentu saja kantor akuntan publiknya tidak boleh memberikan jasa audit. Tentu saja tidak akan ada independensi jika seorang akuntan public melakukan hal tersebut.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : At the Interface of Electronic Frontier and The Law: The International Legal Environment for System Reliability Assurance Service

Penulis : Carl Pacini, William Hillison, Dominic Peltier-Rivest, Dave Sinason, Ratnam Alagiah

Adanya beberapa kasus dan masalah yang berkenaan dengan sistem informasi yang tidak terpercaya, membuat beberapa organisasi akuntan publik yaitu the *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan *Canadian Institute of Chartered Accountant (CICA)* mengeluarkan *SysTrust* untuk laporan jasa atestasi dan *assurance* yang terpercaya.

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi lingkungan perundang-undangan di lima negara, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris. Penelitian ini juga mengidentifikasi lingkungan yang memiliki risiko yang tinggi untuk bisa mengimplementasikan *SysTrust*.

Karakteristik lingkungan yang tepat untuk implementasi *SysTrust* adalah lingkungan bisnis yang memiliki risiko dari strategi manajemen, evaluasi penilaian dengan klien, klausa surat perjanjian serta bagaimana cara menyelesaikan masalah. *SysTrust* diimplementasikan untuk meminimalkan adanya risiko litigasi. Risiko litigasi adalah risiko yang melekat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang saling berkepentingan.

Latar Belakang

1. Adanya kegagalan sistem yang mengakibatkan menurunnya kualitas informasi yang dihasilkan
2. Beberapa perusahaan besar terkena imbas dari kegagalan sistem tersebut.
3. Seiring dengan berkembangnya sistem teknologi informasi, maka toleransi kesalahan akan semakin menurun.
4. Pengguna menginginkan keakuratan dan konsistensi dalam sistem informasi
5. Sistem yang tidak reliable menyebabkan dampak yang berkesinambungan baik untuk perusahaan itu sendiri, konsumennya, supplier, masyarakat, dan relasi bisnis perusahaan seperti pemerintah.
6. AICPA dan CICA kemudian memprakarsai *SysTrust* untuk mengakomodir isu-isu terkait pelaporan jasa atestasi maupun jasa assurance.
7. Pengguna potensial laporan hasil *SysTrust* termasuk perusahaan itu sendiri, masyarakat, kreditur, konsumen, serta pihak yang memiliki kepentingan yang sama dengan perusahaan.
8. Para akuntan publik meyakini bahwa dengan adanya *SysTrust* akan mampu menangani risiko litigasi dalam lingkungan tersebut.
9. selama lebih dari 25 tahun, para akuntan publik menghadapi berbagai krisis yang berkenaan dengan risiko litigasi. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di lima negara (Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris) yang memiliki beberapa masalah serikut terkait dengan sistem perundangan yang berlaku dengan peraturan praktek akuntansi.

10. Mengevaluasi keberadaan hukum internasional yang diterapkan oleh para akuntan publik.

Keberadaan *SysTrust*

1. Sistem informasi yang ada pada perusahaan antara lain Electronic Data Interchange (EDI), Extranet dan Internet.
 - a. *Electronic Data Interchange* (EDI)
 - Memungkinkan pertukaran data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan computer.
 - Memiliki standardisasi pengkodean untuk transaksi perdagangan
 - Tidak memerlukan *hardcopy*
 - b. Extranet
 - Jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasional secara aman kepada supplier, vendor, relasi bisnis dan pelanggan.
 - c. Internet
 - Koneksi atau jaringan dari seluruh komputer di seluruh dunia yang memungkinkan akses informasi secara terbuka.
 - Memungkinkan untuk berkomunikasi menggunakan email dan menyediakan informasi publik yang dapat diakses melalui web maupun situs berbayar.
2. *SysTrust* mampu mendukung penyelesaian masalah yang timbul di dalam pelaporan bisnis terkait dengan pelaporan informasi bisnis yang menggunakan jaringan komputer. *SysTrust* mampu mengevaluasi asersi manajemen selama periode waktu tertentu.

3. Sebuah sistem dikatakan reliable apabila:
 - a. *Availability* (tersedia), sistem tersedia untuk dioperasikan dan digunakan di waktu yang diinginkan.
 - b. *Security* (aman), sistem telah terlindungi dari akses yang illegal. 236
 - c. *Integrity* (integritas), pemrosesan sistem telah lengkap, akurat, tepat waktu dan didukung dengan persetujuan transaksi dari entitas dan peraturan pendistribusian.
 - d. *Maintainability* (dapat dipelihara), sistem ini dapat diperbarui sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.
4. Kriteria sistem informasi yang dapat digunakan:
 - a. Komunikasi. Entitas menggambarkan dan mengkomunikasikan kinerja sistem secara efektif, sesuai aturan, memenuhi standard untuk ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem.
 - b. Prosedur. Entitas menggunakan prosedur, karyawan, data perangkat lunak dan infrastruktur untuk mencapai sistem yang memenuhi standard untuk ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem. 190
 - c. Monitoring / Pengawasan. Entitas memonitoring sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan ketersediaan, keamanan, integritas dan pemeliharaan sistem.

Gambaran sistem hukum

- Adanya perbedaan hukum di empat negara, yaitu : (a) Pihak ketiga wajib menyediakan jaminan; (b) Pengadilan nasional tertinggi memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk membuat keputusan.

Keberadaan Hukum dan *SysTrust*

1. Belum ada kasus hukum yang dilaporkan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kewajiban professional akuntan kepada pihak ketiga dalam jasa assurance maupun kelalaian dalam sistem informasi.
2. Difokuskan pada lingkungan Amerika Serikat dan Kanada, karena:
 - a. Layanan *SysTrust* dikembangkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan *Canadian Institute of Chartered Accountant (CICA)*.
 - b. Dua pertiga pengguna internet ada di Amerika utara.
 - c. Amerika Serikat dan Kanada adalah mitra dagang terbesar
3. **Amerika Serikat**, tidak ada laporan terkait kasus hukum kelalaian penggunaan *SysTrust*.
 - a. *Privity rule*: memiliki ikatan kontraktual (hanya para pihak yang terikat kontrak yang berhak meminta pemenuhan kewajiban)
 - b. *Near - privity standard*: pendekatan kontraktual dengan pihak ketiga.
 - c. *The restatement standard*: berdasarkan standard ini, auditor mempersiapkan informasi keuangan tidak hanya untuk satu klien, tetapi untuk kelompok lain dimana rekan bisnis klien tersebut membutuhkan informasi tersebut.
 - d. *Reasonable foreseeability rule*: merupakan perluasan ruang lingkup akuntan, dimana seorang akuntan mampu melakukan forecast atau prediksi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.

4. **Kanada**, terdapat kasus yang dilaporkan berkaitan dengan kelalaian dalam penggunaan *SysTrust*. Berdasarkan kasus tersebut, maka penyedia jasa *SysTrust* haruslah memperkirakan apakah pihak ketiga akan bergantung pada laporan *SysTrust*.
5. **Australia**, terdapat kasus kelalaian seorang akuntan dalam menyediakan jasa assurance. Kesalahannya mungkin terletak pada pengoperasian EDI atau ekstranet yang tidak semestinya, namun demikian baik EDI maupun ekstranet hanyalah salah satu pendukung berjalanya sistem *SysTrust*.
6. **Selandia Baru**, terdapat kasus yang dilaporkan kepada pengadilan negeri setempat yaitu kasus seorang akuntan dengan pemegang saham. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan tersebut terdapat kesalahan di dalamnya sehingga keputusan yang diambil pemegang saham menjadi salah.
7. **Inggris**, terdapat kasus kelalaian seorang akuntan di dalam penyusunan laporan audit. Laporan yang dihasilkan tersebut ternyata tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dikarenakan informasi di dalamnya mengandung kesalahan penyajian maupun penyusunan.
8. *SysTrust* dapat berjalan jika didukung dengan adanya penggunaan jaringan komputer yang sudah semakin meluas. Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan risiko litigasi yaitu: Mengidentifikasi risiko; Mengevaluasi risiko; dan Mengukur kadar risiko
9. Langkah-langkah penyusunan perikatan *SysTrust*:
 - a. Mengevaluasi integritas manajemen

- b. Mengidentifikasi kejadian khusus dan risiko yang tidak biasa
- c. Menilai kompetensi perusahaan dalam pengaplikasian *SysTrust*
- d. Mengevaluasi independensi
- e. Mengevaluasi kemampuan akuntan
- f. Mempersiapkan surat perikatan

10. Isi perikatan *SysTrust*:

- a. Tujuan perikatan *SysTrust* adalah agar bisa memberikan pendapat sesuai dengan informasi yang telah terdapat di dalam sistem.
- b. Pertanggung jawaban manajemen untuk membangun dan mempertahankan kepatuhan terhadap standard *SysTrust* yaitu ketersediaan, pemeliharaan, integritas dan keamanan.
- c. Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan segala informasi yang dibutuhkan.
- d. Di akhir perikatan, manajemen akan menyediakan provider *SysTrust* dengan surat yang menegaskan ada pernyataan tertentu yang dibuat oleh manajemen.
- e. Adanya klausul yang membahas apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama masih ada di dalam perikatan *SysTrust*.

Kesimpulan

- 1. Para akuntan publik di negara-negara maju sudah mengembangkan sebuah inovasi yaitu *SysTrust*.
- 2. *SysTrust* dibuat untuk menciptakan kenyamanan manajemen, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis dengan sistem yang mendukung bisnis tersebut.

3. Para akuntan harus lebih memahami risiko litigasi sehingga kedepannya para akuntan tidak lagi terlibat kasus hukum karena kelalaian dalam penerapan peraturan dan kurang memahami bisnis klien.

2. Artikel Kedua

Judul : It's all about audit quality: perspective on strategic-system auditing

Penulis : Mark E. Peecher, Rachel Schwartz, Ira Solomon

Latar Belakang

1. SSA ini berhubungan dengan kualitas audit. Dengan menerapkan SSA maka diharapkan laporan audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi.
2. Perubahan lingkungan bisnis disebabkan oleh:
 - a. Adanya inovasi
 - b. Adanya arus informasi yang begitu cepat
 - c. Tuntutan terhadap transportasi yang semakin baik karena jumlah usia produktif yang semakin banyak.
 - d. Adanya komunikasi yang semakin mengglobal
 - e. Adanya kemajuan teknologi
 - f. Era globalisasi
3. Laporan keuangan tetap mengandung risiko, oleh karenanya diterapkan SSA. Perubahan dalam lingkungan audit ini mempengaruhi konsepsi audit. Dalam beberapa kasus, di dalam laporan keuangan masih terdapat informasi yang tidak diungkapkan, hal ini merupakan kecurangan pihak manajemen. Opini auditor menjadi sangat penting untuk menilai

kewajaran laporan keuangan. SSA dapat mengakomodir keperluan di dalam lingkungan audit.

4. Kompleksitas lingkungan audit ini disebabkan oleh:
 - a. Entitas yang sedang di audit menerapkan bisnis baru.
 - b. Kekhawatiran tentang adanya salah saji dalam penyusunan laporan keuangan
 - c. Kurangnya pengendalian terhadap risiko audit
 - d. Audit Risk Model (ARM) tetap dianggap sebagai faktor utama dalam perencanaan audit dan mengontrol kualitas audit
5. Masing-masing konteks bisnis memiliki risiko bisnis tersendiri. Risiko yang paling besar dan sering terjadi adalah adanya peran manajemen untuk “mempermainkan” laporan keuangan, misalnya dengan melakukan manajemen laba. Walaupun di dalam laporan keuangan terdapat beberapa hal yang kompleks, namun auditor harus tetap memberikan pendapat atau opini dengan menguji kebenaran atas laporan keuangan.
6. Untuk menghadapi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan laporan keuangan, maka pemerintah mulai membuat regulasi untuk audit. Salah satunya adalah auditor harus mempunyai keyakinan yang tinggi tentang adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu menilai risiko salah saji material yang disebabkan karena adanya *fraud*.
7. Kondisi yang menyebabkan kegagalan penilaian auditor:
 - a. Kegagalan auditor dalam memahami bisnis klien

- b. Kegagalan untuk menegaskan kembali representasi manajemen
 - c. Kurangnya sifat skeptic auditor.
8. Risiko audit terdiri dari:

$$TAR \text{ (Total Audit Risk)} = IR \times CR \times DR$$

Inherent Risk : risiko yang melekat dalam setiap proses audit

Control Risk : risiko yang tidak dapat di deteksi karena lemahnya pengendalian

Detection Risk : risiko yang tidak dapat dihindari karena lemahnya program audit

9. Gambaran umum SSA

SSA (*strategic-system auditing*) digunakan untuk menghasilkan kualitas laporan audit yang baik. Dengan menerapkan SSA maka audit diharapkan mampu memperoleh pemahaman mendalam tentang bisnis, lingkungan dan risiko bisnis yang melibatkan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar auditor memahami tujuan organisasi, strategi dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Auditor pun dapat menilai kelengkapan analisa yang dilakukan oleh manajemen.

10. Alur SSA:

- a. Auditor harus memahami *Entity Bussiness State (EBS)* atau lingkungan bisnis perusahaan.
- b. Proses dan penerapan program audit dimulai pada fase *Management Information Intermediaries (MII)*, yang isinya adalah proses pengendalian terhadap laporan keuangan dan menerapkan kerangka penyusunan laporan keuangan.

- c. Tahap selanjutnya adalah *Management Bussiness Representation (MBS)* yakni menghasilkan laporan keuangan.

11. Penilaian risiko

- a. Auditor harus memiliki sudut pandang dari berbagai sisi dan objektif dalam menilai risiko audit dan mencari sumber risiko audit tersebut.
- b. Auditor harus menetapkan penilaian terhadap risiko tersebut
- c. Risiko bisnis juga bisa bersifat dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi sehingga risiko audit baru selalu muncul.

12. Dengan SSA maka auditor dapat mengembangkan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai sumber.

13. Ilustrasi SSA:

- a. Memperluas dan mempertimbangkan ruang lingkup *Entity Bussiness State (EBS)*
- b. Menetapkan pengendalian
- c. Menetapkan risiko
- d. Menentukan prosedur audit masing-masing akun
- e. Auditor melakukan wawancara untuk menguatkan dugaan-dugaan sementara.
- f. Mengembangkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga, melakukan riset pasar.
- g. Bukti yang dikumpulkan dari pemahaman EBS membantu meminimalkan atau mendeteksi terjadinya *fraud*.
- h. Auditor juga harus mengamati kinerja non keuangan seperti kinerja karyawan dan kepatuhan terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)*.

14. Dengan SSA maka kredibilitas auditor lebih baik karena auditor memiliki tingkat keyakinan dan pengendalian risiko yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil empiris

1. Bukti yang diperoleh berdasarkan EBS mampu meminimalkan timbulnya *fraud*.
2. Akan terjadi kesetaraan jika auditor dapat menghasilkan kualitas laporan yang baik. Jika adanya pemahaman EBS, maka akan terjadi triangulasi dan penilaian risiko dalam SSA.
3. Namun, terdapat beberapa kontroversi, yaitu:
 - a. SSA dikembangkan untuk meningkatkan reputasi auditor
 - b. Namun beberapa kontroversi terjadi, motivasi auditor seharusnya tidak semata-mata mengejar reputasi, namun tetap meningkatkan kemampuan profesional dengan menghasilkan laporan audit yang berkualitas
 - c. Jika pengujian substansi SSA terlalu sedikit, maka hal itu tidak dipermasalahkan selama sudah mengandung kecukupan dan kompetensi bukti audit yang dibutuhkan.
 - d. Pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh manajemen lebih mudah, namun *fraud* yang terkandung di laporan keuangan (kesalahan yang sengaja) susah dideteksi.
 - e. Biaya untuk SSA mempengaruhi fee audit. Namun jika entitas menginginkan kualitas laporan yang baik, maka hal itu tidak lagi menjadi persoalan.

Kesimpulan:

1. Tuntutan akan kualitas laporan audit meningkat dikarenakan kesadaran masyarakat akan dampak laporan keuangan pada

keberlangsungan bisnis dan kehidupan perekonomian secara luas.

2. SSA masih memerlukan pengembangan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.
3. Bukti audit yang berdasarkan EBS lebih baik sehingga dapat meminimalkan risiko salah saji material.
4. Kinerja auditor menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga kesalahan auditor dalam memberikan opini dapat diminimalkan.

3. Artikel Ketiga

Judul : **Balance Between Auditing and Marketing: An Explorative Study**

Penulis : **Pernilla Broberg, Timurs Umans, Carl Gerlofstig**

Latar Belakang

1. Perubahan lingkungan bisnis membuat munculnya penelitian tentang audit sebagai layanan profesional dengan pemasaran. Hubungan keduanya adalah adanya peningkatan persaingan para akuntan publik yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kantor akuntan publik, sehingga para akuntan publik akhirnya menyadari akan perlunya pemasaran yang baik.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap auditor terhadap pemasaran dan untuk meneliti lingkup pemasaran mereka sebenarnya. Serta meneliti keseimbangan antara tanggung jawab audit dan kegiatan pemasaran. Sehingga implikasi yang diperoleh adalah kita akan memperoleh

pengetahuan praktis tentang bagaimana mengikuti perubahan lingkungan melalui kegiatan pemasaran.

3. Kegiatan pemasaran untuk mempertahankan klien yang sudah ada dan untuk mendapatkan klien baru. Auditor di masa sekarang tidak hanya mempromosikan diri mereka sendiri dan kantor akuntan publiknya, tetapi juga mempromosikan mengapa calon klien membutuhkan audit.

Review Literatur

1. Auditor berperan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi
2. Sejumlah penelitian telah menyelidiki bagaimana hubungan pelanggan, akuisisi pelanggan dan memelihara hubungan dengan pelanggan merupakan bagian dari fungsi audit.
3. Auditor harus bisa mengembangkan tanggung jawab audit yang melekat dan melakukan tugas pemasaran.
4. Hubungan baik dalam professional dengan klien sangat penting untuk menanggapi keunggulan kompetitif.

Metodelogi Penelitian

1. Diskusi tentang proses seleksi sampel dan deskriptif statistik.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anggota auditor yang berwenang dengan total email 3.556.
4. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan kuesioner.
5. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan eksploratif (wawancara) dan kuantitatif (hasil analisa statistik)

Variabel Penelitian

1. Variable independent dalam penelitian ini ialah sikap auditor terhadap pemasaran.
2. Variable dependen dalam penelitian ini ialah Kegiatan audit dan Kegiatan pemasaran
3. Variable lainnya ialah Sikap responden terhadap audit dan Pentingnya kegiatan audit terhadap keberlangsungan entitas bisnis.

Hasil Empiris

1. Hasil uji regresi pada dua variable menunjukkan adanya hubungan antara sikap auditor terhadap pemasaran yang berpengaruh terhadap keseimbangan antara kegiatan audit dengan kegiatan pemasaran.
2. Peneliti mengeksplorasi bagaimana persepsi auditor tentang keseimbangan antara kegiatan audit dengan pemasaran.
3. Pengujian terhadap semua variable yaitu latar belakang, usia dan jenis kelamin terhadap variable dependen dan independen ternyata menunjukkan adanya korelasi.
4. Auditor ternyata lebih banyak berkomunikasi dengan klien melalui email, dan ini juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk pemasaran.
5. Pemasaran kegiatan audit bisa dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan seminar
 - b. mendatangi klien yang prospektif
 - c. mendatangi seminar
 - d. mempelajari teknik marketing
 - e. mengadakan kegiatan bersama KAP
 - f. menjelaskan pentingnya audit
 - g. menunjukkan pentingnya pengendalian internal terhadap bisnis klien

- h. mensosialisasikan peraturan terbaru
- i. informasi mengenai audit akuntansi
- j. pendidikan di dalam audit

Pembahasan

1. Penelitian ini bertujuan untuak menjawab pertanyaan “bagaimana auditor menyeimbangkan kegitan audit dengan kegiatan pemasaran? Untuk menjawabnya maka, penelitian ini menguji adakah korelasi antara keduanya.
 - a. *Attitude*. Dalam penelitian ini menemukan indikasi bahwa pada masa sekarang auditor harus memikirkan mengenai kegiatan pemasaran yang baik untuk kantor akuntan publiknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mempelajari kegiatan pemasaran memiliki nilai yang tinggi berarti auditor akan terus mengembangkan kemampuan pemasaran untuk unggul dalam persaingan bisnisnya.
 - b. *Importance*. Kegiatan pemasaran memiliki skor yang tinggi untuk masing-masing aktivitas. Hal ini berarti auditor mulai menyeimbangkan antara kegiatan audit mereka dan melakukan kegiatan pemasaran. Persaingan yang semakin ketat, memaksa para auditor untuk memiliki inovasi yang baik dan menciptakan metode pemasaran yang efektif.

Kesimpulan

1. Adanya hubungan antara kegiatan audit dengan pemasaran mengingat ketatnya persaingan antar Kantor Akuntan Publik.
2. Penelitian di masa mendatang harus bisa memunculkan isu mengenai perkembangan kegiatan pemasaran kantor akuntan publik dengan profesi auditor itu sendiri.

BAB II

THE CPA PROFESSION

(PROFESI AKUNTAN PUBLIK)

Profesi akuntan publik menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan saat ini. Kebutuhan akan akuntan publik meningkat dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Terlebih lagi bagi para kreditur ataupun investor. Pendapat yang dikeluarkan oleh akuntan publik menjadi sangat krusial dan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa. Ada beberapa jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, yaitu jasa atestasi, jasa assurance dan jasa non assurance. Dalam memberikan jasa atestasi, seorang auditor hanya diperbolehkan untuk melakukan audit selama tiga tahun berturut-turut untuk satu klien.

Dampak & Konsekuensi Perkembangan Akuntansi

1. Meluasnya peran akuntan sehingga tidak hanya meliputi penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.
2. Kebutuhan akan tenaga professional dan besarnya tanggung jawab para CPA untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalamnya yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kebutuhan akan standar teknis sesuai dengan berkembangnya sistem informasi dan kompleksitas kebutuhan akan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria.

Untuk menjadi seorang akuntan publik, seorang akuntan harus memperoleh izin dari menteri keuangan melalui serangkaian ujian dan sertifikasi. Seorang akuntan publik haruslah menjadi anggota dari IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan memiliki gelar CPA (*Certified Public Accountant*).

Seorang Akuntan Publik Tidak Boleh Terlepas dari Lima Hal Berikut ini:

1. Pendidikan berkelanjutan serta melakukan pembelajaran dan pelatihan selama ia menyanggah gelar CPA.

Seorang akuntan publik, harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Regulasi yang selalu berubah, permintaan pasar akan keandalan laporan keuangan menuntut seorang CPA untuk selalu dinamis dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.

2. Kompetensi

Seorang CPA harus memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Mengingat hasil kerja profesionalnya mampu membawa pengaruh dan dampak terhadap keberlangsungan bisnis atau entitas yang menjadi kliennya. Kompetensi ini harus selalu ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan dan permintaan pasar serta kebutuhan bisnis klien, misalnya untuk memperoleh kreditur bagi perusahaan klien.

3. Integritas

Integritas adalah hal utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang CPA. Integritas juga salah satu hal pokok di dalam kode etik akuntan publik. Seorang CPA haruslah memegang teguh integritas di seluruh pekerjaan profesionalnya.

4. Selaras dengan Isu-Isu Bisnis yang Luas

Seorang akuntan publik haruslah selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, salah satunya dengan cara mengikuti perkembangan isu dan perkembangan ekonomi serta regulasi yang berlaku. Seorang CPA tidak boleh menutup diri dengan segala perkembangan dan kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis klien.

5. Objektivitas

Selain integritas, seorang CPA harus selalu mengedepankan objektivitas. Objektivitas ini diperlukan disaat CPA mengevaluasi bukti audit maupun temuannya serta dalam memberikan opininya.

42 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Merupakan prinsip dasar serta aturan profesi yang berhubungan dan mengikat mengenai etika yang harus dijalani oleh setiap individu di dalam kantor akuntan publik. Prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan publik:

1. **Prinsip Integritas.** Setiap akuntan publik harus mengedepankan kejujuran dan memiliki ketegasan dalam menjalankan hubungan professional. Integritas bisa dijadikan tolak ukur dan menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar kepercayaan publik.

2. **Prinsip Objektivitas.** Setiap akuntan publik tidak diperbolehkan bersifat subjektif serta memiliki benturan kepentingan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. **Prinsip Kompetensi.** Seorang akuntan publik dituntut memiliki sikap cermat dan kehati-hatian. Seorang akuntan publik juga selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan dirinya sebagai seorang professional, sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan standar an kode etik profesinya.
4. **Prinsip Kerahasiaan.** Setiap akuntan publik wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari kliennya sebagai hasil jasa profesionalnya. Setiap akuntan publik tidak boleh mengungkapkan isi dari informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari kliennya, terkecuali ada kewajiban lain seperti yang diatur oleh ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.
5. **Prinsip Perilaku Profesional.** Setiap akuntan publik wajib mengikuti segala hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang mampu menjatuhkan kredibilitas profesi akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik (CPA's Firm)

Merupakan suatu badan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bentuk badan usaha kantor akuntan public dapat berupa:

1. **Perusahaan Perseorangan (*proprietorship*),** merupakan kantor akuntan publik dengan pemilik tunggal.

2. **Persekutuan Umum (*general partnership*)**, merupakan kantor akuntan publik yang dimiliki oleh beberapa orang.
3. **Korporasi Umum**. Struktur kepemilikan kantor akuntan publik ini berupa kepemilikan saham oleh para investor. Namun, di banyak negara bentuk kantor akuntan publik ini sudah dilarang.
4. **Korporasi Professional**. Kantor akuntan publik ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Sama halnya dengan korporasi umum, korporasi profesional banyak dilarang di negara-negara barat karena bentuk perlindungan hukumnya.
5. **Limited Liability Company**, kantor akuntan publik ini merupakan gabungan dari korporasi umum dan persekutuan umum.
6. **Limited Liability Partnership**, kantor akuntan publik ini dimiliki oleh satu atau lebih *partner*.

Akan tetapi di Negara Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) ini lazimnya hanya berbentuk menjadi 2 macam, yaitu:

1. **Perseorangan**, kantor akuntan publik ini didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik saja.
2. **Persekutuan perdata atau firma**, kantor akuntan publik ini hanya dapat didirikan oleh minimal dua akuntan publik atau 75% dari anggota firma adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu dalam kantor akuntan publik disebut dengan *partner*.

Persyaratan Pendirian Kantor Akuntan Publik (KAP)

Untuk mendirikan sebuah Kantor Akuntan Publik, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikasi akuntan publik.

2. Menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia
3. Memiliki paling sedikit dua auditor tetap yang memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi minimal DIII dan paling sedikit satu orang berijazah sarjana.
4. Memiliki NPWP pribadi untuk bentuk badan perseorangan dan NPWP badan untuk yang berbentuk firma,
5. Memiliki rancangan standar pengendalian mutu yang sesuai dengan SPAP
6. Pemimpin KAP harus berdomisili sama dengan KAP.
7. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor.
8. Membuat surat pernyataan yang berisi identitas dan alamat lengkap kantor akuntan publik beserta alasan pendiriannya.
9. Melengkapi persyaratan pengajuan pendirian kantor akuntan publik.

Namun jika KAP berbentuk badan usaha persekutuan atau firma, selain syarat di atas, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki perjanjian untuk mengadakan kerja sama yang disahkan di hadapan notaries.
2. Memiliki sertifikat dan surat izin akuntan publik bagi pemimpin *partner* dan *partner*.
3. Memiliki tanda keanggotaan Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang masih berlaku bagi pemimpin *partner* dan *partner*.
4. Memiliki surat persetujuan dari seluruh *partner* KAP berkenaan dengan penunjukkan pemimpin *partner*.
5. Memiliki bukti domisili pemimpin *partner* dan *partner*.

Hierarki/Susunan Organisasi dalam Kantor Akuntan Publik

1. **Partner.** Merupakan seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam perikatan audit, pihak yang bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing dan klien. *Partner* lah yang menandatangani *management letter* dan bertanggung jawab untuk segala proses pemberian fee audit dari klien. Seorang *partner* biasanya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
2. **Manager.** Bertindak sebagai pengawas dalam proses audit. *Manager* bertugas untuk membantu audit senior dalam membuat rencana audit serta waktu pelaksanaan audit, melakukan *review* terhadap kertas kerja, *management letter* serta laporan proses audit. *Manager* tidak berada di kantor klien, melainkan tetap berada di KAP dan dalam bentuk pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior. Agar dapat menjadi seorang *manager*, maka seorang auditor membutuhkan pengalaman di bidang audit selama 5 sampai dengan 10 tahun.
3. **Auditor Senior.** Merupakan seorang auditor yang bertugas untuk melaksanakan penugasan audit, bertanggung jawab dalam mengupayakan fee audit dan penetapan waktu audit sesuai rencana audit yang telah dibuat oleh *manager*. Auditor senior akan berada di kantor klien selama proses audit berlangsung. Auditor senior paling tidak telah memiliki pengalaman selama 2 sampai 5 tahun.
4. **Auditor Junior/Asisten Staf.** Auditor junior melakukan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk melakukan dokumentasi pekerjaan audit yang telah selesai dilakukan. Auditor junior biasanya adalah seorang auditor yang baru menyelesaikan pendidikan formalnya dan

membutuhkan banyak pengalaman dan keterampilan di lapangan. Auditor junior atau asisten staf ini memiliki pengalaman tidak sampai 2 tahun.

Bidang Jasa Kantor Akuntan Publik

1. Jasa Audit Laporan Keuangan

KAP akan melakukan audit atas laporan keuangan klien untuk memberikan opini mengenai kewajaran atas suatu laporan keuangan dan menilainya apakah telah sesuai dengan kriteria yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Jasa Audit Khusus

Audit khusus yang diberikan oleh kantor akuntan publik misalnya saja audit kepatuhan dan audit operasional. Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai apakah entitas atau perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit kepatuhan adalah berupa kesimpulan. Sedangkan audit operasional dilakukan untuk melihat efektifitas, efisiensi dan tingkat ekonomis suatu entitas. Hasil dari audit operasional adalah rekomendasi auditor.

3. Jasa Atestasi.

KAP memberikan jasa profesional berupa jasa atestasi yaitu dengan membuat suatu laporan yang berisi kesimpulan tentang keandalan suatu asersi tertulis, melalui pemeriksaan dan prosedur yang telah disepakati bersama.

4. Jasa Review Laporan Keuangan.

Jasa review laporan keuangan diberikan oleh KAP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan tidak adanya salah saji material di dalam laporan keuangan dan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Review laporan

keuangan dilakukan melalui prosedur pengajuan pertanyaan dan analisa professional sesuai dengan standar jasa akuntansi dan SPAP.

Perbedaan auditing dengan review laporan keuangan adalah audit akan menghasilkan suatu jaminan yang tinggi atas keandalan laporan keuangan dan membutuhkan bukti, dokumen pendukung serta fee yang tidak sedikit. Sedangkan review laporan keuangan menghasilkan jaminan keandalan laporan keuangan yang cukup moderat, tidak membutuhkan banyak bukti dan dokumen pendukung, serta fee yang jauh dibawah fee audit.

5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Kompilasi laporan keuangan dilakukan berdasarkan catatan dan informasi keuangan yang diberikan oleh manajemen. KAP tidak memberikan opini, mengenai tingkat kewajaran di dalam kompilasi laporan keuangan. Tanggung jawab laporan keuangan dan informasi yang terkandung di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen. Kompilasi laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar jasa akuntansi dan review sesuai SPAP.

6. Jasa Konsultasi

KAP dapat memberikan jasa konsultasi sesuai kompetensi yang dimiliki akuntan publiknya. Jasa konsultasi yang diberikan diantaranya adalah jasa konsultasi manajemen, perencanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, penyelenggaraan rekrutmen pegawai, pelatihan dan pendidikan pegawai serta konsultasi yang berkenaan dengan kebijakan manajemen lainnya. Dalam pemberian jasa ini, KAP harus tetap sesuai dengan SPAP.

7. Jasa Perpajakan

KAP bisa memberikan jasa perpajakan, jika ada akuntan publik di dalamnya yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Jasa professional yang bisa diberikan antara lain review pajak, perhitungan pajak dan pelaporan pajak.

Hak dan Kewajiban bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

1. **Hak Akuntan Publik**, dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik memiliki beberapa hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh *fee*
 - b. Memperoleh perlindungan hukum selama dalam memberikan jasa profesionalnya yang sesuai dengan standard SPAP
 - c. Memperoleh berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan selama tidak melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku.
2. **Kewajiban Akuntan Publik**, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang akuntan publik, maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bertanggung jawab atas semua jasa professional yang diberikan
 - b. Saat memberikan jasa profesionalnya wajib melalui KAP tempatnya bernaung.
 - c. Wajib mematuhi standar profesi akuntan publik, kode etik dan peraturan hukum sesuai jasa yang diberikan serta membuat kertas kerja dan mempertanggungjawabkannya.
 - d. Wajib menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia

- e. Berdomisili di Indonesia dan bagi pemimpin *partner* KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP
 - f. Mendirikan atau menjadi *partner* KAP sejak 180 hari dari pengajuan izin.
 - g. Seorang akuntan publik harus membuat laporan **secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak resmi menjadi *partner* pada sebuah KAP atau merangkap jabatan selama tidak dilarang di dalam undang-undang.**
 - h. Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional.
 - i. Menjaga perilaku baik, selalu bertanggung jawab dan memiliki integritas serta independensi.
3. **Kewajiban Kantor Akuntan Publik**, dalam menjalankan operasionalnya KAP harus melakukan berbagai kewajibannya sebagai berikut:
- a. Mempunyai minimal 2 orang tenaga kerja professional atau auditor
 - b. Memiliki kantor sebagai tempat untuk menjalankan usahanya.
 - c. Memiliki standar pengendalian mutu dan mengimplementasikannya.
 - d. Memasang papan identitas kantor di bagian depan.

Sarbanes - Oxley Act & Profesi Akuntan Publik

Sarbanes-oxley Act (Sarbox) muncul pada tahun 2002 karena dilatar belakangi banyaknya skandal akuntansi besar di dunia, salah satunya jatuhnya KAP Big5 Arthur Enderson. Karena dampak *fraud* yang dihasilkan akuntan ternyata memiliki peranan yang sangat besar, seperti para pemegang saham, pasar

dan masyarakat luas. Sarbox membawa dampak positif bagi profesi akuntan publik, di antaranya:

1. Adanya syarat sertifikasi CPA (*certified public accountant*) bagi para akuntan publik yang akan memberikan jasa profesionalnya.
2. Adanya syarat dan peraturan yang mengatur pendirian KAP.
3. Adanya peraturan perdagangan saham, baik *dealer* (penyalur) dan *broker* (perantara) dengan pemilik modal atau investor.
4. Profesi investor dan pengacara yang terlibat dalam jasa keuangan.

Sarbox mengatur mengenai akuntansi, pengungkapan informasi, kode etik bagi seluruh jasa profesional di bidang akuntansi dan pembentukan komite audit independen. Sarbox juga memberikan perlindungan hukum bagi karyawan atau siapa saja yang menemukan dan melaporkan adanya indikasi *fraud* dalam pelaporan keuangan.

Secara umum Sarbox mengatur segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, seperti kode etik, jasa yang boleh dan tidak boleh diberikan, standard dan peraturan yang mengatur para akuntan publik, penilaian pengendalian internal serta syarat dan standar laporan dan informasi keuangan yang dihasilkan.

¹⁰² Sarbox membentuk sebuah badan yang bernama PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) yang memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi dan memeriksa serta memberikan tindakan disiplin pada kantor-kantor akuntan publik.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Personality Preferences of Accounting and Non-Accounting Graduates Seeking to Enter the Accounting Profession*

Penulis : *Paul Andon, Kar Ming Chong, Peter Roebuck*

Latar Belakang

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan personal antara lulusan akuntansi dan non akuntansi saat memasuki dunia profesi akuntansi.
2. Di Australia mulai diperdebatkan mengenai terbukanya kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi.
3. Tujuan dibukanya kesempatan bagi lulusan non akuntansi dengan latar belakang, pengalaman dan keterampilan yang berbeda-beda diharapkan mampu mengubah stereotip profesi akuntansi yang hanya bisa dimasuki oleh lulusan akuntansi serta untuk memenuhi tuntutan kompleksitas dan keberagaman bisnis dan industri sehingga profesi akuntansi dituntut untuk mampu meningkatkan jasa yang diberikan sesuai dengan bisnis yang semakin beragam dan berkembang.
4. Para lulusan non akuntansi mampu memiliki kemampuan di bidang akuntansi dengan pelatihan yang memadai.
5. Dengan pembekalan yang cukup bagi para lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi, maka diharapkan para lulusan ini mampu beradaptasi dan menambah keberagaman sesuai latar belakang ilmu yang dimiliki.

Stereotypical Imagery of Accountants and Links to Demands for More Non Accounting Graduates

1. Adanya kontroversi karena dibukanya kesempatan bagi para lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi, maka lulusan non akuntansi ini harus diberi bekal dan pendidikan akuntansi yang memadai.
2. Dengan adanya kesempatan ini, sebenarnya adalah ingin meningkatkan keberagaman disiplin ilmu dalam ruang lingkup profesi akuntansi.
3. Stereotip yang ada selama ini adalah bahwa hanya lulusan akuntansi yang bisa bergabung dan bekerja di profesi akuntansi.
4. Meningkatnya lulusan akuntansi secara signifikan namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan tidak terlatihnya lulusan akuntansi dalam menghadapi persaingan, maka membuat badan profesi akuntansi di Australia membuat kajian untuk membuka kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk memasuki profesi akuntansi. Keberagaman latar belakang dan disiplin ilmu dalam satu wadah profesi akuntansi diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas profesi akuntansi.
5. Dengan semakin beragamnya latar belakang pendidikan orang-orang yang bergabung dalam wadah profesi akuntansi, diharapkan mampu memenuhi tuntutan pemberian jasa bagi berbagai macam bisnis dan industri.

Rumusan Masalah

1. Secara umum, mengenali kemampuan personal seseorang berarti meneliti dan mengidentifikasi ciri-ciri individu tertentu atau kelompok, maka akan diperoleh data dan informasi mengenai kecenderungan perilaku tertentu seperti sikap, orientasi dan gaya pengambilan keputusan.
2. Menurut beberapa penelitian, ada gabungan dari sifat dari masing-masing individu yang mempengaruhi kemampuan personal.
3. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah utama, yaitu:
 - a. RQ1 : Apa kemampuan personal yang harus dimiliki oleh lulusan non-akuntansi jika akan memasuki dunia profesi akuntansi.
 - b. RQ2 : Apa perbedaan yang signifikan antara lulusan akuntansi dan non akuntansi dalam memasuki profesi akuntansi.

Metodologi Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan metode ¹⁸² *Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)*

MBTI adalah salah satu jenis psikotest yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam memandang hal-hal ²⁴⁶ disekelilingnya serta membuat keputusan. MBTI dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat dan tipe kepribadian.

2. Instrument MBTI menggunakan pengisian kuesioner

Hasil dan Pembahasan

1. Untuk menjawab RQ1
 - Mayoritas lulusan non akuntansi menunjukkan hasil bahwa mayoritas mereka mengandalkan intuisi, berpikir dan menilai.
 - Lulusan non akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi harus dapat membuat keputusan yang berdasarkan logika dan analisis, sebab akibat dan perencanaan yang terorganisir.
2. Untuk menjawab RQ2
 - Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi kemamouan personal antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi.
 - Temuan utama dari studi ini adalah bahwa lulusan non akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi ternyata memiliki kemamouan personal serupa dengan lulusan akuntansi.
 - Lulusan non akuntansi cenderung termotivasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi saat mereka memasuki profesi akuntansi.
3. Menguji kemampuan personal antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi saat memasuki profesi akuntansi.
4. Kesempatan terbuka bagi lulusan non akuntansi dalam memasuki profesi akuntansi agar menambah keragaman dunia profesi akuntansi agar mampu memenuhi tuntutan pasar dan industri yang semakin beragam.

5. Kemampuan personal lulusan non akuntansi dan lulusan akuntansi memiliki kesamaan, yaitu memiliki tingkat penguasaan yang sama di bidangnya masing-masing.

Kesimpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan akan kebutuhan tenaga professional di bidang akuntansi, maka dibuka kesempatan bagi lulusan non akuntansi untuk dapat memasuki profesi akuntansi.
2. Keberagaman latar belakang dan keterampilan dinilai mampu memenuhi tuntutan pasar dan industri bisnis yang semakin beragam.

2. Artikel Kedua

Judul : *Known by The Company They Keep: A Study Of Political Campaign Contributions Made by The United States Public Accounting Profession*

Penulis : *Peggy D. Dwyer, Robin W. Roberts*

Pendahuluan

1. Berita mengenai kasus Enron menjadi topic hangat yang diperbincangkan di kalangan akademisi dan profesi akuntansi.
2. Berkembangnya pertanyaan mengenai sifat hubungan antara akuntansi, klien dan negara yang membuat peraturan. Dari munculnya kasus Enron, maka hubungan antar ketiganya menjadi topic yang sering dibicarakan.
3. Penelitian ini membahas mengenai strategi dan cara yang digunakan oleh para profesiaonal (akuntan publik) dan

kelompok-kelompok lainnya dalam upaya dukungannya terhadap legislative.

4. Peneliti melakukan dua analisa khusus yang berkaitan dengan kecenderungan keterlibatan profesi akuntan publik di dalam politik, yaitu apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau mendukung kepentingan klien.
5. Data yang pertama diambil adalah sejauh mana keterlibatan profesi akuntan publik di dalam pembiayaan kampanye politik. Kedua, adalah mengumpulkan informasi mengenai bagaimana keterlibatan profesi akuntan publik dalam pendanaan kampanye dan keterlibatannya dengan ideology politik tertentu.
6. Adanya informasi mengenai hubungan antara teori profesi dan potensi terlibatnya profesi akuntan publik di dalam politik. Serta adanya laporan kontribusi dari profesi akuntan publik yang secara langsung dan terang-terangan mengikuti kegiatan politik.

Latar Belakang dan Motivasi

1. Keterlibatan Profesi Akuntan Publik di dalam politik
 - Adanya ulasan literature yang menyimpulkan bahwa keterlibatan profesi akuntan publik di dalam politik dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
 - Seharusnya jasa yang diberikan oleh para akuntan publik tidak ditumpangi kepentingan politik karena nantinya akan membatasi ruang lingkup pemberian jasa di segala bidang.
 - Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa peran akuntansi dalam masyarakat sebenarnya tidak sedikit,

yaitu sebagai seseorang yang mampu membawa perubahan atau sebagai reactor yang memfasilitasi perubahan di dalam kehidupan masyarakat.

2. Akuntansi, Profesi Akuntan publik dan Ekonomi Politik

- Seorang akuntan dituntut untuk mampu memberikan informasi secara objektif, independen sehingga dapat menghasilkan informasi yang rasional bagi pengambilan keputusan.
- Dalam perspektif Interaksionis (Willmott, 1986), profesi akuntansi diartikan sebagai kelompok yang mencari pengakuan dan status. Perspektif ini melihat bahwa profesi akuntan publik, tidak lagi mengutamakan kepentingan publik namun sudah memasuki dimensi politik.
- Sedangkan teori kritikal berpendapat bahwa seorang professional (akuntan publik) lebih cenderung mengarah pada kesejahteraan pribadi mereka dengan cara bergabung dan mempromosikan diri mereka dalam suatu wadah yaitu kantor akuntan publik.
- Secara teori, seharusnya profesi akuntan publik haruslah bersifat netral dan tanpa dipengaruhi sudut pandang tertentu yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam memberikan jasa professional.

3. Kontribusi penelitian

- Kontribusi dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa profesi akuntan publik di Amerika Serikat secara aktif terlibat di dalam politik dan adanya dukungan dari para legislative yang menggunakan jasa akuntan publik untuk membantu mereka dalam merumuskan kebijakan dalam sektor keuangan.

Recent Reform in the CPA Profession

1. Profesi akuntan publik ternyata telah terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan politik selama delapan decade di Amerika Serikat.
2. Pemerintah Amerika Serikat mengizinkan ketrlibatan para akuntan publik ini ke dalam ruang lingkup politik yang dapat terlihat seperti di dalam table 1, 2, dan 3 yang merupakan daftar nama akuntan publik yang terlibat di dalam politik Amerika Serikat.

Kontribusi Profesi CPA (tahun 1997-1998)

1. Dari table 4 dan 5 maka dapat dilihat jumlah calon legislative yang mendapat dukungan dari para professional akuntan publik dari berbagai partai politik yang ada di Amerika.
 - Sampel penelitian, sampel terdiri dari 435 anggota legislatif dari rentang tahun 1997-1998, sebagai *data cross-sectional* pada data kontribusi keuangan dalam jangka waktu sampel beberapa periode waktu.
 - *Measures of accounting profession financial contributions.* Adanya indikasi bahwa profesi akuntan publik dapat memainkan peran sentral dalam kegiatan legitimasi dan proyek pembangunan yang ada serta adanya bukti yang menunjukkan bahwa para akuntan publik ini menerima kontribusi dari anggota komite politik.
2. *Measures of ideology : special interest group scores.* Berdasarkan penelitian yang didasarkan pada enam kategori yang dianggap mewakili kelompok politik Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu kelompok kepentingan bisnis, hak sipil, konservatif, buruh, liberal dan wanita. Untuk masing-masing sampel, peneliti akan mencari rata-rata nilainya.

Hasil dan Pembahasan

1. *Univariate analyses*. Dalam tabel 7 digambarkan adanya standar deviasi untuk tujuh kontribusi dari komite politik serta koefisien korelasinya. Dilakukan analisa terhadap enam faktor yang telah disebutkan di atas maka ditemukan adanya korelasi kepentingan antar keenam poin tersebut. Dan hasilnya bahwa keenam poin tersebut tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan analisis multivariat selanjutnya.
2. *Multivariate analyses*. Untuk menguji hubungan antara ideology dengan kontribusi politik para akuntan publik, maka dilakukan analisis regresi dengan variable independen adalah ideology. Hasilnya menunjukkan bahwa ideology memiliki kontribusi yang signifikan terhadap dukungan yang diberikan oleh professional akuntan publik.

Kesimpulan

1. Seorang akuntan sebaiknya bersifat netral dan jauh dari kepentingan konflik sosial, mengingat seorang akuntan mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan terlebih dalam hal keuangan.
2. Adanya korelasi yang signifikan antara keenam poin yaitu kelompok kepentingan bisnis, hak sipil, konservatif, buruh, liberal dan wanita di dalam daftar kontribusi yang diberikan oleh para akuntan publik.
3. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup penelitian yang hanya menyimpulkan bahwa ideology menjadi ukuran dalam analisa penelitian ini. Hakl tersebut tentu saja tidak dapat menggeneralisasi dalam siklus penelitian selanjutnya.
4. Peran akuntan publik dalam area kebijakan publik perlu mendapatkan kajian dan perhatian mengingat apakah ada

kepentingan lain yang mendasari mereka membuat kebijakan publik tersebut.

5. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana motivasi dan konsekuensi dari dukungan yang diberikan oleh akuntan publik terhadap kegiatan politik di Amerika Serikat. Bahwa dukungan ini bisa mengurangi rasa netral dan independensi akuntan di area publik seperti kasus jatuhnya Enron dan kegagalan-kegagalan auditor lain di beberapa kasus. Kebijakan yang dihasilkan oleh para legislative yang mendapat dukungan dari para akuntan publik dianggap tidak bisa bersifat universal dikarenakan adanya penilaian dari para akuntan publik tersebut.

3. Artikel Ketiga

Judul : *CPA Licensure without examination: Legitimation and Resistance*

Penulis : **Richard S. Sathe**

Pendahuluan

1. Adanya akuntan publik yang tidak lulus di dalam ujian CPA menimbulkan reaksi keras dari beberapa organisasi akuntan publik. Hal ini dianggap sebagai bentuk resistensi oleh beberapa organisasi akuntan publik di Minnesota.
2. Munculnya beberapa pertanyaan kalangan seperti bagaimana kualitas dari orang yang memiliki lisensi CPA namun tidak lulus ujiannya, serta mempertanyakan bagaimana tingkat kompetensi para LPAs yang tidak memiliki sertifikasi lulus CPA.

3. Ada tiga tahapan paradigma pemeriksaan untuk para CPA yaitu tidak adanya pemeriksaan sama sekali bagi CPA yang telah lama, pemeriksaan untuk CPA baru dan telah berpengalaman dan pemeriksaan untuk keduanya.
4. Di Minnesota terdapat beberapa kali perubahan peraturan terkait lisensi profesi akuntan publik.

Landasan Teori

62

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa landasan teori. Teori pertama yang digunakan yaitu mengenai regulasi mengenai profesi akuntansi di Amerika Serikat.

1. *Regulation and the public interest*
 - Adanya tiga bentuk langkah-langkah dalam pengajuan pekerjaan di AS seperti adanya pendaftaran, sertifikasi profesi, dan lisensi.
 - Adanya segmen pasar yang besar membuat para akuntan publik berlomba-lomba untuk menawarkan jasanya, namun ada pembatasan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang mensyaratkan pengesahan lisensi bagi jasa professional.
 - Lisensi ini sekaligus menjadi tolak ukur bagaimana kualitas professional yang dimiliki. Karena konsumen yang semakin kritis dalam memilih dan mampu membedakan kualitas para tenaga parofesional.
2. *Theories of the profession*
 - Adanya konsep teori Willmott yang berpendapat bahwa ada kontribusi di setiap teori profesi. Salah satunya adalah profesi akuntansi. Profesi ini mengedepankan keterampilan.

- Sebuah profesi juga dianggap sebagai identitas yang memperoleh pengakuan di tengah masyarakat, namun tak jarang profesi juga menuntut perubahan yang dianggap menguntungkan diri mereka sendiri bukan untuk kepentingan umum.

3. *Institutions*

- Institusi diartikan sebagai sekelompok aturan hukum yang membatasi perilaku manusia, struktur, lembaga pemerintah, kelompok kepentingan dan profesi.
- Profesi didefinisikan sebagai keanggotaan yang bersifat kolektif yang menggabungkan masalah legitimasi. Status keanggotaan kelompok dipertahankan menurut aturan dan sudut pandang sosial.
- Dalam beberapa literature dibahas mengenai kerangka konseptual yang digunakan untuk menguji konversi LPAs dan menunjukkan bahwa lisensi dan ujian CPA merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang yang berkenaan dan sangat perat kaitannya dengan profesi akuntansi.

Metodologi Penelitian

1. Metode studi kasus yang tepat digunakan adalah rentang waktu dan struktur yang terikat dengan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini juga meneliti mengenai bagaimana hubungan intraorganisasi di dalam profesi akuntansi itu sendiri.
2. Data utama penelitian bersumber dari dokumen yang berasal dari lembaga yang mengatur profesi di Minnesota dan wawancara. Ada tiga sesi wawancara, yaitu dengan penyusun utama dari 2001 Act, Presiden MNCPA dan komite

legislative. Hasil wawancara terstruktur ini bersifat ekspansif. Hasil dari wawancara ini nantinya akan diverifikasi akurasi dan pihak yang berkepentingan telah bersedia melakukan koreksi.

Studi Kasus

1. Munculnya argument dari pihak berwenang mengenai adanya akuntan publik yang tidak lulus mengikuti ujian CPA sehingga LPA dianggap tidak memiliki kompetensi. Dan yang kedua masyarakat menganggap bahwa akuntan publik yang telah lulus ujian CPA harus mengkonversi LPA nya. Ketiga, lisensi LPA telah berjalan selama lebih dari dua puluh tahun, dan keempat, dikhawatirkan organisasi LPA akan hilang tergerus dengan kemajuan zaman yang mensyaratkan adanya lisensi CPA bagi akuntan publik.
2. Minnesota memberlakukan bahwa semua akuntan publik harus memiliki CPA.
3. Adanya kontradiksi tentang konversi LPA menjadi CPA. Pertama, mereka yang telah memiliki lisensi LPA secara otomatis akan mendapat lisensi CPA mengingat LPA telah diakui dan berpengalaman selama 20 tahun. Kedua, dengan dihapusnya LPA akan membuat kebingungan publik mengenai lisensi akuntan publik. Ketiga, ada 12.000 akuntan publik berlisensi CPA, namun 300 diantaranya masih aktif berlisensi LPA. Keempat, legislative Minnesota melindungi LPA dikarenakan telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun.

Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan mengungkapkan beberapa argument dari berbagai sudut pandang dan ulasan literature.

1. *Expediency*

Ada kesepakatan bahwa LPA akan perlahan hilang dikarenakan adanya pergeseran, namun hal tersebut akan sulit terjadi. Dikarenakan konversi CPA akan sulit dilakukan.

2. *The Two side of the public interest coin*

Kedua belah pihak berkepentingan haruslah mengutamakan kepentingan umum. Ada yang menganggap bahwa akuntan publik yang berlisensi LPA tidak berkompeten karena tidak memiliki lisensi CPA. Namun, ada pihak lain yang berpendapat bahwa LPA telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan selama jangka waktu itu mereka terus mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Pendapat berbeda menyatakan bahwa semua itu tergantung pada pilihan konsumen. Konsumen akan menentukan apakah akan memilih akuntan berlisensi CPA atau LPA karena keduanya berada di dalam profesi yang sama.

3. *The legitimacy of the CPA examination*

Bahwa akuntan publik yang memiliki lisensi CPA memiliki kemampuan dan keahlian normatif yang baik. Dan lisensi CPA merupakan unsur penting dalam identitas professional. Pendapat lain menyatakan bahwa LPA tidak bisa disetarakan dengan CPA. Para akuntan publik berlisensi LPA tetap harus bekerja keras untuk dapat lulus ujian sertifikasi CPA. Namun, disisi lain ada pertanyaan yang muncul apakah lisensi CPA yang didapat oleh akuntan publik baru akan setara dengan akuntan publik berlisensi LPA namun telah lebih berpengalaman. Menurut mereka lamanya pengalaman merupakan bukti kompetensi dan

mampu menggantikan pendidikan serta dapat sebagai pengganti ujian masuk.

4. *The legitimating role of association*

Pada akhirnya pihak berwenang Minnesota memasukkan status aktif dan tidak aktif untuk lisensi CPA dan LPA. Jika akuntan publik memiliki lisensi tidak aktif, maka tidak bisa memberikan jasa profesionalnya, dan jika ingin kembali mengaktifkannya harus dengan syarat tertentu. Dalam beberapa sudut pandang, akuntan berlisensi LPA dianggap lebih berpengalaman daripada akuntan publik baru yang telah berlisensi CPA.

5. *Resistence*

Resistensi merupakan konsistensi terhadap sesuatu. Adanya kemungkinan akuntan publik berlisensi LPA akan tetap bersaing dengan akuntan publik berlisensi CPA. Resistensi membawa isu bahwa adanya konversi LPA menjadi CPA akan membaw perdebatan publik dan kebingungan bagi masyarakat.

Kesimpulan

1. Untuk menjawab pertanyaan mengapa seorang LPA bisa tidak lulus ujian CPA adalah bahwa akuntan publik berlisensi LPA lebih memandang asas kebermanfaatan daripada gelar lisensi semata.
2. Untuk menjawab pertanyaan kedua mengapa LPA dengan 20 tahun pengalamannya dianggap lebih kompetn dari akuntan publik berlisensi CPA, jawabannya adalah bahwa CPA adlah syarat bagi profesi akuntansi, namun belum tentu akuntan publik baru yang memiliki sertifikat CPA akan mampu mengungguli akuntan publik bersertifikat LPA karena pengalaman mereka yang telah lebih dari 20 tahun. Pengalaman mengalahkan pendidikan dan syarat ujian masuk.

3. Penelitian ini memberikan kontribusi dan pemahaman bagaimana proses legitimasi sertifikasi CPA.
4. Penelitian ini juga sedikit banyak berkontribusi pada asosiasi akuntan publik.
5. Penelitian ini juga berkontribusi dan memberikann pemahaman bahwa di Minnesota tidak hanya akuntan publik berlisensi CPA yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan opini audit.

4. Artikel Keempat

Judul : *The "Information Right" and The CPA Profession*

Penulis : Gary J. Previts

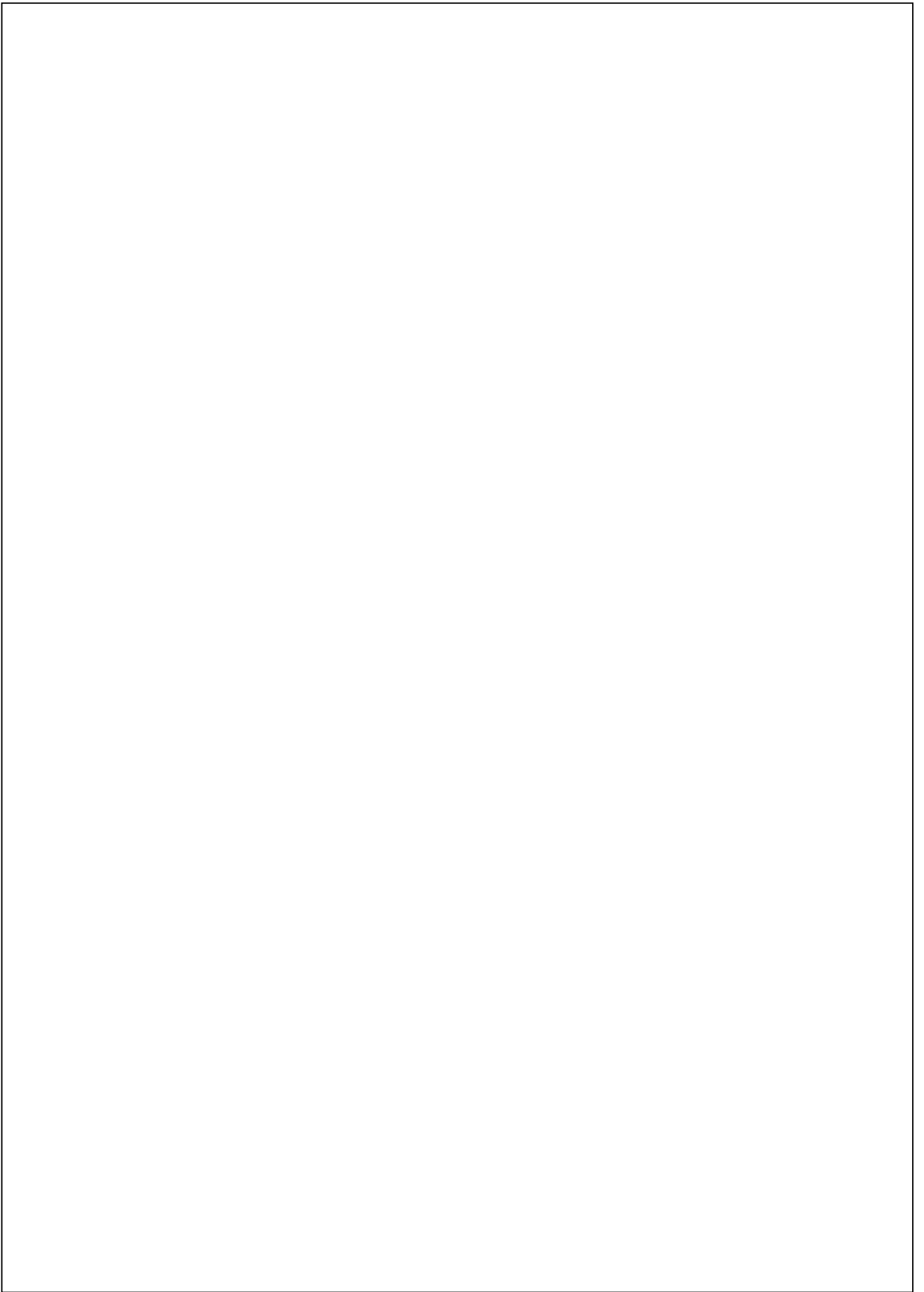
Latar Belakang dan Landasan Teori

1. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajemen (pengelola). Dengan adanya kasus Enron, maka muncul stigma pasar yang baru mengenai kepentingan akuntan publik dalam pemberian jasa profesionalnya.
2. Dengan banyaknya skandal akuntan publik, maka dicetuskan adanya Sarbanes Oxley (Sarbox) yang pada akhirnya mengatur segala kode etik profesi akuntan publik, dan menjadi dasar etika dan yang mengikat profesi akuntan publik.
3. Di tengah perubahan lingkungan, maka akuntan publik dituntut untuk meningkatkan wawasan dan perluasan informasi mengenai perubahan pasar yang terjadi. Seorang akuntan publik memainkan peran penting dalam menyediakan informasi bagi pasar.

4. Dengan adanya pemisahan antara fungsi manajemen dengan kepemilikan, maka fungsi pengendalian akan mudah diterapkan. Penyediaan informasi yang andal merupakan ranah utama bagi profesi akuntan publik.

Kesimpulan

1. Dengan pemisahan fungsi pemilik dan pengelola, maka fungsi pengendalian akan mudah diterapkan. Penyediaan informasi yang andal bagi publik merupakan ranah utama dari profesi akuntan publik. Akuntan publik harus terus mengikuti informasi mengenai perubahan pasar dan harus terus meningkatkan kemampuannya. Namun, seorang akuntan publik terikat oleh aturan etika profesi seperti yang tertuang dalam Sarbanes Oxley.



BAB III

LAPORAN AUDIT

Definisi Laporan Audit

Laporan audit merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan pekerjaan dan hasil temuan dari proses audit secara komprehensif. Laporan audit menjadi perhatian penting bagi auditor karena laporan audit sangat penting bagi para investor, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Laporan audit menurut standar pelaporan di dalam SPAP:

1. **Standar pelaporan pertama.** Laporan audit harus dapat menjamin bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. **Standar pelaporan kedua.** Laporan auditor harus mampu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus memiliki konsistensi di dalam penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya baik di periode sekarang maupun periode sebelumnya. Jika ditemukan adanya perubahan, maka auditor wajib menyebutkannya di dalam laporan auditnya.

3. **Standar pelaporan ketiga.** Informasi yang diungkapkan di dalam laporan keuangan harus memenuhi unsur yang memadai, terutama pengungkapan informasi yang material.
4. **Standar pelaporan keempat.** Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Seorang auditor harus bertanggung jawab mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan.

Manfaat Laporan Audit

1. Sebagai alat untuk memahami informasi mengenai proses audit.
2. Sebagai dasar untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit.
3. Sebagai dasar dalam pengambilan opini.

Syarat Laporan Audit

1. **Lengkap.** Laporan audit harus berisi mengenai segala informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit dan hal memadai atas informasi yang akan dilaporkan.
2. **Akurat.** Laporan audit harus memberikan informasi, temuan dan kesimpulan yang didukung dengan adanya bukti yang kompeten dan relevan.
3. **Objektif.** Laporan audit harus disajikan secara seimbang dan netral tanpa memihak pihak manapun dan tidak ditumpangi kepentingan apapun.

4. **Meyakinkan.** Laporan audit beserta informasi yang ada di dalamnya harus mampu bersifat persuasive dan logis serta disusun berdasarkan fakta yang ada.
5. **Jelas.** Laporan audit harus disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna laporan audit.
6. **Ringkas.** Laporan audit disajikan secara ringkas. Laporan yang terlalu panjang, bisa menurunkan kualitas laporan audit.

Bentuk dan Bagian Laporan Audit

1. **Judul Laporan.** Di dalam standar audit, di dalam laporan audit haruslah mencantumkan judul dan memuat kata independen.
2. **Alamat Laporan Audit.** Di dalam laporan audit, harus tercantum tujuan laporan audit, misalkan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan, dewan direksi maupun pemegang saham.
3. **Paragraf Pendahuluan.** Paragraf pertama merupakan:
 - a. Pernyataan sederhana bahwa KAP telah melaksanakan keseluruhan proses audit
 - b. Mencantumkan laporan keuangan yang telah di audit (tanggal dan periode akuntansi laporan keuangan).
 - c. Pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, dan auditor hanya menyatakan kewajaran atas laporan keuangan.
4. **Paragraf Ruang Lingkup.** Paragraf ini berisi tentang pernyataan di mana audit disusun untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, dan

menyatakan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material. Di dalam paragraph ini auditor juga menyatakan telah mengevaluasi penerapan standar akuntansi, estimasi yang digunakan, proses pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Audit memberikan suatu tingkat keyakinan yang tinggi, namun bukan jaminan.

5. **Paragraf Pendapat.** Merupakan paragraf yang berisi kesimpulan auditor yang berdasarkan atas pertimbangan profesional.
6. **Tanda Tangan, Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik.** Dalam bagian ini menunjukkan *partner* akuntan publik yang bertanggung jawab secara hukum dan jabatannya atas mutu hasil auditnya berdasarkan standar professional.
7. **Tanggal Laporan Audit.** Tanggal yang tertera merupakan tanggal dimana auditor telah menyelesaikan proses terpenting dari prosedur audit di lapangan dan menunjukkan sampai tanggal berapa auditor bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

Kondisi dari Laporan Audit Standar Tanpa Pengecualian:

1. Semua instrument dari laporan keuangan tersaji secara keseluruhan dalam laporan keuangan.
2. Ketiga standar umum audit (keahlian & pelatihan teknis yang memadai bagi auditor, independensi, penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) telah dipatuhi dalam semua hal yang terkait dengan penugasan.
3. Bukti audit yang kompeten dan cukup telah didapatkan oleh auditor.
4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan telah diungkapkan secara memadai.

5. Tidak terjadi kondisi yang membuat auditor perlu menambahkan paragraph penjelas

Kategori Laporan Audit

1. Wajar Tanpa Pengecualian /WTP (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan oleh auditor jika:

- a. Tidak ada pembatasan ruang lingkup audit.
- b. Auditor memperoleh bukti yang cukup dan kompeten
- c. Tidak terdapat pengecualian signifikan tentang kewajaran laporan keuangan, yakni posisi keuangan dan hasil usaha serta operasional perusahaan.
- d. Laporan keuangan telah menerapkan prinsip akuntansi berlaku umum.
- e. Terdapat konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan.
- f. Laporan keuangan telah diungkapkan secara memadai.

2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan/ WTPDP (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Dalam kategori ini, laporan keuangan tetap disajikan secara wajar namun ada beberapa bagian yang dirasa oleh auditor masih memerlukan tambahan penjelasan. Keadaan yang menyebabkan perlunya tambahan paragraph penjelasan adalah:

- a. Adanya ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi.
- b. Adanya keraguan auditor tentang *going concern* entitas.
- c. Penekanan atas suatu hal.
- d. Laporan audit melibatkan auditor lain.

3. **Wajar dengan Pengecualian / WDP** (*Qualified Opinion*)

Dalam kategori ini, laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, namun menurut auditor ada beberapa unsure yang dikecualikan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan. Kondisi WDP terjadi apabila:

- a. Adanya pembatasan ruang lingkup audit oleh klien.
- b. Adanya kondisi diluar kekuasaan auditor maupun klien yang menyebabkan auditor tidak dapat memperoleh informasi dan melaksanakan prosedur audit yang penting.
- c. Laporan keuangan ternyata tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.
- d. Adanya ketidak konsistenan di dalam penerapan prinsip akuntansi di dalam penyajian laporan keuangan.

4. **Tidak Wajar** (*Adverse Opinion*)

Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar apabila:

- a. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sehingga tidak menunjukkan laporan keuangan yang wajar.
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup audit, sehingga auditor tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten.

5. **Tidak Memberikan Pendapat** (*Disclaimer of Opinion*)

Dalam kondisi ini, seorang auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa keseluruhan isi dari laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Auditor memberikan opini ini apabila:

- a. Banyak terjadi pembatasan ruang lingkup audit

- b. Adanya hubungan yang tidak independen antara auditor dengan klien.

42 Jika auditor tidak memberikan opininya, maka di dalam laporan auditor harus menjelaskan semua alasan substantive yang mendukung opininya tersebut.

Laporan Audit dengan melibatkan auditor yang lain

Dimungkinkan jika akuntan publik memiliki klien audit yang memiliki sejumlah kantor cabang yang tersebar, maka akuntan publik tersebut mengandalkan kantor akuntan publik lain dalam melaksanakan proses audit dan memiliki tiga alternatif, yaitu:

1. Auditor tidak memberikan referensi pada laporan audit

Jika auditor tidak memberikan referensi kepada auditor lain, maka pendapat wajar tanpa pengecualian standar akan diberikan, selama tidak ada kondisi lain yang mengharuskan adanya penyimpangan.

2. Auditor memberikan referensi dalam laporan audit

Disebut juga dengan laporan pendapat bersama. Laporan dengan opini WTP adalah laporan yang tepat apabila tidak ada review bagi pekerjaan auditor lain atau dianggap proporsi laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain material terhadap keseluruhan laporan.

3. Auditor mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian

Opini auditor wajar dengan pengecualian maupun menolak berpendapat bergantung pada materialitas yang ditetapkan auditor, akan diperlukan jika auditor utama tidak ingin bertanggung jawan atas pekerjaan auditor lain.

Materialitas

FASB (*financial accounting standard board*) mendefinisikan materialitas adalah sebagai besarnya tingkat kelalaian ataupun salah saji di dalam laporan keuangan, yang membuat pengguna informasi laporan keuangan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan tersebut atau membuat keputusan yang berbeda jika informasi yang benar telah diketahui.

88
Semakin rendah tingkat materialitas yang digunakan, maka akan semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Semakin besar suatu saldo akun, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Belum ada batasan tingkat materialitas yang disepakati bersama, namun ada tiga kategori tingkatan materialitas yang biasanya digunakan, yaitu:

1. **Jumlah yang tidak material.** Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, namun cenderung tidak mempengaruhi keputusan bagi para pemakai informasi laporan keuangan, maka hal tersebut masih dianggap tidak material. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah wajar tanpa pengecualian
2. **Jumlah yang material namun tidak memperburuk informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara menyeluruh.** Dalam kategori ini, jika salah saji terjadi di dalam laporan keuangan dan hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, tetapi laporan keuangan tetap dianggap wajar secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah wajar dengan pengecualian
- 210
3. **Jumlah yang sangat material sehingga kewajaran akan laporan keuangan diragukan.** Dalam kategori ini, salah saji

di dalam laporan keuangan mampu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, maka opini auditor yang dapat diberikan adalah tidak wajar/ menolak memberikan pendapat.

Namun, di dalam proses audit, walaupun tidak ada aturan pasti mengenai berapa rentang angka yang dianggap material atau tidak, seorang auditor tetap harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan sebagai salah satu strategi audit secara menyeluruh. Contoh penetapan rentang materialitas dalam laporan keuangan secara menyeluruh:

1. Laba bersih : 5% - 10%
2. Pendapatan dan biaya : 1% - 3%
3. Asset: 0,5% - 1%
4. Ekuitas: 1%

⁶ Dalam perencanaan audit, auditor harus menetapkan tingkat materialitas ke dalam dua tingkat, yaitu:

1. Tingkat laporan keuangan

Alasannya adalah karena auditor berpendapat mengenai keseluruhan laporan keuangan, sehingga auditor akan menggunakan dua cara berikut:

- a. Pada saat perencanaan audit, maka:
 - Auditor membuat estimasi materialitas
 - Auditor mengidentifikasi sumber dari salah saji material dalam laporan keuangan, seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi, penyimpangan fakta, serta adanya penghilangan informasi yang diperlukan.

- Auditor harus menyadari bahwa di dalam laporan keuangan pasti akan terjadi lebih dari satu tingkat materialitas.
 - Pertimbangan auditor atas materialitas biasanya dibuat enam sampai sembilan bulan dari tanggal neraca berdasarkan data laporan keuangan yang dibuat tahunan. Pertimbangan tersebut juga bisa didasari dari perubahan ekonomi maupun tren bisnis.
- b. Pada saat mengevaluasi bukti audit selama proses pelaksanaan audit

2. Tingkat Saldo Akun

Alasannya adalah karena saldo akun akan diverifikasi untuk mencapai kesimpulan yang menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Saldo suatu akun biasanya mencerminkan *over-statement* atau melebihi batas saji.

Proses Pengambilan Keputusan Untuk Laporan Audit Oleh Auditor

1. Menentukan Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan

Auditor harus mengidentifikasi dan memutuskan apakah telah terjadi kondisi-kondisi yang mempengaruhi kewajaran atas suatu laporan keuangan sebelum pada akhirnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

2. Menentukan Tingkat Materialitas Baik Pada Tingkat Laporan Keuangan Maupun Saldo Akun

Auditor harus menentukan rentang materialitas terhadap salah saji di dalam laporan keuangan. Hal ini penting, mengingat

salah saji dan rentang materialitasnya menjadi salah satu dasar auditor untuk menentukan opininya.

3. Memutuskan Jenis Laporan Audit Berdasarkan Tingkat Materialitas

Setelah mengetahui rentang materialitas suatu laporan keuangan, maka auditor akan mudah menentukan tingkat kewajaran laporan keuangan, dan akan memilih kategori laporan audit mana yang akan digunakannya.

4. Menuliskan Laporan Audit

Auditor pada akhirnya akan menyusun laporan audit yang berisi hasil dari segala proses dan prosedur audit yang telah selesai dilaksanakan. Penulisan laporan audit harus tetap mengikuti aturan baik isi dan bagian dari laporan audit tersebut.

Dampak *E-commerce* Terhadap Pelaporan Audit

Salah saji mungkin saja tidak bisa terdeteksi dengan penggunaan teknologi informasi akibat hilangnya jejak, karena informasi sebagian besar diinput langsung ke dalam komputer, maka bisa saja adanya dokumen dan catatan sumber informasi perusahaan yang hilang ataupun sengaja tidak dimasukkan. Namun, jika sistem teknologi informasi gagal, maka akan mempengaruhi keandalan informasi yang dihasilkan. Risiko yang terjadi adalah dapat meningkatkan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko khusus yang melekat pada sistem teknologi informasi antara lain: (a) Risiko pada *hardware* dan *software*; (b) Jejak atau bukti audit yang berkurang; (c) Kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas di bidang teknologi informasi; (d) Adanya ancaman kegagalan sistem dan virus; dan (e) Akses yang tidak sah.

Di masa sekarang, seorang auditor harus memiliki pemahaman memadai mengenai perangkat keras dan lunak serta sistem komputer untuk merencanakan penugasan dan harus mengetahui bagaimana dampak pengolahan data elektronik terhadap prosedur audit yang akan digunakan. Apabila klien memiliki aplikasi akuntansi yang diproses melalui jaringan, maka auditor harus mempelajari tentang konfigurasi jaringan, *software* yang digunakan untuk mengelola sistem, pengendalian akses dan perubahan program aplikasi . pengetahuan ini akan berdampak pada penilaian risiko pengendalian auditor ketika menyusun rencana audit laporan keuangan dan saat menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Pengendalian aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan dari proses audit. Pengendalian aplikasi ini bersangkutan dengan tujuan saldo akun serta penyajian dan pengungkapan di dalam laporan keuangan. Pengendalian aplikasi ini terdiri dari:

1. **Pengendalian Input**, dirancang untuk memastikan bahwa data dan informasi yang iinput sudah diotorisasi, akurat dan lengkap.
2. **Pengendalian Pemrosesan**, untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses.
3. **Pengendalian Output**, untuk mendeteksi kesalahan serta pemrosesan diselesaikan serta untuk mereview kelayakan data.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Audit Firm Industry Specialization and The Audit Report Lag*

Penulis : Ahsan Habib, Md. Borhan Uddin Bhuiyan

Latar Belakang

1. Paper ini memberikan kontribusi dengan menggambarkan hubungan antara audit dengan spesialisasi industri dengan ARL. ARL didefinisikan sebagai batas antara akhir tahun fiscal perusahaan dengan tanggal laporan audit, dan oleh karenanya ARL dapat digunakan untuk mengukur efisiensi audit.
2. Investor lebih memilih menggunakan ARL, karena informasi di dalam ARL lebih mencerminkan kredibilitas laporan keuangan dan ARL dinilai lebih ringkas.
3. Temuan umum penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi ARL diantaranya adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh klien, ukuran klien, kondisi keuangan klien, dan informasi jenis laba.
4. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kantor audit dengan spesialisasi industri, maka akan focus pada perkembangan teknologi, fasilitas yang memadai, personel yang kompeten dan sistem pengendalian organisasi untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
5. Auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri tertentu diharapkan akan lebih efisien dalam menyelesaikan proses audit dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan tersebut.

6. Auditor dengan spesialisasi di bidang industri tertentu pasti akan menetapkan standar fee yang lebih tinggi.
7. Peneliti juga akan menguji bagaimana pengaruh penerapan IFRS terhadap ARL.

Kerangka Teoritis

1. Secara ringkas, maka penjelasan skema dari konsekuensi auditor dengan spesialisasi di bidang industri:
 - a. Reputasi KAP akan ikut berpengaruh dengan keberadaan auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri.
 - b. Terdapat faktor-faktor penentu dan pengukur dari tingkat spesialisasi auditor tersebut.
 - c. KAP akan menerapkan strategi untuk meningkatkan spesialisasi di bidang industri tersebut.
 - d. KAP yang memiliki auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang tersebut maka secara otomatis akan mempengaruhi penetapan fee audit.
 - e. Auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang industri tertentu tentu akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
 - f. Peningkatan kualitas laporan keuangan antara lain meliputi:
 - 1) ARL
 - 2) Kualitas pengungkapan yang lebih baik
 - 3) Akurasi perkiraan yang lebih baik dan meminimalkan terjadinya dispersi
 - 4) Meminimalkan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan
 - 5) Meningkatkan kualitas informasi laba.

- g. Peningkatan kualitas informasi laba ini meliputi:
 - 1) Meminimalkan praktek manajemen laba
 - 2) Meningkatkan konservatisme atau kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.
 - 3) Mengurangi kecenderungan bahwa penyajian informasi laba tidak bisa mencerminkan keadaan sebenarnya namun hanya untuk memenuhi analisa dan target perusahaan.
2. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua hipotesis berikut:
 - a. Hipotesis 1: dampak kehadiran auditor dengan kemampuan spesialisasi industri dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan spesialisasi tersebut.
 - b. Hipotesis 2 : kewajiban untuk mengadopsi IFRS akan meningkatkan ARL namun tidak sama hasilnya dengan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri.

Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini, komponen yang digunakan antara lain;

1. Menggunakan pengukuran terhadap auditor dengan spesialisasi industry
2. Variable kontrol terdiri dari: (1) Pengukuran keuangan pada akhir tahun; (2) Industri; (3) Ukuran perusahaan; (4) Kerugian; (5) Kondisi keuangan; (6) Anak perusahaan; (7) Fee untuk jasa non audit; (8) Masa jabatan; (9) Kepemilikan; (10) Kewajiban untuk pengadopsian IFRS

3. Pemilihan sampel

Sampel yang digunakan adalah 502 perusahaan yang terdaftar pada bursa efek New Zealand dari tahun 2004-2008. Data yang dikumpulkan adalah tanggal laporan audit, biaya audit, biaya non audit, masa audit, nama kantor akuntan publiknya, jumlah anak perusahaan dan nama pemegang saham serta laporan tahunan perusahaan.

4. Hasil tes

a. Statistik deskriptif dan analisa korelasi

- 1) 22% dari total perusahaan memiliki informasi laba yang negative
- 2) masing-masing perusahaan memiliki rata-rata memiliki tujuh anak perusahaan
- 3) $\frac{3}{4}$ dari sampel memiliki akhir tahun fiscal antara bulan Maret dan Juni
- 4) 39% sampel telah diaudit oleh auditor yang memiliki spesialisasi di bidang industri tertentu.

b. Analisa univariate

Dari hasil analisa univariate terdapat perbedaan rata-rata untuk KAP dengan auditor yang memiliki spesialisasi industri dengan KAP yang tidak memiliki auditor tersebut.

c. Analisa multivariate

Dari hasil analisa multivariate mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri mampu menikmati hasil audit yang lebih efisien. Selain itu, juga terdapat peningkatan yang signifikan terhadap ARL setelah mengadopsi IFRS.

d. Self-selection problem

Pemilihan auditor dengan kemampuan spesialisasi tertentu pada bidang industri tetap dikembalikan lagi kepada klien.

e. *Sensitivity test*, tes ini terdiri dari:

- 1) definisi alternative ARL
- 2) alternatif pengukuran auditor dengan spesialisasi industri
- 3) level spesialisasi industri dan ARL nya
- 4) perbedaan industri

Kesimpulan

1. ARL adalah salah satu dari output yang bisa diamati oleh pengguna eksternal laporan keuangan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi audit.
2. Penelitian empiris membuktikan bahwa ARL dipilih oleh perusahaan tertentu dengan karakteristik audit tertentu.
3. KAP telah melakukan perbaikan dan pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan bisnis klien.
4. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa auditor dengan kemampuan spesialisasi di bidang industri tertentu mampu menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki kemampuan tersebut.
5. Adanya pengaruh adopsi IFRS terhadap ARL
6. Keterbatasan dari penelitian ini adalah pertama, penelitian empiris sebelumnya hanya berkorelasi dengan variable-variabel yang telah disebutkan di atas, dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan variable yang lain. Kedua, penelitian ini tidak secara langsung membahas perbedaan efisiensi auditor dan pengaruhnya terhadap ARL.

2. Artikel Kedua

Judul : *Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay*

Penulis : *Sandra Cohen, Stergios Leventis*

Latar Belakang

1. Adanya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang diakui sebagai karakteristik kualitatif pada informasi keuangan.
2. Laporan keuangan pemerintahan memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja dan posisi keuangan karena sebuah akuntabilitas dan saran untuk mengambil keputusan oleh beberapa pengguna.
3. Publikasi secara tepat waktu dianggap penting untuk menilai kinerja sektor publik untuk mencapai efisiensi, tujuan efektivitas dan ekonomi.
4. Penelitian ini akan melihat pula dampak transisi pencatatan akuntansi pemerintahan daerah di Yunani dari awalnya cash basis menjadi accrual basis.

Landasan Teori

Greek municipalities and relevant regulation

1. Kementrian keuangan Yunani telah mengagendakan ketepatan waktu informasi pelaporan audit yang telah diatur di dalam undang-undang Yunani. Ada faktor yang

menyebabkan keterlambatan pelaporan audit: banyaknya aliran politik, peraturan yang kaku, ketentuan hukum yang ketat dan tidak sesuai dengan legislative. Waktu maksimum untuk mempublikasikan laporan audit yaitu 217 hari.

2. Basis Akrual digunakan untuk semua perusahaan swasta yang tidak terdaftar di Bursa. Pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi akrual harus mempublikasikan laporan keuangan tahun fiskal terutama neraca dan labarugi.

Factors affecting audit delay

1. Penundaan audit telah menjadi subjek perhatian dan penelitian pada sektor swasta.
2. Laporan audit yang tepat waktu saling terkait dengan kualitas laporan audit.
3. Audit menjadi negatif jika dikaitkan dengan penerbitan laporan keuangan dengan tujuan pengungkapan laporan audit, dan juga sebagai independensi dari auditor.
4. Penundaan audit akan berpengaruh pada reputasi auditor dan tanggung jawabnya, kompetensi manajemen dan audit fee.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini fokus pada tiga dimensi (faktor pemerintah daerah, politik dan faktor audit), ketersediaan data, mengkaji asosiasi dengan penundaan audit.

1. ***Audit delay***, merupakan variabel dependen, diukur sebagai jumlah hari dari tanggal akhir tahun pelaporan laporan audit di pemerintah daerah.

2. *Municipality-related factors*

– *Experience in accrual accounting*

Dalam organisasi penerapan konsep akuntansi berbasis akrual dan prakteknya perlu dipelajari lebih banyak dan ini merupakan “permasalahn” yang akan menyebabkan penundaan yang tidak biasa. Di Yunani persiapan pelaporan keuangan merupakan tugas utama untuk semua pemerintah daerah, karenanya dilakukan pelatihan, sistem akuntansi harus diuji dan aset tetap juga harus ada. Tugas yang kedua pemerintah daerah secara signifikan bisa mengendalikan berbagai aset tetap yang harus dicatat dan dinilai untuk pertama kalinya.

H₁: *Audit delay* berhubungan negatif dengan pengalaman kotamadya dalam adopsi akuntansi berbasis akrual.

– *Dependence on governmental grants*

Pemerintah daerah secara signifikan mengandalkan hibah dari pemerintah pusat. Subsidi dari negara diperuntukan untuk operasional dan investasi, dialokasikan ke pemerintah daerah oleh pusat (pajak dikumpulkan dipusat lalu ditransfer ke pemda).

H₂: *Audit delay* berhubungan negatif dengan ketergantungan pemerintah daerah pada hibah pemerintah pusat.

– *Location*

Kekayaan dari sumberdaya di Yunani tidak merata dan bisa mempengaruhi akses kepada pegawai yang terampil untuk mempertahankan sistem akuntansi yang canggih dan internal operasional di administrasi. Peneliti menganggap bahwa lokasi mempengaruhi keterlambatan

audit. Lokasi geografis memfasilitasi pelaksanaan audit, sehingga mengarah ke pelaporan audit yang tepat waktu atau tidak sehingga menjadi *audit delay*.

H₃: *Audit delay* berhubungan negatif dengan lokasi kota yang terletak dipusat-pusat ekonomi dinegara

1. *Politically related factors*

– Strong opinion

Terdapat politik didalam anggota dewan dan terkadang tidak sesuai alirannya dengan parlemen nasional sehingga menimbulkan pengambilan keputusan dalam keuangan yang prosesnya akan lebih panjang. Kompetensi politik telah ditemukan pada penelitian sebelumnya yang bisa membuat ambiguitas dan sulit untuk menetapkan pengukuran.

H₄: *Audit delay* berhubungan positif dengan oposisi kuat pada pemerintahan dewan

– Re-election

Seorang manajer profesional biasanya tidak berpengalaman dengan teknis akuntansi namun, ketika menjabat selama 4 tahun mereka akan lebih mengetahui akuntansi serta paham dengan prosedur audit, namun adanya pemilihan ulang (walikota) dapat mengakibatkan terjadinya *audit delay*.

H₅: *Audit delay* berhubungan negatif dengan pemilihan kembali walikota

2. *Audit-related factors*

– *External accountant*

Perubahan dari cash ke accrual basis bukan merupakan prosedur yang sepele sehingga diperlukan adanya pelatihan staf untuk bisa mengoperasikan sistem baru dan tim eksternal membutuhkan biaya yang dikeluarkan dari segi peningkatan keahlian akuntansi dan dukungan. Keberadaan eksternal accountant bisa membuat meningkatnya *audit delay* karena : (1) Akuntan eksternal tidak banyak menghabiskan waktu di pemerintah daerah yang membuat tidak berkerja sama antara auditor dan staf pemerintah daerah karena mereka bekerja hanya sebagai *freelancer*; (2) Tanggal penyusunan laporan di pemerintah daerah bertepatan pada sektor swasta, oleh karenanya akuntansi eksternal dengan klien disektor swasta akan sibuk selama periode yang nantinya akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah.

H₆: *Audit delay* berhubungan positif dengan adanya akuntan eksternal

– *Internal accounting*

Di Yunani, pengetahuan akuntansi tidak dijadikan syarat untuk menjadi staff yang bekerja di pemerintahan daerah, yang pada akhirnya, pegawai di departemen keuangan tidak memiliki kualifikasi akuntansi profesional. Tim dari internal akuntansi harus melaksanakan fungsi accounting yang diharapkan mendukung auditor dalam tugas-tugas mereka. Hal ini bisa mengakibatkan menghabiskan waktu untuk melakukan kepatuhan dan substansif tes.

H₇: *Audit delay* berhubungan negatif dengan ada tidaknya internal accounting.

– Remarks

Pernyataan yang disajikan di dalam laporan audit mengenai penyimpangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum/undang-undang yang relevan. Di Yunani terdapat banyak sekali kualifikasi yang harus dipatuhi hal ini bisa memperpanjang proses auditor ketika auditor menemukan penyimpangan dan sebagian karena auditor memerlukan banyak waktu mengaudit transaksi sebagai pertahanan terhadap litigasi dimasa depan.

H₈: *Audit delay* berhubungan positif dengan pernyataan audit

– Auditor

Bukti empiris mengungkapkan bahwa perusahaan multi-nasional dan reputasi audit yang baik akan lebih memerlukan waktu sedikit untuk memberikan layanan jasa. Hal ini karena mereka mempunyai staf yang terlatih yang sudah terbiasa menggunakan teknologi terkait proses audit. Di Yunani terdapat SOL (Akuntan publik bersertifikat-Auditor) yang didirikan tahun 1993.

H₉: *Audit delay* berhubungan positif dengan praktek audit lokal.

Metodologi Penelitian

Sampel dalam penelitian ini terdiri 914 pemerintah daerah di Yunani, namun hanya 577 yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sample terdiri 116 pemerintah daerah dalam

kurun waktu 2 tahun (2006-2007). Data-data keuangan diperoleh dari hardcopy atau salinan elektronik.

Hasil dan Analisis Empiris

1. Hasil dari analisis regresi menunjukkan modelnya penelitian hanya menunjukkan 19,9% yaitu tidak terlalu besar. Namun variable partai politik bersignifikan dengan *audit delay*. Karena struktur politik paling berkompetitif dalam masalah keuangan.
2. Pemilihan walikota bersignifikan hal ini menunjukkan bahwa auditor berurusan dengan beban kerja bertambah karena harus melakukan audit tambahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap harta dari wali kota terpilih untuk bisa mengkonfirmasi kecurigaan dengan alasan yang berhubungan pada pra-pemilihan pemilu.
3. Keberadaan internal accounting memiliki hasil yang signifikan karena berhubungan dengan proses ketepatan dalam mengaudit. Keberadaan tim internal accounting sebagai komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

Kesimpulan

1. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa telah terjadi keterlambatan audit di pemerintah daerah Yunani pada tahun 2006-2007.
2. Hasil analisis regresi menunjukkan oposisi politik, pemilihan kembali walikota, populasi, akuntansi internal, akuntansi berbasis akrual, audit remark merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam *audit delay*.

3. Adanya pengaruh KAP big 4 atau ketergantungan pada audit lokal (SOL) dan berhubungan dengan biaya dan berpengaruh pada terjadinya *audit delay*.
4. Keterbatasan penelitian ini adalah tahun yang diobservasi hanya dua tahun yaitu 2006-2007, peraturan dan undang-undang kurang dijelaskan secara terperinci dalam kaitannya dengan *audit delay*
5. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan faktor-faktor lain seperti karakteristik auditor profesional agar bisa mempengaruhi keputusan yang relevan sebagai subject penelitian selanjutnya.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Auditor Decision-Making in Different Litigation Environments : The Private Securities Litigation Reform Act, Audit Reports and Audit Firm Size*

Penulis : *Marshall A. Geiger, K. Raghundan, Dasaratha V. Rama*

Latar Belakang

1. Efek dari Reformasi Undang-undang diakhir Desember 1995 dan secara signifikan mengubah litigasi dilingkungan akuntansi perusahaan Amerika Serikat.
2. Motivasi penelitian ini adalah fokus pada audit perusahaan dalam pengambilan keputusan regulasi maupun legislatif.
3. Penelitian ini membahas mengenai efek ukuran audit yang berbeda diperusahaan karena mengadopsi Undang-undang

reformasi, dalam studi ini peneliti memeriksa apakah undang-undang reformasi menghasilkan efek differensial.

4. Melalui laporan audit terkait, ditemukan bahwa KAP secara signifikan melakukan modifikasi opini audit setelah adanya undang-undang reformasi.

Pengembangan Hipotesis

1. Dalam penelitian ini berharap bahwa auditor mengurangi kemungkinan melakukan modifikasi pada laporan keuangan dalam undang-undang reformasi dari periode sebelumnya untuk periode selanjutnya.
2. Peneliti memperoleh pengaruh penurunan litigasi pada berbagai pengambilan keputusan manajemen perusahaan dengan memeriksa opini audit sebelum dan setelah adanya reformasi penting dari undang-undang.
3. H_a : kantor akuntan publik *big 6* mengurangi kecenderungan untuk mengeluarkan modifikasi laporan *going concern* sealah diberlakukannya undang-undang reformasi.

Metodologi Penelitian

1. Peneliti menggunakan kepailitan sebagai indikasi perusahaan yang gagal dan kasus auditor yang mengeluarkan pendapat *going concern* yang telah dimodifikasi sebelumnya.
2. Peneliti menemukan perbedaan kecenderungan modifikasi laporan sebelum dan setelah adanya reformasi undang-undang
3. Metode penelitian ini menggunakan model regresi logistik multivariate, variabelnya adalah jenis laporan audit, variabel indikatornya adalah KAP Big6 dalam mengendalikan ukuran perusahaan.

Pembahasan

Sensitivity and additional analyses

1. *Big 6 non-Big 6 analyses*

Hasil menunjukkan KAP big 6 lebih kecil kemungkinannya untuk mengeluarkan pendapat *going concern* yang dimodifikasi setelah undang-undang reformasi dibandingkan sebelum adanya reformasi, sedangkan KAP non big 6 dalam mengeluarkan pendapat yang dimodifikasi karena relatif lebih konservatif dalam mengambil keputusan laoran dalam periode sebelum undang-undang reformasi.

2. *Client Size*

Peneliti akhirnya menggunakan 404 perusahaan yang digunakan untuk kantor akuntan big 6 dan 116 untuk KAP yang tidak termasuk dalam big6.

3. *Changes in client risk portfolios*

KAP big6 memiliki hasil yang signifikan dalam perubahan dan modifikasi laporan audit antara sebelum dan sesudah reformasi undang-undang dibandingkan dengan KAP yang tidak termasuk ke dalam big6

4. *Cut-off dates*

Adanya perubahan isi laporan audit dari sebelum dan sesudah adanya reformasi undang-undang oleh pemerintah.

Kesimpulan

1. Studi ini meneliti apakah perubahan lingkungan litigasi akan memberi dampak keputusan dari pelaporan audit di KAP big 6 dan non big 6.

2. Hasil analisa peneliti memberikan bukti bahwa pada periode 1991-2001 adanya modifikasi laporan *going concern* pada saat undang-undang reformasi secara signifikan mempengaruhi keputusan pelaporan pada KAP big 6 tetapi tidak pada KAP non big 6. .
3. Adanya keputusan tentang modifikasi pelaporan audit akan berkontribusi terhadap pengetahuan kita reformasi undang-undang pada pelaporan audit perusahaan.
4. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa reformasi undang-undang mungkin memiliki litigasi yang penting untuk kebutuhan profesi akuntan publik di masa mendatang.

BAB IV

ETIKA PROFESIONAL

13

Definisi Etika

Etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan yang buruk. Etika juga memiliki arti norma, nilai, prinsip dan kaidah serta ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

134

Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan sebab akibat dan baik buruknya. Etika merupakan suatu refleksi dari sebuah pengendalian diri karena segalanya dilakukan dan diterapkan untuk kepentingan sosial.

45

Tidak setiap hal yang berkaitan dengan perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, sistematis dan sesuai dengan metode yang ada, sehingga etika dapat dikatakan sebagai ilmu dimana objeknya adalah tingkah laku manusia.

Tujuan Penerapan Etika

Dalam penerapannya, etika memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Untuk memperoleh kesamaan konsep mengenai penilaian baik atau buruknya perilaku manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
2. Mengarahkan masyarakat untuk menjadi lebih tertib, teratur dan harmonis.
3. Membuat orang bersikap kritis dan lebih rasional dalam mengambil keputusan.
4. Etika merupakan sarana untuk memberikan orientasi pada hidup manusia
5. Menuntun manusia untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab.
6. Etika dianggap sebagai norma yang dianggap berlaku.
7. Dalam etika juga mengatur bagaimana menghormati hak orang lain, hak lembaga, dll.

Etika umum berusaha mendefinisikan sifat dari kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain tujuan penerapannya, terdapat pula alasan mengapa etika diperlukan, yaitu:

1. Saat ini kita hidup di lingkungan yang semakin pluralistis, sehingga dengan etika akan mampu membantu kita menyikapi keberagaman yang ada.
2. Lingkungan kita tinggal adalah lingkungan dengan masa transformasi masyarakat. Transformasi bisa berupa transformasi budaya, transformasi ekonomi dan transformasi intelektual. Dalam hal ini, etika akan membantu kita agar tidak kehilangan orientasi.

3. Banyak munculnya ideologi-ideologi baru, sehingga dengan kita akan membantu kita menyikapi munculnya ideology-ideologi tersebut agar tidak mudah terpancing.

Jenis Etika

1. **Etika Deskriptif.** Etika jenis ini berkaitan dengan nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan realitas yang telah menjadi bagian budaya dalam kehidupan masyarakat. Etika deskriptif memberikan gambaran mengenai fakta yang selalu berkembang di masyarakat, tanpa adanya interpretasi yang lugas.
2. **Etika Normatif.** Etika normatif memberikan penilaian sekaligus menjadikan norma sebagai dasar dalam memutuskan suatu tindakan. Macam-macam norma dalam etika normative, yaitu:
 - a. Norma kesopanan, menyangkut bagaimana tata cara hidup dan pergaulan sehari-hari.
 - b. Norma hukum, memiliki konsekuensi yang tegas karena diatur oleh adanya suatu peraturan dengan memiliki jaminan hukuman bagi siapa saja yang melanggar.
 - c. Norma moral, sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia.

Macam-Macam Etika

1. **Etika Umum.** Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori etika yang ada.

2. **Etika Khusus.** Etika ini merupakan penerapan dari prinsip moral dasar dalam bidang-bidang kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi:
 - a. **Etika individual**, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia kepada dirinya sendiri.
 - b. **Etika soisal**, yaitu etika yang menyangkut kewajiban dan perilaku manusia didalam masyarakat. Etika sosial terdiri atas etika komunikasi, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan dan etika ideology.

Sistem Penilaian Etika

1. Etika dipandang sebagai suatu ilmu.
2. Etika sebagai perbuatan seseorang yang telah menjadi sifat baginya, atau yang disebut akhlak dan budi pekerti.
3. Perbuatan manusia dinilai dengan tiga tingkatan, yaitu adanya rencana (niat), perbuatan (pekerti), hasil perbuatan tersebut (baik dan buruk).

Menurut **Josephson Institute (Arens, 2008)**, ada enam nilai terkait perilaku etis, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*), yang mencakup: (a) kejujuran; (b) integritas; (c) reliabilitas; dan (d) loyalitas.
2. Penghargaan (*respect*), mencakup: (a) kepantasan (*civility*); (b) kesopan santunan; (c) kehormatan; (d) toleransi; dan (e) penerimaan.
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yang berarti seseorang akan berusaha untuk menahan diri dalam melakukan tindakan

4. Kelayakan (*fairness*), yang mencakup: (a) adanya persamaan penilaian; (b) sikap netral atau tidak memihak; (c) proporsionalitas; dan (d) keterbukaan.
5. Perhatian (*caring*), berarti seseorang memiliki kesungguhan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat.
6. Kewarganegaraan (*citizenship*), mencakup kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara agar kehidupan di dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik.

Dilema Etika

Merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang saat memutuskan perilaku seperti apa yang harus dan yang tepat untuk dia lakukan. Ada beberapa rasionalisasi yang umum digunakan sehingga menghasilkan tindakan yang tidak etis, yaitu:

1. **bahwa setiap orang juga melakukan tindakan yang sama**, pernyataan ini memiliki arti bahwa jika suatu perilaku yang tidak etis tersebut secara umum dilakukan, maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar.
2. **jika tindakan tersebut sah menurut hukum, maka hal tersebut dianggap etis**, pernyataan ini berarti bahwa semua perilaku yang dianggap sah menurut hukum merupakan perilaku yang etis yang berdasarkan pada kesempurnaan hukum. Padahal sebenarnya hukum berbeda dengan etika.
3. **kemungkinan penemuan dan konsekuensinya**, pernyataan ini berdasarkan pada evaluasi atas kemungkinan bahwa individu lain akan menemukan dan melakukan perbuatan

tersebut dan akan mengetahui seberapa besar konsekuensi yang akan diterimanya.

Selain itu, terdapat beberapa pendekatan untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu sebagai berikut:

1. memperoleh fakta yang relevan
2. mengidentifikasi isu etika berdasarkan fakta tersebut.
3. menentukan apa dan siapa yang akan terkena pengaruh dari dilema tersebut
4. mengidentifikasi alternative yang tersedia untuk menyelesaikan dilemma tersebut
5. mengidentifikasi konsekuensi yang terjadi dari masing-masing alternative.
6. memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan.

Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis seseorang dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi dan menerapkan prinsip-prinsip moral dasar dan norma etis umum yang berkaitan dengan profesi di dalam kehidupan manusia.

Etika profesi selalu berkaitan dengan bidang pekerjaan seseorang sehingga sangat perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Setiap etika profesi pasti akan memiliki konsep etika yang telah ditetapkan dan disepakati pada masing-masing tatanan profesi dan ruang lingkup tertentu. Dengan etika profesi diharapkan para professional dapat bekerja sebaik mungkin dan bertanggung jawab atas tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan profesinya.

Prinsip Dasar Etika Profesi

1. **Tanggung jawab**, yang meliputi:
 - a. Selalu berusaha melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di dalam pekerjaannya.
 - b. Selalu memikirkan bagaimana dampak profesi tersebut untuk kehidupan di masyarakat.
2. **Keadilan**, prinsip keadilan berarti dalam melayani masyarakat sesuai profesi yang dimiliki tidak akan berat sebelah atau membeda-bedakan satu sama lain.
3. **Kompetensi**, dalam prinsip ini berarti seseorang akan melakukan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dan kompetensi yang dimiliki dengan penuh ketekunan.
4. **Perilaku Profesional**, Seseorang akan menjalankan profesinya selalu konsisten dan menjaga reputasi profesinya.
5. **Kerahasiaan**, seorang profesional akan menjaga informasi kerahasiaan dari klien dan tidak akan menyebarkan tanpa seijin klien.

Kode Etik Profesi

Merupakan suatu sistem norma, nilai dan aturan professional yang tertulis yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional di bidang tertentu. Tujuan kode etik adalah agar seorang professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Kode etik memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) kontrol social; (2) mencegah adanya campur tangan pihak yang tidak berkepentingan; dan (3) mencegah terjadinya konflik dan benturan kepentingan

Etika Professional Akuntan Publik

Seorang akuntan di Indonesia di dalam menjalankan profesinya telah diikat dengan suatu kode etik profesi yang merupakan pedoman bagi para akuntan publik saat berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan masyarakat. Kode etik akuntan juga merupakan sarana bagi para pemakai laporan keuangan atau masyarakat tentang penilaian kualitas dan mutu atas jasa professional yang telah diberikannya melalui serangkaian pertimbangan etika sesuai aturan dalam kode etik profesi. Terdapat lima aturan etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik, yaitu:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

- a. **Independensi.** Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik harus mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesionalnya. Independensi terdiri dari Independensi dalam fakta (*independence in fact*), yaitu seorang auditor benar-benar mampu mempertahankan independensinya selama proses audit, dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), yaitu apabila independensi seorang auditor ada secara fakta, namun klien meyakini bahwa auditor tersebut memberikan nasehat atau konsultasi dengan klien.
- b. **Integritas.** Seorang akuntan publik harus tetap mengedepankan integritas dengan bebas dari benturan kepentingan.
- c. **Objektivitas.** Seorang akuntan publik tidak boleh mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain atau

bersikap berat sebelah karena mengetahui adanya faktor salah saji material.

183

2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi, yang terdiri dari:

- a. **Kompetensi professional.** Seorang akuntan publik hanya diijinkan untuk melakukan pemberian jasa professional sesuai dengan kecermatan dan keseksamaan professional.
- b. **Kecermatan dan keseksamaan professional**
- c. **Perencanaan dan supervise.** Setiap akuntan publik diwajibkan untuk melakukan perencanaan dan supervise setiap memberikan jasa profesionalnya.
- d. **Data relevan yang memadai.** Setiap akuntan publik wajib memperoleh data yang relevan dan memadai untuk menjadi dasar yang layak untuk pengambilan keputusan dan rekomendasi sesuai dengan jasa profesionalnya.
- e. **Kepatuhan terhadap standar yang berlaku.** Setiap akuntan publik diwajibkan mematuhi standar yang ada dalam melaksanakan setiap jasa profesionalnya.

106

60

3. Tanggung Jawab Kepada Klien, meliputi:

- a. **Rahasia informasi klien.** Seorang akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun tanpa seijin klien.
- b. **Fee professional.** Besarnya fee seorang kauntan publik berdasarkan pada: risiko penugasan professional, kompleksitas jasa yang diminta klien, tingkat keahlian sesuai penugasan tersebut, struktur biaya di KAP dan banyak pertimbangan professional lainnya.
- c. **Fee Kontinjen.** Fee ini ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional sesuai dengan hasil tertentu atau

106

temuan yang dihasilkan oleh seorang akuntan publik. Seorang akuntan publik dilarang untuk menetapkan fee kontinjen jika hal tersebut mampu mempengaruhi independensi.

4. Tanggung Jawab Kepada Seprofesi, meliputi:

- a. Akuntan publik wajib menjaga citra dan nama baik profesi dengan tidak melakukan tindakan yang mampu menjatuhkan kredibilitas profesi akuntan publik.
- b. Akuntan publik wajib melakukan komunikasi tertulis dengan akuntan publik lain jika berkaitan dengan penggantian penugasan audit

224

5. Tanggung jawab dan praktek lain. Seorang akuntan publik diperkenankan melakukan promosi, selama tidak menurunkan citra dan kredibilitas akuntan publik.

Peraturan Perilaku

ATURAN	Diterapkan Pada	
	semua CPA	CPA dalam KAP
Independensi, Integritas, Objektivitas		v
Independensi		
Integritas dan objektivitas	v	
Standar Umum dan Prinsip Akuntansi		
standar umum	v	
kepatuhan terhadap standar	v	
prinsip-prinsip akuntansi	v	
Tanggung jawab kepada klien		
informasi rahasia klien		v
honor Kontinjen		v
tanggung jawab seprofesi		
tanggung jawab dan praktek lainnya		
tindakan yang mendiskreditkan	v	
periklanan dan bentuk solisitasi lainnya		v
komisi dan honor referal		v
bentuk organisasi dan nama		v

Delapan Etika Profesional Akuntan Publik oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

1. **Tanggung Jawab Profesi.** Setiap akuntan publik harus selalu menggunakan pertimbangan professional dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya mengingat peran penting seorang akuntan publik. Seorang akuntan publik juga harus bertanggung jawab kepada pemakai jasa professional mereka. Akuntan publik juga harus bertanggung jawab dengan sesama akuntan publik lainnya untuk senantiasa mengembangkan profesi akuntansi, selalu memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan mengatur diri pribadi untuk selalu bertanggung jawab setiap menjalankan tugas profesionalnya.
2. **Kepentingan Publik.** Salah satu cirri utama suatu profesi adalah kesediaan untuk penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan publik memiliki peranan yang penting, tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada kreditur, pemerintah, investor, pemberi kerja, masyarakat luas yang bergantung pada bisnis dan keuangan yang akan bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan publik dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh mereka.
3. **Integritas.** Integritas merupakan salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Dengan integritas, akuntan publik diharuskan untuk selalu bersikap jujur, tanpa memihak pihak manapun, maupun memiliki benturan kepentingan. Integritas adalah kualitas yang melatar belakangi adanya kepercayaan publik dan merupakan *benchmark* bagi akuntan publik dalam menguji keputusan yang diambilnya.

4. **Objektivitas.** Setiap akuntan publik diwajibkan untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Objektivitas juga berarti berlaku adil, tidak memihak ke[ada pihak manapaun dan jujur secara intelektual. Apapun jasa dan kapasitas yang dimiliki oleh akuntan publik, skuntan publik tetap harus menjaga integritas dan objektivitas dalam pekerjaannya.
5. **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.** Setiap akuntan publik dituntut untuk selalu berhati-hati, memiliki kompetensi dan wajib untuk mempertahankan serta mengembangkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya dan memastikan bahwa klien telah memperoleh manfaat dari jasa professional sesuai dengan yang diharapkan, serta tetap mempertahankan konsistensi dan mempertanggungjawabkan profesinya kepada publik. Jika akuntan publik menerima penugasan professional yang melebihi kompetensinya, maka akuntan publik tersebut wajib untuk melakukan konsultasi atau bahkan menyerahkan penugasan tersebut kepada anggota akuntan publik yang lain yang lebih kompeten. Setiap akuntan publik harus mampu menilai kompetensi yang dimiliki dan memiliki apakah kompetensi yang dimiliki masih memadai untuk melakukan penugasan profrsional.
6. **Kerahasiaan.** Setiap akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional. Setiap akuntan publik tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat persetujuan dari klien, kecuali bahwa informasi tersebut boleh diungkapkan berkaitan dengan hak dann kewajiban

secara hukum. Bahkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini berlaku sampai penugasan profesionalnya berakhir. Standar profesi telah mengatur sifat dan luas cakupan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan profesional.

7. **Perilaku Profesional.** Seluruh akuntan publik harus berlaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan reputasi profesi akuntansi. Hal ini sebagai perwujudan tanggung jawab kepada klien, pihak ketiga, staf maupun masyarakat umum.
8. **Standar Teknis.** Seluruh akuntan publik harus berpedoman pada standar teknis dan standar profesional yang relevan dan berlaku dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selalu berhati-hati, menjaga integritas, objektivitas dan memelihara kompetensinya dalam melaksanakan penugasan.

Aturan dan Larangan Tentang Independensi Bagi Seorang Akuntan Publik Berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act* dan SEC (*Security and Exchange Commission*)

1. **Jasa Non-Audit.** Seorang akuntan publik dilarang memberikan dua jasa profesional secara bersamaan namun saling mempengaruhi independensi, misalkan seorang auditor yang sedang mengaudit perusahaan seorang klien, bertindak juga sebagai konsultan manajemen.
2. **Komite Audit.** Sarbox mewajibkan independensi bagi anggota komite audit yang beranggotakan tiga sampai lima orang dewan direksi yang tugas utamanya adalah mengawasi auditor agar tetap independen.

3. **Konflik dari Hubungan Personalia.** Menurut SEC maupun Sarbox kantor akuntan publik dianggap tidak bisa menjaga independensinya jika klien yang diaudit adalah mantan partner, principal maupun pemegang saham dari kantor KAP dimana auditor tersebut bernaung.
4. **Rotasi Partner.** Aturan SEC menyebutkan bahwa pimpinan dan partner audit harus dirotasi setelah lima tahun melakukan penugasan audit.
5. **Kepentingan Kepemilikan.** Aturan SEC melarang para akuntan publik menerima penugasan dari klien yang masih memiliki hubungan dekat dengan para akuntan publik tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan untuk mempengaruhi independensi.

Contoh Dilema Etika yang Dialami oleh Seorang Auditor

Jika seorang klien mengancam akan mencari auditor baru apabila auditor sekarang tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal sesuai dengan hasil audit, pendapat tersebut tidak dapat dikeluarkan. Maka sebaiknya, seorang auditor tetap harus menjaga independensi dan integritasnya mengingat begitu pentingnya opini audit. Opini audit tentang kewajaran suatu laporan keuangan merupakan suatu informasi yang sangat sensitive dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Selain itu, auditor juga harus mengingat konsekuensi yang diterima apabila tetap mempertahankan klien dengan syarat seperti di atas.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *The Code of ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992-2002*

Penulis : **Emmanouil Dedoulis**

Latar Belakang

1. Adanya Anglo-accountancy di Amerika yang menjadi perhatian politik dunia.
2. Anglo Accountancy adalah model profesi akuntansi yang kuat, peran pemerintah yang terbatas dan mementingkan pasar sekuritas
3. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana profesi akuntansi di Yunani merespon dibentuknya kode etik dan tindakan disipliner untuk memperbaiki citra dan kredibilitas organisasi profesi akuntansi.
4. Adanya latar belakang restrukturisasi politik dan ekonomi Yunani yang menggunakan Anglo-amerika (AS dan Kanada).
5. Adanya kasus Enron menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi.

Understanding the role of the Code of Ethics in the advancement of the local

1. Ulasan literature:
 - a. Adanya pendekatan konvensional yang bergantung pada pandangan mengenai profesi akuntansi.
 - b. Adanya pandangan tentang pengaruh kelompok organisasi dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

2. Kode etik akuntan diartikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang dirancang untuk aturan yang bersifat mengikat.
3. Menurut Meigs (1989) berpendapat bahwa kode etik adalah unsure utama profesi yang berisi pedoman bagi tindakan disiplin anggota profesi.

The politic economic context of Greece in the period 1992-2002 and the restructuring of the profession

1. Pada tahun 1995 audit SOL (standard audit Yunani) telah dimasukkan ke dalam sistem terpusat di pemerintahan.
2. Perubahan politik Yunani pada tahun 1990 mengakibatkan adanya restrukturisasi SOL dan perubahan lembaga pemerintahan untuk memenuhi tuntutan pemegang saham, manajemen, pemilik perusahaan dan kreditur untuk memperoleh informasi keuangan yang andal.
3. Menurut kepres 226/1992 telah diubah oleh kepres 341/1997 dilakukan oleh Dewan Pengawas SOE dimasukkan kedua anggota Sol dan anggota multinasional audit perusahaan yang telah berlatih di Yunani dan mendirikan sebuah asosiasi dikenal sebagai SELE.

Inter-professional rivalries and the formulation of the Code of Ethics

1. Pada tahun 1990-an, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kantor audit adalah adanya persaingan diantara para anggotanya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggota yang signifikan. Peningkatan anggota ini adalah penggabungan dari auditor local dan multinasional. Sedikit perubahan pada peraturan membuat para auditor makin kompetitif.

2. Untuk menjaga kepentingan para auditor ini, mereka memutuskan untuk mendirikan organisasi, beberapa auditor memutuskan untuk tetap bergabung dengan organisasi SOL, dan sebagian lainnya mendirikan kantor praktek independen.
3. Organisasi audit juga berperan di dalam ekonomi Yunani, seperti pemerintah Yunani menarik kembali peraturan mengenai liberalisasi pasar dan tidak lagi mempersulit proses audit.
4. Adanya persaingan yang ketat diantara para auditor menyebabkan banyaknya tekanan untuk memenuhi tuntutan para klien, selain itu juga terdapat persaingan dalam penetapan fee. Para auditor juga menggunakan berbagai cara akan nantinya dipilih kembali oleh klien.
5. Jika para auditor berlomba-bersaing untuk tetap memperoleh klien atau mempertahankan kliennya dengan berbagai cara, maka keandalan dan kualitas informasi yang dihasilkan pun turut diragukan.
6. Pada tahun 1996, organisasi profesi mulai khawatir dengan kegiatan yang dilakukan oleh para auditor dan menjadi sorotan media. Ada empat kelompok auditor:
 - a. Sangat sedikitnya auditor yang melakukan audit sesuai dengan standar audit dan peraturan
 - b. Banyaknya auditor yang tidak melakukan prosedur audit secara lengkap
 - c. Auditor yang tidak memberikan opini yang seharusnya walaupun menemukan adanya penyimpangan
 - d. Auditor yang memodifikasi laporan keuangan klien sehingga informasi laporan keuangan terkesan akurat.
7. Dengan demikian banyak pihak yang menyatakan bahwa profesi auditor sedang mengalami krisis. Sehingga

pemerintah akan mengatur kerangka peraturan yang akan mengatur keanggotaan dalam organisasi profesi auditor.

8. Pada pertengahan 1990an, pemerintah Yunani menyiapkan rancangan peraturan untuk etika profesi akuntan. Rancangan peraturan ini akan disesuaikan dengan struktur dan budaya Yunani, seperti adanya kebebasan, kerahasiaan, hubungan dengan rekan kerja, promosi dan kepatuhan.
9. Rancangan peraturan ini disusun dengan memperhatikan ruang lingkup dan sifat organisasi auditor di Yunani. Rancangan aturan ini berjudul "Peraturan Etika Profesional".
10. Kode etik akan memberikan kerangka untuk mengatur para anggota agar para auditor dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tepat, memberikan pengawasan mengenai penugasan dan pekerjaan pada auditor, apakah auditor telah memenuhi peraturan dan standar yang ada.

36

The impact of the Enron episode and the responses of the Greek profession

1. Setelah runtuhnya Enron, penggunaan kode etik di Yunani dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap praktek profesional akuntan publik. Auditor dituntut untuk mampu mendeteksi kecurangan dan memprediksi risiko kebangkrutan.
2. Kondisi ekonomi di suatu negara juga bergantung salah satunya pada informasi yang dihasilkan oleh auditor.
3. Semenjak adanya kasus Enron, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menjadi menurun. Oleh karenanya diperlukan kode etik yang mengatur profesi akuntansi. Pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dipatuhi dan benar-benar dijalankan.

Pembahasan

1. Dengan focus pada penerapan kode etik profesi akuntansi didalam perekonomian negara berkembang, maka di dalam penelitian ini disebutkan kode etik tersebut lambat untuk diaplikasikan atau dipraktakan.
2. Satu hal yang menarik dalam perumusan kode etik ini dilakukan secara tertutup tanpa keterlibatan pihak lain seperti auditee, pengguna informasi keuangan, stake holder dan pejabat negara.
3. Ruang lingkup kode etik profesi ini antara lain pertama adalah agar organisasi profesi akuntan mampu mengendalikan dan mengawasi kegiatan para auditor serta memperkenalkan aturan kepatuhan yang harus dijalani dan dipatuhi oleh auditor. Kedua, adalah membatasi akuntabilitas akuntan publik agar tidak terlalu luas cakupannya.
4. Kode etik juga diaplikasikan setelah terjadinya kasus Enron untuk menghadapi krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat.
5. Penelitian ini telah berusaha untuk menunjukkan bahwa adanya metode pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi penerapan kode etik dalam organisasi profesi akuntan di Yunani.
6. Kode etik dibuat karena adanya pengaruh imperialisme, peraturan politik dan ekonomi serta adanya persaingan antara auditor. Kode etik juga dipandang sebagai strategi untuk memperbaiki citra profesi auditor di mata masyarakat.

2. Artikel Kedua

Judul : *The Accounting Profession's Code of Ethics: Is It A Code of Ethics or A Code of Quality Assurance?*

Penulis : Sivakumar Velayutham

Latar Belakang

1. Kode etik profesi akan memberikan jaminan kepada publik dan bertanggung jawab terhadap integritas dan reputasi akuntan publik.
2. Kode etik profesi akuntan akan berfokus dan bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat mengenai jasa profesi yang diberikan.
3. Penelitian ini didasarkan pada evaluasi kode etik dari Institusi Of chartered accountants selandia baru (ICANZ) dan ASCPA.
4. Penelitian ini akan menjawab banyak pertanyaan mengenai apakah isi dan focus dari kode etik profesi akuntansi?
5. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai fitur dan konsep dari etika, kualitas dan jaminan mutu.

The concern of ethics and quality

1. *Ethics*

Menurut Frankena (1973) membedakan ada 3 jenis pemikiran atau pendekatan tentang filsafat moral yaitu:

Menurut Frankena (1973) ada 3 jenis pendekatan tentang filsafat moral yaitu:

- a. Deskripsi empiris untuk menjelaskan fenomena moralitas dan kejadian yang dilakukan oleh antropologi dan sosiolog.
- b. Normatif yaitu penilaian baik dan benar
- c. *Analitycal* atau etis berpikir dengan logis atau epistemologis, yaitu bagaimana moral itu dinilai.

Etika sering disebut sebagai moralitas dan mengacu pada kode moral atau teori normatif individu atau kelompok.

Dasar etika:

- a. Universal tentang kode etik yang berlaku untuk anggota profesi
- b. Sebagai perspektif, pernyataan dalam kode etik yang diwujudkan dalam Tindakan
- c. Aturan dan prinsip harus yang mengatur perbuatan benar dan salah

Menurut Frankena (1976), penilaian formatif:

- a. Didukung fakta yang digambarkan dalam tindakan dan karakter
- b. Merupakan sudut pandang tertentu dalam menghadapi sesuatu
- c. Suatu tindakan responsive

2. *Quality*

Di dalam Oxfords Dictionary, kualitas didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Smith (1993) mendefinisikan kualitas sebagai properti atau atribut mengacu pada karakteristik.

Kualitas tidak langsung diukur tetapi melewati penilaian proses.

Garvin mengidentifikasikan 8 dimensi kualitas dalam menyediakan kerangka berpikir tentang elemen dasar kualitas :

- a. Kinerja, mengacu pada karakteristik operasi utama dari produk
- b. Fitur, karakteristik sekunder yang melengkapi fungsi produk dasar
- c. Keandalan, mencerminkan kemungkinan produk yang gagal dalam jangka waktu tertentu
- d. Kesesuaian, tingkatan dimana sebuah produk didesain dan karakteristik operasi sesuai dengan standar yang ditetapkan
- e. Daya tahan, ketahanan atau masa dimana produk dapat digunakan
- f. Kecepatan pelayanan, kesopanan dan kompetensi dalam pengiriman produk
- g. Estetika, bagaimana produk didesain
- h. Kualitas yang dirasakan, persepsi produk berdasarkan gambar dan iklan

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai jaminan kualitas sebagai tanggung jawab organisasi profesional melalui pengembangan standar profesional dan bijaksana.

Manajemen mutu akuntansi diperusahaan akan lebih fokus terhadap keunggulan kompetitif, termasuk dalam proses perencanaan. Jaminan mutu merupakan pendekatan yang digunakan oleh manajer untuk memenuhi tuntutan kualitas.

Tujuan dari kualitas adalah kesesuaian produk, layanan dan proses produk sampai pada konsumen dipastikan telah memenuhi standar. ISO merupakan contoh standar jaminan kualitas yang paling populer.

Di dalam standar kualitas, sebuah produk akan dipastikan akan sesuai dengan prosedur produksi, meliputi proses desain, pengembangan, proses produksi dan pelayanan.

Comparison

1. Perbedaan konsep etika dan kualitas:
 - a. Etika berkaitan dengan aturan dan berdampak pada kehidupan, sedangkan kualitas berfokus pada produk dan jasa.
 - b. Etika mengatur hubungan antar individu, sedangkan tidak ada aturan tentang kualitas.
 - c. Etika memiliki persyaratan yang spesifik mengenai apa yang baik dan buruk, sedangkan etika tidak.
 - d. Etika adalah sebuah sikap, sedangkan kualitas mempengaruhi selera terhadap produk dan layanan.
 - e. Etika seringkali diwujudkan dalam tindakan etis yang penilaiannya bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, sedangkan penilaian kualitas adalah berdasarkan individu (konsumen).
2. Menurut May (1975), kualitas pelayanan professional dapat disesuaikan dengan pendekatan perjanjian atau pendekatan kontrak.

Kode Etik ICANZ dan ASCPA

1. ICANZ menggunakan Code of Ethics (COE) sementara ASCPA menggunakan Code of Professional Conduct (CPC).
2. CEO & CPC terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:
 - a. Pembukaan, yang berisi tujuan kode etik, penerapan dan kepatuhan. Menekankan semua anggota untuk

- melaksanakan kode disipliner jika terjdski penyimpangan terhadap peraturan kepatuhan.
- b. Prinsip-prinsip, berisi prinsip dasar perilaku yang etis dan profesional
 - c. Ketentuan etika COE atau pernyataan hukum CPC
3. COE ICANZ dan CPC ASCPA berisi prinsip-prinsip dasar yaitu:
- a. Kepentingan umum
 - b. Integritas
 - c. Objektivitas dan kebebasan
 - d. Kompetensi dan kehati-hati
 - e. Profesionalisme
 - f. Kepatuhan terhadap standar teknis
 - g. Kerahasiaan.

Masing-masing dari prinsip-prinsip diatas disertai dengan paragraf pendek penjelasan CEO dan CPC.

4. Pernyataan peraturan dibagi kedalam 4 kelompok:
- a. Berlaku untuk semua anggota kelompok profesi
 - b. Berlaku untuk anggota yang menyediakan layanan akuntansi publik, termasuk untuk biaya profesional
 - c. Berpegang pada prinsip tentang aspek dari perilaku profesional, termasuk dalam kepatuhan akuntansi, auditing, perpajakan, dan manajemen, konsultasi layanan standar.
 - d. Pernyataan profesional, termasuk penugasan profesional, klien, serta perubahan dalam janji professional.
5. Evaluasi ICANZ dan ASCPA dalam kode etik berfokus pada profesi akuntansi berdasarkan struktur kode etik dan tujuan

dari kode etik itu. Ruland dan LindBlom (1992) menunjukkan bahwa akuntan terkadang memiliki konflik di dalam penugasannya untuk mematuhi peraturan profesional dan tugas untuk mengungkapkan informasi kepentingan umum.

6. Tujuan kerangka konseptual adalah memberikan informasi untuk membantu pengguna jasa professional akuntan publik. Menurut Garvin (1984) memiliki 8 dimensi kualitas, yang bisa mewakili dimensi kinerja terhadap produk atau layanan yang diukur. Komponen dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi) dan tambahan pernyataan (pernyataan kebijakan akuntansi, laporan auditor) mewakili fitur produk atau jasa.

From Etchic To Quality

1. Abott (1983) telah menunjukkan bahwa kode etik profesi merupakan sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat, literatur menjelaskan bahwa kode etik menyediakan legitimasi untuk kerja profesional. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kerja menghubungkan kegiatan profesional dan kesimpulan nilai dalam budaya otoritas kerja profesional. About (1998) menunjukkan bahwa terdapat perubahan mendasar akibat profesi, legitimasi dan teknik legitimasi.
2. Setiap profesi harus memutuskan layanan apa yang akan diberikan dengan kualitas yang terjamin. Adanya identifikasi dan pengukuran terhadap kualitas layanan akan memungkinkan bagi tenaga professional untuk memastikan apakah jasa yang telah diberikan telah memenuhi standar kualitas yang ada.

Kesimpulan

1. Etika merupakan topic yang penting dalam praktek profesional dan pendidikan akuntansi. Begitu pula dengan kode etik profesi. Fokus utama pada kode etik adalah tanggung jawab moral.
2. Dalam penelitian ini menyediakan gambaran mengenai kode etik sebagai kualitas yang bisa diberikan oleh tenaga professional. Tujuannya untuk bisa membedakan etika dan kualitas. Etika mengenai sikap sedangkan kualitas difokuskan pada produk dan jasa.

BAB V

TANGGUNG JAWAB AUDIT & TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan oleh auditor adalah untuk memeriksa kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Secara umum, tujuan audit diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Kelengkapan (*Completeness*)**, untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara actual telah dimasukkan.
2. **Ketepatan (*Accuracy*)**, untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat, rincian dalam saldo akun telah sesuai dengan buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
3. **Eksistensi (*Exixtence*)**, untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau

keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksin yang tercatat tersebut tidaklah fiktif.

4. **Penilaian (*Valuation*)**, untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi telah diterapkan dengan benar.
5. **Klasifikasi (*Classification*)**, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan tepat termasuk angka-angka terkait dengan saldo.
- 41 6. **Pisah Batas (*cut-off*)**, untuk memastikan bahwa transaksi yang berdekatan dengan tanggal neraca telah dicatat dalam tanggal yang tepat. Kemungkinan terjadi transaksi salah saji adalah nerkenaan dengan akun yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
7. **Pengungkapan (*Disclosure*)**, untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dengan penjelasan secara wajar yang terdapat dalam isi catatan kaki laporan keuangan tersebut.

Selain tujuan pelaksanaan audit seperti penjelasan di atas, terdapat empat kondisi audit laporan keuangan perlu dilakukan, yaitu:

- 148 1. **Pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*)**, bahwa laporan keuangan harus bersifat netral, informasi disajikan dengan tidak menguntungkan salah satu kelompok pengguna.
2. **Konsekuensi (*consequence*)**. Laporan keuangan berisikan informasi-informasi yang penting, dan tidak jarang menjadi satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, pengajuan

pinjaman, dan lain sebagainya. Sehingga para pengguna laporan keuangan menginginkan sebanyak mungkin data yang relevan.

- 101
3. **Kompleksitas (*Complexity*)**, dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak sengaja juga turut meningkat. Oleh karenanya, para pengguna informasi laporan keuangan mengandalkan auditor untuk menilai mutu informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan.
 4. **Keterpencilan (*Remoteness*)**. Para pengguna laporan keuangan seringkali menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi guna untuk memverifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu dan biaya. Sehingga untuk menghemat waktu, para pengguna mengandalkan laporan auditor untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.

17

Langkah – langkah untuk Mengembangkan Tujuan Audit

1. Memahami Tujuan serta Tanggung Jawab Audit

Tujuan audit adalah untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan serta menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Selanjutnya, untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan merupakan tanggung jawab audit. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Auditor yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh

kepastian yang layak bahwa salah saji, apakah yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, yang tidak material.

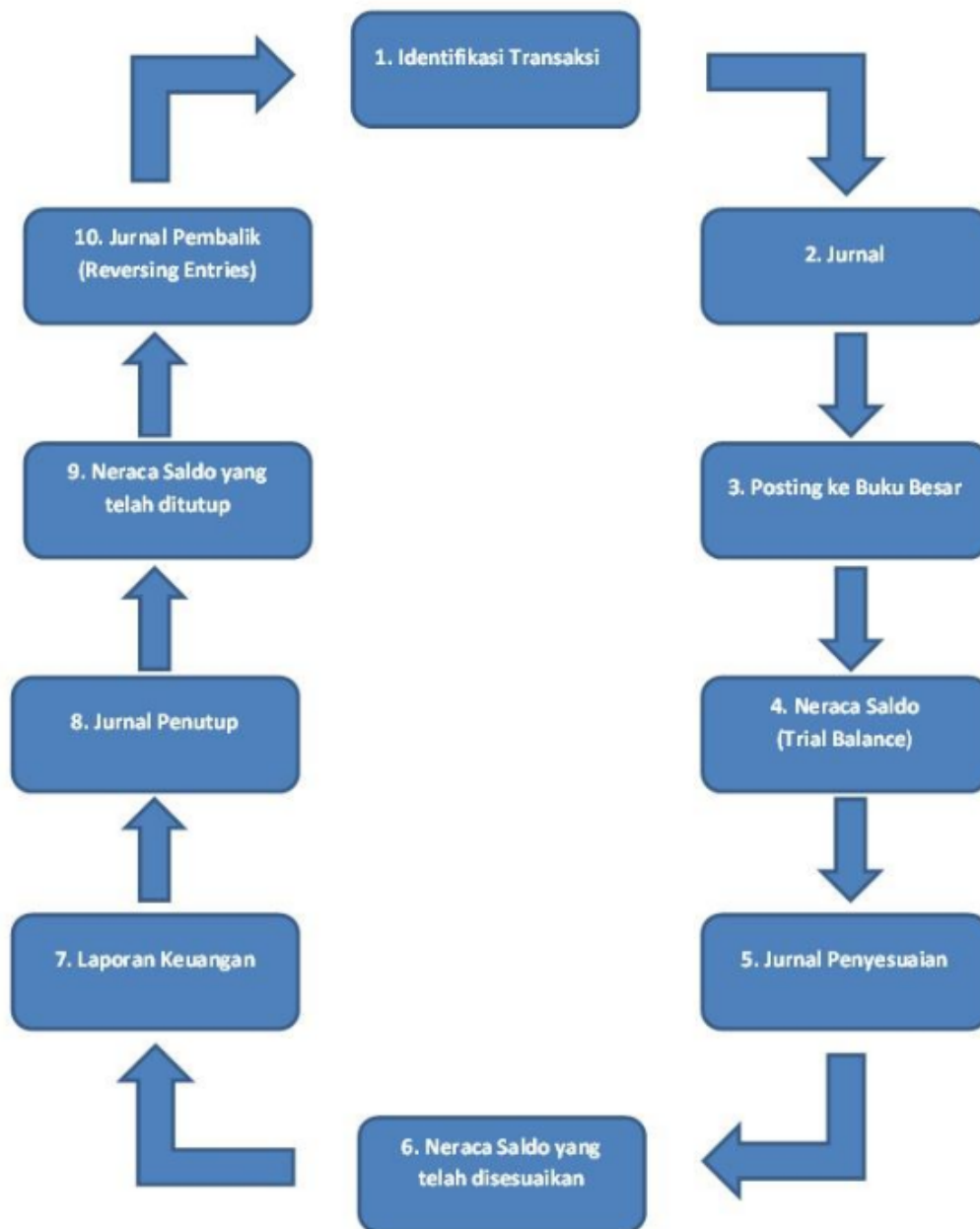
2. Membagi Laporan Keuangan Menjadi Beberapa Siklus

Pendekatan siklus (*cyclus approach*) merupakan cara yang digunakan dalam proses audit untuk tetap memoertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Penggunaan pendekatan siklus ini terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan.

Siklus akuntansi dimulai dari terjadinya transaksi sampai mempersiapkan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Seorang auditor harus memahami siklus dalam laporan keuangan sehingga mampu untuk mendeteksi celah untuk melakukan kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Setelah mengetahui bagaimana siklus akuntansi secara umum, maka auditor akan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Siklus penerimaan kas, merupakan semua transaksi yang menyebabkan saldo kas bertambah. Contoh: transaksi penjualan tunai, pembayaran piutang, memperoleh uang kas yang bersumber dari hutang, dll.
- b. Siklus pengeluaran kas, yaitu semua transaksi yang menyebabkan saldo kas berkurang. Contoh : transaksi pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan, dll.

Masing-masing siklus dalam akuntansi ini akan diperlakukan secara terpisah dan secara independen selama proses audit sampai batas dalam pengelolaan audit yang rumit,



Gambar Siklus Akuntansi

3. Mengetahui Asersi Manajemen Tentang Laporan Keuangan.

Asersi merupakan sebuah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Asersi manajemen digolongkan:

- a. **Asersi Keberadaan atau Keterjadian.** Asersi ini tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah akun asset atau utang entitas benar-benar terjadi pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.
- b. **Asersi Kelengkapan.** Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan telah dicatatnya semua akun dan transaksi ke dalam laporan keuangan.
- c. **Asersi Hak dan Kewajiban.** Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan apakah akun asset (hak) dan hutang (kewajiban) telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar.
- d. **Asersi Penilaian dan Alokasi.** Asersi mengenai penilaian dan alokasi berhubungan dengan apakah akun asset, kewajiban, pendapatan dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang semestinya.
- e. **Asersi Penyajian dan Pengungkapan.** Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah seluruh komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan dengan seharusnya.

4. Mengetahui Tujuan Audit Umum Untuk Kelas Transaksi, Akun dan Pengungkapan.

Auditor melakukan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu dengan menguji transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapannya. Terdapat delapan tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, yaitu sebagai berikut:

- a. **Keterjadian**, semua jumlah saldo yang ada dalam laporan keuangan memang benar-benar ada.
- b. **Kelengkapan**, berkaitan dengan apakah jumlah saldo akun telah dicantumkan semuanya.
- c. **Keakuratan**, menyatakan bahwa semua jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar.
- d. **Klasifikasi**, apakah semua transaksi telah diklasifikasikan ke dalam akun yang tepat.
- e. **Cut off**, apakah semua transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Adanya kesalahan penyajian biasanya dikarenakan munculnya transaksi yang mendekati tanggal neraca.
- f. **Hubungan yang rinci**, memeriksa apakah rincian tiap-tiap saldo akun telah sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun pada buku besar.
- g. **Nilai yang dapat direalisasi**, nilai yang tercantum pada laporan keuangan merupakan nilai yang dapat direalisasi. Tujuannya apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih.

- h. **Hak dan kewajiban**, apakah akun asset (hak) dan hutang (kewajiban) telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar.

17

5. Mengetahui Tujuan Audit Khusus untuk Kelas Transaksi, Akun, dan Pengungkapan

Audit khusus biasanya memiliki tujuan yang hampir sama dengan audit umum. Audit khusus biasanya terdiri audit ketaatan dan operasional. audit khusus bertujuan melihat apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melihat operasional suatu entitas apakah telah berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Adapun aara untuk memenuhi tujuan audit, yaitu sebagai berikut:

- a. **Merencanakan dan Merancang Sebuah Pendekatan Audit.** Untuk setiap penugasan audit, terdapat banyak cara yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti untuk mencapai tujuan audit dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.
- b. **Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantive.** Pengendalian ini terkait dengan akurasi audit, dengan mengevaluasi dan memverifikasi catatan dan dokumen serta bukti audit.
- c. **Melakukan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Rincian Saldo.** Prosedur analitis menggunakan perbandingan untuk menilai apakah saldo akun telah disajikan secara wajar dengan menguji rincian saldo. Prosedur ini dimaksudkan untuk menguji salah saji nominal saldo akun dalam laporan keuangan.
- d. **Menyelesaikan Audit dan Menerbitkan Laporan Audit.** Setelah auditor melaksanakan prosedur audit, maka

auditor akan menggabungkan informasi dari masing - masing prosedur dan tujuan audit untuk memperoleh kesimpulan secara menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Proses penarikan kesimpulan adalah hal yang bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian professional auditor.

Tanggung Jawab Audit

Tanggung Jawab Manajemen Menurut PSA 01 SA 110

"Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan sisi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan audit terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut

Tanggung Jawab Auditor menurut PSA 01 SA 110:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan”. Keyakinan memadai berarti bukan keyakinan yang absolute, menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Alasannya:

1. Sebagian besar bukti audit berasal dari pengujian sample populasi.
2. Penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks, tentunya melibatkan ketidakpastian sehingga auditor harus mengandalkan bukti yang meyakinkan namun tidak menjamin sepenuhnya.
3. Sangat sulit bagi auditor untuk mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan, terlebih lagi jika terjadi kolusi di dalam manajemen.

Tanggung Jawab auditor

1. **Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji material dan tidak material**

Auditor harus membedakan antara dua salah saji, yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Kekeliruan (*error*)

merupakan tindakan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang disengaja. Kecurangan (*fraud*) dibedakan antara menjadi:

- a. **Misapropriasi aktiva (*misappropriation of assets*)**, merupakan penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan karyawan.
- b. **Pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent financial reporting*)**, merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen selama proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mampu mendeteksi kecurangan ini, auditor dituntut untuk memiliki sikap skeptisme profesional yaitu sikap tidak mudah percaya, penuh rasa ingin tahu serta kritis terhadap bukti audit yang ada. Dalam PSA 04 (SA 230), mengenai skeptisme profesional, auditor diharuskan untuk mendesain prosedur auditor untuk dapat menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Skeptisme profesional merupakan sikap, pemikiran dan penilaian yang kritis terhadap bahan dan bukti audit.

2. Tanggung Jawab Auditor untuk Menemukan Tindakan Illegal

Tindakan illegal merupakan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan illegal dibedakan menjadi:

- a. **Tindakan Illegal Berdampak Langsung.** Tindakan melanggar hukum dan peraturan berdampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu.

Contoh: pelanggaran terhadap perhitungan pajak, maka akan berpengaruh secara langsung terhadap saldo akun pajak.

- b. Tindakan Illegal Berdampak Tidak Langsung.** Tindakan melanggar peraturan dan hukum, namun dampaknya tidak secara langsung mempengaruhi laporan keuangan. Contoh : jika perusahaan mengabaikan dan melanggar hukum lingkungan, maka laporan keuangan akan terpengaruh jika perusahaan diharuskan membayar sanksi atau denda.

Selain itu, terdapat tiga tingkat tanggung jawab auditor dalam menemukan dan melaporkan tindakan illegal, yaitu: (1) Pengumpulan bukti jika tidak ditemukan alasan untuk mempercayai telah terjadial tindakan illegal yang berdampak tidak langsung. Contohnya: melalui notulen rapat dewan direksi, wawancara dengan pihak klien; dan (2) Pengumpulan bukti dan tindakan lainnya jika ada alasan untuk percaya bahwa tindakan illegal baik yang berdampak langsung maupun tidak telah terjadi. Kemudian, jika auditor mengetahui adanya tindakan illegal maka seorang auditor perlu melakukan Tindakan sebagai berikut:

- mengidentifikasi dampaknya terhadap laporan keuangan;
- mempertimbangkan pengaruh tindakan illegal tersebut terhadap hubungan kantor akuntan publiik dengan manajemen;
- auditor harus berkomunikasi (secara lisan atau tertulis) dengan komite audit atau pihak lainnya yang berwenang tentang terjadinya tindakan illegal tersebut;

- jika klien menolak memberikan konfirmasi, maka auditor dapat menarik diri dari penugasan.

3. **Tanggung Jawab Auditor Terhadap *Subsequent Event* / Kejadian yang Terjadi Setelah Tanggal Neraca Namun Sebelum Diterbitkannya Laporan Audit**

Auditor bertanggung jawab untuk menjamin bahwa klien telah mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dalam menginformasikan kepada pemakai laporan keuangan atas kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam laporan keuangan tersebut. Auditor juga akan berupaya untuk segera meminta keadaan klien untuk mengeluarkan revisi secepatnya atas laporan keuangan tersebut dengan mencantumkan penjelasan tentang alasan adanya perbaikan atau revisi terhadap laporan keuangan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. **Artikel Pertama**

Judul : *Management control in audit firms – Partners' perspectives*

Penulis : Bernard Pierce, Breda Sweeney

Latar Belakang

1. Adanya perubahan lingkungan audit yang meningkat maka biaya dan prosedur pengendalian perusahaan yang berkaitan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Tujuan studi ini untuk pemeriksaan mendalam tentang

Landasan Teori

1. *Management control literature*

- Simons (2000) mendefinisikan sistem kontrol diagnostik sebagai sistem informasi formal yang manajer menggunakan monitor hasil organisasi dan penyimpangan dari standar kinerja, sedangkan kontrol interaktif sebagai sistem informasi resmi yang melibatkan manajer dalam mengambil keputusan keputusan kegiatan. Dengan kontrol diagnostik kinerja tingkat rendah pada karyawan bisa di pantau dari penyimpangan untuk mencapai target sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan sistem kontrol interaktif digunakan untuk menjelaskan perubahan yang tidak terduga dalam bisnis mereka dan menyarankan rencana.

2. *Cost/quality conflict in audit firms*

- Biaya dikendalikan dengan menggunakan anggaran dan digunakan dalam program audit untuk mampu memenuhi semua kepentingan yang nantinya bisa dievaluasi kinerjanya.

3. *Audit quality controls*

- Kontrol kualitas berkaitan dengan perilaku dan aturan peraturan mengenai bagaimana proses audit dilakukan dan diawasi.
- Proses audit dianggap sebagai ukuran audit (kekuatan) risiko dari litigasi muncul dari kegagalan untuk memastikan proses audit yang dilakukan dengan melihat dokumen klien. Senior audit bekerja untuk mengawasi junior audit dilapangan.

4. *Clan controls and the audit firm*

- *Clan controls* digunakan untuk mendorong staf bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.
- Terdapat kesulitan dalam mengendalikan biaya secara terperinci karena dalam mengontrol kualitas tidak ada langkah yang memuaskan mengenai output dan kesulitan menggunakan kontrol perilaku.

Tujuan dan Metodologi Penelitian

1. *Research objective*

139

- Pengukuran audit tidak hanya dalam pengukuran kualitas audit tetapi juga bagaimana mengacu pada standar audit dan biaya yang kompetitif sesuai target. *Clan controls* dan pengendalian informasi dipandang sebagai hal yang penting.
- Fokus utama adalah pada *partner* yang secara bersama menempati posisi pemilik dan manajemen senior serta usaha memperoleh perspektif tentang elemen formal dan informal sistem kontrol audit perusahaan.

2. *Data collection*

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan semi terstruktur menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada bulan juni-agustus 2002 sekitar 12 mitra audit *bigfour* perusahaan di Irlandia.
- Terdapat panduan wawancara yang berisi cakupan tentang tema dalam studi ini. Kondisi lingkungan dianggap telah mengakibatkan kurangnya staff yang nantinya bisa terkena dampak kualitas audit yang dihasilkan.

3. *Data organisation and analysis*

- Ada beberapa faktor yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu memastikan semua lengkap disetiap wawancara, menganalisis temuaan, analisis penedekatan tertsruktur untuk data analisis dan tabulasi untuk memungkinkan pembaca memperoleh data secara keseluruhan.

Temuan

1. *Background findings on reaction to behaviours and perceived consequences*

- Tabel 1 menyajikan ringkasan singkat dari pandangan utama yang diungkapkan setiap mitra mengenai reaksi temua sebelumnya dan konsekuensi dari perilaku auditor dan audit perusahaan.
- QTB perlu diidentifikasi karena konsekuensinya yang dihasilkan tentang kegagalan akan berisiko tinggi dimasa depan, jika evaluasi kinerja buruk.

2. *Roles of formal and informal controls*

- Pengendalian kualitas secara **formal** dan **informal** diidentifikasi oleh *partner* audit.
- Kontrol dinggap sangat penting dalam lingkungan saat ini untuk memastikan bahwa jasa yang diberikan berkualitas.

3. *Audit review process*

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses audit dianggap sebagai pengendalian utama dalam kualitas audit. *Partner* dan manajer dilibatkan dan membahas pekerjaan audit:

- Ada banyak keterlibatan *partner* dan manajer ditempat kerja sehingga lebih banyak pelatihan dan *review* selama proses audit .
- Perhatian lebih dikhususkan untuk daerah yang dianggap berisiko
- Peninjauan real time dianggap sebagai prosedur review baru untuk bisa mengendalikan tekanan anggaran dan sebagai mitra untuk bisa mengambil keputusan dari anggaran.

Audit Methodology

1. Setiap penugasan audit dilakukan oleh tim audit dengan mengikuti proses dan prosedur yang telah disusun dengan terstruktur. Di masa sekarang dokumentasi audit dilakukan secara elektronik. Kepatuhan terhadap metode yang diterapkan dalam perusahaan dianggap sebagai suatu kontrol terhadap proses audit yang mampu mempengaruhi pemberian opini audit.
2. Manajemen perusahaan baru-baru ini menerapkan *risk- based management*. metode ini dianggap paling baik untuk menerapkan sistem pengendalian terhadap manajer dan karyawan.
3. Auditor akan lebih mudah efisien jika melaksanakan prosedur audit jika telah ada klasifikasi risiko dalam masing – masing segmen bisnis.
4. Pengendalian dalam segmen bisnis ini tujuannya bukan hanya untuk meminimalkan biaya., tetapi juga untuk memenuhi sisi *assurance* bisnis.

5. Walaupun menurut hasil wawancara dengan beberapa manajer di level atas, pendekatan berbasis risiko ini dianggap kurang terstruktur, dan di sisi lain beberapa karyawan perusahaan yang diwawancarai menyatakan pengendalian ini sudah cukup terstruktur.
6. Di dalam audit, akan kecil kemungkinan jika suatu risiko tidak dapat diidentifikasi. Karena sebelum membuat prosedur audit, maka seorang auditor akan melakukan identifikasi dan mengenali bisnis klien beserta risiko yang melekat dan yang akan terjadi.
7. Sebelum melaksanakan penugasan audit, seluruh anggota tim audit akan memperoleh pengarahan mengenai apa yang ada dalam bisnis klien beserta risiko yang melekat. Akan dijelaskan pula mengenai pentingnya tenggat waktu penyelesaian penugasan audit.
8. Di dalam pengarahan itu juga akan dijelaskan bagaimana menerapkan prosedur audit yang baik dan benar.

Pembahasan dan Kesimpulan

1. Adanya kekurangan dalam sistem pengendalian formal, masih bisa ditoleransi oleh *partner* karena ada beberapa faktor seperti adanya risiko yang tidak dapat dideteksi. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas laporan audit, karena para auditor telah melakukan langkah antisipasinya dalam prosedur audit.
2. *Market and bureaucratic controls*
 - Pasar dan birokrasi secara luas mempengaruhi tuntutan akan parameter dan kualitas audit. Permintaan pasar yang tinggi akan membuat klien meminta kualitas

laporan audit yang tinggi sehingga perlu dikembangkan adanya pengendalian terhadap staf auditor.

- Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas, diantaranya adalah standar professional, hukum dan risiko litigasi.
- Adanya perubahan metode dan review prosedur audit, mengharuskan adanya komunikasi antara *partner* dengan staf audit, mengenai lingkup pengujian audit dan fungsi lain yang mendukung opini audit.

3. *Clan Control*

- *Clan control* memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan antara *partner* dengan staff auditnya. Sebuah *clan control* diharapkan mampu menjaga kualitas audit dari sebuah KAP dan *partner* audit bertanggung jawab atas hal ini.

- ***Image management***

Sebuah *image management* sangat penting bagi sebuah KAP sehingga sebuah KAP harus menjaga citra publik yang positif kepada masyarakat. Sehingga peraturan dan prosedur yang ada di dalam KAP wajib dipatuhi oleh semua staf auditor bahkan termasuk *partner*. Mereka harus mengedepankan profesionalitas dengan tetap berpegang teguh terhadap standar profesi akuntan publik yang berlaku. *Image management* sebuah kantor akuntan publik juga dapat terlihat dari kemampuan yang dimiliki oleh auditornya serta laporan audit yang dihasilkannya.

– ***Informal Communication***

Sebuah komunikasi informal diperlukan antara *partner* dengan staff auditnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kendala yang dihadapi selama berada di lapangan dalam melaksanakan penugasan audit. Dengan demikian, seorang *partner* akan mampu menilai bagaimana kualitas audit dan laporan yang dihasilkan oleh staf auditornya.

– **Selection and training process**

Proses perekrutan karyawan sangat penting untuk menyeleksi calon auditor baru dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan sebuah proses pelatihan juga mendukung terciptanya kualitas audit yang tinggi, karena auditor akan dibekali oleh kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan selama menjalankan penugasan audit.

– ***Intuition of audit partner***

Seorang *partner* akan bertanggung jawab terhadap kantor akuntan publik dan kualitas audit yang dihasilkan. Pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan intuisi seorang *partner* dapat digunakan di dalam pembuatan prosedur audit atau bahkan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau solusi jika di dalam penugasan audit terjadi kendala. Hal ini dikarenakan pengalaman *partner* yang bisa dibilang tidak sebentar dalam profesi akuntan publik.

2. Artikel Kedua

Judul : *Auditor's Responsibility and Independence: Evidence From China*

Penulis : Z. Jun Lin

Latar Belakang

1. Adanya skandal Enron membuat munculnya undang-undang baru yaitu Sarbanes-Oxley Act 2002 yang berisi peraturan lebih ketat tentang tata kelola dan pelaporan keuangan dan audit. Serta mendirikan badan baru yang independen yaitu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) diberi mandat untuk mengatur kedisiplinan perusahaan yang di audit auditor.
2. Penelitian ini bermaksud untuk memeriksa tanggung jawab auditor dilihat dari sudut pandang praktisi dan pengaturan ekonomi. Dalam pengaturan kelembagaan audit mempunyai fungsi utama yaitu melayani tujuan tertentu pemerintah administrasi bisnis. Oleh karena audit layanan melayani pemerintah untuk pajak dan retribusi dan kontrol bisnis pada makro ekonomi.
3. CPA di China membentuk akuntansi/audit untuk publik, semua perusahaan di China disponsori oleh departemen untuk biaya, perpajakan, administrasi, properti negara, BUMN dan berbagai industri. karena hal ini personil audit lebih dekat dengan badan pemerintahan serta mereka tunduk terhadap intervensi pemerintah.
4. Masalah muncul di China tentang ambiguitas tanggung jawab auditor dan kurangnya keleluasan sebagai praktisi umum. Umumnya di China CPA diperdayakan untuk

melindungi properti negara dan bunga, hal ini menjadi tanggung jawab auditor tidak diakui dalam substansi.

5. Tugas CPA china menverifikasi modal dan audit keuangan untuk memenuhi perundangan-undangan untuk restrukturisasi bisnis yang berbeda struktur kepemilikan, konversi BUMN ke saham perusahaan, likuidasi bisnis dsb. Oleh karenanya auditor china akan lebih mendapat tinggakt risiko kegagalan bisnis atau kebangkrutan yang dihasilja dari penegakan hukum.

Preposition Study

1. Terdapat perdebatan tanggung jawab auditor dinegara industri selama dua dekade terakhir ini dalam eprtumbuhan akuntansi publik di China, karena negara ini sedang mengalami menuju market-oriented diperekonomiannya. Dalam keyakinan transisi ekonomi cina, keandalan akuntansi informasu adalah penting untuk pengambilan keputusan keuangan bagi pengguna, dan fungsi audit mempengaruhi kesejateraan berbagai pihak. Oleh karena proposisi studi audit pertama adalah sebagai
(P-1): Peran dan manfaat dari audit yang independen positif dengan manfaat auditor untuk masyarakat China.
2. Salah satu fokus utama dari studi adalah untuk menyelidiki apakah persepsi publik dan harapan kaitannya dengan tanggung jawab auditor dalam lingkungan bisnis China. Terjadi kesenjangan harapan yang berlangsung selama dua dekade terakhir ini, audit sebagai alat pelengkap administrasi bisnis swasta dan berharap berrevolusi dengan perubahan dalam sosial dan kondisin ekonomi.
(P-2): Perbedaaan harapan dalam kaitannya dengan tanggung jawab auditor dilingkungan bisnis saat ini

3. Kesenjangan harapan adalah refleksi dari persepsi yang berbeda tujuan audit, kewajiban untuk mendekteksi penipuan dan tanggung jawab untuk kelalaian atau kegagalan audit diberbagai kepentingan. Di China fungsi audit untuk memastikan kepatuhan terhadap pemerintah bisnis undang-undang atau peraturan untuk menjaga kebenaran dan legiti-masi dari catatan akuntansi dalam entitas bisnis individu.
(P-2.1): Persepsi mengenai tujuan independen audit (akun-tansi publik) secara substansial berbeda antara penerima manfaat audit dan auditor China.
4. Auditor china telah melengkapi hukum dan memfasilitasi kontrol untuk pemerintah terhadap operasi bisnis.
(P-2.2): Persepsi mengenai tugas-tugas auditor dalam men-deteksi dan pelaporan penipuan penyimpangan subtansial berbeda antara penerima jasa audit dan auditor di China.
5. Penugasan audit adalah kontrak antara auditor dan bisnis manajemen, banyak kepentingan pihak seperti calon investor, kreditor, dan pemerintah, mungkin bergantung pada hasil audit utnk bisa mengevaluasi kinerja bisnis dan membuat berbagai keputusan. Auditor diharapkan bisa mendeteksi kegagalan oleh pihak ketiga.
(P-2.3): Persepsi mengenai tanggung jawab auditor pihak ketiga kedua belah pihak dalam kegagalan dan kelalain auditor antara penerima manfaat audit dan auditor di China.
6. Independensi auditor di China dibawah dari pengawasan pelaporan keuangan atau skandal akuntansi di Cina dan negara-negara barat lainnya. Akibat hal ini profesi audit di China mendorong untuk menjadi auditor yang independensi.
(P-3): Pentingnya kebebasan auditor yang diakui oleh penerima manfaat audit/klien dan auditor Di China.

Sampel Penelitian

1. Dengan menggunakan alat survei email untuk bisa melihat praktek-praktek yang ada akuntansi publik China, terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan proposisi.
2. Masing-masing berisi pertanyaan dengan masalah peran audit dan tujuan serta kewajiban auditor untuk mendeteksi pemalsuan, independensi auditor.
3. Kuisioner berisi data dari demografis responden seperti pendidikan, spesifikasi pekerjaan, dan pengalaman kerja. Tanggapan setiap pertanyaan dirancang "sangat tidak setuju" , "tidak ada pendapat" atau "netral", "setuju" dengan menggunakan skala 1-5.
4. Survei dengan menggunakan bahasa inggris dan diterjemahkan dalam bahasa China untuk didistribusi di China.
5. Subjek penelitian untuk para investor, kreditor, pejabat pemerintah, manajemen bisnis dan akademis serta praktisi umum.
6. Total 800 kuisioner didistribusikan ke China, 300 dikirim kepada BUMN dan PLC secara acak (1997-1998). Total kuisioner yang kembali ada 209.

Pembahasan

1. Role and Objectives of Auditing Function

Mayoritas responden setuju untuk peran akuntansi publik untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi akuntansi sebuah entitas. Data ini menunjukkan bahwa auditor memberikan dukungan kuat untuk memperluas layanan untuk semua entitas terlepas dari struktur kepemilikan, dan setuju bahwa laporan audit dapat membantu pengguna

untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi bisnis. Secara umum data ini mendukung proposisi (P-1) yang menyatakan bahwa penerima manfaat audit dan auditor diakui penting saat ini pada lingkungan bisnis di China.

2. *Responsibility for Fraud Detection and Communication*

Responden setuju bahwa manajemen harus bertanggung jawab untuk kejujuran dan keandalan laporan. Akuntan publik harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan pelaporan kesalahan dan penipuan dalam audit. Data yang ada menunjukkan bahwa mendukung proposisi (P-2) menyatakan perbedaan harapan berkaitan dengan tanggung jawab auditor mendeteksi penipuan dan pelaporan di China.

3. *Auditor Independence*

Responden mayoritas setuju bahwa auditor (akuntan publik) harus mempertahankan kebebasan dalam pengaudit, dan auditor dituntut untuk meningkatkan independensi.. Pada data ini responden seperti kurang puas dengan status independensi auditor China, yang kini dipertanyakan. Data ini mendukung proposisi (P-3) yang pentingnya kebebasan audit. Para responden percaya bahwa kontrol pemerintah yang secara langsung akan bisa merusak kredibilitas pada jasa audit yang yang mencegga auditor mencapai kemerdekaan/ kebebasam atau tidak memihak.

4. *Subgroup Comparison*

Dalam perekonomian di China terdapat perbedaan besar antara penerima jasa audit terhadap bisnis mereka yaitu pada struktur kepemilikan, kebutuhan informasi, dan pemanfaatan audit layanan, yang dapat mempengaruhi persepsi tanggung jawab auditor dan kemerdekaan. Oleh karenanya respondne

dibagi menjadi sub kelompok kreditor investor, pemerintah, manjer dan akademisi. Semua respondenn mendukung gagasan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk bisa mendeteksi pelaporan dan kewajiban atas *fraud* audit.

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima jasa audit di china setuju bahwa fungsi audit harus independensi demi meningkatkan keandalan laporan keuangan dan berperan positif dalam perekonomian di china.
2. Dalam studi ini menemukan bahwa “*expetation gap*” mengenai tujuan audit bisa dikaitkan dengan pengaturan kelembagaan di China. Dalam perekonomian di China didominasi oleh kepemilikan oleh pemerintah dan oleh karenanya auditor tunduk pada intervensi pemerintah terutama pada kepatuhan audit.
3. Studi ini menemukan bahwa auditor China tidak puas karena dibawak kontrol pemerintahan sehingga meras atidak bisa meningkatkan independensi auditor.
4. Studi ini memiliki keterbatasan yaitu ukuran sample yang relatif kecil karena kesulitasn dalam melakukan survei di China. Tingkat Sampel yang sedikit menajdi berpengaruh pada analisis data.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Audit Quality in ASEAN*

Penulis : Michael Favere

Introduction

1. Artikel ini melaporkan hasil studi tentang kualitas audit di negara yang bersatatus sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
2. Hukum, peraturan, kode profesional dan standar mengenai audit hukum menentukan peran dan posisi auditor, dan mempengaruhi fungsi pasar pemeriksaan di wilayah tersebut.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang lingkungan hukum yang dapat mempengaruhi peran dan posisi auditor hukum di kawasan ASEAN.
4. Dalam penelitian ini akan melihat hubungan antara hukum dan peraturan nasional yang mempengaruhi penunjukan dan pemutusan auditor hukum, kemandirian dan tidak kompatibel masalah yang dihadapi oleh auditor, pelaporan audit, dan tanggung jawab auditor hukum.
5. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang sifat fungsi audit dalam ASEAN dan keandalan informasi keuangan yang diaudit serta menyediakan perbandingan analisis antara negara-negara anggota, penelitian ini akan membantu masyarakat ASEAN untuk menilai kecukupan hukum dan peraturan yang mengatur audit dan profesi akuntansi.

Landasan Teori

1. Ada dua poin untuk penelitian ini. Poin pertama memberikan gambaran tentang hukum yang relevan lingkungan di ASEAN dan didasarkan pada data yang disediakan oleh kantor akuntan public "Big Five".
2. Poin kedua adalah analisis perbedaan utama antara hukum ASEAN dan peraturan, dan dampaknya pada fungsi pasar audit. Pedomannya adalah menggunakan analisis wawasan dari penelitian berbasis ekonomi dalam audit untuk membuat rekomendasi kebijakan publik menggunakan standar audit internasional.
3. Empat dimensi yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup penelitian ini. Pertama, negara-negara yang tercakup dalam studi ini sesuai dengan negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 31 Desember, 1996. Pada tanggal tersebut, negara-negara anggota yang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Laos dan Myanmar yang mengakui ke ASEAN pada 23 Juli 1997 tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini mendefinisikan " entitas yang dikenakan Audit hukum " sebagai perusahaan swasta yang diaudit sebagai persyaratan hukum nasional.. Ketiga, auditor termasuk dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki hak untuk melakukan hukum audit untuk entitas yang didefinisikan di atas. Dan yang terakhir, kuesioner meminta para responden untuk menggambarkan status hukum dan peraturan pada Juni 1997, dan perubahan dalam lingkungan hukum.

Metodologi Penelitian

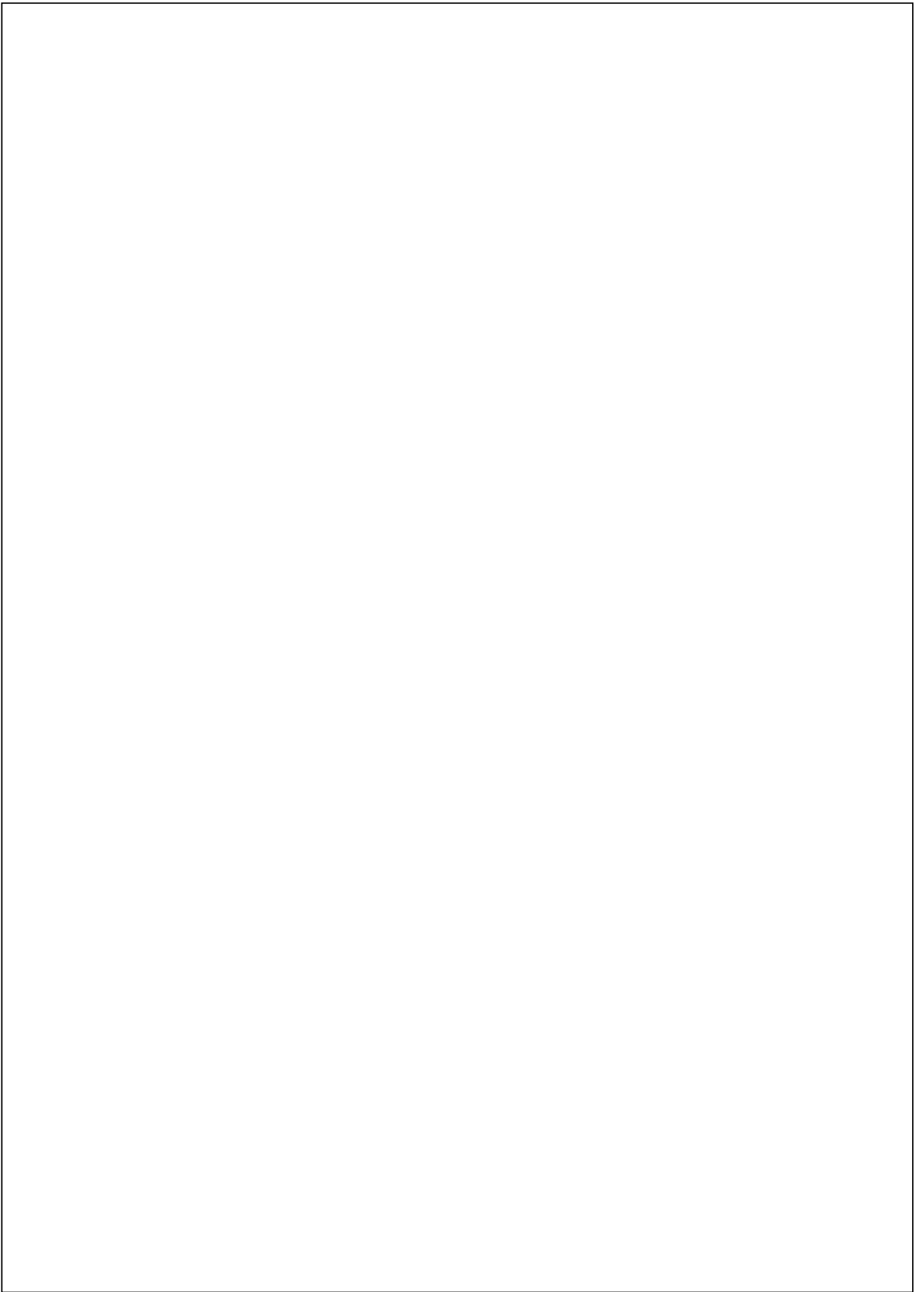
1. Kuesioner menggunakan format pertanyaan terbuka untuk memungkinkan responden lebih fleksibel dan memberi kesempatan untuk menambahkan informasi latar belakang jawaban mereka. Isi dari kuesioner ini mengenai informasi yang berkaitan dengan topik-topik berikut: penunjukan dan pemutusan auditor hukum, maupun kegiatan yang tidak kompatibel, hubungan auditor hukum dengan perusahaan, kewajiban auditor hukum terhadap Perusahaan dan ketiga pihak, dan isi dari laporan audit.
2. Setelah menerima jawaban kuesioner ternyata beberapa kuesioner tidak mampu menjawab sejumlah isu spesifik dan terdapat beberapa tanggapan yang diperlukan penjelasan lebih lanjut, maka peneliti memberikan kuesioner kedua kepada perwakilan negara ASEAN.
3. Informasi yang diberikan oleh kedua kuesioner kemudian diringkas dan gambaran dikirim ke perwakilan nasional untuk memastikan bahwa data kompilasi telah benar.
4. Untuk meningkatkan keakuratan informasi, kuesioner dikirimkan ke badan-badan profesional dan pemerintah terkait yang mengatur audit profesi di masing-masing negara ASEAN untuk diperiksa. Secara total, 15 profesional dan badan pemerintah, termasuk Federasi ASEAN Akuntan (AFA), yang terlibat dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Kompetensi auditor hukum memiliki hubungan langsung dengan kualitas audit dan negara ASEAN harus mengadopsi persyaratan yang lebih ketat dan berlaku untuk seluruh Negara yang menjadi anggota.

2. Terkait pelaksanaan audit, ulasan mutu eksternal (oleh rekan atau peraturan badan) adalah alat yang sangat berharga dan penting untuk meningkatkan kualitas audit. Badan pengawas ASEAN harus mempertimbangkan peningkatan kualitas audit dengan meminta, minimal, peer review berkala untuk semua perusahaan audit, sebagaimana ditentukan oleh Pernyataan Kebijakan Dewan IFAC (1992) dan ISA 220. Secara optimal, perusahaan melakukan audit hukum dan perusahaan publik harus tunduk pada proses review kualitas regulasi.
3. Kewajiban pelaporan auditor hukum sangat bervariasi di antara negara-negara ASEAN. Sehingga keseragaman atau keharmonisan persyaratan pelaporan harus menciptakan iklim akuntabilitas kepada investor dan tanggung jawab publik. Langkah ini dilakukan agar terciptanya transparansi dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu bisnis harus meningkatkan kualitas informasi keuangan yang diaudit. Ada juga sedikit kesepakatan dalam bentuk dan isi laporan audit.
4. Keseimbangan diperlukan antara memberikan insentif yang cukup bagi auditor untuk memberikan high kualitas audit dan menghindari penurunan jasa audit karena biaya litigasi berlebihan (Palmrose, 1988). Mengingat pertimbangan tersebut, negara-negara ASEAN harus mempertimbangkan bergerak untuk mengatur beberapa fitur berikut: (1) berbagai sanksi profesional sesuai dengan tingkat keparahan kondisi sehingga menimbulkan seperti sanksi, (2) kemungkinan litigasi oleh auditee, pemegang saham dan ketiga lainnya

- pihak, (3) topi kewajiban yang wajar, dan (4) diperlukan jaminan asuransi profesional
5. lingkungan hukum yang dihadapi oleh auditor hukum saat ini terlalu beragam untuk memastikan kualitas audit yang seragam di seluruh wilayah. Sehingga badan profesional dan pemerintah ASEAN harus berusaha untuk menerapkan standar berkualitas tinggi yang berlaku untuk semua auditor hukum di wilayah tersebut.
 6. negara-negara akan bergantung pada peningkatan investasi asing dan perdagangan global pada pengembangan ekonomi masa depan, Sehingga badan profesional dan pemerintah ASEAN harus berusaha untuk meningkat kualitas audit, melalui suatu peningkatan hukum dan peraturan untuk mencocokkan standar audit internasional saat ini (Schwartz, 1997). Manfaat utama bagi negara-negara ASEAN harus meningkatkan kepercayaan investor dalam pasar keuangan mereka.



BAB VI BUKTI AUDIT

Pengertian Bukti Audit

1. Bukti audit adalah segala bentuk informasi baik berupa angka maupun informasi penguat yang lain yang relevan dengan penyajian laporan keuangan, sebagai dasar auditor untuk memberikan opini.
2. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan auditor dalam mendukung semua argumentasi yang menguatkan dasar pengambilan opini, kesimpulan dan rekomendasi auditor dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun tidak semua informasi berguna bagi auditor, sehingga informasi tersebut harus dipilih.
3. Pembahasan bukti audit ini didasarkan pada Standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu "Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Tipe Bukti Audit

1. Tipe Data Akuntansi

- a. **Pengendalian Internal.** Pengendalian internal dibentuk untuk mampu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kuat dan lemahnya pengendalian internal akan mempengaruhi jumlah bukti audit yang dibutuhkan. Semakin kuat pengendalian internal maka bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bukti yang dibutuhkan jika pengendalian internal klien lemah.
- b. **Catatan Akuntansi.** Jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Maka, saat auditor menemukan sejumlah saldo pada suatu akun, maka auditor akan menelusuri dan memverifikasi saldo yang tercantum tersebut dengan dokumen pendukung dan catatan akuntansinya.

2. Informasi Penguat

- a. **Bukti Fisik,** merupakan bukti yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan langsung oleh auditor.
- b. **Bukti documenter,** tipe bukti dokumenter dibuat dari kertas bertuliskan huruf atau angka atau symbol. Jika dilihat dari sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
 - **Bukti documenter yang dibuat dari pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor.**

- Bukti documenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien.
 - Bukti documenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.
- c. Perhitungan Sebagai Bukti.** Perhitungan sendiri oleh auditor dalam membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien dan bersifat kuantitatif. Perhitungan yang dilakukan auditor, berupa:
- *Footing*, adalah pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal.
 - *Cross-footing*, adalah pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal.
 - Bukti ketelitian perhitungan biaya depresiasi.
 - Bukti ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham, taksiran pajak perseroan, dll.
- d. Bukti Lisan.** Permintaan keterangan dengan lisan menunjukkan situasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan pengumpulan bukti audit lain yang bisa menguatkan. Hasil bukti lisan ini selanjutnya akan didokumentasikan dalam bentuk informasi tertulis. Dalam mengajukan pernyataan, auditor harus berpegang teguh pada standar dan prosedur yang berlaku. Auditor tidak boleh penyelidikan silang pada klien dan tidak boleh memberi tekanan dalam memperoleh informasi.
- e. Perbandingan.** Untuk menentukan akun atau transaksi yang telah dipisahkan guna untuk penyelidikan lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, pendapatan dan beban dengan saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Bukti

6
audit berupa perbandingan dan rasio dikumpulkan oleh auditor pada awal audit dalam membantu penentuan objek audit memerlukan penyelidikan mendalam dan diperiksa pada akhir audit untuk menguatkan kesimpulan atas dasar bukti lain. Bukti berupa konfirmasi (*confirmation evidence*) merupakan jawaban tertulis atau secara lisan dari pihak ketiga independen yang memverifikasi kecermatan informasi yang diminta oleh auditor. Informasi ini bersifat faktual dan memiliki keandalan tinggi. Contoh : konfirmasi bank, piutang. Pernyataan tertulis (*written representation*) adalah pernyataan dibuat dan ditanda tangani orang yang bertanggung jawab dan mengetahui tentang hal yang perlu ditegaskan. Bukti ini dibedakan dengan konfirmasi bahwa bukti ini berasal dari dalam atau luar perusahaan. Selain itu bukti ini lebih bersifat subjektif mengenai sesuatu hal dari informasi yang sebenarnya. Contoh : surat pernyataan manajemen klien

- f. **Bukti dari Spesialis**, spesialis merupakan seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang lain selain akuntansi dan auditing, misal: pengacara, insinyur, appraisal.

6 Kecukupan Bukti Audit

Cukup atau tidaknya bukti audit terkait dengan banyaknya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor untuk menentukan kecukupan bukti audit antara lain:

1. Materialitas dan Risiko

Akun-akun dalam laporan keuangan yang memiliki jumlah saldo besar dan memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadi salah saji, maka auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti daripada akun yang bersaldo lebih rendah dengan risiko salah saji yang lebih kecil. Akun-akun dengan saldo yang material, maka auditor akan mengumpulkan lebih banyak bukti dibandingkan dengan akun-akun yang dianggap tidak bersaldo material.

2. Faktor ekonomi

Pengumpulan bukti audit dibatasi oleh faktor waktu dan biaya. Auditor harus mempertimbangkan faktor ekonomi di dalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Pertimbangan ekonomi yang diambil oleh para auditor yaitu *cost and benefit*.

3. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Dalam pemeriksaan unsure-unsur dalam laporan keuangan seringkali digunakan sampling audit. Pada sampling audit, auditor memilih acak sebagian anggota populasi yang akan diperiksa karakteristiknya. Semakin besar populasi semakin banyak jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika anggota populasi memiliki karakteristik yang heterogen, maka semakin banyak pula bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor.

Kompetensi Bukti Audit

1. Kompetensi data akuntansi

Catatan akuntansi yang andal dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal yang lemah seringkali tidak mampu mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi.

2. Kompetensi Informasi Penguat

Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh:

- a. **Relevansi**, faktor relevansi berarti bahwa bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Auditor harus memperoleh bukti sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan.
- b. **Sumber**, bukti audit yang berasal dari luar entitas klien biasanya merupakan bukti yang memiliki kompetensi yang tinggi. Bukti audit yang diperoleh dengan cara informasi secara langsung yaitu dengan cara pemeriksaan tangan pertama, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor.
- c. **Ketepatan waktu**, ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh auditor. Untuk akun-akun yang berkaitan dengan asset lancar, utang lancar, dan akun laba-rugi, auditor harus memperoleh bukti klien telah melakukan *cut off* terhadap transaksi kas, penjualan, dan pembelian pada tanggal neraca.
- d. **Objektivitas**, bukti yang bersifat objektif biasanya lebih andal jika dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Bukti yang diperoleh dari luar entitas klien biasanya bersifat lebih objektif.

Bukti Audit sebagai Dasar Opini Auditor

Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa factor berikut:

1. Pertimbangan Professional

Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh IAI berisi persyaratan tentang bukti audit dan memberikan pedoman tentang cara yang harus dilakukan oleh auditor untuk memenuhi

persyaratan mengenai penerapan mutu dan jumlah bukti audit yang diperlukan, dan auditor harus memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan terhadap PSA.

2. Integritas Manajemen

Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan mengendalikan bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karenanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen yang memiliki integritas yang tinggi akan meminimalkan keraguan auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

3. Kepemilikan Publik VS Terbatas

Auditor umumnya memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit laporan keuangan perusahaan yang telah *go public* dibandingkan dengan audit terhadap perusahaan dengan bentuk PT tertutup. Hal ini dikarenakan audit laporan keuangan perusahaan *go public*, informasi di dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh kalangan yang lebih luas dibandingkan dengan pemakai laporan auditan perusahaan tertutup

4. Kondisi Keuangan

Jika suatu perusahaan sedang dalam keadaan *distress* dan dalam proses kebangkrutan, maka beberapa pihak akan menyalahkan auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena auditor dinilai gagal dalam mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan memberi sinyal mengenai memburuknya kondisi perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus mampu mempertahankan opini atas laporan keuangan audit dan mutu pekerjaan audit yang sudah dilaksanakan.

Pendekatan Pengumpulan Audit

Pengumpulan bukti dilakukan dari dua arah secara simultan yaitu *top-down* dan *bottom – up*, berikut penjelasannya.

1. Bukti Audit *Top-Down*

Pendekatan *top down* berfokus kepada perolehan pemahaman bisnis dan industri klien, tujuan dan sasaran manajemen, penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan, keunggulan kompetitif klien, proses bisnis klien yang utama dan *cash flow* yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar auditor memperoleh pengetahuan tentang perusahaan klien dan mengembangkan ekspektasi auditor terhadap laporan keuangan.

2. Bukti Audit *Bottom-Up*

Pendekatan *bottom – up* berfokus pada pengujian secara langsung terhadap transaksi, saldo akun dan sistem yang mencatat transaksi dan menghasilkan saldo-saldo akun. Tujuannya adalah agar auditor memperoleh bukti-bukti pendukung yang mendukung transaksi dan saldo-saldo akun dalam laporan keuangan.

Dokumentasi Bukti Audit (Kertas Kerja Audit)

Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat. Manfaat utama dari kertas kerja audit antara lain:

1. Penunjang utama laporan audit;
2. Dasar bagi supervise
3. Dasar bagi perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. Pedoman pokok isi kertas kerja, yang memuat:

- Bukti yang menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing
 - Bukti yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dan informasi yang dilaporkan sesuai dengan catatan klien
 - Penjelasan mengenai keputusan yang diambil auditor terhadap pengecualian
 - Komentar/kesimpulan mengenai aspek lainnya
- b. Kuantitas dan Bentuk, faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas, bentuk, isi antara lain:
- Sifat dan tujuan penugasan
 - Sifat laporan audit
 - Sifat laporan keuangan, daftar atau informasi lainnya yang diperlukan untuk pembuatan laporan
 - Sifat dan kondisi catatan klien
 - Tingkat risiko pengendalian
 - Kebutuhan tertentu seperti untuk supervisi dan review
- c. Filing, terdiri dari:
- Permanent file: berisi data yang bersifat historis dan berkelanjutan
 - Copy dokumen penting
 - Informasi mengenai penilaian struktur internal control
 - Hasil analytical prosedur
 - Current file: berkas dibuat dan digunakan untuk tahun buku yang bersangkutan
 - Audit program
 - Informasi umum
 - *Working trial balance*
 - *Lead schedule*

Keputusan Yang Harus Diambil Auditor Terkait Bukti Audit

1. **Penentuan Prosedur Audit yang Akan Digunakan.** Dalam pengumpulan bukti audit, auditor menggunakan prosedur audit yang disajikan berikut :
 - a. Hitung penerimaan kas yang belum disetorkan di tanggal neraca dan awasi uang kas sampai disetoran ke bank.
 - b. Minta *cut-off bank statement* dari bank untuk jangka waktu dua minggu sesudah tanggal neraca.
 - c. Pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien.
2. **Penentuan Besarnya Sampel.** Banyak unsur yang harus diuji oleh auditor dalam setiap prosedur audit. Besarnya sampel berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dan dari prosedur yang satu dengan yang lain.
3. **Penentuan Unsur yang Dipilih Sebagai Anggota Sampel.** Setelah menentukan besarnya sampel, auditor harus memutuskan unsur yang dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa.
4. **Penentuan Waktu yang Cocok dalam Melaksanakan Prosedur Audit.** Audit laporan keuangan meliputi jangka waktu biasanya 1 tahun, auditor mulai mengumpulkan bukti audit awal tahun. Klien biasanya menghendaki pekerjaan audit diselesaikan dalam jangka waktu satu minggu dengan tiga bulan setelah tanggal neraca.

Prosedur Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor

1. **Inspeksi,** merupakan pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan-catatan atau kondisi fisik sesuatu. Inspeksi

terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap, auditor dapat menaksir keaslian dokumen, atau mendeteksi adanya perubahan yang mungkin dilakukan.

2. **Pengamatan**, merupakan prosedur audit yang dilakukan auditor untuk melihat pelaksanaan kegiatan.
3. **Konfirmasi**, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan bagi auditor dalam memperoleh informasi langsung dari pihak ketiga.
4. **Permintaan keterangan**, adalah prosedur audit yang dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan adalah bukti lisan dan dokumenter.
5. **Penelusuran**, auditor melakukan penelusuran informasi dimulai dari awal data direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.
6. **Pemeriksaan dokumen pendukung**, merupakan prosedur audit yang meliputi:
 - a. Inspeksi dokumen-dokumen yang mendukung transaksi atau data keuangan dalam menentukan kewajaran dan kebenarannya.
 - b. Membandingkan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi terkait.
7. **Perhitungan**, perhitungan fisik pada sumber daya berwujud seperti kas dan pertanggung jawaban untuk formulir bernomor urut tercetak.
8. **Scanning**, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur yang tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. **Pelaksanaan ulang**, ialah pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh klien.
10. **Teknik audit berbantuan komputer (*computer-assisted audit techniques*)**, merupakan catatan akuntansi klien dilaporkan dalam bentuk media elektronik. Auditor menggunakan teknik audit berbantuan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit seperti yang dijelaskan diatas.

50

Situasi Audit yang Mengandung Risiko Besar

1. **Lemahnya Pengendalian Internal.** Pengendalian internal menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Semakin kuat pengendalian internal maka bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan bukti yang dibutuhkan jika pengendalian internal klien lemah.
2. **Kondisi Keuangan yang Tidak Sehat.** Suatu perusahaan yang sedang mengalami *distress* akan mengalami kecenderungan untuk menunda melakukan penghapusan piutang, sehingga auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait hal ini.
3. **Manajemen yang Tidak Dapat Dipercaya.** Auditor harus terlebih dahulu memiliki informasi mengenai latar belakang manajemen perusahaan klien. Karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disajikannya dan keandalan informasi yang disampaikan.
4. **Penggantian Auditor.** Jika klien mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas, maka bisa saja diakibatkan oleh adanya ketidakpuasan klien terhadap kinerja auditor, namun jika

22

klien terlalu sering mengganti auditor, maka hal ini bisa diindikasikan bahwa adanya perselisihan antara auditor dengan klien mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

5. **Perubahan Tarif Atau Peraturan Pajak Atas Laba.** Jika terjadi perubahan peraturan mengenai tarif pajak, maka akan terjadi perbedaan penafsiran dan penggantian prinsip akuntansi serta terjadi transaksi yang tidak konsisten sehingga membuat perusahaan melakukan pergeseran pengakuan pendapatan yang pada akhirnya mengakui besarnya pajak atas laba.
6. **Sifat Usaha yang Spekulatif.** Auditor melaksanakan audit laporan keuangan yang kegiatannya bersifat spekulatif, akan menghadapi risiko yang relatif lebih besar dibandingkan jika auditor mengaudit perusahaan yang kegiatannya relatif stabil.
7. **Transaksi Perusahaan Klien yang Kompleks.** Perusahaan klien melakukan transaksi usaha rumit dan kompleks, sehingga perusahaan tersebut mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan transaksi secara konvensional.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

Artikel Pertama

Judul : *Enforcement release evidence on the audit confirmation process: Implication for standard setters*

Penulis : Diane Janvrin

Latar Belakang

1. Tugas auditor adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti melalui prosedur.
2. Salah satu prosedur yang sering digunakan yaitu proses konfirmasi audit yang melibatkan bukti langsung dari pihak ketiga yang membenarkan pernyataan-pernyataan relevan tentang saldo rekening, transaksi, dan pengungkapan
3. Peneliti meneliti tentang efektivitas proses dari konfirmasi audit, yang sebelumnya mengalami kegagalan dalam hasil audit.

A Brief History of Confirmation Standards

Di AS terdapat standart konfirmasi yaitu SAS No 67 yang dikeluarkan tahun 1991 tentang konfirmasi piutang. DI AS (AICPA) menambahkan standar untuk bisa mengkonfirmasi angsuran pinjaman (AU 330,24) Saldo kas (AU 330.10), Account payable (AU 330.13) dan barang konsinyasi (AU 330.12)

Audit Confirmation Process

Konfirmasi yang melibatkan piutang, dan auditor kurang tepat dalam menentukan konfirmasi maka mereka melakukan alternatif audit produser (AICPA, 2008 , AU 330.34-35). Untuk meminimalkan kemungkinan bahwa hasil akan menjadi bias karena adanya intersepsi dan perubahan permintaan konfirmasi maka auditor disarankan untuk melakukan kontrol atas permintaan kepada pihak ketiga (AU 330.28).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini meneliti AAERS berkaitan dengan proses konfirmasi audit. Terdapat AAERs 2500 tahun 1982-2006, peneliti mengidentifikasi 113 konfirmasi terkait dari AAERs.

Analysis of Confirmation-Related AAERs

Dalam pemeriksaan mengenai AAERs menemukan isu berkaitan dengan regulator dan efektivitas dari proses konfirmasi audit, yaitu:

1. Determine if confirmations are appropriate

Menentukan apakah konfirmasi telah sesuai dengan bukti-bukti yang relevan dan bisa mengurangi risiko. Sebagai contoh pada AAERs yang berhubungan dengan konfirmasi

- a. E-safety world (2005), auditor gagal mengkonfirmasi permintaan mengenai keberadaannya piutang. Biasanya dalam bentuk saham sebagai pengganti uang tunai.
- b. Vista (2001-2004), Terdapat penjualan fiktif auditor gagal meninjau pesanan/pembelian, penjualan, faktur, dokumen pengiriman atau kas
- c. First America Health Concepts (2005) , tentang perbedaan antara buku besar dengan neraca saldo yang tidak seimbang, FAHC yang melebihkan piutang tahun 1999.

2. Document decision to forego confirmations

Pada standar audit AS saat ini memungkinkan auditor untuk mengorbankan konfirmasi jika kondisinya seperti ini:

- a. Piutang usaha tidak bersifat material dalam laporan keuangan.
- b. Konfirmasi dinilai tidak efektif.
- c. Auditor lemah dalam menilai *inherent risk* dan *control risk*.

ISA 505 menunjukkan bahwa auditor memepertimbangkan apakah permintaan memiliki implikasi mengenai integritas atau menunjukkan implikasi mengenai integritas dari manajemen. AAERs melibatkan manajemen audit ketika account tertentu tidak bisa dikonfirmasi contohnya:

3. *Select items to confirm*

Auditor bisa memilih untuk konfirmasi atau mereka memilih menguji seluruh populasi. Kesimpulan yang salah akan terjadi jika auditor gagal dalam memilih sample.

4. *Design confirmation request*

Auditor bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga yang mereka percaya memiliki pengetahuan tentang informasi. Auditor harus memikirkan pertimbangan efek dari informasi pada desain pemrintaan efek dan mengevaluasi hasil termasuk apakah prosedur lain diperlukan (AICPA, AU 33.27). Contoh yang berkaitan dengan desain **confirmation request**

5. *Communicate request to third party while maintaining control over request*

Konfirmasi dilakukan dengan mengirimkannya via pos. Pada standars audit di AS mencatat bahwa proses manual konfirmasi menjadi kurang kompeten karena tidak adanya kontrol proses konfirmasi. Dan sekarang dengan adanya kemajuan teknologi auditor menggunakan faks, konfirmasi elektronik, e-mail atau telepon untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga.

6. *Follow up with second request or perform alternative audit procedures*

Ketika permintaan konfirmasi belum menerima tanggapan, maka auditor menindaklanjuti permintaan ke tiga kali, dan jika

belum menerima tanggapan maka auditor umumnya akan menerapkan prosedur alternatif saldo untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat rendah. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan AAERs dalam *second request or perform alternative audit procedures*: (a) California Micro Devices (2003); (b) Flight Transportation (1985); (c) Alpex Computer Corporation (1984)

Kesimpulan

1. Peneliti meninjau bukti AAERs mengenai proses konfirmasi audit dan mempertimbangkannya dengan memperluas konfirmasi saldo selain account piutang
2. mengidentifikasi terkait kapan konfirmasi harus digunakan, menggunakan otentifikasi elektronik untuk konfirmasi tanggapan.
3. Peneliti menemukan beberapa contoh dimana auditor tidak melakukan konfirmasi apada account, dan beberapa kasus AAERs terlibat kasus antara audit dan pelanggan/vendor. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah auditor mempunyai independensi terkait konfirmasi terhadap pihak ke tiga. Dengan demikian panduan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga harus bisa dijamin dan standar menyangkut otentifikasi juga harus tepat.
4. Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini:
 - a. Penelitian ini tidak mencakup semua masalah penting mengenai proses konfirmasi audit.
 - b. Sulitnya kasus kolusi ditemukan

Oleh karenanya dengan adanya perubahan lingkungan pada ekonomi dan politik penting untuk kita memahami prosedur audit, proses konfirmasi.

BAB VII

PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALISIS

Perencanaan Audit

1. Perencanaan Audit meliputi pengembangan strategi pelaksanaan menyeluruh dan ruang lingkup Audit yang diharapkan.
2. Standars pelaksanaan pekerjaan lapangan pertama menyatakan : bahwa semua pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika terdapat asisten terlebih dahulu harus disupervisi dengan semestinya.

Terdapat 3 alasan utama tentang perlunya perencanaan audit :

1. Auditor bisa memperoleh bukti yang memadai sesuai dari kondisi pada saat audit berlangsung.
2. Membantu menjaga agar biaya audit tetap wajar.
3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Dalam perencanaan Audit, yang harus diperimbangkan Auditor adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang ada kaitannya dengan bisnis entitas maupun industri yang menjadi tempat usaha.
2. Adanya Kebijakan serta prosedur akuntansi entitas tersebut.
3. Penggunaan Metode yang biasa digunakan oleh entitas dalam pengolahan informasi akuntansi, dan juga adanya penggunaan jasa maupun organisasi dari luar dalam upaya pengolahan informasi akuntansi diperusahaan tersebut.
4. Harus melakukan pemcanaan untuk tingkat risiko pengendalian yang akan direncanakan.
5. Adanya Pertimbangan awal dalam menentukan tingkat materialitas untuk tujuan audit.
6. Terdapat penyesuaian dalam akun/pos laporan keuangan (jika diperlukan).
7. Adanya Kondisi dimana diperlukannya perluasan ataupun perubahan ketika melakukan pengujian audit, seperti tentang adanya risiko kekeliruan/kecurangan yang bersifat material atau dengan adanya transaksi antar pihak-pihak (mempunyai hubungan istimewa).
8. Pada Sifat laporan Auditor diharapkan bahwa laporannya berisi: laporan Auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada Bapepam, laporan khusus dibuat untuk penggambaran dari kepatuhan (klien) terhadap kontrak perjanjian yang telah dibuat.

Pada perencanaan audit, seorang auditor harus bisa mempertimbangkan sifat, lingkup, pekerjaan harus dilakukan seperti halnya yaitu membuat/melaksanakan program audit yang dilakukan secara tertulis dengan satu set program audit tertulis yang ditujukan untuk setiap audit.

Program audit dibuat harus bisa menggambarkan secara terperinci prosedur audit yang menurut auditor melalui tingkat keyakinan diperlukan untuk bisa mencapai tujuan dari audit. Dari program audit serta tingkat kegiatannya dibuat dengan terperinci sesuai dengan keadaan dan bersifat variasi. Selama berlangsungnya proses audit, perubahan kondisi menyebabkan terjadinya perubahan prosedur audit yang sudah direncanakan.

Terdapat 8 bagian utama dalam perencanaan audit yaitu :

1. Menerima kliennya dan melaksanakan Perencanaan audit awal
2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang/ peahaman dari bisnis klien
3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum dari klien
4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan/awal
5. Menentukan materialitas dan risikonya
6. Memahami struktur pengendalian intern
7. Memperoleh informasi untuk menilai risiko kecurangan
8. Mengembangkan rencana program audit secara keseluruhan

Terdapat dua risiko audit :

1. Risiko audit yang bisa diterima/ *acceptable audit risk* yaitu pengukuran dari auditor seberapa besar auditor bisa menerima bahwa laporan keuangan tersebut akan bisa salahsaji secara material disaat audit telah selesai dan auditor telah berpendapat Wajar tanpa pengecualian.
2. Risiko Inheren yaitu ukuran dari penilaian auditor terhadap kemungkinan pada salah saji yang bersifat material di akun saldo sebelum auditor bisa mempertimbangkan pengendaliann internal.

Penjelasan terkait perencanaan Audit:

1. Perencanaan audit awal

Disini audit melibatkan 4 macam apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit:

- a. Auditor harus bisa memutuskan untuk menerima klien baru atau melanjutkan memberi pelayanan terhadap klien yang ada sekarang.
- b. Auditor bisa mengidentifikasi kenapa klien membutuhkan jasa audit
- c. Guna menghindari adanya kesalahpahaman, maka auditor wajib memahami persyaratan penugasan yang telah ditetapkan oleh klien.
- d. Auditor disini mampu mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk dalam penugasan staff.

2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang/ pemahaman dari bisnis klien

Dalam memperoleh Informasi mengenai latar belakang digunakan berbagai cara diantaranya adalah sbagai berikut:

Memahami Bidang Usaha dan Industri Klien

Dalam penginterpretasikan informasi yang didapat selama audit secara memadai, penting pihak auditor untuk bisa memahami industry/bisnis klien. Tiga alasan perlunya pemahaman yang baik atas industry klien, yaitu :

- a. Terdapat Banyak industry yang mempunyai aturan akuntansi khas/bervariasi yang harus dipahami oleh auditor untuk mengevaluasinya apakah laporan keuangan pada klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia. Misalnya, jika

auditor mengaudit badan pemerintah, maka auditor harus mampu memahami aturan-aturanyang berlaku pada akuntansi pemerintahan.

- b. Auditor harus mampu melakukan pengidentifikasi pada risiko dalam industri yg bisa mempengaruhi penetapan risiko audit yang bisa diterima.
- c. Risiko bawaan pada hakikatnya sama seluruh klien dalam industri yang bersangkutan. Pemahaman risiko akan dapat membantu auditor dalam pengidentifikasian risiko bawaan dari klien. Contoh antara lain pada risiko bawaan yaitu keusangan persediaan dalam industri rumah mode, risiko bawaan kolektabilitas pada piutang usaha di industri pinjaman konsumen.
- d. Pengetahuan tentang industri klien diperoleh dari berbagai cara, yaitu diskusi dengan auditor sebelumnya (yang mengaudit tahun sebelumnya) dan dengan auditor yang sedang melakukan penugasan serupa dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama pegawai klien. Meninjau pabrik dan kantor serta fasilitas untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai bidang usaha dan operasi klien.
- e. Berdiskusi dengan pegawai luar pada bidang akuntansi selama proses peninjauan audit kan berguna dalam mendapatkan perspektif lebih luas. Peninjauan langsung dilokasi fisik perusahaan akan membantu auditor memahami pengamanan fisik atas aktiva serta menginterpretasikan pada data akuntansi memberikan kerangka acuan dalam visualisasi aktiva.

- f. Menelaah Kebijakan Perusahaan perusahaan akan sangat berguna dalam Keputusan-keputusan dasar yang menyangkut kebijakan seperti kebijakan tentang pengendalian intern, pelepasan sebagian dari usaha, adanya kebijakan kredit, pinjaman ke perusahaan afiliasi, dan kebijakan akuntansi untuk mencatat aktiva dan pengakuan pendapatan, dievaluasi dengan teliti sebagai bagian audit untuk menetapkan apakah manajemen dapat memperoleh wewenang dari dewan komisaris untuk membuat keputusan tertentu serta memberi keyakinan bahwa keputusan manajemen tercermin di laporan keuangan.
- g. Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi antara klien dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa seperti : transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan induk dengan perusahaan anak, tukar menukar peralatan antara dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, dan pinjaman kepada para pegawai. Karena hubungan istimewa harus diungkapkan maka penting untuk seluruh pihak yang mempunyai hubungan istimewa diidentifikasi dan dimasukkan kedalam berkas permanen pada awal penugasan auditor. Hal yang umum dilakukan biasanya dengan menanyakan kepada pihak manajemen, menelaah arsip modal, memeriksa daftar pemegang saham untuk mengidentifikasi para pemegang saham utama.
- h. Mengevaluasi kebutuhan akan Spesialis dari Luar, Jika auditor menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, perlu bagi auditor untuk menghubungi spesialis. Contohnya: seorang spesialis berlian diperlukan

untuk menilai biaya penggantian berlian, seorang spesialis aktuaris untuk bisa menetapkan kelayakan nilai yang tertulis dari cadangan kerugian asuransi, maupun konsultasi dengan pengacara untuk dalam interpretasi hukum sebuah kontrak

3. Memperoleh Informasi Mengenai Kewajiban Hukum Klien/risiko bisnis klien

Tiga dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan Adalah:

- a. akta pendirian dan anggaran perusahaan sebagai dokumen penting, untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri.
- b. risalah rapat direksi, komisaris, dan pemegang saham yang berisi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham
- c. Kontrak

informasi harus diungkapkan dalam keuangan. Diperlukan oleh pihak audit guna memperoleh gambar yang lebih baik tentang perusahaan dan membiasakan diri pada bagian yang mungkin menimbulkan masalah.

Informasi yang termasuk dalam notulen rapat yaitu :

- a. Pengumuman dividen
- b. Otorisasi penggajian untuk pejabat
- c. Persetujuan kontrak dan kesepakatan
- d. Otorisasi atas perolehan aktiva
- e. Persetujuan merger
- f. Otorisasi pinjaman jangka panjang

- g. Persetujuan untuk menggadaikan efek-efek
- h. Otorisasi pegawai yang berhak menandatangani cek
- i. Pelaporan mengenai kemajuan operasional perusahaan.

4. Melaksanakan Prosedur Analisis Pendahuluan

64

Prosedur analitis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang logis antara data keuangan dan data non keuangan yang meliputi perbandingan jumlah yang tercatat yang akan digunakan dalam memperoleh bukti tentang saldo akun ataupun jenis transaksi.

Tujuan pelaksanaan prosedur analisis pendahuluan yaitu:

- a. Penetapan kemampuan entitas untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya
- b. Memahami bidang usaha klien
- c. Indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan
- d. Mengurangi pengujian audit yang terperinci
- e. Tahap-tahap dalam prosedur analisis yaitu:
- f. Mengidentifikasi perhitungan/ perbandingan yang harus dibuat
- g. Mengembangkan harapan
- h. Melaksanakan perhitungan/perbandingan
- i. Menganalisis data dan pendidentifikasi perbedaan yang signifikan
- j. Menyelidiki perbedaan yang signifikan dan tidak terduga serta evaluasi perbedaan tersebut.
- k. Menentukan apa dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit tersebut.

5. Menentukan materialitas dan risikonya

Definsi Materialistis dan risiko Adalah Unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan auditor. Materialistas merupakan besarnya kekeliruan atau salah saji informasi akuntansi laporan keuangan.

Langkah-langkah dalam penetapan materialistas Adalah sebagai berikut :

- a. Menentukankan pertimbangan awal mengenai materialistas tersbut
- b. Melakukan pengalokasian tentang pertimbangan awal mengenai materialistas
- c. Melakukan estimasi total salah saji dalam segmen
- d. Dapat melakukan estimasi pada salah saji gabungan
- e. Membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan awal mengenai tingkat materialistas.
- f. Dapat mengestimasi dari jumlah kekeliruan/salah saji dalam tiap segmen (langkah 3) terjadi selama proses audit. Langkah 4 dan 5 dilakukan tahap penyelesaian audit.

6. Memahami struktur pengendalian intern

Luas pemahaman mencukupi untuk merencanakan audit yang memadai. Empat masalah spesifik perencanaan, yaitu :

- a. Auditability

Auditor harus mampu mendapatkan informasi yang cukup kaitan dengan integritas manajemen dan sifat serta

luas catatan akuntansi, sehingga bahan bukti kompeten tersedia untuk mendukung saldo laporan keuangan.

b. Potensi salah saji yang material

Pemahaman auditor seharusnya mampu mengidentifikasi jenis-jenis kekeliruan dan ketidakberesan yang berpotensi dan dapat mempengaruhi laporan keuangan, dan dapat menetapkan risiko.

c. Risiko penemuan

Informasi mengenai struktur pengendalian intern digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan pengendalian, kemudian mampu mempengaruhi risiko penemuan yang telah direncanakan.

d. Perancangan pengujian

Informasi yang diperoleh seharusnya memungkinkan bagi auditor dalam merancang pengujian saldo laporan keuangan yang efektif. Pengujian atas transaksi maupun atas saldo, prosedur analisis dan yang disebut pengujian substantif.

Terdapat prosedur yang berkaitan dengan perancangan dalam operasi dan digunakan sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien:

- a. Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha
- b. Melakukan Tanya jawab dengan pegawai klien tentang Kebijakan dan pedoman system klien
- c. Melakukan Inspeksi dokumen dan catatan, serta Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha

7. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh

Perencanaan audit dan program audit berhunungan dengan -jenis pengujian audit yang dilakukan, melalui prosedur memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern, pengujian pengendalian, pengujian substantive transaksi, prosedur analisis serta pengujian rinci atas saldo.

a. *Primarily substantive approach*

- 1) Auditor mengutamakan pengujian substantive daripada pengujian pengendalian. Auditor lebih sedikit melakukan prosedur dalam memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien. Strategi ini banyak dipakai dalam audit pertama kali daripada klien lama.
- 2) Strategi ini digunakan apabila auditor, atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya, menemukan kondisi sebagai berikut:
 - a) Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi, tidak efektif. Salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien. Kemudian auditor menguji apakah salah saji yang tidak terdeteksi struktur pengendalian intern klien tersebut, dapat dideteksi oleh prosedur audit. Sehingga, auditor akan lebih banyak melakukan pengujian substantive.
 - b) Biaya untuk melaksanakan: 1)Prosedur tambahan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, 2) *Test of control* mendukung *lower assessed level of control risk* melebihi biaya melaksanakan test substantif yang lebih ekstensif.

Kedua kondisi ini berkaitan dengan asersi-aseri akun:

- 1) Yang dipengaruhi oleh transaksi tidak rutin atau jarang terjadi, misalnya aktiva tetap, utang obligasi, dan modal saham.
 - 2) Yang sangat memerlukan jurnal penyesuaian misalnya akumulasi depresiasi.
- b. *Lower assessed level of control risk approach*
- 1) Auditor mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif.
 - 2) Auditor tetap melakukan pengujian substantive meskipun tidak se-ekstensif pendekatan Primarily substantif. Auditor banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien.
 - 3) Strategi ini banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit atas klien baru. Strategi ini digunakan apabila auditor, terkait dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya, menemukan kondisi :
 - a) Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi dirancang dengan baik, dan efektif. Struktur pengendalian intern klien yang efektif dapat mengurangi kemungkinan salah saji. Auditor harus menguji apakah struktur pengendalian intern klien efektif mendeteksi salah saji. Auditor lebih banyak melakukan pengujian pengendalian.
 - b) Biaya untuk melaksanakan: 1)Prosedur tambahan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, 2)*Test of control* dalam mendukung

lower assessed level of control risk lebih rendah dari biaya melaksanakan test substantif yang ekstensif, 3) Akun yang diperiksa adalah akun yang terkait transaksi rutin, dan tinggi volume. Contoh akun :

- Penjualan
- Piutang dagang
- Persediaan
- Biaya upah dan gaji

8. Melakukan Prosedur Analitis Audit

Terdapat 5 jenis prosedur analitis :

- a. Membandingkan data klien dengan industri.
- b. Membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya.
- c. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.
- d. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.
- e. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan menggunakan data non keuangan.

Kertas Kerja Audit dan Program Audit

Kertas Kerja Audit

Definisi Kertas Kerja Audit

Kertas kerja audit berguna sebagai salah satu alat untuk bertahan bagi para auditor terhadap tuntutan pengadilan atas kelalaiannya maupun penyelewengan yang dituduhkan serta sebagai alat untuk bisa mengumpulkan segala informasi penting yang menjadi bahan laporan audit.

Dalam Kertas kerja audit disini akan mencerminkan standart audit , prosedur audit yang mampu dijalankan serta kesimpulan apa yang saja sebagai hasil dari audit. Kertas kerja audit di buat secara teratur, hati-hati, bersih, dan teliti serta mudah di mengerti. Penanggung jawab dan supervisor mereview kertas kerja audit dengan tujuan :

- a. Meyakinkan bahwa program audit telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Meyakinkan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standart auditing yang di tetapkan IAI.
- c. Meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kertas kerja audit tidak memuat salinan buku / dokumen perusahaan, tetapi memuat ikhtisar data serta kesimpulan audit. Data yang dimuat dalam kertas kerja audit harus merupakan data yang perlu untuk mendukung laporan, perlu untuk penyelidikan di kemudian hari dan perlu untuk verifikasi ketepatan pembukuan transaksi.

Setiap kertas kerja harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh auditor saat selesai dikerjakan. Di atas kertas kerja audit harus dicantumkan nama klien, nama dan nomor akun, dan tahun buku audit serta petunjuk kepada program audit yang bersangkutan. Kertas kerja audit harus lengkap dan bebas dari kekurangan-kekurangan seperti :

- a. Kekurangan bukti bahwa system pengendalian intern telah diselidiki dan ternyata cukup baik atau lemah.
- b. Kegagalan dalam menjelaskan sesuatu masalah yang muncul dari audit sebelumnya.

- c. Kelalaian dalam menunjukkan prosedur yang dilakukan.
- d. Data yang didapat tidak lengkap untuk dapat menyusun laporan.
- e. Kegagalan dalam menyiapkan hasil audit atas transaksi yang penting setelah tanggal neraca.
- f. Kegagalan dalam memerinci nama jenis efek/sekuritas wesel tagih
- g. Kegagalan dalam melakukan penyelidikan dalam pengawasan atas persediaan barang, sistem pembebanan, upah/gaji, *overhead*.

Program Audit

1. Auditor harus melakukan pengembangan dan pendokumentasian pada program audit untuk dapat melakukan penetapan sifat, waktu dan luasnya prosedur audit yang direncanakan. Pendokumentasian dalam rencana audit umumnya akan mencakup pada rinci dari akun aktivitas klien, bagan alir, dan atau deskripsi naratif dari sistem akuntansi, kuesioner pada pengendalian intern, program audit terinci, review analitis, kertas kerja, anggaran waktu, dan lain-lain.
2. Dalam Penyesuaian situasi dan kondisi di setiap perusahaan harus bisa disesuaikan dengan Program audit yang direncanakan, setiap langkah di arahkan kepada cara yang efisien, sehingga akan diperoleh informasi yang cukup/memadai untuk menilai kewajaran atas penyajian pada laporan keuangan dan sesuai dengan PABU.

Terdapat beberapa Tujuan program audit adalah sebagai berikut :

1. Auditor akan dibantu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam penugasan staff.
2. Adanya kelengkapan dalam kertas kerja akan menunjukkan bahwa program audit tersebut :1. Direncanakan sesuai dengan tujuan pengujian yang diharapkan/diinginkan, 2. Pemilihan prosedur akan lebih sesuai/tepat dengan standart auditing yang di tetapkan IAI melalui.
3. Akan mampu menghemat waktu bagi staff dan auditor sendiri.

221

Terdapat Beberapa hal yang harus di pertimbangkan dalam melakukan rencana pada program audit :

1. Adanya permasalahan serta teknik baru yang memerlukan modifikasi dan revisi terhadap prosedur audit, serta program audit harus di review kembali untuk setiap pengujian dan penugasannya.
2. Perancangan pada Program harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah utama yang dapat diantisipasi (termasuk pada kelemahan dalam SPI).
3. Auditor harus mampu memperoleh pemahaman dari struktur pengendalian intern klien, agar mampu untuk melakukan perencanaan audit dan pengembangan pendekatan audit yang efektif hal ini dilakukan sebelum auditor melakukan program audit. Auditor juga harus dapat menilai risiko bawaan.
4. Auditor melakukan rencana audit untuk pengendalian risiko pada tingkat asersi di saldo akun dan kelompok transaksi-transaksi yang sifatnya material. Para Auditor juga harus melaksanakan prosedur analitis selama audit ketika tahap perencanaan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Materiality judgments and audit firm culture : social behavioral and political perspectives*

Penulis : **Brian W. Carpenter, MarkDirsmith, Parveen P. Gupta**

Abstract

1. Adanya keinginan peneliti untuk menginterpretasikan cara auditor dalam memberikan justifikasi atau penilaian sebagai sebuah teknik atau fenomena kognitif.
2. Teori dan analisa empiris dalam penelitian ini terbagi dalam tiga level, yaitu: (1) peneliti menginterpretasikan pola justifikasi auditor sebagai fenomena perilaku sosial dimana di dalamnya terdapat justifikasi untuk materialitas; (2) peneliti akan menginterpretasikan filosofi yang dimiliki oleh sebuah KAP dan menilainya sebagai sebuah budaya.
3. Peneliti menyusun dua hipotesis : (1) budaya kantor akuntan publik mencerminkan mekanisme yang ada di dalamnya , sistematis termasuk justifikasi materialitas oleh masing-masing auditor, dimana mengedepankan pertimbangan rasional dan kepuasan; (2) tingkat pengalaman auditor, mencerminkan tingkatan atau hierarki di dalam KAP, memperjelas budaya di dalam KAP tersebut.

Introduction

1. Penelitian ini menafsirkan proses pengambilan keputusan sebagai kejadian yang kognitif dimana mampu mewakili karakteristik perusahaan klien dan mampu mempengaruhi penilaian auditor. Pengalaman seorang auditor juga dipandang mampu untuk mempengaruhi penilaian dan justifikasi terhadap klien.
2. Menurut Hoghart bahwa auditor dalam melakukan justifikasi juga dipengaruhi oleh bukti yang diperoleh auditor yang berkaitan dengan klien.
3. Dalam penelitian sebelumnya, Morris & Nichols (1998) meneliti adanya kemungkinan pengaruh struktur yang ada pada KAP terhadap penilaian materialitas. Pada penelitian mereka, disebutkan bahwa struktur pada KAP dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap klien.
4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan mengenai proses penilaian sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi konteks sosial di dalam KAP.
5. Berdasarkan teori dan hasil analisis, maka hipotesis dari penelitian ini adalah untuk menguji bahwa budaya di dalam KAP mampu mempengaruhi penilaian auditor. Dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor mempengaruhi posisinya di dalam hirarki sebuah KAP.

Audit Firm Structure vs Judgment in Forming Materiality Judgments: a Cultural Reinterpretation

a. *Structure and judgment in audit firms*

- 1) Penelitian terdahulu menggambarkan bahwa struktur di dalam KAP, akan mempengaruhi dalam perikatan

audit, termasuk penilaian auditor terhadap risiko audit. Struktur di dalam KAP juga mempengaruhi kebijakan *partner* terhadap staff auditornya.

- 2) Struktur yang ada di dalam KAP juga mempengaruhi para auditor dalam menghadapi kompetisi dalam memperoleh klien, maka para auditor dituntut untuk selalu bekerja secara efektif dan efisien.
- 3) Dalam menghadapi persaingan tersebut, maka auditor dituntut untuk mampu memiliki keunggulan bersaing dalam hal litigasi risiko audit, sistem pendokumentasian audit, peningkatan audit berbasis komputer. Para auditor juga dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai peningkatan kompleksitas dari lingkungan bisnis, organisasi klien dan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan klien.
- 4) Dalam penelitian yang dilakukan Kinney (1986) menjelaskan bagaimana anggota dari Auditing Standard Board melakukan vote. Dalam penelitian ini Kinney juga menyebutkan pentingnya sebuah KAP harus memiliki teknologi audit yang terstruktur.
- 5) Struktur KAP yang digeneralisasi biasanya fokus pada filosofi atau dasar audit dan teknologi yang digunakan dalam menyusun metodologi audit

b. *The mechanism and organic metaphors*

- 1) Konsep struktur dalam KAP biasanya mengacu pada kecenderungan organisasi, perilaku organisasi, sikap terhadap birokrasi, mekanisme internal, dll.

- 2) Beberapa organisasi akuntan publik banyak mengadopsi parameter dan strategi dari KAP yang lebih besar agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien.
- 3) Salah satu parameter yang banyak diadopsi adalah mengenai pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan serta untuk melatih anggota KAP untuk responsive terhadap masalah serta sensitive terhadap permasalahan sosial.
- 4) Perlu adanya sosialisasi di dalam anggota KAP untuk meningkatkan kemampuan penilaian mereka, pengembangan keterampilan dan komitmen jangka panjang.
- 5) Tujuan adanya struktur yang jelas serta pelatihan untuk justifikasi adalah agar auditor memiliki keyakinan dalam memastikan salah saji dalam laporan keuangan.
- 6) Seorang auditor juga harus mampu mengembangkan metode analitis jika menemukan salah saji di dalam laporan keuangan. Sehingga seorang auditor mampu memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai selama penugasan audit.

c. *A cultural theory of cognition*

- 1) Selain mekanisme dan *image* organisasi, sebuah organisasi perlu untuk memiliki budaya organisasi yang mencerminkan karakter di dalam organisasi. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi justifikasi atau penilaian auditor. Budaya organisasi juga dianggap mampu menyeragamkan berbagai latar belakang anggota organisasi.
- 2) Struktur dan budaya organisasi secara kolektif dapat mempengaruhi pola perilaku dan pemikiran sesuai

standar yang ditetapkan. Pada akhirnya pola budaya ini menjadi dasar dalam stuktur formal organisasi.

- 3) Perspektif yang lain memandang budaya sebagai bentuk dari konsekuensi interaksi sosial yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi anggota organisasi, sehingga budaya organisasi tidak dapat dimanipulasi dan dibuat oleh manajemen.
- 4) Dalam konteks organisasi formal, peneliti berfokus mengenai perilaku anggota organisasi dalam konteks sosial. Di dalam penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh struktur serta budaya organisasi mempengaruhi penilaian materialitas oleh auditor.

Audit Firm Culture and Hypotheses

1. Budaya yang ada di dalam KAP harus bisa mencerminkan tingkat profesionalisme seorang auditor, sehingga auditor diharapkan mampu memandang masalah dari berbagai sudut pandang sesuai penilaian profesionalnya.
2. Budaya di dalam KAP juga mampu mempengaruhi penilaian materialitas.
3. Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana auditor menggunakan informasi sebagai dasar menilai materialitas.
4. March dan Simon menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas dan kapasitas komputasi, sehingga manusia memiliki keterbatasan untuk menghadapi masalah-masalah structural.
5. Konsisten dengan perspektif budaya antara tingkat rasional dan kepuasan terhadap strategi penilaian audit dengan karakteristik, mekanisme dan budaya local organisasi audit. Untuk mekanisme organisasi, hal ini bukan hanya mengenai

penilaian individual menggunakan informasi yang diperoleh oleh masing-masing individu tetapi bagaimana selyuruh individu di dalam organisasi mampu bersinergi dalam pengambilan penilaian tingkat materialitas.

Berdasarkan alasan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah;

H1 : budaya di dalam KAP mempengaruhi prosedur penilaian tingkat materialitas oleh para akuntan publiknya.

H1a : auditor yang berasal dari KAP memiliki mekanisme yang berbeda dalam melakukan penilaian materialitas.

H1b : auditor yang berasal dari KAP yang memiliki budaya organisasi akan menilai materialitas dalam sudut pandang yang berbeda.

6. Budaya di dalam organisasi memiliki persamaan dengan pengalaman masing-masing individu dan interaksi sosial di dalam organisasi. Semakin banyak pengalaman dan interaksi sosial yang dilakukan oleh auditor maka akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap materialitas.

7. Berdasarkan informasi di atas, maka perumusan hipotesisnya:

H2 : semakin tinggi pengalaman auditor, maka hal tersebut akan mempengaruhi strategu penilaian auditor terhadap rentang materialitas yang disesuaikan dengan budaya KAP nya.

H2a : auditor yang memiliki pengalaman yang lebih serta berkaitan dengan mekanisme budaya dalam perusahaan, maka akan lebih rasional dalam menilai rentang materialitas.

H2b : auditor yang memiliki pengalaman yang lebih serta dikaitkan dengan budaya internal organisasi, maka akan lebih memenuhi ekspektasi dalam menilai rentang materialitas.

Research Method

Pengujian hipotesis dilakukan dengan *experimental simulation* (Runkle & McGrath, 1972) diatur sedemikian rupa untuk *partner, manager, senior audit* pada kantor akuntan publik internasional.

a. Test instrument development

Pengujian dilakukan terhadap pengembangan instrumen yang ada di dalam organisasi akuntan publik.

b. Participants and distribution

Peneliti mendistribusikan 304 uji instrument kepada *partner, managers* dan auditor senior Big8 dari 29 kantor di 6 kota yang merger dengan Arthur Young with Ernst & Whinney and Deloitte, Haskins & Sells dengan Touche Ross. Distribusi dari uji instrument ini dilakukan secara acak yang dikordinasi oleh partner atau manajer di masing-masing kantor.

Ada 212 instrumen tes yang kembali kepada peneliti, kemudian akan dibandingkan antara persepsi dengan pengamatan peneliti.

c. Data analysis

Penelitian ini menggunakan *analysis of variance (ANOVA)* untuk menguji hipotesis dan hasilnya ditunjukkan pada table 2.

Analisa ini akan menguji budaya yang ada pada KAP yaitu *organic, intermediate, mechanistic*) dengan hirarki yang ada dalam KAP yaitu senior, manager dan partner.

Results and Discussion

Dalam table 2, diperoleh hasil bahwa H1 dan H2 diterima. Hal ini berarti adanya sosialisasi budaya dalam perusahaan berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki oleh auditor.

Implications : Audit Judgment and Judgment models as signals and symbols

Adanya implikasi teoritis dari penelitian ini yakni yang berhubungan dengan budaya perusahaan dan politik.

a. A cultural interpretation of audit judgment and technology

H1 dan H2 penelitian ini diterima, itu berarti bahwa terdapat hubungan antara budaya, pengalaman dan interaksi sosial dengan penilaian materialitas.

Pola budaya yang ada di dalam organisasi akan tampak dalam struktur organisasi KAP.

Budaya di dalam organisasi juga harus bisa menerima kemajuan teknologi sehingga teknologi digunakan sebagai pendukung untuk menentukan rentang materialitas.

b. A political interpretation of audit judgment and technology

Dari sisi sosiologi, maka akan ada keterkaitan antara fungsi organisasi dan individu, arah komunikasi dan hierarki yang ada dalam suatu KAP.

Adanya tendensi jika seorang anggota KAP terlibat dengan politik. Anggota KAP yang terlibat dalam politik secara tidak langsung akan mempengaruhi pembuatan

kebijakan keuangan. Sehingga kurang independen jika harus menilai rentang materialitas.

Concluding comments

1. Penelitian ini meneliti adanya perspektif budaya dan politik dalam penilaian materialitas oleh auditor.
2. Adanya strategi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan sebuah justifikasi materialitas dan keterkaitannya dengan sistem manajemen dan ekonomi untuk audit yang berbasis teknologi.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan meningkatkan pola penilaian audit dengan keterbukaan wawasan yang berdasar pada fenomena budaya dan politik wilayah setempat.

2. Artikel Kedua

Judul : *Changing audit risk characteristics in the public client market*

Penulis : Gary Giroux , Cory Cassell

Introduction

1. Jasa pada audit keuangan telah berubah di AS selama setengah abad terakhir, sehingga merubah pola siklus dari risiko audit relatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambar perubahan pola dalam lingkungan risiko ekonomi dan kelembagaan dari waktu-kewaktu dan mampu menyelidiki perbedaan ukuran relatif pada risiko audit.
2. Selama 40 tahun terakhir jasa audit memiliki perubahan yang signifikan, alasannya mencakup dari siklus ekonomi, teknologi,

perubahan kompetensi pada perusahaan audit berbagai tingkat litigasi dan dinamika audit pada regulasi dan penegakan hukum. Pada penelitian ini diharapkan akan mampu menjelaskan pergeseran tentang ekonomi dan kelembagaan lingkungan pada risikonya dari waktu ke waktu, mampu menyelidiki risiko perbedaan pengganti pada risiko audit.

3. Pada proxy keuangan Z-core Altman menggunakan modifikasi. Jika nilai proxy lebih tinggi maka bisa diartikan melakukan manipulasi laba .

Audit events and characteristics from the 1970s to 2007

1. Perkembangan ekonomi dan peraturan pada tahun 1970 berdampak pada profesi audit dan pada risiko.
2. Tahun 1970 : dekade yang dianggap kacau karena terjadi peningkatan inflasi (indeks harga konsumen mencapai 11% pada tahun 1974) dan adanya defisit pada anggaran pemerintahan. Adanya penetapan standar yang baru dalam upaya memecahkan berbagai masalah yang kompleks (Zelf 2003)
3. Pertengahan tahun 1970: terdapat 400 kasus perusahaan yang melakukan penyuapan dan pemebayaran yang ilegal terhadap pemerintah, partai politik dll. Akibatnya tanggung jawab auditor tidak diakui atau hilang karena mereka melakukan tindakan suap tidka adanay pengendalian internal yang memadai pada perusahaan (Zeff 2003).
4. Tahun 1980: adanya resesi dan inflasi yang ekstem, banyaknya tingkat pengangguran mencapai lebih dari 20% di tahun 1980. Serta para auditor mulai berkompetensi dala persaingan harga dalam biaya audit yang lebih rendah.

Kurangnya independensi auditor juga menjadi perhatian dari regulator akuntansi.

5. Tahun 1990: Adanya perkembangan Saham besar di NASDAQ. Tumbuh penggunaan opsi saham dan bonus serta meningkatnya insentif perusahaan untuk dapat memanipulasi laba.
6. Tahun 2002 : munculnya Sabanes Oxley yang bisa membawa reformasi besar pada undang-undang sekuritas, regulasi pada profesi akuntansi, dan pengelolaan perusahaan yang baru.

Sample and data analysis

Model empiris yang digunakan untuk mengevaluasi risiko keuangan (Z-core Altman), risiko manipulasi earnings, dan risiko litigasi. Rata-rata tahun menyarankan pola siklus risiko audit relatif, pada perubahan kelembagaan selama periode tersebut.

Result

1. Cakupan perusahaan meningkat dari waktu-waktu sekitar 2009 klien audit pada tahun 1970, dan 3181 klien pada tahun 2006 dengan menggunakan Altman (sampel ukuran berbeda-beda)
2. Jumlah terbesar 4793 pada tahun 1997, dan totalnya ada 130.235 observasi perusahaan/tahun.
3. Rata-rata Z-core selama periode itu berfluktuasi selama periode tersebut.
4. Adanya skandal Enron 2001, mengakibatkan kegagalan audit pada laporan keuangan yang menyebabkan publik tidak percaya kepada auditor.

5. Penggunaan akrual yang lebih besar dimungkinkan adanya manipulasi laba yang meningkat. Tingkat akrual muali rendah pada tahun 1970 dan naik pada tahun 1980. Olehkarenanya larangan iklan terhadap audit keuangan dicabut, meningkatnya daya saing auditor,

Conclussion

1. Penelitian ini merupakan sejarah dari risiko audit relatif berdasarka pada peratiran audit dan faktor serta dampak dar kualitas audit. Peristiwa ekonomi mampu mengubah lingkungan risiko audit dari waktu-ke waktu, sehingga periode nya semakin ketat dalam pengawasannya dan diharapkan kualitas audit akan lebih tinggi dari periode ke periode selanjutnya .
2. Beberapa peristiwa yang memiliki efek pada risiko audit, dampak besar:
 - a. Foreign Corrupt Practise Act Of 1997 (ketaatan meningkat)
 - b. Reformasi pada swasta Ligitasi Sekuritas Act Of 1995 (Kurang ketaatan)
 - c. Sarbanes Oxley Act Of 2002 (Ketaatan lebih besar)
3. Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini :
 - a. Data yang digunakan relatif terbatas dari tahun-ketahun
 - b. Jumlah perusahaan untuk sample berkurang
 - c. Perubahan standar akuntansi dari waktu ke waktu yang membuat kesulitan bagi peneliti untuk penentuan hasil
4. Adanya keterbatasan namun hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa perubahan ada pada mengubah tentang regualsi audit dan faktor-faktor kompetitif.

BAB VIII

MATERIALITY AND RISK

Materialitas

1. Konsep Materialitas dalam Audit

Materialitas merupakan suatu pertimbangan pokok atau utama di dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus diterbitkan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau tingkat salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan bagi pengguna informasi laporan keuangan dikarenakan adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Materialitas juga diindikasikan dengan tingkat riskan atau tidaknya sesuatu hal bagi perusahaan dan pemakai informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Materialitas juga berhubungan dengan dampak suatu item/transaksi terhadap keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam FASB 2 materialitas diartikan sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi laporan keuangan dengan memperhitungkan situasi, yang menyebabkan pertimbangan seseorang yang megacu atau mengandalkan informasi tersebut

mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.

Auditor berdasarkan temuan salah saji yang material akan menyatakan hal tersebut kepada klien sehingga dapat dilakukan koreksi. Hal tersebut dilakukan karena penentuan tingkat materialitas merupakan tanggung jawab auditor. Jika klien menolak untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan, maka auditor akan mengeluarkan opini atau pendapat sesuai dengan kondisi yang terjadi dan apa adanya, tergantung pada besarnya tingkat material salah saji.

Lima langkah auditor dalam menerapkan materialitas:

- Merencanakan luas pengujian

Langkah 1 : menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

Langkah 2 : mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam beberapa segmen.

- Mengevaluasi hasil

Langkah 3 : mengestimasi total salah saji dalam segmen-segmen.

Langkah 4 : memperkirakan salah saji gabungan

Langkah 5 : membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.

2. Menentukan Pertimbangan Pendahuluan Tentang Materialitas Membuat Pertimbangan Pendahuluan Tentang Berapa Jumlah yang Dianggap Material

Auditor berkewajiban untuk memutuskan jumlah salah saji gabungan antara yang tertera dalam laporan keuangan, ketika sedang mengembangkan strategi pertimbangan pendahuluan sebelum memulai proses audit. Pertimbangan audit ini juga akan dimasukkan ke dalam dokumentasi audit.

Pengertian pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa di dalam laporan keuangan akan terdapat salah saji namun tidak mempengaruhi keputusan pemakai informasi laporan keuangan.

Dalam membantu auditor dalam merencanakan pengumpulan bukti yang tepat maka auditor akan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali melakukan perubahan atas pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, sehingga seringkali penetapan materialitas ini akan direvisi.

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas:

1. Materialitas bersifat relative bukan absolute

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja bersifat material bagi perusahaan kecil, tetapi akan berbeda jika jumlah tersebut ditemukan di dalam perusahaan yang besar dan menjadi tidak material. Jadi, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas bergantung pada masing-masing jenis dan ukuran usaha klien.

2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas

Diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji tersebut tergolong material, hal ini karena materialitas bersifat relatif. Pada umumnya yang digunakan dalam pertimbangan pendahuluan ini adalah laba bersih sebelum pajak, dikarenakan poin ini dianggap sebagai poin yang sangat penting dalam penyajian informasi pada pemakai laporan keuangan.

33 3. Faktor kualitatif yang mempengaruhi pertimbangan materialitas

Jenis salah saji tertentu mungkin akan lebih penting bagi para pengguna informasi dibandingkan dengan salah sai lainnya, meskipun sama nilai rupiahnya. Misal:

- a. Nilai yang diakibatkan oleh kekeliruan terkadang dianggap kurang penting dengan nilai yang melibatkan kecurangan karena perbuatan tersebut mencerminkan kejujuran serta realibilitas manajemen atau karyawan yang terlibat.
- b. Salah saji yang sebenarnya tidak material, dapat menjadi material apabila mempengaruhi tren laba.
- c. Hal - hal yang bersifat kurang penting dan kecil terkadang bersifat material apabila hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi atas sejumlah kewajiban dalam kontrak.

Standar auditing dan standar akuntansi tidak menyediakan pedoman khusus tentang materialitas. Pertimbangannya adalah bahwa pedoman tersebut tidak mungkin diterapkan tanpa memperhitungkan semua kompleksitas yang dapat mempengaruhi keputusan akhir auditor.

3. Mengalokasikan Pertimbangan Awal/Pendahuluan Tentang Materialitas ke Dalam Setiap Segmen Atau Salah Saji Yang Dapat Diterima / Ditoleransi

Hal ini perlu dilakukan oleh auditor harus mengumpulkan bukti tiap segmen dari laporan keuangan. Ini dapat membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat dan yang harus dikumpulkan maka pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk setiap segmen harus dimiliki oleh auditor.

Akun neraca banyak dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan materialitas oleh sebagian besar praktisi daripada akun laba rugi. Hal ini dikarenakan salah saji yang terjadi dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama dalam neraca akibat penerapan sistem pelaporan akuntansi.

Ada tiga kesulitan yang dihadapi auditor dalam mengalokasikan materialitas dalam akun neraca:

- a. Alokasi ini mempengaruhi biaya audit.
- b. Baik *understatement* maupun *overstatement* harus tetap dipertimbangkan.
- c. Auditor akan cenderung memperkirakan akun-akun tertentu yang mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan dengan akun-akun lainnya.

Tujuan pengalokasian pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke akun-akun neraca adalah untuk membantu auditor dalam memutuskan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan bagi setiap akun laporan laba rugi ataupun dalam laporan neraca.

78 Salah satu tujuan alokasi ini adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa mengorbankan mutu audit. Apabila proses audit telah dilaksanakan maka auditor harus berkeyakinan

bahwa salah saji gabungan dalam semua akun akan lebih kecil dengan memperhatikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

4. Mengestimasi Salah Saji Material dan Membandingkan dengan Pertimbangan Pendahuluan

Dalam melaksanakan prosedur untuk mengestimasi salah saji dalam segmen, auditor akan membuat kertas kerja yang digunakan untuk mendokumentasikan semua salah saji yang ada. Salah saji yang terkandung dalam suatu akun apat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

a. Salah saji yang diketahui

Merupakan salah saji yang dapat ditentukan jumlahnya oleh auditor.

b. Salah saji yang masih bersifat kemungkinan

Salah saji yang masih bersifat kemungkinan ini terdiri dari:

1) Salah saji yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara penilaian auditor dengan penilaian manajemen dalam menjumlah saldo akun, misal: saldo akun penyisihan piutang tak tertagih.

2) Adanya *forecast* atau peramalan salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang telah ditetapkan.

1 Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan professional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali ditetapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup:

- a. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas.
- b. Unsure-unsur laporan keuangan (asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban).
- c. Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus akuntansi, lingkungan bisnis dan ekonomi.
- d. Adanya fluktuasi dalam tolak ukur unsure laporan keuangan.
- e. Adanya unsur yang menjadi perhatian khusus auditor (tujuan evaluasi kinerja keuangan)

Waktu penentuan tingkat materialitas

Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kealahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam lapran auditor.

Dalam perencanaan audit, auditor membuat berbagai pertimbangan tentang ukuran kealahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk:

- a. Penentuan sifat, saat dan luas prosedur penilaian audit.
- b. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material
- c. Menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit lanjutan.

Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (jika berlaku materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu) pada saat auditor menyadari adanya informasi selama audit yang mungkin saja menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari jumlah materialitas yang pertama kali ditetapkan.

Pada akhirnya opini yang diberikan oleh auditor juga berdasarkan kecukupan bukti, salah saji dan materialitas yang diidentifikasi oleh auditor. Jika selama proses audit, auditor menemukan tingkat kesalahan pada penyajian laporan keuangan secara individu suatu golongan akun dan keseluruhan dibawah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor, maka opini yang akan diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan jika tingkat kesalahan berada di atas atau melebihi tingkat materialitas yang ditentukan, maka opini yang akan diberikan adalah wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) atau tidak wajar (*adverse opinion*), tergantung seberapa material kesalahan tersebut.

62

Risiko Audit

1. Definisi Risiko Audit

Risiko audit diartikan sebagai tingkat ketidak pastian tertentu yang adapt diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya. Risiko audit juga merupakan kemungkinan terjadinya risiko salah saji material maupun indikasi terjadinya *fraud* yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat.

Mengingat kemungkinan terjadinya risiko sangat besar, maka auditor harus melakukan *risk assessment* sebelum menjakankan proses audit, tepatnya pada tahap perencanaan audit. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin saja terjadi dan bisa menentukan dimana proses audit akan dilaksanakan secara ketat dan tidak serta pada proses mana akan dilakukan *full audit* dan *random audit*.

15

Standar pekerjaan lapangan kedua mewajibkan auditor untuk memahami entitas klien dan lingkungannya termasuk pengendalian internalnya, dengan tujuan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang salah saji yang potensial di dalam laporan keuangan secara keseluruhan serta saldo akun khusus, kelas transaksi, dan pengungkapan dimana salah saji paling mungkin terjadi, auditor menggunakan model risiko audit.

2. Model Risiko Audit dan Perencanaan Audit

Dalam mengantisipasi adanya risiko, maka auditor menggunakan model risiko audit dalam merencanakan pengumpulan bukti audit. Model risiko audit akan membantu auditor dalam memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya.

a. Jenis Risiko Audit

Secara keseluruhan total risiko audit dirumuskan:

$$\text{TAR} = \text{IR} \times \text{DR} \times \text{CR}$$

Dimana:

TAR : Total Audit Risk

IR : Inherent Risk

DR : Detection Risk

CR : Control Risk

1) *Inherent Risk*

Pada dasarnya risiko inheren merupakan risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan atau yang melekat dari suatu transaksi entah karena adanya (a) kompleksitas transaksi; (b) kompleksitas perhitungan; (c) asset yang mudah

dicuri atau digelapkan; (d) kurangnya informasi yang bersifat objektif.

Risiko inherent mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapat salah saji material, baik *error* maupun *fraud* yang ada di dalam bagian proses audit sebelum mempertimbangkan efektifitas pengendalian internal klien. Auditor akan menyimpulkan bahwa risiko inherent tinggi, apabila auditor mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar ada salah saji, dengan mengabaikan pengendalian internal.

Risiko inherent ini berada diluar jangkauan auditor dalam melakukan pencegahan, bahkan juga berada diluar kendali auditee sendiri. Dengan kata lain, auditor hanya bisa menemukan adanya risiko inherent tetapi tidak bisa melakukan apa-apa.

Beberapa ciri inherent risk yang tinggi antara lain:

- a) Terjadi profitabilitas dan kinerja laporan keuangan yang terus menurun.
- b) Terjadi kekurangan modal kerja
- c) Tingginya asset yang menganggur atau tidak menghasilkan.

Faktor yang mempengaruhi *Inherent Risk*:

- a) Sifat bisnis klien

Risiko inherent bagi akun-akun tertentu dapat dipengaruhi oleh sifat bisnis klien.

- b) Hasil yang diperoleh dari kegiatan audit sebelumnya
Salah saji yang terjadi dalam audit di tahun sebelumnya bisa terjadi lagi pada audit tahun berjalan, karena banyaknya jenis salah saji dan perusahaan cenderung lamban dalam menangani salah saji. Dalam hal ini auditor sebaiknya melakukan pengujian ekstensif sebagai cara untuk menentukan apakah klien telah memperbaiki salah saji yang terjadi.
- c) Penugasan awal atau penugasan berulang
Apabila auditor telah melakukan audit kepada klien yang sama selama beberapa tahun, maka auditor akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kemungkinan salah saji material, sehingga untuk penugasan selanjutnya auditor akan berusaha mengurangi risiko inheren. Jika penugasan tersebut merupakan awal/klien baru, maka auditor akan meningkatkan risiko inheren pada awal periode penugasan.
- d) Pihak terkait
Adanya pihak terkait yang memiliki tujuan yang berbeda sehingga kemungkinan besar terjadi salah saji, sehingga risiko inherennya juga akan meningkat.
- e) Transaksi non rutin
Transaksi yang jarang terjadi justru menjadi transaksi yang rentan terhadap salah saji dan celah terjadi *fraud*.
- f) Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat akun saldo dan transaksi yang tepat
Sebagian besar akun memang membutuhkan ketepatan pencatatan sehingga saldo yang tercantum juga akan tepat.

g) Unsure populasi

Setiap item dapat membentuk total populasi, misalnya akun piutang usaha akan mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji.

h) Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan

Risiko kecurangan dapat dinilai untuk keseluruhan proses audit, yaitu menurut siklus, akun, dan tujuan. Respon auditor terhadap munculnya risiko mencakup revisi penilaian risiko audit yang dapat diterima, *inherent risk*, *detection risk* dan *control risk*.

2) *Detection Risk*

Merupakan risiko dimana bukti audit untuk **suatu** segmen yang dinilai tidak mampu atau akan gagal **men-deteksi** adanya **salah saji yang melebihi salah saji yang bisa ditoleransi**. *Detection risk* berada di dalam kendali auditor, oleh karenanya auditor harus berupaya untuk menekan risiko ini ke tingkatan yang paling rendah, karena risiko ini tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya.

Risiko deteksi bisa muncul karena adanya pernyataan yang tidak bisa terdeteksi melalui pengujian substantive oleh auditor. Untuk meminimalkan terjadinya *detection risk*, auditor harus mengembangkan perencanaan audit secara tepat dan melakukan supervise atas pelaksanaan audit.

Ada 4 faktor yang berpotensi menghasilkan *detection risk* yang tinggi, yaitu:

- a) Salah mengaplikasikan prosedur audit.
- b) Salah menginterpretasikan hasil audit.
- c) Salah memilih metode uji.
- d) Pengujian terhadap *control risk* yang kurang intensif.

3) *Control Risk*

Control risk atau risiko pengendalian mengukur penilaian auditor terkait apakah salah saji melebihi jumlah yang dapat diterima di suatu bagian pengauditan akan dapat dideteksi atau dicegah dengan tepat waktu oleh pengendalian internal klien. *Control risk* juga bisa timbul akibat lemahnya sistem pengendalian internal klien, baik desain SPI nya maupun pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan desain SPI yang ada sehingga tidak mampu mencegah potensi salah saji material maupun *fraud*. *Control risk* tidak bisa dikendalikan oleh auditor tetapi bisa dikendalikan oleh auditee jika auditee bersedia. Jika risiko pengendalian ditetapkan dalam jumlah yang tinggi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audir yang lebih banyak.

Karakter perusahaan yang berisiko memiliki *control risk* tinggi, antara lain:

- a) Struktur organisasi yang tidak jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang juga tidak jelas. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan *control risk*-nya juga tinggi.
- b) Lemahnya pengawasan manajemen terhadap operasional perusahaan.
- c) Tidak memiliki auditor internal dan komite audit.
- d) Sistem pengendalian internal lemah atau tidak efektif.

Langkah-langkah untuk mendeteksi adanya *control risk*:

- a) Menelusuri dokumen pendukung transaksi.
- b) Melakukan perhitungan fisik secara acak. Dan hasilnya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan klien.
- c) Apabila klien menggunakan sistem teknologi informasi, maka auditor harus memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan semestinya.

b. Menilai Risiko audit yang dapat diterima

Risiko audit yang dapat diterima merupakan risiko audit yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesediaan auditor dalam menerima kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan setelah audit selesai dilaksanakan dan opini telah dikeluarkan. Jika auditor meyakini di dalam laporan keuangan tidak ditemukan salah saji material, maka auditor akan memutuskan risiko yang dapat diterima lebih rendah.

Dalam sebuah proses audit, auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima, terlebih lagi dilakukan selama proses perencanaan audit dengan cara:

- 1) Auditor menetapkan risiko kontrak kerja.
- 2) Menggunakan risiko kontrak kerja tersebut untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima.

205

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima yaitu:

145

- 1) Tingkat ketergantungan pemakai eksternal terhadap laporan keuangan

Jika pemakai eksternal sangat bergantung pada laporan keuangan maka risiko audit yang dapat diterima jadi berkurang. Beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat ketergantungan pemakai eksternal terhadap laporan keuangan yaitu:

- a) Ukuran klien

Yang diukur menurut asset atau total pendapatan.

b) Distribusi kepemilikan

Apabila perusahaan bersifat terbuka maka pemakai laoran keuangan lebih banyak daripada perusahaan tertutup.

c) Jumlah dan sifat kewajiban

Jika dalam laporan keuangan terdapat kewajiban dalam jumlah besar, maka laporan keuangan tersebut akan banyak digunakan oleh para kreditur ataupun calon kresitr secara luas daripada perusahaan dengan jumlah kewajiban yang berjumlah kecil.

2) Kondisi yang memungkinkan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan.

Auditor seringkali mengalami kesulitan untuk memprediksi kegagalan keuangan klien sebelum hal itu terjadi, namun ada beberapa faktor yang mengindikasikan terjadinya kesulitan keuangan klien, antara lain:

a) Posisi likuiditas

Jika klien mengalami kekurangan modal kerja serta kas sehingga akan terjadi kesulitan dalam pembayaran kewajiban di masa mendatang.

b) Laba atau rugi periode sebelumnya

Apabila perusahaan mengalami penurunan laba atau peningkatan kerugian maka auditor harus mengetahui masalah solvensi yang akan dihadapi klien di amsa mendatang.

c) Metode pembiayaan pertumbuhan

Apabila perusahaan lebih mengandalkan utang sebagai alat pembiayaan, maka kemungkinn besar akan terjadi kesulitan keuangan di masa mendatang. Auditor harus bisa

menevaluasi apakah asset klien dibiayai dengan utang jangka pendek atau jangka panjang karena kebutuhan kas yang besar dalam jangka pendek dapat menyebabkan kepailitan.

d) Sifat operasi klien

Jenis bisnis tertentu dapat mempengaruhi risiko yang terjadi.

e) Kompetensi manajemen

Manajemen yang memiliki kompetensi akan selalu waspada terhadap potensi adanya kesulitan keuangan yang akan dihadapi oleh perusahaan sehingga manajemen akan memodifikasi metode operasinya guna meminimalkan dampak masalah keuangan yang timbul.

3) Evaluasi auditor atas integritas manajemen

Apabila auditor meragukan integritas klien, maka auditor akan menilai risiko audit yang diterima akan lebih rendah.

3. Hubungan Risiko terhadap Bukti Audit

Konsep materialitas dan risiko di dalam audit saling terkait satu sama lain. Keduanya berperan untuk mengukur jumlah ketidakpastian dalam suatu besaran tertentu dimana risiko audit merupakan ukuran ketidakpaastian, sedangkan materialitas merupakan ukuran tinggi rendahnya atau besaran dari ketidakpastian tersebut.

Respon auditor terutama pada risiko yaitu dengan melakukan perubahan terhadap jenis prosedur audit dan luas pengujian, termasuk memasukkan unsure ketidakpastian dalam prosedur audit yang akan digunakan. Ada beberapa cara yang digunakan oleh auditor dalam merespon risiko audit, antara lain:

a. Menugaskan staf yang berpengalaman

Dalam menyusun staf pada setiap penugasan, KAP harus memperhatikan kualifikasi pada masing-masing staf. Contoh: *partner* pada sebuah KAP memperkirakan terdapat risiko inheren yang tinggi pada akun persediaan klien, maka *partner* akan menempatkan staf auditor yang berpengalaman melakukan audit persediaan.

b. Melakukan review dengan seksama terkait penugasan

Penilaian atau review harus dilakukan oleh auditor secara memadai guna memastikan risiko yang adandan mengukur tingkat risiko tersebut untuk menyusun langkah auditor selanjutnya guna meminimalkan risiko tersebut.

Beberapa hal yang harus direview oleh KAP antara lain:

- 1) File audit yang mendokumentasikan rencana audit, bukti audit yang dikumpulkan, kesimpulan serta masalah lain yang muncul selama proses audit.
- 2) Risiko pengendalian maupun risiko inheren umumnya tidak dinilai untuk audit secara keseluruhan, tetapi dinilai untuk setiap siklus serta untuk setiap akun, beserta tujuan audit terhadap akun tersebut.
- 3) Risiko audit yang dapat diterima umumnya dinilai oleh auditor selama tahap perencanaan audit dan bersifat tetap atau tidak berubah pada setiap siklus dan akun utama.
- 4) Risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang dibutuhkan biasanya akan bervariasi dari tujuan satu ke tujuan yang lain, dari akun satu ke akun yang lain, atau dari siklus ke siklus yang lain, seperti halnya risiko pengendalian dan risiko inheren.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Internal Audit Function Role in Operational Risk Management*

Penulis : *Ana Fernandez, Laviada*

Introduction

Dalam Basel modal Accord (NBCA) menetapkan bahwa :

Bank harus mengemabngkan kerangka kerja untuk mengelola risiko operasional dan mengevaluasi kecukupan modal yang diberikan. Kerangka kerja harus mencakup toleransi risiko operasional yang ditetapkan melalui kebijakan.

Pada Capital Requirement Directive, kerangka nya harus ditinjau secara ateratur oleh auditor internal atau eksternal. Dewan direksi harus mampu memastikan bahwa bank tunduk pada manajemen internal audit (secara independen) yang efektif dan komprehensif. Sebagai contoh pelaksanaannya :

1. Dewan direksi harus memastikan stafnya berkompeten dan terlatih
2. Dewan direksi memastikan bahwa adanya kebebasan dalam pengelolaan audit.

Pada internal audit harus beradaptasi dengan rancangan dan prosedur untuk memastikan pengawasan perencanaan sistem. Terdapat beberapa tujuannya yaitu:

1. Dapat mengkonfirmas tingkat kebijakan dan prosedur yang disetujui dewan direksi
2. Tinjauan terhadap integritas dalam proses idnentifikasi OR
3. Pemantauan yang berkala untuk menilai keseluruhan daerah dari bank

Oversight of the operational risk management framework

1. Appropriate operational risk management environment

Komite Basel menetapkan 3 prinsip dasar untuk mencapai tujuan yaitu:

- a. Struktur organisasi. Dewan ini bertanggung jawab membangun struktur manajemen yang melaksanakan OR. Internal audit meninjau:
 - 1) Adanya fungsi OR independen dengan staf yang berkualitas dengan diperlukan pengalaman, kemampuan teknis dan akses ke sumber daya.
 - 2) Penetapan OR manajer di setiap daerah dari entitas dalam berbagai unit bisnis dalam grup.
 - 3) Penciptaan atau komite untuk memandu manajemen senior dan untuk menentukan komposisi dan fungsi.
 - 4) Pembentukan jalur komunikasi antara orang yang bertanggung jawab untuk mengelola OR unit usaha tingkat dan untuk mengkoordinasikan penampilan yang berkaitan dengan OR.
- b. Peran dewan dan senior manajemen. Salah satu faktor yang paling penting dalam pengadopsian dan implementasi dalam kerangka OR yang efektif. Auditor internal akan memverifikasi :
 - 1) Pertanggung jawaban manajemen senior dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan, proses dan prosedur
 - 2) Manajemen senior harus mengimplementasikan kebijakan tertentu, proses dan prosedur yang dilaksanakan dan diverifikasi pada unit bisnis.

2. *Operational risk identification*

Dalam New accord modla tuntutan yang terus-menerus, sistematis audit harus:

- a. Menverifikasi keberadaan dalam entitas tertentu untuk OR
- b. Memastikan bahwa fungsi OR mampu identifikasi kelemahannya
- c. Didokumentasikan dengan baik proses ini
- d. OR Telah menerapkan prosedur pengendalin yang mencerminkan entitas

Auditor harus melakukan :

- a. Menganalisis kualitas dokumentasi yang didukung proses OR
- b. Menverifiaksi waktu dan proses integritas

Dalam identifikasi risiko faktor intenal dan eksternal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mencapai tujuan bank. Internla auditor harus mempertimbangkan risiko internal yaitu:

- a. Struktur organisasi yang tidak memadai yang tidak memfasilitasi pemisahan fungsi atau mengawasi dan menganalisis kegiatan dikembangkan diperusahaan.
- b. Non-ekstensi manual berisi kebijakan, proses dan prosedur meliputi kegiatan badan/ entitas
- c. Non-eksistensi fungsional manual berisi kebijakan manajemen lingkungan yang berbeda setiap area

Internal auditor harus mempertimbangkan faktor risiko internal berikut :

- a. Struktur organisasi tidak memadai jika tidka ada pemisahan fungsi yang dikembangkan pada perusahaan

- b. Non eksistensi manual berisi kebijakan, proses, prosedur meliputi kegiatan entitas
- c. Non-eksistensi manual fungsional manual mendefinisikan manajemen lingkungan berbeda area
- d. Kurangnya tatakelola perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan
- e. Kurangnya kode etik yang mengatur kinerja keseluruhan entitas.
- f. Kurangnya otomatisasi proses utama.
- g. Tidak adanya mekanisme pengawasam yang efektif untuk operasi dan proses

Internal auditor mempertimbangkn faktor risiko eksternal meliputi:

- a. teknologi usang
- b. kegagalan utnuk menyesuaikan prosedur yang mencerminkan kerangka peraturan baru dan memantua pelaksanaanya
- c. kegagalan dalam beradaptasi dan mempertimbangkan, pasar baru produk atau kegiatan
- d. munculnya penipuan baru.

Operational Risk Management

Bank seharusnya menilai risiko inheren yang melekat pada operasional untuk semua produk yang material, kegiatan, proses dan sistem. Penilaian risiko yang efektif harus menggabungkan antara evaluasi kualitatif dan kuantitatif.

1. qualitative evaluation

Auditor internal akan merancang prosedur untuk memverifikasi keberadaan model evaluasi dan menilai apakah

model evaluasi ini telah sesuai atau belum. Dalam beberapa kasus, model evaluasi ini harus menggunakan informasi dari kategori lini bisnis dan didefinisikan sesuai yang tercantum dalam *New Capital Accord* dan berkontribusi terhadap manajemen.

Secara khusus, aspek yang harus dinilai dari bagian program internal audit antara lain:

- a. Desain model yang akan digunakan untuk mengevaluasi risiko operasi entitas.
- b. Tugas dari seorang manajer operasional untuk bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap risiko operasional.
- c. Adanya partisipasi dari komite yang bertanggung jawab atas penelitian dan persetujuan untuk berbagai aktivitas, produk, proses dan sistem yang berjalan.
- d. Dimasukkannya semua kelompok dan unit fungsi bisnis yang terlobat dalam model evaluasi.
- e. Hubungan antara lingkup organisasi entitas dan lini bisnis sesuai dengan definisi di dalam *New Capital Accord*.
- f. Keandalan dari prosedur manajemen risiko dari aktivitas operasi masing-masing cabang entitas.
- g. Keberadaan prosedur internal dalam entitas.
- h. Adanya pelaporan permanen mengenai aktivitas operasi antar manajemen.
- i. Adanya dokumentasi dari proses evaluasi yang ada secara mendetail untuk memfasilitasi review yang akan dilakukan oleh pihak ketiga (auditor eksternal bank).

Faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor internal dalam merancang prosedur audit mereka antara lain:

- a. Proses pengambilan data. Menjamin keandalan hasil atau data yang diperoleh.

- b. Validasi internal. Proses validasi internal digunakan untuk menilai kinerja dari prosedur yang digunakan dan juga mengevaluasi kualitas audit dengan sistem yang ada.
- c. Parameter dari evaluasi kualitatif. Parameter dari evaluasi kualitatif meliputi penilaian kewajaran dari pemilihan sistem evaluasi yang dipilih.

2. *Quantitative evaluation*

Dua faktor utama dalam evaluasi kuantitatif yang digunakan dalam menilai risiko operasional adalah lingkungan bisnis beserta pengendalian internalnya dan analisa data yang berasal dari eksternal entitas.

a. *Risk indicator*

Merupakan ukuran yang menunjukkan proses kinerja dari perusahaan yang dapat memberikan wawasan dalam tingkat risiko bank. Indikator yang dimiliki oleh bank ini selalu siap terhadap perubahan yang mungkin menunjukkan adanya kemungkinan risiko dan mempengaruhi anggaran yang telah disusun oleh bank.

Tujuan dan prosedur audit untuk indikator risiko ini dirancang oleh entitas harus mempertimbangkan hal-hal seperti:

- 1) Keberadaan dari sistem pengukuran kuantitatif.
- 2) Memperhitungkan kelebihan dari sistem evaluasi.
- 3) Monitoring atas indikator yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan pelaporan atas hasil dari masing-masing wilayah entitas dan laporan dari manajemen senior.

b. *Analysis of operational loss events*

Secara umum entitas memiliki sistem untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan dan memitigasi peristiwa kerugian ini melalui evaluasi dan sistem penilaian risiko operasional.

Pertimbangan auditor internal dalam merencanakan rencana audit, antara lain:

- 1) Adanya metode yang pasti mengenai pengumpulan data atau informasi mengenai kerugian. Pengumpulan informasi tetap harus memperhitungkan eksposur risiko dengan lini bisnis dan jenis risikonya sebagaimana didefinisikan dalam *New Capital Accord*
- 2) Adanya infrastruktur untuk menanggulangi kerugian yang terjadi di dalam entitas.
- 3) Pelaporan adanya peristiwa kerugian
- 4) Memvalidasi hasil temuan
- 5) Adanya rencana perbaikan
- 6) Melakukan pelaporan atas hasil dari masing-masing wilayah entitas dan laporan dari
- 7) Melaporkan hasil evaluasi pada pihak yang berkepentingan.

3. *Operational risk mitigation*

Pelaksanaan sistem penilaian terhadap risiko operasional secara menyeluruh harus dapat memastikan dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko yang ada sesuai kondisi dan keadaan entitas serta harus sesuai dengan ambang batas risiko yang dapat diterima.

Prosedur yang diterapkan oleh auditor internal antara lain:

- a. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil penilaian pada area bisnis dan manajemen.
- b. Pembentukan rencana untuk tindakan selanjutnya
- c. Monitoring rencana yang akan dilakukan.

4. *Monitoring and reporting operational risk*

Auditor internal harus memverifikasi keberadaan proses pelaporan eksternal yang menyediakan informasi untuk pihak ketiga, yaitu auditor eksternal, masyarakat, pemerintah, dll. Auditor harus memeriksa mengenai prosedur dan kebijakan yang ada serta memeriksa dokumentasi yang berisi tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh entitas untuk mencapai tujuan perusahaan serta aksesibilitas dan transparansi data yang digunakan.

Auditor internal harus menganalisa laporan yang dihasilkan yang terdiri dari:

- a. Tujuan dari pemilihan sistem
- b. Distribusi informasi yang diperoleh
- c. Bagaimana tentang pendokumentasian informasi tersebut
- d. Sumber data
- e. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi tersebut dan memonitoring proses tersebut.

Methodology for the calculation of capital

Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh auditor akan mempengaruhi metodologi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan proses audit.

Dalam proses audit, auditor internal harus mempertimbangkan:

1. Adanya fungsi yang bertanggung jawab.
2. Tingkat otomatisasi dari proses dan pelaksanaan kontrol.

3. Pembentukan batas toleransi atau ambang batas
4. Membentuk sistematika pelaporan
5. Dokumentasi yang memadai atas terkumpulnya informasi

1. *Basic indicator approach*

Auditor internal harus memastikan bahwa pemilihan opsi dan prosedur tidak menyiratkan ketidakpantasan terhadap penilaian risiko operasional.

2. *Standardized approach*

Auditor internal akan mengkonfirmasi keberadaan mengenai kebijakan yang dilih dalam prosedur audit. Konfirmasi dibuat untuk:

- a. Penugasan semua kegiatan yang dilakukan dalam entitas
- b. Adanya kerjasama dengan area yang bertanggung jawab mengelola risiko lainnya seperti kepatuhan, risiko kredit dan risiko pasar.
- c. Pertimbangan desain risiko operasional, menganalisa dan mendapatkan otorisasi atau persetujuan.
- d. Meninjau pendapatan kotor dalam laporan keuangan
- e. Struktur dan sistem akuntansi yang dipilih oleh entitas
- f. Dokumentasi keseluruhan hasil penugasan
- g. Aplikasi yang memadai untuk mendukung prosedur audit internal.

3. *Advanced measurement approaches*

Kompleksitas dalam penerapan jenis metodologi membuat entitas harus melakuak proses sesuai dengan peraturan pemerintah. Aspek yang harus diperhatikan oleh auditor internal dalam melakukan proses pemeriksaan dan analisis, yaitu:

- a. Adanya rencana untuk meninjau dan memantau fungsi untuk pelaksanaan mitigasi risiko operasional.
- b. Adanya panduan operasional untuk semua tingkat staf.
- c. Pengembangan dan pembentukan rencana dan proses untuk semua tingkatan staf.
- d. Proses identifikasi dan pengumpulan data dan proses analisa yang dilakukan.

Conclusion

1. Bagian terpenting dari tata kelola perusahaan yang sehat adalah adanya pengendalian internal yang kuat dan ini termasuk ke dalam fungsi audit internal karena merupakan sumber informasi yang berharga mengenai risiko internal dan eksternal untuk manajemen bank.
2. Kerangka risiko operasional yang dimiliki manajemen yang efisien akan meningkatkan dan memperkuat pengendalian internal organisasi.
3. Audit internal harus waspada terhadap seluruh proses pelaksanaan sistem untuk mengelola risiko operasional di dalam entitas. Memodifikasi bentuk dari perilaku dan tidak hanya mengadaptasi prosedur dari sudut pandang fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan budaya yang kuat, memperkuat kerangka kerja di dalam entitas.
4. Pada akhirnya keseluruhan proses dan prosedur audit internal akan menghasilkan informasi yang lebih baik bagi pihak ketiga seperti supplier, masyarakat dan pemerintah.

2. Artikel Kedua

Judul : *Do Auditors Assess Inherent Risk As If There Are No Controls?*

Penulis : **Timothy C. Miller**

Introduction

1. Pada penelitian ini menguji tentang auditor dalam melakukan penilaian risiko salah saji bermaterial (RMM) sesuai dengan standar hari ini. Adanya standar setter mempunyai tingkat keefektivitasan pada audit efisiensi sebagai IR dan IC untuk mampu menentukan sifat, waktu dan tingkat audit tes.
2. Penelitian ini meneliti apakah auditor menilai IR tanpa memasukkan asumsi mereka tentang kontrol klien. Penelitian ini menyelidiki percobaan dengan dua fasa. Fasa pertama 54 auditor dari big 4 untuk mengevaluai efek khusus yang melekat dari faktor RC di RMM, pada tahap kedua meminta para auditor untuk membuat penilaian RMM sebagai hipotesis klien yang tentang faktor CR dari waktu ke waktu. Para auditor senior seringkali meningkatkan penilaian terhadap RMM dalam pengendalian internal sebagai bentuk harapan pengendalian yang efektif untuk menilai IR.

259

(In)dependence of IR and CR

1. Secara tradisional risiko audit telah dinilai kesesuaiannya dengan SAS NI 147 (AICPA, 1983) dan 39 (AICPA,1981) SAS NO 47 mendefinisikan IR sebagai :
“kerentanan saldo akun atau golongan transaksi terhadap kesalahan yang bisa menjadi bermaterial bila digabungkan

dengan kesalahan dalam saldo atau kelas-kelas dan dengan asumsi bahwa tidak ada pengendalian akuntansi internal terkait.

2. CR Didefinisikan sebagai:

“Risiko terhadap kesalahan dapat terjadi dalam akun atau kelompok transaksi dan itu bisa menjadi bermaterial, bila digabungkan dengan kesalahan dalam saldo atas kelas-kelas lain, tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal akuntansi (AICPA 1983).

Dalam model Kinney pada penelitiannya (1989) dinyatakan sebagai salah satu konsep penilaian probabilitas dari RMM untuk menilai CR dan IR.

- a. Setiap informasi dalam pengendalian yang relevan harus mampu mengurangi RMM, sebagai contoh auditor dalam menilai IR dari salah saji material ketika meragukan account dengan tingkat 90% karena entitas pada piutang meragukan dan sangat kompleks.
- b. Para auditor mengindikasikan bahwa menilai risiko dengan bertanya bagaimana pengendaliannya bisa mengurangi kesalahan, dan apa yang bisa menjadi salah? Olehkarenanya dalam big4 terdapat beberapa rincian tentang proses penilaian risiko yaitu:
 - 1) Adanya IR pada laporan keuangan
 - 2) Penilaian pada entitas terkait tingkat pengendalian (CR)
 - 3) Ada pernyataan tentang risiko pada laporan keuangan.
- c. Penilaian ketiga bagian ini mengikuti prosedur pada saat auditor melakukan wawancara, yaitu

Expectations

1. Pada desain penelitian Haskin (1995) adanya pengendalian dalam lingkungan akan mampu menilai potensialnya IR dan CR yang diberikan pada subject. Desain penelitian ini memungkinkan untuk memberi informasi tentang pengendalian terhadap RMM.
2. IR faktor diharapkan untuk meningkatkan atau menurunkan RMM pada awal penilaian. CR faktor menjadi kekuatan atau arah dari faktor dalam penilaian, sehingga IR faktor akan meningkat atau menurunkan RMM bergantung pada kekuatan atau arah faktor. Dan diharapkan bahwa CR akan mampu menurunkan (tidak berpengaruh) pada Assesment RMM. Hipotesisnya :

¹²
H1 : Revisions of RMM based on internal control information will either reduce or have no effect on the prior RMM assessment.

Method

Terdapat dua fasa untuk menilai/ melakukan percobaan terhadap faktor IR dan CR faktor pada RMM. Faktornya tercantum pada apendiks diambil dari SAS 109.

Pada tahap 1:

Peserta diminta untuk mengevaluasi delapan faktor risiko dengan menjawab prompt “mengabaikan semua informasi lain (termasuk tidak menyediakan informasi perusahaan”, bagaimana Anda pikir faktor berikut akan bisa mempengaruhi risiko salah saji material (RMM)? Delapan faktor risiko yang kemudian disajikan secara individual dan peserta menunjukkan apakah dan untuk tingkatan apa, faktor risiko meningkat,

menurun, atau tidak berpengaruh pada RMM (-5 penurunan pada RMM , dan +5 kenaikan pada RMM)

Pada tahap 2 :

Kami memperluas penelitian kami dengan memeriksa kombinasi IR dan CR dalam penentuan RMM. Fase ini menyajikan konteks pada latar belakang perusahaan. Setelah membaca latar belakang perusahaan participant diminta untuk memberikan penilaian dasar dari RMM.

Oleh karena itu sementara Tahap 1 menangkap efek langsung dari faktor risiko pada RMM tahap 2 meminta partisipan untuk membuat penilaian risiko yang mempengaruhi RMM secara berurutan.

Results

Survey dilakukan pada participant sebanyak 54 terdapat 48% pesertanya laki-laki, yang memiliki rata-rata 4 tahun pengalaman dan telah berpartisipasi dalam penilaian risiko diperusahaan. Semua partisipan mengikuti sesi pelatihan pada perusahaan big4.

Hasil tahap 1 :

Peneliti menemukan bahwa informasi pada kualitas pengendalian (kompetensi audit internal) menyebabkan peningkatan RMM pada saat ketika ditafsirkan oleh auditor. Secara khusus hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada RMM yang disebabkan pada faktor CR, Dalam 216 kasus penilaian RMM mengenai pengendalian pada tahap 1 (54 peserta) -RMM telah dinilai meningkat sekitar 45%.

Hasil tahap 2:

Auditor menilai 3 dari 4 faktor yang secara signifikan dapat meningkatkan RMM. Serupa dengan tingkat 45% dari keseluruhan kenaikan RMM ditemukan tahap 1 untuk faktor CR sekitar 48%.

Conclusion

1. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa CR dapat tergantung pada tingkat nilai IR. Penilaian CR oleh auditor secara signifikan dipengaruhi oleh IR, yang disebut sebagai *downstream*.
2. Dalam mengevaluasi faktor risiko auditor dalam konteks ARM mereka harus menilai faktor IR dan CR secara konsisten.
3. Pada penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana praktisi yaitu auditor bisa menginterpretasikan faktor risiko, dan mereka mampu untuk menilai risiko sesuai dengan standar yang berasal dari teori. Peningkatan penilaian risiko maka akan mengarah pada perencanaan audit yang lebih efektif.

257

BAB IX

AUDIT ATAS PENGENDALIAN INTERNAL DAN RISIKO PENGENDALIAN

Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal

54 Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan and sasarnya. Kebijakan dan prosedur ininkemudian dikenal denngan pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk sistem pengendalian internal.

Tujuan utama dalam perancangan sistem pengendalian internal yang efektif:

1. Keandalan atau reabilitas atas 37 laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi para kreditur, investor dan para pengguna lainnya. Manajemen juga bertanggung jawab secara professional dan hukum mengenai laporan keuangan yang benar bahwa informasi yang disajikan tersebut 63 telah sesuai dengan persyaratan

yang tercantum dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu pengendalian internal yang dijalankan atas pelaporan keuangan, salah satunya bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan oleh manajemen.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan

Sistem pengendalian internal akan digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan sasaran dan tujuan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Oleh karena itu sistem pengendalian internal ditujukan untuk memperoleh semua informasi keuangan dan non keuangan tentang operasi perusahaan yang akurat dalam keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen.

3. Kepatuhan akan hukum dan peraturan

Dalam Sarbanes Oxley Act tercantum dalam Section 404 yang mewajibkan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan mengenai keefektifan atas pelaksanaan pengendalian internal laporan keuangan perusahaan. Selain menaati ketentuan yang tercantum di dalam Sarbox Section 404, perusahaan, organisasi publik, maupun non publik serta organisasi nirlaba diharuskan untuk juga mematuhi berbagai peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai contohnya mengenai Undang Undang Perlindungan lingkungan dan hak sipil, dalam hal ini tidak ada keterkaitannya dengan akuntansi. Sedangkan peraturan dan hukum yang ada kaitannya dengan akuntansi seperti Undang undang dan ketentuan perpajakan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor atas pengendalian internal

Manajemen dan auditor memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai tanggung jawab atas pengendalian internal. Dilihat dari sisi manajemen, ia bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pengendalian internal entitas. Menurut isi pada Section 404, pembuatan laporan keuangan secara transparan merupakan bentuk efektifitas pelaksanaan sistem tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari sisi auditor, ia bertanggung jawab untuk memahami dan menguji sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Menurut Section 404, auditor juga diharuskan untuk mengeluarkan laporan audit mengenai penilaian manajemen terhadap pengendalian internlanya, termasuk mengeluarkan pendapat atas efektif atau tidaknya pengendalian tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen

1. Tanggung jawab manajemen dalam penetapan pengendalian internal

Pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pengendalian internal entitas adalah manajemen bukan auditor. Hal ini sesuai dengan konsep yang terdapat dalam GAAP mengenai penyusunan laporan keuangan. Ada dua konsep utama yang menjadi landasan dalam merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal, yaitu:

- a. Kepastian yang layak

Pengembangan pengendalian internal harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memberikan kepastian yang

layak, namun bukan absolute. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan seharusnya bersifat wajar. Kepastian yang layak hanya memeberikan kemungkinan kecil dalam mencegah dan mendeteksi kealahan saji material secara tepat waktu oleh pengendalian internal.

b. Keterbatasan inheren

Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif seratus persen, tanpa menghiraukan kecermatan dan ketelitian dari pihak manajemen yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya.

2. Tanggung Jawab Laporan Manajemen menurut Sarbox Section 404

208
Setiap manajemen dalam perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan laporan pengendalian internal yang tercantum dalam Sarbox. Laporan tersebut terdiri dari:

- 20
- a. Adanya pernyataan bahwa pihak manajemen harus bertanggung jawab atas penetapan dan penyelenggaraan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur laporan keuangan.
 - b. Adanya suatu penilaian atas efektivitas prosedur laporan keuangan dan struktur pengendalian internal per akhir tahun fiscal perusahaan.

Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan A.S adalah internal control - integrated framework yang dikeluarkan Commitee of Sponsoring Organization dari Treadway Commosision (COSO). Identifikasi manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan mencakup:

a. Rancangan pengendalian internal

Manajemen harus melakukan evaluasi mengenai apakah pengendalian internal yang telah dirancang dan diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan.

b. Efektifitas pelaksanaan pengendalian

Pihak manajemen juga harus melakukan uji efektivitas atas pelaksanaan pengendalian internal. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal yang telah dirancang berjalan sebagaimana mestinya dan apakah pihak yang melakukan mempunyai kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian internal secara efektif.

Tanggung jawab Auditor

1. Tanggung jawab auditor dalam memahami pengendalian internal

Pengetahuan mengenai ²⁰ pengendalian internal klien dinyatakan terpisah dalam standar auditing yang berlaku umum. Auditor harus memiliki pemahaman yang benar dan cukup mengenai lingkungan dan entitasnya termasuk pengendalian internal, menilai apakah risiko salah saji material dalam laporan keuangan disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan.

2. Pengendalian atas keandalan/ reabilitas laporan keuangan

Auditor berfokus pada poengendalian yang berkaitan dengan perhatian manajemen yang pertama, yaitu mengenai keandalan laporan keuangan. Hal ini digunakan untuk ¹¹² mematuhi standar pekerjaan lapangan yang kedua yaitu Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.

Tidak seperti yang dilakukan oleh manajemen, auditor tidak berfokus pada pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas klien atas pengamatan asset dan ketaatan pada hukum karena akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan.

3. Pengendalian atas kelas transaksi

Pengendalian internal ditekankan oleh auditor atas kelas-kelas transaksi bukan saldo akun. Hal ini disebabkan oleh kakuratan output sistem akuntansi yang dicerminkan pada saldo akun sangat bergantung pada proses transaksi dan keakuratan input.

4. Tanggung jawab auditor dalam menguji pengendalian internal

Auditor menerbitkan dan menegaskan laporan tentang penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan. Hal ini merupakan persyaratan yang tertuang dalam Sarbox Section 404. Auditor harus memiliki pemahaman dalam melakukan pengujian terhadap pengendalian untuk semua transaksi seperti saldo akun, transaksi dan pengungkapan yang signifikan serta hal lain yang terkait dengan asersi dalam laporan keuangan.

164

Komponen Pengendalian Internal menurut dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organization* dari *Treadway Commission* (COSO)

Terdapat lima komponen pengendalian internal yang tercantum di dalam COSO. Lima komponen pengendalian ini dirancang dan ditetapkan oleh manajemen sehingga dapat

memberikan kepastian yang layak dan tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Lima komoonen pengendalian internal tersebut antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

Poin utama pengendalian internal yang efektif dari organisasi yang dikendalikan terletak pada sistem manajemen puncak, apabila anggota organisasi atau perusahaan cenderung tidak diperhatikan oleh manajemen puncak, maka tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan yang mencakup hal-hal mengenai prosedur dan kebijakan yang dijalankan. Berikut merupakan subkomponen pengendalian yang paling penting:

a. Integritas dan nilai-nilai etis

Pengertian dari integritas dan nilai etis adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas serta bagaimana standar tersebut diberlakukan dan dikomunikasikan dalam praktek. Subkomponen ini mencakup langkah nyata manajemen untuk menghilangkan dorongan yang membuat staf melakukan hal-hal yang dilarang dalam standar etika, seperti *moral hazard* dan hal lain yang tidak etis.

b. Komitmen pada kompetensi

Definisi dari kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas. Tindakan nyata manajemen pada kompetensi mencakup adanya pertimbangan tingkat kompetensi bagi pekerja di posisi/bagian tertentu.

c. Partisipasi komite audit atau dewan komisaris

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris memiliki tanggung jawab akhir untuk memastikan kelayakan penerapan pengendalian dan proses laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk membantu mengawasi manajemen, dewan komisaris membentuk sebuah organ yang disebut komite audit. Komite ini bertugas untuk mengawasi pelaporan keuangan, berkomunikasi dengan auditor eksternal dan internal dan menyetujui baik jasa audit maupun non audit.

d. Filosofi dan gaya operasional manajemen

Melalui kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, dapat memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan bahwa pengendalian internal sebagai suatu hal yang penting. Berdasarkan aktivitas tersebut, auditor dapat pula menilai sikap antusias manajemen mengenai pengendalian internal.

e. Struktur organisasi

Dengan memahami struktur organisasi dari sebuah entitas, auditor dapat menentukan tanggung jawab dan kewenangan dari penerapan atas pengendalian internal yang ada.

f. Kebijakan dan praktik sumber daya

Bagian yang penting dalam pengendalian internal adalah personil. Apabila para karyawan adalah orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya, maka pengendalian intern akan sukses dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memenuhi kualifikasi andal. Sebaliknya, sebaik apapun sistem pengendalian internal, jika dijalankan oleh orang yang tidak

berkompeten dan tidak berintegritas, maka justru akan menggagalkan pengendalian itu sendiri.

2. Penilaian risiko

Merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Setelah proses identifikasi risiko, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh manajemen adalah melakukan estimasi dan menilai kemungkinan terjadinya risiko dan mengembangkan sebuah tindakan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko tersebut bahkan ke level risiko yang dapat diterima. Hal ini berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor bertujuan untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit.

3. Aktivitas Pengendalian

Didefinisikan sebagai prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk menangani risiko guna tercapainya visi, misi dan tujuan entitas.

Kegiatan pengendalian pada umumnya dikelompokkan menjadi:

- a. Adanya pemisahan tugas yang memadai
- b. Otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan kegiatan
- c. Dokumentasi dan pencatatan yang lengkap
- d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan.
- e. Pemeriksaan independen atas kinerja.

4. Komunikasi dan Informasi

Tindakan memulai, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi serta mempertahankan akuntabilitas atas asset yang berhubungan dengan tujuan dari sistem komunikasi dan informasi akuntansi dari setiap entitas. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi yang mempunyai sub-sub komponen yang dapat membentuk kelompok transaksi misalnya: pembelian, penjualan, retur penjualan, dll.

5. Pengawasan

Kegiatan pengawasan berkaitan dengan penilaian kualitas pengendalian internal secara periodic atau berkelanjutan oleh pihak manajemen dalam menentukan bahwa pengendalian akan dijalankan sesuai tujuan dan dapat dimodifikasi apabila terdapat perubahan kondisi.

Informasi dapat dinilai dari berbagai macam sumber yaitu dari pengendalian internal yang telah ada, laporan dari regulator, laporan internal auditor serta laporan pengecualian atas aktivitas Pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dan pengendalian internal

Auditor harus dapat mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu dengan pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Cara yang dilakukan antara lain:

1. Komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola

Auditor harus menyampaikan kelemahan yang material dan defisiensi yang signifikan secara tertulis kepada pihak yang

bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Komunikasi ini ditujukan kepada manajemen dan komite audit.

2. Surat manajemen

Auditor sering melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal, sehingga auditor harus mengkomunikasikannya dengan klien. Bentuk komunikasinya sering kali berupa surat terpisah yang kemudian disebut surat manajemen.

Hal-hal yang menjadi fokus pada penilaian pengendalian internal, antara lain:

1. filosofi dan gaya operasi

Manajemen melalui aktivitasnya memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal.

2. struktur organisasi entitas

menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada.

3. kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personil. Penilaian risiko (*risk assesment*) atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan pengendalian risiko-risiko yang relevan dengan penyusutan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendapatkan dan Melakukan Dokumentasi pemahaman terhadap pengendalian internal

Dokumentasi manajemen adalah sumber utama pada waktu mendapat pemahaman terhadap pengendalian internal. Auditor menggunakan prosedur dalam mendapatkan pemahaman, yang meliputi pengumpulan bukti mengenai rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian internal tersebut telah diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan informasi sebagai dasar audit terpadu.

Pada umumnya auditor menggunakan tiga jenis dokumen dalam mendapatkan serta melakukan dokumentasi pemahaman terhadap rencana pengendalian internal, yaitu:

1. Narasi

Naratif-naratif adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Ada empat hal yang baik untuk mendapatkan narasi yang baik tentang sistem akuntansi dan pengendalian internal:

- a. Asal usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem
- b. Semua pemerosesan yang berlangsung
- c. Disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem
- d. Petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilain risiko pengendalian

2. Bagan Arus

Bagan arus (*flow chart*) pegendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi.

3. Kuesioner pengendalian internal

Kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi definisi pengendalian internal.

Mengevaluasi Penerapan Pengendalian Internal

Metode umum yang digunakan dalam mengevaluasi penerapan pengendalian internal, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pengalaman auditor sebelumnya yang diperoleh dari perusahaan yang pernah di audit.
2. Melakukan Tanya jawab dengan klien untuk mengevaluasi apakah karyawan memahami tugasnya dan melakukan prosedur pengendalian internal.
3. Melakukakan pengujian dokumen dan catatan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah informasi yang dijelaskna di dalam narasi dan bagan arus sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengamatan dan kegiatan dan operasi entitas.
5. Melakukan penelusuran pada sistem akuntansi. Pada setiap tahap pemrosesan auditor melaksanakan tanya jawab, melihat aktivitas dan menguji semua dokumen catatan.

Risiko Pengendalian

Menilai Risiko Pengendalian

Auditor harus memahami perancangan dan pengemplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian

pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang memadai secara keseluruhan.

Ada 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas :

1. Pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan.
2. Matrik risiko pengendalian untuk membantu proses penilai risiko pengendalian.

Langkah - langkah dalam penyusunan matriks antara lain:

1. Melakukan identifikasi tujuan audit.
 - a. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal : rancangan dan operasi
 - b. Menilai risiko pengendalian
 - c. Merancang melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian
 - d. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantive.
2. Melakukan identifikasi pengendalian yang sudah ada.

Auditor menggunakan informasi yang telah dibahas pada bagian terdahulu mengenai perolehan dan pendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam pencapaian tujuan audit berhubungan dengan transaksi

3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait setiap pengendalian aka memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
4. Melakukan identifikasi dan evaluasi atas:

- a. defisiensi pengendalian kekurangan operasi terjadi apabila rencana atau pelaksanaan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. defisiensi yang signifikan adanya kekurangan yang signifikan terjadi apabila satu atau lebih kekurangan pengendalian yang tidak dapat dideteksi.
- c. kelemahan yang material kelemahan material muncul jika ada kekurangan signifikan yang lainnya. Hal ini dapat berakibat kemungkinan yang lebih kecil jika pengendalian internal belum mampu mencegah atau mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan.

Pengujian Pengendalian

Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah.

1. Mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat
2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan
3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian
4. Melaksanakan kembali prosedur klien

Luas prosedur

1. Mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya
2. Menguji pengendalian yang berhubungan dengan risiko yang signifikan
3. Menguji kurang dari seluruh periode audit

Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum :

1. Untuk memahami pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman harus diterapkan pada semua pengendalian yang teridentifikasi selama tahap tersebut.

2. Prosedur untuk memperoleh pemahaman hanya pada satu atau beberapa transaksi atau dalam kasus observasi, pada satu titik waktu.

Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantive

Dalam menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantive terkait untuk audit atas laporan keuangan, auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Langkah-langkahnya antara lain:

1. Memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal : perencanaan dan pelaksanaan.
2. Menilai risiko pengendalian.
3. Merancang ,melaksanakan,dan mengevaluasi pengujian pengendalian.
4. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif

Pelaporan pengendalian internal menurut Sarbox Section 404

Berdasarkan penilaian dan pengujian auditor atas pengendalian internal, auditor diharuskan oleh UU Sarbanes-Oxley untuk menyusun laporan keuangan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Opini auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal telah ditanyakan secara wajar,dalam semua hal yang material.

Opini auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan, dalam semua hal yang material,pengendalian

internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan.

Jenis-jenis opini

1. Opini wajar tanpa pengecualian
2. Opini tidak wajar
3. Opini wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan opini

Mengevaluasi, Melaporkan, dan Menguji Pengendalian Internal untuk Perusahaan Nonpublik

Mengidentifikasi Perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan :

1. Persyaratan pelaporan
2. Luas pengendalian internal yang disyaratkan
3. Luas pemahaman yang diperlukan
4. Menilai risiko pengendalian
5. Luas pengujian pengendalian yang diperlukan

Jumlah pengendalian yang diuji oleh auditor untuk menayakan pendapat mengenai pengendalian internal bagi sebuah perusahaan publik jauh lebih besar ketimbang hanya menyatakan pendapat tentang laporan keuangan.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Embedding Risk Management : Structure and Approaches*

Penulis : Ian Frasser and William Henry

Introduction

1. Munculnya The Turnbull Report dan The Hampel Report dengan latar belakang permintaan untuk pelaporan perusahaan tentang efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. The Turnbull Report didasari pada pendekatan berbasis risiko untuk pengendalian internal dan pada penilaian efektivitas.
2. Ada lima klasifikasi risiko yang tercantum dalam Turnbull Report yaitu risiko keuangan, bisnis, kepatuhan, operasional dan risiko lainnya.
3. Secara historis perusahaan lebih berfokus pada risiko keuangan, namun manajemen risiko yang baru menganggap harus adanya penilaian yang komprehensif dari seluruh bisnis dan lingkungannya.
4. Pendekatan untuk menilai risiko bisnis secara keseluruhan disebut dengan risiko enterprise-wide management (ERM) oleh Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission (COSO,2004) yang mendefinisikan keseluruhan proses dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil di dalam entitas dalam pengaturan strategi perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas, mengelola risiko dan memberikan jaminan untuk mencapai tujuan entitas.

5. Dan oleh UK Institut of Internal Auditor (IIA, 2004) merumuskan efektifitas pengendalian internal adalah sebagai proses terstruktur, konsisten, dan terus menerus di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, memutuskan tanggapan dan melaporkan peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuannya.
6. Hubungan antara manajemen risiko dan pengendalian internal belum banyak dijelaskan. Hampell, Turnbull dan FRC (2005) mendefinisikan hubungan tersebut dengan memanfaatkan para direksi untuk mengambil tanggung jawab dan mempertimbangkan semua kontrol, tidak hanya pelaporan keuangan.
7. Di dalam COSO (2004) dijelaskan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari ERM dimana pengendalian internal merupakan cara untuk mengelola risiko.
8. Perkembangan saat ini dalam tata kelolanya, perusahaan menempatkan banyak tanggung jawab pada direktur perusahaan, komite audit and audit internal untuk efektivitas proses ERM.
9. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaporkan penelitian mengenai cara perusahaan dalam mengidentifikasi risiko, melakukan manajemen risiko, prosedur pengendalian dan juga melaporkan interaksi antara audit internal dan komite audit terkait kontribusi mereka dalam manajemen risiko.

Literature

1. *Risk Identification And Management*

- a. FRC (2005) menyatakan bahwa perkembangan ERM terjadi sangat tinggi dikarenakan adanya dampak dari Turnbull Report. Turnbull Report dianggap memberikan kontribusi pada penetapan standar serta ukuran manajemen risiko dan pengendalian internal.
- b. Menurut Bolton (2002) Turnbull Report memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menerapkan budaya pengendalian dan manajemen risiko sebagai ciri organisasi tersebut.
- c. Chown (2000); Diageo (Viles, 2000), Baklfour Beatty (Boswell, 2001) juga mengutip perkembangan dari implementasi Turnbull Report juga menguatkan identifikasi atas risiko dan pengendalian internal dalam manajemen beserta dengan model pelaporannya.
- d. Chown (2000) menyebutkan adanya struktur piramida pada kepemilikan organisasi dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko karena tanggung jawab melekat pada masing-masing tingkatan.
- e. Skinner dan Leptospira (2003) menyatakan bahwa pengendalian risiko menggunakan *control- self assessment* (CSA).
- f. Page dan Leptospira (2004) menyoroti penggunaan model *bottom up* dalam mengidentifikasi risiko yang melekat pada manajemen.
- g. Hodge (2002) menyatakan bahwa risiko harus dikaji dan dikelola.

- h. Page dan Spira (2004) risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko yang tinggi, rendah atau menengah.
 - i. Barlow (2000); Mustafa dan Kennard (2004) menyatakan bahwa risiko harus dipetakan dan dikelompokkan oleh auditor internal, manajemen, dan komite audit.
 - j. Boswell (2001) menyatakan organisasi harus menyusun sebuah *software* untuk dapat menilai dan menghitung risiko serta sebagai awal implemenatsi ERM.
2. *The role internal audit in erm*
- a. IIA (2004) mendefinisikan adanya peran auditor internal dan implemenatsi ERM untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan akan tercapai jika risiko utama usaha dapat dikelola secara tepat dan memastikan bahwa pengendalian interinal telah berjalan efektif.
 - b. Page dan Leptospira (2004) memyatakan bahwa personil auditor internal memiliki latar belakang keuangan.
 - c. ICAEW (2000) menjelaskan peran auditor internal dapat memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses dimana risiko diidentifikasi, diprioritaskan, dikelola, dikendalikan, dikurangi dan dilaporkan.
3. *The Role Of Audit Committees In Erm*
- a. Leptospira (2003) menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan *task framework* dalam proses penilaian risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh komite audit.
 - b. ERM dapat dijadikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan oleh auditor internal untuk mengatasi kendala dalam menilai risiko dan asimetri informasi.

- c. Beberapa literature menyebutkan bahwa komite audit mulai banyak menggunakan ERM.

Research question and methodology

RQ1 : apa mekanisme untuk mengidentifikasi risiko kritis dan efektifitas manajemen dan apa saja informasi yang bisa dikembangkan oleh dewan direksi?

RQ2 : Apa peranan auditor internal dalam manajemen risiko dan bagaimana seharusnya fungsi audit internal melakukan fungsi pengendalian secara efektif?

RQ3 : Apa peranan komite audit dalam manajemen risiko mengingat adanya keterbatasan waktu dan keahlian dalam proses manajemen risiko?

53

Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi isu-isu yang sedang berkembang.

The Interview

26

Koresponden di dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di bursa dan kantor akuntan publik Big 4. Pihak yang berpartisipasi antara lain:

1. *Financial director*
2. *Audit committee chairs*
3. *Internal auditor*
4. *Risk director*
5. *Audit partners*

Interview dilakukan dengan tujuan untuk:

1. *mechanism for identification and management of risk*

fungsi audit internal dan penggunaan ERM mampu mengidentifikasi risiko dan menyiapkan mitigasi kontrol,

tanggung jawab dan selalu beriringan dengan manajemen operasional.

2. *the role of internal audit in risk management*

Peneliti percaya bahwa audit internal mampu membuat bisnis menjadi lebih berorientasi dan memberikan dampak positif terhadap fungsi pengawasan bisnis.

3. *the role of audit committees in risk management*

Komite audit akan terlibat di dalam manajemen risiko sampai pada batas yang telah ditentukan. Komite audit akan melaporkan temuan kepada dewan direksi dan bertanggung jawab mengenai efektivitas ERM

Conclusion

Peranan auditor internal yang berkaitan dengan ERM adalah sebagai pihak yang memberikan jaminan bahwa risiko utama bisnis jika dikelola secara tepat dan pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan target yang ditetapkan perusahaan.

2. Artikel Kedua

Judul : *Audit Committees and Corporate Control*

Penulis : *Gerald Vinten and Connie Lee*

Introduction

1. Adanya kontrol manajemen menjadi semakin terpisah dari kepemilikan sejak pergantian abad kedua puluh. Penelitian di US 200 perusahaan telah menunjukkan pada periode 1992-1963, kepemilikan tanpa bunga dominan dalam perusahaan

telah meningkat dari 44 persen menjadi 84 persen, dan perusahaan dengan kontrol yang sama mayoritas menurun dari 11% menjadi 3%.

2. Pada penelitian yang ada di Inggris sebanyak 250 perusahaan mengungkapkan kecenderungan yang sama pada persentase perusahaan tanpa mengendalikan kepentingan yang cenderung sama.
3. Komite audit dikembangkan setelah runtuhnya Atlantic Corporation pada tahun 1965. Dalam rangka untuk meningkatkan independensi auditor, maka diterbitkan saham ekuitas untuk membentuk komite audit dan tersedia untuk auditor membahas tidak hanya laporan keuangan tetapi juga hal-hal yang terkait audit curse.
4. Laporan Komite Watson Chartered Accountant diterbitkan pada tahun 1968 yang direkomendasikan bahwa undang-undang federal dan provinsi, harus memerlukan direksi perusahaan yang mempunyai efek kepada masyarakat untuk mengatur komite audit direksi tidak kurang dari tiga, dan bahwa sebagian besar tidak bertugas diperusahaan. Laporan keuangan yang diaudit harus mendapat persetujuan dari dewan direksi.

12

Background to Audit Committee Developments

The North American Experience

1. Konsep komite audit dikembangkan Di Amerika Utara pada tahun 1940an menyusul kasus McKesson-Robbins, Salah satu kasus penipuan yang paling terkenal dalam sejarah bisnis. Pembentukan komite audit mulai menarik minat setelah

terdapat isu pernyataan oleh komite eksekutif dari AICPA yang mendukung komite tersebut.

2. Pada tahun 1972 Komisi Bursa Saham (SEC) mendorong pembentukan komite audit oleh semua perusahaan yang terdaftar. Perkembangan komite audit di Kanada mengikuti pola yang sama, dalam rangka meningkatkan independensi auditor, komite Lawrence telah merekomendasikan kepada pemerintah Ontario yang perusahaan menerbitkan saham ekuitas yang diperlukan untuk membentuk komite audit dan tersedia untuk auditor untuk membaca tidak hanya laporan keuangan tetapi juga hal-hal yang relevan yang telah muncul pada audit course.

The UK Experience

1. Tidak ada persyaratan hukum untuk pembentukan komite audit dalam setiap beban hukum di Inggris. Perusahaan (Komite Audit) Bill diperlukan bahwa pemegang saham perusahaan publik utama diberikan hak untuk memilih pembentukan komite audit.
2. Tugas yang ditetapkan komite audit dalam RUU meliputi : meninjau semua laporan keuangan sebelum publikasi mereka. Pertimbangan hal-hal pemeriksaan penting yang membutuhkan perhatian khusus, dan rekomendasi tentang pengangkatan dan remunerasi auditor eksternal.
3. Tradisi Inggris sering lebih suka self-regulation bukan paksaan hukum, pada tahun 1977 konfederasi industri Inggris mendirikan partai bekerja yang keluar secara luas mendukung prinsip-prinsip Bill yang diusulkan.
4. Sementara Institusi di direksi didukung janji lebih dari direktur non-eksekutif, telah menyatakan keprihatinan bahwa komite audit dengan peran tertentu dalam

pengawasan masalah manajemen keuangan dalam organisasi, dapat digunakan sebagai platform di mana tanggung jawab kolektif dewan yang dirusak.

63

Pressures on the Board of Directors

1. Pada dewan direksi perusahaan dipegang penuh pada tanggung jawab untuk arah dan manajemen Diskusi lingkup dan waktu pekerjaan audit dengan auditor internal
2. Penilaian efektivitas tim audit internal dan laporannya
3. Ulasan dari temuan audit, biasanya dikomunikasikan dalam surat manajemen oleh auditor eksternal.
4. Ulasan dari kebijakan akuntansi untuk memastikan kepatuhan dengan yang terbaik atau umumnya diterima standar praktek accounting
5. Ulasan dari laporan keuangan sebelum naik persetujuan
6. Rekomendasi kepada dewan signifikan dalam pengungkapan audit
7. Hal yang berkaitan dengan penunjukkan auditor dan remunerasi.

Audit Committees and the Board

1. Dalam analisis keterkaitan komite audit dan dewan, kita akan menyoroti beban regulasi meningkatkan eksternal yang dikenakan pada para direktur, oleh karena itu pelurnya mekanisme internal untuk membantu mereka dalam pemakaian dari tanggung jawab tersebut. Selain itu peneliti berusaha untuk mengklarifikasi peran komite audit. Dan melanjutkan untuk mengidentifikasi perusahaan.
2. Akuntabilitas dikomunikasikan melalui penilaian dan manajemen perusahaan oleh pemegang saham secara berkala.

3. Direksi umumnya diperlukan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara jujur dan adil pada perusahaan. Audit hukum tidak membebaskan direksi tanggung jawab utama ini. Hal ini juga tugas direktur untuk menjaga catatan akuntansi yang dirancang dengan baik.
4. Direksi bertanggung jawab untuk penilaian yang salah dalam kaitannya dengan solvabilitas perusahaan, penafsiran yang salah atas fakta-fakta dalam promosi perusahaan melalui penerbitan prospektus, perilaku yang merugikan dalam masalah saham, kesalahan dalam kegiatan pengambil alihan merger, serta pengajuan rekening dan laporan dalam batas waktu yang wajar.

Functions of Audit Committee

Pentingnya meninjau laporan keuangan oleh audit komite yang telah didokumentasikan dengan baik dalam penelitian. Terdapat 50% responden dalam studi 1978 menganggap ini sebagai fungsi utama untuk meningkatkan kualitas laporan yang diterbitkan. Komite akan memastikan bahwa manajemen dan auditor puas dengan kebenaran dan keadilan dari laporan keuangan sebelum mereka tunduk pada dewan utama. Beberapa hal yang menarik:

1. Prinsip akuntansi, kebijakan praktek yang digunakan dalam penyusunan account dan prospektus dan meninjau setiap perubahan
2. Keterbatasan pada arus keuangan
3. Tingkat kesesuaian dan pelaporan praktek dalam industri dan sesuai dengan perundang-undangan, saham asing dan persyaratan standar akuntansi.

4. Kelayakan metode pengukuran mengadopsi tempat akuntansi kontroversial, skema pada neraca keuangan, goodwill dan merk dagang, merger dan akuisisi
5. Kecukupan ketentuan kewajiban seperti pengguhan pajak, saham usang dan depresiasi aset
- 12 6. disclosure of non-recurring or individually significant items such as business rationalization expenses and cost of discontinuation of operations.
7. pengungkapan kontigensi ketentuan dan neraca saldo seperti kontrak kerugian komitmen modal dan mungkin pemerintah tindakan.
8. dasar subjektif perkiraan yang dibuat manajemen di daerah menentu dan tertunda litigasi klaim dan asuransi kerugian
9. pengungkapan transaksi tidak menentu seperti klaim litigasi tertunda dan asuransi kerugian
10. hal yang ingin auditor eksternal diskusikan dengan board

Conclusion

1. Penciptaan komite audit merupakan langkah maju untuk memberikan bantuan dalam arah yang benar. Berfungsinya komite audit diperusahaan Di Amerika Utara, dalam sepuluh terakhir dan memberikan tingkat tertentu kenyamanan dalam perannya sebagai mekanisme yang berguna untuk para direktur untuk memantau tentang kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan.
2. Pelaksanaan komite audit harus selalu menjaga peran penasehat dan pengawasan didelegasikan oleh dewan. upaya meningkatkan kemerdekaan harus bisa terlepas dari tekanan dan mampu bertanggung jawab terhadap publik.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Quality Assurance and effectiveness of audit system*

Penulis : Karapetrovic and Willborn

Introduction

1. Kualitas audit dipakai sejak 20 tahun terakhir sebagai alat untuk menilai efektivitas dalam upaya meningkatkan jaminan kualitas dan mengevaluasi sesuai dengan standar kualitas yang berlaku seperti ISO 9000, Auditor kualitas memeriksa dalam beberapa tahap. Pertama mereka menilai kepatuhan prosedur jaminan kualitas dan dokumentasi terkait standar yang berlaku dan pedoman.
2. Penelitian ini menyajikan pandangan yang sistematis tentang jaminan kualitas di auditing. Pendekatan sistem untuk audit secara singkat dan didikuti oleh diskusi adanya jaminan kualitas audit dan pengendalian diberbagai elemen audit sistem.

Sistem pendekatan untuk audit

Mutu audit sistem dikumpulkan untuk independensi dan objektivitas serta verifikasi bukti audit, dan evaluasi terhadap kriteria audit. Bukti audit berkaitan dengan semua informasi dan materi yang dikumpulkan dengan tujuan mencapai tujuan audit yang direncanakan. Kriteria audit meliputi prosedur yang disepakati, pedoman, standar, SIO 9001 atau QS 9000 yang berfungsi sebagai patokan untuk audit individual.

Karakteristik dari pendekatan sistem dalam audit meliputi :

1. audit individual harmonis dan selaras mencapai tujuan strategis umum bukan seperangkat tujuan taktis yang tidak terkait.
2. Audit individu subsistem dari program audit (misalnya program untuk mengaudit sistem manajemen mutu dapat mencakup siklus audit pada kualitas individu selama periode 3 tahun)
3. Program audit adalah subsistem dari sistem audit general keseluruhan.
4. Sistem audit generic adalah subsistem dari sistem manajemen utama dan dikelola sesuai dengan yang sama manajemen pedoman, metodologi dan prinsip-prinsip sebagai sistem lain
5. Audit saling bergantung yang berarti fokus sementara pada pencapaian tujuan global yang sama dan berbagi sumber daya yang sama output dari satu atau lebih audit dapat menjadi masukan.
6. Audit adalah sistem terbuka dan dinamis yang berarti bahwa parameter dan kendala dimana mereka beroperasi dan dengan adanya perubahan seiring waktu.
7. Audit adalah sistem adaptif mampu membiasakan diri untuk perubahan di lingkungan operasional.

Kualitas Jaminan dan sistem audit

Untuk memastikan kualitas proses audit dan hasil, langkah-langkah yang relevan untuk jaminan kualitas harus diterapkan. Dan melanjutkan dengan diskusi tentang alasan, manfaat, dan keprihatinan menerapkan jaminan resmi didasarkan pada sistem Mutu ISO 9001 serta saran tentang kerangka untuk aplikasi seperti itu.

Membangun kepercayaan

Jaminan kualitas (QA) berkaitan dengan penyediaan kepercayaan diri untuk pelanggan yang kebutuhan mereka untuk kualitas produk atau jasa terpenuhi terus menerus. Karena kualitas audit adalah layanan diberikan kepada eksternal atau pihak ketiga klien, sistem audit mutu harus memberikan keyakinan sehubungan dengan persyaratan audit. Misalnya:

1. Kerangka waktu khusus untuk melakukan audit
2. Ketentuan untuk pengeolaan program audit
3. Pemeliharaan kompetensi auditor yang memadai
4. Ketersediaan sumber daya audit untuk merencanakan dan melakukan audit yang berbasis risiko
5. kerja sama dengan klien dan auditte.

Audit system effectiveness

1. *Efectivenees*

Memberikan kepercayaan kepada klien tentang kebutuhan mereka untuk kualitas audit yang diperlukan

2. *Reliability*

Keandalan sistem audit dapat didefinisikan sebagai probabilitas sistem yang memadai berfungsi dalam rangka waktu tertentu ketika berfungsi dibawah kondisi tertentu dan ruang lingkup.

3. *Availibilty*

Ketersediaan merupakan probabilitas sistem audit secara memadai yang berfungsi bahwa sistem audit secara memadai akan berfungsi pada saat tertentu.

4. *Efectivenees revisited*

Efektivitas sistem adalah masalah yang kompleks melibatkan kemampuan auditor untuk melakukan audit bebas dari kesalahan, siap beroperasi bila diperlukan dan cocok untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.

Conclusion dan penelitian lebih lanjut

1. Standar audit mutu internasional yaitu ISO 10011 (1990) diterbitkan pada awal dekade ini dan telah banyak digunakan untuk melakukan audit individual dan mengelola program audit dan menilai kualifikasi auditor.
2. Penelitian ini berpendapat bahwa bagian dari masalah tersebut terletak pada pembentukan jaminan kualitas dalam audit. Kerangka ISO 9000 adalah solusi yang mungkin, menyediakan kepercayaan dalam kualitas eksternal, sistem audit yang harus dikelola untuk efektivitas internal.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan dalam domain teknik sampling statistik audit, permodelan pemeliharaan audit dan keberlanjutan serta penggunaan skema jaminan kualitas untuk audit perusahaan kecil. Penelitian khusus juga harus diberikan untuk pengembangan metode kuantitatif untuk menilai efektivitas pemeriksaan melalui langkah-langkah kehandalan, ketersediaan, kesesuaian.

BAB X

AUDIT RISK ALERT

Latar Belakang

Standar auditing berdasarkan risiko baru dikeluarkan oleh Auditing Standards Board pada Maret 2006. Laporan Standar Audit nomer 104-111 terdiri atas 8 pernyataan yang terpisah dari standar auditing dan sering disebut sebagai “standar penilaian risiko. prosedur audit yang tepat yang responsive terhadap risiko dinilai.

Alasan SAS Nomor 104-111 dikeluarkan adalah standar yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit dengan berfokus pada prosedur audit secara langsung terhadap penilaian risiko.

Klien akan mendapatkan keuntungan karena pendekatan audit ini akan lebih disesuaikan dengan entitas klien. Sebagai contoh, standar ini menuntut auditor untuk lebih memahami berbagai aspek lingkungan klien, termasuk pengendalian internal dan untuk menilai risiko salah saji material. Hal ini juga memungkinkan bagi auditor untuk memfokuskan prosedur audit pada pos-pos dimana dinilai mengandung risiko yang besar.

Karena kategori yang ada di dalam *alerts* ini diperbarui setiap tahun, maka dapat membantu mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan yang dapat mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Adanya *alerts* ini dapat juga digunakan oleh manajemen untuk menangani pos-pos yang menjadi perhatian audit.

Alerts pada laporan keuangan dirancang untuk para pihak di dalam manajemen keuangan dan komite audit suatu entitas untuk mengidentifikasi dan memahami siklus serta metode akuntansi dan perkembangan peraturan yang ada yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan entitas, terutama perkembangan dan kebijakan ekonomi.

Audit risk alert berdasarkan AICPA Risk Alert Summarize SAS 104-111 yaitu:

1. SAS 104 Amends SAS 1 Due Professional Care

Untuk menerapkan SAS 104 auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan cara memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang lebih rendah sehingga laporan keuangan terbebas dari salah saji materialitas. Auditor tidak memeriksa keseluruhan transaksi klien karena adanya keterbatasan waktu dan biaya sehingga jaminan mutlak tidak dapat dicapai. Ini adalah premis dasar untuk standar baru lainnya.

2. SAS 105 Amends SAS 95 Generally Accepted Auditing Standards

Peraturan ini memperluas lingkup standar pekerjaan lapangan kedua yaitu dari pemahaman pengendalian internal menjadi pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk di

dalamnya adalah pengendalian internal. Standar ini juga menekankan kualitas dan kedalaman pemahaman yang akan diperoleh oleh auditor dalam mengidentifikasi salah saji material di dalam laporan keuangan apakah terjadi karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) serta untuk merancang sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Standar ini pada dasarnya menganggap bahwa opini audit adalah hasil dari pemahaman auditor terhadap entitas, lingkungan dan pengendalian internalnya, serta ketersediaan bukti yang cukup.

3. SAS 106 Audit Evidence

SAS 106 ini menjelaskan prosedur penilaian risiko audit sebagai prosedur audit sehingga auditor harus memperoleh pemahaman tentang lingkungannya. Standar ini mengatur mengenai segala sesuatu tentang ketersediaan dan kecukupan bukti audit yang diperoleh dengan melakukan prosedur penilaian risiko serta yang diperoleh dengan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantive. Hasil dari prosedur penilaian risiko dan prosedur audit lanjutan lainnya serta adanya bukti audit yang cukup dan tepat akan menjadi dasar auditor untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut.

4. SAS 107 Audit Risk & Materiality

SAS 107 merupakan landasan dari standar berbasis risiko yang menyatakan bahwa auditor harus memiliki dan mendokumentasikan secara tepat untuk pendekatan audit. Dalam standar ini menyatakan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah dan auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada setiap tahapan dan menunjukkan semua

kemungkinan salah saji telah diidentifikasi dan telah dikomunikasikan ke level manajemen yang sesuai.

5. SAS 108 Audit Planning & Supervision

SAS 108 memberikan petunjuk bagi auditor tentang perencanaan audit. Komponen kunci dari SAS 108 antara lain:

- a. Strategi audit secara keseluruhan
- b. Rencana audit
- c. Menentukan keterlibatan professional sesuai dengan bidangnya.

Ketika mengembangkan rencana audit, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang entitas yang akan diaudit.

6. SAS 109 Understanding The Entity and Its Environment Assessing The Risks of Material Misstatements

Dalam SAS 109 dijelaskan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang terjadi kemungkinan berasal dari kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) sehingga auditor bisa merancang sifat, waktu dan luas prosedur audit lebih lanjut. Untuk memperoleh pemahaman tentang entitas, auditor perlu melakukan prosedur penilaian risiko yang meliputi pertanyaan yang akan diajukan, prosedur analitik, observasi dan pemeriksaan. SAS 109 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal untuk mengevaluasi desain pengendalian internal klien dan menilai apakah klien telah melaksanakan pengendalian internal tersebut secara efektif. SAS 109 juga mewajibkan auditor untuk menilai risiko salah saji

material baik di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi. Penilaian salah saji material pada tingkat asersi merupakan dasar untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit lebih lanjut. Auditor harus menentukan apakah salah satu risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan tersebut.

7. SAS 110 Performing Audit Procedure in Response to Assessed in Risk and Evaluating the Audit Evidence Obtained

Dalam SAS 110 menjelaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan dasar yang memadai untuk memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. SAS 110 juga memberikan pedoman untuk menentukan respon secara keseluruhan dan merancang serta melakukan prosedur audit lebih lanjut. SAS 110 juga mewajibkan auditor untuk mendokumentasikan hubungan antara risiko yang dinilai oleh auditor dan pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut.

8. SAS 111 Amends SAS 39 Audit Sampling

SAS 111 memberikan panduan lebih lanjut mengenai salah saji yang dapat ditoleransi. Selain itu, standar ini bisa menjadi parameter auditor untuk mengembangkan sampel, baik yang menggunakan metode statistic maupun non statistic. Sehingga kedua metode tersebut akan menghasilkan ukuran sampel yang sebanding.

Penyimpanan dan Lembaga Pinjaman

Sebagai ahli laporan keuangan atau auditor adalah penting untuk memahami kompleksitas industri penyimpanan dan peminjaman lembaga termasuk operasional, peraturan, akuntansi, pelaporan, dan aspek audit unik untuk industri ini. publikasi AICPA memberikan informasi latar belakang umum bersama dengan perkembangan terakhir, informasi tambahan tentang masalah yang kompleks, dan contoh ilustrasi untuk akuntansi umum dan praktek audit industri penyimpanan dan peminjaman lembaga, termasuk bank dan lembaga tabungan, serikat kredit, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan hipotek. Topik yang dibahas dalam publikasi penyimpanan dan pinjaman lembaga termasuk

1. investasi pada efek hutang dan ekuitas dan gangguan lainnya-dari-sementara.
2. pinjaman dan kerugian kredit.
3. akuntansi untuk transfer dan pelayanan dari aset keuangan.
4. restrukturisasi hutang bermasalah
5. Perkiraan audit seperti penyisihan pinjaman dan sewa kerugian.

Juga dibahas adalah perkembangan terbaru di bidang-bidang seperti konsolidasi, transfer dan pembayaran, restrukturisasi utang bermasalah, piutang pembiayaan dan penyisihan kerugian

Staf Audit Praktek Alerts menyoroti baru, muncul, atau dicatat keadaan yang dapat mempengaruhi bagaimana auditor melakukan audit di bawah adapersyaratan standar dan aturan PCAOB dan hukum yang relevan. Auditor harus menentukan

apakah dan bagaimana menanggapi inikeadaan berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disajikan. Laporan terkandung dalam Staf Audit Praktek Alerts tidak menetapkan aturan Dewan dan tidak mencerminkan tekad Dewan atau penilaian tentang perilaku dari setiap perusahaan tertentu, auditor, atau orang lain.

Ringkasan bisnis plan

Pasar negara berkembang memainkan peran yang semakin penting dalam dunia ekonomi mengingat prospek pertumbuhan yang tinggi ekonomi dan ukuran pasar yang signifikan.

Pinjaman material dan tidak ada catatan atau perbedaan yang signifikan mengenai transaksi tertentu;

1. Upaya oleh manajemen untuk mencegah atau mengubah permintaan konfirmasi atau tanggapan;
2. Penyimpangan dalam kontrak penjualan, seperti segel khusus perusahaan ditempelkan pada kontrak penjualan yang bukan milik yang diklaim pelanggan yang disebutkan dalam kontrak;
3. Mengakui pendapatan dari kontrak atau pelanggan yang keberadaannya tidak bisa dikuatkan;
4. Mencatat penjualan produk dikirim ke gudang atau barang forwarders di mana tidak ada pelanggan diidentifikasi;
5. Bahan yang dirahasiakan fakta-fakta seputar transaksi akuisisi, transaksi penjualan, dan transaksi off-balance-sheet dengan pihak terkait.
6. Merekam aset yang bukti penguasaan, kepemilikan, atau Judul tidak jelas atau sulit untuk menguatkan
7. Potensi penghitungan ganda aktiva tetap;

8. Pencatatan biaya operasional uncorroborated dimana tujuan bisnis tidak jelas;
9. Manipulasi catatan akuntansi untuk menjelaskan sifat atau menyembunyikan pembayaran suap atau pembayaran lainnya yang tidak pantas;
10. Perbedaan dijelaskan signifikan antara jumlah termasuk dalam laporan keuangan dalam pengajuan SEC dan jumlah termasuk dalam laporan keuangan kepada regulator lainnya, seperti pemerintah daerah;
11. Penggunaan pribadi-jenis rekening bank yang diselenggarakan atas nama perusahaan petugas atau karyawan bukan perusahaan-jenis rekening bank untuk bisnis perusahaan; dan
12. Penundaan yang tidak biasa oleh manajemen dalam produksi rutin dokumen yang diminta oleh auditor.

Standar PCAOB membutuhkan auditor untuk melakukan audit mereka untuk menanggapi risiko penipuan dan risiko lainnya dari salah saji material, dan untuk mendapatkan yang relevan dan bukti terpercaya yang cukup untuk mendukung opini auditor. praktek ini peringatan membahas pertimbangan tertentu yang mungkin relevan saat melakukan audit di pasar negara berkembang.

Meskipun kondisi, situasi, dan risiko penipuan yang dijelaskan dalam peringatan ini telah diamati dalam audit perusahaan di pasar negara berkembang tertentu, mereka mungkin juga hadir pada perusahaan di pasar lain. Hal-hal yang dibahas dalam peringatan ini relevan kapan kondisi seperti itu, situasi, atau risiko *fraud* yang hadir dalam audit dari perusahaan yang berlokasi di negara berkembang atau dikembangkan pasar.

Seperti perusahaan publik di negara-negara maju, emerging market perusahaan yang ingin meningkatkan modal di pasar internasional mungkin ingin menyajikan posisi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang kuat pada pendapatan dan laba. Pada gilirannya, ini mungkin menciptakan insentif atau tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan bukan dari laporan hasil buruk atau berita buruk kepada masyarakat investasi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan gagal untuk mewujudkan akuisisi diumumkan sebelumnya, ada risiko bahwa manajemen mungkin memanipulasi laporan keuangan untuk membuat mereka muncul seolah olah akuisisi telah terjadi. Sebagai contoh lain, manajemen di unit operasi jarak jauh terletak dari multinasional besar perusahaan lokasi mungkin merasa tekanan untuk melaporkan hasil meningkat. Selain insentif dan tekanan secara rutin dipertimbangkan dalam audit perusahaan publik, auditor harus mempertimbangkan karakteristik unik dari perusahaan pasar atau lingkungan yang muncul yang mungkin mengakibatkan penipuan tertentu risiko. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin terlibat dalam bisnis yang signifikan kemitraan dengan badan milik negara atau VIE. Dalam situasi itu, perusahaan mungkin termotivasi untuk mengkonsolidasikan kemitraan atau VIE untuk memperkuat dilaporkan posisi keuangan, bahkan jika pembatasan hukum yang signifikan mencegah perusahaan dari memperoleh saham mayoritas di kemitraan atau aset. Misalnya, Perusahaan mungkin masuk ke dalam pengaturan kontrak dengan VIE yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan VIE, meskipun mungkin ada ketidakpastian yang signifikan mengenai substansi ekonomi mereka.

Sebagai contoh lain, pembatasan hukum pada pergerakan aset perusahaan mungkin menyebabkan perusahaan untuk mempertahankan sejumlah besar uang tunai atau aset likuid lainnya di unit usaha di wilayah hukum tertentu, yang dapat membuat insentif untuk penyalahgunaan aset.

Peluang

Beberapa risiko penipuan timbul saat kondisi internal atau eksternal dan lemah pengendalian internal memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. aspek-aspek tertentu dari bisnis lingkungan di pasar negara berkembang dapat menciptakan peluang untuk melakukan penipuan, karena dibahas dalam contoh di bawah ini. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di pasar berkembang mungkin memiliki dominan Kehadiran di wilayah geografis di mana letaknya karena itu adalah satu majikan terbesar di kawasan ini, atau mungkin melakukan kontrol atas bahan baku di struktur VIE tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko terkait dengan dihilangkan, tidak lengkap, atau pengungkapan yang tidak akurat

Pertimbangan Penipuan adalah Bagian Integral Audit

Pertimbangan penipuan merupakan bagian integral dari audit bawah PCAOB standar. Standar PCAOB mengharuskan rencana auditor dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas Selain menunjukkan risiko penipuan tinggi, di beberapa situasi, kondisi dan situasi dalam daftar ini mungkin juga indikasi pemahaman:

1. Industri yang relevan dan faktor regulasi, termasuk hukum, dan lingkungan politik, yang mungkin termasuk hal-hal

seperti: Signifikansi perusahaan dalam perekonomian regional atau local dan tingkat pengaruh atas Industri, dan regional atau pemerintah daerah, dan

2. Norma-norma budaya di lingkungan bisnis dan peraturan;
3. Perusahaan tujuan, strategi, dan risiko bisnis terkait; struktur organisasi; dan sumber pendanaandari operasi perusahaan;
4. Investasi yang signifikan perusahaan, termasuk metode ekuitas investasi, usaha patungan, dan entitas bunga variabel
5. Sumber pendapatan perusahaan, termasuk relatif profitabilitas produk dan layanan utama; dan
6. Pemasok dan pelanggan utama perusahaan hubungan.

Perbedaan signifikan dapat ada antara lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di pasar negara berkembang dan orang-orang di maju pasar, yang dapat mempengaruhi risiko salah saji dalam laporan keuangan.

Misalnya, perusahaan di pasar negara berkembang dapat dikenakan berubah dengan cepat atau kurang konsisten peraturan pengawasan dan pelaporan persyaratan, sedangkan perusahaan di pasar negara maju tidak mungkin. Ini dan aspek lain darilingkungan bisnis di pasar negara berkembang dapat menciptakan insentif, tekanan, dan peluang yang dapat menyebabkan risiko lebih tinggi terhadap penipuan. manajemen perusahaan mungkin memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintah daerah atau negara.

Dalam keadaan seperti:

1. Manajemen mungkin bisa mendikte syarat atau kondisi untuk local pemasok atau pelanggan, yang mungkin mengakibatkan panjang non-lengan

transaksi.

2. Manajemen mungkin bisa menekan personil dari bank lokal atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan informasi palsu kepada auditor.
3. Karyawan perusahaan mungkin tidak bersedia melaporkan kasus penipuan karena alasan budaya atau takut akan pembalasan dari manajemen.

Sementara perlindungan whistleblower telah diperkenalkan di banyak negara-negara emerging market, pengamat mengatakan bahwa masih ada perlu meningkatkan efektivitas program whistleblower.

Lemahnya internal dan kurangnya pemerintahan yang kuat mekanisme telah diamati di perusahaan di pasar berkembang tertentu negara. Ini mungkin berasal dari kurangnya keakraban dalam budaya lokal dengan tertentu konsep tata kelola, seperti larangan self-dealing, bahkan di mana serupa konsep hukum. Budaya seperti itu bisa memberikan kesempatan untuk manajemen untuk mempengaruhi pejabat senior perusahaan lain atau berbagai ketiga pihak untuk memberikan informasi palsu atau menyesatkan auditor perusahaan.

Jika mengkritik atau mempertanyakan sosok otoritas bertentangan dengan local budaya, karyawan perusahaan mungkin ragu-ragu untuk mengungkapkan keprihatinan apapun tentang tindakan manajemen untuk auditor. Seperti lingkungan dapat memberikan peluang tambahan bagi manajemen untuk menimpa kontrol atau sengaja salah mengutarakan laporan keuangan.

Sebagai contoh lain, sebuah perusahaan di pasar berkembang mungkin dibuat sebagai spin-off dari badan swasta atau BUMN yang lebih besar. Operasi komponen dari entitas yang lebih besar mungkin di antara pemasok terbesar perusahaan atau pelanggan. Dalam kasus tertentu, individu atau kelompok yang sama yang mengontrol.

Respon Auditor Untuk Penipuan Risiko

Standar PCAOB mengharuskan desain auditor dan melaksanakan audit yang tanggapan yang mengatasi risiko penipuan yang diidentifikasi dan dinilai. Auditor harus mencakup tanggapan yang memiliki efek keseluruhan pada bagaimana audit dilakukan (misalnya, membuat tugas keterlibatan yang sesuai) dan tanggapan melibatkan sifat, waktu, dan luas prosedur audit (misalnya, memodifikasi prosedur audit yang direncanakan)

Di bawah standar PCAOB, tanggapan dia auditor terhadap risiko dinilai dari salah saji material, terutama risiko *fraud*, harus melibatkan penerapan skeptisisme profesional dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. tidak efektif tanggapan terhadap risiko penipuan dapat mengakibatkan kegagalan auditor untuk mendeteksi bahan salah saji laporan keuangan atau kegagalan untuk memperoleh sesuai cukup mengaudit bukti untuk mendukung pendapat dalam laporan auditor.

Contoh : Penerapan skeptisisme profesional dalam menanggapi risiko penipuan dinilai mungkin termasuk "memodifikasi prosedur audit yang direncanakan untuk memperoleh lebih handal bukti tentang asersi yang relevan dan ... memperoleh sesuai cukup bukti untuk menguatkan penjelasan atau representasi manajemen.

Prosedur Audit Menanggapi Risiko Penipuan

Auditor harus melaksanakan prosedur substantif, termasuk tes detail, yang secara khusus responsif terhadap risiko penipuan dinilai, termasuk prosedur tertentu untuk mengatasi risiko manajemen override kontrol.

Banyak kondisi yang dibahas di atas yang menunjukkan penipuan tinggi risiko muncul untuk melibatkan kemungkinan upaya untuk melebih-lebihkan jumlah aset atau pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan. Ketika melakukan pemeriksaan prosedur untuk mengatasi risiko *fraud* tertentu, terutama yang melibatkan keberadaan aset seperti kas dan piutang.

Definisi *Fraud*

Fraud memiliki definisi merupakan kecurangan oleh seseorang. Dari pendekatan pribadi terdapat dan ada pendekatan disebut sebagai the segitiga *fraud*. Ketiga alasan itu adalah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Terdapat 4 pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) *Exposure* (pengungkapan).

1. Faktor Individu

- a. Berhubungan dengan moral, sebagian besar berhubungan dengan keserakahan (*greed*)
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*) yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan.

52

2. Faktor Generic

- a. Kesempatan (opportunity) melakukan kecurangan tergantung kedudukan pelaku terhadap kecurangan objek.
- b. Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya dan terungkap.

Gejala Adanya *Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh top manajemen/manajer tingkat atas lebih sulit ditemukan dan dilakukan daripada oleh karyawan.

1. Gejala *fraud* pada manajemen:
 - a. Ketidakcocokan di antara manajemen.
 - b. Moral dan motivasi karyawan rendah.
 - c. Kurangnya staf pada departemen akuntansi.
 - d. Adanya tingkat complain yang tinggi terhadap entitas dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas.
 - e. Adanya kekurangan pada kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
 - f. Penjualan atau laba yang menurun sementara hutang dan piutang dagang meningkat.
 - g. Perusahaan melakukan kredit sampai batas-batas maksimal dalam jangka waktu yang lama.
 - h. Terdapat kelebihan persediaan.
 - i. Ada peningkatan ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.
 - j. Penggantian auditor eksternal sering.
2. Gejala *fraud* pada karyawan
 - a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa penjelasan pendukung.

- b. Adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung
- c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku besar
- d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
- e. Kekurangan barang yang diterima oleh perusahaan
- f. Naiknya harga barang yang dibeli
- g. Adanya faktur ganda
- h. Mutu barang yang diganti.
- i. Adanya transaksi yang tidak masuk akal

Langkah Mengantisipasi Terjadinya *Fraud*

Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani *fraud*, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensik) dan manajemen perusahaan.

Red Flag

Merupakan kondisi janggal berbeda dengan suatu keadaan normal. Dengan kata lain, *red-flags* adalah indikasi akan adanya tidak biasa. *Red flags* tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah/tidak tmerupakan tanda peringatan bahwa bisa *fraud* terjadi.

Tipe *Red flag*

1. *Red flag* pada karyawan

ciri-cirinya: perubahan gaya hidup karyawan, seperti mobil mewah, dan perhiasan; memiliki permasalahan hutang pribadi; perubahan perilaku, seperti indikasi penggunaan

- 9
2. *Red flag* pada manajemen
ciri-cirinya: enggan untuk memberikan informasi kepada auditor; terdapat lingkungan pengendalian internal yang lemah; sering terjadi pergantian auditor eksternal;
- 9
3. *Red flag* pada perubahan kebiasaan
ciri-cirinya: kreditur dan kolektor mendatangi tempat kerja; mudah kesal/tersinggung dengan pertanyaan yang tidak wajar.
- 9
4. *Red flag* pada kas/piutang
ciri-cirinya: aktivitas mendadak; transaksi tunai berlebihan yang dibenarkan; dan sebagian besar penghapusan dari rekening bank yang tidak direkonsiliasi.
- 9
5. *Red flag* pada bagian penggajian
ciri-cirinya: jam lembur yang tidak konsisten untuk pusat biaya; lembur dibebankan selama periode tertentu.
- 9
6. *Red flag* pada persediaan
ciri-cirinya: semakin banyak keluhan tentang produk atau layanan; peningkatan pembelian persediaan tanpa ada peningkatan penjualan; kurangnya keamanan fisik aset/persediaan.

Kebijakan Umum Penerapan Strategi Anti *Fraud*

87
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Strategi anti *Fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang memiliki 4 pilar yaitu :

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan bagian sistem pengendalian *Fraud* telah memuat langkah-langkah mengurangi potensi-risiko terjadinya *Fraud*, yang kurang kesadaran mencakup terhadap bahaya *Fraud* anti-*Fraud* awareness, identifikasi kerawanan, dan penerapan prinsip mengenal pekerja.

2. Deteksi

23

Deteksi bagian dari sistem pengendalian *Fraud* telah memuat langkah dalam rangka mengidentifikasi & menemukan *Fraud* dalam kegiatan Bank, mencakup kurang kebijakan *whistleblowing*, pelaksanaan audit mendadak (surprise audit), dan sistem pengamatan (*surveillance system*).

3. Investigasi, pelaporan dan sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

Artikel Pertama

Judul : *Auditors' perception of fraud risk indicators Malaysian evidence*

Penulis : Malcolm Smith

Introduction

1. *Fraud* didefinisikan oleh Malaysian Approved Standart Auditing sebagai "Tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu antara manajemen, karyawan, yang bisa menghasilkan laporan keuangan yang tidak benar/kekeliruan"
2. Menurut Palshikar (2002) *fraud* merupakan masalah yang serius dan menjadi tantangan dalam bisnis saat ini, menyatakan bahwa *fraud* merupakan kejahatan kerah putih yang dominan dalam lingkungan bisnis dan organisasi pemerintah, khususnya bidang jasa keuangan.
3. Auditor, akuntan dan profesi lainnya perlu mengambil langkah proaktif untuk mengekang tindakan *fraud* di perusahaan, dengan peningkatan pada regulasi.
4. *Fraud* telah menjadi masalah besar di Malaysia (Manajemen time, 2001) Melaporkan bahwa lebih dari 60% perusahaan yang terdaftar di Malaysia telah melakukan tindakan *fraud*.

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu :

1. Bertujuan untuk mengidentifikasi *red flag* sebagai kesadaran bagi auditor
2. Mengeksplorasi auditor berdasarkan faktor jenis kelamin, pengalaman auditor, audit tenure, jenis audit firms, dan *fraud experience*

Literature Review

SAS 99 mengharuskan auditor-auditor dalam pengumpulan informasi yang diperlukan dalam salah saji material karena *fraud* dan menerapkan profesionalisme untuk mampu mempertimbangkan atribut risiko.

Terdapat 3 poin utama risiko:

1. Jenis risiko (kecurangan pelaporan keuangan atau penyalahgunaan aset).
2. Signifikansi dari risiko.
3. Kemungkinan risiko mengakibatkan salah saji material.

Menurut Burn (1997) Bahwa adanya *Red flags* pada bisnis akan memungkinkan terjadinya *fraud*. Adanya *Red flag* akan mengingatkan auditor tentang adanya kemungkinan *fraud* dan memperingatkan secara dini kepada kliennya. Mendeteksi adanya *fraud* auditor bisa menerapkan "Skeptisme" secara profesional.

Menurut Hackenbrack (1993) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit akan merasa bahwa apenilaian tentang risiko *fraud* lebih efektif dengan membedakan anatar faktor risiko dan bobot relatif.

Pada penelitian Bell dan Carcello (2000) mengembangkan untuk melakukan pengujian regresi logistik untuk memperkirakan kemungkinan *fraud* pada pelaporan keuangan dengan sample 77 yang terlibat *fraud* dan 305 yang tidak terlibat *fraud*. Mereka menemukan adanya *Red flags* secara signifikan efektif diskriminasi anatar frau dan non *fraud* yaitu:

1. Ketidak jujuran manajemen kepada auditor
2. Pengendalian internal yang lemah

3. Sikap dari manajemen yang agresif
4. Penekanan pada proyeksi laba yang tidak semestinya
5. Hubungan yang sulit tentang transaksi yang berhubungan dengan audit.

Penelitian Church (2001) memberikan bukti bahwa auditor internal sensitif terhadap faktor kemungkinan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Dalam situasi pendapatan operasional lebih besar daripada yang diharapkan, bonus plan.

Penelitian Knap (2001) mengungkapkan bahwa pengalaman auditor dan keberhasilan sebelumnya dalam mendeteksi *fraud* adalah variable konsisten signifikan dalam pendeteksian *fraud* di siklus audit, mereka melakukan percobaan dengan meneliti efek dari pengalaman auditor dan risiko eksplisit dalam mendeteksi *fraud* melalui prosedur analitis yang hasilnya menunjukkan bahwa manajer audit lebih efektif menilai risiko *fraud* daripada senior audit melalui prosedur analitis.

Chung dan Monroe (2001) Meneliti efek dari jenis kelamin dan kompleksitas tugas keakuratan penilaian audit. Mereka menemukan bahwa ada perbedaan pada penilaian secara akurasi, khususnya mencatat interaksi dimana perempuan lebih akurat dibanding laki-laki saat memproses tugas audit yang kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan survei Kuisoner sebagai metode pengumpulan data. Kuisoner ini bersifat kerahasiaan yang mendorong keterbukaan dan telah banyak digunakan dalam penelitian Audit.

Responden dari survei ini auditor dari perusahaan di Kuala Lumpur. Sampel auditor diambil dari populasi perusahaan yang

terdaftar di Kuala Lumpur (Malaysia Ikatan Akuntan). Tekniknya yaitu random sampling, instrument survei terdiri dari surat lamaran, amplop prab-bayar dan kuisisioner yang dikirim kepada 200 auditor. Sebanyak 48 persen menanggapi kuisisioner sehingga tingkat respon ada 24%.

Terdapat 3 bagian didalam kuisisioner yaitu:

1. Bagian pertama berisi informasi demografis tentang responden
2. Bagian kedua tentang pertanyaan apakah auditor telah mengalami kasus *fraud* selama mengaudit dan persepsi tentang pentingnya tingkat *Red flag*. Dengan menggunakan skala likert "1" tidak penting samasekali "2" pada umumnya tidak penting "3" pada umumnya penting dan "4" sangat penting.
3. Bagian ke tiga kuisisioner berisi pertanyaan yang lebih spesifik
 - a. Pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden untuk berpendapat dan membuat rekomendasi tentang *Red flag* lainnya yang tidak tercantum dalam daftar pertanyaan.
 - b. Pertanyaan tertutup, mengumpulkan pendapat responden tentang apakah perlu atau tidak daftar *Red flag* selama penugasan mereka.

Result dan data analisis

Peneliti melakukan pengujian normalitas untuk memeriksa distribusi data "normal". Pada ukuran statistiknya menghasilkan 0,8280 yang berarti item yang dibuat dengan skala konsisten secara internal.

Tabel 1, memberikan informasi demografis mengenai responden yang terdiri dari 27 laki-laki dan 21 auditor

perempuan. Sebanyak 26 auditor memiliki kurang dari 3 tahun pengalaman audit dan 22 auditor memiliki pengalaman diatas 3 tahun. Sebanyak 20 responden pernah menangani kasus *fraud* dan 28 sebelumnya tidak pernah.

Tabel 2, menunjukkan hanya 7 yang memiliki score rata-rata 3,00 (umumnya penting). hanya satu indikator bersak dari pengaruh manajemen atas pengendalian lingkungan dan enam lainnya berasal dari operasi dan stabilitas keuangan.

Tabel 3, menunjukkan bahwa karakteristik stabilitas keuangan dan operasi pada *Red flag* dianggap lebih penting daripada karakteristik manajemen dan pengaruh pengendalian atas lingkungan dan kondisis industri.

Tabel 4, hasil t-test antara perbedaan kelompok yang berhubungan dengan kondisi industri

Hasil Empiris

Pengaruh manajemen atas kelompok lingkungan pengendalian menduduki peringkat sebagai indikator risiko *fraud* yang paling penting dalam membantu auditor untuk memprediksi kehadiran acara penipuan. Auditor tampaknya memahami bahwa “pengendalian internal yang lemah” dan “sikap yang salah terhadap kepentingan mereka” akan menyebabkan risiko yang lebih besar untuk kelangsungan organisasi.

Persepsi auditor tidak ditemukan pengaruh oleh latar belakang demografis, yang diwakili oleh jenis kelamin, tahun pengalaman atau jenis perusahaan audit. Hasil memotivasi beberapa wilayah penelitian masa depan.

Untuk menguji apakah indikator risiko penipuan ini memang membantu dalam investigasi melaporkan kesalahan dan kasus penipuan di Malaysia. Mungkin temuan ini dapat

membantu peneliti untuk mengembangkan indikator risiko penipuan baru yang memperhitungkan kasus aktual penipuan Malaysia.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Terdapat 3 penelitian sebelumnya relevan dengan penelitian ini : Apostolou et al., 2001b; yang hasilnya operasi dna stabilitas keuangan dianggap penting sebagai karakteristik dimanajemen dan pengaruh pengendalian atas lingkungan pada *Red flag* Abdul Majid and Tsui, 2001; hasilnya *Red flag* adalah yang penting untuk menentukan penegndlaian and Heiman-Hoffman et al., 1996. Hasilnya sulitnya transaksi audit sehingga sulit untuk menentukan pengendalian pada organisasi.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini para auditor memberikan tanggapan bahwa pentingnya indikator risiko yang terkait dengan potensi *fraud* pada manajemen.

Persepsi auditor tidak berpengaruh terhadap demografi latar belakang mereka, serta jenis kelamin dan pengalaman audit. Hasil ini didasarkan pada pengalaman umum auditor dengan *fraud* pada manajemen dan menunjukkan auditor harus memberikan fokus perhatian terhadap *Red flag* yang berkaitan dnegan operasi dan stabilitas keuangan. Temuan ini juga pentingnya melakukan pengendalian internal yang baik dalam organisasi agar bisa terhindar dari *fraud*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memotivasi peneliti selanjutnya, untuk meneliti apakah indikator dari risiko *fraud* akan membantu dalam menyelidiki masalah *fraud* di Malaysia sehingga bisa mengembangkan indikator risiko *fraud* yang harus diperhitungkan

BAB XI

FRAUD AUDITING

DefinisI *Fraud*

Fraud merupakan kejahatan memanipulasi informasi dengan sengaja yang bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. *Fraud* pada umumnya dapat terjadi karena sejumlah alasan yakni internal kontrol yang lemah, pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan terhadap aturan atau ketentuan yang lemah ataupun dapat menyebabkan penetapan kebijakan yang tidak up to date,serta monitoring yang lemah.

Jenis - Jenis Kecurangan

⁶¹ Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keungan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah laporan keuangan yang curang (*fraudulent financial reporting*) dan penyalahgunaan aktiva (*misapropriation of assets*).

1. Kecurangan pada laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*)

Kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau pengabaian jumlah di dalam pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan.

Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya untuk melebih sajian laba, perusahaan juga mungkin dengan sengaja menyajikan laba lebih rendah dari yang seharusnya ketika sebenarnya laba itu tinggi untuk membentuk cadangan laba. Praktek seperti ini disebut *income smoothing* dan *earnings management*.

Income smoothing (perataan laba) merupakan salah satu bentuk pengaturan laba dimana manajemen menukar posisi pendapatan dan laba di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Perataan laba adalah tindakan yang sengaja memanipulasi dan dilakukan oleh manajemen mengenai tingkatan labadilaporkan agar keuntungan perusahaan berada ditingkat yang dianggap normal

2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation asset*)

Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan atau pencurian aset perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kondisi yang menyebabkan *Fraud* (*Fraud Triangle*)

1. Tekanan

Tekanan adalah situasi diaman seseorang meyakini untuk harus melakukan *fraud*. Misalnya, saat seseorang berada dalam

kondisi kesulitan ekonomi, maka seorang karyawan akan terdorong untuk melakukan *fraud*. Faktor kesejahteraan karyawan menjadi salah satu perhatian penting manajemen untuk mengikis dorongan atau motivasi karyawan untuk melakukan *fraud*.

Memang tidak ada jaminan yang mutlak bahwa karyawan yang sejahtera sekalipun tidak akan melakukan *fraud*. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi setidaknya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, selain diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya *fraud* juga dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.

2. Peluang

Peluang adalah situasi dimana seseorang meyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan *fraud* dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, bahkan di saat seseorang tersebut tidak memiliki tekanan untuk melakukan *fraud*.

3. Rasionalisasi

Terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Pelaku *fraud* merasa bahwa tindakannya bukan merupakan kecurangan namun memang merupakan haknya, kadang pelaku merasa berperan dan berjasa dalam organisasi.

Latar belakang muncul *fraud* juga bisa disebabkan oleh:

1. Beberapa risiko penipuan muncul ketika kondisi internal dan eksternal mendukung
2. Melemahnya pengendalian internal memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk terlibat dalam *fraud*

3. Adanya *whistleblower*
4. Lemahnya kontrol atas *whistleblower*
5. Lemahnya pengendalian internal dan kebijakan pemerintah yang terlalu mendominasi.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) *Exposure* (pengungkapan). Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu (faktor individual), sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi (faktor generic/ umum).

1. Faktor Individu

- a. Berhubungan dengan moral, sebagian besar berhubungan dengan keserakahan (*greed*)
- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*) yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan karyawan yang terkait dengan asset yang dimiliki entitas tempatnya bekerja. Selain itu adanya tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan *fraud*.

2. Faktor Generic

Faktor Risiko Penyebab Kecurangan pada laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kecurangan.

25
Dalam *fraud triangle*, kecurangan pada laporan keuangan dan penyalahgunaan asset terbagi dalam tiga kondisi yang sama, tetapi faktornya berbeda.

1. Tekanan atau Insentif

29
Tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah karena menurunnya prospek keuangan perusahaan. Perusahaan juga mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau tolak ukur para analis seperti laba periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, manajemen akan memanipulasi laba hanya untuk menjaga reputasi mereka

2. Peluang

29
Meskipun laporan keuangan pada masing-masing perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar. Perputaran personil bagian akuntansi atau kelemahan lain dalam metode dan proses akuntansi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji.

3. Rasionalisasi

29
Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko.

Faktor risiko untuk penyalahgunaan asset

1. Tekanan

Tekanan keuangan merupakan dorongan yang umum bagi pegawai yang menyalahgunakan asset. Pegawai yang memiliki tuntutan ekonomi yang besar, berpeluang besar untuk melakukan tindakan penyalahgunaan asset.

2. Peluang

Kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan atau pencurian memang terdapat pada semua perusahaan. Akan tetapi, kesempatan itu jauh lebih besar pada perusahaan yang memiliki akses kas yang mudah, persediaan atau asset lainnya yang tidak memiliki pengendalian yang kuat.

3. Rasionalisasi

Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai dan manajer merasionalisasi pencurian asset. Jika manajemen melakukan penipuan terhadap pelanggan dengan jalan membebankan harga yang terlalu tinggi untuk barang atau terlihat dalam taktik penjualan yang sangat agresif. Pada level karyawan, adanya perasaan bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan seperti memanipulasi laporan keuangan atau absensi dianggap benar seperti yang para manajer lakukan dalam kecurangan yang lainnya.

4

Menilai Risiko Kecurangan

Auditor tidak menjamin bahwa semua *fraud* terdeteksi, tetapi harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil prosedur auditnya, sehingga dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan, ketidakberesan, dan ketidaktaatan yang material dapat dideteksi.

Beberapa standar audit yang mewajibkan auditor untuk mendeteksi *fraud* antara lain terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP).

Sejalan dengan tanggung jawab profesi auditor serta dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut, maka dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan risiko kecurangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor hendaknya menempuh langkah berikut berkaitan dengan risiko kecurangan:

1. Mengenal kemungkinan kecurangan terkait dengan kegiatan/substansi masalah/hal yang akan diaudit
2. Menetapkan pengendalian yang seharusnya ada, dalam rangka memastikan bahwa risiko kecurangan di atas tidak akan terjadi.
3. Penilaian didasarkan pada tersedia atau tidaknya prosedur pengendalian, serta efektif atau tidaknya prosedur pengendalian tersebut.
4. Mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan
5. Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) serta dampak (consequences) kecurangan tersebut
6. Memilih risiko kecurangan yang akan di alami dalam kegiatan audit.

Dalam menilai risiko kecurangan, auditor harus mempertahankan sikap skeptisme profesionalnya. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan.

1. Skeptisme Professional

SAS 1 menyatakan, dalam melaksanakan sketisisme profesional, auditor “tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kecurangan absolut.” Dalam praktik, mempertahankan sikap skeptisisme profesional ini mungkin sulit karena, meskipun sudah ada contoh-contoh mutakhir yang menyolok mengenai laporan keuangan yang curang, kecurangan yang material terbilang jarang jika dibandingkan dengan jumlah audit laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Pikiran.

2. Sumber Informasi untuk Menilai Risiko Kecurangan.

a. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen.

Pertanyaan yang diajukan harus spesifik termasuk kemungkinan manajemen mencurigai adanya kecurangan.

b. Faktor-faktor risiko.

Ketiga faktor risiko (insentif/tekanan, kesempatan, dan sikap/rasionalisasi) perlu dipertimbangkan dengan semua informasi yang ada.

c. Prosedur analitis.

Prosedur analitis dirancang sejak perencanaan audit. Bila hasilnya berbeda dengan ekspektasi, harus dievaluasi dengan memperhitungkan dengan informasi yang lain.

d. Informasi lain.

Informasi ini diperoleh dalam di setiap tahapan audit saat penilaian risiko *fraud*, dan selebihnya dapat mendeteksi risiko kecurangan lebih tinggi.

Mendokumentasikan Penilaian Kecurangan

Peraturan yang terdapat di dalam SAS 99 mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal yang bersangkutan dengan pertimbangan auditor mengenai salah saji material.

Merespon Risiko Kecurangan

Apabila risiko salah saji yang material akibat kecurangan telah teridentifikasi, langkah pertama yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan pembahasan tersebut dengan manajemen dan meminta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang telah dirancang untuk mendeteksi salah saji. Selanjutnya auditor harus mempertimbangkan apakah program dan pengendalian anti *fraud* dapat mengurangi salah saji material akibat kecurangan atau apakah terdapat defisiensi pengendalian yang meningkatkan risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi:

1. Mengubah pelaksanaan auditor secara keseluruhan

Auditor bisa melakukan berbagai pemilhan atas berbagai tindakan apabila risiko kecurangan meningkat. Apabila terjadi peningkatan terhadap risiko salah saji akibat dari kecurangan yang meningkat, maka dapat menugaskan personil yang telah berpengalaman.

Dalam SAS 99 mengharuskan auditor memasukkan ketidakterdugaan dalam rencana audit. Hal ini disebabkan karena pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui mengenai berbagai prosedur audit yang akan dilakukan.

2. Merancang dan melakukan **Prosedur Audit untuk mengatasi risiko kecurangan**

Prosedur audit yang sesuai **untuk digunakan dalam** mengatasi berbagai risiko kecurangan tertentu bergantung pada akun apa yang akan diaudit serta tipe risiko kecurangan yang diidentifikasi.

3. Merancang dan melakukan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

Dalam setiap audit, terdapat tiga prosedur yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memeriksa catatan jurnal dan penyesuaian lain untuk bukti kemungkinan salah saji karena kecurangan.
- b. Meninjau kembali estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias.
- c. Mengevaluasi dasar rasional untuk transaksi tidak lazim yang bernilai signifikan, seorang auditor harus memiliki pemahaman.

Pos-pos risiko kecurangan yang spesifik

1. Pembelian
2. **Penjualan dan Pemasaran**

Uraian lengkap pengujian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga terendah/memperoleh potongan harga (*discount*) paling besar**
- b. **Teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit**

- c. Teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu tertentu
 - d. Lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang dan faktur, selanjutnya bandingkan antara ketiganya
 - e. Teliti pengiriman barang contoh ke gudang/cabang atau pengiriman barang kepada pihak ketiga tersebut. Prosedur ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan pengiriman barang sampel
 - f. Teliti nota kredit untuk barang-barang yang dikembalikan (diretur) dan bandingkan dengan penerimaan barangnya (di gudang)
 - g. Teliti surat menyurat berkaitan dengan transaksi pembelian. Perhatikan keluhan konsumen, seperti kesalahan dalam faktur dan sebagainya. Trasiir keluhan-keluhan tersebut kepada barang yang dipesan, pengiriman barang, dan faktur penjualan
3. Teliti catatan pelunasan piutang ke rekening yang bersangkutan. Trasiir ke buku kasnya dan slip pembayaran. Perhatikan perbedaan tanggal, nama pembayar. Prosedur ini dilakukan dalam rangka mendeteksi kemungkinan terjadinya lapping.
 4. Persediaan

Persediaan seringkali merupakan **akun terbesar dalam neraca dan auditor sering merasa sulit untuk memverifikasi eksistensi dan penilaian persediaan. Akibatnya persediaan rentan terhadap manipulasi oleh manajer yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan keuangan.**

Langkah untuk menguji akun persediaan:

- a. ² Teliti secara detail catatan-catatan persediaan berkaitan dengan hal-hal berikut ini :
 - 1) Produk yang mempunyai perputaran (turnover) paling tinggi
 - 2) Produk yang ada dalam persediaan, padahal tidak terdapat dalam persediaan tahun sebelumnya
 - 3) Produk yang ada dalam persediaan tahun-tahun lalu, namun tidak tersedia tahun ini
 - 4) Semua koreksi atas catatan persediaan yang disebabkan adanya perbedaan pada saat dilakukan stock opname
- b. Periksa jadwal pelaksanaan stock opname tahun lalu dengan cara :
 - 1) Meneliti setiap jenis barang dan kaitkan dengan kewajaran persediaan, perputaran dan ruang penyimpanan yang tersedia
 - 2) Meneliti catatan kerja pengemudi perusahaan pada saat dilakukan inventarisasi
 - 3) Meneliti apakah terdapat pembayaran biaya pengangkutan untuk pihak ketiga pada saat inventarisasi
 - 4) Verifikasi kebenaran barang dalam perjalanan

Tanggung jawab Bila Dicurigai ada Kecurangan

Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, lebih banyak kecurangan yang terdeteksi oleh pengendalian internal atau fungsi internal audit dibandingkan oleh auditor eksternal.

1. Merespons salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan

Sepanjang pengauditan, auditor terus menerus mengevaluasi apakah bukti-bukti yang didapatkan dan pengamatan-

pengamatan lainnya mengindikasikan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.

2. Jenis teknik-teknik wawancara tanya jawab dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif.

Mengidentifikasi Tata Kelola Korporasi dan Faktor-faktor Lingkungan Pengendalian Lainnya yang Mengurangi Risiko Kecurangan

Manajemen bertanggung jawab mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan, yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. Pedoman untuk mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi
 - a. menetapkan *tone at the top* (tekanan berasal dari tingkatan manajerial yang dapat menyebabkan bawahan berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada)
 - b. menciptakan lingkungan kerja yang positif
 - c. mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, konfirmasi, dan disiplin.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan
 - a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan
 - b. Mengurangi risiko kecurangan
 - c. Memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan

Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses penilaian risiko kecurangan oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti *fraud*.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *Can an auditor ever be a first responder to financial fraud*

Penulis : **G. Stevenson Smith**

Abstract

1. Responder pertama adalah tim yang akan pertama kali menangani ketika terjadi situasi krisis. Dalam hal audit laporan keuangan, tentu saja responder pertamanya adalah auditor itu sendiri. Tindakan yang dilakukannya adalah mengidentifikasi penipuan yang terjadi, menstabilkan situasi, mencegah kerugian sumber daya yang berkelanjutan yang dialami oleh klien.
2. Ketika muncul dugaan telah terjadi tindakan illegal, auditor perlu untuk terlibat di dalam penyelidikan lebih lanjut, sesuai di dalam Section 10A dalam aturan Securities and Exchange Commission (SEC). lebih lanjut lagi, seorang auditor memiliki peran untuk mewaspadaai terjadinya suatu kecurangan dan penipuan keuangan selama proses penugasan audit.
3. Pada era sekarang, dimana audit sudah memakai basis digital, maka seorang auditor dalam upaya menstabilkan dan mencegah kerugian klien yang lebih lanjut harus memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam mengoperasikan informasi teknologi dan audit yang berbasis pada komputer / digital.

Investigasi menurut Section 10A

Di dalam Section 10A, seorang auditor harus menginformasikan kepada klien mengenai tindakan perbaikan jika telah terjadi tindakan illegal atau kecurangan. Aturan di dalam *Section A* kepada auditor, antara lain:

- Menentukan apakah telah terjadi tindakan illegal
- Menentukan dan mempertimbangkan efek jika terjadi tindakan illegal
- Meginformasikan kepada komite audit maupun dewan direksi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan illegal.

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor memerlukan pemahaman yang memadai mengenai tindakan perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh manajemen jika terjadi suatu kecurangan atau tindakan illegal. Seorang auditor dituntut untuk selalu proaktif dalam mengidentifikasi, mencegah maupun menangani tindakan-tindakan illegal di dalam entitas klien, mengingat auditor merupakan responder pertama selama penugasan audit di dalam perusahaan klien.

Professional Auditing Standar

1. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*)

Merupakan organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar (*certified public accountants*) saja. Pendirian AICPA membuat akuntansi sebagai profesi yang istimewa karena persyaratannya, pendidikan yang ketat, standar profesional tinggi, kode etik profesional, dan komitmen dalam melayani kepentingan publik.

2. PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*)

PCAOB dibentuk pada tahun 2002 dengan dibentuknya peraturan Sarbox dan memulai kegiatannya pada awal tahun 2003. PCAOB kemudian mengeluarkan Standar Audit No.2 mengenai Audit Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan yang dilakukan bersamaan dengan Audit Laporan Keuangan.

PCAOB juga bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dalam peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik.

3. IFAC (*International Financial Accounting Standards*)

IFAC merupakan organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan mempertkuat kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. IFAC serupa dengan GAAP di Amerika, yakni dibentuk untuk menghadapi isu-isu internasional yang berkaitan dengan *fraud*.

The First responder's rule

Peranan dari responder pertama terkait *fraud*:

1. Menstabilkan situasi
2. Mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut

Tiga langkah dasar jika auditor menemukan indikasi dugaan terjadinya *fraud*:

1. Mengamankan e-data

Menurut section 10 A mengenai penyelidikan *fraud*, auditor harus menentukan upaya untuk mencari e-dokumen terkait dengan tindakan *fraud* tersebut.

Auditor juga harus memastikan semua data yang diperoleh oleh manajer terbebas dari unsure *fraud*.

Semua data yang diperoleh selama penyelidikan, menurut Section 10A, auditor harus mendiskusikannya dengan spesialis forensic komputer.

2. Pencatatan Dokumentasi

Dalam Section 10 A mengenai investigasi *fraud*, seharusnya paling tidak ada satu manajer yang menjadi kunci yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumentasi telah dicatat, dikelola dan disimpan dengan benar. Manajemen harus menyediakan dokumentasi e -data sesuai dengan prosedur jika nantinya dibutuhkan di dalam penyelidikan *fraud*.

3. Pelatihan dan kompetensi

Tanpa adanya pelatihan yang memadai, seorang responder pertama dikhawatirkan justru akan merusak e-data yang seharusnya digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Umumnya, personil IT adalah seseorang yang terlatih yang nantinya akan menginterpretasikan hasil analisis data forensic kepada klien maupun auditor.

Kemampuan dasar untuk investigator forensic komputer antara lain:

- a. Memahami sistem operasi (OS) seperti Windows or Linux. Investigator haruslah familiar dengan OS dan jaringan yang digunakan oleh klien.
- b. Mampu untuk mengisolasi atau mengamankan file dengan cepat.

- c. Mampu untuk menyimpan data dengan benar. Data tersebut bermanfaat jika terjadi pergantian file atau entri jurnal.
- d. Kemampuan untuk mengamankan data. Para investigator harus memastikan bahwa file asli harus memiliki replikasi yang persis sebagai cadangan jika terjadi sesuatu pada file yang asli.

Auditor harus familiar dengan metode dan proses investigasi dengan menggunakan data elektronik dan memastikan bahwa prosedur investigasi yang dijalani harus sesuai dengan Section 10A.

Seorang auditor membutuhkan jaminan berupa perikatan dengan perusahaan terkait tindakan investigasi dengan mengikuti prosedur yang tepat serta melibatkan pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi.

Stepping up to the plate

Pada Section 10A tentang investigasi, menempatkan auditor pada posisi hukum yang lebih genting daripada pedoman profesional para auditor itu sendiri. Dalam standar pedoman bagi auditor tidak terdapat penjelasan mengenai peran auditor sebagai responder pertama. Seorang auditor harus memiliki dan mempertahankan skeptisme profesionalnya dalam menjalani prosedur investigasi. Seorang auditor juga harus menyadari kelemahan yang terdapat pada setiap teknologi sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi pengendalian internal.

Kesimpulan

Auditor memiliki keharusan untuk mengevaluasi kecukupan penyelidikan/investigasi digital berdasarkan peraturan yang tercantum di dalam SEC Section 10A mengenai brainstorming maupun mitigasi jaminan yang di dokumentasikan oleh manajemen perusahaan yang ternyata tidak memadai. Dalam rangka untuk menentukan prosedur penyelidikan, auditor harus memahami mengenai dokumentasi digital sehingga pada saat melakukan investigasi terhadap e-data, auditor menyadari kelemahan e-data tersebut.

Sampai pada saat ini, standar professional auditor belum memasukkan peran dari dokumentasi digital di dalam praktek audit. Standar ini hanya berfokus terhadap *fraud* atas laporan keuangan sehingga peran auditor sebagai responder pertama jika terjadi kecurangan kurang begitu dibahas.

2. Artikel Kedua

Judul : *Fraud Auditing*

Penulis : **Rocco R. Vanasco**

Introduction

Fraud telah menjadi perhatian bagi penyidik, audit, dan akuntansi, asosiasi, dan lembaga pemerintah, dalam nasional dan internasional.

Menurut Prosser 1971 mempunyai unsur-unsur *fraud* sebagai berikut:

1. *Theft act* which involves taking cash, inventory, information, or other assets manually, by computer, or by telephone;
2. *Concealment* which involves the steps taken by the perpetrators to hide the *fraud* from others; and
3. *Conversion* which involves selling or converting stolen assets into cash and then spending the cash.

Menurut Albrecht (1996) setiap *fraud* mempunyai tiga unsur:

1. Adanya pencurian dalam uang tunai, inventaris, informasi, atau aset lainnya secara manual, komputer, atau telephon
2. Melakukan penyembunyian dengan melibatkan penipuan lainnya.
3. Adanya konversi yang melibatkan menjual atau mengubah aset ke kas dan kemudian menghabiskan uang tunai.

Terdapat beberapa *fraud* yang dilaporkan dalam dekade ini yang telah menyebabkan pemerintah dan profesi akuntansi dan profesi akuntansi untuk menjaga aset perusahaan yang lebih baik.

Bagian I : *Fraud* dan hukum

Peran Sekuritas dan pertukaran komisi auditor harus bisa menyadari tanggung jawab mereka kepada, investor publik dengan memasukkan kegiatan manajemen dalam kajian mereka (SEC, 1940).

SEC menyarankan bahwa auditor menyelidiki tentang manajemen klien baru dan mencatat:

1. Banyak prosedur audit memerlukan penguatan prosedur persediaan.
2. Auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi pada gross apakah dihasilkan dari kolusi atau tidak

3. Auditor harus menyadari tanggung jawab mereka kepada investor publik dengan memasukkan kegiatan manajemen dalam review mereka

Pada tahun 1942, SEC diundangkan Peraturan 10b-5 yang menyatakan larangan :

1. Untuk mempekerjakan skema atau kecerdasan dengan alasan penipuan
2. Membuat pernyataan tidak benar dari fakta material atau menghilangkan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat material.
3. Terlibat dalam tindakan atau praktek *fraud* atau kebohongan atas setiap orang sehubungan dengan pembelian atau penjualan

Robert Loeffler kegiatan *fraud* dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Adanya inflasi aset dalam neraca keuangan
2. Peminjaman uang tunai tanpa rekaman kewajiban yang sesuai
3. Penciptaan asuransi palsu yang dijual ke perusahaan asuransi lain.

Pengadilan menyimpulkan bahwa :

Perlakuan rektroatif dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan kesalahan dalam laporan 1968.

Kelalaian biasa

Merupakan kegagalan untuk latihan dan bersifat wajar.

Perusahaan Aliansi Athur Andersen&Co Pengadilan didirikan tiga kriteria untuk menentukan apakah penggugat dapat membawa klaim terhadap auditor untuk kelalaian biasa:

1. Penggugat tidak sebenarnya mengandalkan laporan audit.
2. Auditor Tahu bahwa penggugat dimaksudkan untuk mengandalkan laporan mereka.
3. Auditor melakukan tindakan berdasarkan bukti ketergantungan penggugat.

Kelalaian

Kelalaian adalah kegagalan dalam situasi dimana auditor bertindak sembarangan atau asal-asalan dalam melakukan auditnya.

Pedoman menetapkan nilai titik keorganisasi berdasarkan litigasi dan keadaan yang memberatkan. Antara lain:

1. Organisasi yang terlibat pernah melakukan kesalahan yang sama dimasa lalu
2. Kejahatan dalam melanggar perintah pengadilan yang ada atau perintah
3. Organisasi memperkerjakan orang yang mempunyai catatan kriminal sebelumnya.

Program yang efektif meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Membangun program kepatuhan yang dapat diperkirakan mungkin mengurangi prospek kegiatan.
2. Menugaskan tanggung jawab kepada individu highlevel khusus untuk mengawasi kepatuhan dengan standar dan prosedur.
3. Tidak memungkinkan otoritas diskresioner untuk individu dalam organisasi akan terlibat dnegan kegiatan yang bersifat ilegal.
4. Pemasangan sistem monitoring dan ausit sistem yang dirancang untuk mendeteksi perilaku kriminal.

5. Adanya komunikasi dalam prosedur dan standar kepada seluruh karyawan dan agen melalui program pelatihan
6. Memperkuat standar secara konsisten melalui mekanisme disiplin yang sesuai.
7. Menanggapi melaporkan pelanggaran dengan tindakan diambil untuk mencegah kekambuhan (Flesher 1996).

Bagian II: *Fraud* dan standar profesional

Peran AICPA

Auditor Independen harus menerima tanggung jawab untuk menemukan dan pengungkapan tentang adanya penyimpangan, karena praktisi harus bisa bijaksana dalam mengungkapkannya (Mautz dan Sharaf, 1961).

Diharapkan pada tujuan AICPA mampu menyelamatkan akuntansi dan profesi audit dalam kasus *fraud* dengan meluruskan situasi dan standar audit serta prosedur audit. Kasus *fraud* ini, telah dipublikasikan secara luas dan memiliki efek pada profesi sebagai tanggung jawab auditor independen.

Peran Lembaga manajemen akuntan

The association of Certified *Fraud* Examiner (ACFE) yang didirikan pada tahun 1988 untuk tujuan tersebut mengurangi insiden penipuan kerah putih. The ACFE menjalankan program untuk mengakreditasi sebagai Certified *Fraud* Examiners (CFEs) orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi, menyelidiki, mencegah penipuan. CFEs sering memiliki akuntansi atau latarbelakang audit dan bekerja diserti bidang akuntansi forensik, audit *fraud* dan investigasi, pencegahan kerugian, penegakan hukum, penelitain akademisi, dan akuntan publik.

Peran Komisis *Treadway*

Komisi *Treadway* mendesak semua peserta dalam proses pelaporan keuangan untuk mempertimbangkan beberapa faktor risiko tertentu ketika perencanaan atau meninjau kegiatan audit yang diusulkan.

Bab III : Peran manajemen, komite audit dan auditor

Peran manajemen

Munculnya nondiscovery audit dalam kasus manajemen *fraud*, sekarang para auditor memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menemukan *fraud* manajemen dari sebelumnya (Arens dan Loebbecke 1994)

Berikut ini daftar delapan alasan baik dibalik manajemen *fraud*:

1. Eksekutif terkadang mengambil langkah yang salah
2. Profit center dapat distorsi dengan fakta untuk menunda divesta
3. Manajer tidka kompeten
4. Kinerja yang mungkin distorsi utnuk menjamin bonus besar
5. Kebutuhan untuk berhasil dapat mengubah manajer untuk *fraud*
6. Manajer yang mempunyai kepentingan sendiri
7. Keuntungan yang dapat meningkat untuk memperoleh keuntungan dipasar
8. Orang yang mengontrol baik aset atau catatan mereka dalam posisi yang smepurna untuk bisa memalsukan catatan.

Peran Komite Audit

Dalam banyak kasus manajemen puncak sering tidak percaya bahw *afraud* bis aterjadi pada organisasi mereka.

Asumsinya bahwa orang yang jujur, adanya pengendalian internal bisa mencegah *fraud* atau penyalahgunaan (Alpert 1992)

Peran auditor internal

Merupakan tantangan bagi auditor internal untuk memberikan perhatian pada *fraud* dengan seimbang dan bisa menyelesaikan permasalahan *fraud* dlama sebuah organisasi (Brink dan Witt 1982).

Bagian IV : *Fraud* dalam pemerintahan dan entitas nirlaba

Peran kantor akuntansi Umum AS

Fraud adalah masalah yang signifikan bagi pemerintah saat ini. Aspek tanggung jawab dibawah pemerintah dengan membuat standar auditng untuk bisa mendeteksi dalam pelaporan yang salah, penyimpangan dan tindakan ilegal meliputi:

1. Menyadari karakteristik dan jenis penyimpangan bahan potensial yang akan berkembang
2. Adanya indikasi penyimpangan dan tindakan ilegal dalam organisasi
3. Jika ada pelanggaran atau *fraud* segera melaporkannya kepada penegak hukum dan badan pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab.

Bagian V : Sektor industri

Sektor perbankan

Para direktur bank komersial sering bertanggung jawab untuk *fraud* yang dilakukan bawahan dan mereka tidak menyadari adanya *fraud* dalam aktivitas organisasi (Schadewitz dan Blevin 1996).

Terdapat 5 skema yang dapat mengakibatkan *fraud* menjadi kegagalan dalam keuangan adalah:

1. Calon peminjam
2. Peminjam agunan ganda
3. Timbal balik pengtauran pinjaman
4. Land flips
5. Terkait pembiayaan

Sektor kesehatan

Akuntan bukan menjadi penjamin laporan dia hanya bertugas untuk mempersiapkan laporan dan bertindak jujur dan mempunyai itikad baik dan penuh kehati-hatian agar laporan disajikan dengan wajar sesuai dengan kewajiban profesionalnya.

Sektor industri ritel

Karyawan tidak jujur adalah salah satu penyebab utama dollar hilang pada setiap perusahaan. Para *frauder* disini juga menutupi agar tindakannya tidak terdeteksi oleh auditor. (Dabny 1997)

Bagian VI : Arena International

Menampilkan perspektif tentang *fraud* disleuruh dunia. Seperti Uni Eropa, Afrika, Asia dan negara-negara penganut sistem Anglo Saxon

Kesimpulan

1. *Fraud* dalam laporan keuangan menjadi perhatian pada dunia usaha, profesi akuntansi. Adanya *fraud* akan dapat mengejutkan publik dan bisa merusak kredibilitas dari para auditor dalam kaitannya profesi audit.

2. Dalam institut Internal Auditor (IIA) telah menempatkan pencegahan penipuan atas tugas prioritas, pada tahun 1985 membuat SIAS yaitu pencegahan, pendekteksia, dan penyelidikan.
3. Pada kasus-kasus yang telah diteliti disarankan untuk melakukan program baru, produk, investasi dan tunjangan yang perlu diawasi oleh auditor. Pada penelitian Lacativo (1995) menunjukkan pendekatan berbasis risiko *fraud* audit akan membantu auditor memenuhi peraturan federal dengan taat.
4. Untuk mengurangi adanya *fraud* dalam sektor industri, maka IIA mendirikan tugas mengembangkan "pandua industri" yang berurusan dengan pencegahan *fraud*, deteksi, pencegahan, dan pelaporan. Diharapkan para auditor internal dan auditor eksternal dituntut untuk mempunyai keterampilan dalam kaitannya pendekteksian dan pencegahan *fraud*. Dalam kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa uang, persediaan, dan transaksi menjadi rentan atas *fraud*.
5. Adanya sistem komputerisasi dianggap sebagai pemicu *fraud* karena tidak tepatnya dalam penginputan data, program aplikasi, file data, dan operasi komputer. Adanya kesulitan untuk mendeteksi sehingga auditor sekarang harus mempunyai pengetahuan dan praktek EDP audit, serta melakukan rekonstruksi dalam kerangka kerja audit untuk memenuhi kebutuhan semua internal auditor diseluruh dunia.

21

BAB XII

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROSES AUDIT

Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi (TI) bisa saja meningkatkan pengendalian internal dengan menambah prosedur-prosedur pengendalian yang baru dan terprogram di dalam komputer. Dan disisi lain, penggunaan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko yang baru, namun sebenarnya risiko ini masih dapat dikelola oleh klien dengan menggunakan mekanisme khusus yang dibuat oleh klien. Seorang auditor tidak dibenarkan untuk selalu bergantung pada informasi yang dihasilkan melalui proses komputerisasi, dan harus menelusuri keakuratan sumber atau input informasi tersebut. Sebelum mengambil kesimpulan bahwa informasi yang dihasilkan komputer dapat diandalkan, auditor harus memahami dan menguji penguasaan berbasis komputer tersebut.

27

Berikut ini beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang diakibatkan oleh adanya pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi:

1. Pengendalian internal berbasis teknologi informasi menggantikan pengendalian internal dengan sistem manual.

Manfaat dari perubahan ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi mampu menangani sejumlah transaksi bisnis yang besar dan lebih kompleks secara efektif dan efisien. Karena komputer mampu memproses transaksi secara konsisten, maka hal ini diharapkan mampu meminimalkna terjadinya salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan prosedur yang telah terprogram yang menerapkan pengendalian dan pengecekan untuk setiap transaksi yang diproses.

Pengendalian keamanan secara online atas aplikasi, database dan sistem operasi dapat memperbaiki pemisahan fungsi atau tugas dan mengurangi kesempatan untuk melakukan *fraud*.

2. Tersedianya informasi bermutu tinggi

Segala aktivitas yang melibatkan teknologi informasi umumnya terjadi secara kompleks dan dikelola secara efektif. Hal ini biasanya menghasilkan informasi yang memiliki mutu lebih tinggi bagi manajemen, jauh lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan sistem manual. Setelah yakin atas keandalan informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi, manajemen cenderung menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Menilai Risiko Teknologi Informasi

Meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, namun di sisi lain juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian perusahaan secara

keseluruhan. Hal ini terjadi jika sistem dalam teknologi informasi tersebut mengalami kendala dan kegagalan. Risiko ini dapat menimbulkan kemungkinan salah saji material dalam laoran keuangan. Risiko spesifik pada sistem teknologi informasi meliputi:

1. Risk to hardware and data

Risiko khusus yang mencakup hal-hal mengenai perlindungan terhadap *hardware* dan data meliputi:

- a. Adanya ketergantungan pada fungsi dan kemampuan *hardware* dan *software*. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, maka baik *hardware* maupun *software* tidak akan berfungsi dengan baik dan akan menghasilkan informasi yang tidak semestinya.
- b. Adanya kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Risiko kesalahan acak akan terjadi jika sistem manual telah diganti dengan sistem berbasis teknologi informasi. Namun, kesalahan sistematis juga akan meningkat saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Jika ada kecacatan pada pemrograman komputer sering kali mengakibatkan banyak terjadi salah saji material yang signifikan.
- c. Adanya akses yang tidak sah Sistem akuntansi yang berbasis teknologi informasi memungkinkan akses secara online ke data elektronik dalam file induk, *software* dan catatan lainnya. Dikarenakan akses online dapat diakses dari luar kota/dimanapun oleh pihak eksternal melalui internet, mungkin saja terjadi akses yang tidak sah.

- d. Hilangnya data sebagian besar data pada sistem teknologi informasi disimpan dalam file elektronik yang terpusat. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan file data secara keseluruhan dan juga memiliki konsekuensi terjadi salah saji material.

2. *Reduced Audit Trail*

Salah saji yang mungkin tidak dapat terdeteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi akibat berkurangnya jejak audit, termasuk berkurangnya keterlibatan auditor dan sistem manual. Selain itu sistem komputer dapat juga menggantikan jenis otorisasi manual dalam beberapa sistem teknologi informasi, antara lain meliputi:

a. Visibilitas jejak audit

Karena sebagian besar informasi dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan dokumen dan catatan dari sumber data yang memungkinkan organisasi untuk melakukan penelusuran informasi akuntansi.

b. Keterlibatan manusia berkurang

Dalam banyak sistem teknologi informasi, karyawan yang terlibat dalam pemrosesan awal transaksi biasanya tidak pernah melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, mereka kurang mampu mengidentifikasi salah saji pemrosesan.

c. Tidak adanya otorisasi manual

Sistem teknologi informasi yang canggih sering digunakan untuk memproses transaksi tertentu secara otomatis. Oleh karena itu, otorisasi yang tepat tergantung pada prosedur *software* dan keakuratan file induk yang digunakan dalam membuat keputusan otorisasi.

3. *Need for IT experience and separation of IT duties*

Sistem teknologi informasi mampu meminimalisasi pemisahan tugas secara tradisional seperti pembukuan, otorisasi dan penyimpanan, untuk mengaplikasikan sistem teknologi informasi ini, maka dibutuhkan pengalaman di bidang teknologi informasi, yaitu:

- a. Berkurangnya pemisahan tugas secara tradisional

Ketika suatu organisasi memutuskan untuk mengganti dari sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, maka tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual akan digantikan dengan komputer seperti otorisasi dan pembukuan.

- b. Kebutuhan mengenai pengalaman teknologi informasi

Sangat penting bagi perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam memasang, memelihara dan menggunakan sistem tersebut. Ketika penggunaan sistem teknologi informasi meningkat, kebutuhan akan ahli di bidang IT juga meningkat.

Pengendalian Internal Khusus Bagi Teknologi Informasi

Standar auditing, menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem teknologi informasi, yaitu:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini diterapkan pada semua aspek dalam fungsi teknologi informasi termasuk pengaturan teknologi informasi, pemisahan tugas, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada *hardware* dan data-data yang terkait, kontijensi dan rencana cadangan jika dalam kondisi darurat yang

diperkirakan sebelumnya, dan pengendalian *hardware*. Auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Administrasi fungsi teknologi informasi

Pengawasan atas penggunaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara komputerisasi.

b. Pemisahan tugas dan fungsi

Dengan menggunakan teknologi informasi, maka fungsi dan tugas akan dilakukan secara otomatis. Tanggung jawab untuk melakukan pemrograman, pengoperasian dan pengendalian data dapat dipisahkan.

c. Pengembangan sistem

Dalam pengembangan sistem mencakup hal mengenai keputusan untuk membeli *software* yang baru atau mengembangkan sendiri *software* yang sudah ada dan memastikan bahwa *software* tersebut kompatibel dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Keamanan fisik dan online

Mencakup:

- 1) Pengendalian fisik yang layak atas keseluruhan perangkat komputer maupun *hardware* dan *software* serta melakukan pembatasan akses, dan melakukan *back up* data.
- 2) Pengendalian akses secara online dengan menggunakan *username* dan *password*.
- 3) *Backup* dan kontijensi, organisasi memerlukan *backup* terperinci dan rencana kontijensi seperti menyimpan

semua salinan file data dan *software* untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko kehilangan, kebakaran atau bencana.

- 4) Pengendalian *hardware*. kerusakan memori atau kerusakan *hardware* menyebabkan munculnya pesan-pesan yang salah dalam tampilan layar komputer.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini diterapkan untuk memproses transaksi dan saldo akun. Auditor seharusnya mengevaluasikan dalam pengendalian aplikasi untuk setiap kelompok transaksi atau saldo akun dimana auditor merencanakan untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian karena pengendalian teknologi informasi berbeda di setiap kelompok transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi akan efektif jika pengendalian umumnya efektif.

Pengendalian aplikasi terdiri dari tiga kategori yaitu:

a. Pengendalian input

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer sudah lengkap, akurat dan diotorisasi.

b. Pengendalian proses

Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data diproses.

c. Pengendalian output

Pengendalian ini berfokus pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan telah selesai dilaksanakan, bukan pada mencegah adanya kesalahan.

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Proses Audit

Auditor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengendalian internal umum dan aplikasi dan melihat apakah klien menggunakan sistem teknologi informasi yang kompleks atau sederhana. Hal ini dilakukan karena para auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Pengetahuan yang memadai mengenai pengendalian umum mampu meningkatkan efektivitas pengendalian aplikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko pengendalian secara keseluruhan selama proses audit.

1. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian

Auditor harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian umum sebelum melakukan evaluasi terhadap pengendalian aplikasi. memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor mengevaluasi pengendalian umum terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif.

a. Pengaruh pengendalian umum terhadap keseluruhan aplikasi sistem

Pengendalian umum yang tidak efektif dapat menghasilkan potensi salah saji material pada keseluruhan aplikasi sistem, tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor menempatkan keandalan yang lebih pada pengendalian *software*. Auditor setelah itu menguji pengendalian *software* serta efektivitas operasi dan menjamin hasil dalam pengurangan pengujian substantive.

b. Pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan *software*

Perubahan yang dilakukan klien terhadap aplikasi *software* dapat mempengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian berbasis komputer tersebut. Ketika klien memutuskan untuk mengganti *software* maka auditor harus mengevaluasi apakah diperlukan pengujian tambahan. Jika pengendalian umum dinilai telah efektif, maka auditor dengan mudah akan mengidentifikasi kapan perubahan *software* dilakukan. Namun, jika klien memiliki pengendalian umum yang lemah, akan sulit untuk mengidentifikasi kapan *software* tersebut diganti.

c. Memahami pengendalian umum klien

Auditor dapat memperoleh informasi mengenai pengendalian umum dan aplikasi melalui cara-cara antara lain:

- 1) Memeriksa dokumentasi sistem, seperti bagan arus, petunjuk penggunaan, permohonan perubahan program dan pengujian output.
- 2) Melakukan wawancara dengan personel IT dan para pengguna utama.
- 3) Mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf IT.

2. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantive

a. Menghubungkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi

Biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan definisi pengendalian umum dengan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Dikarenakan pengendalian

umum mampu mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus, maka pengendalian umumnya menjadi tidak efektif dan kemampuan auditor. Jika pengendalian umum tersebut efektif maka kemampuan auditor dalam penggunaan pengendalian *software* pada semua siklus akan cenderung meningkat.

b. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substantive

Setelah melakukan identifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor kemudahan mengurangi pengujian substantive. Karena pengendalian aplikasi bersifat sistematis, hal ini akan memungkinkan auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut baik dalam audit keseluruhan laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

3. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang kompleks

Dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang begitu kompleks, organisasi seringkali mengandalkan sistem komputer sederhana (mikro) untuk melakukan fungsi akuntansi. Penggunaan sistem komputer yang sederhana (mikro) akan menghasilkan beberapa pertimbangan oleh auditor, antara lain:

a. Akses file induk

Apabila klien menggunakan komputer yang sederhana (mikro), auditor harus memperhatikan mengenai akses terhadap file-file utama dan tanggung jawab pemrosesan menjadi sangat penting.

- b. Adanya ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang bersifat otomatis.

Dalam lingkungan teknologi informasi yang tidak begitu canggih, pengendalian otomatis seringkali dapat diandalkan. Sebagai contoh, program *software* dalam komputer sederhana (mikro) dapat dimasukkan ke dalam *hard drive* komputer dengan format yang tidak memungkinkan dilakukan perubahan oleh personel lain selain yang memegang tugas dan otorisasi, sehingga risiko perubahan illegal / tidak diotorisasi terhadap *software* tersebut menjadi rendah.

- c. Risiko virus komputer

Virus yang menyerang perangkat komputer mampu menyebabkan hilangnya data dan program. Beberapa virus bahkan dapat merusak file elektronik atau mematikan seluruh jaringan komputer. Memperbarui *software* dan antivirus secara berkala dapat meningkatkan pengendalian.

4. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks

Pengendalian internal seringkali disisipkan dalam aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik, hal ini dilakukan apabila organisasi meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

Pendekatan tersebut adalah auditing dengan melalui komputer (*auditing through the computer*).

Tiga kategori pendekatan auditing melalui komputer (*auditing through the computer*) antara lain:

- a. Pendekatan data pengujian (*test data approach*)

Jika menggunakan pendekatan ini, auditor akan memiliki tiga pertimbangan utama, yaitu:

- 1) Program aplikasi yang digunakan untuk pengujian data auditor haruslah sama dengan yang digunakan oleh klien sepanjang tahun berjalan.
- 2) Data pengujian harus meliputi semua kondisi yang relevan
- 3) Data pengujian harus dihapuskan dari catatan klien.

Auditor yang melakukan *test data approach* selalu mendapatkan bantuan dari para ahli IT karena tingginya tingkat kompleksitas dari program dan aplikasi *software* klien tersebut.

b. Simulasi parallel (*parallel simulation testing*)

Tujuan simulasi parallel adalah untuk menentukan tingkat efektivitas suatu pengendalian yang terotomatisasi dan untuk memperoleh bukti mengenai saldo akun elektronik. Auditor biasanya melakukan simulasi parallel dengan menggunakan *software* audit tergeneralisasi (*generalized audit software - GAS*) yang merupakan suatu program yang dirancang secara khusus untuk tujuan auditing. GAS memiliki tiga keunggulan yaitu:

- 1) *Software* tersebut bisa diimplementasikan pada berbagai jenis bisnis klien dengan penyesuaian yang minimal.
- 2) Relative mudah melatih para staf audit untuk menggunakannya, walaupun mereka hanya memiliki pelatihan yang minim di bidang IT terkait dengan audit.
- 3) Mampu untuk melakukan pengujian audit yang jauh lebih cepat dan terperinci jika dibandingkan dengan prosedur manual dan tradisional.

- c. Pendekatan modul audit tertanam (*embedded audit module approach*)

Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan sebuah modul audit di dalam sistem aplikasi klien guna mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan bagi auditor untuk bisa terus menerus mengaudit berbagai transaksi dengan melakukan identifikasi atas transaksi actual yang diproses oleh klien yang selanjutnya akan dibandingkan dengan pendekatan simulasi parallel dan data pengujian. Meskipun memungkinkan bagi auditor untuk menggunakan satu ataupun kombinasi dari setiap pendekatan pengujian, auditor akan mempertimbangkan pilihan pendekatan yang akan digunakan, antara lain:

- 1) Simulasi parallel untuk melakukan pengujian substantive seperti menjumlahkan file induk ke sebuah catatan tambahan saldo akun dan menghitung ulang jumlah transaksi yang ada.
- 2) Data pengujian untuk melakukan pengujian substantive atas transaksi dan pengujian pengendalian
- 3) Modul audit yang melekat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai transaksi yang tidak biasa bagi pengujian substantif.

Permasalahan Pada Lingkungan Teknologi Informasi Yang Berbeda

1. Masalah pada lingkungan jaringan

Lingkungan jaringan terlebih lagi organisasi berada pada lingkungan jaringan yang rumit, akan menimbulkan berbagai masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam merencanakan penugasan

2. Masalah pada sistem manajemen database

Klien menerapkan sistem manajemen database yang berguna untuk meningkatkan pengendalian atas data, mengurangi kelebihan data, dan menyediakan informasi yang lebih baik bagi pengambilan keputusan dengan cara mengintegrasikan informasi pada seluruh fungsi dan departemen.

Sistem manajemen database juga dapat menimbulkan berbagai risiko pengendalian internal, seperti risiko banyaknya personil yang bisa mengakses file dan memperbarui file data sehingga file menjadi tidak akurat dan tidak mendapat otorisasi.

Jika klien menggunakan manajemen database, maka auditor memiliki pemahaman mengenai organisasi, perencanaan, kebijakan dan prosedur klien guna menilai seberapa baik sistem tersebut dikelola. Pemahaman ini dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko pengendalian dan pendapat auditor tentang tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan.

3. Masalah pada sistem *e-commerce*

Perusahaan yang menggunakan sistem *e-commerce* dalam berbagai transaksi bisnis seperti penjualan dan pembelian, memiliki risiko tersendiri di dalam sistem IT. Penggunaan sistem *e-commerce* akan membuat data perusahaan menjadi sensitive dan terbuka oleh kemungkinan kemudahan akses bagi pihak luar.

Dalam menilai validitas patner dagang yang melaksanakan bisnis-bisnis secara *e-commerce*. Perusahaan mengandalkan otoritas sertifikasi pihak eksternal yang memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital berisi nama pemilik dan

password, serta berisi nama yang memberikan otoritas sertifikasi dan tanggal kadaluarsa sertifikat tersebut dan informasi khusus lainnya.

4. Masalah yang timbul ketika klien melakukan *outsorce* teknologi informasi

Kebanyakan klien meng*outsorce* beberapa atau seluruh kebutuhan IT nya kepada pusat pelayanan komputer independen seperti penyedia jasa aplikasi. Untuk memahamin dan menguji pengendalian pusat jasa, seorang auditor harus menggunakan beberapa kriteria yang sama dengan yang digunakan untuk melakukan evaluasi pengendalian internal klien.

Dalam SAS 70 (SA-324) memberikan pedoman: (1) auditor yang mengeluarkan laporan mengenai pengendalian internal suatu organisasi jasa, (2) auditor organisasi pemakai yang bergantung pada laporan auditor pusat jasa. Ada dua jenis laporan yang dikeluarkan oleh auditor pusat jasa, yaitu:

- a. Laporan mengenai pengendalian yang telah diimplementasikan, akan membantu auditor dalam memahami suatu pengendalian internal guna perencanaan audit.
- b. Lapora mengenai pengendalian yang telah diimplementasikan dan diuji untuk keefektifan operasi.

Auditor membutuhkan bukti mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian guna menilai risiko pengendalian, terutama ketika akan mengaudit penganadalian internal atas pelaporan keuangan sebuah perusahaan publik.

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

Judul : *The Impact of information technology on the audit process : an assessment of the state of the art and implication for the future*

Penulis : **James L. Bierstaker, Priscilla Burnaby, dan Jay Thibodeau**

Saat ini penyimpanan data pada komputer dianggap lebih efisien dan transaksi uang dilakukan secara elektronik telah berkembang dengan pesat. Teknologi seperti pertukaran data secara elektronik (EDI) dan transfer file elektronik (EFT) akan membuat audit secara tradisional akan menghilang. Teknologi akan mengubah sifat dari proses audit tradisional yang mengandalkan sumber dokumen dalam bentuk kertas menjadi terkomputerisasi. Untuk mengaudit dengan sistem on-line, auditor harus menggabungkan *software* audit online sebagai alat audit utama mereka dan mengumpulkan bukti elektronik. Penggunaan teknologi akan membebaskan auditor dari kegiatan-kegiatan manual dan memungkinkan auditor untuk menggunakan waktu ini untuk tugas-tugas yang lain, seperti lebih memahami bisnis klien dan menilai berbagai risiko.

Teknologi telah berdampak pada perencanaan audit. Sebagai contoh, komputer digunakan untuk menghasilkan template pengendalian internal klien yang lebih spesifik untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem. Untuk menghasilkan template pengendalian internal klien, auditor menginput data kuesioner yang berbasis komputer yang dikembangkan oleh kantor audit. *Software* dalam komputer dapat

digunakan untuk menganalisis proses bisnis klien, menentukan pengendalian yang ada, menilai pengendalian risiko dan menghasilkan serangkaian tes pemeriksaan yang secara rinci akan dilakukan. Hasil pengujian audit kemudian dimasukkan ke dalam *software* untuk menentukan apakah risiko yang teridentifikasi selama perencanaan, telah ditangani dengan tepat.

Keuntungan penting dari penggunaan teknologi untuk perencanaan audit adalah bahwa alih-alih hanya mengandalkan pada keahlian tim audit yang ditugaskan untuk menilai pengetahuan manajer dan mitra di seluruh dunia yang dikumpulkan dan dapat diakses dengan menggunakan *software* komputer. Banyak perusahaan telah megadopsi pendekatan audit berbasis risiko dan mengembangkan atau memutuskan untuk membeli *software* untuk membantu auditor mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana risiko eksterna dan internal dapat mempengaruhi audit.

Kemampuan penting lain yang dimiliki oleh *software* yaitu pemantauan secara terus menerus dari transaksi yang memiliki risiko yang tinggi, pengendalian internal, tren persediaan item yang tidak biasa dan indikator kinerja lainnya.

Teknologi akan terus memiliki dampak dramatis pada hampir setiap tahapan proses audit. Dari pemeriksaan yang dihasilkan, *software* program komputer mampu melakukan pengujian terhadap seluruh populasi data klien. Teknologi sangat penting bagi akuntan untuk memahami proses bisnis klien dan bersaing dengan audit yang telah mencanangkan program *paperless* sebagai cara untuk mensukseskan program lingkungan hidup. Auditor yang memanfaatkan perkembangan teknologi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dalam hal efisiensi dan efektivitas audit.

2. Artikel Kedua

Judul : *Program Review : Its Role in computer Auditing*

Penulis : Michael J. Earl

Review program atau audit program pada awalnya masih bersifat tidak pasti, namun perlahan-lahan menjadi salah satu metode pemeriksaan berbasis komputer. Saat ini review program menjadi teknik yang ditetapkan dalam audit komputer, baik sebagai alternatif atau pelengkap untuk metode tertentu. Auditor eksternal telah menggunakan review program untuk memenuhi keadaan tertentu dimana teknik lain tidak tepat untuk digunakan. Dalam audit internal, review program dapat digunakan pada audit kepatuhan dan audit kinerja.

Jika program audit baru pertama kali dijalankan, akan lebih baik untuk memulai dengan program yang sederhana daripada mencari program yang kompleks. Pengendalian data, pengujian, tes kewajaran dan pengendalian berkas adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada beberapa dasar yang harus diperhatikan untuk membuat program audit klien. Kelayakan program audit sering dipertanyakan karena tingkat kesulitannya dan tingginya permintaan. Beberapa pertanyaan yang sering muncul antara lain: apa keterampilan yang diperlukan, siapa yang harus melaksanakan audit, bagaimana dengan biayanya, bagaimana hubungan internal auditor dengan eksternal auditor dan dengan manajemen serta bagaimana teknik yang masih mungkin untuk dikembangkan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk program audit mencakup kemampuan untuk berpikir logis, pemahaman tentang desain sistem komputer dan pengetahuan tentang pengaplikasi-

an sistem bisnis. Diperlukan pula pengetahuan tentang bahasa pemrograman yang relevan, namun kemampuan-kemampuan ini belum dimiliki sepenuhnya oleh auditor internal dan eksternal. Oleh karenanya, saat ini sering diadakan pelatihan untuk para auditor tentang dasar-dasar pengolahan data dan pengoperasian program audit berbasis komputer.

Pada saat ini, organisasi cenderung memisahkan fungsi dan tanggung jawab dengan menggunakan teknologi informasi serta semua departemen audit telah menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga kemungkinan program audit bisa lebih efisien apabila menggunakan orang yang ahli dalam pemrograman IT.

Salah satu cara untuk membangun hubungan yang terpercaya, fungsi audit internal salah satunya adalah memberikan saran konstruktif atau bersifat membangun. Di sisi lain, auditor internal dan eksternal memiliki sedikit potensi terjadi konflik dalam hubungan mereka. Auditor eksternal dapat memilih untuk mendelegasikan audit program tertentu yang lebih kompleks kepada personel IT yang lebih ahli. Kemudian prosedur pengendalian dan administrative akan diperlukan untuk program audit tertentu. Saat ini perusahaan yang bergerak dalam bidang audit sudah mulai memberikan pelatihan terkait audit komputer untuk auditor internal klien.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Automation: Crossing the Final Frontier*

Penulis : **Peter Fox**

Menggunakan otomatisasi penuh berarti menerapkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk menjalankan kegiatan

operasional organisasi keseluruhan secara otomatis. Hal ini berarti penggunaan otomatisasi berlaku untuk setiap fungsi mulai dari pembelian bahan baku melalui supplier hingga untuk pengiriman barang jadi. Hal ini juga termasuk setiap fungsi dari tugas-tugas operasional untuk kegiatan taktis yaitu memesan bahan untuk proses selanjutnya dan untuk perencanaan strategis yaitu memutuskan output untuk periode berikutnya.

Dalam model tradisional, kegiatan operasional dapat dibagi menjadi lima lapisan dalam dua tingkat. Pada tingkat manufaktur dan tingkat perakitan merupakan instrument, proses yang terotomatisasi dan optimalisasi pada sebagian proses, di tingkat manajemen perusahaan : manufaktur sistem eksekusi dan sistem untuk perencanaan bisnis atau *enterprise resource planing* yang selalu memerlukan *software* yang telah didesain.

Pengguna memerlukan sistem otomatisasi yang terpisah dalam setiap lapisan untuk menghubungkan lima pemasok yang berbeda dan kemudian menghubungkan sistem tersebut bersama-sama. Hal ini mengharuskan keterlibatan pihak ketiga yang akan menjadi salah satu pemasok peralatan. Dengan komponen *hardware* dan *software*, serangkaian komponen dapat dibuat untuk kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Dan dengan dukungan para ahli yang tersedia di setiap proses dalam siklus sebuah sistem. Manajemen aset bukan hanya mengenai personel yang melakukan tugas perakitan, tapi keseluruhan proses, melalui alat audit yang dimiliki oleh perusahaan pemantauan kondisi, optimalisasi siklus sistem dan dokumentasi.

4. Artikel Keempat

Judul : *Auditing in the e-commerce era*

Penulis : Ning Zhao, I-Chiu Chang and David C

Penelitian ini berfokus tentang kebutuhan audit ditengah sistem perdagangan elektronik. Perlu adanya pembaharuan dalam sistem audit untuk menghadapi era perkembangan sistem perdagangan secara elektronik agar bisa memenuhi kebutuhan para pelaku perdagangan elektronik.

Dengan perkembangan teknologi informasi, fungsi audit tradisional akan berkurang bahkan nyaris tidak ada. Ancaman-ancaman itu berupa :

1. Investor dapat meng-*up date* data setiap perusahaan setiap menit melalui perangkat elektronik tanpa menunggu laporan triwulan atau tahunan.
2. Laporan keuangan tahunan didasarkan pada informasi historis, sedangkan informasi keuangan dari data elektronik disajikan pada rincian kejadian saat ini sehingga lebih cepat untuk disampaikan atau disajikan, oleh karenanya laporan keuangan dari data elektronik lebih dipilih oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kelemahan-kelemahan sistem audit tradisional adalah:

1. Kurang cepat dalam menyajikan informasi, laporan keuangan disajikan periodenya bisa triwulan atau tahunan.
2. Kurang peka terhadap perkembangan jaman
3. Memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak

Perkembangan teknologi bisa mengancam fungsi audit. Saat ini peristiwa-peristiwa ekonomi di ukur, dan dilaporkan secara elektronik, tidak lagi menggunakan dokumentasi tertulis dan

kertas kerja. Sistem informasi yang ada dalam era perdagangan elektronik ini diantaranya adalah:

a. *Real time accounting* (RTA)

RTA merupakan sistem informasi akuntansi dalam perdagangan elektronik yang menyediakan data secara cepat, berkualitas dan akurat.

b. *Elektronik Data Interchange* (EDI)

EDI juga menyediakan informasi ekonomi dalam perdagangan elektronik secara cepat, dapat digunakan untuk menghemat waktu dan biaya perusahaan dalam kegiatan bisnisnya karena tidak memerlukan kertas kerja dan lebih bisa mengantisipasi arus produk fisik dan audit dalam perdagangan elektronik.

Meskipun terdapat ancaman terhadap audit secara tradisional, maka para auditor maupun kantor akuntan publik telah menawarkan sistem terbaru yaitu memberikan jasa akuntansi berbasis elektronik. Salah satu perkembangan sistem audit yang ditawarkan adalah sistem *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) atau pelaporan bisnis ekstensibel. XBRL merupakan aplikasi *software* untuk bidang akuntansi khususnya auditing yang lebih efisien dan membantu kerja auditor. Cara kerja XBRL adalah:

1. Sistem akan mengevaluasi risiko yang terkait dengan keterlibatan klien termasuk perencanaan auditnya, sehingga sistem kerja audit lebih efisien,
2. Sistem akan menerbitkan laporan keuangan
3. Sistem akan meng-upload informasi bisni dan akan mengidentifikasi sehingga memunculkan laporan informasi yang akurat.

4. XBRL memungkinkan untuk melakukan audit secara terus-menerus/modern hal ini merupakan pengembangan dari sistem audit untuk mengikuti perkembangan jaman. Pengembangan audit modern disponsori oleh AICPA dan CICA. Audit modern merupakan metodologi yang memungkinkan audit independen untuk memberikan jaminan atas serangkaian laporan yang diterbitkan. Sistem ini dibantu oleh perangkat komputer yang disebut Computer Assistent Audiit Tools (CAATs). CAATs dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas audit dan meningkatkan fungsi audit.

189 *Software* dalam CAATs yang membantu auditor adalah Audit Command Language (ACL) dan Interactive Data Extration and Analysis (IDEA). Laporan audit modern merupakan laporan dengan interval pendek, relevan yang disajikan untuk kondisi saat ini dan bisa diperbaharui seiring dengan perkembangan jaman. Auditor dapat melakukan audit modern jika sebagian besar informasi hanya dalam bentuk elektronik. Dalam pemantauan laporan audit modern dari pihak yang tidak bertanggung jawab auditor umumnya merancang sistem pengendalian yaitu dengan menggunakan password untuk membatasi akses, dan hanya karyawan tertentu yang disetujui yang bisa masuk ke-program. Yang dibuthkan auditor dalam audit modern adalah :

1. Link yang efektif untuk mempercepat komunikasi
2. Konektivitas yang lebih mudah artinya dapat terhubung ke area jaringan yang lebih luas.
3. Jaminan keamanan yaitu menggunakan firewall, enkripsi data
4. Pelaporan audit yang cepat, akurat dan tepat waktu

5. Auditor harus mempunyai kemampuan dan pemahaman terhadap aspek teknologi informasi bisnis dan keuangan klien.

Persamaan audit tradisional dan audit modern : dilakukan oleh auditor independen dan menurut standar GAAP.

Perbedaan audit tradisional dan audit modern:

Audit tradisional:

1. Dilakukan untuk akuntansi berbasis kertas kerja
2. Dilakukan setahun sekali
3. Melakukan kerja lapangan
4. Informasi berbentuk dokumen tertulis
5. Waktu lebih panjang dan biaya yang dibutuhkan lebih banyak

Audit modern

1. Dilakukan untuk akuntansi berbasis elektronik
2. Interval penugasan lebih pendek
3. Tidak memerlukan kerja lapangan
4. Informasi dalam bentuk data elektronik
5. Lebih hemat waktu dan biaya

Kesimpulan:

Diperlukan adanya pengembangan dari sistem audit untuk memenuhi kebutuhan di era elektronik yaitu audit modern. Audit modern menyediakan informasi keuangan secara elektronik, laporan keuangan yang disajikan dapat tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan. Hal ini menjawab semua keinginan pelaku bisnis dan masyarakat sebagai pelaku perdagangan elektronik.

5. Artikel Kelima

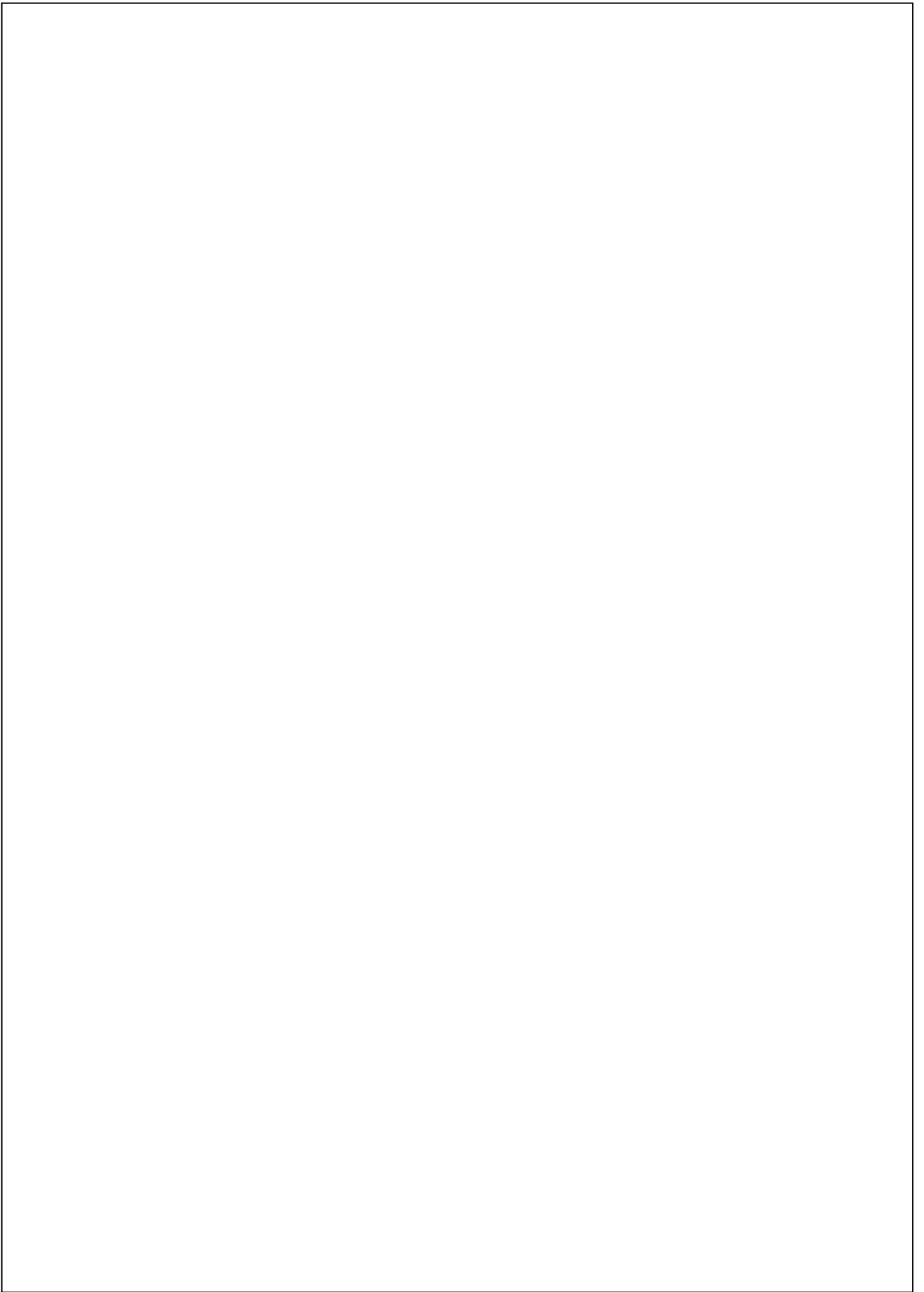
Judul : *Audit Automation As Control Within Audit Firms*

Penulis : *Stuart Manson, Sean McCartney & Michael Sherer*

Pada **paper** membahas sifat otomatisasi pengendalian audit dalam perusahaan audit. Tema artikel ini adalah pengendalian atas proses kerja dan pemeriksaan staf, tugas, ketahanan dan kompetensi, yang dianalisis menggunakan kerangka teori yang disediakan oleh Coombs dkk yang menerapkan teori struktur Giddens untuk meneliti dampak teknologi informasi dalam organisasi

Sebagai bagian dari studi yang lebih luas dari penggunaan dan dampak teknologi informasi dalam proses audit, peneliti melakukan serangkaian wawancara mitra, manajer, senior, asisten dan spesialis teknologi informasi di dua perusahaan audit big five. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana praktek kerja mereka dan perilaku mereka telah dipengaruhi oleh otomatisasi audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otomatisasi audit tidak dapat dilihat hanya sebagai teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari proses audit. Otomatisasi audit juga memiliki nilai sebagai simbol daya saing pasar suatu perusahaan dan karenanya membantu untuk mempromosikan perusahaan kepada klien dan internal perusahaan. Selain itu peneliti ini juga menunjukkan bahwa otomatisasi audit menawarkan peluang yang cukup besar untuk pengawasan dan pengendalian manajerial yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama memfasilitasi struktur organisasi yang kurang hirarkis dan struktur organisasi yang lebih informal.



BAB XIII

RENCANA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT SECARA KESELURUHAN

Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus berencana secara benar:

1. Untuk memungkinkan auditor untuk memperoleh bukti keterlibatan yang cukup dan tepat untuk keadaan,
2. Untuk membantu menjaga biaya audit wajar, dan
3. untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien.

Jenis Pengujian

Auditor menggunakan lima jenis pengujian dalam mengembangkan rencana audit secara keseluruhan dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, antara lain:

1. Prosedur Penilaian Risiko
2. Pengujian Pengendalian
3. Pengujian Substantif atas Transaksi
4. Prosedur analitis
5. Pengujian rincian saldo

- a. Mendapatkan bukti yang cukup dan tepat adalah penting jika perusahaan meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Menjaga biaya yang wajar dan membantu perusahaan tetap kompetitif.
- b. Menghindari kesalahpahaman dengan klien diperlukan untuk menjaga hubungan klien yang baik dan untuk memfasilitasi pekerjaan yang berkualitas tinggi pada fee yang wajar:
 - 1) Misalkan auditor menginformasikan klien bahwa audit akan selesai sebelum 30 Juni tapi tidak dapat menyelesaikannya sampai Agustus karena penjadwalan tidak sesuai dengan rencana.
 - 2) Klien mungkin akan marah dengan perusahaan KAP dan bahkan bisa menuntut pelanggaran kontrak.

Perencanaan Audit Awal

Melibatkan empat hal, yang semuanya harus dilakukan di awal audit:

1. Auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan. Penentuan ini biasanya dibuat oleh auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. auditor ingin membuat keputusan ini awal, sebelum menimbulkan biaya yang signifikan.
2. Auditor mengidentifikasi mengapa klien ingin atau perlu audit. Informasi ini kemungkinan akan mempengaruhi sisa bagian dari proses perencanaan.

3. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien tentang perjanjian kontrak.
4. Auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk keterlibatan kepegawaian dan setiap spesialis audit yang diperlukan.

Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu aspek yang paling menuntut dan penting dari audit. Sebuah kehati-hatian Audit direncanakan dalam meningkatkan efisiensi auditor dan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa tim audit dan membahas isu-isu penting.

Auditor mempersiapkan pemeriksaan perencanaan dokumen yang merangkum latar belakang industry klien, informasi dan mendiskusikan isu-isu akuntansi dan auditing terkait dengan laporan keuangan klien.

Securities and Exchange Commission (SEC) Form 10-K aturan pengajuan memerlukan mengelola perusahaan publik AS untuk memasukkan informasi latar belakang tentang bisnis.

1. Keandalan pelaporan keuangan, manajemen
 - a. Bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya.
 - b. Manajemen memiliki kedua tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa
 - c. Informasi disajikan secara wajar sesuai dengan pelaporan dari kerangka akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Tujuan yang efektif pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi pelaporan tanggung jawab keuangan.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi.
 - a. Kontrol dalam perusahaan tentang penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan golnya.
 - b. Tujuan penting dari kontrol ini adalah akurat keuangan dan informasi non keuangan tentang operasi perusahaan untuk keputusan pembuatan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
 - a. Mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk menerbitkan laporan tentang efektivitas operasi dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain ketentuan hokum publik, non publik, dan tidak-untuk organisasi nirlaba yang diwajibkan mengikuti banyak hukum dan peraturan.
 - b. Beberapa berhubungan dengan akuntansi hanya secara tidak langsung, seperti perlindungan lingkungan dan hukum hak-hak sipil.
 - c. Lainnya adalah erat terkait dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan anti-*fraud*.
 - d. Manajemen desain sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan semua tiga tujuan.
 - e. Fokus auditor di kedua audit atas laporan keuangan dan audit internal.
 - f. Kontrol pada kontrol atas keandalan pelaporan keuangan
 - g. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang secara material dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Standar audit

1. Standar kedua²⁰ mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan klien.
2. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk memahami bisnis klien dan industri untuk menilai risiko salah saji material.
3. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian.¹²¹
4. Tentang bagaimana auditor melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian.²⁶¹
5. Prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk kontrol internal, merupakan prosedur penilaian risiko auditor. prosedur penilaian risiko dilakukan untuk menilai risiko salah mengutarakan dalam laporan keuangan.

Auditor melakukan :

1. Tes kontrol
2. Substantif tes transaksi
3. Prosedur analitis
4. Tes rincian saldo dalam menanggapi penilaian auditor dari risiko salah saji material.

Prosedur untuk memperoleh pemahaman internal kontrol

Fokus pada kedua Desain dan pelaksanaan dari pengendalian internal dan digunakan untuk menilai risiko kontrol untuk setiap audit terkait transaksi.

Tujuan

Pemahaman auditor pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko kontrol untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit.

Contoh menilai tujuan akurasi untuk transaksi penjualan rendah dan tujuan terjadinya sebagai moderat. ketika kontrol kebijakan dan prosedur diyakini dirancang secara efektif, auditor menilai risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan efektivitas relatif dari kontrol-kontrol. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian bahwa, auditor melakukan tes kontrol.

Tes kontrol, baik manual atau otomatis, mungkin termasuk jenis berikut :

1. Membuat pertanyaan dari personil klien yang sesuai
2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan
3. Mengamati kegiatan yang berhubungan dengan kontrol
4. Prosedur klien Reperform

Walkthrough

1. Auditor melakukan sistem walkthrough sebagai bagian dari prosedur untuk mendapatkan dan membantu mereka menentukan apakah kontrol berada di tempat.
2. Walkthrough adalah biasanya diterapkan pada satu atau beberapa transaksi dan mengikuti transaksi yang melalui seluruh proses. Misalnya, auditor dapat memilih transaksi satu penjualan untuk system walkthrough dari proses persetujuan kredit, kemudian ikuti proses persetujuan kredit dari inisiasi transaksi penjualan melalui pemberian kredit.

Tes kontrol

1. Tes kontrol juga digunakan untuk menentukan apakah kontrol ini efektif dan biasanya melibatkan pengujian sampel transaksi.
2. Uji efektivitas operasi dari proses persetujuan kredit, misalnya, auditor mungkin memeriksa sampel dari 50 transaksi penjualan dari sepanjang tahun untuk menentukan apakah kredit diberikan sebelum pengiriman barang.
3. Prosedur untuk memperoleh pemahaman internal control umumnya tidak memberikan bukti yang cukup dan tepat bahwa kontrol adalah beroperasi secara efektif.
4. Pengecualian mungkin berlaku untuk kontrol otomatis karena mereka kinerja yang konsisten. prosedur auditor untuk menentukan apakah otomatis control telah dilaksanakan juga dapat berfungsi sebagai tes kontrol yang, jika auditor menentukan ada risiko minimal bahwa kontrol otomatis telah berubah sejak pemahaman diperoleh. Kemudian, tidak ada tes tambahan kontrol akan diperlukan.

Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk tes kontrol tergantung pada dua hal:

1. Luasnya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman pengendalian internal
2. Rencana pengurangan risiko control

Pengujian Pengendalian

Peran pengujian pengendalian dalam audit penjualan dan siklus koleksi relatif terhadap tes lain yang dilakukan untuk memberikan bukti yang cukup dan tepat untuk opini auditor. P

Jika auditor memverifikasi bahwa penjualan dan penerimaan kas transaksi dengan benar dicatat dalam catatan akuntansi dan diposting ke buku besar, mereka dapat menyimpulkan bahwa berakhir saldo piutang dan penjualan sudah benar.

Auditor dapat melakukan pengujian kontrol terpisah dari semua tes lainnya, tapi sering lebih efisien untuk melakukannya pada waktu yang sama dengan pengujian substantif transaksi.

Auditor biasanya dapat menerapkan pengujian pengendalian melibatkan dokumentasi dan Reperformance untuk transaksi yang sama diuji untuk salah saji moneter.(secara bersamaan memberikan bukti tentang kedua kontrol dan kebenaran moneter).

Mengasumsikan bahwa tes kontrol dan substantif tes tindakan dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Prosedur Analitis

Prosedur Analitis melibatkan perbandingan dicatat sebesar harapan yang dikembangkan oleh auditor. standar auditing mengharuskan mereka dilakukan selama perencanaan dan menyelesaikan audit. Meskipun tidak diperlukan, prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun.

Dua yang paling penting tujuan prosedur analitis dalam audit saldo rekening adalah untuk:

1. Menunjukkan mungkin salah saji dalam laporan keuangan.
2. Memberikan bukti substantive.

Prosedur analitis dilakukan selama perencanaan biasanya berbeda dari yang dilakukan di tahap pengujian. Bahkan jika, misalnya, auditor menghitung margin kotor selama perencanaan, mereka mungkin melakukannya dengan menggunakan data interim.

Kemudian, selama pengujian saldo berakhir, mereka akan menghitung ulang rasio menggunakan data tahun penuh. Jika auditor yakin bahwa analisis

prosedur mengindikasikan kemungkinan wajar dari salah saji, mereka dapat melakukan prosedur analitis nasional atau memutuskan untuk memodifikasi tes rincian saldo.

Tes rincian saldo

Tes rincian saldo fokus pada saldo buku besar berakhir untuk kedua keseimbangan sheet dan laporan laba rugi rekening.

Beberapa pengamatan tentang tabel:

1. Lebih banyak jenis bukti, enam di total, yang digunakan untuk tes rincian saldo dari ntuk semua jenis lain dari tes.
2. Hanya tes rincian saldo melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi.
3. Pertanyaan dari klien yang dibuat untuk setiap jenis tes.
4. Dokumentasi digunakan dalam setiap jenis tes kecuali prosedur analitis.
5. Digunakan dalam setiap jenis tes kecuali prosedur analitis.

Auditor mungkin kontrol sebagai bagian dari langkah-langkah transaksi atau untuk menguji kontrol yang tidak didukung oleh bukti-bukti dokumen yang cukup.

Perhitungan kembali digunakan untuk memverifikasi keakuratan matematis transaksi saat per membentuk tes substantif transaksi dan saldo akun saat per - membentuk tes rincian saldo.

Ketika auditor harus menentukan jenis tes untuk memilih untuk mendapatkan appro yang cukup bukti, biaya bukti adalah suatu pertimbangan penting.

Jenis tes tercantum di bawah ini dalam rangka peningkatan biaya:

1. prosedur analitis
2. prosedur penilaian risiko
3. pemahaman pengendalian internal
4. tes kontrol
5. pengujian substantif transaksi
6. tes rincian saldo

Analisis Audit 1

15

1. Klien ini adalah perusahaan besar dengan kontrol internal yang canggih dan risiko yang melekat rendah.
2. Auditor melakukan tes ekstensif kontrol dan sangat bergantung pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif.
3. Luas prosedur analitis substantif juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya.
4. Pengujian substantif transaksi dan tes rincian saldo yang diminimalkan. Karena penekanan pada tes kontrol dan substantif analitis prosedur, pemeriksaan ini dapat dilakukan relatif murah.
5. Audit ini kemungkinan merupakan campuran bukti yang digunakan dalam audit terpadu dari perusahaan publik keuangan pernyataan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Analisis Audit 2

1. Perusahaan ini adalah media berukuran, dengan beberapa kontrol dan beberapa risiko yang melekat.

2. Auditor telah memutuskan untuk melakukan sejumlah media pengujian untuk semua jenis tes kecuali prosedur analitis substantif, yang akan dilakukan secara ekstensif.
3. Pengujian ekstensif akan diperlukan jika risiko yang melekat tertentu ditemukan.

Analisis Audit 3

1. Perusahaan ini adalah media berukuran tetapi memiliki sedikit kontrol yang efektif
2. Risiko yang melekat signifikan.
3. Manajemen telah memutuskan bahwa lebih baik kontrol menjadi efektif.

Analisis Audit 4

1. Rencana awal audit ini adalah untuk mengikuti pendekatan yang digunakan Analisis Audit 2.
2. Auditor mungkin menemukan luas penyimpangan tes kontrol dan salah saji yang signifikan saat melakukan pengujian substantif transaksi dan prosedur analitis substantif.

Desain Program Audit

1. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan yang sesuai penekanan pada masing-masing empat jenis tes, prosedur audit spesifik untuk setiap jenis tes harus dirancang.
2. Setiap siklus transaksi kemungkinan akan dievaluasi menggunakan satu set terpisah dari sub-audit program.

Dalam siklus penjualan dan penagihan, misalnya, auditor mungkin menggunakan:

1. Sebuah tes kontrol dan substantif tes program audit transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas
2. Sebuah program audit prosedur analitis substantif untuk seluruh siklus
3. Tes rincian program audit saldo uang tunai, piutang, buruk Beban utang, penyisihan piutang tak tertagih, dan rekening aneka piutang

Prosedur Audit

Prosedur Audit Ketika merancang tes kontrol dan substantive, auditor menekankan memuaskan tujuan audit terkait transaksi dikembangkan dalam. Auditor mengikuti pendekatan empat-langkah untuk mengurangi risiko pengendalian yang dinilai.

- a. Terapkan tujuan audit terkait transaksi transaksi seperti penjualan.
- b. Identifikasi pengendalian kunci yang harus mengurangi risiko kontrol tujuan audit.
- c. Mengembangkan tes yang sesuai kontrol untuk semua kontrol internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal dari risiko kendali bawah maksimum (kontrol utama).
- d. Untuk jenis potensi salah saji yang terkait dengan setiap audit terkait transaksi objektif, desain yang sesuai substantif tes transaksi, mengingat kekurangan dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian

Salah saji dan Menilai Risiko Inheren untuk Piutang

Auditor harus menentukan penilaian awal tentang materialitas untuk audit secara utuh dan kemudian mengalokasikan total saldo rekening,

Menilai Risiko Pengendalian untuk Penjualan

Untuk mengevaluasi risiko pengendalian akan diterapkan baik penjualan dan penerimaan kas dalam audit piutang.

Desain dan Lakukan Pengujian Kontrol dan Tes Substantif Transaksi untuk Penjualan dan Koleksi Cycle

Tes kontrol dan substantif tes transaksi dirancang dengan harapan bahwa hasil tertentu akan diperoleh.

Tujuan Audit Terkait

Tes direncanakan rincian saldo termasuk pemeriksaan prosedur, ukuran sampel, item untuk memilih, dan waktu. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan tujuan audit terkait dengan saldo dalam setiap akun.

Prosedur Analitis penggunaan hubungan bandingkan untuk menilai apakah saldo rekening atau data lain muncul masuk akal bukti campuran kombinasi dari jenis tes untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk siklus; ada kemungkinan menjadi variasi campuran dari siklus ke siklus tergantung pada keadaan audit prosedur audit lebih lanjut kombinasi dari tes kontrol, tes substantive transaksi, prosedur analitis, dan tes rincian saldo dilakukan dimenanggapi risiko salah saji material diidentifikasi oleh penilaian risiko auditor Prosedur

Fase proses audit empat aspek audit lengkap:

1. rencana dan merancang pendekatan audit,
2. melakukan tes kontrol dan substantif tes transaksi,
3. melakukan prosedur analitis
4. menyelesaikan audit dan menerbitkan surat laporan audit

13

Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal

Prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti tentang

15

Ikhtisar Jenis-Jenis Pengujian

Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi claim siklus tersebut telah cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian, sehingga memungkinkan pengurangan pengujian substantif.

25

klien yang merupakan perusahaan publik. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk memverifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal dan dipindahbukukan ke dalam buku besar.

Prosedur analitis menekankan pada keyakinan keseluruhan atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo buku besar. Pengujian atas perincian saldo menekankan pada saldo akhir dalam buku besar.

Memilih Jenis Pengujian Yang Akan Dilaksanakan

Auditor menggunakan lima jenis pengujian pada waktu audit laporan kecurangan, beberapa jenis pengujian memperoleh penekanan yang lebih dibandingkan dengan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap pengujian yang dipilih yang akan dipelajari adalah: (Arens, Elder et al. 2008)

1. Ketersediaan Jenis Bukti untuk Prosedur Audit Selanjutnya

Ada beberapa pengamatan tentang tabel hubungan antara prosedur audit lanjutan dan jenis bukti antara lain:

- a. Lebih banyak jenis bukti, ada enam jumlahnya, digunakan dalam pengujian rincian saldo dibandingkan bagi setiap pengujian lainnya;
- b. Tanya jawab dengan klien dilakukan dalam setiap jenis pengujian;
- c. Hanya pengujian rincian saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi;
- d. Disetiap pengujian dilakukan dokumentasi kecuali pada prosedur analitis;
- e. Pada setiap jenis pengujian dilakukan pengujian ulang kecuali prosedur analitis.

2. Biaya Audit

Jenis-jenis pengujian berikut ini mempunyai dasar urutan biaya yang dari rendah sampai yang tinggi:

Prosedur Analitis

Prosedur ini menggunakan biaya yang paling rendah sebab lebih mudah dalam membuat perhitungan dan perbandingan.

Prosedur Penilaian Risiko

Prosedur ini dalam memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal tidak semahal pengujian audit lainnya, sehingga dengan mudah auditor membuat tanya jawab prosedur analitis

Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian dibandingkan pengujian juga masih menggunakan biaya yang rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Tetapi pengujian pengendalian masih lebih mahal daripada prosedur penilaian risiko.

Pengujian Substantif

15

Pengujian substantif transaksi lebih mahal dibanding dengan pengujian pengendalian yang tidak melibatkan suatu pengerjaan ulang sebab yang sebelumnya.

Pengujian Rincian Saldo

Pengujian ini lebih mahal dibanding dengan jenis pengujian yang lainnya karena adanya biaya prosedur contohnya pengiriman konfirmasi serta perhitungan persediaan.

Pada waktu perencanaan auditor harus memutuskan apakah akan melakukan penilaian risiko pengendalian dibawah maksimum.

Ikhtisar Proses Audit

- Fase I : Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit
- Fase II : Melaksanakan Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi
- Fase III : Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo
- Fase IV : Menvelesaikan Audit dan Mengeluarkan Laporan Audit

REVIEW ARTIKEL TERKAIT

1. Artikel Pertama

12

Judul : *An Exploratory Study Of The Effects Of The Sarbanes-Oxley Act, The Sec And United Statesstock Exchange(S) Rules On Audit Committee Alignment*

Penulis : *Louis Braiotta Jr and Jian Zhou*

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki rekomendasi dari Blue Ribbon Committe (BRC) dan persyaratan Sarbanes-Oxley (SOX) untuk keselarasan komite audit. Pada penelitian ini

menguji apakah penerbitan aturan baru untuk komite audit oleh Kongres AS dengan berlakunya SOX, SEC aturan yang dibuat organisasi, dan standar audit setter telah menyebabkan keselarasan yang lebih besar apada struktur dan komposisi komite audit dan dewan direksi. Mengingat pengungkapan baru pada SEC, Standar pencatatan bursa saham nasional dan komunikasi diluar auditor tidak dapat dilakukan secara sistematis dikarena adanya kepatuhan ini.

Terdapat aturan-aturan baru yang diberlakukan memungkinkan pemeriksaan cross-sectional yaitu pada sejauh mana aturan pada sektor swasta dan publik dapat mempengaruhi, keputusan dewan direksi untuk menyelaraskan struktur komite audit dan keanggotaanya. Pada penelitian ini keselarasan komite audit didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan direksi di perusahaan, yang dirancancang untuk menerapkan perubahan (reformasi) dalam struktur komite audit perusahaan dan komposisi memenuhi persyaratan peraturan. Lebih khusus, keselarasan komite audit terjadi jika perusahaan mengubah ukuran komite audit dan atau perubahan komposisi komite audit untuk memnuhi persyaratan peraturan. Sebagai contoh, BRC tentang peningkatan efektivitas Audit Komite Perusahaan (1999) menyatakan bahwa sehubungan dengan penyelarasan "Komite audit akan lebih efektif dalam membantu untuk menjamin transparansi dan integritas pelaporan keuangan dan dengan demikian mempertahankan kepercayaan investor yang membuat pasar sekuritas kami terbaik dan paling likuid di dunia". Pada bulan juli 2002, Kongres AS memberlakukan SOX yang menyebabkan banyak komite audit dalam praktek terbaik

untuk menjadi undang-undang federal, misal SOX membutuhkan komite audit harus terdiri dari direktur independen sepenuhnya.

Penelitian ini menguji akan struktur, komposisi serta ukuran komite audit dan dewan direksi berdasarkan pengungkapan yang disediakan pada tahun 1999-2000. Metodologi/pendekatan : menggunakan seperangkat data yang dikumpulkan dari komite audit dengan 129 perusahaan (tahun 1999, 2000, 2002) .

Penelitian ini dipisahkan menjadi dua tahap : tahap pertama menyelidiki dampak dari rekomendasi dari BRC terkait peningkatan efektivitas komite audit pada keselarasan komite audit, pada tahap kedua menyelidiki dampak SOX pada keselarasan komite audit.

Penelitian ini dilakukan karena melihat pentingnya tugas komite audit melakukan pengawasan yang efektif dari kedua proses audit dan pengungkapan keuangan, yang apabila gilirannya akan membantu menyediakan sistem pelaporan keuangan dan pasar sekuritas efisien. Pada penelitian Cook (1993) menyebutkan bahwa " Komite audit menambahkan nilai yang cukup besar dengan kualitas dan kredibilitas proses pelaporan keuangan. Pada pengawasan mereka dari fungsi audit dan sistem pengendalian internal perusahaan membantu melindungi kepentingan para pemegang saham dengan menjaga pada bisnis "Straight and narrow". Namun pada penelitian Wolnozer (1995) Berpendapat bahwa komite audit merupakan red herrings kecuali pada praktek akuntansi direformasi sehingga laporan keuangan dapat dikonfirmasi melalui jalan lain untuk bukti komersial yang andal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel mengalami perubahan tahunan secara signifikan dalam

keselarasan komite audit dalam periode pengujian BRC. Namun pada periode SOX, Hasil analisis corellation menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keselarasan komite audit, tingkat independensi dewan dan ukuran. Selanjutnya setelah mengendalikan faktor lain yang terkait dengan keselarasan komite audit, dan ukuran komite audit, direktur kompensasi, jumlah pertemuan komite audit, tingkat independensi dewan dan ukuran. Selanjutnya setelah mengendalikan faktor lain yang terkait dengan keselarasan komite audit, hasil analisis logis menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih cenderung untuk menyelaraskan komite audit pada tahun 2002 berkaitan dengan kurangnya peningkatan EM.

Pada penelitian ini terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas monitoring komite audit struktur dan komposisi (Independensi). Penelitian etrbaru menyarankan bahwa struktur dan komposisi komite audit mungkin berhubungan dengan kualitas pelaporan dan proses pemeriksaan. Pada penelitian Menon dan Willian (1994) menyatakan bahwa "Independensi dan Integritas pemantauan dapat ditingkatkan dengan memiliki auditor internal dan eksternal yang melpor kedewan yang terdiri dari luar direksi. Dewan direksi penuh termasuk CEO dan karyawan lainnya pada perusahaan yang kinerjanya dapat dipertanyakan oleh auditor.

Independensi dan komposisi komite audit meningkatkan untuk bertanggung jawab pada pengawasan untuk pelaporan keuangan dan sekuritas pasar, pada teori agensi Jensen dan Meckling 1979 menyatakan biaya agensi akan turun karena efektivitas pemantau ditingkatkan. Pada penelitian Watts (1977) Bukti bahwa kualitas pelaporan eksternal dan proses audit

terkait dapat mengurangi biaya agensi. Dengan demikian perusahaan dengan komite audit di pasar AS mendapatkan peningkatan transparansi pada perusahaan mereka untuk mengurangi risiko litigasi. Ceteris paribus, berargumen bahwa dewan direksi akan memberikan insentif untuk menyelaraskan komite audit mereka dengan ada persyaratan yang etrkait untuk pencapaian keseragaman dalam perlindungan pengawasan untuk investasi publik. Oleh karena itu pembahasan termasuk kemajuan hipotesis berikut :

- H1. Karena SOX telah membentuk lingkungan hukum dan peraturan baru untuk akuntabilitas perusahaan, dewan direksi akan memiliki insentif untuk menyelaraskan struktur komite audit dan komposisi mereka. Ceteris paribus, keselarasan komite audit kemungkinannnya terkait dengan peningkatan ukuran komite audit, kompensasi direktur, independensi komite audit, pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit dan keahlian tata kelola.
- H2. Sejak SOX dibentuk melalui lingkungan hukum dan peraturan baru untuk tujuan akuntabilitas perusahaan, dewan direksi akan memilki insentif untuk menyelaraskan struktur komite audit dan komposisi mereka. Ceteris paribus, perusahaan dengan keselarasan komite audit yang mungkin terkait dengan kurangnya peningkatan EM atau tingkat yang lebih rendah dari EM.

Dalam konteks tata kelola perusahaan, dengan membandingkan hasil temuan diatas maka penelitian ini mempunyai implikasi penting mengenai efek independensi komite audit dan kompetensi yang ditingkatkan dalam perlindungan pengawasan untuk investasi publik/masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan komite audit yang terkait dengan SOX dan persyaratan pertukaran meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang berfungsi sebagai bukti awal pada efektivitas persyaratan ini. Sample pada penelitian ini relatif kecil karena penggunaan data primer yang dikumpulkan, sehingga peneliti menyarankan untuk future reserach menambah sampel agar hasilnya bisa digeneralisasikan jika menggunakan sampel yang lebih besar lagi.

2. Artikel Kedua

Judul : *Increase Your Fraud Auditing Effectiveness By Being Unpredictable!*

Penulis : **Thomas E. McKee**

²⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana auditor dapat menggabungkan ketidakpastian dalam rencana audit mereka, untuk memenuhi standar audit internasional tentang adanya pencegahan dan pendeteksian penipuan. Adanya ketidakpastian membuat paara auditor bersikap skeptisme yang didefinisikan dalam SAS 99 (13) yaitu sebagai sikap yang mencakup pikiran pertanyaan dan penilaian kritis dari bukti audit.

Keuntungan utama untuk auditor menjaid tidak terduga yaitu bahwa ini akan meningkatkan peluang auditor akan menemukan penipuan. Dengan kata lain audit akan lebih efektif. Hal ini terjadi karena perilaku tidak terduga oleh auditor akan membuat penipu/*frauder* cenderung untuk dapat secara efektif menyembunyikan adanya penipuan. Peneingkatan deteksi adanya penipuan berarti bahwa klien dan masyarakat umum

akan lebih percaya dengan profesi audit. Manfaat kedua adalah bahwa pencegahan penipuan akan meningkat.

Kesimpulannya yaitu beberapa penipuan kan mudah untuk dilakukan karena kurangnya prediksi dari pihak auditor. Sebagaimana dicatat dikedua SAS 99 dan ISA 240 salah satu respon terhadap risiko *fraud* adalah untuk menggabungkan unsur ketidakpastian dalam rencana audit. Tulisan ini memaparkan jumlah teknik audit untuk meningkatkan ketidakpastian auditor. Publik mengharapkan profesi audit untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan pencegahan penipuan dengan deteksi. Jika semua auditor secara rutin menggabungkan beberapa unsur ketidakpastian dalam pendekatan audit mereka, profesi audit akan memenuhi harapan ini.

3. Artikel Ketiga

Judul : *Audit Committees and Corporate Control*

Penulis : *Gerald Vinten and Connie Le*

Kontrol manajemen telah menjadi semakin terpisah dari kepemilikan, sejak adanya pergantian abad kedua puluh. Penelitian terhadap 200 Perusahaan rangking di Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk periode 1929-1963, kepemilikan pada kepentingan dominan dalam perusahaan telah meningkat dari 44 persen menjadi 84 persen, dan perusahaan dengan kontrol saham mayoritas telah menurun dari 11 persen menjadi 3 persen. Dari bukti yang ada, jelas bahwa tidak ada kepemilikan tunggal yang mempunyai kontrol efektif atas kegiatan perusahaan.

Komite audit menjadi subjek berbagai interpretasi oleh perusahaan yang berbeda. AICPA belum mendefinisikan lingkup yang tepat dari tanggung jawab komite audit, namun AICPA telah memutuskan bahwa efektivitas komite tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan persepsi dari manajemen puncak, yang akan menentukan piagam komite yang tepat berkaitan dengan persyaratan perusahaan.

Berfungsinya komite audit di perusahaan-perusahaan Amerika Utara, dalam sepuluh tahun terakhir, memberikan tingkat tertentu kenyamanan dalam perannya sebagai mekanisme yang berguna untuk para direktur dalam memantau kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan.

Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi lima bidang dasar utama: review dari departemen audit internal, review dari rencana audit tahunan, review dari pengendalian akuntansi

internal dan perlindungan aset perusahaan. Istilah yang tepat sebagai referensi dari komite audit dapat diperluas atau diasah tergantung pada kebutuhan perusahaan dan karakteristik perusahaan di waktu tertentu. Merupakan hal yang biasa apabila komite audit mereview hal-hal seperti kontribusi politik, kode etik perilaku, audit kepatuhan lingkungan, konflik kepentingan insider trading dan kualitas laporan pendapatan.

Efektivitas komite audit dapat terancam jika manajemen mementingkan ego pribadi. Dalam mendefinisikan peran komite, manajemen tidak harus membangun harapan yang tidak realistis komite, sehingga memaksa kemampuan mereka dalam mengambil tanggung jawab yang tidak bisa untuk ditangani, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya anggota direktur non-eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. www.praktisi.ac.id. Diakses, Jumat 9 September 2016.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S., 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 Edisi keduabelas*. Jakarta : Erlangga
- Arens, Alvin A., Loebbecke, James k., Jusuf, Amir Abadi. 1996. *Auditing, Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Salemba 4
- Auditor (Online). <http://id.wikipedia.org/wiki/auditor>. diakses Rabu, 31 Agustus 2016
- Andon, Paul., Chong, Kar Ming., Roebuck Peter. 2010. "Personality preferences of accounting and non-accounting graduates seeking to enter the accounting profession". *Critical Perspective on Accounting* 21. Elsevier 253-265.
- Bierstaker, J.L., et al. 2001. "The Impact of Information Technology on The Audit Process : an Assessment of The State of The Art and Implication for The Future". *Managerial Auditing Journal* 16 (3). 159-164
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., Kell, Walter G. 2002. *Modern Auditing Edisi Ketujuh Jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Braiotta, Jr, L. J. Zhou. 2006. "An Exploratory Study of The Effects of The Sarbanes Oxley Act, the SEC and United States

-
- Stock Change Rules On Audit Committee Alignment". *Managerial Auditing Journal* 21 (2). 166-190
- Broberg, Pernilla., Umans, Timurs., Carl, Gerlofsting. 2013. "Balanced Between Auditing and Marketing : An Explorative Study". *Journal Of International Accounting, Auditing and Taxation*. Xxx-xxx
- Carpenter, Brian W., et al. 1994. "Materiality Judgements and Audit Firm Culture: Social Behavioral and Political Perspective". *Accounting Organization and Society* vol.19, no.45. 355-380
- Cohen, Sandra,. Leventis, Stergios. 2013. "Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay". *Accounting Forum* 37. Science Direct 40-53.
- Dedoulis, Emmanouil. 2006. "The Code of ethics and the development of the auditing profession in Greece, the periodn1992-2002". *Accounting Forum* 30. 155-178
- Dwyer, Peggy. 2004. "Known by the company they keep: a study of political campaign contribution made by the United States public accounting profession". *Critical Perspective on Accounting* 15. Elsevier Science 865-883.
- Earl, Michael J.1980. "Program review : Its Role in Computer Auditing". *Managerial Finance* 5 (2). 188-199
- Favere, Michael., Marchesi. 2000. "Audit Quality in ASEAN". *The International Journal of Accounting* 35.121-149.

- Fraser, Ian., Henry, William. 2007. "Embedding risk management: Structures and approaches". *Managerial Auditing Journal* vol. 22 No 4. 392-409.
- Fox, Peter. 2001."Automation: Crossing the Final Frontier". *Assembly Automation* vol 21 No 2. 111-114
- Geiger, Marshall A., Raghunandan, K. Rama, Dasaratha V. 2006. "Auditor decision-making in different litigation environments: the private securities litigation reform act, audit report and audit firm size". *Journal of Accounting and Public Policy* 25. Science Direct 332-353.
- Giroux, Gary., Casseell, Cory. 2011. "Changing Audit Risk Characteristic in the Public Client Market". *Research in Accounting Regulation* 23. 177-183
- Habib, Ahsan., Bhuiyan, Md Borhan Uddin,. 2011. "Audit firm industry specialization and the audit report lag". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 20. Science Direct 32-44.
- Ikatan Akuntan Indonesia, standar profesional akuntan publik
- Janvrin, Diane., Caster, Paul., Elder, Randy. 2010. : "Enforcement Release Evidence on the Audit Confirmation Process : Implication for standard setters". *Research in Accounting Regulation* 22. 1-17.
- Karapetrovic, Stainslav., Willborn, Walter. 2000." Quality Assurance and Effectiveness of Audit System". *International Journal of Quality & Reliability Management* vol 17 No.6.679-703.

- Kode etik profesi akuntan publik. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- Laviada, Ana Fernandez. 2007." Internal Audit Function Role in Operational Risk Management". *Journal of Financiak Regulation and Compliance vol 15 No.2 . 143-155*
- Lin, Z. Jun., 2004. "Auditor's Responsibility and Independendence: Evidence From China". *Research in Accounting Regulation 17.167-190.*
- Manson, Stuart et al. 2001." Audit Automation As Control Within Audit Firms". *Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol 14 No 1. 109-130.*
- Mulyadi. 2001. *Auditing Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- Miller, Timothy C. 2012. "Do Auditors Assess Inherent Risk As If There Are No Controls?". *Managerial Auditing Journal vol.27 no.5. 448-461.*
- McKee, T. E. 2006. "Increase Your *Fraud* Audit Effectiveness By Being Unpredictable". *Managerial Auditing Journal 21 (2).224-231*
- Pacini, Carl., Hillison, William., Peltier, Dominic., Sinason, Dave., Alagiah, Ratnam. 2000. " At The Interface of The Electronic Frontier and The Law : The International Legal Environment for System Reliability Assurance Services". *Journal Of Accounting Auditing Taxation. Elseviers Science.185-218.*
- Peecher, Mark E., Schwartz, Rachel., Solomon, Ira. 2007. "It's All About Audit Quality: Perspective on Strategic-System

- Auditing". *Journal Of Accounting Organization and Society*. Elsevier Science. 463-485
- Pierce, Bernard., Sweeney, Breda. 2005. "Management Control in audit firms - Partner's perspective". *Management Accounting Research* 16. 340-370.
- Previts, Gary J. 2003." The Information right and the CPA Profession" . *Research in Accounting Regulation volume* 16. Elsevier Science 275-277.
- Sathe, Richard S. 2010. "CPA Licensure without examination: Legitimation and resistance". *Critical Perspective on Accounting* 21. Elsevier 496-508.
- Smith, Malcom. 2005. "Auditor's Perception of Fraud Risk Indicators". *Managerial Auditing Journal* vol.20 No.1 . 73-85
- Smith, G. Stevenson. 2012. "Can an Auditor Ever Be A First Responder to Financial Frauds?". *Journal of Financial* vol 19 No 3. 291-304
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, www.kompas.com diakses pada Jumat 4 November 2016
- The Institute of Internal Auditor, www.iaa.com, diakses pada Jumat 4 November 2016
- Vanasco, Rocco R. 1998. "Fraud Auditing". *Managerial Auditing Journal* 13/1. 4-71
- Velayutham, Sivakumar. 2003." The Accounting Profession's code of ethics, is it code of ethics or code of quality assurance". *Critical Perspective on Accounting* 14. 483-503

- Vinten, Gerald., Lee, Connie. 1993. "Audit Committees and Corporate Control". *Managerial Auditing Journal* vol 8 No.3. 11-24
- www. Akuntansiterapan.com/2010/12/22/ mengupas-seluk-beluk-*fraud*-dan-cara-mengatasinya/ diakses pada Jumat 4 November 2016
- www. Akuntansiterapan.com/2010/12/22/ mengupas-seluk-beluk-*fraud*-dan-cara-mengatasinya/ diakses pada Sabtu 26 November 2016
- www. kompas.com /audit-kecurangan/ diakses pada Sabtu 26 November 2016
- Zhao, Ning et al. 2004. "Auditing In The *E-commerce* Era". *Information Management & Computer Security* Vol 12 No.5. 389-400

Audit Sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	<1 %
2	auditkuncara.blogspot.com Internet Source	<1 %
3	ariplie.blogspot.com Internet Source	<1 %
4	jalanrancagoong.blogspot.com Internet Source	<1 %
5	akosalam.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	nisitasari.blogspot.com Internet Source	<1 %
7	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
8	blogtiara.wordpress.com Internet Source	<1 %
9	anggaradana.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %

11	ekonomister.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	www.emeraldinsight.com Internet Source	<1 %
13	slideplayer.info Internet Source	<1 %
14	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
15	smahmudah.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	ukipradana.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	auditshariahsebi.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
20	gemar-akuntansi.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	akuntansi-teori-praktek.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
23	henirebecha.blogspot.com Internet Source	<1 %

24	Submitted to ppmsom Student Paper	<1 %
25	okta-wiskey.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 1 Juni 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2012 Publication	<1 %
27	docobook.com Internet Source	<1 %
28	news.palcomtech.com Internet Source	<1 %
29	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
30	pasal1.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	Repository.Unej.Ac.Id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
33	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
34	jasaaudit.info Internet Source	<1 %
35	wayansudanaadhitama.blogspot.com Internet Source	<1 %

36

Emmanouil Dedoulis. "The Code of Ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002", Accounting Forum, 2006

Publication

<1 %

37

repository.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

38

sarafinanurjannah96.blogspot.com

Internet Source

<1 %

39

www.kata-bijak.web.id

Internet Source

<1 %

40

Claudia Korompis. "DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENGANTISIPASI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2014

Publication

<1 %

41

auditor-blog.blogspot.com

Internet Source

<1 %

42

penelitianilmiahauditing.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

terataifamily.blogspot.com

Internet Source

<1 %

44

www.belajarakuntansionline.com

Internet Source

<1 %

45

fitri-fykatili.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46	search.ricest.ac.ir Internet Source	<1 %
47	dimashrlmbng.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
49	Managerial Auditing Journal, Volume 13, Issue 1 (2006-09-19) Publication	<1 %
50	loutfiee.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	Carpenter, B.W.. "Materiality judgments and audit firm culture: Social-behavioral and political perspectives", Accounting, Organizations and Society, 199405/07 Publication	<1 %
52	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
53	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
55	Diane Janvrin, Paul Caster, Randy Elder. "Enforcement release evidence on the audit confirmation process: Implications for standard setters", Research in Accounting Regulation, 2010 Publication	<1 %

56	Novianty -. "Sebuah Jurnal Audit Audit Plan, Audit Program dan Audit Prosedur Pada Harta, Utang dan Modal", Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2020 Publication	<1 %
57	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
59	alberta-warae.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	jessicaodiliaputri.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
62	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
63	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
64	materikitasemua.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	Faujan Otinur, Sifrid S. Pangemanan, Jessy Warongan. "ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG PADA TOKO CAMPLADEAN MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017	<1 %

66	indahnurul-indahnurul.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	utasgetho.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	Tumpal Manik dan Firmansyah Kusasi. "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENCEGAHAN FRAUD DI PROVINSI KEPRI", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2019 Publication	<1 %
69	repository.itspku.ac.id Internet Source	<1 %
70	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
71	fjuniawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
73	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
75	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %

76	Internet Source	<1 %
77	martinamelissaloudoe.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	canducation.com Internet Source	<1 %
79	dokterilmuu.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	malicaccounting.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	Pierce, B.. "Management control in audit firms-Partners' perspectives", Management Accounting Research, 200509 Publication	<1 %
82	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
83	dellazuari.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	www.yuntisinspiration.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	Harry Cendrowski, Louis W. Petro. "Professional Standards", Wiley, 2015 Publication	<1 %
86	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.stieipwija.ac.id Internet Source	<1 %

88

Cholifah Husti Laila, Novita Novita.
"PENGARUH KODE ETIK, MATERIALITAS
AUDIT DAN RISIKO AUDIT TERHADAP OPINI
AUDITOR", Jurnal Akuntansi, 2019

Publication

<1 %

89

moam.info

Internet Source

<1 %

90

Carl Pacini, William Hillison, Dominic Peltier-
Rivest, Dave Sinason, Ratnam Alagiah. "At
the interface of the electronic frontier and
the law: the international legal environment
for systems reliability assurance services",
Journal of International Accounting, Auditing
and Taxation, 2000

Publication

<1 %

91

ambon.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

92

Abin Suarsa. "KERANGKA PENGENDALIAN
INTERN MODEL COMITEE ON SPONSORING
ORGANIZATION (COSO): IMPLEMENTASI
DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA
KOPERASI SYARIAH BAITUL MUTTAQIN
KOTA BANDUNG", Akuisisi: Jurnal Akuntansi,
2020

Publication

<1 %

93

repo.pusikom.com

Internet Source

<1 %

94

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

95	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
96	www.acccfile.com Internet Source	<1 %
97	irurus1.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	lppm.stkippgri-sidoarjo.ac.id Internet Source	<1 %
99	Andriyan Andriyan, Ridwan Saleh. "ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBAYARAN TOP UP FLAZZ PADA PT. TRANS JAKARTA", JURNAL AKUNTANSI, 2020 Publication	<1 %
100	Delviana Dama Yanti. "ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR Di BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021 Publication	<1 %
101	Yenny Yenny, Verawati Verawati, Sherine Sherine, Devy Mestika, Wilsa Road Betterment Sitepu, Rika Dinarianti. "Pengaruh Due Professional Care, Kompleksitas Audit, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Medan", Owner, 2019 Publication	<1 %

102	andigunawan03.wordpress.com Internet Source	<1 %
103	katarinadesi.blogspot.com Internet Source	<1 %
104	Ana Fernández - Laviada. "Internal audit function role in operational risk management", Journal of Financial Regulation and Compliance, 2007 Publication	<1 %
105	Muhammad Naufal Hilmi, Novita Novita. "THE EFFECT OF AUDITOR'S COMPETENCY, PROFESSIONALISM AND EXPERIENCE ON MATERIALITY LEVEL CONSIDERATIONS", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021 Publication	<1 %
106	animo-antolog.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	claritayohanas.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	iwanfaizal99.blogspot.com Internet Source	<1 %
109	Riyani Leady Popilo, David Paul E. Saerang, Ventje Ilat. "PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, KOMPETENSI, PEMAHAMAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN AUDITI DAN PERTIMBANGAN RISIKO AUDIT TERHADAP KEMAMPUAN PENDETEKSIAN	<1 %

KERUGIAN DAERAH PADA INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI UTARA", JURNAL RISET
AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL",
2016

Publication

110	Sandra Cohen, Stergios Leventis. "Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay", Accounting Forum, 2019 Publication	<1 %
111	amirsyopian.blogspot.com Internet Source	<1 %
112	fatih-io.biz Internet Source	<1 %
113	hudanusantara-end.blogspot.com Internet Source	<1 %
114	ilhamardiansyahug.wordpress.com Internet Source	<1 %
115	winsonakuntansi.blogspot.com Internet Source	<1 %
116	www.online.fe.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
117	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
118	ilmaarofi.blogspot.com Internet Source	<1 %
119	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %

120	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
121	buatbercerita.blogspot.com Internet Source	<1 %
122	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
123	snaper-ebis.feb.unej.ac.id Internet Source	<1 %
124	apr1ana.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	ecojoin.org Internet Source	<1 %
126	irmajhe.blogspot.com Internet Source	<1 %
127	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
128	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
129	Gde Herry Sugiarto Asana, Komang Krishna Yogantara. "PERAN AUDIT FEE, JASA NON AUDIT, LAMA HUBUNGAN AUDIT DAN UKURAN KAP TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR", Journal of Applied Management and Accounting Science, 2020 Publication	<1 %

Submitted to nyenrode

130	Student Paper	<1 %
131	Submitted to Nottingham Trent University Student Paper	<1 %
132	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
133	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %
134	adsiw11208294.blogspot.com Internet Source	<1 %
135	descuadrando.com Internet Source	<1 %
136	pengendalianinternal.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	sipeg.unj.ac.id Internet Source	<1 %
138	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
139	www.penainfo.com Internet Source	<1 %
140	ayubhuana.blogspot.com Internet Source	<1 %
141	d-vanz.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

142 fe-akuntansi.unila.ac.id
Internet Source

<1 %

143 makalahku05.blogspot.com
Internet Source

<1 %

144 mastahbisnis.com
Internet Source

<1 %

145 muhajirhakim.blogspot.com
Internet Source

<1 %

146 repository.poliupg.ac.id
Internet Source

<1 %

147 221.120.199.3
Internet Source

<1 %

148 adyakuntansi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

149 conference.um.ac.id
Internet Source

<1 %

150 lusiahmadi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

151 Submitted to Harrisburg University of
Science and Technology
Student Paper

<1 %

152 Submitted to Tarumanagara University
Student Paper

<1 %

Submitted to Udayana University

153	Student Paper	<1 %
154	Submitted to Universitas Katolik Widya Mandala Student Paper	<1 %
155	accurateaccountingsurabaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	alicyborg.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	mania3x.blogspot.com Internet Source	<1 %
158	triyatmoko.wordpress.com Internet Source	<1 %
159	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
160	Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1 %
161	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
162	Muhammad Syafaat, Aditya Putra. "PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)",	<1 %

-
- 163 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
Student Paper <1 %
-
- 164 digilib.polban.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 165 hasnanmahardika.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 166 ismail125cc.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 167 supriakuntansisy.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 168 Dian Puji Puspita Sari, Arief Rahman.
"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Auditor", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2019
Publication <1 %
-
- 169 Nita Andriyani, Dianing Ratna Wijayani, Sri Mulyani. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS AUDIT", Solusi, 2020
Publication <1 %
-
- 170 annisatrisnaaulia.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 171 dewikeiko.blogspot.com

<1 %

172 ilmumanajemenakuntansi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

173 jackpane02.blogspot.com
Internet Source

<1 %

174 jdih.bpk.go.id
Internet Source

<1 %

175 repository.umsu.ac.id
Internet Source

<1 %

176 rindyagustin.blogspot.com
Internet Source

<1 %

177 slidetodoc.com
Internet Source

<1 %

178 Ahmad Zakie Mubarrok, Almer Reyhan Islam. "THE EFFECT OF MANAGEMENT CHANGE, AUDIT OPINION, COMPANY SIZE, FINANCIAL DISTRESS AND AUDITOR REPUTATION ON AUDITOR SWITCHING", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2020
Publication

<1 %

179 Nawir A.A., Murniati, Rumboko L., (eds.). "Rehabilitasi hutan di Indonesia: akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa?", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2008

<1 %

-
- 180 Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Student Paper <1 %
-
- 181 fecon.uii.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 182 jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 183 lovelycimutz.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 184 media.neliti.com
Internet Source <1 %
-
- 185 syaugiernestoyahya.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 186 Agung Nur Probohudono, Payamta, Sri Hantoro. "Determinants of audit risk assessment for governmental audits in Indonesia: a study of the national audit board of the republic of Indonesia", Corporate Ownership and Control, 2015
Publication <1 %
-
- 187 Galuh Artika Febriyanti. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penentuan Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2018
Publication <1 %
-
- 188 Submitted to Universitas Sam Ratulangi

<1 %

189 bura.brunel.ac.uk
Internet Source

<1 %

190 chiipiet.blogspot.com
Internet Source

<1 %

191 docplayer.fr
Internet Source

<1 %

192 hamil.co.id
Internet Source

<1 %

193 journal.tarumanagara.ac.id
Internet Source

<1 %

194 journal.unpar.ac.id
Internet Source

<1 %

195 kuntowibi.wordpress.com
Internet Source

<1 %

196 nicolashadi.wordpress.com
Internet Source

<1 %

197 pa-jakartabarat.go.id
Internet Source

<1 %

198 pwmu.co
Internet Source

<1 %

199 repository.uisi.ac.id
Internet Source

<1 %

200 scholar.unand.ac.id
Internet Source

<1 %

201	widuri.raharja.info Internet Source	<1 %
202	www.bankmuamalat.co.id Internet Source	<1 %
203	www.lpmak.org Internet Source	<1 %
204	Herman Supriadi, Martani Huseini. "Inovasi Dilingkungan Di Kementerian Sekretariat Negara RI Dilihat Dari Perspektif Knowledge Management", Reformasi Administrasi, 2020 Publication	<1 %
205	Lutfiana Nur Hanifah, Siti Noor Khikmah, Faqiatul Mariya Waharini. "Kesulitan Keuangan, Integritas Manajemen, Profesionalisme, dan Ketergantungan Pengguna Eksternal Laporan Keuangan terhadap Risiko Audit", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2020 Publication	<1 %
206	Miki Indika, Abdika Jaya, Novi Septianah. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2020 Publication	<1 %
207	Muhammad Adhani Adhitaqwan Mardiana dan Camelia Verahastuti. "AUDIT MANAJEMEN ATAS PENGELOLAAN PIUTANG	<1 %

USAHA PADA PT. PELABUHAN INDONESIA
IV (PERSERO) CABANG SAMARINDA",
DEDIKASI, 2020

Publication

208

Rizki Yuli Sari. "PENGARUH AUDIT TENURE, FEE AUDIT, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP AUDIT REPORT LAG (SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UU NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2021

Publication

<1 %

209

Rudi Sanjaya, Krida Puji rahayu, Lativa Lativa. "Pengaruh Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Dan Bukti-Bukti (Kecukupan dan Kelayakan) Audit Terhadap Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian "Studi Penelitian Di Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan", Research Journal of Accounting and Business Management, 2022

Publication

<1 %

210

Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti. "Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Banten)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2020

Publication

<1 %

211	anirozita.blogspot.com Internet Source	<1 %
212	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
213	baixardoc.com Internet Source	<1 %
214	bappenas.go.id Internet Source	<1 %
215	capunkalexander.wordpress.com Internet Source	<1 %
216	contohpembuatantugasakhir.blogspot.com Internet Source	<1 %
217	de.scribd.com Internet Source	<1 %
218	dimasgroup26blog.wordpress.com Internet Source	<1 %
219	documents.mx Internet Source	<1 %
220	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
221	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
222	fe.budiluhur.ac.id Internet Source	<1 %
223	gratiagpib.wordpress.com Internet Source	<1 %

224	idafitrana99.blogspot.com Internet Source	<1 %
225	irasak3.blogspot.com Internet Source	<1 %
226	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
227	krisdasomerpes.wordpress.com Internet Source	<1 %
228	lawtherapy.blogspot.com Internet Source	<1 %
229	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
230	magussudrajat.blogspot.com Internet Source	<1 %
231	majalahpajak.net Internet Source	<1 %
232	previewitalia.com Internet Source	<1 %
233	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
234	rorisstiann.blogspot.com Internet Source	<1 %
235	septaskundarian3.blogspot.com Internet Source	<1 %
236	sudangmamat.blogspot.com Internet Source	<1 %

237	toptenid.com Internet Source	<1 %
238	wikizero.com Internet Source	<1 %
239	www.antikorupsi.org Internet Source	<1 %
240	www.blitarkab.go.id Internet Source	<1 %
241	www.diva-portal.org Internet Source	<1 %
242	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
243	www.unisosdem.org Internet Source	<1 %
244	Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono, Dona Sri Sunardi Wijayanti, Irene Fransisca Liemanto, Qonrezti Shebilla Kalia et al. "Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 Publication	<1 %
245	Feibe Maria Turangan, David Paul .E. Saerang, Jullie. J. Sondakh. "PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH	<1 %

DENGAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING", JURNAL
RISET AKUNTANSI DAN AUDITING
"GOODWILL", 2016

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 246 | Sri Mulyati. "Developing Cybercounseling for Job Sector Selection", <i>Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 247 | Theresia Siwi Kartikawati, Mahyus Mahyus, Zulfikar Zulfikar. "Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Beneish Model serta Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan", <i>Eksos</i> , 2020
Publication | <1 % |
| 248 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 249 | estikurniawati.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 250 | herikurniawan19.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 251 | jimmy-januar.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 252 | johannessimatupang.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 253 | magisterakutansi.blogspot.com
Internet Source | |

<1 %

254 novitaariandy.wordpress.com
Internet Source

<1 %

255 nurikamayang.blogspot.com
Internet Source

<1 %

256 repository.unj.ac.id
Internet Source

<1 %

257 Angelina Klesia Kalendesang, Linda Lambey, Novi S. Budiarmo. "ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA SUPERMARKET PARAGON MART TAHUNA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017
Publication

<1 %

258 Novita Eka Paradina. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2010-2015", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021
Publication

<1 %

259 Timothy C. Miller, Michael Cipriano, Robert J. Ramsay. "Do auditors assess inherent risk as if there are no controls?", Managerial Auditing Journal, 2012

<1 %

260	buletinmi.com Internet Source	<1 %
261	crimecats.blogspot.com Internet Source	<1 %
262	hanifahamelia.wordpress.com Internet Source	<1 %
263	nita5211.blogspot.com Internet Source	<1 %
264	nyonyengoceh.blogspot.com Internet Source	<1 %
265	tensilatif31.blogspot.com Internet Source	<1 %
266	ttavidhie.blogspot.com Internet Source	<1 %
267	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
268	soekirman.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Audit Sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182

PAGE 183

PAGE 184

PAGE 185

PAGE 186

PAGE 187

PAGE 188

PAGE 189

PAGE 190

PAGE 191

PAGE 192

PAGE 193

PAGE 194

PAGE 195

PAGE 196

PAGE 197

PAGE 198

PAGE 199

PAGE 200

PAGE 201

PAGE 202

PAGE 203

PAGE 204

PAGE 205

PAGE 206

PAGE 207

PAGE 208

PAGE 209

PAGE 210

PAGE 211

PAGE 212

PAGE 213

PAGE 214

PAGE 215

PAGE 216

PAGE 217

PAGE 218

PAGE 219

PAGE 220

PAGE 221

PAGE 222

PAGE 223

PAGE 224

PAGE 225

PAGE 226

PAGE 227

PAGE 228

PAGE 229

PAGE 230

PAGE 231

PAGE 232

PAGE 233

PAGE 234

PAGE 235

PAGE 236

PAGE 237

PAGE 238

PAGE 239

PAGE 240

PAGE 241

PAGE 242

PAGE 243

PAGE 244

PAGE 245

PAGE 246

PAGE 247

PAGE 248

PAGE 249

PAGE 250

PAGE 251

PAGE 252

PAGE 253

PAGE 254

PAGE 255

PAGE 256

PAGE 257

PAGE 258

PAGE 259

PAGE 260

PAGE 261

PAGE 262

PAGE 263

PAGE 264

PAGE 265

PAGE 266

PAGE 267

PAGE 268

PAGE 269

PAGE 270

PAGE 271

PAGE 272

PAGE 273

PAGE 274

PAGE 275

PAGE 276

PAGE 277

PAGE 278

PAGE 279

PAGE 280

PAGE 281

PAGE 282

PAGE 283

PAGE 284

PAGE 285

PAGE 286

PAGE 287

PAGE 288

PAGE 289

PAGE 290

PAGE 291

PAGE 292

PAGE 293

PAGE 294

PAGE 295

PAGE 296

PAGE 297

PAGE 298

PAGE 299

PAGE 300

PAGE 301

PAGE 302

PAGE 303

PAGE 304

PAGE 305

PAGE 306

PAGE 307

PAGE 308

PAGE 309

PAGE 310

PAGE 311

PAGE 312

PAGE 313

PAGE 314

PAGE 315

PAGE 316

PAGE 317

PAGE 318

PAGE 319

PAGE 320

PAGE 321

PAGE 322

PAGE 323

PAGE 324

PAGE 325

PAGE 326

PAGE 327

PAGE 328

PAGE 329

PAGE 330

PAGE 331

PAGE 332

PAGE 333

PAGE 334

PAGE 335

PAGE 336

PAGE 337

PAGE 338

PAGE 339

PAGE 340

PAGE 341

PAGE 342

PAGE 343

PAGE 344

PAGE 345

PAGE 346

PAGE 347

PAGE 348

PAGE 349

PAGE 350

PAGE 351

PAGE 352

PAGE 353

PAGE 354

PAGE 355

PAGE 356

PAGE 357

PAGE 358

PAGE 359

PAGE 360

PAGE 361

PAGE 362

PAGE 363

PAGE 364

PAGE 365

PAGE 366

PAGE 367

PAGE 368

PAGE 369

PAGE 370

PAGE 371

PAGE 372

PAGE 373

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Audit Sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance
 Penulis Buku : Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFrA
 Identitas Buku : a. ISBN : Nomor 978-623-6000-44-1
 b. Edisi : 1
 c. Tahun Terbit : 2022
 d. Penerbit : YUMA PUSTAKA
 e. Jumlah Halaman : 373

Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	tidak ditemukan ketidak wajaran kesamaan
2	Linearitas	cukup linier

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai		Nilai Maksimal Mengedit/menyunting karya ilmiah	Nilai Akhir yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	4
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	12
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	11	11
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12	12
Total = (100%)		39	39
e.	Kontribusi Pengusul Sebagai : Penulis Utama Urutan Author : 1 Jumlah Anggota : 0 Prosentase : (100%) (100% * 39)	39	
TOTAL NILAI (1* 39)		39	
Komentar/Ulasan Peer Review			
bisa dilanjutkan			

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :

- 1. Kesesuaian dan Kelengkapan unsur isi karya ilmiah : lengkap**
- 2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : cukup**
- 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : cukup update**
- 4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan : lengkap**

Surakarta, 27 Juli 2022

Reviewer 1



Prof. Drs. Djoko Suhardjanto,
M.Com(Hons), Ph.D., Ak

NIP.196302031989031006

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku : Audit Sebagai Jasa Assurance dan Non Assurance
 Penulis Buku : Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFrA
 Identitas Buku : a. ISBN : Nomor 978-623-6000-44-1
 b. Edisi 1
 c. Tahun Terbit 2022
 d. Penerbit : YUMA PUSTAKA
 e. Jumlah Halaman : 373

Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Hasil pengujian dengan menggunakan Turnitin menunjukkan nilai 15%. Hal ini menunjukkan tingkat similaritas buku ini adalah 15%. Dengan demikian buku ini tidak terindikasi plagiasi
2	Linearitas	Buku ini membahas tentang audit sebagai jasa assurance dan non-assurance, sehingga topik ini merupakan topik mengenai audit. Oleh karena itu, buku ini linier dengan ilmu akuntansi dan sesuai dengan bidang ilmu pengusul

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang Dinilai		Nilai Maksimal Mengedit/menyunting karya ilmiah	Nilai Akhir yang Diperoleh
a.	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	3,5
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	11
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan metodologi (30%)	12	11
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12	10,5
Total = (100%)			36
e.	Kontribusi Pengusul Sebagai : Penulis Utama Urutan Author : 1 Jumlah Anggota : 0 Prosentase : (100%) (100% * 40)		
TOTAL NILAI (1 * 36)		36	

Komentar/Ulasan Peer Review

Secara umum buku ini membahas tentang konsep audit sebagai jasa assurance dan non-assurance. Buku ini membahas secara detail terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, buku ini penting untuk memberikan insight terkait dengan bidang ilmu audit

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :

1. Kesesuaian dan Kelengkapan unsur isi karya ilmiah

Buku ini mempunyai unsur yang lengkap dan sesuai. Buku ini membahas secara detail terkait dengan audit. Secara detail membahas tentang audit dan jasa assurance lainnya, diikuti dengan profesi akuntan public dan laporan audit. Selanjutnya membahas tentang aspek audit secara detail seperti bukti audit dan prosedur audit.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan :

Buku ini mempunyai pembahasan yang mendetail terkait dengan pengertian audit, yang dilanjutkan dengan prosedur audit dan juga jasa yang dilakukan oleh profesi auditor. Secara umum pembahasan buku ini mendetail dan mendalam, sehingga memberikan informasi yang penting bagi pembaca

Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi :


Penulis menggunakan informasi yang terbaru terkait dengan prosedur audit dan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan audit. Oleh karena itu, buku ini mempunyai informasi yang cukup dan mutakhir

3. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan :

Buku ini mempunyai unsur yang lengkap dan baik. Buku yang berjudul Audit sebagai jasa Assurance dan Non Assurance diterbitkan oleh penerbit YUMA yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Oleh karena itu, buku ini mempunyai kualitas yang cukup baik.

Surakarta, 27 Juli 2022

Reviewer 2



Prof. Doddy Setiawan, S.E., M.Si., Ph.D., Ak

NIP. 19750218000121001

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis